



**PERATURAN
WALI KOTA LHOKSEUMAWE
Nomor 18 Tahun 2026**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2027**

**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2026**



WALI KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di daerah harus memiliki dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2027, yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
19. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
20. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
21. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
22. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);
23. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
24. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045;
25. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh;

28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2027;
29. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
30. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044;
31. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045;
32. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Wali Kota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas, Badan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPK adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Kota Lhokseumawe untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMK, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Lhokseumawe untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut APBDK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRK.
17. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

18. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Musyawarah Rencana Pembangunan, Anggaran Pendapatan Belanja Kota.

BAB II

RKPK

Pasal 2

- (1) RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan kota untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun 2027 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.
- (2) RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Kota Lhokseumawe
 - c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Kota Lhokseumawe
 - d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe
 - e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Kota Lhokseumawe
 - f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Lhokseumawe
 - g. Bab VII Penutup
- (3) Uraian secara rinci RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 merupakan RKPK penjabaran tahun ke-3 (tiga) dari RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRK, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan kota.
- (2) RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kota.
- (3) RKPD Lhokseumawe Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan:
 - a. pedoman penyempurnaan rancangan Renja perangkat daerah Tahun 2027;
 - b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027; dan
 - c. pedoman dalam menyusun Rancangan APBK Tahun Anggaran 2027.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2027:

- a. Pemerintah Kota Lhokseumawe menggunakan RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRK.
- b. Perangkat Daerah menggunakan RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027 dengan DPRK.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN RKPK

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPK adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala Perangkat Daerah wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja Perangkat Daerah bila belum sesuai dengan RKPK;
- c. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRK berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRK maka RKPK Tahun 2027 dapat dilakukan penyesuaian;

- d. kerangka pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPK merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRK;
- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPK dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRK;
- f. penyesuaian RKPK Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Wali Kota;
- g. RKPK Tahun 2027 sebagai pedoman penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2027 serta bahan arahan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RKPK DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Penambahan program baru dalam RKPK dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan/atau penambahan program dalam RPK.
- (2) Dalam hal penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah dan/atau perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, tidak perlu mengubah RPK.
- (3) Penambahan Program/Kegiatan baru dalam RKPK ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA-Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang berkenaan berakhir.

- (3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya menyerahkan hasil evaluasi berikut rekomendasi dan langkah yang diperlukan kepada Wali Kota.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan/pertimbangan dalam penyusunan RKPK periode tahun berikutnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 Juli 2026 M
16 Muharram 1447 H

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,



SAYUTI ABUBAKAR

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 3 Juli 2026 M
16 Muharram 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,



A. HARIS

BERITA DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2026 NOMOR 18



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027 dapat disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah untuk tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029.

RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 memiliki arti strategis karena menjadi salah satu dokumen awal dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029, sekaligus menjadi bagian integral dari upaya pencapaian tujuan jangka panjang sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025-2045.

Dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses perencanaan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Melalui proses perencanaan tersebut, diharapkan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang dirumuskan dapat menjawab berbagai tantangan pembangunan dan permasalahan yang terjadi akibat bencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025 serta mendorong akselerasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Kota Lhokseumawe.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Lhokseumawe, 3 Juli 2026
Wali Kota Lhokseumawe

SAYUTI ABUBAKAR



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-5
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan	I-9
1.5. Sistematika Penyusunan	I-9
BAB II GAMBARAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE	II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Kota Lhokseumawe	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah ...	II-1
2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-1
2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	II-2
2.1.1.1.3. Kondisi Topografi	II-2
2.1.1.1.4. Kondisi Geologi	II-3
2.1.1.1.5. Kondisi Hidrologi.....	II-4
2.1.1.1.6. Kondisi Klimatologi	II-5
2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan	II-7
2.1.1.2. Potensi Sumber Daya Alam	II-8
2.1.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah	II-9
2.1.1.4. Daya Dukung dan Daya Tampung	
Lingkungan Hidup	II-16
2.1.1.4.1. Daya Dukung Pangan.....	II-16
2.1.1.4.2. Daya Dukung Air	II-19
2.1.1.5. Berketahanan Energi, Air dan	
Kemandirian Pangan	II-21
2.1.1.5.1. Indeks Ketahanan Pangan.....	II-21
2.1.1.5.2. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi	
Pangan.....	II-21
2.1.1.5.3. Akses Rumah Tangga Terhadap	
Konsumsi Air Minum	II-22
2.1.1.6. Lingkungan Hidup Berkualitas.....	II-23
2.1.1.6.1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ..	II-23
2.1.1.6.2. Timbulan Sampah Terolah di	
Fasilitas Pengolahan Sampah	II-25
2.1.1.6.3. Proporsi Rumah Tangga dengan	
Layanan Penuh Pengumpulan	
Sampah.....	II-26
2.1.1.6.4. Rumah Tangga Dengan Akses	
Sanitasi Aman.....	II-26
2.1.1.7. Resilensi Terhadap Bencana dan	
Perubahan Iklim.....	II-27
2.1.1.7.1. Indeks Risiko Bencana	II-27
2.1.1.7.2. Indeks Ketahanan Daerah	II-29
2.1.1.8. Demografi	II-30
2.1.1.8.1. Jumlah Penduduk.....	II-30



2.1.1.8.2.	Kepadatan dan Persebaran Penduduk	II-30
2.1.1.8.3.	Pertumbuhan Penduduk	II-31
2.1.1.8.4.	Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin.....	II-32
2.1.1.8.5.	Penduduk Menurut Kelompok Umur	II-33
2.1.1.8.6.	Angka Ketergantungan Penduduk	II-34
2.1.1.8.7.	Proyeksi dan Analisis Penduduk 5 (lima) Tahun kedepan.....	II-34
2.1.2.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-36
2.1.2.1.	Kesejahteraan Ekonomi.....	II-36
2.1.2.1.1.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-36
2.1.2.1.2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-39
2.1.2.1.3.	Distribusi Persentase PDRB	II-41
2.1.2.1.4.	PDRB Per Kapita	II-41
2.1.2.1.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-43
2.1.2.1.6.	Indeks Gini	II-44
2.1.2.1.7.	Tingkat Kemiskinan	II-45
2.1.2.1.8.	Indeks Pembangunan Manusia	II-47
2.1.2.2.	Kesehatan Untuk Semua	II-48
2.1.2.2.1.	Usia Harapan Hidup	II-48
2.1.2.2.2.	Indeks Keluarga Sehat	II-49
2.1.2.2.3.	Prevalensi Stunting	II-50
2.1.2.2.4.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	II-51
2.1.2.3.	Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-51
2.1.2.3.1.	Rata-Rata Lama sekolah	II-51
2.1.2.3.2.	Harapan Lama Sekolah	II-52
2.1.2.3.3.	Angka Literasi/Numerasi	II-53
2.1.2.3.4.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	II-54
2.1.2.4.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-55
2.1.2.4.1.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	II-55
2.1.2.5.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-56
2.1.2.5.1.	Fokus Seni Budaya	II-56
2.1.2.6.	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif.....	II-57
2.1.2.6.1.	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	II-57
2.1.2.6.2.	Indeks Perlindungan Anak	II-58
2.1.2.6.3.	Indeks Ketimpangan Gender	II-58
2.1.2.6.4.	Indeks Pembangunan Gender.....	II-59
2.1.2.6.5.	Indeks Pemberdayaan Gender	II-60
2.1.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-60
2.1.3.1.	Daya Saing Sumber Daya Manusia...	II-60
2.1.3.1.1	Angka Ketergantungan	II-60
2.1.3.2.	Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi.....	II-61
2.1.3.2.1.	Rasio PDRB Perdagangan	II-61
2.1.3.2.2.	Rasio PDRB Industri Pengolahan.....	II-62



2.1.3.2.3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	II-62
2.1.3.2.4	Rasio Kewirausahaan	II-63
2.1.3.2.5	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB.....	II-63
2.1.3.2.6	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian	II-64
2.1.3.2.7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja...	II-64
2.1.3.2.8	Indeks Inovasi Daerah	II-65
2.1.3.3.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru .	II-68
2.1.3.3.1	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	II-68
2.1.3.4.	Transformasi Digital	II-68
2.1.3.4.1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	II-68
2.1.3.5.	Integritas Ekonomi Domestik dan Global	II-69
2.1.3.5.1	Pembentukan Modal tetap Bruto	II-69
2.1.3.5.2	Ekspor Barang dan Jasa	II-70
2.1.3.6.	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Petumbuhan Ekonomi	II-70
2.1.3.6.1	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur.....	II-70
2.1.3.6.2	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	II-71
2.1.3.6.3	Presentase Desa Mandiri	II-71
2.1.3.7	Stabilitas Ekonomi Makro	II-75
2.1.3.7.1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB .	II-75
2.1.3.7.2	Tingkat Inflasi	II-75
2.1.3.7.3	Total Kredit/PDRB dan Dana Pihak Ketiga/PDRB.....	II-77
2.1.3.7.4	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	II-77
2.1.3.7.5	Indeks Kemandirian Fiskal.....	II-78
2.1.4.	Aspek Pelayanan Umum.....	II-78
2.1.4.1	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....	II-78
2.1.4.1.1	Indeks Reformasi Birokrasi	II-78
2.1.4.1.2	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	II-79
2.1.4.1.3	Indeks Reformasi Hukum	II-81
2.1.4.1.4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	II-81
2.1.4.1.5	Indeks Pelayanan Publik	II-82
2.1.4.1.6	Indeks Integritas Nasional	II-82
2.1.4.2	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substantial	II-83
2.1.4.2.1	Persentase Penegakan Perda	II-83
2.1.4.2.2	Presentase Capaian Aksi HAM.....	II-84
2.1.4.3	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-84



2.1.4.3.1.	Indeks Daya Saing Daerah	II-84
2.1.4.3.2.	Indeks Pembangunan Syariah	II-85
2.1.4.4	Kinerja Urusan Pemerintah Daerah ..	II-86
2.1.4.4.1	Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..	II-86
2.1.4.4.1.1	Pendidikan	II-86
2.1.4.4.1.2	Kesehatan	II-91
2.1.4.4.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-117
2.1.4.4.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-124
2.1.4.4.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	II-127
2.1.4.4.5	Sosial	II-132
2.1.4.4.2	Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-135
2.1.4.4.2.1	Tenaga Kerja.....	II-135
2.1.4.4.2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-137
2.1.4.4.2.3	Pangan	II-141
2.1.4.4.2.4	Pertanahan	II-143
2.1.4.4.2.5	Lingkungan Hidup	II-144
2.1.4.4.2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-147
2.1.4.4.2.7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-151
2.1.4.4.2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	II-154
2.1.4.4.2.9	Perhubungan	II-155
2.1.4.4.2.10	Komunikasi dan Informatika	II-163
2.1.4.4.2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-163
2.1.4.4.2.12	Penanaman Modal.....	II-165
2.1.4.4.2.13	Kepemudaan dan Olahraga	II-167
2.1.4.4.2.14	Statistik	II-169
2.1.4.4.2.15	Persandian	II-169
2.1.4.4.2.16	Kebudayaan	II-170
2.1.4.4.2.17	Perpustakaan.....	II-172
2.1.4.4.2.18	Kearsipan.....	II-175
2.1.4.4.3	Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan	II-175
2.1.4.4.3.1	Pariwisata	II-175
2.1.4.4.3.2	Pertanian	II-177
2.1.4.4.3.3	Energi dan Sumber Daya Mineral	II-178
2.1.4.4.3.4	Perdagangan	II-179
2.1.4.4.3.5	Perindustrian	II-180
2.1.4.4.3.6	Kelautan dan Perikanan	II-181
2.1.4.4.4	Aspek Penunjang Urusan	II-181
2.1.4.4.4.1	Perencanaan Pembangunan	II-181
2.1.4.4.4.2	Keuangan.....	II-184
2.1.4.4.4.3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.....	II-186
2.1.4.4.4.4	Penelitian dan Pengembangan.....	II-190



2.1.4.4.4.5	Pengawasan	II-192
2.1.4.4.4.6	Sekretariat DPRK	II-194
2.1.4.4.4.7	Sekretariat Daerah	II-195
2.1.4.4.4.8	Unsur Kekhususan	II-195
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK dan Realisasi RPJMK sampai Tahun 2025	II-198
2.2.1	Capaian Indikator Makro Kota Lhokseumawe	II-198
2.2.1.1.	Pertumbuhan Ekonomi	II-198
2.2.1.2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-198
2.2.1.3.	Rasio Gini	II-199
2.2.1.4.	Indeks Pembangunan Manusia	II-199
2.2.1.5.	Tingkat Kemiskinan	II-199
2.2.2	Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan.....	II-200
2.2.2.1.	Realisasi Pendapatan	II-200
2.2.2.2.	Realisasi Belanja	II-202
2.2.2.3.	Realisasi Pembiayaan	II-203
2.2.3	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan	II-203
2.2.3.1.	Metode Evaluasi	II-203
2.2.3.2.	Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran.....	II-205
2.2.3.2.1.	Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2025	II-205
2.2.3.2.2.	Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025	II-215
2.2.3.2.3.	Hasil Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Lhokseumawe 2025	II-227
2.2.3.2.4.	Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran	II-260
2.2.3.2.5.	Tantangan dan Hambatan Pencapaian Kinerja.....	II-261
2.2.3.2.6.	Kesimpulan dan Rekomendasi	II-262
2.3.	Permasalahan dan Isu Strategis Kota Lhokseumawe.....	II-427
2.3.1	Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe	II-427
2.3.1.1.	Belum Optimalnya Implementasi Keistimewaan Aceh	II-427
2.3.1.2.	Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Masih Berada di Bawah Rata-Rata Aceh dan Nasional	II-428
2.3.1.3.	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe Belum Optimal	II-433
2.3.1.4.	Masih Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan.....	II-439



2.3.1.5.	Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Manajemen Kebencanaan	II-442
2.3.1.6.	Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Infrastruktur Kota Lhokseumawe belum Optimal	II-443
2.3.2	Isu Strategis	II-446
2.3.2.1.	Isu Strategis Kota Lhokseumawe	II-446
2.3.2.1.1.	Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Pendapatan Perkapita	II-446
2.3.2.1.2.	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	II-447
2.3.2.1.3.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pendidikan, Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	II-448
2.3.2.1.4.	Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana	II-449
2.3.2.1.5.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastuktur yang Berkualitas	II-451
2.3.2.1.6.	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Kemandirian Ruang Fiskal	II-451
2.3.2.1.7.	Memperkuat Pelaksanaan Nilai-Nilai Dinul Islam dan Pembangunan Kebudayaan	II-452
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA	III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi	III-1
3.1.1	Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional	III-1
3.1.2	Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Aceh	III-2
3.1.3	Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe	III-8
3.1.3.1.	PDRB Per Kapita	III-19
3.1.3.2.	Pertumbuhan Ekonomi	III-20
3.1.3.3.	Laju Inflasi	III-23
3.1.3.4.	Gini Ratio	III-25
3.1.3.5.	Kemiskinan	III-25
3.1.3.6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	III-26
3.1.3.7.	Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2027	III-28
3.1.3.8.	Tantangan dan Prospek Ekonomi	III-29
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Kota	III-30
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe	III-34
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe	III-40



3.2.3	Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe	III-45
3.3.	Dukungan Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) / <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>	III-47
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	IV-1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan.....	IV-10
4.2.1.	Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027	IV-10
4.2.2.	Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2027 ...	IV-11
4.2.3.	Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2027.....	IV-12
4.3	Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Provinsi Aceh dengan Kota Lhokseumawe untuk Tahun 2026	IV-77
4.4	Pokok-Pokok Pikiran DPRK.....	IV-95
4.4.1	Maksud dan Tujuan	IV-96
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	
6.1	Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2027	VI-1
6.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	VI-3
BAB VII	PENUTUP	VII-1
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe.....	II-1
Tabel	2.2	Kondisi Suhu Udara Per Bulan di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-5
Tabel	2.3	Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-6
Tabel	2.4	Kelembaban dan Tekanan Udara Per Bulan di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-7
Tabel	2.5	Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe	II-7
Tabel	2.6	Luas Jasa Penyediaan Pangan Per Kecamatan Kota Lhokseumawe	II-18
Tabel	2.7	Luas Jasa Penyediaan Air Bersih Per Kecamatan Kota Lhokseumawe.....	II-20
Tabel	2.8	Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-22
Tabel	2.9	Tahapan Area Pelayanan Jaringan Perpipaan Siap Minum Kota Lhokseumawe.....	II-23
Tabel	2.10	Proporsi rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-26
Tabel	2.11	Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Akses Layanan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-27
Tabel	2.12	Kelas Jenis Bahaya Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-27
Tabel	2.13	Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-28
Tabel	2.14	Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan Tahun 2021-2025.....	II-30
Tabel	2.15	Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan Tahun 2021-2025.....	II-31
Tabel	2.16	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-32
Tabel	2.17	Mutasi Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-32
Tabel	2.18	Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-33
Tabel	2.19	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2030.....	II-35
Tabel	2.20	PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (dalam juta rupiah)	II-36
Tabel	2.21	Kontribusi PDRB Kota Lhokseumawe terhadap PDRB Aceh Tahun 2021-2025 (dalam milyar)	II-37



Tabel	2.22	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (dalam juta rupiah)	II-38
Tabel	2.23	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-39
Tabel	2.24	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-41
Tabel	2.25	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-43
Tabel	2.26	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-45
Tabel	2.27	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Lhokseumawe 2021-2025	II-46
Tabel	2.28	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-47
Tabel	2.29	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-51
Tabel	2.30	Perkembangan Kompetensi Literasi dan Numerasi SD dan SMP Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2025	II-53
Tabel	2.31	Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.. ..	II-55
Tabel	2.32	Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe	II-56
Tabel	2.33	Rasio Ketergantungan di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-61
Tabel	2.34	Rasio PDRB Perdagangan (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-61
Tabel	2.35	Rasio PDRB Industri Pengolahan (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-62
Tabel	2.36	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025).....	II-62
Tabel	2.37	Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-63
Tabel	2.38	Proporsi Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Non Pertanian Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-64
Tabel	2.39	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-65
Tabel	2.40	Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2025	II-66
Tabel	2.41	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-68
Tabel	2.42	Pembentukan Modal Tetap Bruto PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (juta rupiah)	II-69



Tabel	2.43	Ekspor Barang dan Jasa PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (juta rupiah).....	II-70
Tabel	2.44	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-71
Tabel	2.45	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-71
Tabel	2.46	Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-72
Tabel	2.47	Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-73
Tabel	2.48	Indeks Desa Membangun Kota Lhokseumawe Tahun 2025	II-73
Tabel	2.49	Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-75
Tabel	2.50	Inflasi Kota Lhokseumawe menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2021-2025	II-76
Tabel	2.51	Total Kredit dan dana Pihak Ketiga Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (juta)	II-77
Tabel	2.52	Capaian Komponen nilai SAKIP Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-80
Tabel	2.53	Nilai Indeks SPBE Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-81
Tabel	2.54	Capaian Survei Penilaian Integritas Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-83
Tabel	2.55	Persentase Penegakan Peraturan Daerah/Qanun Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-83
Tabel	2.56	Indeks Daya Saing Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-85
Tabel	2.57	Dimensi Indeks Pembangunan Syariah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 dan 2024-2025	II-86
Tabel	2.58	Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD dan SMP Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-90
Tabel	2.59	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Tahun 2025	II-91
Tabel	2.60	Angka Kematian Bayi di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-91
Tabel	2.61	Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-92
Tabel	2.62	Angka Kematian Balita di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-92
Tabel	2.63	Angka Kematian Neonatus di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-93
Tabel	2.64	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-93
Tabel	2.65	Rasio Posyandu Per Satuan di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-94
Tabel	2.66	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 ..	II-95



Tabel	2.67	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-96
Tabel	2.68	Rasio Dokter per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-96
Tabel	2.69	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-97
Tabel	2.70	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-98
Tabel	2.71	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi KebidanaKota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-99
Tabel	2.72	Cakupan Desa/Kelurahan Universal <i>Child Immunization</i> (UCI) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-100
Tabel	2.73	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-100
Tabel	2.74	Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-101
Tabel	2.75	Cakupan Persentase Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 ..	II-102
Tabel	2.76	Cakupan Penemuan Pneumonia Pada Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-102
Tabel	2.77	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-103
Tabel	2.78	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 .	II-104
Tabel	2.79	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 .	II-104
Tabel	2.80	Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-105
Tabel	2.81	Proporsi Kasus Tuberculosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-106
Tabel	2.82	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-107
Tabel	2.83	Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-107
Tabel	2.84	Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-108
Tabel	2.85	Cakupan Kunjungan Bayi Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-109
Tabel	2.86	Cakupan Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-109



Tabel	2.87	Cakupan Puskesmas Pembantu Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-110
Tabel	2.88	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-110
Tabel	2.89	Cakupan Pelayanan Nifas Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-111
Tabel	2.90	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025...	II-112
Tabel	2.91	Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-113
Tabel	2.92	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-113
Tabel	2.93	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi ≤ 24 jam Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-114
Tabel	2.94	Capaian Indikator Rencana Induk Bidang Kesehatan Tahun 2021-2025.....	II-115
Tabel	2.95	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2025.....	II-116
Tabel	2.96	Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-118
Tabel	2.97	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (Km).....	II-118
Tabel	2.98	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-120
Tabel	2.99	Persentase Akses Rumah Tangga (RT) berakses Air Minum Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-121
Tabel	2.100	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-121
Tabel	2.101	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGU Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-122
Tabel	2.102	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-123
Tabel	2.103	Jumlah Rekomendasi Perijinan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-124
Tabel	2.104	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025	II-124
Tabel	2.105	Luas Permukiman Layak Huni Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-125
Tabel	2.106	Areal Kawasan Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-125
Tabel	2.107	Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2025	II-126



Tabel	2.108 Rasio Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Linmas Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-127
Tabel	2.109 Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-128
Tabel	2.110 Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-129
Tabel	2.111 Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-130
Tabel	2.112 Persentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 .	II-131
Tabel	2.113 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025.....	II-131
Tabel	2.114 Penanganan PPKS Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-132
Tabel	2.115 PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-133
Tabel	2.116 Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-133
Tabel	2.117 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2025.....	II-134
Tabel	2.118 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2021 s.d 2025 Kota Lhokseumawe	II-135
Tabel	2.119 Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-136
Tabel	2.120 Besaran Kasus yang diselesaikan dengan PB Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-136
Tabel	2.121 Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-137
Tabel	2.122 Besaran Tenaga Kerja Terbina Kompetensi Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-137
Tabel	2.123 Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-138
Tabel	2.124 Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRK Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-138
Tabel	2.125 Rasio KDRT Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-139
Tabel	2.126 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-140
Tabel	2.127 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-140
Tabel	2.128 Capaian Kota Layak Anak dan Gampong Layak Anak Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024	II-141
Tabel	2.129 Pola Pangan Harapan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-141



Tabel	2.130	Ketersediaan Pangan Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-142
Tabel	2.131	Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-142
Tabel	2.132	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-143
Tabel	2.133	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-143
Tabel	2.134	Persentase Luas Hak Guna Bangunan yang Dipetakan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 ..	II-144
Tabel	2.135	Timbulan Sampah yang ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-145
Tabel	2.136	Sarana Prasarana Persampahan Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2025.....	II-145
Tabel	2.137	Persentase Cakupan Area Pelayanan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-146
Tabel	2.138	Capaian Indeks Pengelolaan Sampah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2025	II-147
Tabel	2.139	Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-148
Tabel	2.140	Rasio Bayi ber Akta Kelahiran Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-148
Tabel	2.141	Rasio Pasangan Berakta Nikah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-149
Tabel	2.142	Rasio Anak yang Memiliki KIA Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-150
Tabel	2.143	Jumlah Akte Kematian yang dikeluarkan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-150
Tabel	2.144	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Gampong yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-151
Tabel	2.145	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-152
Tabel	2.146	Bantuan Keuangan Gampong dari Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-152
Tabel	2.147	Jumlah PKK Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-153
Tabel	2.148	Posyandu Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-154
Tabel	2.149	Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-154
Tabel	2.150	Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-156



Tabel	2.151 Rasio Ijin Trayek di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-156
Tabel	2.152 Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-157
Tabel	2.153 Jumlah Terminal Bus di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-157
Tabel	2.154 Persentase Layanan Angkutan Darat di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-158
Tabel	2.155 Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-158
Tabel	2.156 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-160
Tabel	2.157 VC Ratio dan Tingkat Pelayanan Jalan Kota di Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	II-162
Tabel	2.158 Persentase Koperasi Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-164
Tabel	2.159 Jumlah BPR/LKM Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-164
Tabel	2.160 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-165
Tabel	2.161 Nilai Omset UKM yang dibina Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-165
Tabel	2.162 Realisasi Kumulatif Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-166
Tabel	2.163 Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (milyar rupiah)	II-166
Tabel	2.164 Pelayanan Perizinan di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-167
Tabel	2.165 Organisasi Pemuda yang aktif di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-168
Tabel	2.166 Cakupan Pembinaan Olahraga di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-168
Tabel	2.167 Cakupan Pelatih yang Bersertifikat di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-169
Tabel	2.168 Persentase PD yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi PD di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-170
Tabel	2.169 Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2025	II-170
Tabel	2.170 Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe	II-171
Tabel	2.171 Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-172
Tabel	2.172 Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-173



Tabel	2.173 Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-173
Tabel	2.174 Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-174
Tabel	2.175 Jumlah OPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-175
Tabel	2.176 Jumlah Kunjungan Wisatawan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-176
Tabel	2.177 Objek Wisata Kota Lhokseumawe	II-176
Tabel	2.178 PAD Sektor Pariwisata Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-177
Tabel	2.179 Produksi Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya Di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-177
Tabel	2.180 Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-178
Tabel	2.181 Rasio Ketersediaan Daya Listrik di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-179
Tabel	2.182 Ekspor Bersih Perdagangan Kota Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (juta rupiah)	II-179
Tabel	2.183 Realisasi Pendapatan Sektor Perdagangan di Pasar Tradisional Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.	II-180
Tabel	2.184 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-180
Tabel	2.185 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-181
Tabel	2.186 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	II-181
Tabel	2.187 Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	II-182
Tabel	2.188 Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	II-183
Tabel	2.189 Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA Kota Lhokseumawe	II-183
Tabel	2.190 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-184
Tabel	2.191 Opini BPK “WTP” Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-185
Tabel	2.192 Persentase SILPA Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-185
Tabel	2.193 Persentase Belanja Pendidikan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-185
Tabel	2.194 Proporsi Belanja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (milyar)	II-186
Tabel	2.195 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024	II-186



Tabel	2.196	Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-187
Tabel	2.197	Jumlah Pemangku Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-187
Tabel	2.198	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum pada Instansi Pemerintah di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-188
Tabel	2.199	Capaian Penerapan Sistem Merit pada Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2025	II-188
Tabel	2.200	Indeks Profesionalitas ASN di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2025.....	II-190
Tabel	2.201	Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2025.....	II-191
Tabel	2.202	Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-192
Tabel	2.203	Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-193
Tabel	2.204	Capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-193
Tabel	2.205	Capaian Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-194
Tabel	2.206	Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-194
Tabel	2.207	Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021-2025.....	II-195
Tabel	2.208	Dimensi Indeks Pembangunan Syariah Kota Lhokseumawe Tahun 2021 dan 2024-2025.....	II-195
Tabel	2.209	Jumlah Dayah Terakreditasi Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-196
Tabel	2.210	Pendapatan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah Tahun 2021-2025	II-197
Tabel	2.211	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Tahun 2021-2025	II-197
Tabel	2.212	Target dan Capaian Indikator Makro Kota Lhokseumawe Tahun 2025	II-200
Tabel	2.213	Capaian Pendapatan Tahun 2025 Semester 2 terhadap Target P-RKPK Tahun 2025.....	II-201
Tabel	2.214	Capaian Belanja Tahun 2025 Semester 2 terhadap Target P RKPK Tahun 2025.....	II-202
Tabel	2.215	Capaian Pembiayaan Tahun 2025 terhadap Target P RKPK Tahun 2025	II-203
Tabel	2.216	Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2025	II-206
Tabel	2.217	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025	II-216



Tabel	2.218	Indikator Kinerja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025.....	II-228
Tabel	2.219	Rekapitulasi Capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPK Lhokseumawe Tahun 2025	II-260
Tabel	2.220	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2025 Pemerintah Kota Lhokseumawe.....	II-264
Tabel	2.221	Daftar Program yang Mengalami Inkonsistensi antara RPJMD dan RKPD Tahun 2025.....	II-440
Tabel	3.1	Capaian Indikator Makro Tahun 2020-2024	III-28
Tabel	3.2	Target Makro Ekonomi Tahun 2026.....	III-28
Tabel	3.3	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024	III-31
Tabel	3.4	Penetapan APBK Lhokseumawe Tahun 2020-2024	III-31
Tabel	3.5	Anggaran dan Realisasi APBK Lhokseumawe Tahun 2020-2024.....	III-33
Tabel	3.6	Realisasi dan Target/Proyeksi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2027	III-35
Tabel	3.7	Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2027	III-42
Tabel	3.8	Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2027	III-46
Tabel	3.9	Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027.....	III-46
Tabel	4.1	Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026	IV-5
Tabel	4.2	Tema Pembangunan Tahun 2026	IV-10
Tabel	4.3	Persandingan Target Indikator Makro Nasional, Aceh dan Kota Lhokseumawe Tahun 2026.....	IV-12
Tabel	4.4	Keselaran Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe dengan Prioritas Pembangunan Aceh dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	IV-14
Tabel	4.5	Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Pembangunan Aceh dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	IV-17
Tabel	4.6	Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026.....	IV-21
Tabel	4.7	Sinkronisasi Priritas Pembangunan Tahun 2026 dengan Program Unggulan pada Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029.....	IV-27
Tabel	4.8	Matriks Prioritas dan Program Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2027	IV-41
Tabel	4.9	Indikator Kinerja Urusan Hasil Rakortekbang Provinsi Aceh dengan Kota Lhokseumawe	IV-78



Tabel	5.1	Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2027	V-1
Tabel	5.2	Rekapitulasi Pagu Indikatif Dukungan SPM dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2027	V-4
Tabel	5.3	Dukungan ProSN Tahun 2027 Kota Lhokseumawe	V-14
Tabel	5.4	Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027	V-21
Tabel	6.1	Indikator Kinerja Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2027	VI-1
Tabel	6.2	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintahan Kota Lhokseumawe Tahun 2027	VI-3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Asta Cita, Misi Aceh dan Kota Lhokseumawe.....	I-2
Gambar 1.2	Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD	I-3
Gambar 1.3	Capaian Tahun 2025 dan Target Indikator Makro Tahun 2027	I-4
Gambar 1.4	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Lhokseumawe.....	I-8
Gambar 1.5	Referensi Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2027	I-8
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Lhokseumawe	II-2
Gambar 2.2	Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe	II-3
Gambar 2.3	Peta Geologi Kota Lhokseumawe	II-3
Gambar 2.4	Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe	II-5
Gambar 2.5	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Lhokseumawe	II-17
Gambar 2.6	Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Lhokseumawe	II-19
Gambar 2.7	Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-21
Gambar 2.8	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025	II-22
Gambar 2.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKLH) Tahun 2021-2025	II-24
Gambar 2.10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2021 s.d 2025	II-25
Gambar 2.11	Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Lhokseumawe	II-29
Gambar 2.12	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2025	II-29
Gambar 2.13	Grafik Distribusi Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan Tahun 2025	II-31
Gambar 2.14	Grafik Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2025	II-33
Gambar 2.15	Angka Ketergantungan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-34
Gambar 2.16	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025	II-40



Gambar 2.17	PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha ADHB Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-42
Gambar 2.18	PDRB Perkapita Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025	II-42
Gambar 2.19	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2021-2026	II-43
Gambar 2.20	Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025	II-44
Gambar 2.21	Tingkat Kemiskinan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025	II-46
Gambar 2.22	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 ...	II-47
Gambar 2.23	Perbandingan IPM Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025	II-48
Gambar 2.24	Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-49
Gambar 2.25	Indeks Keluarga Sehat Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025.....	II-50
Gambar 2.26	Prevelensi Balita Stunting Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024.....	II-50
Gambar 2.27	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.....	II-52
Gambar 2.28	Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-52
Gambar 2.29	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-54
Gambar 2.30	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-57
Gambar 2.31	Indeks Perlindungan Anak (IPA) Lhokseumawe 2021-2025	II-58
Gambar 2.32	Indeks Ketimpangan Gender Lhokseumawe, Aceh dan Nasional 2021-2025	II-59
Gambar 2.33	Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-59
Gambar 2.34	Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-60
Gambar 2.35	Rasio Kewirausahaan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025	II-63
Gambar 2.36	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025	II-65
Gambar 2.37	Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-66
Gambar 2.38	Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2025	II-69



Gambar 2.39	Perkembangan IDM Kota Lhokseumawe Terhadap Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025	II-72
Gambar 2.40	Perbandingan Inflasi Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025	II-76
Gambar 2.41	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-78
Gambar 2.42	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-79
Gambar 2.43	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.	II-80
Gambar 2.44	Indeks Reformasi Hukum Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2025	II-81
Gambar 2.45	Indeks Pelayanan Publik Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2025	II-82
Gambar 2.46	Persentase Capaian Aksi HAM Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2025	II-84
Gambar 2.47	Angka Partisipasi Kasar Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-87
Gambar 2.48	Angka Partisipasi Murni Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-88
Gambar 2.49	Angka Partisipasi Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-88
Gambar 2.50	Angka Kelulusan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-89
Gambar 2.51	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025	II-119
Gambar 3.1	Sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027	III-8
Gambar 3.2	PDRB ADHB Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (triliun rupiah)	III-14
Gambar 3.3	PDRB ADHK Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (triliun rupiah)	III-15
Gambar 3.4	Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe dengan Migas Tahun 2024 (persen)	III-16
Gambar 3.5	Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe Tanpa Migas Tahun 2024 (persen)	III-16
Gambar 3.6	PDRB Lhokseumawe Menurut Pengeluaran Dengan Migas Tahun 2020-2024 (triliun rupiah)	III-17
Gambar 3.7	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Tahun 2020 dan Tahun 2024	III-18
Gambar 3.8	PDRB Per Kapita Lhokseumawe AHB Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	III-19
Gambar 3.9	PDRB Per Kapita Lhokseumawe ADHK Tahun 2020-2024 (juta rupiah).....	III-19
Gambar 3.10	Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga per Kapita ADHB Tahun 2020-2024 (juta rupiah)	III-20
Gambar 3.11	Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (persen).....	III-21



Gambar 3.12	Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 (persen)	III-21
Gambar 3.13	Laju Pertumbuhan PDRB Lhokseumawe ADHK Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2024 (persen) ..	III-22
Gambar 3.14	Inflasi Nasional Aceh, Lhokseumawe dan Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2024 (persen)	III-24
Gambar 3.15	Tingkat Inflasi <i>Year on Year</i> Lhokseumawe Bulan Desember 2023-2025 (persen)	III-24
Gambar 3.16	Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 (Milyar Rp.)	III-32
Gambar 3.17	Informasi Sebaran Pembangunan Rumah Layak Huni Kota Lhokseumawe Tahun 2025	III-54
Gambar 3.18	Informasi Sebaran Pembangunan Rumah Layak Huni Kota Lhokseumawe Tahun 2026	III-55
Gambar 3.19	Potret Kondisi Rumah Sebelum Pembangunan tahun 2025 dan 2026	III-56
Gambar 4.1	Komponen Penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2027	IV-1
Gambar 4.2	Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029	IV-3
Gambar 4.3	Tema Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030	IV-4



BAB I PENDAHULUAN

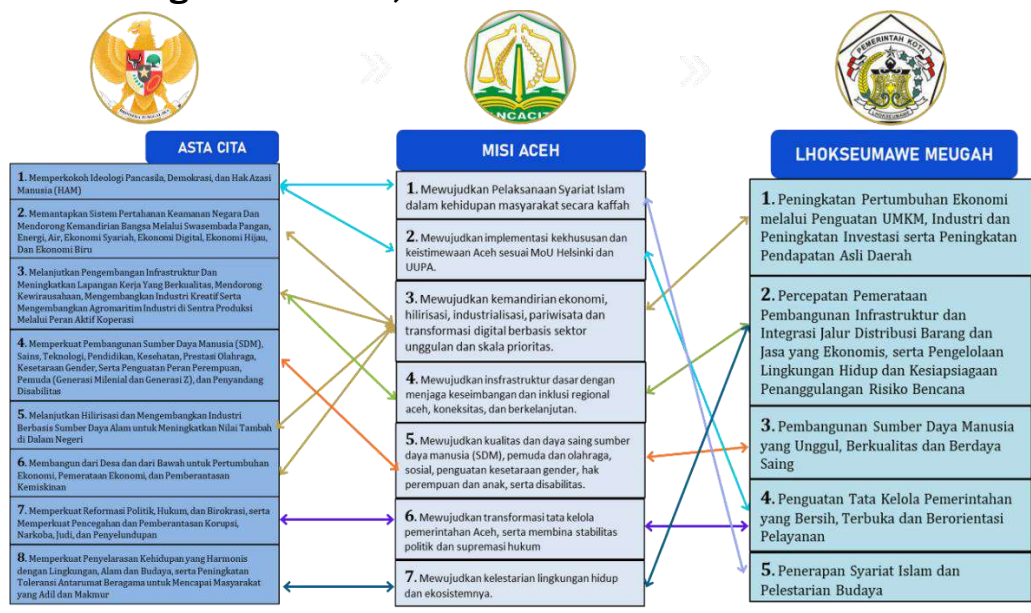
1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok sesuai dengan Tahapan Pertama Tahun 2025-2029 “Penguatan Modal Dasar Transformasi”, dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan 15 program unggulan meliputi: 1). Pengelolaan Sampah (Broh Jeut Keu Peng); 2). Penanganan Banjir; 3). Pemerataan Jaringan Air Bersih; 4). Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kota; 5). Penataan Lingkungan Pesisir, Khususnya Desa Pusong; 6). Penyelesaian Pembangunan Islamic Center; 7). Peningkatan Kualitas SDM Dayah; 8). Digitalisasi Pelayanan Publik; 9). Ruang Kreatif Pemuda; 10). Peningkatan Kesadaran Spritual para Remaja; 11). Bantuan Sosial Untuk Lansia Miskin; 12). Beasiswa untuk Pelajar Berprestasi; 13). Pengelolaan Hasil Laut; 14). Pemberdayaan Sektor Perikanan dan 15). Pemberdayaan Sektor Pertanian yang Modern.

RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahun ketiga untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan tema **“Peningkatan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Publik, dan Ruang Publik Yang Berkualitas Guna Mendukung Produktivitas, Investasi, dan Pengembangan Industri Daerah”**, dengan memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPK Lhokseumawe Tahun 2025, Isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional dan kebijakan pembangunan daerah tahun 2027, terutama 8 Asta Cita dengan 17 Program Prioritas Nasional dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat nasional dan 7 Prioritas Aceh untuk Tahun 2025-2029.



Gambar 1.1
Hubungan Asta Cita, Misi Aceh dan Kota Lhokseumawe



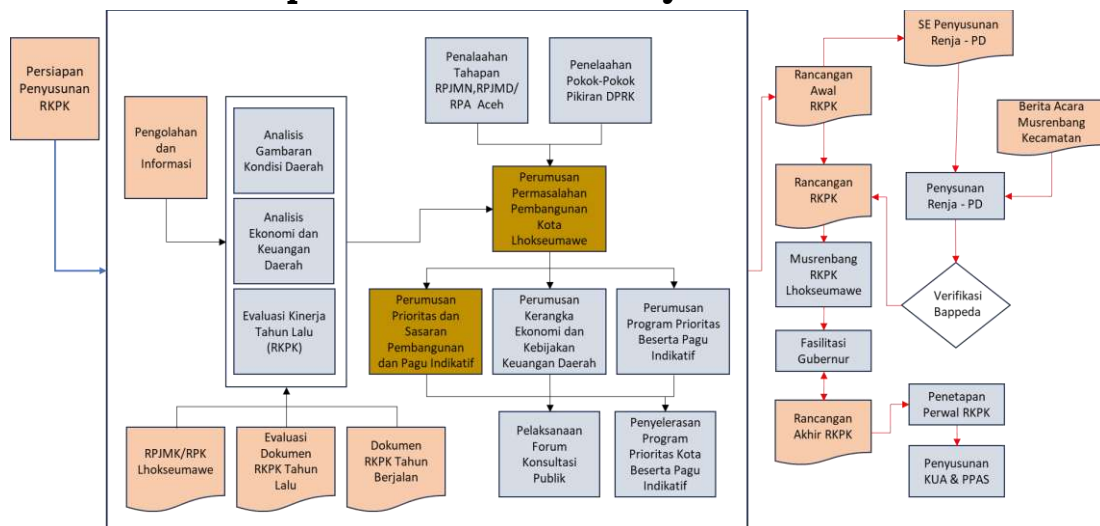
Penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 juga fokus pada permasalahan yang terjadi akibat Bencana Hidrometeorologi di akhir Tahun 2025 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan mengganggu aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik, yang secara detail telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Benca Hidrometeorologi Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2028.

Dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota, sebagai berikut:

- a. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun;
- b. Secara normatif menjadi acuan bagi Wali Kota dan DPRK dalam menentukan Kebijakan Umum APBK dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBK Tahun Anggaran 2027;
- c. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah; dan
- a. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Adapun tahapan dan tata cara penyusunan RKPK disajikan pada Gambar 1.2

Gambar 1.2
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD



Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tahapan dan tata cara penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 meliputi:

Proses penyusunan dokumen RKPK Tahun 2027 meliputi tahapan:

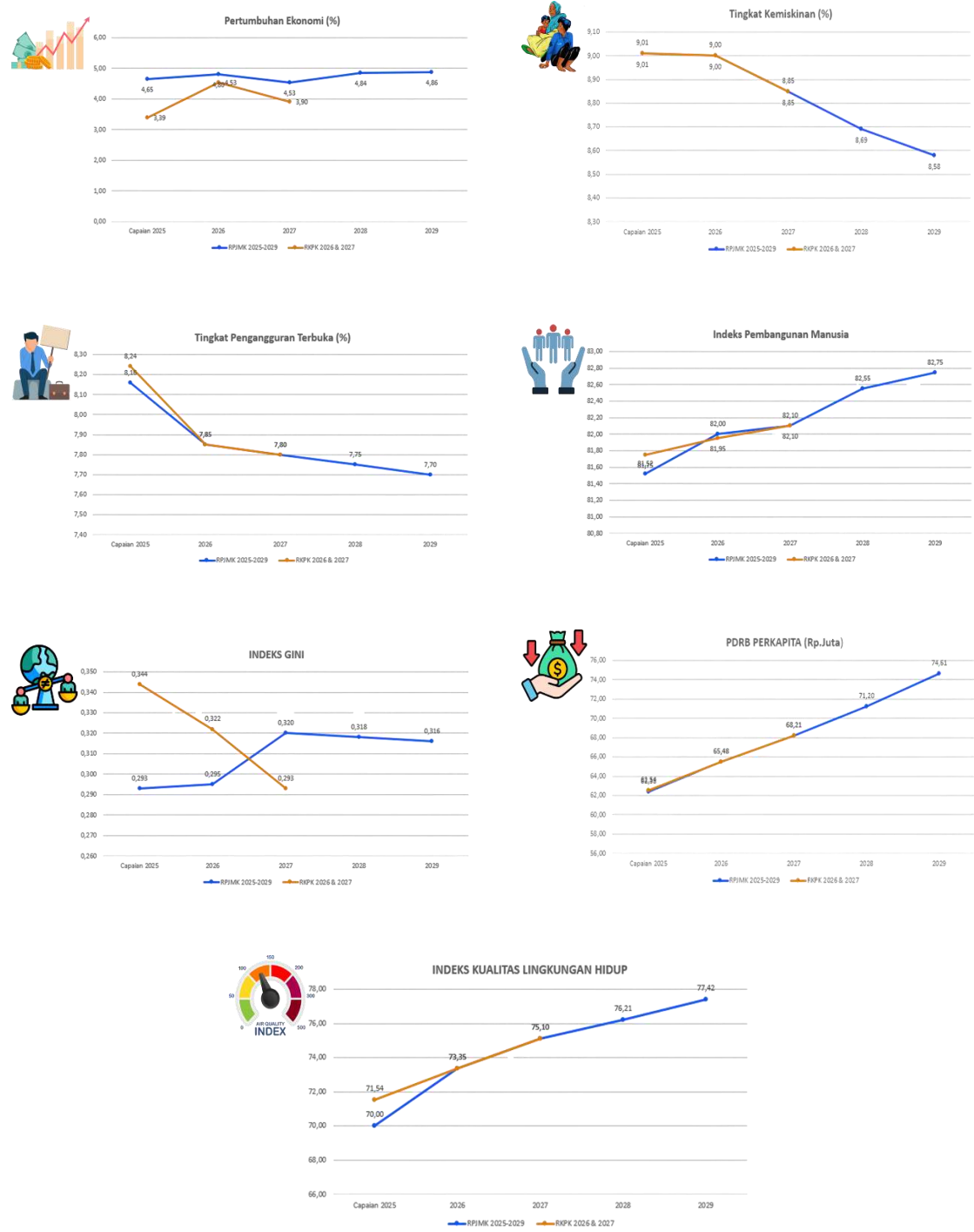
1. Persiapan yaitu penyampaian surat Wali Kota Lhokseumawe Nomor 050/041 tanggal 2 Januari 2026 tentang Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Tahun 2027 serta Permintaan Data Kamus Usulan Aspirasi Masyarakat/Aspirasi Anggota Dewan (Pokir) dalam rangka penyusunan Rancangan Awal RKPK Tahun 2027 melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 050/025 tanggal 7 Januari 2026;
2. Konsultasi Publik RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 pada tanggal 3 Maret 2026 dan dilanjutkan dengan Musrenbang Tingkat Kecamatan pada tanggal 5 Maret 2026;
3. Menyampaikan Surat Edaran Nomor 050/325/2026 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
4. Melaksanakan Musrenbang RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 pada tanggal 2 April 2026;
5. Melakukan penyempurnaan Rancangan RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 menjadi Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe Tahun 2027;
6. Reviu Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 oleh APIP; 7) Fasilitasi RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 oleh Bappeda Aceh;
7. Perbaikan dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 hasil fasilitasi Bappeda Aceh; dan
8. Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2027.

Penyusunan dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 juga memperhatikan capaian Indikator Makro Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dan Indikator Makro yang ditargetkan dalam RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 meliputi:



- 1. Pertumbuhan Ekonomi;
- 2. Tingkat Kemiskinan;
- 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT);
- 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- 5. Gini Rasio;
- 6. Pendapatan Perkapita; dan
- 7. Indeks Lingkungan Hidup.

Gambar 1.3
Capaian Tahun 2025 Dan Target Indikator Makro Tahun 2027



Sumber: BPS dan Bappeda, 2026



1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan



- Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
 13. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
 14. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;
 15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
 16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2022 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (Lembaran Aceh Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 130);
 17. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
 18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045;
 19. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
 21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh;
 22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh;
 23. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;



24. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044;
25. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045;
26. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah Aceh, maka Rancangan Awal RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2027 disesuaikan dan hanya berpedoman pada RPJMK Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029.

RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. RKPK dan RPJPK 2025-2045

RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 merupakan penjabaran periode pertama RPJMK Lhokseumawe periode 2025-2029 dengan tetap mempedomani RPJPK Lhokseumawe 2025-2045 dengan “Visi Kota Lhokseumawe Yang Islami, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan” serta 8 (delapan) Misi yaitu:

- 1) Mewujudkan Transformasi Sosial;
- 2) Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
- 3) Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
- 4) Mewujudkan ketertiban daerah, penegakan hukum, stabilitas dan implementasi Syariat Islam;
- 5) Mewujudkan Ketahanan sosial budaya dan ekologi;
- 6) Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata, berkeadilan dan berkualitas;
- 7) Mewujudkan Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan; dan
- 8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

RKPK Lhokseumawe berisikan program prioritas dan kegiatan berdasarkan 26 (dua puluh enam) sasaran pokok dan 8 (delapan) arah kebijakan RPJPK Lhokseumawe Tahap pertama yang telah disesuaikan dengan arah kebijakan periode 2025-2029 RPJP Aceh yaitu Penguatan Fondasi Transformasi dan tahapan pertama RPJPN yaitu Penguatan Transformasi.

2. RKPK dan RPJMK 2025-2029

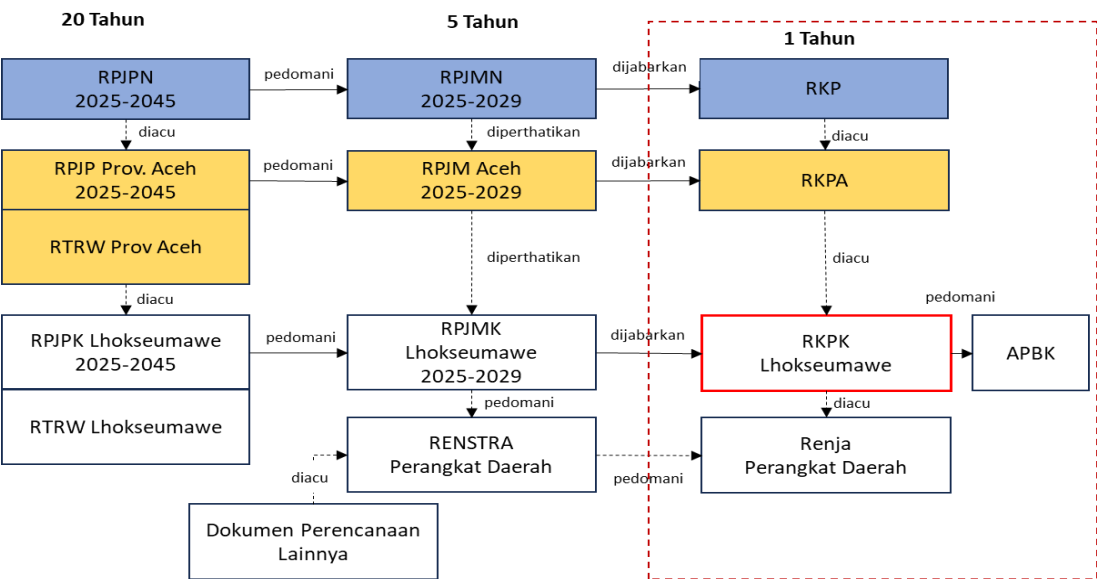
RKPK Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 dengan Visi “Terwujudnya Lhokseumawe sebagai Kota Cerdas dan Nyaman Huni” dengan 5 (lima) Misi Pembangunan, dengan 5 (lima) tujuan, 5 (lima) sasaran, 6 (enam) indikator tujuan, 13 (tiga belas) indikator sasaran, target tujuan, target sasaran dan prioritas pembangunan. RKPK berisi penjabaran program pembangunan



dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Lhokseumawe 2025-2029 dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Kota Lhokseumawe.

- 3. RKPK dan Renja PD
RKPK Tahun 2027 sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.
- 4. RKPK dan APBK
RKPK digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBK telah disusun berdasarkan RKPK.

Gambar 1.4
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Lhokseumawe



Sumber: Bappeda Kota Lhokseumawe 2026

Gambar 1.5
Referensi Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2027



Sumber: Bappeda Kota Lhokseumawe, 2026

1.4 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud disusunnya RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yang secara simultan disusun dengan RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja RKPK tahun sebelumnya.
2. Mengakomodir pemasalahan yang timbul pasca Bencana Hidrometeorologi di akhir Tahun 2025 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan mengganggu aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik.
3. Menciptakan sinergi program/kegiatan antar wilayah, antar kewenangan urusan pembangunan, antar Perangkat Daerah.
4. Mewujudkan efektivitas alokasi sumber dana.
5. Mengakomodir dinamika kebutuhan prioritas masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027;
2. Pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027;
3. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan RKPK, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Dokumen.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA LHOKSEUMAWE

Memberikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPK sampai dengan tahun Triwulan I Tahun 2026 dan realisasinya terhadap target RPJMK serta permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kota Lhokseumawe



BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA LHOKSEUMAWE

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2025 dan perkiraan tahun 2027, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah Kota Lhokseumawe yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah. meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2027 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPK tahun 2025, keterkaitannya dengan RPJPK dan RPJMK serta identifikasi prioritas pembangunan di tingkat Kota, provinsi dan nasional.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA LHOKSEUMAWE

Memuat rencana program dan kegiatan daerah yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2027 beserta pagu indikatif Perangkat Daerah.

BAB VI. KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

Memuat capaian dan terget Indikator Kinerja Utama Kota Lhokseumawe dan Indikator Kinerja Daerah yang bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII. PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPK Kota Lhokseumawe Tahun 2027 dapat mengatasi permasalahan dan terlaksana sesuai tema pembangunan Tahun 2027.



BAB II
GAMBARAN UMUM KOTA LHOKSEUMAWE

2.1 Kondisi Umum Kondisi Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu Kota di Aceh yang terletak persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera. Berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga Kota Lhokseumawe merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh. Kota Lhokseumawe tidak bersinggungan langsung dengan Ibu Kota Propinsi yaitu Kota Banda Aceh dan harus menempuh jarak kurang lebih 207 km untuk mencapainya. Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 kecamatan, setiap kecamatan memiliki kondisi yang berbeda-beda baik kondisi fisik maupun non fisiknya.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik fisik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah kabupaten. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Aspek geografi ditampilkan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi dan sosiologi.

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kota Lhokseumawe memiliki luas wilayah 181,06 Km² atau 18.106 Ha. Kota Lhokseumawe berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Utara. Wilayah administrasi Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 Kecamatan, 9 kemukiman dan 68 Gampong. Secara rinci Kecamatan dan luas wilayah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

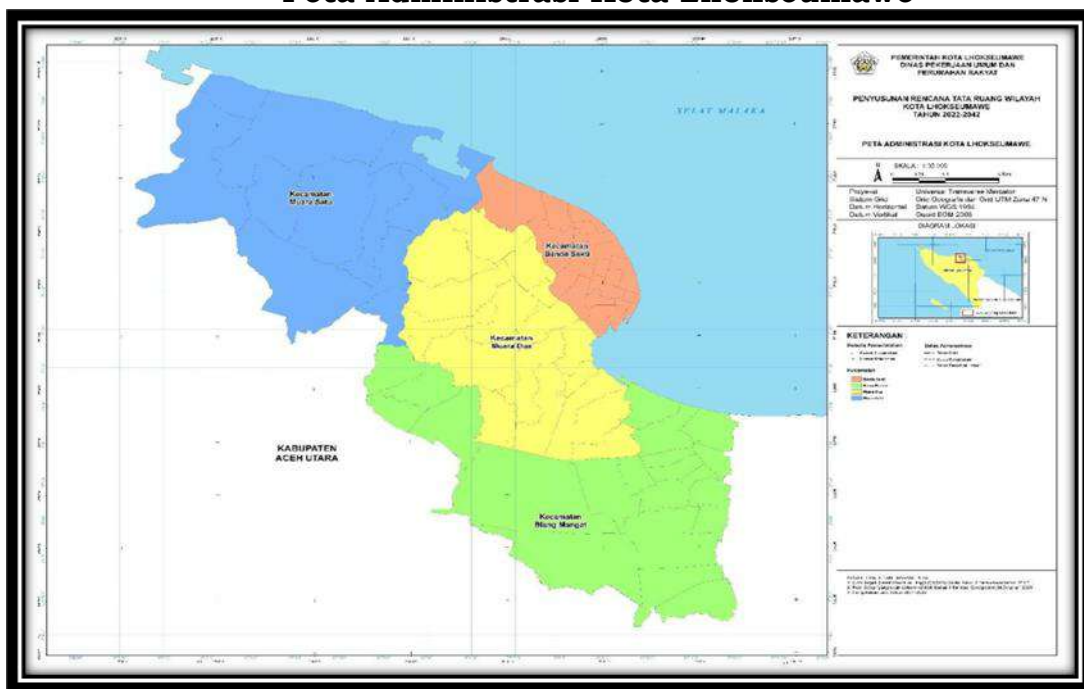
Tabel 2.1
Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kecamatan
Kota Lhokseumawe

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1	Banda Sakti	11.24	6.21
2	Muara Dua	57.80	31.92
3	Blang Mangat	56.12	31.00
4	Muara Satu	55.90	30.87
Kota Lhokseumawe		181.06	100.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, 2026

Kecamatan Muara Dua merupakan Kecamatan terluas yaitu dengan luas wilayah sebesar 57.80 km² atau 31.92% dari luasan Kota Lhokseumawe dan Kecamatan yang memiliki luasan wilayah terkecil adalah Kecamatan Banda Sakti yaitu seluas 11.24 km² atau sebesar 6.21% dari luasan Kota Lhokseumawe.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Lhokseumawe



Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

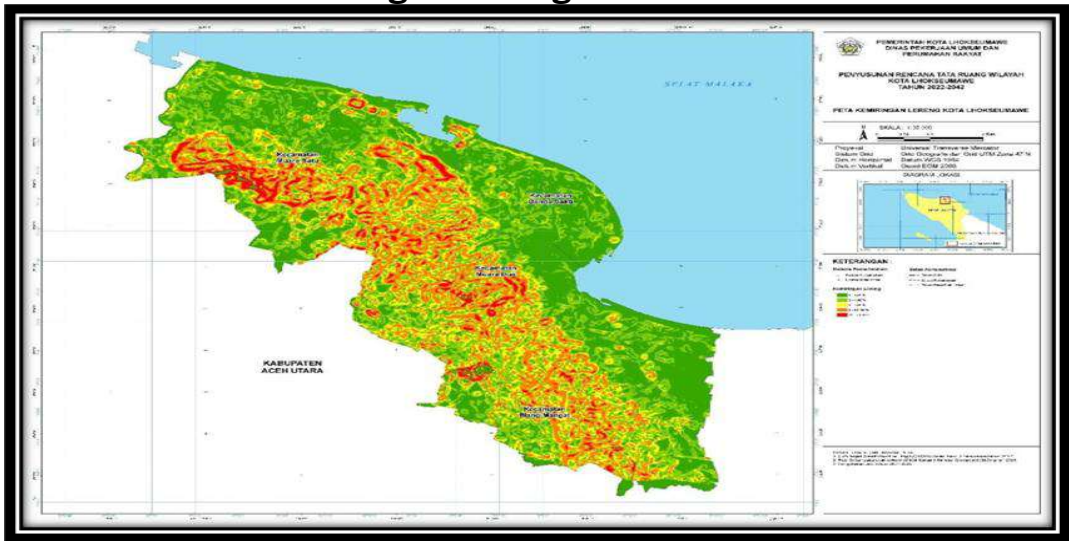
Secara geografis Kota Lhokseumawe terletak diantara $04^{\circ}54'$ Lintang Utara $05^{\circ}18'$ Lintang Selatan serta $96^{\circ}20'$ – $97^{\circ}21'$ Bujur Timur. Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian +24 meter diatas permukaan laut, disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 105 diatas permukaan laut, sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 diatas permukaan laut. Kota Lhokseumawe berbatasan dengan wilayah berikut:

- Utara dengan Selat Malaka;
- Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara);
- Barat dengan Kabupaten Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan
- Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).

2.1.1.1.3 Kondisi Topografi

Wilayah utara Kota Lhokseumawe merupakan pesisir selat malaka dan daerah sebelah Timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0-8%. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8-15%. Kondisi ketinggian lahan menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian 0-100 mdpl. Daerah pesisir di sebelah utara dan daerah di sebelah timur berada pada ketinggian antara 0-5 mdpl. Sedangkan pada daerah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 m dpl. Dengan kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan kegiatan perkotaan.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe

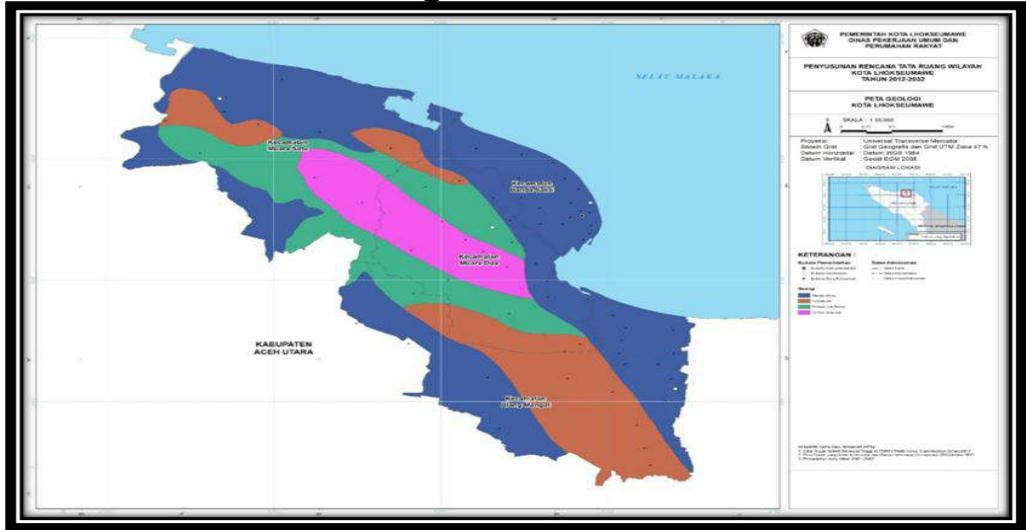


Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

2.1.1.1.4 Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kota Lhokseumawe terbentuk oleh bantuan Alluvium Muda, Formasi Idi, Formasi Julurayeue dan Formasi Seureula. Sebaran batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan Fluviatill berada pada daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah timur yaitu sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sebaran Formasi Julurayeue berupa endapan sungai batu pasir tufaan, lempung berlignit, dan batulumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran formasi seureula berupa batupasir gunungapi, dan batulumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua.

Gambar 2.3
Peta Geologi Kota Lhokseumawe



Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

2.1.1.1.5 Kondisi Hidrologi

Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatan Kota Lhokseumawe. Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan *Krueng* (Sungai) Cunda yang terletak di bagian barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan air sumur dan air PDAM.

A. Air Tanah

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu wilayah yang mempunyai potensi lahan pertanian, baik lahan sawah maupun lahan kering. Kota Lhokseumawe mempunyai 3.747 ha (21%) lahan sawah dan 308 ha (2%) lahan pertanian semusim yang dialiri jaringan irigasi tersier sepanjang 9.950 M. Jaringan irigasi tersier tersebut terletak di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Muara Satu sepanjang 2.000 M, dan Kecamatan Blang Mangat sepanjang 7.950 M. Sedangkan jaringan primer, aliran sawah Kota Lhokseumawe masih memakai buangan air dari Kabupaten Aceh Utara

B. Sungai

Wilayah Kota Lhokseumawe merupakan bagian cakupan Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Geukeuh dan Krueng Pase. Cakupan DAS Krueng Geukeuh meliputi seluruh Kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu serta sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sedangkan cakupan DAS Krueng Pase meliputi sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat.

C. Waduk

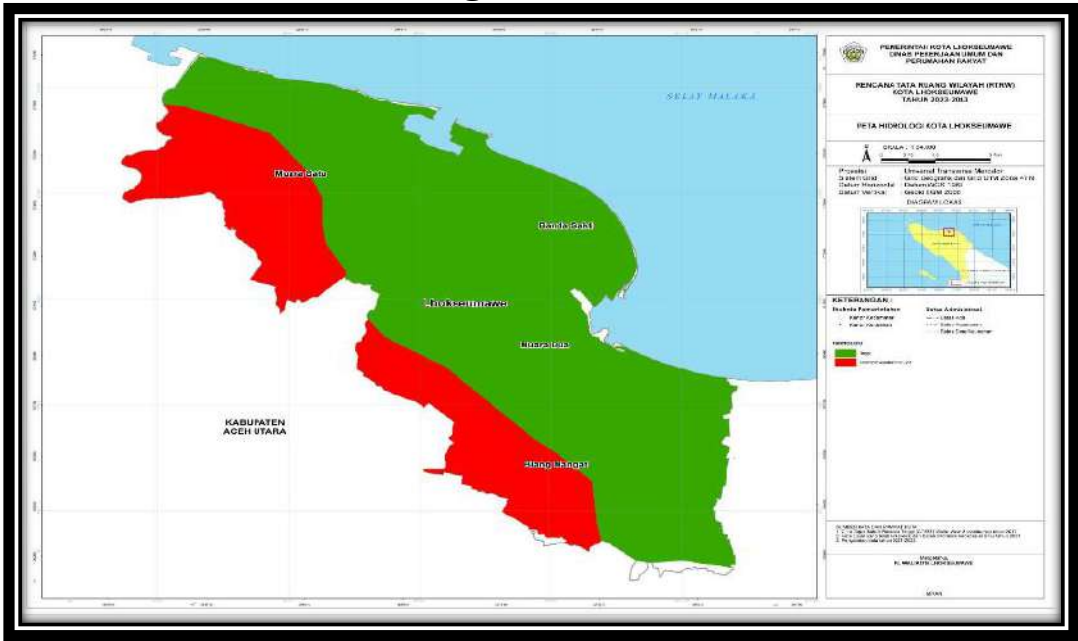
Potensi sumber daya air lainnya yang dapat dimanfaatkan yaitu berupa waduk yang terdapat 5 waduk yang berfungsi sebagai penyatu dari 2 daerah irigasi di wilayah ini untuk kebutuhan irigasi. Waduk/embung tersebut di antaranya adalah sebagai berikut, waduk Jeulikat, Seuneubok, Paya Itek, Lhok Kuaci, Mane Kareung dan rencana pengembangan waduk/embung lainnya yang sebagian besar berada di Kecamatan Blang Mangat yang merupakan lumbung padi Kota Lhokseumawe.

D. Cekungan Air Tanah

Pengelolaan air tanah berdasarkan Cekungan Air Tanah (CAT) bertujuan untuk menjaga kelangsungan, daya dukung dan fungsi air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan melalui pemetaan tingkat kriteria zona kerentanan air tanah. Cekungan Air Tanah (CAT) Lhokseumawe terdiri dari Kabupaten Aceh timur seluas 114,35 Ha, Kabupaten Aceh Utara seluas 171,61 Ha, Bireun seluas 1.38 Ha dan Lhokseumawe seluas 15,34 Ha.



Gambar 2.4
Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe



Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

2.1.1.1.6 Klimatologi

Iklim di suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis lintang, lereng, ketinggian, jarak dari perairan, serta kondisi arus air laut. Setiap daerah memiliki iklim yang berbeda. Jenis iklim pada tiap daerah sangat dipengaruhi oleh garis lintang. Iklim juga didasarkan pada karakteristik cuaca yang mempertimbangkan kondisi hujan, suhu dan angin atau penguapan. Kota Lhokseumawe memiliki iklim muson tropis (*Am*) dengan dua musim yang jelas, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Suhu udara di Kota Lhokseumawe ini cenderung konstan antara 21°-34°C dengan rata-rata suhu udara antara 25°-27°.

Tabel 2.2
Kondisi Suhu Udara Per Bulan di Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025

		Suhu Udara (°C)									
No	Bulan	2021		2022		2023		2024		2025	
		Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata
1	Januari	21.2-32.4	26.5	22.8-30.8	26.2	19.70-32.40	26.30	21.6-33.2	26.8	21.1-32.7	26.4
2	Februari	21.0-32.5	26.5	22.8-30.4	25.9	20.80-31.80	26.50	22.2-34	27.7	20.7-33.7	27.1
3	Maret	21.0-33.8	27.4	23.2-31.0	25.9	20.00-33.20	27.10	21-34	28.2	22.4-33.2	27.4
4	April	22.5-33.6	27.3	23.3-31.3	26.6	21.20-33.80	27.90	23.5-34.6	29	22.4-34.0	27.1
5	Mei	23.2-33.1	27.2	23.7-32.1	27.1	22.40-34.20	28.20	24-35.3	28.7	23.4-35.3	28.0
6	Juni	23.1-32.9	27.1	23.2-31.4	26.5	22.60-33.80	27.90	22.5-35	28.3	22.7-35.4	28.3
7	Juli	21.4-32.8	26.7	23.8-32.0	27.2	22.80-33.60	28.00	22.6-35.2	28.3	22.8-35.1	28.6
8	Agustus	23.2-33.5	27.4	23.2-31.9	26.8	22.60-34.40	27.70	22.8-33.9	26.6	22.5-34.7	27.5

No	Bulan	Suhu Udara (°C)									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata	Min-Maks	Rata-rata
9	September	23.0-34.6	26.8	23.1-31.5	26.7	22.60-34.40	27.30	23-34.1	27.7	22.7-36.9	27.7
10	Oktober	22.6-33.7	27.0	23.3-30.4	26.1	22.60-32.50	26.80	22.6-33	27.2	22.2-33.7	26.9
11	November	22.9-32.0	26.2	23.2-29.7	25.8	22.60-33.00	26.50	23-32.6	26.7	21.9-31.9	25.9
12	Desember	21.9-31.7	25.7	22.6-29.2	25.3	23.40-32.40	26.70	22-32.2	26.8	22.1-31.8	26.4

Sumber: BPS Lhokseumawe 2026

Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh selama periode waktu tertentu yang pengukurannya menggunakan satuan tinggi di atas permukaan tanah horizontal yang diasumsikan tidak terjadi infiltrasi, run off, maupun evaporasi. Tingkat hujan yang diukur dalam satuan 1 (satu) mm adalah air hujan setinggi 1 (satu) mm yang jatuh (tertampung) pada tempat yang datar seluas 1 meter persegi dengan asumsi tidak ada yang menguap, mengalir dan meresap tempat yang datar seluas 1 meter persegi dengan asumsi tidak ada yang menguap, mengalir dan meresap. Pada tahun 2021 curah hujan Kota Lhokseumawe tertinggi berada di Bulan Mei dan Desember dengan hari hujan terbanyak 17 hari dan pada tahun 2025 curah hujan Kota Lhokseumawe tertinggi berada di Bulan November dengan hari hujan terbanyak mencapai 17 hari.

Tabel 2.3
Curah Hujan dan Hari Hujan Per Bulan di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Bulan	2021		2022		2023		2024		2025	
		CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH	CH	HH
1	Januari	20.5	3	129	9	171.40	16	33.8	7	139.7	15
2	Februari	48.5	3	296	14	52.90	11	7	3	50.2	4
3	Maret	34.5	3	61	11	35.00	9	23.9	4	259.3	12
4	April	44.5	6	112	9	26.60	4	88.5	4	153.7	13
5	Mei	287.5	17	62	7	165.70	13	154	7	92.7	9
6	Juni	150.5	9	182	11	161.90	15	135.3	8	66.9	6
7	Juli	160	7	31	4	41.90	9	69.5	3	33.3	6
8	Agustus	6.5	2	132	12	131.60	9	140.5	12	51.6	8
9	September	83.5	5	56	10	135.40	16	133.2	8	54.5	7
10	Oktober	41.5	6	359	17	173.30	24	72.6	13	243.1	16
11	November	150.5	11	271	15	241.70	23	297.8	15	1099.2	17
12	Desember	455	17	379	22	342.70	22	132.3	13	165.5	12

Sumber: BPS Lhokseumawe 2026

Kelembaban udara adalah ukuran kadar uap air yang berada dalam bentuk gas di udara. Kandungan air pada suatu wilayah bisa memengaruhi kelembaban di udara. Semakin tinggi ketersediaan air di suatu tempat semakin tinggi pula kelembaban di wilayah tersebut. Kelembaban udara Lhokseumawe minimum pada tahun 2025 berkisar 39% sampai dengan 59%. Dan kelembaban udara maksimum berkisar



sampai dengan 100% dengan tekanan udara berkisar 1008 sampai 1010.

Tabel 2.4
Kelembaban dan Tekanan Udara Per Bulan di Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025

No	Bulan	2021		2022		2023		2024		2025	
		Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara	Min-Maks	Tekanan Udara
1	Januari	73.3-86.8	1010.7	61-98	1007.3	54-100	1011.40	58-100	1011.5	56-100	1010.1
2	Februari	74.5-93.8	1011.5	60-100	1005.9	58-100	1012.20	47-100	1011.9	50-100	1010.5
3	Maret	76.0-87.3	1009.9	65-99	1005.5	53-100	1013.90	51-100	1010.7	58-100	1009.6
4	April	81.0-89.0	1010.0	64-98	1005.8	44-100	1011.60	51-99	1008.4	59-100	1009.7
5	Mei	78.8-95.0	1008.9	50-98	1004.8	47-100	1011.90	52-100	1008.2	50-100	1008.3
6	Juni	80.3-91.0	1008.9	51-98	1005.5	52-100	1009.50	49-99	1009.5	49-100	1009.1
7	Juli	70.8-90.8	1008.5	51-98	1004.3	53-100	1009.90	51-100	1008.5	39-100	1008.3
8	Agustus	77.5-90.3	1008.5	50-99	1005.2	57-100	1011.40	53-100	1009.8	43-100	1009.6
9	September	76.3-92.8	1009.2	53-100	1005.3	53-100	1010.70	53-100	1008.9	41-100	1009.7
10	Oktober	69.5-89.5	1008.6	65-100	1006.7	61-100	1011.90	56-100	1010	56-100	1009.8
11	November	81.3-95.8	1009.6	67-100	1006.7	62-100	1011.00	64-100	1009.2	59-100	1010.3
12	Desember	82.5-97.5	1010.0	64-100	1006.4	56-100	1012.00	51-100	1009.5	56-100	1010.1

Sumber: BPS Lhokseumawe 2026

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Kota Lhokseumawe memiliki luas 181,06 Km² atau 18106 Ha dengan penggunaan lahan yang beragam. Angka paling tinggi digunakan sebagai kawasan pemukiman dan diikuti oleh kawasan perdagangan dan jasa. Penggunaan lahan di Kota Lhokseumawe untuk pemukiman 15,81%, perdagangan dan jasa 0,27% yang berpusat di Kecamatan Banda Sakti, kegiatan industri 5,10% yang terpusat di Kecamatan Muara Satu. Penggunaan lahan lainnya untuk budi daya perikanan darat (tambak) 8,81%, sedangkan daerah pedalamannya di dominasi oleh alang-alang dan belukar, ladang, sawah serta perkebunan kelapa sawit yang terletak di Kecamatan Blang Mangat.

Tabel 2.5
Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Permukiman	2861,79	15,81
2.	Perdagangan dan Jasa	49,36	0,27
3.	Industri Besar	923,76	5,1
4.	Sawah	987,13	5,45
5.	Tambak	1595,3	8,81
6.	PPI	2,77	0,02
7.	Mangrove	12,86	0,07
8.	Sungai	80,48	0,44
9.	Pendidikan	0,6	0,003
10.	Perkantoran	14,35	0,08



No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
11.	Kebun	11452,1	63,25
12.	Waduk	57,75	0,32
13.	Danau	16,6	0,09
14.	Lapangan Golf	51,14	0,28
Total		18106	100

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe 2026

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang ada di suatu wilayah, mampu memberikan dampak positif bagi penduduk di sekitarnya, salah satunya dalam bidang perekonomian. Industri ekstraktif merupakan industri yang bahan baku diambil langsung dari alam. Kota Lhokseumawe memiliki potensi perekonomian sekitar meliputi sektor perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, pertambangan, dan lain lain.

A. Perikanan

Kota Lhokseumawe sebagai daerah pesisir memiliki potensi perikanan yang cukup besar, baik dari sektor perikanan tangkap maupun budidaya. Berdasarkan data aplikasi desktop validasi nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan total produksi perikanan tangkap Kota Lhokseumawe tahun 2025 sebesar 6.970 ton untuk non pelabuhan dan 3.280 ton untuk pelabuhan dengan total produksi perikanan tangkap sebesar 10.250 ton. Komoditas unggulan meliputi budidaya ikan lele, budidaya udang vaname, budidaya ikan bandeng, budidaya ikan mujair, budidaya ikan kerapu dan ikan kakap. Lokasi budidaya tersebar di seluruh pesisir pantai Kota Lhokseumawe, meliputi keramba jaring apung, tambak dan kolam yang ada di beberapa kecamatan di Kota Lhokseumawe yang meliputi Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu.

Luas lahan tambak di Kota Lhokseumawe sebesar 8.558.000 m² dan tahun 2025 produksi perjenis pembesaran mencapai 1.778,05 ton dengan jumlah produksi terbesar pada budidaya udang vaname sebesar 958,40 kg disusul dengan ikan lele sebesar 435,26 kg, kemudian ikan bandeng sebesar 189,26 kg, selanjutnya ikan mujahir sebesar 93,26 kg dan ikan kerapu 62,93 kg, untuk ikan kakap putih, dan udang windu dengan total 19,55 kg.

Untuk hasil perikanan Kota Lhokseumawe telah memiliki 31 (tiga puluh satu) Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang merupakan usaha mikro dan kecil yang bergerak dibidang pengolahan ikan dan tersebar 4 kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe. UPI ini berperan penting dalam perekonomian Kota Lhokseumawe terutama dalam sektor perikanan baik dari segi ekonomi maupun ketahanan pangan. Produk Olahan hasil kelautan dan perikanan Kota Lhokseumawe berupa teri kering dan ikan asin, kerupuk tuna, pempek ikan, keumamah, bileh crispy, nugget ikan, peyek udang, dendeng ikan, ikan gabus crispy, bandeng isi dan hasreng.



B. Pertanian

Sebagai sebuah Kota, Lhokseumawe juga memiliki potensi kawasan pertanian di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu. Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dengan produktivitas. Luas tanam pada tahun 2025 sebesar 1.798,93 ha dengan luas panen sebesar 1.798,93 Ha dan produksi padi sebesar 9.894 ton dengan produktivitas sebesar 5.5 ha.

C. Perkebunan

Potensi Perkebunan Kota Lhokseumawe tersebar di beberapa kecamatan di Kota Lhokseumawe. Secara keseluruhan luas panen tanaman perkebunan sebesar 1.005,1 ha pada tahun 2025 dengan produktivitas sebesar 86.6 kuintal. Produksi terbesar adalah kelapa sawit, diikuti tebu, pinang, kakao, kemiri dan kelapa.

2.1.1.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Lhokseumawe dilihat dari sisi perwujudan sistem perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044 meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat pelayanan, meliputi:
 1. Perwujudan Pusat Pelayanan Kota (PPK) Lhokseumawe, meliputi:
 - a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan perkantoran;
 - b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama perdagangan dan jasa skala kota;
 - c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama pusat permukiman;
 - d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan pariwisata;
 - e) Penetapan dan pengembangan fungsi utama pusat pertahanan dan keamanan; dan
 - f) Penyusunan dan legalisasi rencana detail tata ruang (RDTR).
 2. perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Lhokseumawe, meliputi:
 - a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, Kawasan permukiman dan kegiatan perkantoran;
 - b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kawasan perkantoran dan kawasan pendidikan;
 - c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kawasan pendidikan, Kawasan industri dan kegiatan ruang terbuka hijau; dan
 - d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan permukiman, Kawasan perkantoran dan kegiatan pertanian.
 3. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kota Lhokseumawe, meliputi:



- a) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kegiatan pariwisata, kawasan permukiman, dan kegiatan perikanan;
 - b) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan campuran, kawasan permukiman, kegiatan industri, kegiatan pertanian, kawasan perkantoran;
 - c) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kegiatan transportasi, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, dan perikanan budidaya;
 - d) Penetapan dan pengembangan fungsi utama kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kegiatan pertahanan dan keamanan, Kawasan industri dan kegiatan perkantoran; dan
 - e) Pembentukan Kecamatan Kandang Makmur beserta kelengkapannya.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi terdiri dari:
- 1. perwujudan sistem jaringan jalan, meliputi:
 - a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - b) Survei Kondisi Jalan/Jembatan;
 - c) Rehabilitasi Jalan;
 - d) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan arteri primer yang merupakan kewenangan nasional,
 - e) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan arteri sekunder yang merupakan kewenangan kota,
 - f) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan kolektor primer yang merupakan kewenangan provinsi,
 - g) peningkatan status jalan nasional pada ruas jalan Akses Terminal Tipe A Lhokseumawe;
 - h) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lokal primer yang merupakan kewenangan kota,
 - i) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lokal sekunder yang merupakan kewenangan kota di Kota Lhokseumawe;
 - j) Rencana umum (masterplan) Pembangunan dan pengembangan jalan lokal sekunder di Kota Lhokseumawe;
 - k) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan umum berupa jalan lingkungan sekunder yang merupakan kewenangan kota di Kota Lhokseumawe;
 - l) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan line pipa di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Blang Mangat;
 - m) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan akses Terminal Tipe A Lhokseumawe yang



- merupakan kewenangan nasional di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua;
- n) Pembangunan dan pengembangan ruas jalan khusus berupa jalan akses KEK Arun di Kecamatan Muara Satu;
 - o) Pembangunan *exit* Tol Langsa-Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe;
 - p) Pembangunan *exit* Tol Lhokseumawe-Sigli di Kota Lhokseumawe;
 - q) Pembebasan lahan untuk pembangunan *exit* Tol Langsa-Lhokseumawe di Kota Lhokseumawe;
 - r) Pembebasan lahan untuk pembangunan *exit* Tol Lhokseumawe-Sigli di Kota Lhokseumawe;
 - s) Pengembangan terminal penumpang tipe A Lhokseumawe di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Muara Dua;
 - t) Pengembangan terminal penumpang tipe C di Gampong Keude Aceh di Kecamatan Banda Sakti;
 - u) Pengembangan angkutan dalam kota yang terintegrasi di Kota Lhokseumawe;
 - v) Pengembangan Terminal Barang Kota Lhokseumawe di Gampong Meunasah Mee di Kecamatan Muara Dua;
 - w) Pembangunan dan pengembangan jembatan di Kota Lhokseumawe;
 - x) Penggantian Jembatan di Kota Lhokseumawe; dan
 - y) Pembangunan *fly over* Cunda di Kota Lhokseumawe.
2. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, meliputi:
- a) pengembangan terminal khusus Migas V di Gampong Blang Panyang di Kecamatan Muara Satu;
 - b) Pengembangan Terminal khusus Energi Listrik II Gampong Hagu Teungoh di Kecamatan Banda Sakti; dan
 - c) Pengembangan Pelabuhan Pendaratan Ikan Ujong Blang di Gampong Ujong Blang di Kecamatan Banda Sakti.
- c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
- a) jaringan minyak dan gas bumi, meliputi:
 - 1) Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua; dan
 - 2) Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen di Kota Lhokseumawe;
 - b) infrastruktur minyak dan gas bumi berupa pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi di Kecamatan Muara Satu dan Kecamatan Banda Sakti.



2. perwujudan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a) jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, meliputi:
 - 1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) jaringan transmisi Banda Aceh-Sigli-Lhokseumawe-Langsa-Medan-Tebing Tinggi di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - 2) Pengembangan jaringan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
 - 3) Pengembangan Saluran transmisi lainnya di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.
 - b) jaringan distribusi tenaga listrik, meliputi:
 - 1) Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Kajian rencana pengadaan tenaga listrik di Kota Lhokseumawe; dan
 - 3) Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe.
 - c) pengembangan gardu listrik di Kecamatan Muara Satu;
 - d) infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, meliputi:
 - 1) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Arun (LNG) 180 MW di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu; dan
 - 2) Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sumbagut-2 Peaker 240 MW di Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan tetap, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pengembangan jaringan tetap di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan sistem penataan menara diluar zona pembangunan Menara di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pengembangan jaringan kabel maupun non kabel di Kota Lhokseumawe; dan
 - d) Penataan jaringan udara dan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe.
 2. pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan tetap di Gampong Alue Awee di Kecamatan Muara Dua;
 3. perwujudan sistem jaringan bergerak, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pengembangan jaringan bergerak seluler di Kota Lhokseumawe;
 - b) Kajian pengembangan infrastruktur jaringan mikro digital di Kota Lhokseumawe;



- c) Kajian Pembangunan menara BTS di Kota Lhokseumawe;
- d) Pengembangan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum di Kota Lhokseumawe; dan
- e) Pembangunan menara bersama di Kota Lhokseumawe;
- e. Perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
 - 1. Perwujudan sistem jaringan irigasi, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Dua;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu; dan
 - c) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu.
 - 2. Perwujudan sistem pengendalian banjir, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir di Kota Lhokseumawe; dan
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu.
 - 3. Perwujudan bangunan sumber daya air, meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan pintu air di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan prasarana irigasi di Kota Lhokseumawe;
 - c) Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya di Kota Lhokseumawe;
 - d) Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku di Kota Lhokseumawe;
 - e) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya di Kota Lhokseumawe; dan
 - f) Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya di Kota Lhokseumawe.
- f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
 - 1. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM), meliputi:
 - a) perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan di Kota Lhokseumawe;
 - c) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM di Kota Lhokseumawe;
 - d) Penataan jaringan dalam tanah di Kota Lhokseumawe;
 - e) perwujudan sistem jaringan perpipaan, meliputi:
 - 1) pengembangan unit air baku di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu;



- 2) pengembangan jaringan air baku di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Muara Satu;
- 3) pengembangan unit produksi di Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu; dan
- 4) pengembangan unit distribusi di Kota Lhokseumawe.
- f) perwujudan bukan jaringan perpipaan berupa pembangunan dan pengembangan terminal air di Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu.
2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL), meliputi:
 - a) Penyusunan Masterplan Air Limbah di Kota Lhokseumawe;
 - b) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota di Kota Lhokseumawe;
 - c) Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman di Kota Lhokseumawe;
 - d) Kajian Pembangunan IPAL dan IPLT di Kota Lhokseumawe;
 - e) Kajian Pembangunan pipa jaringan air limbah di Kota Lhokseumawe;
 - f) Kajian Pembangunan Penampungan Sementara Air Limbah di Kota Lhokseumawe;
 - g) Kajian Pembangunan Rumah Pompa Air Limbah di Kota Lhokseumawe;
 - h) Perwujudan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa Pengembangan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Lhokseumawe;
 - i) Perwujudan Jaringan Pengelolaan Air Limbah Domestik berupa Pengembangan Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Lhokseumawe.
3. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), meliputi:
 - a) Pengembangan dan peningkatan Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat;
 - b) Penyediaan *buffer* hijau pada lokasi penampungan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat; dan
 - c) Penataan lingkungan disekitar lokasi tempat pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Gampong Blang Buloh di Kecamatan Blang Mangat.
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
 - a) Pengembangan dan pemeliharaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat;
 - b) Pemindahan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Gampong Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat;



- c) Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Blang Mangat, dan Kecamatan Muara Satu;
 - d) Peningkatan dan pemeliharaan penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) di Kota Lhokseumawe;
 - e) Peningkatan pengadaan alat angkut sampah (*gerobak, dump truck, amroll truck, bulldozer*) di Kota Lhokseumawe;
 - f) Peningkatan sistem penyuluhan kesadaran masyarakat di Kota Lhokseumawe; dan
 - g) Peningkatan pengawasan dan penerapan sanksi pencemaran lingkungan di Kota Lhokseumawe.
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
- a) Penyediaan jalur evakuasi bencana di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pembangunan dan pengembangan tempat evakuasi bencana di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Penyusunan kajian teknis rencana induk kebencanaan di Kota Lhokseumawe.
6. perwujudan sistem drainase, meliputi:
- a) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - b) Perwujudan Jaringan Drainase Primer, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan Jaringan drainase primer di Kota Lhokseumawe;
 - 2) Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 3) Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 4) Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan di Kota Lhokseumawe;
 - 5) Normalisasi Jaringan drainase primer di Kota Lhokseumawe;
 - 6) Kajian pembangunan kolam retensi air/kolam penampungan air hujan di Kota Lhokseumawe; dan
 - 7) Kajian pembangunan kanal-kanal yang terdapat di seluruh wilayah terutama di jalan arteri primer di Kota Lhokseumawe.
 - c) Perwujudan Jaringan Drainase Sekunder, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan jaringan drainase sekunder di Kota Lhokseumawe; dan
 - 2) Peningkatan jaringan drainase sekunder di Kota Lhokseumawe.
 - d) Perwujudan Jaringan Drainase, meliputi:
 - 1) Pemeliharaan jaringan drainase Tersier di Kecamatan Blang Mangat, Kecamatan Banda Sakti, dan Kecamatan Muara Dua; dan



- 2) Peningkatan jaringan drainase Tersier di Kota Lhokseumawe.
7. Penyediaan jalur sepeda di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Muara Dua;
8. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:
 - a) Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan arteri primer dan sekunder di Kota Lhokseumawe;
 - b) Pengembangan jaringan pejalan kaki di jalan kolektor primer di Kota Lhokseumawe; dan
 - c) Pengembangan pedestrian ramah disabilitas di Kota Lhokseumawe.

2.1.1.4 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) komponen, yaitu kapasitas penyediaan (supportive capacity) dan kapasitas tampung limbah (assimilative capacity). Dalam dokumen KLHS RPJM Kota Lhokseumawe telaahan daya dukung lingkungan hidup terbatas pada kapasitas penyediaan sumber daya alam, terutama berkaitan dengan kemampuan lahan serta ketersediaan dan kebutuhan lahan dan air dalam suatu ruang/wilayah.

Kapasitas daya tampung lingkungan hidup meliputi daya tampung lahan dalam bentuk kemampuan lahan dan daya tampung air dalam bentuk sebaran kualitas air. Sedangkan daya dukung lingkungan hidup meliputi daya dukung pangan, air dan lahan. Dukungan sumber daya alam berupa air, pangan dan lahan merupakan dasar penting dalam proses produksi untuk mencapai tujuan pembangunan.

Dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Lhokseumawe tahun 2023 dijelaskan bahwa tutupan lahan menjadi bagian penting dari jasa ekosistem, dikarenakan perbedaan jenis tutupan lahan akan memberi pengaruh terhadap besarnya nilai jasa yang dihasilkan oleh suatu ekosistem, baik sebagai lahan pertanian, perkebunan, gunung atau hutan bahkan lahan budidaya manusia.

Hasil analisis Dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Lhokseumawe berbasis jasa ekosistem bersifat indikatif, yakni digunakan dalam menggambarkan suatu wilayah atau lokasi sebagai informasi awal dari proses kebijakan terkait alokasi atau penyediaan lokasi untuk tujuan tertentu yang bersifat sementara dalam menuju situasi pasti (definitif). DDDT LH jasa ekosistem digunakan untuk mendapatkan gambaran potensi jasa ekosistem di suatu wilayah tertentu dengan pendekatan keruangan yang melibatkan unsur-unsur fisik dan lahan di wilayah tersebut.

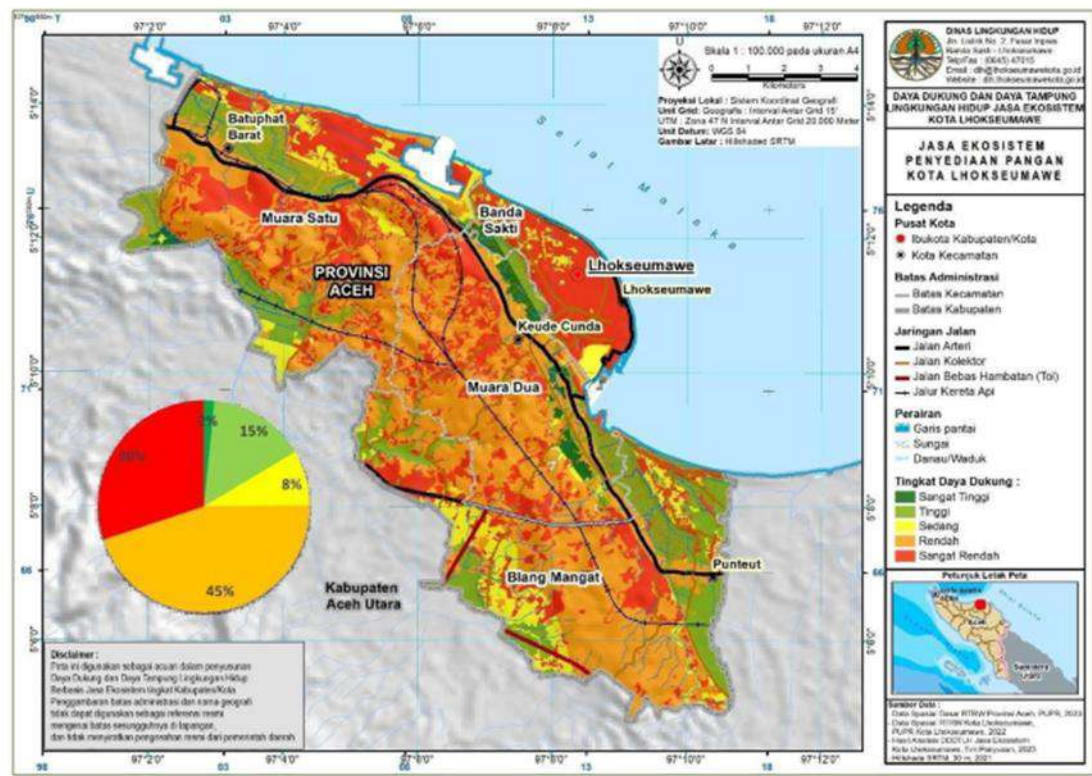
2.1.1.4.1 Daya Dukung Pangan

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem penyedia pangan berkaitan dengan segala jenis bahan pangan yang berasal dari sumber hayati berupa tumbuhan dan hewan, termasuk didalamnya ikan. Jasa ekosistem penyedia pangan menjadi

penting karena memiliki manfaat sebagai penyedia makanan dan minuman bagi konsumsi manusia.

Jasa ekosistem penyedia pangan dapat berasal dari banyak sumber, diantaranya adalah hasil pangan pertanian, hasil perkebunan, hasil laut dan perikanan darat, hasil peternakan, serta hasil hutan. Hasil pangan dari sumber-sumber tersebut dapat berupa beras, jagung, ketela, ikan, telur, daging, buah-buahan, sayur-mayur, dan segala jenis bahan makanan yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan konsumsi manusia. Kehidupan manusia sangat tergantung kepada ketersediaan bahan pangan yang bersumber dari tanaman dan hewan. Budidaya hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, maupun dari hasil hutan menjadi aktivitas utama untuk penyediaan pangan.

Gambar 2.5
Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan Kota Lhokseumawe



Sumber : KLHS RPJMK Lhokseumawe, 2026

Suatu ekoregion memiliki karakteristik fisik tertentu yang menyebabkan variasi potensi pangan. Dataran aluvial sesuai untuk pertanian lahan basah seperti persawahan, daerah berbukit dan pegunungan dapat dimanfaatkan untuk pertanian lahan kering (hortikultura dan perkebunan) dan sebagainya. Tingkat kesesuaian lahan untuk pengembangan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering sangat tergantung kepada karakteristik iklim dan karakteristik tanah. Alih fungsi lahan pertanian lahan sawah seperti sawah menjadi permukiman dan kawasan perdagangan dapat memberikan tekanan terhadap penurunan jasa penyediaan pangan. Peta jasa ekosistem penyediaan pangan Kota Lhokseumawe disajikan pada gambar di atas.



Berdasarkan hasil analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, potensi jasa ekosistem penyediaan pangan di Kota Lhokseumawe memiliki indeks yang Rendah, yakni 2,36. Luas jasa ekosistem penyediaan pangan di masing-masing kecamatan di Kota Lhokseumawe disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Luas Jasa Penyediaan Pangan Per Kecamatan Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Jasa Penyediaan Pangan (Ha)					Luas (Ha)
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Banda Sakti	34,50	29,13	132,31	86,55	840,20	1.102,69
Blang Mangat	-	953,04	545,10	2.050,57	919,65	4.468,35
Muara Dua	137,59	262,84	56,16	1.762	807,82	3.026,41
Muara Satu	37,82	730,55	383,79	2.114,51	1.436,24	4.702,91
Lhokseumawe	209,91	1.975,56	1.117,36	5.993,62	4.003,90	13.300,36

Sumber : KLHS RPJMK Lhokseumawe, 2026

Tabel diatas memberikan informasi bahwa jasa ekosistem penyediaan pangan yang tergolong Sangat Tinggi seluas 209,91 Ha (1,58%), Tinggi seluas 1.975,56 Ha (14,85 %), dan Sedang seluas 1.117,36 Ha (8,40%) dari total luas Kota Lhokseumawe. Sementara sisanya tergolong ke dalam jasa penyediaan pangan Rendah seluas 5.993,62 Ha (45,06 %) dan Sangat Rendah seluas 4.003,90 Ha (30,10%). Beberapa kecamatan berdasarkan luas yang memilikipotensi penyedia pangan Sangat Tinggi adalah Kecamatan Muara Dua dengan luas mencapai 137,59 Ha (4,55%). Selanjutnya, kecamatan yang memiliki potensi jasa lingkungan Tinggi adalah Kecamatan Blang Mangat dengan luasan 953,04 Ha (21,33%). Kecamatan yang memiliki potensi jasa ekosistem penyediaan pangan Rendah dan Sangat Rendah berdasarkan luas adalah Kecamatan Muara Dua, yakni 1.762,00 Ha (58,22%) dan Banda Sakti 840,20 Ha (76,20%) dari luas wilayah kecamatannya.

Berdasarkan arahan rencana pola ruang Kawasan Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan di Kota Lhokseumawe dengan luas ±927,09 Ha terletak di kecamatan: (1) Blang Mangat ±610,56 Ha, (2) Muara Satu dengan luas ±256,11 Ha dan (3) Muara Dua dengan luas ±60,42 Ha. Begitupula halnya dengan rencana pola ruang kawasan perkebunan rakyat seluas ±1.645 Ha yang diarahkan pada ketiga kecamatan tersebut dengan rincian di Kecamatan Blang Mangat berada pada 18 gampong, di Kecamatan Muara Satu berada pada 7 gampong dan di Kecamatan Muara Dua berada pada 12 gampong.

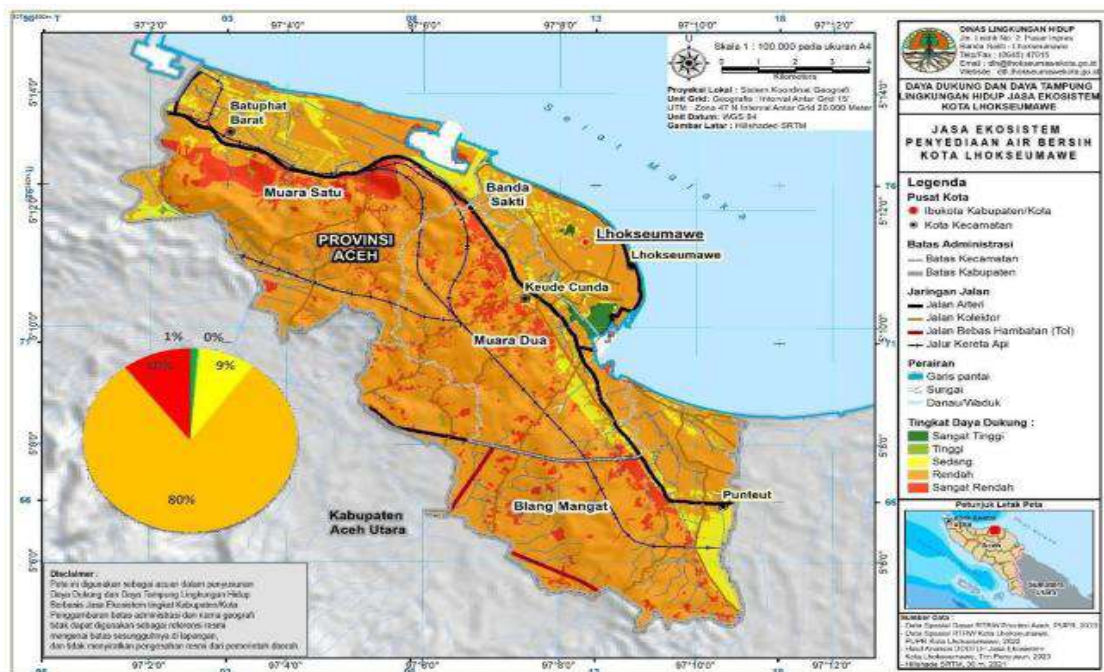
Berdasarkan hasil analisis DDDT LH jasa ekosistem penyediaan pangan, pengembangan kawasan pertanian disarankan untuk diarahkan pada Kecamatan Muara Satu, Muara Dua dan Blang Mangat karena potensi jasa ekosistem penyediaan pangan di wilayah tersebut kategori Sangat Tinggi dan Tinggi.Untuk wilayah dengan potensi jasa ekosistem penyediaan pangan karegori Rendah dan Sangat Rendah, yaitu Kecamatan Banda Sakti perlu melakukan langkah-langkah intensifikasi lahan pertanian dan diversifikasi pangan.

2.1.1.4.2 Daya Dukung Air

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih yang berasal dari air permukaan maupun air tanah bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti ekoregion bentanglahan. Ketersediaan air bersih di suatu wilayah bergantung kepada pasokan dan cadangan air tanah dan permukaan. Karakteristik tanah mempengaruhi kemampuan untuk menyerap dan mengalirkan air. Jenis batuan tiap ekoregion Kota Lhokseumawe akan menggambarkan potensi akuifer atau impermeable layer. Hal ini berpengaruh untuk penyerapan air hujan ke dalam tanah.

Ekoregion Kota Lhokseumawe yang berupa lembah antar perbukitan (8%), dataran aluvial (17%), dataran fluviomarin (19%) merupakan ekosistem yang potensial sebagai jasa penyedia air bersih. Lembah antar perbukitan/pegunungan lipatan menyediakan air bersih melalui sungai-sungai yang berasal dari lembah lipatan. Sementara dataran aluvial memiliki sistem akuifer yang baik, di mana air hujan atau air sungai menembus lapisan sedimen dan tersimpan sebagai cadangan air tanah sehingga dataran aluvial menjadi sumber air yang penting bagi kegiatan pertanian dan perkebunan, pemukiman, dan konsumsi manusia. Hujan yang tercurah di Kota Lhokseumawe ditampung dalam Cekungan Air Tanah, yang menjadi potensi sumber air paling utama yang airnya mengalir sepanjang tahun dan memenuhi sumur bor penduduk. Potensi jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kota Lhokseumawe digambarkan pada peta di bawah ini.

Gambar 2.6
Peta Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih Kota Lhokseumawe



Sumber : KLHS RPJMK Lhokseumawe, 2026



Potensi jasa ekosistem penyediaan air bersih di Kota Lhokseumawe terdistribusi dari kategori Sangat Rendah sampai Sangat Tinggi. Jasa penyediaan air bersih yang Sangat Tinggi (hijau tua) berada pada wilayah pesisir dengan penggunaan lahan berupa waduk, kolam, sungai, saluran air, kuala/laguna dan empang dengan vegetasi alami berupa hutan pantai, hutan terna air tawar dan hutan terna tepian sungai payau. Sedangkan jasa ekosistem penyediaan air bersih Sangat Rendah (merah) berada pada kawasan peralihan fluvioarin dengan penggunaan lahan dominan berupa permukiman, lahan terbangun non-permukiman, lahan terbuka dan semak belukar dengan vegetasi hutan dipterokarpa pamah. Pada peta juga dapat dilihat bahwa jasa ekosistem penyediaan air bersih yang dominan adalah kategori Rendah (jingga) yang berada pada bentang lahan perbukitan lipatan dan dataran fluvio-marin, penggunaan lahan berupa semak belukar dan vegetasi hutan dipterokarpa pamah dan non- pamah. Kategori Rendah ini tersebar hampir di seluruh kecamatan di Kota Lhokseumawe. Luas jasa penyediaan air bersih perkecamatan di Kota Lhokseumawe disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Luas Jasa Penyediaan Air Bersih Per Kecamatan
Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Jasa Penyediaan Air Bersih (Ha)					Luas (Ha)
	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
Banda Sakti	94,06	1,02	163,69	807,72	36,21	1.102,69
Blang Mangat	2,87	6,32	315,83	3.786,03	357,31	4.468,35
Muara Dua	27,04	11,67	185,45	2.445,93	356,31	3.026,41
Muara Satu	22,55	23,16	477,69	3.543,33	636,18	4.702,91
Lhokseumawe	146,51	42,17	1.142,66	10.583,01	1.386,01	13.300,36

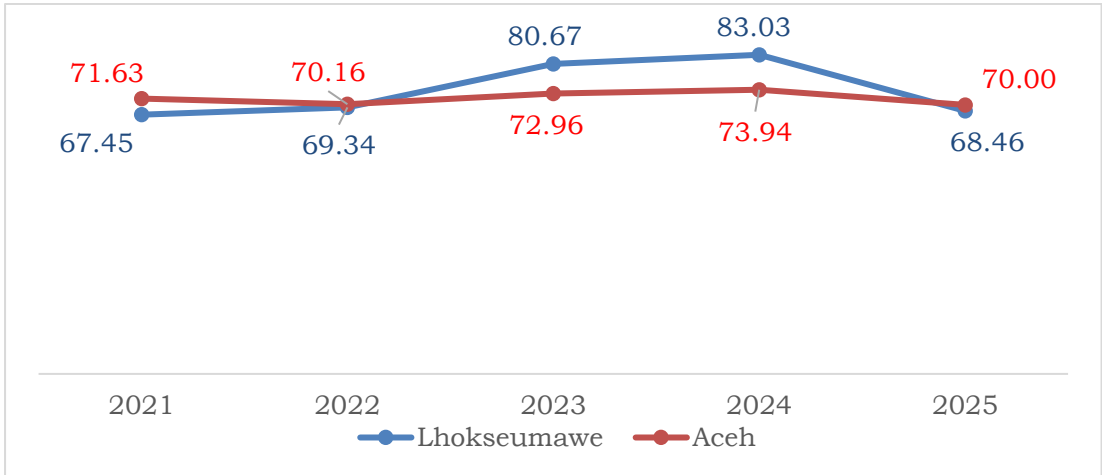
Sumber : KLHS RPJMK Lhokseumawe, 2026

Tabel diatas memberikan informasi bahwa jasa ekosistem penyediaan air bersih yang tergolong Sangat Tinggi seluas 146,51 Ha (1,10%), Tinggi seluas 42,13 Ha (0,32 %), dan Sedang seluas 1.142,66 Ha (8,59%) dari total luas Kota Lhokseumawe. Sementara sisanya tergolong ke dalam jasa penyediaan air bersih Rendah seluas 10.583,01 Ha (45,06 %) dan Sangat Rendah seluas 1.384,19 Ha (30,10%). Jasa penyediaan air kategori Sangat Tinggi seluas 94,06 Ha (8,53%) terbesar berada di Kecamatan Banda Sakti dengan penggunaan lahan waduk dan saluran air. Sementara jasa penyediaan air kategori Tinggi seluas 23,16 Ha (0,49%) terbesar berada di Kecamatan Muara Satu, namun potensi jasa ekosistem penyedia air kategori Sangat Rendah dengan luasan mencapai 636,18 Ha (13,53%) juga berada di kecamatan Muara Satu, terutama pada lahan dengan penggunaan berupa permukiman kepadatan tinggi dan lahan terbuka. Kecamatan yang memiliki potensi jasa ekosistem penyediaan air bersih Rendah berdasarkan luas adalah Kecamatan Blang Mangat mencapai 3.786,03 Ha (84,73%) dari luas wilayahnya.

2.1.1.5 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
2.1.1.5.1 Indeks Ketahanan Pangan

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Gambar 2.7
Indeks Ketahanan Pangan Aceh dan Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025



Sumber: DKPPP Lhokseumawe, 2026

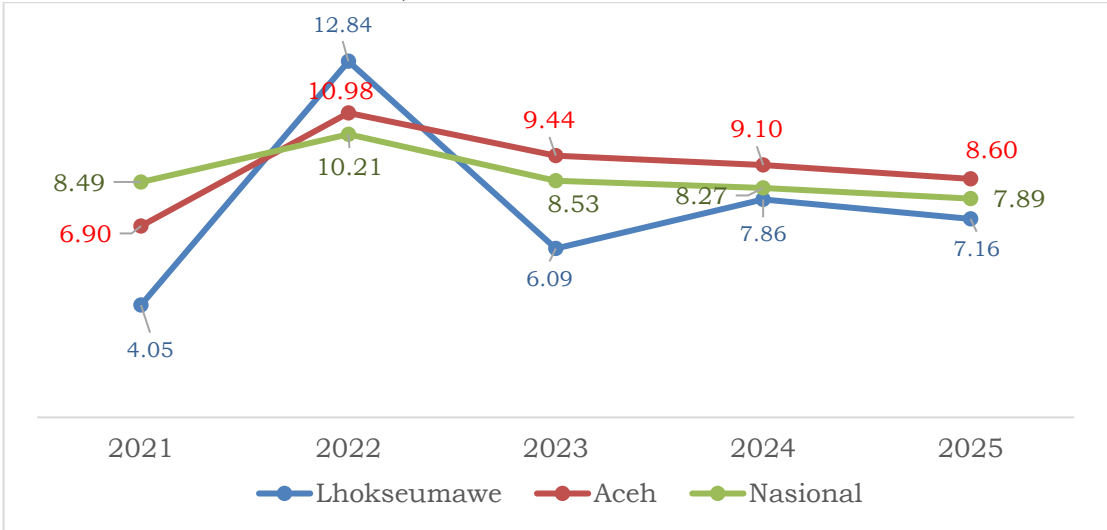
Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 sebesar 83.03, angka ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021-2024, dan menjadi Indeks Ketahanan Pangan tertinggi selama 4 tahun terakhir. Meningkatnya Angka Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe dikarenakan aspek ketersediaan yaitu meningkatnya produksi komoditas khususnya padi. Namun Tahun 2025 Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe mengalami penurunan yang drastis menjadi 68,46 dikarenakan indeks ketersediaan mengalami penurunan. Indeks Ketahanan Pangan Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 sebesar 67.45 berada dibawah IKP Aceh sebesar 71.63. Sedangkan tahun 2023-2024 IKP Kota Lhokseumawe meningkat dan berada di atas IKP Aceh tahun 2025 kembali berada dibawah IKP Aceh.

2.1.1.5.2 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau PoU adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, di mana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Pada gambar berikut dapat dilihat prevelinsi ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional tahun 2021-2025.



Gambar 2.8
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan
Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Nasional, 2026

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau PoU Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 sebesar 4.05 persen berada dibawah Aceh sebesar 6.90 dan Nasional sebesar 8.49 dan pada tahun 2022 Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau PoU Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan menjadi 12.84 persen dan masih di atas Aceh yang sebesar 10,98 persen dan Nasional sebesar 10,21 persen. Namun Tahun 2023-2025 Prevelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Kota Lhokseumawe terus mengalami penurunan. Tahun 2025 menjadi sebesar 7.16 persen.

2.1.1.5.3 Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan. Sumber air yang digunakan oleh masyarakat Kota Lhokseumawe bersumber dari PDAM Ie Beusare Rata Lhokseumawe, PDAM Tirta Mon Pase milik Aceh Utara, air sumur dalam terlindungi maupun sumur gali dan sumur bor.

Tabel 2.8
Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga terhadap Konsumsi
Air Minum Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pelanggan PDAM Ie Beusare Rata	1.954	2.419	2.350	2.349	2.349
2	Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Mon Pase	4.942	4.848	4.936	5.023	4.909
3	Sumur dalam terlindungi	148	148	148	538	1.028
4	Pamsimas	0	0	0	49	0
5	Jumlah Rumah Tangga	42.354	43.930	45.504	46.315	46.778
Persentase		16.63	16.88	16.34	16.42	17.71

Sumber : PUPR Kota Lhokseumawe, 2026



Persentase jumlah rumah tangga terhadap konsumsi air minum Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2023 masih stagna di 16 persen, hal ini di karenakan Kota Lhokseumawe yang tidak memiliki sumber air baku. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih Kota Lhokseumawe juga melakukan penyediaan Air Minum melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/sumur dalam terlindungi/sumur pompa yang diakses melalui perpipaan sambungan rumah yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.

Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan penyediaan SPAM secara optimal dalam hal ini PDAM Ie Besare Rata bekerjasama dengan PT Toya Perdana Lhokseumawe membangun proyek jaringan SPAM yang menggunakan teknologi pengolahan air minum yang aman dikonsumsi langsung baik bagi kesehatan keluarga dan ramah lingkungan. Proyek SPAM Lhokseumawe diharapkan menjadi pionir dalam pengembangan dan penyediaan solusi infrastruktur air minum berkualitas tinggi yang unggul dan berkelanjutan dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan.

Jaringan SPAM Siap Minum Kota Lhokseumawe dengan target pelanggan sebanyak 22.137 pelanggan domestik dan non domestik, yang pada tahun pertama dengan target sebanyak 7.884 pelanggan, tahun kedua dengan target 7.051 pelanggan dan tahun ketiga sebanyak 7.202 pelanggan dengan area pelayanan di 4 (empat) kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.9
Tahapan Area Pelayanan Jaringan Perpipaan Siap Minum
Kota Lhokseumawe

Kecamatan	Total Property Area Layanan	Tahap 1		Tahap 2		Tahap 3	
		Domestik	Non Domes tik	Domestik	Non Domes tik	Domestik	Non Domes tik
Banda Sakti	10.113	5.783	2.101	1.158	1.071	-	-
Blang Mangat	1.666	-	-	-	-	1.467	199
Muara Dua	5.177	-	-	3.934	888	231	124
Muara Satu	5.181	-	-	-	-	3.454	1.727
Total	22.137	5.783	2.101	5.092	1.959	5.152	2.050
			7.884		7.051		7.202

Sumber : PT. Aceh Water, 2026

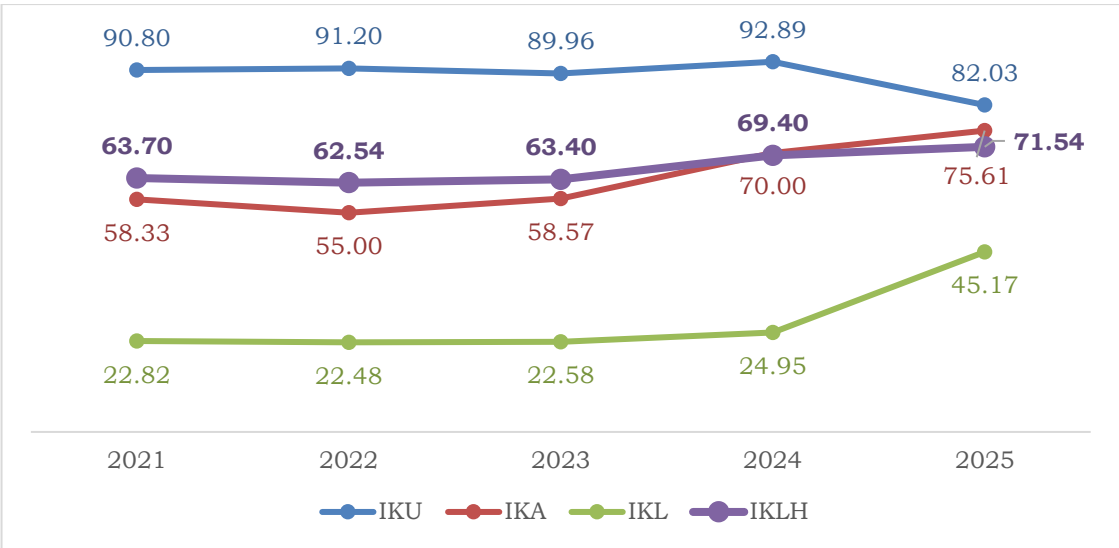
2.1.1.6 Lingkungan Hidup Berkualitas
2.1.1.6.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.



Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Indeks kualitas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar di bawah:

Gambar 2.9
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKLH)
Tahun 2021-2025

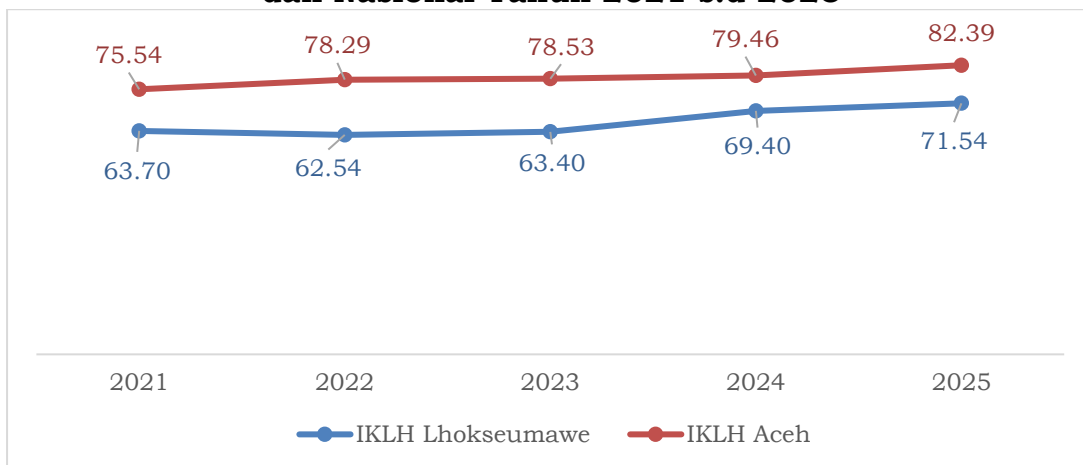


Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2026

Dari Gambar di atas Indeks kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2021 sebesar 63.70. Pada tahun 2022 sedikit menurun menjadi 62.54 dan tahun 2025 meningkat menjadi 71.54. Indeks Kualitas Udara Lhokseumawe sebesar 90.80 tahun 2021, pada Tahun 2025 menurun menjadi 82.03. Untuk Indeks Kualitas Air pada Tahun 2021 sebesar 58.33 dan tahun 2025 meningkat menjadi sebesar 75.61. Sedangkan Indeks Kualitas Lahan Lhokseumawe sebesar 22.82 pada tahun 2021. Dan meningkat menjadi 45.17 di Tahun 2025.

Perkembangan negatif dari Indeks kualitas lahan Kota Lhokseumawe terjadi karena luasan tutupan lahan Kota Lhokseumawe yang mengalami pengurangan dalam dokumen RTRW Lhokseumawe 2024-2044. Faktor yang menyebabkan Kota Lhokseumawe mengalami degradasi kualitas lahan adalah perubahan penggunaan lahan dari hutan atau pertanian menjadi area terbangun, penggundulan hutan atau perkebunan/pertanian untuk keperluan pertambangan, abrasi tanah, pencemaran tanah dan perubahan iklim.

Gambar 2.10
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, Aceh
dan Nasional Tahun 2021 s.d 2025



Sumber: DLHK Aceh, 2026

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2021 sebesar 63.70 berada jauh dibawah IKLH Aceh sebesar 78,29. IKLH Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 terus mengalami peningkatan dan menjadi 71.54 pada tahun 2025 namun masih berada dibawah IKLH Aceh sebesar 82.39.

2.1.1.6.2 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah menunjukkan persentase sampah yang berhasil diolah dan dimanfaatkan kembali, sedangkan sampah yang tidak terolah menunjukkan sampah yang tidak dapat diolah dan memerlukan pembuangan akhir. Sampah terolah dapat berupa hasil daur ulang, kompos, atau energi dari sampah.

Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe masih memerlukan perhatian khusus dikarenakan TPA Alue Lim yang terletak di gampong Alue Lim Kecamatan Blang Mangat menjadi tempat pembuangan akhir sampah di Kota Lhokseumawe masih dengan sistem *open dumping*, telah mendapat peringatan untuk ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Lhokseumawe dan mencegah ditutupnya TPA Alue Lim, pada tahun 2025 melalui pendanaan yang bersumber dari Otonomi Khusus Aceh Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan pengadaan 1 paket Pengadaan Mesin Pengolahan Sampah menjadi Energy Terbarukan yang diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah di fasilitas pengolahan sampah dan dapat menciptakan nilai tambah dari barang yang tidak berguna menjadi energy terbarukan.

Menangani sampah memerlukan upaya kolaboratif dan berkelanjutan. Pemerintah Kota perlu memperkuat infrastruktur (armada, TPS, TPA yang dikelola baik), menegakkan regulasi (Qanun No. 9 Tahun 2015), dan terus menggalakkan edukasi. Namun, peran aktif masyarakat adalah kunci: memilah sampah dari rumah, tidak membuang sampah sembarangan, dan berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah seperti Bank Sampah. Dengan fokus pada transformasi tata kelola, peningkatan kesadaran lingkungan,



pembangunan berkelanjutan, dan penegakan hukum, Kota Lhokseumawe berupaya mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.

2.1.1.6.3 Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Layanan penuh pengelolaan sampah mencakup semua aspek pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengolahan, hingga pembuangan akhir, dengan tujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Layanan ini juga mencakup upaya untuk mengubah sampah menjadi sumber daya yang bermanfaat, seperti kompos atau energi. Kondisi sistem pengelolaan persampahan di Kota Lhokseumawe masih dengan paradigma klasik yaitu kumpul, angkut dan buang dan bahkan ada sebagian yang dibakar di lingkungan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu dan dinamika pembangunan dan pertumbuhan penduduk diharapkan pengelolaan persampahan secara terpadu akan lebih optimal. Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA di Kota Lhokseumawe berada pada Gampong Alue Lim masih dioperasikan secara *open dumping*, perlu dukungan semua unsur dan kalangan untuk ditingkatkan menjadi *sanitary landfill* atau melalui pengelolaan sampah menjadi energy yang terbarukan. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah Kota Lhokseumawe sebagai berikut.

Tabel 2.10
Proporsi rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Rumah Tangga yang dilayani	400	410	415	425	430
2	Jumlah Rumah Tangga	42.354	43.930	45.504	46.315	46.778
3	Proporsi RT dengan layanan penuh pengumpulan sampah (%)	0.94	0.93	0.91	0.92	0.92

Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2026

2.1.1.6.4 Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman

Cakupan layanan sanitasi ini terbagi sesuai dengan kondisi akses layanan sanitasi. Akses sanitasi terbagi menjadi tiga jenis yaitu akses sanitasi dasar, akses sanitasi layak dan akses sanitasi aman. Akses sanitasi dasar merupakan sarana pengolahan air buangan yang masih bersifat tradisional atau sederhana. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta pembuangan akhir tinja berupa tangka septik atau IPAL. Sedangkan akses sanitasi aman adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki rumah tangga, yang terhubung dengan septic tank. Akses sanitasi yang masuk kategori aman ini umumnya disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke instalasi pengolahan tinja atau IPLT. Dari hasil pendataan didapatkan jumlah capaian sanitasi berdasarkan akses layanan sebagai berikut.



Tabel 2.11
Cakupan Layanan Sanitasi Berdasarkan Akses Layanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

Akses Layanan	Satuan	Capaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
Akses Aman	%	7.34	7.06	8.36	9.43	9.43
	RT	3.110	3.102	3.802	4.367	4.411
Akses Layak Tidak Termasuk Aman	%	85.76	83.21	82.01	84.28	84.28
	RT	36.321	36.554	37.316	39.033	39.423
Akses Belum Layak	%	3.80	6.64	6.38	3.40	3.70
	RT	1.611	2.918	2.904	1.573	1.709
Tidak Ada Akses	%	3.10	3.09	3.26	2.90	2.60
	RT	1.312	1.356	1.482	1.342	1.235
Jumlah Cakupan Layanan	%	100	100	100	100	100
Sanitasi	RT	42.354	43.930	45.504	46.315	46.778

Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Dari data diatas, terlihat bahwa masih terdapat akses sanitasi yang belum layak dari tahun 2021, namun terlihat menurun sampai dengan tahun 2024. Namun 2025 mengalami sedikit peningkatan akses belum layak. Akses sanitasi yang dikatakan belum layak ini apabila bagian bawah bangunan sanitasi merupakan lubang tanah, dan kloset masih menggunakan plengsengan dengan atau tanpa tutup. Secara umum, cakupan layanan sanitasi di Kota Lhokseumawe sebagian besar sudah dalam kondisi layak. Namun, jumlah akses sanitasi yang layak tetapi tidak termasuk aman masih mendominasi, hal ini dikarenakan rumah tangga yang tidak rutin melakukan penyedotan dan tidak dibuang ke instalasi pengolah tinja (IPLT).

2.1.1.7 Resilensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
2.1.1.7.1 Indeks Risiko Bencana

Secara keseluruhan potensi bahaya di Kota Lhokseumawe diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12
Kelas Jenis Bahaya Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

Jenis Bencana	Bahaya	
	Total Luas	Kelas
Banjir	6,784.38	Tinggi
Cuaca Ekstrim	13,914.45	Tinggi
Gelombang Ekstrim dan Abrasi	136.44	Tinggi
Gempa Bumi	13,937.04	Sedang
Kebakaran Hutan dan Lahan	855.18	Tinggi
Kekeringan	13,937.04	Rendah
Longsor	231.84	Sedang
Tsunami	207.80	Sedang

Sumber : BPBD Kota Lhokseumawe, 2026

Tabel di atas menunjukkan secara keseluruhan potensi bahaya di Kota Lhokseumawe memiliki tingkat bahaya tinggi, sedang dan tinggi. Adapun potensi bencana dengan tingkat bahaya rendah adalah kekeringan, potensi bencana dengan tingkat bahaya sedang adalah



gempa bumi, longsor, dan tsunami. Sedangkan potensi bencana dengan tingkat bahaya tinggi adalah banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan.

Pada bulan November 2025, bencana hidrometeorologi melanda propinsi Aceh termasuk Kota Lhokseumawe dari 18 Kabupaten/Kota yang mengeluarkan penetapan status tanggap darurat Bencana Alam akibat banjir, tanah longsor dan angin kencang. Bencana tersebut menimbulkan dampak besar terhadap keselamatan masyarakat, terganggunya aktivitas sosial-ekonomi serta kerusakan pada infrastruktur dasar.

Jumlah penduduk yang terdampak tercatat sebanyak 100.519 jiwa, dengan 19.577 jiwa diantaranya terpaksa mengungsi. Korban jiwa akibat bencana meliputi 5 (lima) orang meninggal dunia dan 4 (empat) orang mengalami luka ringan. Dari segi infrastruktur, banjir mengakibatkan kerusakan pada 16 unit jembatan, 33 ruas jalan, 73 ruas jalan lingkungan serta 20 ruas drainase jalan. Selain itu 3 lokasi daerah irigasi, 3 unit terminal dan 1 unit dermaga (tambatan perahu) juga terdampak.

Kerusakan perumahan mencapai 1.362 unit rumah, yang terdiri atas 1.198 rumah rusak sedang, 141 rumah rusak berat dan 23 rumah rusak ringan. Tidak hanya itu, banjir juga menyebabkan terganggunya fasilitas umum dan pelayanan publik yaitu 56 fasilitas kesehatan, 53 sekolah, 28 kantor pemerintah serta 5 unit mesjid sehingga aktivitas sosial, ekonomi dan pelayanan masyarakat juga terdampak.

Menurut data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) untuk Kota Lhokseumawe tahun 2021-2022 menunjukkan kecenderungan menurun dari 130,11 (tinggi) di tahun 2021 menjadi 128.61 (sedang) di tahun 2022. Pada tahun 2024 IRB Kota Lhokseumawe sedikit meningkat menjadi 136,99 dan tahun 2025 meningkat kembali menjadi 168,97 (tinggi) hal ini ditandai dengan menurunnya Indeks Ketahanan Daerah. Nilai IRB pada Tahun 2025 dihitung menggunakan *baseline* yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode 2015-2024. Berikut series data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRB) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.

Tabel 2.13
Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025

No	Kab/Kota	Tahun					Kelas Risiko
		2021	2022	2023	2024	2025	
1	Lhokseumawe	130.11	128.61	134.83	136.99	168,97	Tinggi
2	Aceh	149.99	149.10	146.90	144.29	192,75	Tinggi
3	Nasional	138.81	135.56	132.25	128.50	147.95	Sedang

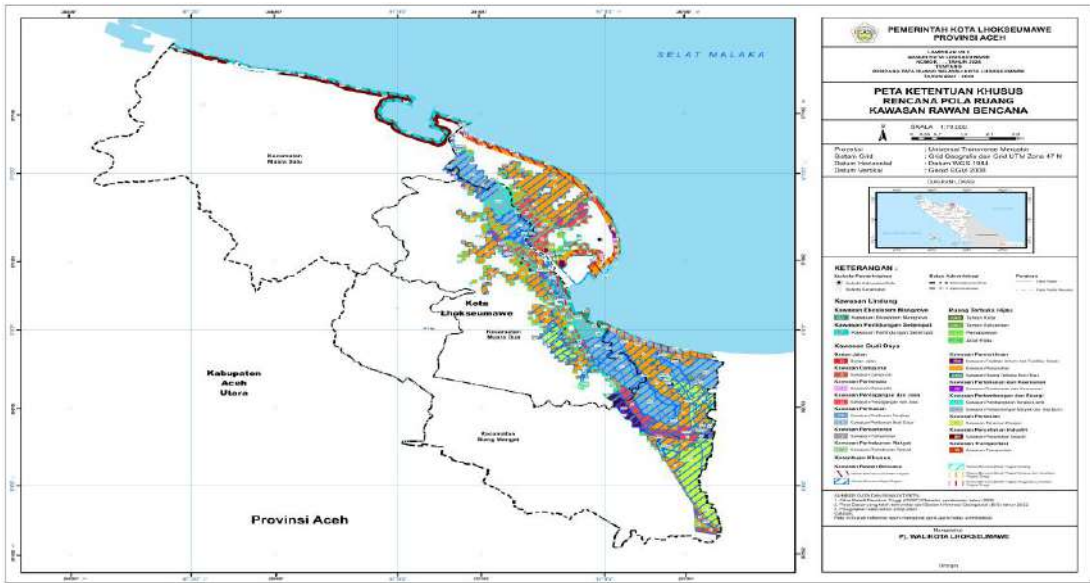
Sumber: <https://inarisk.bnppb.go.id/irbi>

IRB Kota Lhokseumawe 2021-2025 berada di bawah IRB Aceh dan Nasional. Namun tahun 2023-2024 IRB Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan walaupun masih berda di bawah Aceh dan di atas Nasional. Potensi bencana di Kota Lhokseumawe teridentifikasi pada 4 Kecamatan, baik bencana banjir, gelombang ekstrim dan



abrasi, serta tsunami. Sedangkan bahaya kebakaran hutan dan lahan teridentifikasi di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Blang Mangat dan Kecamatan Muara Satu serta tanah longsor teridentifikasi di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Muara Satu.

Gambar 2.11
Peta Kawasan Rawan Bencana Kota Lhokseumawe

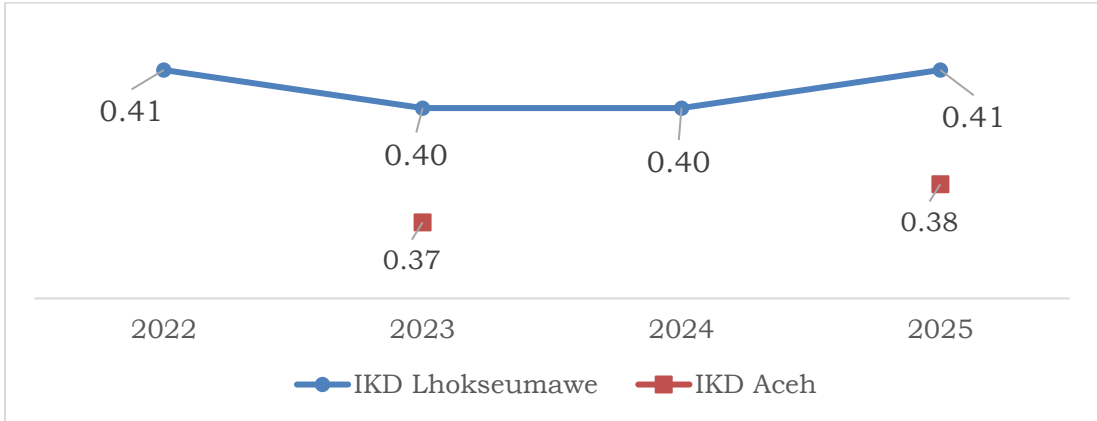


Sumber: RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2044

2.1.1.7.2 Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah dihitung berdasarkan 7 prioritas, yakni: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik Kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. IKD Kota Lhokseumawe menunjukkan tren positif yaitu sebesar 0,41 pada tahun 2022 menjadi 0,40 pada tahun 2024, namun tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 0.41. Indeks Ketahanan Daerah Kota Lhokseumawe berada di atas IKD Aceh,

Gambar 2.12
Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2025



Sumber: BNPB, 2026



2.1.1.8 Demografi

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dari pembangunan yang sangat penting bagi rencana-rencana seperti permintaan akan barang dan jasa pelayanan serta kebutuhan akan lahan di masa yang akan datang.

2.1.1.8.1 Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, di samping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan
Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Banda Sakti	77.985	78.256	79.850	80.672	81.138
2	Muara Dua	51.472	52.079	53.068	53.764	54.586
3	Blang Mangat	26.559	26.992	28.146	28.775	29.286
4	Muara Satu	33.925	34.069	35.003	35.494	35.866
		189.941	191.396	196.067	198.705	200.876

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe 2026

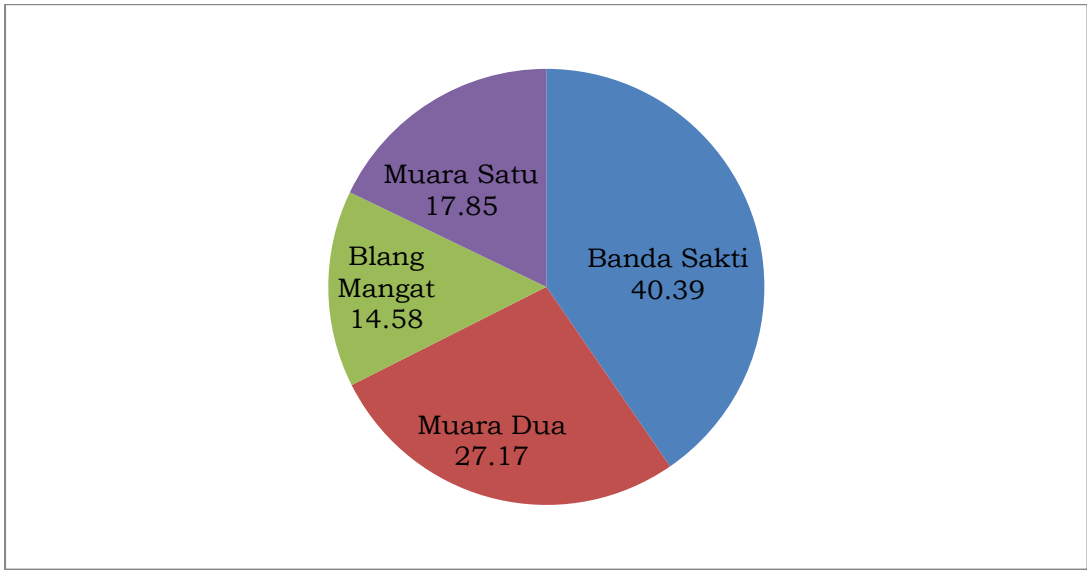
Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2021-2025 memilik kecenderungan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Kota Lhokseumawe sebanyak 189.941 jiwa menjadi 200.876 jiwa di tahun 2025. Pertambahan jumlah penduduk tahun 2025 disebabkan karena adanya kelahiran, kematian dan pindah datang penduduk.

2.1.1.8.2 Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Selain menjadi Kecamatan dengan luas wilayah terkecil di Kota Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti dari tahun ke tahun merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak, yaitu sebanyak 81.138 jiwa pada tahun 2025. Kebalikan dengan Kecamatan Blang Mangat selain menjadi wilayah terbesar ke dua di Kota Lhokseumawe juga merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit dengan jumlah sebanyak 29.286 jiwa pada tahun 2025.



Gambar 2.13
Grafik Distribusi Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan Tahun 2025



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe 2026

Distribusi penduduk Kota Lhokseumawe paling tinggi di wilayah Kecamatan Banda Sakti yaitu sebesar 40.39%, selanjutnya di ikuti kecamatan Muara Dua sebesar 27.17%, Kecamatan Muara Satu sebesar 17.85% dan yang paling erndah adalah di wilayah Kecamatan Blang Mangat. Kepadatan penduduk digunakan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah penduduk per satuan luas wilayah. Pada tahun 2025, Kecamatan dengan penduduk terpadat di Kota Lhokseumawe adalah Kecamatan Banda Sakti dengan jumlah 7.219 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan dengan penduduk terlenggang adalah Kecamatan Blang Mangat dengan angka kepadatan sebesar 522 Jiwa/km². Kepadatan penduduk Kota Lhokseumawe di Tahun 2025 ini sedikit mengalami peningkatan menjadi 1.109 jiwa/km², hal ini dipengaruhi adanya mobilisasi penduduk seperti kematian dan perpindahan penduduk.

Tabel 2.15
Kepadatan Penduduk Kota Lhokseumawe per Kecamatan Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Banda Sakti	6.938	6.962	7.104	7.177	7.219
2	Muara Dua	891	901	918	930	944
3	Blang Mangat	473	481	502	513	522
4	Muara Satu	607	609	626	632	642
Lhokseumawe		1.161	1.057	1.083	1.097	1.109

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe 2026

2.1.1.8.3 Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah



penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas pelayanan publik dan sebagainya. Secara umum, jumlah penduduk di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Tabel 2.16
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Laju							
1	Pertumbuhan Penduduk	%	1.42	0.77	1.66	1.3	1.09

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe 2026

Laju pertumbuhan penduduk tahun kurun waktu 2021-2025 menunjukkan angka dengan kecenderungan menurun. Pada 2021 laju pertumbuhan penduduk menunjukkan angka 1.42% kemudian terus menurun hingga tahun 2025 dengan laju pertumbuhan menjadi 1.09%. Pada tahun 2022 laju pertumbuhan mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,77%. Hal ini dikarenakan adanya proses mobilisasi penduduk, seperti lahir, mati, maupun perpindahan penduduk selama tahun 2022. Besaran laju pertumbuhan penduduk yang berada pada kategori $r>0$ menunjukan bahwa adanya penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Berikut detail data mutasi penduduk di wilayah Kota Lhokseumawe pada kurun waktu tahun 2021-2025.

Tabel 2.17
Mutasi Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Kategori Mutasi Penduduk	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Kelahiran	jiwa	4321	4.083	3.533	3.576	3.256
2	Kematian	jiwa	979*	867*	1.154*	1.162*	1.810*
3	Kedatangan	jiwa	4.518	3.552	5.563	4.949	6.544
4	Perpindahan	jiwa	7.857	4.525	6.395	5.659	7.190

Sumber: BPS dan Disducapil Kota Lhokseumawe, 2026

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2025 jumlah kelahiran sebanyak 3.256 jiwa. Selanjutnya jumlah kematian sebanyak 1.810 jiwa. Jumlah kematian penduduk berdasarkan jumlah akte kematian yang diterbitkan. Kemudian jumlah pendatang sebanyak 6.544 Jiwa serta jumlah yang pindah sebanyak 7.190 Jiwa.

2.1.1.8.4 Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio Jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator sex ratio berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil.

Tabel 2.18
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2021	94.303	95.638	189.941	99
2	2022	95.042	96.354	191.396	99
3	2023	97.339	98.728	196.067	98.59
4	2024	98.717	99.988	198.705	98.72
5	2025	99.106	100.465	200.876	98.66

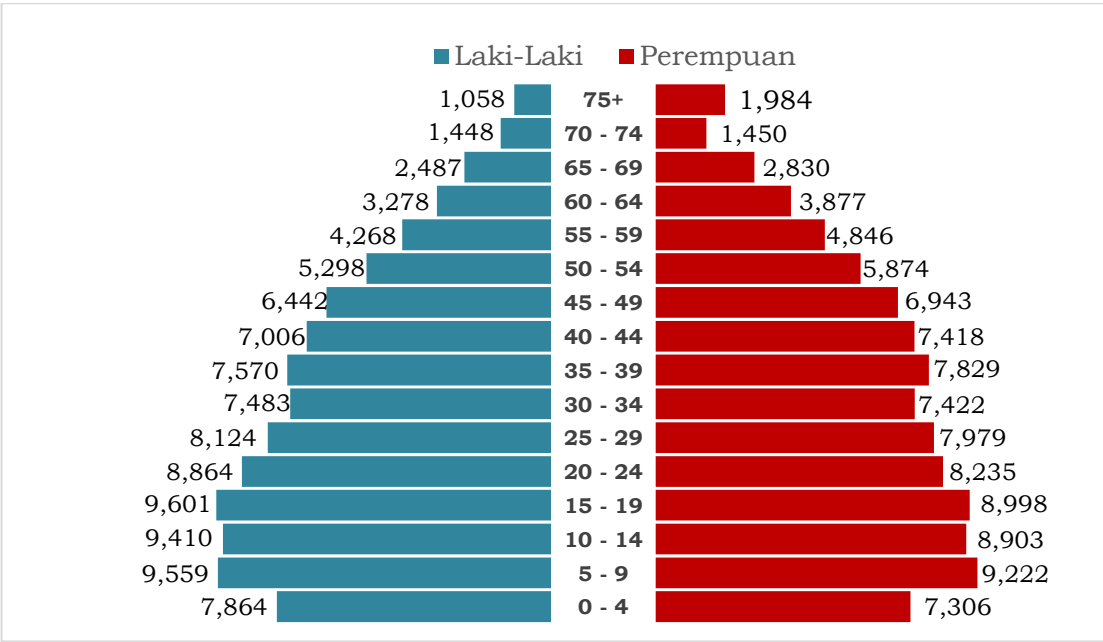
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe 2026

Secara umum dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2022, besaran nilai sex ratio di Kota Lhokseumawe menunjukkan angka tetap 99. Hal ini dipengaruhi penduduk dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan seimbang kenaikannya, sehingga mempengaruhi sex rasionya. Pada tahun 2025, angka sex ratio menunjukkan angka 98.66, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Hal ini menunjukkan selisih antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seimbang.

2.1.1.8.5 Penduduk Menurut Kelompok Umur

Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Kota Lhokseumawe memiliki struktur piramida yang berbentuk ekspansif, 33etika terdapat dominasi jumlah penduduk usia muda (pelajar) dan usia produktif. Pada grafik tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat dominasi jumlah penduduk oleh kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah total sebesar 18.781 jiwa. Penduduk pada kelompok umur 5-9 tersebut memiliki komposisi jenis kelamin laki-laki sebesar 9.559 jiwa dan 33etika33an sebanyak 9.222 jiwa. Sedangkan kelompok umur dengan jumlah paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun yaitu sebesar 2.898 jiwa.

Gambar 2.14
Grafik Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2025

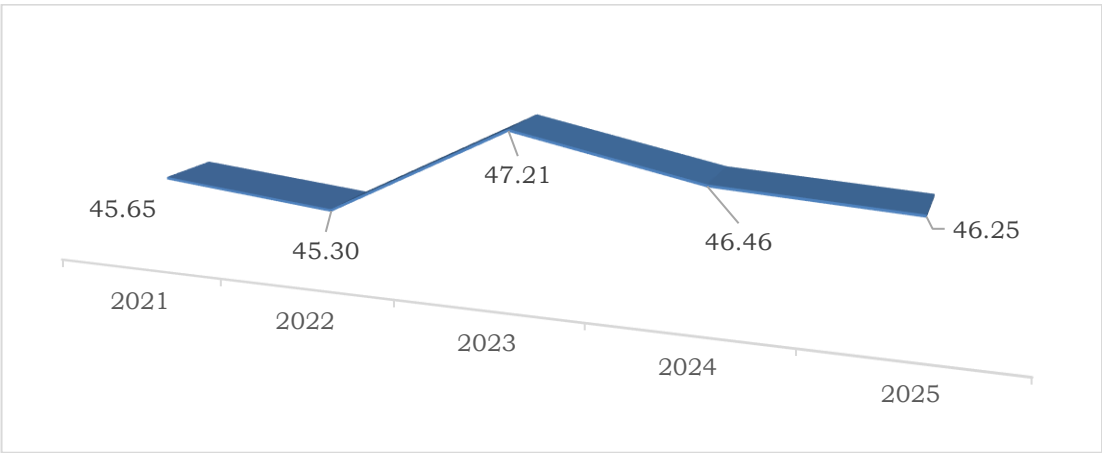


Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka Kota Lhokseumawe 2026

2.1.1.8.6 Angka Ketergantungan Penduduk

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15–64 tahun). Semakin tingginya *Persentase Dependency Ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus di tanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang tidak produktif.

Gambar 2.15
Angka Ketergantungan Penduduk Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2026

Dari gambar di atas dapat dilihat Angka ketergantungan penduduk Kota Lhokseumawe cenderung menurun pada tahun 2023-2025. Pada tahun 2025, angka ketergantungan penduduk Kota Lhokseumawe adalah sebesar 46.25 persen artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kota Lhokseumawe menanggung 46 orang usia tidak produktif. Semakin rendah angka ketergantungan maka semakin sedikit beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, yang mana kondisi ini sering kali menunjukkan potensi bonus demografi jika didukung oleh penyerapan tenaga kerja yang baik

2.1.1.8.7 Proyeksi dan Analisis Penduduk 5 (lima) Tahun kedepan

Proyeksi penduduk adalah suatu perkiraan jumlah penduduk berdasarkan metode tertentu dengan asumsi-asumsi kelahiran, kematian dan migrasi. Proyeksi penduduk dapat dikatakan sebagai perkiraan penduduk di masa depan berdasarkan kecenderungan saat ini dan masa lalu.

Kegunaan Proyeksi Penduduk dalam perencanaan diantaranya, proyeksi penduduk membantu dalam perencanaan penyediaan infrastruktur, seperti pendidikan dan kesehatan. Sebagai Kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan dan papan. Pemerintah memerlukan proyeksi penduduk untuk melihat jumlah penduduk di masa depan. Hal ini berguna supaya pemerintah dapat memperkirakan jumlah pangan, air dan perumahan yang dibutuhkan oleh penduduknya.



Tabel 2.19
Proyeksi Jumlah Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2030

No.	Uraian	Jumlah Penduduk 2023	Proyeksi Penduduk 2025	Proyeksi Penduduk 2030
1	Penduduk	197,35	203,41	217,83
2	- Laki-laki	98,03	101,08	108,27
3	- Perempuan	99,32	102,33	109,56
4	Sex Ratio Penduduk	98,7	98,8	98,8
5	Angka Ketergantungan	45,7	45,8	47,3
	- Usia 0-14	52,37	52,84	54,48
	- Usia 15-64	135,49	139,53	147,92
	- Usia 65+	9,51	11,06	15,45

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2026

Dari data di atas proyeksi penduduk di atas terlihat bahwa penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 6,06 ribu jiwa. Penambahan penduduk dipengaruhi oleh faktor fertilitas, mortalitas atau mobilitas. Untuk jumlah penduduk laki-laki lebih kecil dari pada jumlah penduduk perempuan. Untuk angka *sex Indonesia* tahun 2023 sebesar 98,7 dan naik di tahun 2025 dan 2030 menjadi sebesar 98,8. Bila dilihat dari rasio ketergantungan Kota Lhokseumawe untuk Tahun 2023 masih tinggi sebesar 45,7 persen ini artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif di Kota Lhokseumawe mempunyai beban tanggungan sebanyak 46 orang penduduk non produktif. Pada Tahun 2025 tidak mengalami perubahan yang signifikan dan tahun 2030 meningkat menjadi sebesar 47,3 persen.

Indonesia termasuk Aceh saat ini tengah menuju puncak bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2025 hingga tahun 2030, begitu juga untuk Kota Lhokseumawe puncak bonus demografi akan terjadi antara 2025 sampai dengan 2030. Bonus demografi adalah kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif (sekitar 15-64 tahun) dalam suatu negara lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia), bonus demografi bisa menjadi momentum untuk menjadikan Kota Lhokseumawe maju karena berbagai keuntungan yang bisa didapat, seperti dampak positif dari bonus demografi dinilai sebagai peluang besar dalam dunia industri, membuka peluang tenaga kerja yang berkompeten, membantu perkembangan ekonomi, ini artinya semakin banyak individu yang mendapatkan kesempatan kerja sehingga semakin banyak sumber daya manusia yang dimanfaatkan.

Dampak negatif dari bonus demografi bila tidak di persiapkan secara matang maka akan membludaknya angka pengangguran, kualitas dan kualifikasi SDM yang tidak seimbang jika pemerintah tidak menyediakan fasilitas untuk membentuk sumber daya manusia dengan baik.



2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, aspek pembangunan yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan analisis adalah mencakup aspek pemerataan ekonomi serta sosial budaya. Di bidang pembangunan perekonomian indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian diantaranya penilaian produk domestik regional bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, kemiskinan. Sedangkan indikator sosial budaya diantaranya usia harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah. Penjelasan terinci aspek kesejahteraan masyarakat akan diuraikan dalam sub bab berikut ini.

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.1.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah tersebut. Analisis pertumbuhan PDRB dapat menunjukkan kedudukan perekonomian wilayah beserta tingkat pertumbuhannya sehingga dapat diketahui perkiraan perkembangannya pada tahun-tahun mendatang. Analisis pertumbuhan PDRB ini dapat dianalisis berdasarkan nilai PDRB pada setiap tahunnya.

Analisis ekonomi suatu wilayah meliputi : PDRB harga konstan (riil) yang dapat dipergunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB harga berlaku (nominal) yang menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah, distribusi PDRB untuk menggambarkan struktur perekonomian atau menunjukkan peranan kategori ekonomi suatu wilayah, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku yang menunjukkan nilai PDB per satu orang penduduk dan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita.

Nilai PDRB menurut Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Lhokseumawe pada tahun 2025, nilai PDRB yang terbesar 3.017.433,3 juta rupiah atau sebesar 23,72% dari total PDRB Kota Lhokseumawe. Di posisi kedua, sektor Industri Pengolahan yang berkontribusi sebesar 2.000.470,2 juta rupiah atau 15,73% di tahun 2025. Selanjutnya, pada posisi ketiga adalah sektor konstruksi menghasilkan PDRB sebesar 12,96% atau 1.697.746,7 juta rupiah dari total PDRB. Nilai PDRB berdasar ADHB dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel 2.20
PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (dalam juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023r	2024*	2025**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	924,451.3	965,874.2	1,025,598.0	1,102,178.5	1,191,769.6
B	Pertambangan dan Penggalian	36,957.5	40,065.6	41,754.4	43,035.9	44,501.6



No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023r	2024*	2025**
C	Industri Pengolahan	1,793,400.5	2,002,471.4	2.023,961.6	1,978,225.7	2,000,470.2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,753.9	16,169.9	17,544.0	18,766.6	19,606.5
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,481.4	1,627.8	1,745.5	1,996.6	2,184.1
F	Konstruksi	1,364,872.5	1,454,765.8	1,487.217.80	1,535,276.1	1,697,746.7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,013,276.4	2,184,656.3	2.561,330.4	2,753,463.5	3,017,433.3
H	Transportasi dan Pergudangan	902,547.1	1,022,517.0	1.267,330.9	1,470,903.4	1,618,969.1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	168,466.8	225,635.0	256,396.8	272,390.8	305,003.7
J	Informasi dan Komunikasi	333,007.8	366,897.7	402,754.4	408,712.8	424,687.5
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	272,137.9	280,387.5	254,387.7	317,291.5	335,572.1
L	Real Estat	452,445.2	475,763.5	508.542.1	519,468.6	551,396.0
M,N	Jasa Perusahaan	94,894.3	112,782.7	116,063.5	122,623.4	125,093.1
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	441,252.7	434,765.4	476,478.0	534,641.4	570,088.2
P	Jasa Pendidikan	148,982.3	154,734.5	164.979.5	178,510.1	195,585.2
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	338,571.7	389,765.8	400,412.4	421,815.8	446,416.6
R,S,T,U	Jasa Lainnya	127,786.6	144,745.3	163,135.1	168,936.1	174,383.6
PDRB MIGAS		9.431.385.9	10.277.625.4	11.169.632.1	11,848,236.9	12,720,907.1
PDRB NONMIGAS		7.890.150.1	8.567.858.1	9.457.579.4	10,222,464.0	11,110,849.5

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2026

Pada kurun waktu lima tahun terakhir (2021-2025) kontribusi Kota Lhokseumawe terhadap PDRB ADHB Propinsi Aceh mengalami penurunan dikarenakan peningkatan PDRB Kota Lhokseumawe tidak signifikan dengan kenaikan PDRB Aceh dan pada tahun 2025 kontribusi PDRB Kota Lhokseumawe sebesar 4.94%.

Tabel 2.21
Kontribusi PDRB Kota Lhokseumawe terhadap PDRB Aceh
Tahun 2021-2025 (dalam milyar)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB Lhokseumawe	9.431,39	10.277,63	11.169,63	11.848,24	12.720,9
PDRB Aceh	184.979,88	209.698,36	227.018,20	243.202,09	257.502,43
% Kontribusi PDRB	5,10	4,90	4,92	4,87	4.94

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2026

PDRB berdasarkan harga konstan (penghitungan menggunakan tahun dasar 2010), secara umum menunjukkan peningkatan pada periode 2021-2025. Pada Tahun 2021 mencapai 7.252.904,8 juta rupiah dan pada Tahun 2025 mencapai sebesar 8.489.952,4 juta rupiah. Nilai PDRB 2025 tersebut mengalami peningkatan dari tahun



2021 sebesar 1.237.047,6 juta rupiah atau sebesar 17.05%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.22
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (dalam juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	612,746.7	602,948.8	608,700	645,707.9	632,670.8
B	Pertambangan dan Penggalian	30,187.3	30,287.3	31.400	32,160.6	31,856.4
C	Industri Pengolahan	1,331,428.6	1,368,986.0	1.387.500	1,395,382.7	1,419,185.9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,515.0	14,836.1	15,800	16,704.4	16,960.2
E	Pengadaan air, Pengelolaan sampah dan daur ulang	915.2	1,002.2	1.100	1,099.5	1,126.2
F	Konstruksi	1,027,310.5	1,034,763.4	1.034.400	1,065,356.5	1,059.426.6
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor	1,587,445.5	1,681,277.9	1.840.000	1,894.942.1	1,991,366.6
H	Transportasi dan Pergudangan	847,757.7	888,178.7	951.100	1,083,401.0	1,174,130.2
I	Penyediaan Makan Minum	105,493.3	136,910.3	150.400	152,782,7	163,598.3
J	Informasi dan Komunikasi	321,273.7	353,546.4	381.600	387,696.5	404,306.3
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	170,306.0	163,188.5	145.882.8	175,682.6	183,177.1
L	Real Estate	342,345.3	355,052.5	372,743.5	381,036.4	400,503.8
M,N	Jasa Perusahaan	72,728.7	80,328.5	80,134.5	84,720.6	84,647.7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	307,619.2	306.976.7	320,743.5	338,923.1	352,544.3
P	Jasa Pendidikan	101,178.7	104,154.5	109,056.6	113,782.7	119,884.8
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	280,925.5	310,034.7	310.956.3	318,085.2	327,800
R,S,TU	Jasa lainnya	98,727.8	111,265.5	119.524.4	123,966.6	126,700
PDRB MIGAS		7,252.904.8	7.543.739.1	7.861.007.8	8,211,431.4	8,489,952.4
PDRB NONMIGAS		6,069.121.6	6,330,756.6	6,635,158.4	6,987,695.5	7.253.172.2

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2026

Berdasarkan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010 Kota Lhokseumawe Tahun 2025, nilai PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda motor adalah yang terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu mencapai 1.991.366,6 juta rupiah atau sebesar 23.46%



dari total PDRB Kota Lhokseumawe. Di posisi kedua, sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 16,72% atau 1.419.185,9 juta rupiah di tahun 2025 Selanjutnya, sektor Transportasi dan Pergudangan menghasilkan PDRB sebesar 1.174.130,2 juta rupiah atau 13,83% dari total PDRB.

2.1.2.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun yang bersangkutan terhadap Tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Selama lima Tahun terakhir (2021-20254), pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe mengalami peningkatan dari waktu ke waktu namun Tahun 2025 Laju pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 diperlihatkan oleh gambar berikut:

Tabel 2.23
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Lapangan Usaha / Industry	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-1.65	-1.60	0.96	6.07	-2.02
B	Pertambangan dan Penggalian	7.10	0.33	3.79	2.31	-0.95
C	Industri Pengolahan	0.07	2.82	1.35	0.57	1.71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0.30	2.21	6.45	5.77	1.53
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2.32	9.51	6.33	3.18	2.42
F	Konstruksi	-1.82	0.73	-0.04	3.00	-0.56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.17	5.91	9.44	2.99	5.09
H	Transportasi dan Pergudangan	23.65	4.77	7.09	13.91	8.37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	-0.85	29.78	9.82	1.61	7.08
J	Informasi dan Komunikasi	6.98	10.05	7.93	1.60	4.28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-3.81	-4.18	-10.60	20.43	4.27
L	Real Estat	3.57	3.71	4.98	2.22	5.11
M,N	Jasa Perusahaan	0.83	10.45	-0.24	5.72	-0.09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	5.16	-0.21	4.48	5.67	4.02
P	Jasa Pendidikan	1.41	2.94	4.71	4.33	5.36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	9.52	10.36	0.30	2.29	3.06
R,S,T ,U	Jasa Lainnya	2.28	12.70	7.42	3.72	2.23
PDRB Migas		3.84	4.01	4.21	4.46	3.39
PDRB Tanpa MigasMigas		4.75	4.31	4.81	5.31	3.80

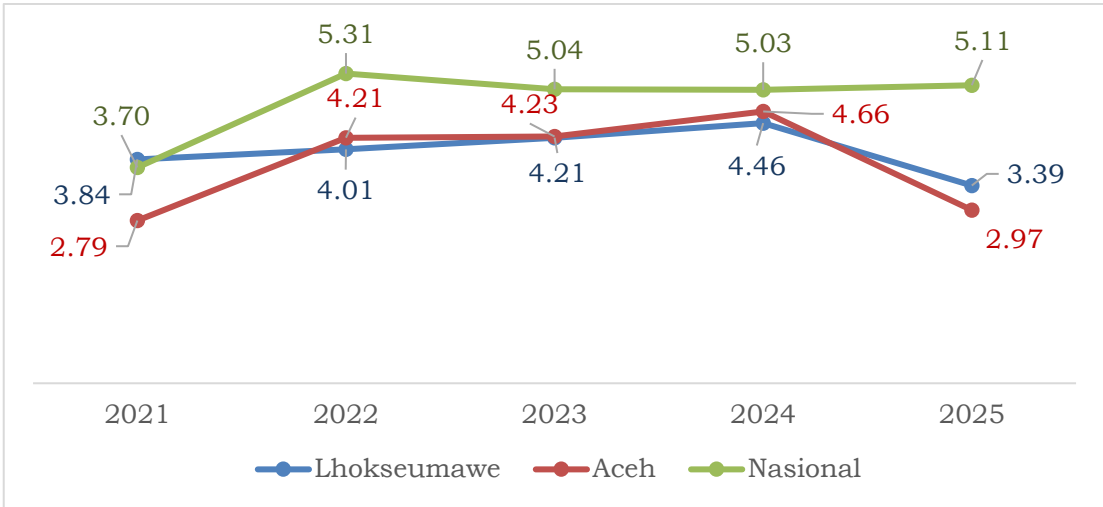
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2026



Pada tahun 2021 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah sektor transportasi dan pergudangan sebesar 23.65% sedangkan paling kecil adalah sektor Jasa keuangan dan Asuransi dengan laju pertumbuhan sebesar -3.81%. Selanjutnya pada tahun 2022 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam PDRB ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan yaitu sebesar 29.78% sedangkan yang paling kecil adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi dengan laju pertumbuhan sebesar -4.18%.

Kemudian pada tahun 2025 berdasarkan pertumbuhan sektoralnya, sektor dalam PDRB ADHK yang memiliki pertumbuhan paling besar adalah transportasi dan pergudangan sebesar 8.37%. Sedangkan, pertumbuhan sektoral paling kecil yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan laju pertumbuhan -2.02%. Jika dilihat secara keseluruhan pada pertumbuhan PDRB ADHK tahun 2025 hampir semua sektor mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 2.16
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber : BPS, 2026

Pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe pada tahun 2021 sebesar 3.84% berada di atas pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 2.79% dan pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 3.70%. Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2024 sebesar 4.46% namun masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 4.66% dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.03%. Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 3.39% berada diatas pertumbuhan ekonomi Aceh sebesar 2.97% dan dibawah pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5.11%. Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe tahun 2025 tumbuh melambat karena dampak dari bencana hidrometrologi yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan sehingga mobilitas barang dan orang terhambat, perdagangan lesu dan daya beli masyarakat melemah. Selain itu investasi dan belanja pemerintah melambat tercermin dari sektor kontruksi tumbuh terbatas, ditambah realisasi belanja modal APBK



menurun akibat efisiensi anggaran dan transisi pemerintahan baru di awal 2025.

2.1.2.1.3 Distribusi Persentase PDRB

Pada kurun waktu 2021-2025, dominasi sektor terkait kontribusinya terhadap PDRB tetap pada urutan pertama adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada posisi kedua penyumbang PDRB Kota Lhokseumawe adalah Industri pengolahan dan disusul oleh sektor kontruksi di posisi ketiga.

Dilihat dari PDRB ADHB, terjadi kecenderungan penurunan di sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor walaupun berada pada urutan pertama penyumbang PDRB Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2021 kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21.35% dan mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 23.72%. Namun untuk sektor Industri pengolahan pada tahun 2021 sebesar 19.02% dan mengalami penurunan menjadi 15.73 pada tahun 2025. Distribusi persentase PDRB ADHB Kota Lhokseumawe menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 dapat dicermati pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Lapangan Usaha / Industry	2021	2022	2023	2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan,	9.80	9.40	9.18	9.30	9.37
B	Pertambangan dan Penggalian	0.39	0.39	0.37	0.36	0.35
C	Industri Pengolahan	19.02	19.48	18.12	16.70	15.73
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
F	Konstruksi	14.47	14.15	13.31	12.96	13.35
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21.35	21.26	22.93	23.24	23.72
H	Transportasi dan Pergudangan	9.57	9.95	11.35	12.41	12.73
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.79	2.20	2.30	2.30	2.40
J	Informasi dan Komunikasi	3.53	3.57	3.61	3.45	3.34
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.89	2.73	2.28	2.68	2.64
L	Real Estat	4.80	4.63	4.55	4.38	4.33
M,N	Jasa Perusahaan	1.01	1.10	1.04	1.03	0.98
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.69	4.27	4.27	4.51	4.48
P	Jasa Pendidikan	1.58	1.51	1.48	1.51	1.54
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.59	3.79	3.58	3.56	3.51
R,S,T, U	Jasa Lainnya	1.36	1.41	1.46	1.43	1.37
PDRB Migas		100	100	100	100	100
PDRB tanpa Migas		83.64	83.34	84.67	86.28	87.34

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2026

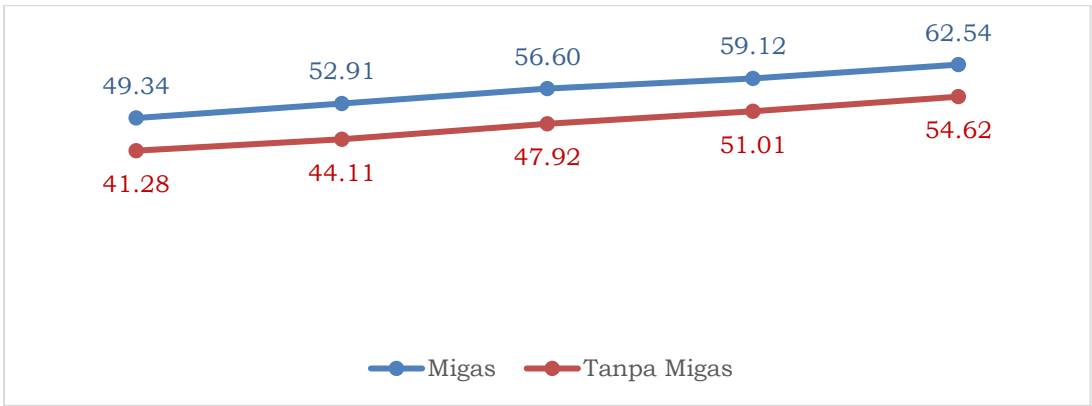
2.1.2.1.4 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu,



besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

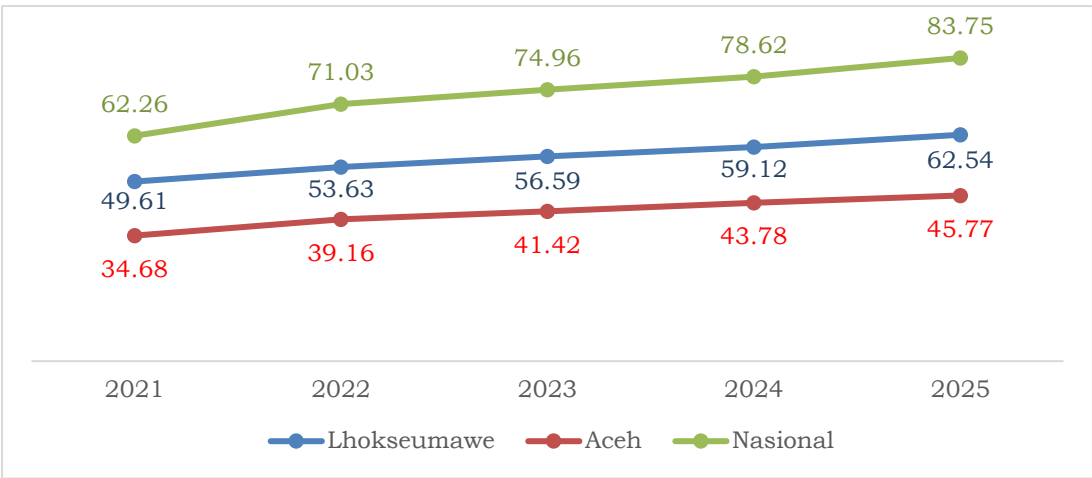
Gambar 2.17
PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha ADHB
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2026

PDRB per kapita Kota Lhokseumawe kurun waktu 2021-2025 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2021 PDRB per kapita sebesar 49.34 juta rupiah dan pada tahun 2025 PDRB perkapita Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan menjadi 62.54 juta rupiah. PDRB per kapita Kota Lhokseumawe tahun 2025 meningkat sebesar 3.42 juta rupiah dari tahun 2025.

Gambar 2.18
PDRB Perkapita Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional
Tahun 2021-2025



Sumber : BPS, 2026

PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2021 sebesar 49.61 juta berada di atas PDRB Aceh sebesar 34.68 juta dan masih di bawah PDRB nasional sebesar 62.26 juta. Selama kurun waktu 2021-2025 PDRB Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan menjadi 62.54 juta tahun 2025 namun masih tetap berada di bawah nasional pada tahun 2025 sebesar 83.75 juta dan di atas PDRB Aceh sebesar 45.77 juta.



2.1.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja. Jumlah ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 tahun ke atas) namun belum/tidak bekerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dihitung berdasarkan jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.

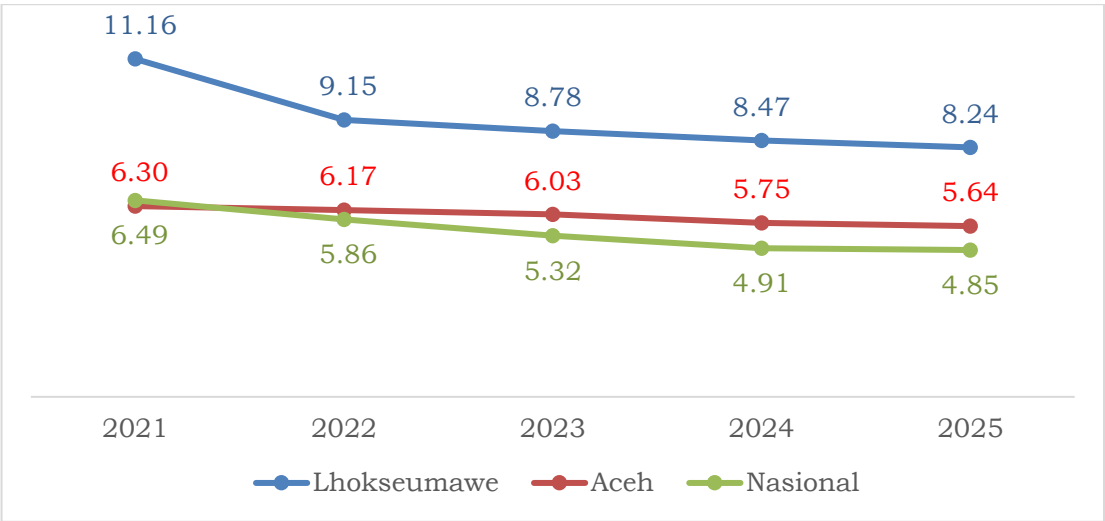
Tabel 2.25
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pengangguran terbuka	Orang	10,804	9,059	8.221	8.111	8.036
2	Jumlah penduduk angkatan kerja	Orang	96,835	98,953	93.594	95.783	97.475
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	11.16	9.15	8.78	8.47	8.24

Sumber : BPS, 2026

Tingkat pengangguran terbuka Kota Lhokseumawe menunjukkan perkembangan yang cenderung menurun. Pada tahun 2021, TPT di Kota Lhokseumawe adalah sebesar 11.16% kemudian angka tersebut terus mengalami penurunan menjadi 8.24% pada tahun 2025. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ini menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Gambar 2.19
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: BPS, 2026

Pada periode Tahun 2021-2025, TPT Kota Lhokseumawe selalu di atas rata-rata TPT Aceh dan TPT nasional. Satu hal yang patut dicatat bahwa TPT Kota Lhokseumawe jauh diatas TPT nasional, bahkan hampir separuh dari TPT nasional. Pada tahun 2021 TPT Kota Lhokseumawe sebesar 11.16 mengalami penurunan, menjadi 9.15



persen di tahun 2022. Selanjutnya pada Tahun 2025, TPT Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 8.24 persen, penurunan TPT ini tetapi masih menempakan Kota Lhokseumawe sebagai daerah dengan TPT tertinggi di Aceh.

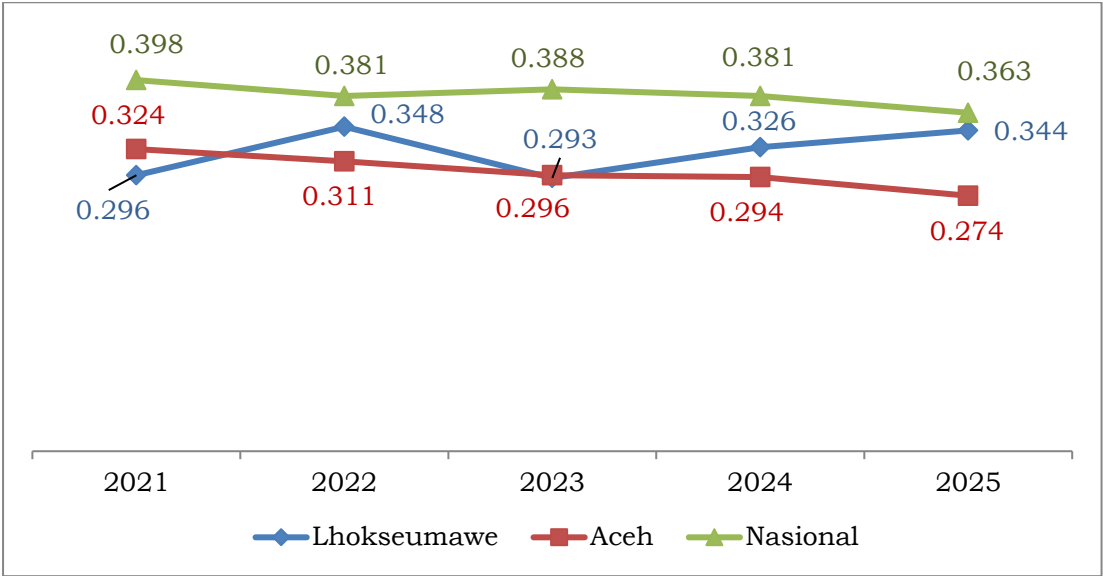
Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka pengangguran di Lhokseumawe adalah keterbatasan lapangan kerja, kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja, kurangnya investasi baru, baik dari dalam maupun luar negeri turut menghambat penciptaan lapangan kerja, penurunan aktivitas industri besar seperti sektor migas juga berdampak pada pengurangan lapangan kerja.

Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu berupaya menciptakan lapangan kerja baru terutama sektor UMKM dan industri kreatif, program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja, sektor usaha mikro, kecil dan menengah perlu didukung penuh melalui pemberian modal, pelatihan dan akses pasar. Pada tahun 2025 untuk mendukung kebutuhan industri bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja melakukan pendidikan dan pelatihan migas melalui dana TDBH Migas.

2.1.2.1.6 Indeks Gini

Untuk mengetahui pemerataan distribusi pendapatan penduduk ukuran tinggi, sedang atau rendah ketimpangannya secara kuantitatif dapat dilihat dengan menggunakan Rasio Gini. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Semakin mendekati satu maka dikatakan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya semakin mendekati 0 distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.

Gambar 2.20
Grafik Perkembangan Indeks Gini Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2026

Rasio Gini Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 menggambarkan kesenjangan pendapatan antar masyarakat termasuk dalam kondisi ketimpangan sedang/moderat (koefisien gini



berkisar antara 0.31-0.40). Besaran Rasio Gini Kota Lhokseumawe lebih rendah dari Nasional namun lebih tinggi dari Aceh. Hal ini menunjukkan adanya pemerataan pendapatan di Kota Lhokseumawe yang lebih merata dibandingkan Nasional. Gini Rasio Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 sebesar 0.296 naik menjadi 0.348 pada tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 0.293 dan tahun 2024 dan 2025 mengalami kenaikan menjadi 0.326 dan 0.344.

2.1.2.1.7 Tingkat Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan sesuai dengan BPS digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan. Perbandingan kondisi garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin sebagai berikut.

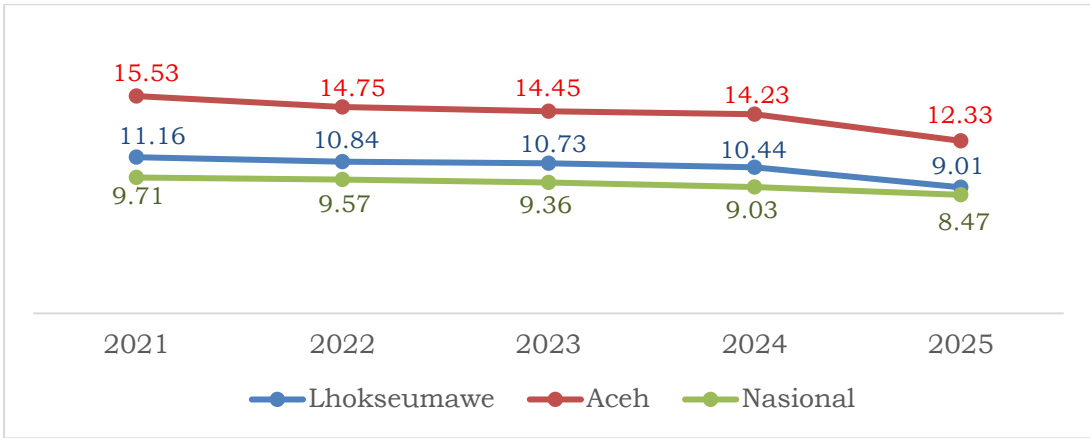
Tabel 2.26
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Kota Lhokseumawe						
Garis Kemiskinan	Rupiah	427.045	460.583	498.431	522.671	529.671
Jumlah Penduduk Miskin	000 Jiwa	23,38	23,03	23,10	22,77	19,90
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	%	11,16	10,84	10,73	10,44	9,01
Aceh						
Garis Kemiskinan	Rupiah	541.109	579.227	627.534	661.227	676.247
Jumlah Penduduk Miskin	000 Jiwa	834,24	806,62	806,75	804,53	704,69
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	%	15.33	14.64	14.45	14.23	12,33

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2026

Persentase penduduk miskin di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2021-2025 mengalami penurunan. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin sebanyak 23,38 ribu jiwa dan menurun di tahun 2022 menjadi 23,08 ribu jiwa atau setara 10.84% dari total penduduk Kota Lhokseumawe pada tahun 2022. Angka kemiskinan yang tinggi di tahun 2021 ini sebagai akibat dan adanya pandemic Covid-19. Kemudian menurun menjadi 23.03 ribu jiwa di tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 sedikit meningkat menjadi 23,10 ribu jiwa atau setara 10.73% dan tahun 2025 menurun menjadi 19,90 ribu jiwa atau 9,01%.

Gambar 2.21
Tingkat Kemiskinan Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional
Tahun 2021-2025



Sumber : BPS, 2026

Dibandingkan dengan Aceh, persentase jumlah penduduk miskin di Kota Lhokseumawe relatif lebih kecil. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin Aceh 15,33% sebagai dampak dari terjadinya pandemic Covid 19 kemudian tahun 2022 turun menjadi 14,64% dan pada tahun 2023 kembali turun menjadi 14,45% dan tahun 2025 turun menjadi 12,33%. Namun jika dibandingkan dengan nasional persentase jumlah penduduk miskin Kota Lhokseumawe berada di atas persentase jumlah penduduk miskin nasional.

Untuk mengukur rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan digunakan Indeks kedalaman kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks Kedalaman kemiskinan Kota Lhokseumawe pada tahun 2021-2025 mengalami kenaikan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan mengalami peningkatan cukup drastik pada tahun 2023, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 1,37. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2021-2025 fluktuatif namun pada tahun 2023 dan 2024 mengalami lonjakan yang cukup tinggi.

Tabel 2.27
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Lhokseumawe 2021-2025

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
2021	1.87	0.54
2022	1.33	0.26
2023	2.23	0.70
2024	1.98	0,67
2025	1,37	0,33

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2026



2.1.2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Berikut adalah tabel Komponen Indeks Pembangunan Manusia di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025.

Tabel 2.28
Komponen Indeks Pembangunan Manusia
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

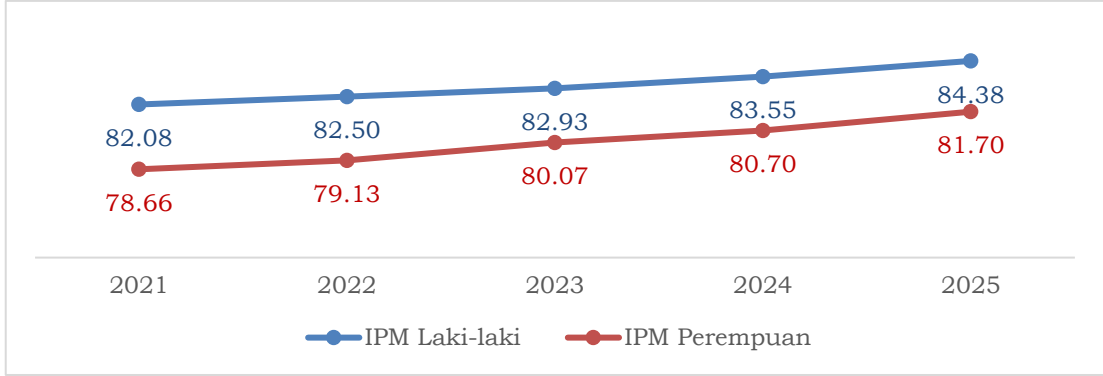
Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Harapan Hidup (Metode Baru)	Tahun	74,38	74,59	74,76	74.93	75.29
Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,21	15,27	15,54	15,55	15.56
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,11	11,12	11,27	11,31	11.64
Pengeluaran Riil per Kapita	Ribu Rp.	11.390	11.701	12.125	12.694	13.071
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Metode Baru)		78,92	79,38	80,26	80.89	81,75

Sumber: BPS, 2026

Dari 4 (empat) komponen pembentuk IPM Kota Lhokseumawe, baik dari segi kesehatan, pendidikan dan standar hidup masih perlu perbaikan pada setiap komponen agar capaiannya IPM Kota Lhokseumawe bisa lebih meningkat posisinya dari tahun 2025 di posisi ke tiga setelah Kota Banda Aceh dan Kota Langsa.

IPM Kota Lhokseumawe menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, namun terdapat ketimpangan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Pada tahun 2025 IPM laki-laki Kota Lhokseumawe sebesar 84.38 sedangkan IPM perempuan Kota Lhokseumawe jauh lebih rendah yaitu sebesar 81.70. Hal yang sama juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

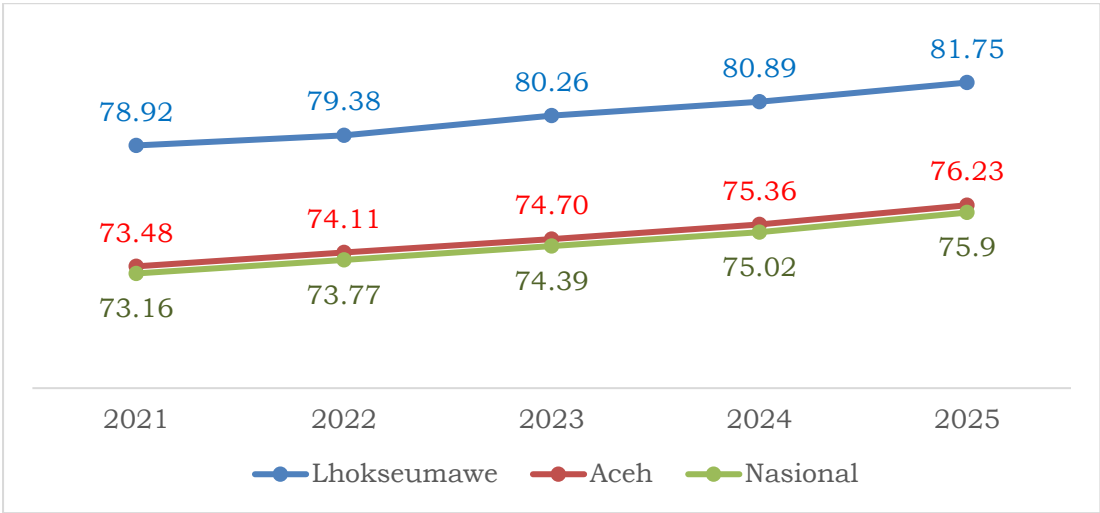
Gambar 2.22
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Jenis Kelamin
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025



Sumber: BPS, 2026

Secara umum, Indeks Pembangunan Manusia di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2021-2025 mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kota Lhokseumawe sebesar 78,92, angka tersebut terus meningkat hingga mencapai 81,75 pada tahun 2025. Perbandingan kondisi Indeks Pembangunan Manusia Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional dapat di lihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.23
Perbandingan IPM Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional
Tahun 2021-2025



Sumber : BPS, 2026

Dalam kurun waktu tahun 2021-2025, nilai IPM Kota Lhokseumawe jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai IPM Aceh dan nilai IPM Nasional. IPM Kota Lhokseumawe menduduki peringkat ke tiga di Aceh. Nilai IPM Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 sebesar 81,75. Berdasarkan kategori yang dikeluarkan BPS, nilai IPM di Kota Lhokseumawe ini termasuk kategori sangat tinggi (nilai IPM>80). Hal ini tentunya merupakan hasil dari berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

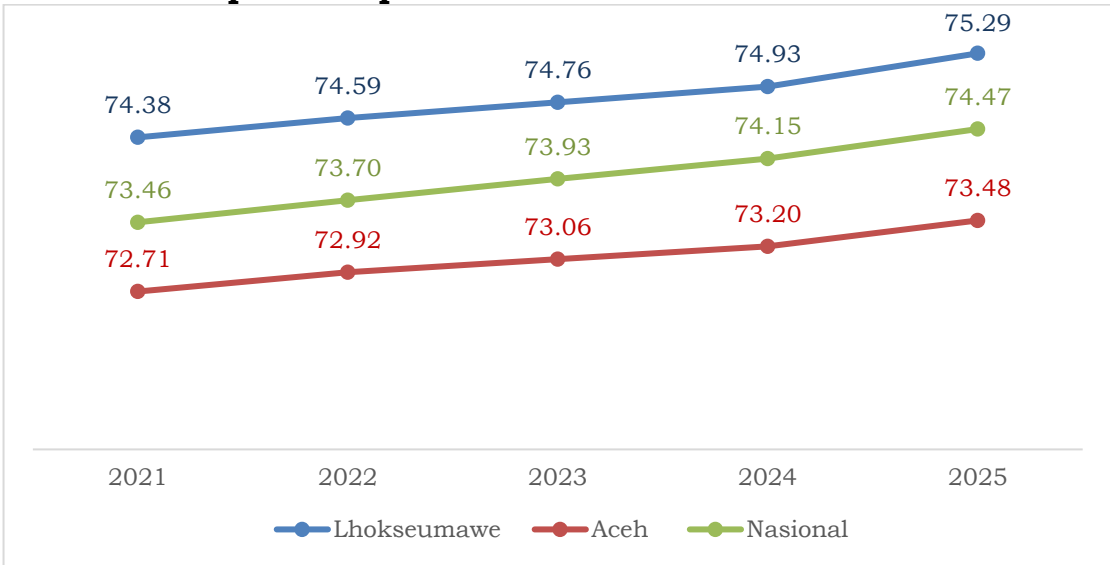
2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

2.1.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata lama hidup penduduk suatu daerah yang mencerminkan gambaran umur yang mungkin dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Indikator angka usia harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Berikut merupakan data angka usia harapan hidup di Kota Lhokseumawe.

Usia Harapan Hidup kota Lhokseumawe tahun 2021-2025 berada di atas Usia Harapan Hidup Aceh dan Nasional. Pada tahun 2025 UHH Kota Lhokseumawe sebesar 75.29 berada diatas UHH Nasional sebesar 74.47 dan UHH Aceh sebesar 73.48.

Gambar 2.24
Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025



Sumber : BPS, 2026

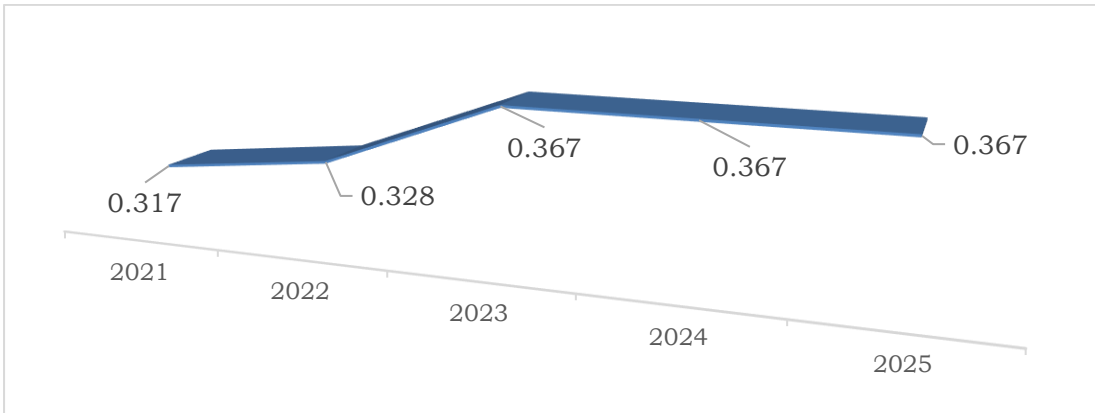
Dalam kurun waktu tahun 2021-2025, angka usia harapan hidup terus meningkat. Pada tahun 2021 angka usia harapan hidup menunjukkan angka 74,38 tahun dan terus meningkat menjadi 75,29 tahun pada 2025. Angka usia harapan hidup Kota Lhokseumawe berada di atas rata-rata provinsi dan nasional. Hal tersebut menandakan bahwa kualitas penduduk Kota Lhokseumawe cenderung semakin meningkat. Angka usia harapan hidup tersebut dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang semakin baik ditunjang dengan kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses fasilitas kesehatan yang baik.

2.1.2.2.2 Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur kesehatan keluarga. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai.

Indikator yang dinilai adalah Keluarga mengikuti KB, Ibu melakukan persalinan di fasyankes, Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap, Bayi mendapat ASI eksklusif, Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan, Penderita TB mendapatkan pengobatan sesuai standar, Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, Anggota keluarga tidak ada yang merokok, Keluarga sudah menjadi anggota JKN, Keluarga mempunyai akses sarana air bersih, dan Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat. Berikut Indeks Keluarga Sehat Kota Lhokseumawe sebagai berikut.

Gambar 2.25
Indeks Keluarga Sehat Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional
Tahun 2021-2025



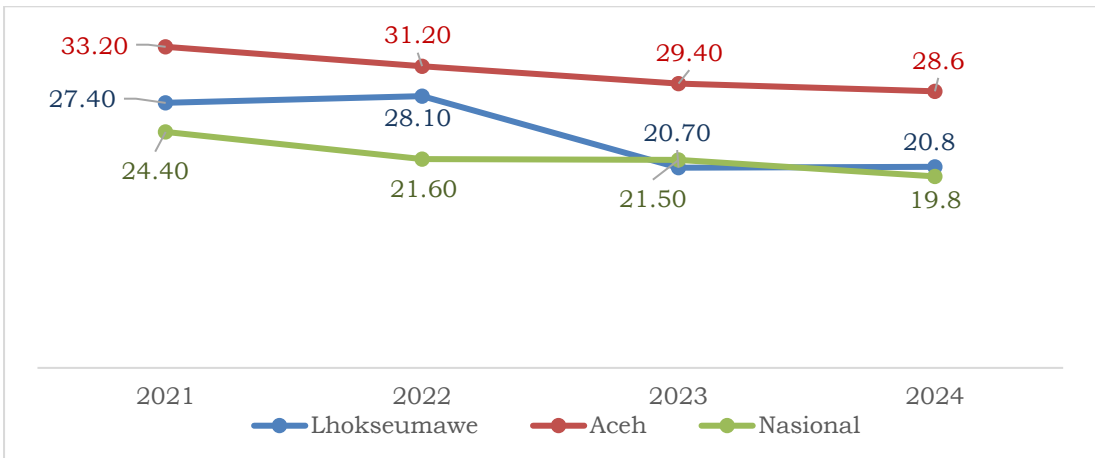
Sumber : Dinkes Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Capaian IKS Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2025 masih dalam kategori **keluarga tidak sehat** karena lebih kecil dari 0,500. Untuk pencapaian 12 (dua belas) indikator keluarga sehat harus diupayakan dengan kerja keras dan pembangunan kesehatan yang memadai serta sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan keluarga sangat diperlukan.

2.1.2.2.3 Prevalensi Stunting

Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Balita stunting disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Prevelensi Balita Stunting Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.26
Prevelensi Balita Stunting
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024



Sumber: Buku Saku Hasil SSGI 2026



2.1.2.2.4 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan kesehatan merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memberikan dampak positif terhadap layanan Kesehatan di Kota Lhokseumawe. Program JKN memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat. Program JKN memastikan semua masyarakat Kota Lhokseumawe memiliki akses terhadap layanan kesehatan untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan dan promosi kesehatan.

Tabel 2.29
Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Peserta JKN	%
1	2021	189,941	179.152	94,32
2	2022	191,396	188.248	98.35
3	2023	196,067	183.996	93.84
4	2024	198.705	185.363	93.28
5	2025	200.876	185.391	92.29

Sumber : BPJS Kesehatan Cabang Kota Lhokseumawe, 2026

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 sebesar 94.32% atau 182.427 peserta dari jumlah penduduk 188.713 jiwa. Dan pada tahun 2025 cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional menurun menjadi 92.29% atau 185.391 peserta dari 200.876 jiwa penduduk. Tahun 2026 Kota Lhokseumawe meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award sebagai salah satu dari 75 pemerintah daerah terbaik yang berhasil memenuhi kategori tertinggi yaitu kategori utama dalam cakupan jaminan kesehatan nasional.

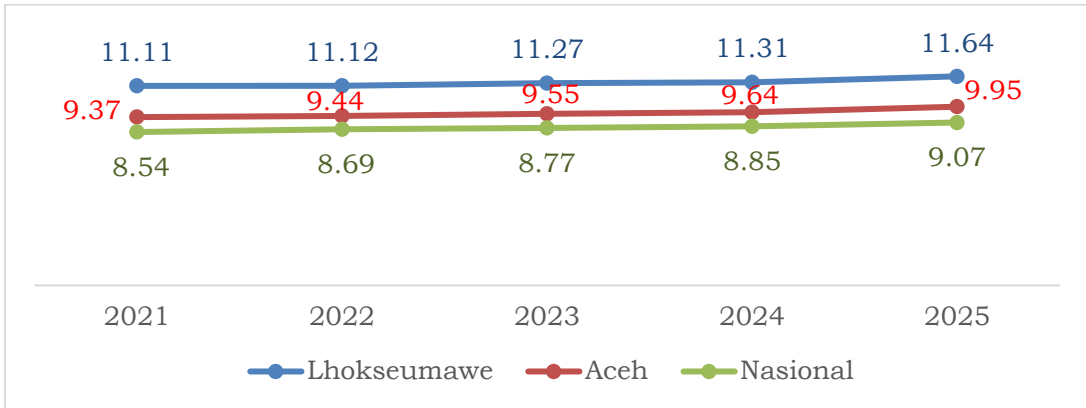
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.1.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Mulai tahun 2015 terdapat perubahan rumus dalam perhitungan indikator IPM, dimana angka rata-rata lama sekolah tidak diidentifikasi berdasarkan jenjang pendidikannya. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan penduduk di kota/kabupaten tersebut semakin baik.



Gambar 2.27
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025



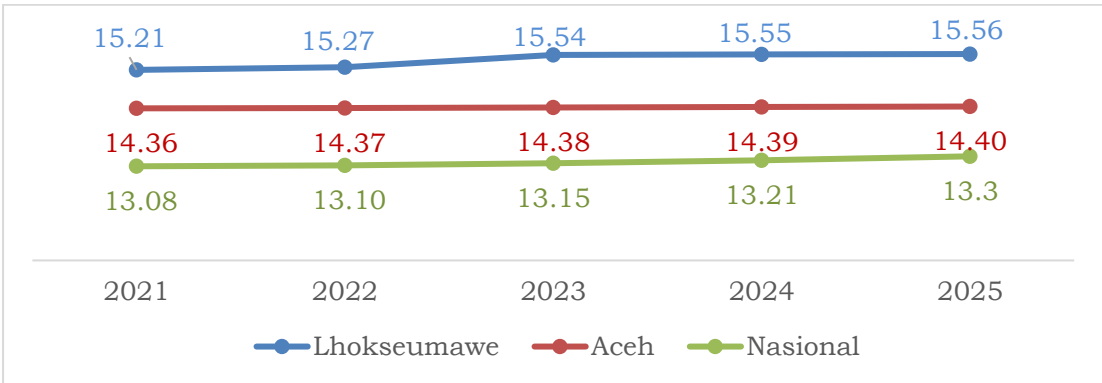
Sumber: BPS, 2026

Gambar di atas menunjukkan bahwa angka rata-rata lama sekolah di Kota Lhokseumawe pada tahun 2021-2025 mengalami peningkatan. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 adalah sebesar 11.11 tahun kemudian angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga menjadi 11,64 tahun pada tahun 2025. Angka tersebut merupakan hasil akumulasi lama sekolah dari jenjang SD/MI hingga SMA/MA/SMK. Rata-rata lama sekolah Kota Lhokseumawe berada di atas rata-rata lama sekolah Aceh dan Nasional. Hal ini dapat dimaknai bahwa penduduk Kota Lhokseumawe semakin sadar akan pentingnya pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) diartikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Angka HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Gambar 2.28
Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025



Sumber: BPS, 2026



Dari gambar di atas terlihat bahwa angka Harapan Lama Sekolah di Kota Lhokseumawe pada tahun 2021-2025 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 angka Harapan Lama Sekolah sebesar 15.21 tahun dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 15.56 tahun. Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe berada di atas Angka Harapan Lama Sekolah Aceh dan Nasional.

2.1.2.3.3 Angka Literasi/Numerasi

Angka Kompetensi Minimum (AKM) adalah merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM dirancang untuk menghasilkan informasi yang dapat mengarahkan pada perbaikan kualitas pembelajaran yang menguji tes dalam mata pelajaran utama yaitu membaca, matematika dan sains.

AKM dimaksudkan untuk mengukur kompetensi secara mendalam, tidak sekedar penguasaan konten. Literasi membaca sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika. Perkembangan kompetensi literasi dan numerasi pada SD dan SMP di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Perkembangan Kompetensi Literasi dan Numerasi SD dan SMP
Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2025

AKM	Lhokseumawe				Nasional			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Rerata Kompetensi literasi SD berdasarkan AN	63.32	64.84	56.72	53.39	61.53	61.53	70.62	71.81
Rerata Kompetensi Numerasi SD berdasarkan AN	39.51	55.43	49.44	44.77	46.67	46.67	62.62	69.58
Rerata Kompetensi literasi SMP berdasarkan AN	51.85	58.36	68.34	68.95	59.00	59.00	68.27	72.07
Rerata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan AN	35.36	39.5	59.94	60.49	40.63	40.63	65.00	69.61
Iklim Keamanan Sekolah SD	69.87	72.14	74.60	73.04	68.18	68.18	72.65	74.92
Iklim kebinekaan SD	60.31	67.98	71.74	65.93	67.64	67.64	72.74	71.55
Iklim Inklusivitas SD	53.62	56.24	58.07	56.82	55.39	55.39	55.45	58.90
Iklim Keamanan Sekolah SMP	66.66	66.58	71.06	71.53	65.29	65.29	68.97	69.70
Iklim kebinekaan SMP	58.85	64.61	69.77	66.37	64.33	64.33	72.53	70.29
Iklim Inklusivitas SMP	51.36	53.57	56.55	58.50	54.84	54.84	56.37	57.26

Sumber: Rapor Pendidikan, 2026

Kompetensi Literasi SD Kota Lhokseumawe sebesar 53.39 pada tahun 2025 berada di bawah Kompetensi Literasi SD Nasional. Untuk



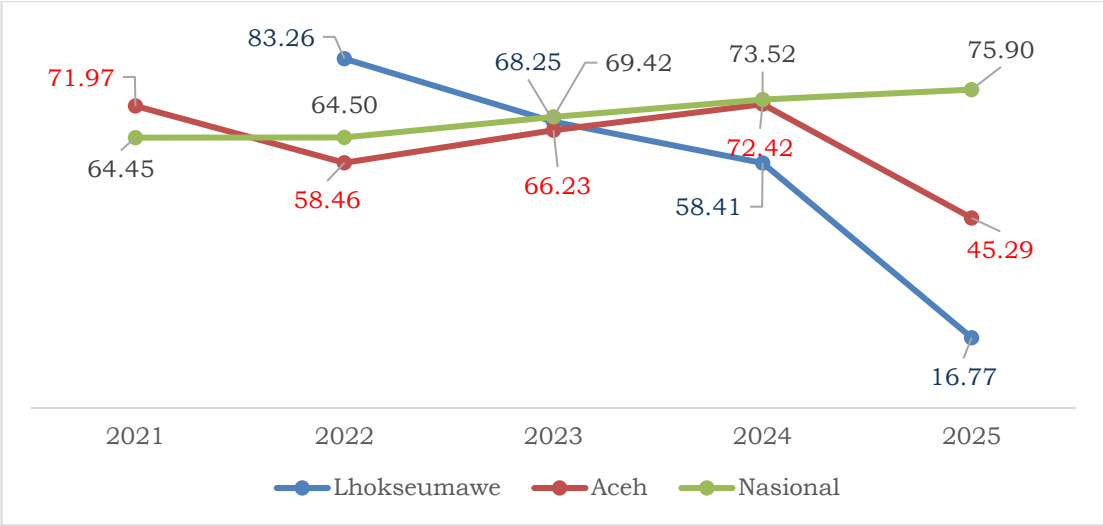
Kompetensi Numerasi SD Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 sebesar 44.77 berada di bawah kompetensi numerasi SD nasional yaitu 69.58. Untuk kompetensi literasi dan numerasi SMP Kota Lhokseumawe masing-masing masih berada di bawah nasional.

2.1.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Perpustakaan memiliki fungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Nilai IPLM Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki karakteristik yang berbeda terutama berkaitan dengan aspek masyarakat, seperti jumlah penduduk dan luas wilayah yang akan berimplikasi pada kepadatan penduduk.

Gambar 2.29
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber : Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2022 memperlihatkan IPLM Kota Lhokseumawe menduduki posisi 3 di Aceh yaitu sebesar 83.26 dengan kategori Tinggi. Namun pada Tahun 2023 IPLM Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi kategori sedang. Pada tahun 2023 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Lhokseumawe sebesar 68.25 dalam karegori sedang. Kota Lhokseumawe berada pada posisi 5 dalam pencapaian IPLM di Aceh setelah Kota Sabang sebesar 74.66, Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 72,17; Kabupaten Aceh Besar sebesar 71,20 dan Kota Banda Aceh sebesar 69.96. Pada tahun 2025 IPLM Kota Lhokseumawe mengalami penuriunan menjadi sebesar 16.77 dalam kategori rendah. Selama 4 (empat) tahun terakhir IPLM Kota Lhokseumawe terus mengalami penurunan.



Jika dibandingkan dengan Aceh dan Nasional IPLM Kota Lhokseumawe tahun 2022 berada di atas IPLM Aceh sebesar 58.46 dan nasional sebesar 64.50 namun pada tahun 2025 IPLM Kota Lhokseumawe turun menjadi sebesar 16.77 berada di bawah IPLM Aceh sebesar 45.29 dan IPLM Nasional sebesar 75.90.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif
2.1.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek adalah indikator yang menghitung persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta program jamsostek dari keseluruhan pekerja.

Tabel 2.31
Jumlah Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Tenaga Kerja Persektor usaha	2021		2022		2023		2024		2025	
		Peserta	Pekerja	Peserta	Pekerja	Peserta	Pekerja	Peserta	Pekerja	Peserta	Pekerja
1	Pertanian, Perkebunan Kehutanan, Perburuan Perikanan	643	4.591	730	4.591	1.010	16.145	460	16.618	1.059	8452
2	Pertambangan dan Penggalian	293	202	295	202	346	700	352	722	357	932
3	Industri Pengolahan	1.701	4.307	1770	4.307	2.008	9.589	2.024	9.898	2.072	9488
4	Listrik, Gas dan Air	1.159	283	1.183	283	1.082	451	792	466	833	870
5	Konstruksi	6.402	7.273	10.246	7.273	3.157	7.436	4.010	7,551	4.683	11581
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	2.901	20.104	3.351	20.104	4.262	18.237	4.232	18.822	5.016	24.318
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	438	5.463	463	5.463	638	3.773	667	3.896	583	4.791
8	Lembaga Keuangan, Asuransi, Real Estate,Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	839	1.2	866	1.2	1.129	2.256	1.056	2.331	894	2.822
9	Jasa Kemasyarakatan	9.251	14.78	13.327	14.78	10.515	7.971	13.513	8.228	10.032	13.074
10	Jumlah peserta JAMSOSTEK / Jumlah tenaga kerja	23.627	58.203	32.231	58.203	24.047	66.56	27.106	68.532	25.529	76.308
Persentase		40.59		55.38		36.13		39.55		33.46	

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2026

Dari tahun 2021 hingga tahun 2024, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta jamsostek terus bertambah, tetapi tidak lebih pesat dari peningkatan jumlah tenaga kerja secara umum. Pada tahun 2021, persentase tenaga kerja yang mengikuti program jamsostek dari keseluruhan tenaga kerja adalah 40.59%, tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 55.38%, tetapi di tahun 2023 menurun hingga sebesar 36.13% dan tahun 2024 sedikit meningkat menjadi 39,55% dikarenakan adanya petugas Pemilhan KPPS dan PPS pada Pemilu dan pemilukada tahun 2024 sedangkan tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 33,46%.



2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
2.1.2.5.1 Fokus Seni Budaya

Pembangunan bidang seni budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat, yaitu untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab. Warisan budaya adalah ekspresi cara hidup yang dikembangkan oleh suatu komunitas dan diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya adalah peninggalan yang merepresentasikan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak suatu kebudayaan yang terus-menerus diwariskan dari masa lalu hingga masa sekarang. Warisan budaya terdiri dari dua jenis yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda.

Warisan budaya benda seperti situs Kurok-kurok, Gua Jepang, makam kuno, naskah/benda kuno dan cagar budaya lainnya yang seluruhnya berjumlah 22 cagar budaya yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kota Lhokseumawe. Kota Lhokseumawe juga memiliki kekayaan budaya tak benda yang menarik seperti tarian, adat istiadat dan kegiatan spiritual. Kota Lhokseumawe telah memiliki warisan budaya tak benda yaitu Canang Ceurekeh serta kesenian tradisional khas Lhokseumawe yaitu Rapai Uroh Duek. Selain itu kesenian Aceh seperti rapai, seurene kale, seudati, saman, ranup lampuan, syair, dalil khairat menjadi kekayaan budaya tak benda yang terus dilakukan pelestarian, pengembangan dan promosi melalui pembentukan sanggar-sanggar kesenian.

Peninggalan budaya dapat dibuktikan dengan ditemukannya cagar budaya di Kota Lhokseumawe. Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.32
Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe

No.	Lokasi (Kecamatan) / Nama Situs			
	Banda Sakti	Muara Satu	Blang Mangat	Muara Dua
1	Makam Tgk. Chik Ditunong dan Tgk. Dibuah	Makam Putroe Neng	Makam Prajurit Tgk. Abd. Jalil Cot Plieng	Tugu Perlawanan TKR
2	Makam Tgk. Di Lhokseumawe	Makam Tgk. Syiah Hudam	Makam Mualem Taufiq Shaleh	Rumah Adat Ulee Balang
3	Makam Tgk. Maharaja Abdul Hamid dan Meriam Belanda	Makam Tgk. Chik Dipaloh	Makam Tgk. Batee Meutarah	-
4.	Makam Tgk. Sayed Muhammad Nadir	Makam Tgk. Jrat Meuindram	Tugu Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	-
5.	Makam Tgk. Ulei Utan	Makam Tgk. Chik Buket Bruek Kreung	-	-
6.	Makam Tgk. Syaikh Al Kalaliy	Gua Jepang	-	-



No.	Lokasi (Kecamatan) / Nama Situs			
	Banda Sakti	Muara Satu	Blang Mangat	Muara Dua
7.	Tugu Pahlawan TNI	Gua Tgk. Ibrahim Tapa dan Cot Bu Kulah	-	-
8.	Rumoh Aceh Kota Lhokseumawe	-	-	-
9.	Kurok-Kurok	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026.

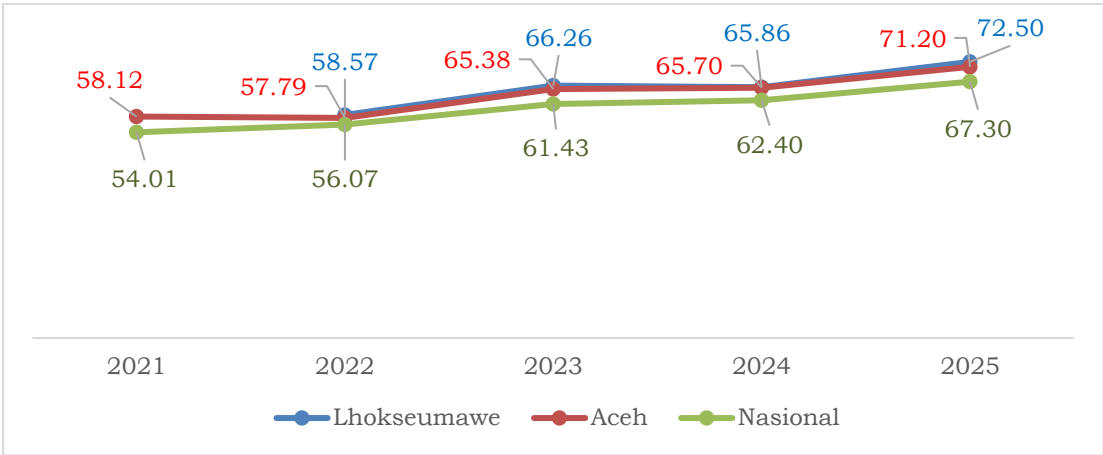
Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa situs atau cagar budaya Kota Lhokseumawe terbanyak berada di kecamatan Banda Sakti yaitu 9 situs terdiri dari 6 makam, 1 Tugu, dan 1 kurok-kurok (benteng), Sedangkan situs atau cagar budaya paling sedikit terdapat di Kecamatan Muara Dua yaitu 1 Tugu dan 1 Rumah Adat Ulee Balang. Dari 22 situs atau cagar budaya di Kota Lhokseumawe, belum ada satupun yang terlegalisasi.

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

2.1.2.6.1 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin. Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) merupakan indeks pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga adalah status capaian pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh, berkembang, dan rentan. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Lhokseumawe sebagai berikut.

Gambar 2.30
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber: BKKBN Aceh, 2026

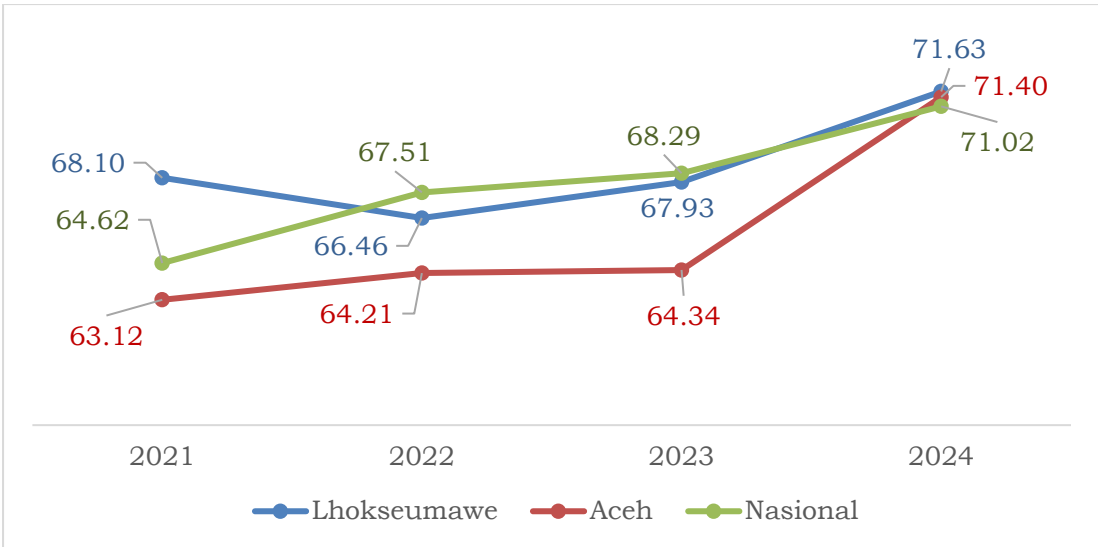
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kota Lhokseumawe pada kurun waktu tahun 2022-2025 mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 iBangga Kota Lhokseumawe sebesar 72.50 berada di atas iBangga Aceh sebesar 71.20 dan nasional sebesar 67.30.



2.1.2.6.2 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak digunakan sebagai indikator pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Indikator itu menggambarkan capaian pemenuhan hak anak dan menjadi ukuran untuk mematikan program dan kebijakan sudah efektif dan efisien dalam menjawab berbagai permasalahan anak khususnya terkait perlindungan anak yang terintegrasi di lintas sektor. Indeks Perlindungan Anak di lihat dari 5 (lima) klaster yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan altelnatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus. Indeks Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe dapat di lihat pada gambar berikut.

Gambar 2.31
Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Lhokseumawe 2021-2024



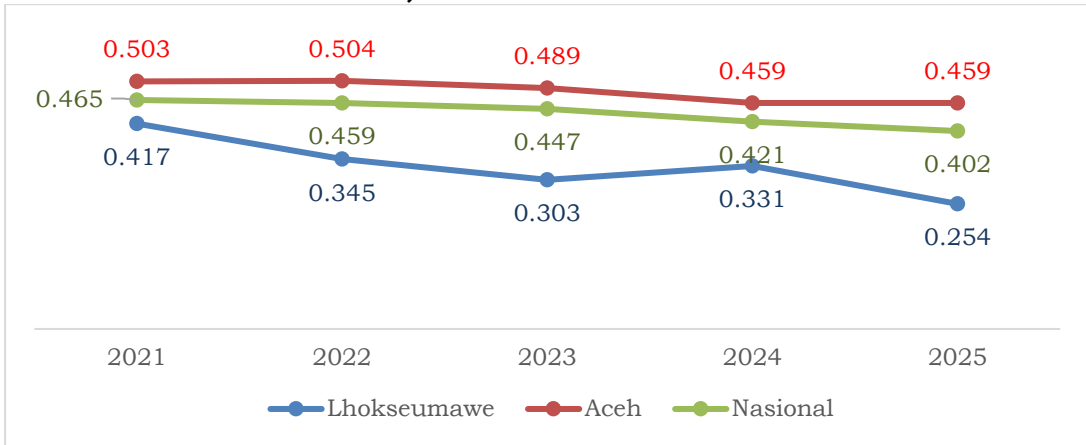
Sumber : DP3AP2KB, 2026

Pada gambar di atas terlihat Indeks Perlindungan Anak Kota Lhokseumawe pada tahun 2021-2024 mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 68.10 dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 71.63. IPA Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 sebesar 71.63 berada diatas IPA Aceh sebesar 71.02 dan IPA Nasional sebesar 71.40.

2.1.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender

Ketimpangan gender antara lain terjadi di pendidikan, pekerjaan, akses atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik. Perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan atau yang lebih tinggi dikenal dengan perbedaan gender yang terjadi di masyarakat tidak menjadi suatu permasalahan sepanjang perbedaan tersebut tidak mengakibatkan diskriminasi atau ketidakadilan. Patokan atau ukuran sederhana yang dapat digunakan untuk mengukur apakah perbedaan gender itu menimbulkan ketidakadilan atau tidak. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Berikut Indeks Ketimpangan Gender Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 2.32
Indeks Ketimpangan Gender
Lhokseumawe, Aceh dan Nasional 2021-2025



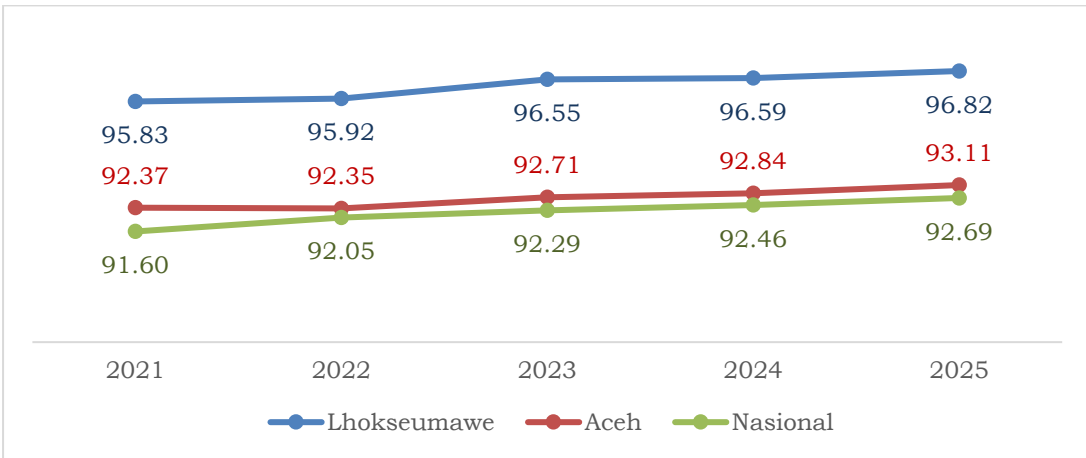
Sumber: BPS, 2026

Indeks Ketimpangan Gender Kota Lhokseumawe kurun waktu 2021-2025 cenderung tidak mengalami penurunan yang signifikan. Pada Tahun 2021 IKG Kota Lhokseumawe sebesar 0.417 lebih rendah dibandingkan dengan Aceh sebesar 0,503 dan Nasional sebesar 0,465. Sedangkan pada tahun 2025 IKG Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi sebesar 0.254 masih lebih rendah dibandingkan Aceh sebesar 0.459 dan Nasional sebesar 0.402.

2.1.2.6.4 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Kegunaan Indeks Pembangunan Gender untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.33
Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025



Sumber : BPS, 2026

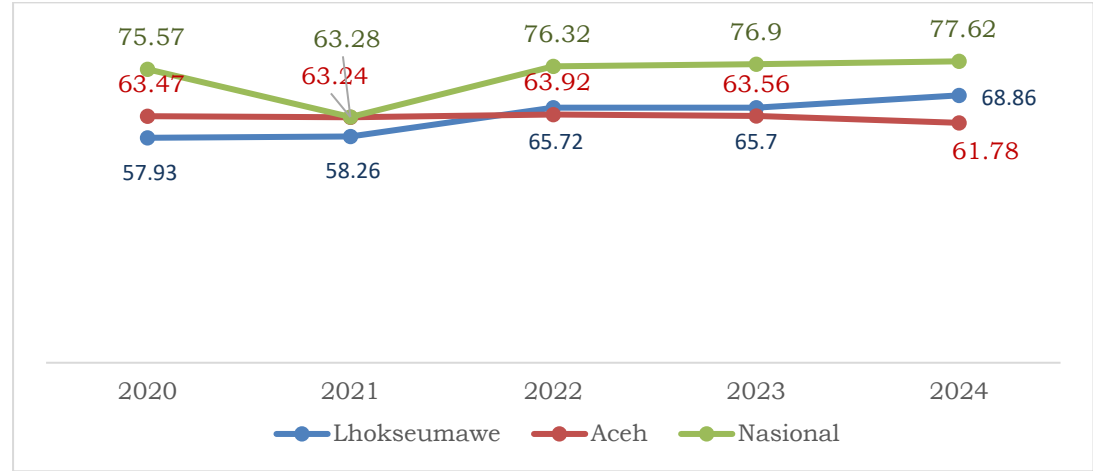


IPG Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2021-2025 terus mengalami kenaikan dan jika dibandingkan dengan IPG Aceh dan IPG Nasional IPG Kota Lhokseumawe berada di atas IPG Aceh dan Nasional. Peningkatan ini berarti bahwa kapabilitas dasar perempuan yang terangkum dalam dimensi kesehatan, pendidikan maupun hidup layak selama kurun waktu tersebut mengalami perbaikan seiring dengan pelaksanaan program-program pembangunan.

2.1.2.6.5 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur indeks ini meliputi partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Hal yang penting dari pemberdayaan gender adalah tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi perempuan dan laki-laki.

Gambar 2.34
Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe
Tahun 2020-2024



Sumber : BPS, 2025

Peranan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik di Kota Lhokseumawe yang diukur melalui IDG pada kurun waktu 2020-2024 memperlihatkan perkembangan yang positif. Tahun 2024 IDG Kota Lhokseumawe berada di atas IDG Aceh namun berada di bawah IDG Nasional. Apabila dilihat dari data pilah gender di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2024, terdapat 7 orang perempuan atau 28 persen yang menjadi anggota DPRK.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.1.3.1.1 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kota



Lhokseumawe pada tahun 2025 adalah 46.25%. Besaran angka rasio ketergantungan di Kota Lhokseumawe memiliki pengertian bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 46 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 2.33
Rasio Ketergantungan di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penduduk usia <15 th +usia>64th	59.536	59.668	62.875	63.029	63.521
2	Penduduk usia 15-64	130.405	131.728	133.192	135.676	137.355
Rasio Ketergantungan		45.65	45.30	47.21	46.45	46.25

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2024

Dari tahun 2021-2025, rasio ketergantungan ini terus mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Seperti halnya pada tahun 2021 angka rasio ketergantungan mencapai 45.65%, dan mengalami pnurunan pada tahun 2022, kemudian angka ini kembali turun pada tahun 2024 dan 2025. Hal ini menunjukkan bahwa beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif di Kota Lhokseumawe semakin berkurang setiap tahunnya.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.1.3.2.1 Rasio PDRB Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB menggambarkan posisi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian. Pada kurun waktu lima tahun terakhir kontribusi sektor perdagangan dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe menunjukkan kecenderungan fluktuatif. Pada tahun 2021 sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB Kota Lhokseumawe sebesar 21.35%, lalu menurun menjadi 21.26% di tahun 2022. Selanjutnya kontribusi sektor perdagangan meningkat kembali menjadi 23,72% di tahun 2025 dengan laju pertumbuhan sebesar 5.09%. Sektor perdagangan berdasar pada posisi pertama dalam penyumbang PDRB Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.34
Rasio PDRB Perdagangan (ADHB)
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Sektor Perdagangan	2.013.276,4	2.184.656,3	2.561.330.4	2.753.463,5	3.017.433.3
2	Jumlah PDRB dengan Migas	9.431.385.9	10.277.625.4	11.169.632.1	11.848.236,9	12.720.907.1
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	7.890.150.1	8.567.858.1	9.457.579.4	10.222.464,0	11.110.849.5
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		21.35	21.26	22.93	23.24	23.72
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		25.52	25.49	27.08	26.94	27.16
Laju Pertumbuhan sektor perdagangan		4.17	5.91	9.44	2.99	5.09

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2026



2.1.3.2.2 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Pada kurun waktu 2021-2025 Kontribusi sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe menunjukkan kecenderungan positif. Pada tahun 2021 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Kota Lhokseumawe sebesar 19.02%, lalu meningkat di tahun berikutnya hingga menjadi 19.48% pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023-2025 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 15.73% di tahun 2025, dengan laju pertumbuhan 1.71%.

Tabel 2.35
Rasio PDRB Industri Pengolahan (ADHB)
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Sektor Industri	1.793.400.5	2.002.471.4	2.023.961.6	1.978.225,7	2.000.470.2
2	Jumlah PDRB dengan Migas	9.431.385.9	10.277.625.4	11.169.632.1	11.848.236,9	12.720.907.1
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	7.890.150.1	8.567.858.1	9.457.579.4	10.222.464,0	11.110.849.5
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		19.02	19.48	18.12	16.70	15.73
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		22.73	23.37	21.40	19.36	18.00
Laju Pertumbuhan sektor industri pengolahan		0.07	2.82	1.35	0.57	1.71

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2026

2.1.3.2.3 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum

Pada kurun waktu 2021-2025 Kontribusi sektor penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe menunjukkan kecenderungan positif, Pada tahun 2021 kontribusi sektor akomodasi penyediaan makan dan minum terhadap PDRB ADHB Kota Lhokseumawe sebesar 1.79%, lalu di tahun-tahun berikutnya terus meningkat menjadi 2.40% di tahun 2025.

Tabel 2.36
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum (ADHB)
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makmin	168.466,80	225.635,00	256.396,8	272.390,8	305.003.7
2	Jumlah PDRB dengan Migas	9.431.385.9	10.277.625.4	11.169.632.1	11.848.236,9	12.720.907.1
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	7.890.150.1	8.567.858.1	9.457.579.4	10.222.464,0	11.110.849.5
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		1.79	2.20	2.30	2.30	2.40
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		2.14	2.63	2.71	2.67	2.75
Laju Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan minum		-0.85	29.78	9.82	1.61	7.08

Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka, 2026



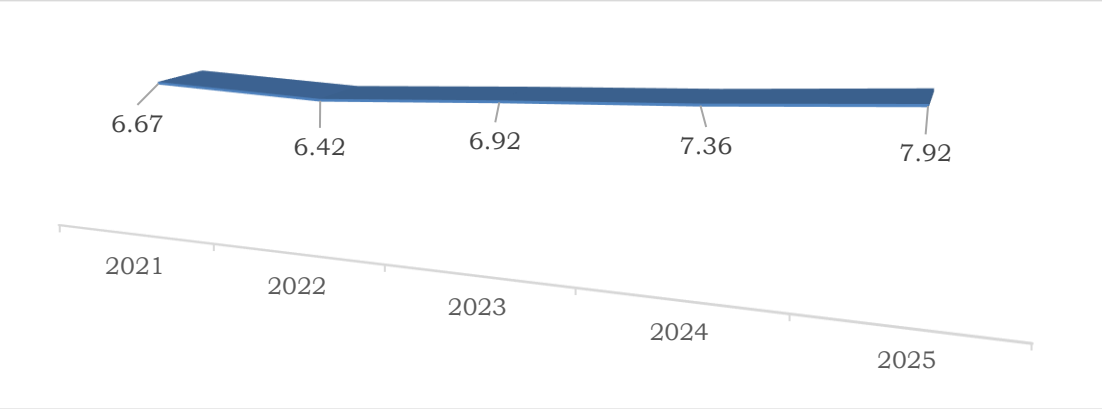
2.1.3.2.4 Rasio Kewirausahaan

Berdasarkan Perpres No. 2 Tahun 2022, wirausaha adalah orang yang menjalankan, menciptakan, dan/atau mengembangkan suatu usaha. Perpres itu membedakan wirausaha menjadi dua jenis, yaitu "wirausaha pemula" dan "wirausaha mapan". "Wirausaha pemula" adalah pelaku usaha yang berusaha sendiri, serta pelaku usaha yang dibantu buruh tak tetap/buruh tak dibayar. Kemudian "wirausaha mapan" adalah pelaku usaha yang dibantu buruh tetap/buruh dibayar. Lampiran I Perpres No. 2 Tahun 2022 juga menetapkan tata cara penghitungan rasio kewirausahaan dengan rumus berikut:

- Rasio Wirausaha Pemula = $\frac{\text{Populasi Wirausaha Pemula}}{\text{Populasi Angkatan Kerja}} \times 100\%$
- Rasio Wirausaha Mapan = $\frac{\text{Populasi Wirausaha Mapan}}{\text{Populasi Angkatan Kerja}} \times 100\%$

Perkembangan rasio kewirausahaan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 2.35
Rasio Kewirausahaan Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025



Sumber : Disperindagkop Lhokseumawe, Kementerian Koperasi 2026

2.1.3.2.5 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Volume usaha koperasi adalah total nilai penjualan/pendapatan barang dan jasa dari usaha koperasi pada suatu periode atau tahun buku secara agregat dalam satuan rupiah. Perkembangan volume usaha koperasi dan PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

Tahun	Volume Usaha Koperasi	PDRB	Rasio
2021	14,796,727,000	9,422,285,900,000	0.16
2022	15,573,222,000	10,263,425,400,000	0.15
2023	88.386.445.000	11.169.632.100.000	0.79
2024	24.349.881.000	11.848.236.900.000	0.21
2025	15.068.154.000	12.720.907.100.000	0.11

Sumber: Disperindagkop, 2026



Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB tahun 2021 s.d 2025 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2021 volume usaha koperasi sebesar 0.16 persen terus menurun hingga sebesar 0.15 persen 2022, namun tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 0.79 persen dan tahun 2025 kembali turun menjadi 0.11 persen.

2.1.3.2.6 **Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian**

Sektor UMKM memegang peran penting dalam peningkatan perekonomian Kota Lhokseumawe. UMKM berkontribusi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil yang memulai dengan modal terbatas dan memanfaatkan dapur rumah sebagai tempat produksi, mencerminkan semangat kewirausahaan dari skala kecil. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama. Berikut proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.38
Proporsi Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Non Pertanian Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Usaha Mikro	5.330	5852	6.346	6396	6538
2	Jumlah Usaha Kecil	348	348	348	348	349
3	Jumlah Usaha Menengah	60	60	60	60	60
4	Jumlah UMKM	5.739	6353	6.848	6.897	6.947
Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian (%)		7.11	6.42	5.96	5.92	5.97

Sumber: Disperindagkop, 2026

Selama lima tahun terakhir, proporsi UKM non pertanian menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2025 proporsi UKM non pertanian sebesar 5.97 persen, naik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah UKM non pertanian.

2.1.3.2.7 **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan suatu ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif dalam pasar tenaga kerja baik yang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Indikator ini dapat mengindikasikan besaran ukuran relatif penawaran tenaga kerja (*supply*) yang dapat terlibat dalam produksi barang/jasa. TPAK yang dirinci menurut jenis kelamin dapat memberikan gambaran mengenai distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK menurut jenis kelamin selama periode Tahun 2021–2025 seperti terlihat dalam tabel berikut ini:



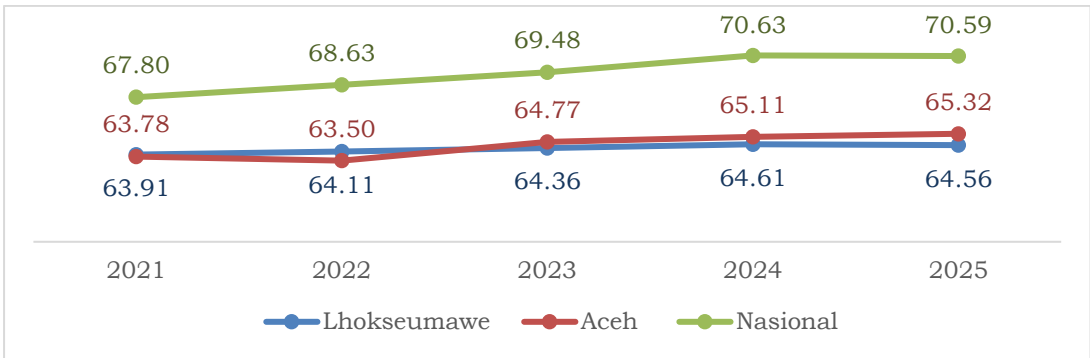
Tabel 2.39
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
2021	80.02	48.15	63.91
2022	80.26	48.33	64.11
2023	77.64	51.50	64.36
2024	79.44	50.25	64.61
2025	79.61	49.98	64.56

Sumber : BPS, 2026

Selama periode Agustus 2021-2024 menurut BPS Kota Lhokseumawe, TPAK mengalami peningkatan. Pada Agustus 2021 TPAK Kota Lhokseumawe sebesar 63.91%. Tahun 2024 TPAK mengalami kenaikan sebesar 1.44 poin menjadi 64.61%. Namun tahun 2025 TPAK mengalami penurunan menjadi 64,56%. Nilai TPAK sebesar 64.56% mengandung arti ada sekitar 64 penduduk kategori angkatan kerja diantara 100 penduduk usia kerja. Satu hal yang patut dicatat bahwa TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan. Hal ini bisa dijelaskan karena pada umumnya laki-laki sebagai penanggung nafkah utama yang aktif secara ekonomis untuk menghasilkan barang dan jasa.

Gambar 2.36
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Lhokseumawe, Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber : BPS, 2026

Berdasarkan data di atas menurut BPS Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 bila dicermati TPAK Kota Lhokseumawe lebih tinggi dibandingkan TPAK Aceh namun lebih rendah dari nasional. Pada tahun 2022-2023 TPAK Kota Lhokseumawe lebih tinggi dari Aceh namun, tetap lebih rendah dari nasional. Namun pada tahun 2023-2025 TPAK Lhokseumawe kembali lebih rendah dari Aceh dan nasional. Rendahnya TPAK Kota Lhokseumawe disebabkan karena tingkat pengangguran yang tinggi dimana ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah pencari kerja yang tidak sebanding mengakibatkan timbulnya pengangguran sehingga mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan.

2.1.3.2.8 Indeks Inovasi Daerah

Dalam mengelola sebuah negara, perlu sebuah gagasan-gagasan baru yang dapat menciptakan kemajuan daerah. Baik pemerintah maupun pihak swasta harus melakukan pengembangan gagasan-gagasan itu supaya ada inovasi yang tercipta. Dalam hal ini, bukan



hanya pemerintah pusat yang harus berinovasi, melainkan juga pemerintah daerah.

Pemerintah pusat menetapkan sebuah peraturan yang membuka kesempatan bagi daerah dan warganya untuk dapat berkreasi dan menciptakan terobosan baru (inovasi). Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain untuk berkreasi, pemerintah berharap Inovasi Daerah dapat meningkatkan daya saing dan kinerja penyelenggara pemerintahan sehingga nantinya daerah-daerah dapat mengalami kemajuan.

Kota Lhokseumawe dalam percepatan pembangunan daerah adalah dengan melakukan inovasi daerah. Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 ada 8 Perangkat Daerah yang telah menginput data inovasi ke dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri pada tahun 2023. Jumlah inovasi yang diinput sebanyak 8 dengan rincian BKPSDM Kota Lhokseumawe menyumbang 2 (dua) inovasi dengan nilai kematangan masing-masing sebesar 91 dan 90. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) inovasi dengan nilai kematangan sebesar 81. BPKD Kota Lhokseumawe dengan 1 (satu) inovasi memiliki nilai kematangan sebesar 70. DPMTSP dan Naker Kota Lhokseumawe dengan 3 inovasi memiliki nilai kematangan sebesar 56-65. Dan Pemerintah Gampong Kuta Blang dengan 1 inovasi dan memiliki nilai kematangan sebesar 66.

Tabel 2.40
Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2025

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah / Inisiator	Nilai Kematangan Inovasi
Tahun 2023			
1.	Aplikasi e-Kinerja Kota Lhokseumawe	BKPSDM	91
2.	Aplikasi Presensi Kota Lhokseumawe	BKPSDM	90
3.	Percepatan Pencapaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (PEKAD 3 in 1 Plus)	Disdukcapil	81
4.	Layanan Chat WA Pajak dan Retribusi (CAWAPRES)	BPKD	70
5.	Sistem Informasi Gampong dan Layanan Online (SIGAMLON)	Pemerintah Gampong Kuta Blang	66
6.	Sistem Perizinan dan Layanan Antar Jemput Izin (SIPERI WET WET)	DPMTSP & Naker Kota Lhokseumawe	65
7.	Klinik Layanan Perizinan Sistem Online dan Verifikasi Cepat (KLIPPER SINOVA)	DPMTSP & Naker Kota Lhokseumawe	58
8.	Integrasi Layanan Menerapkan Online System Submission (Whatsapp & On Call)	DPMTSP & Naker Kota Lhokseumawe	56
Tahun 2024			
1	Bidan Ceting (Bidan Dampingi Ibu Cegah Stunting)	Puskesmas Mon Geudong	91.00
2	HKG (Hari Kesehatan Gampong)	Puskesmas Mon Geudong	86.00
3	Ahad Festival (Penyediaan Akses Pasar Lokal Bagi Pelaku UMKM)	Disperindagkop & UKM	85.00
4	Ceudah Brat (Cerdas Elektronik untuk Digital Arsip Berani dan Akurat)	Disperindagkop & UKM	79.00
5	Dasibangsida (Database Hasil Penelitian, Informasi Pembangunan dan Inovasi Daerah)	BAPPEDA	78.00
6	Umbi Kanjai (UMKM Center, Majukan Bisnis Ciptakan Keajaiban)	Disperindagkop & UKM	75.00
7	Sipentalmu (Aplikasi Presensi Digital SD Muhammadiyah)	SDS Muhammadiyah	73.00



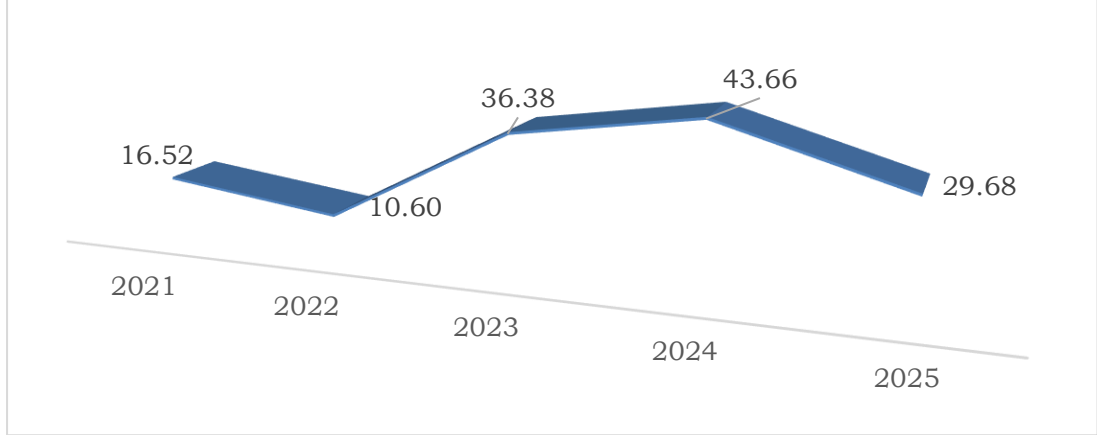
No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah / Inisiator	Nilai Kematangan Inovasi
8	Pliek Digata (Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Untuk Anda)	Disdukcapil	72.00
9	Kolaborasi Pemasalan Olahraga Senam Pada Kegiatan Ahad Festival	Disporapar	70.00
10	Peusijuk (Perekaman Untuk Siswa/i Jangkau Usia KTP)	Disdukcapil	70.00
11	Pelataran PBB-P2 (Pelayanan Antar Himbauan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan)	BPKD	63.00
Tahun 2025			
1	DASIBANGSIDA (Database Hasil Penelitian, Informasi Pembangunan dan Inovasi Daerah)	Bappeda	81
2	LALAT (Lapak Alat Literasi)	DIisperpusip	59
3	PASTA GA PARAH (Pasar Tani dan Gerakan Pangan Murah)	DKPPP	57
4	Beravsi (Belajar Dari Video Animasi)	SMP Negeri 3 Lhokseumawe	55
5	Konsumen Perpus	Disperpusip	55
6	Cemara Eksdanxa	SD Negeri 1 Banda Sakti	50

Sumber : <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

Untuk tahun 2024 Kota Lhokseumawe memiliki 11 Perangkat Daerah yang telah menginput data inovasi ke dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023, dengan Tingkat kematangan inovasi tertinggi sebesar 91 dan terendah sebesar 63.

Indeks Inovasi Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2023 sebesar 36,38 berada pada peringkat ke 83 di Indonesia. Nilai IID ini tergolong dalam kelompok pemerintah kota yang inovatif. IID tahun 2023 ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang pada saat itu IID Kota Lhokseumawe sebesar 10.60 dan berada pada peringkat ke 91 di Indonesia. Tahun 2024 IID Kota Lhokseumawe meningkat kembali menjadi sebesar 43.66 dan berada pada peringkat ke 77 di Indonesia. Namun tahun 2025 IID Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi sebesar 29.68 berada pada peringkat 87 di Indonesia dalam kelompok kurang inovatif. Selanjutnya berikut ini merupakan IID Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 s.d 2025.

Gambar 2.37
Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025



Sumber : SK Kemendagri tentang IID 2021-2025 (diolah)



2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan Penerapan ekonomi hijau dan biru adalah kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB.

2.1.3.3.1 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB menggambarkan posisi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam struktur perekonomian wilayah. Pada kurun waktu 2020-2025, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe fluktuatif cenderung menurun. Pada tahun 2021, kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 9.80% per tahun dan menurun hingga 9,18% pada tahun 2023. Kemudian angka tersebut sedikit meningkat menjadi 9.37% pada tahun 2025 dengan laju pertumbuhan berkontraksi sebesar 2.02%. Penurunan kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ini sejalan dengan bergesernya fungsi Kota Lhokseumawe kepada sektor-sektor tersier.

Tabel 2.41
Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHB)
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun (Juta Rupiah)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	922.451.3	965.874.2	1.025.598.0	1.102.178,5	1.191.769.6
2	Jumlah PDRB dengan Migas	9.431.385.9	10.277.625.4	11.169.632.1	11.848.236,9	12.720.907.1
3	Jumlah PDRB tanpa Migas	7.890.150.1	8.567.858.1	9.457.579.4	10.222.464,0	11.110.849.5
Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)		9.80	9.40	9.18	9.30	9.37
Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)		11.70	11.27	10.84	10,79	10.72
Laju pertumbuhan		-1.65	1.60	0.96	6.07	-2.02

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2026

2.1.3.4 Transformasi Digital

2.1.3.4.1 Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu (1) Infrastruktur dan Ekosistem; (2) Keterampilan Digital; (3) Pemberdayaan; dan (4) Pekerjaan. Pengukuran pilar-pilar tersebut dapat memberikan gambaran kondisi masyarakat digital Indonesia secara lebih komprehensif, objektif, dan terstandardisasi. Capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia untuk Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 s.d 2025 seperti gambar di bawah ini.

Gambar 2.38
Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2025



Sumber: <https://imdi.sdmdigital.id/home>, 2026

Capaian IMDI Kota Lhokseumawe kurun waktu 2022-2024 terus meningkat, tahun 2022 IMDI Kota Lhokseumawe sebesar 40.28 meningkat menjadi sebesar 45.76 tahun 2024, namun tahun 2025 capaian IMDI Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi sebesar 42.00. Dari 4 (empat) pilar dari 2022 s.d 2024 pilar 2 s.d pilar 4 mengalami peningkatan hanya pilar 1 yang mengalami penurunan. Tahun 2025 pilar ketrampilan digital dan pemberdayaan mengalami penurunan.

2.1.3.5 Integritas Ekonomi Domestik dan Global
2.1.3.5.1 Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) adalah komponen pengeluaran terhadap produk domestik bruto (PDB) yang menunjukkan seberapa besar nilai tambah baru dalam suatu perekonomian diinvestasikan dari pada dikonsumsi. Komponen ini mengukur nilai perolehan aset tetap baru atau yang sudah ada oleh sektor bisnis, pemerintah, dan rumah tangga murni (tidak termasuk perusahaan yang tidak berbadan hukum) dikurangi penjualan aset tetap.

Tabel 2.42
Pembentukan Modal Tetap Bruto PDRB ADHK 2010 Menurut
Pengeluaran Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (juta rupiah)

No	Komponen	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.049,79	3.045,85	3.047,56	3.255,85	3.304,06
2	PDRB Pengeluaran	7.252,90	7.543,74	7.861,01	8.211,43	8.489,95
	Persentase	42.05	40.38	38.77	39.65	38.92

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2026



Pada kurun waktu 2021-2025, Pembentukan Modal Tetap Bruto pada PDRB ADHK 2010 menurut pengeluaran Kota Lhokseumawe mengalami penurunan. Pada Tahun 2021 PMTB sebesar 3.049,79 juta atau 42.05% dari PDRB ADHK 2010 menurut Pengeluaran dan terus menurun sampai tahun 2023 menjadi sebesar 3.047,56 juta atau 38,77% namun pada tahun 2024 PMTB sedikit mengalami peningkatan menjadi 3.255,85 atau sebesar 39,65% dari PDRB ADHK 2010 menurut pengeluaran. Tahun 2025 PMTB mengalami peningkatan menjadi 3.304,06 juta namun kenaikannya tidak signifikan dengan kenaikan PDRB ADHK 2010 menurut pengeluaran sehingga PMTB menjadi 38.92%.

2.1.3.5.2 Ekspor Barang dan Jasa

Nilai net ekspor antar daerah merupakan selisih nilai ekspor dan impor antardaerah. Ekspor dan impor antar daerah merupakan nilai transaksi alih kepemilikan ekonomi dalam bentuk barang dan jasa antara non-residen dengan residen suatu daerah. Adapun perkiraan nilai net ekspor antar daerah saat ini menggunakan metode Cross Houlling.

Tabel 2.43
Ekspor Barang dan Jasa PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (juta rupiah)

No	Komponen	2021	2022	2023	2024	2025
1	Ekspor Neto	-391,39	-43,67	105,85	34,51	-19.54
2	PDRB Pengeluaran	7.252,90	7.543,74	7.861,01	8.211,43	8.489,95
Persentase		-5.4	-0.58	1.35	0.42	-0.23

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2026

Nilai Ekspor barang dan jasa Kota Lhokseumawe periode 2021-2025 mengalami tren positif walaupun peningkatan tidak signifikan. Pada tahun 2021 ekspor barang dan jasa Kota Lhokseumawe sebesar (391.39) juta rupiah atau sebesar (-5.4)% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 105,85 juta rupiah atau 1,35% namun pada tahun 2025 ekspor barang dan jasa Kota Lhokseumawe mengalami kontraksi menjadi (19.54) juta rupiah atau (0,23)%.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.6.1 Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah atau penyedia layanan publik lainnya. Infrastruktur yang dimaksud di sini meliputi berbagai sektor, seperti transportasi, energi, air bersih, saluran pembuangan, telekomunikasi, perumahan, jalan, dan jembatan. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Lhokseumawe Tahun 2024 sebesar 59,26 dan tahun 2025 menurun menjadi 58.00

2.1.3.6.2 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni ini didapatkan dengan membandingkan data jumlah seluruh rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dengan jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dan dikalikan dengan 100. Indikator ini akan dapat menunjukkan persentase rumah layak huni yang ada di Kota Lhokseumawe secara time series dari tahun 2021-2025.

Tabel 2.44
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah seluruh rumah layak huni	35.856	37.074	36.780	37.878	37.917
2	Jumlah seluruh rumah	42.354	43.930	45.504	46.315	47.300
Cakupan ketersediaan Rumah Layak Huni		84.65	84.39	80.83	81.78	80.16

Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Berdasarkan data yang ada cakupan ketersediaan rumah layak huni di Kota Lhokseumawe dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 cenderung menurun. Indikator cakupan rumah layak huni sebetulnya kurang tepat apabila digunakan untuk mengukur kondisi kewilayahan di Kota Lhokseumawe. Indikator yang lebih sesuai adalah rumah tidak layak huni. Dari halaman resmi Kementerian PUPR, Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.

Tabel 2.45
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah tidak layak huni	15.969	18.587	17.199	8.430	9.383

Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 terlihat jika jumlah RTLH di Kota Lhokseumawe mengalami fluktuatif kecenderungan meningkat. Hal tersebut dikarenakan program dan kegiatan penanganan terhadap RTLH belum efektif dilaksanakan.

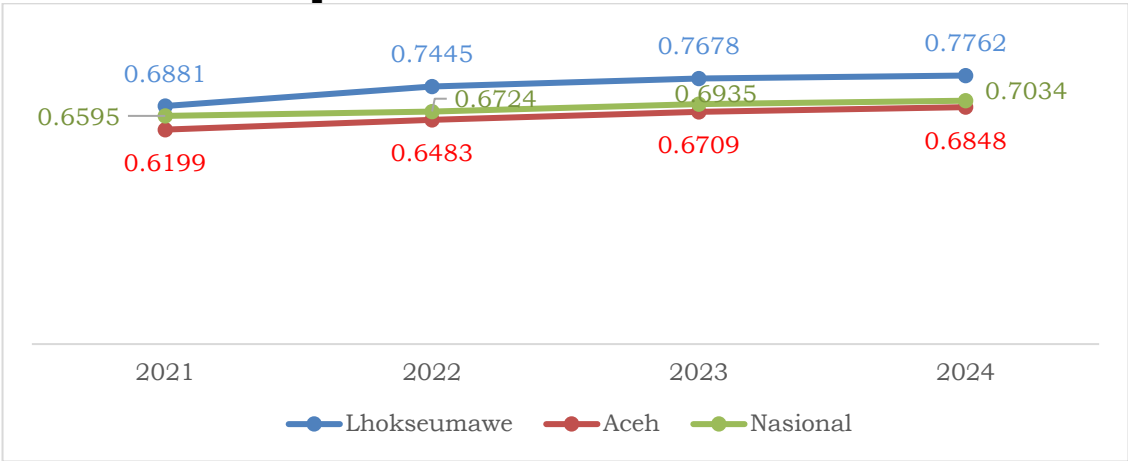
2.1.3.6.3 Persentase Desa Mandiri

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa Nomor 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya. Untuk mengetahui nilai Indek Desa Membangun (IDM) di



Kota Lhokseumawe pada tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 2.39
Perkembangan IDM Kota Lhokseumawe
Terhadap Aceh dan Nasional Tahun 2021-2024



Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe, 2026.

Dari gambar dapat di lihat secara lengkap status perkembangan desa di Kota Lhokseumawe dibandingkan dengan Aceh dan nasional mulai tahun 2021-2024. Status IDM Kota Lhokseumawe meningkat dari tahun 2021 sebesar 0.7445 menjadi 0.7762 termasuk dalam kategori Maju dengan nilai 0.7762 lebih baik dari Provinsi Aceh Tahun 2024 masuk dalam Kategori Berkembang dengan nilai 0,6848, meningkat dibandingkan dengan status IDM Kota Lhokseumawe tahun 2021 dengan nilai 0,6881. Meskipun demikian, perolehan nilai status IDM Kota Lhokseumawe Tahun 2022 berada di atas nilai rata-rata Aceh dan nasional yaitu 0,6724. Dan pada Tahun 2024 nilai IDM Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 0.7762 di atas Aceh dengan nilai 0,6848 dan nasional sebesar 0.7034. Tahun 2025 Indeks Desa Membangun (IDM) berubah nama menjadi Indeks Desa. Indeks Desa Kota Lhokseumawe tahun 2025 sebesar 71,73. Adapun dapat dilihat pada tabel di bawah ini untuk IDM masing-masing Gampong di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.46
Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No.	Nama Desa	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
A	Muara Dua					
	- Mandiri	0	1	2	3	3
	- Maju	5	12	14	13	13
	- Berkembang	12	4	1	1	1
	- Tertinggal	0	0	0	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
B	Banda Sakti					
	- Mandiri	1	5	12	16	17
	- Maju	3	12	6	2	1
	- Berkembang	14	1	0	0	0
	- Tertinggal	0	0	0	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
C	Blang Mangat					
	- Mandiri	0	2	2	4	5



No.	Nama Desa	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
	- Maju	2	1	7	8	11
	- Berkembang	20	19	13	10	6
	- Tertinggal	0	0	0	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
D	Muara Satu					
	- Mandiri	1	2	2	2	4
	- Maju	3	6	6	6	6
	- Berkembang	7	3	3	3	1
	- Tertinggal	0	0	0	0	0
	- Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
	TOTAL	68	68	68	68	68

Sumber: Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi, 2026

Untuk lebih jelas jumlah status desa di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025 dapat di lihat pada gambar dibawah ini:

Tabel 2.47

Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Desa Mandiri	2	10	18	25	29
2	Desa Maju	13	31	33	29	31
3	Desa Berkembang	53	27	7	14	8
4	Desa Tertinggal	0	0	0	0	0
5	Desa Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
6	Jumlah Desa	68	68	68	68	68
Persentase Desa Mandiri		2,94	14,71	26,47	36,76	42,65

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Dari Gambar di atas, terlihat bahwa status desa yang sangat tertinggal dan desa tertinggal di Kota Lhokseumawe tidak ada. Sedangkan status desa berkembang tahun 2021 yaitu 53 desa pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 27 desa yang berstatus desa berkembang dan tahun 2024 menjadi 14 desa atau 20,59%. Status desa maju terdapat pada 13 desa pada tahun 2021, jumlah desa yang berstatus maju tahun 2025 meningkat menjadi sebanyak 31 desa maju atau 45,58%. Status desa mandiri pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana terdapat 29 desa yang berstatus desa mandiri atau 42.65%

Penurunan atau peningkatan status desa dari status mandiri menjadi status maju serta status desa maju menjadi berkembang dan sebaliknya dikarenakan adanya faktor-faktor yang tidak mampu dipertahankan ataupun dipenuhi oleh desa tersebut atau terdapat faktor-faktor yang mampu dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk mengetahui nilai Indek Desa Membangun (IDM) di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.48

Indeks Desa Membangun Kota Lhokseumawe Tahun 2025

KECAMATAN	NAMA GAMPONG	ID	STATUS
BANDA SAKTI	BANDA MASEN	82.68	Mandiri
	HAGU BARAT LAUT	89.29	Mandiri
	HAGU SELATAN	81.26	Mandiri
	HAGU TEUNGOH	85.83	Mandiri
	JAWA BAROE	73.37	Maju
	KAMPUNG JAWA LHOKSEUMAWE	94.49	Mandiri



KECAMATAN	NAMA GAMPONG	ID	STATUS
BLANG MANGAT	KEUDE ACEH	80.79	Mandiri
	KOTA LHOKSEUMAWE	83.78	Mandiri
	KUTA BLANG	83.78	Mandiri
	LANCANG GARAM	80.79	Mandiri
	MON GEUDONG	83.46	Mandiri
	PUSONG BARU	82.68	Mandiri
	PUSONG LHOKSEUMAWE	81.73	Mandiri
	SIMPANG EMPAT	82.99	Mandiri
	TUMPOK TEUNGOH	84.57	Mandiri
	UJONG BLANG	83.62	Mandiri
	ULEE JALAN	79.84	Mandiri
	UTEUN BAYI	82.36	Mandiri
	ALUE LIM	70.08	Maju
	ASAN KAREUNG	71.18	Maju
	BALOI	75.28	Maju
	BLANG BULOH	74.17	Maju
	BLANG CUT	82.36	Mandiri
	BLANG PUNTEUET	73.86	Maju
	BLANG TEUE	62.52	Berkembang
	BLANG WEU BAROH	77.48	Maju
MUARA DUA	BLANG WEU PANJOE	66.93	Berkembang
	JAMBO MESJID	72.91	Maju
	JAMBO TIMU	77.64	Maju
	JEULIKAT	73.07	Maju
	KEUDE PUNTEUET	84.09	Mandiri
	KUALA	79.21	Maju
	KUMBANG PUNTEUET	89.13	Mandiri
	MANE KAREUNG	70.08	Maju
	MESJID PUNTEUET	86.93	Mandiri
	RAYEUK KAREUNG	81.73	Mandiri
	SEUNEUBOK	68.98	Berkembang
	TEUNGOH	68.35	Berkembang
	TUNONG	66.6	Berkembang
	ULEE BLANG MANE	82.83	Mandiri
	ALUE AWE	82.99	Mandiri
	BLANG CRUM	75.43	Maju
	BLANG POROH	72.28	Maju
	COT GIREK KANDANG	71.65	Maju
	CUT MAMPLAM	73.07	Maju
MUARA SATU	KEUDE CUNDA	62.92	Maju
	LHOK MON PUTEH	72.76	Maju
	MEUNASAH ALUE	71.50	Maju
	MEUNASAH BLANG	73.07	Maju
	MEUNASAH MANYANG	75.75	Maju
	MEUNASAH MEE	77.95	Maju
	MEUNASAH MESJID	83.94	Mandiri
	MNS. PANGGOI	75.59	Maju
	PALOH BATEE	72.28	Maju
	PAYA BILI	60.16	Berkembang
	PAYA PUNTEUET	71.65	Maju
	UTEUNKOT	82.99	Mandiri
	BATUPHAT BARAT	83.94	Mandiri
	BATUPHAT TIMUR	89.61	Mandiri
	BLANG NALEUNG MAMEH	72.44	Maju
	BLANG PANYANG	72.91	Maju
	BLANG PULO	81.10	Mandiri
	COT TRIENG	69.45	Maju



KECAMATAN	NAMA GAMPONG	ID	STATUS
	MEUNASAH DAYAH	75.43	Maju
	MEURIA PALOH	84.88	Mandiri
	PADANG SAKTI	68.66	Berkembang
	PALOH PUNTI	74.49	Maju
	UJONG PACU	76.54	Maju

Sumber: Kementerian Desa, PDTT dan Transmigrasi, 2026

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.1.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak adalah perbandingan atau presentasi penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) nominal suatu daerah. Tax ratio ini berfungsi untuk mengukur kinerja penerimaan pajak suatu daerah. Ia berguna untuk mengukur seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan negara dengan sumber dayanya sendiri. Semakin tinggi nilai tax ratio suatu daerah, maka pemerintah daerah lebih dapat mengandalkan APBD untuk melakukan pembangunan. Pemerintah perlu berupaya meningkatkan penghasilan dari pajak dengan memperluas wilayah jangkauan objek pajak.

Tabel 2.49

Perkembangan Rasio Pajak Terhadap PDRB
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Tahun	Realisasi Pajak	PDRB	Tax Ratio
1	2021	82.129.767.768,97	9.422.285.900.000	0,87
2	2022	88.725.171.946,20	10.263.425.400.000	0,86
3	2023	79.085.772.870,00	11.169.632.100.000	0,71
4	2024	86.431.498.758,00	11.848.236.900.000	0,73
5	2025	103.384.510.190,00	12.720.907.100.000	0,81

Sumber : BPS Lhokseumawe dan BPKD Lhokseumawe, 2026

Dari tabel di atas rasio pajak terhadap PDRB Kota Lhokseumawe masih sangat minim, pada tahun 2021 rasio pajak terhadap PDRB sebesar 0.87 persen. Persentase ini sedikit mengalami penurunan pada tahun 2025, rasio pajak menurun menjadi 0,81 persen. Pemerintah Daerah perlu berupaya meningkatkan penghasilan dari pajak dengan memperluas wilayah jangkauan objek pajak dan mencari potensi pendapatan lainnya termasuk dari pajak dan retribusi.

2.1.3.7.2 Tingkat Inflasi

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nilai inflasi akan meningkat jika terjadi kenaikan harga barang atau jasa di suatu wilayah. Kenaikan harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Inflasi terkait erat dengan ketersediaan, permintaan dan harga barang atau jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah. Inflasi secara langsung berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi dikenal dengan istilah laju inflasi. Laju Inflasi Kota Lhokseumawe sebagai berikut.

Secara umum inflasi Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2021-2025 fluktuatif. Inflasi tertinggi Kota Lhokseumawe adalah tahun 2025 yaitu sebesar 5.56% dan inflasi pada tahun 2023 adalah terendah yaitu sebesar 1.56%. Mulai Tahun 2021, perhitungan inflasi menggunakan tahun dasar 2018 sehingga terdapat perbedaan



pengelompokan pengeluaran menjadi 11 kelompok pengeluaran. Inflasi Kota Lhokseumawe menurut kelompok pengeluaran adalah sebagai berikut.

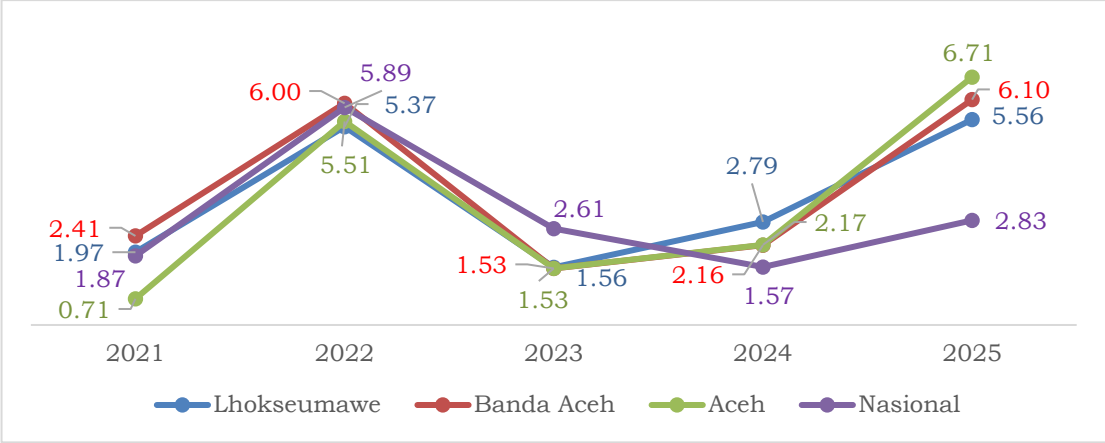
Tabel 2.50
Inflasi Kota Lhokseumawe menurut Kelompok Pengeluaran (YoY)
Tahun 2021-2025

No	Kelompok Pengeluaran	2021	2022	2023	2024	2025
1	Makanan, Minuman Dan Tembakau	3.36	5.13	1.34	5.28	10.19
2	Pakaian Dan Alas Kaki	2.94	5.12	4.20	1.36	1.10
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar Lainnya	1.48	2.84	0.47	1.55	1.0
4	Perlengkapan, Peralatan Dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1.35	5.52	-0.71	2.85	0.84
5	Kesehatan	1.22	0.33	1.81	0.04	2.02
6	Transportasi	0.38	20.65	1.86	0.17	1.30
7	Informasi, Komunikasi, Dan Jasa Keuangan	0.25	-0.59	0.28	2.32	0.16
8	Rekreasi, Olahraga, Dan Budaya	0.25	7.49	8.93	0.89	5.04
9	Pendidikan	1.44	1.13	0.52	3.86	1.08
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman/restoran	0.05	3.76	1.59	2.06	5.26
11	Perawatan Pribadi Dan Jasa Lainnya	1.63	3.47	2.45	3.43	11.99
Inflasi Kota Lhokseumawe		1.97	5.37	1.56	2.79	5.56

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2026

Inflasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 sebesar 1.97% lebih tinggi dibandingkan inflasi Aceh yaitu sebesar 0.71% dan inflasi nasional sebesar 1.87%. Kemudian pada tahun 2024 inflasi Kota Lhokseumawe sebesar 2.79% lebih tinggi dibandingkan inflasi Aceh yaitu 2.17% dan inflasi nasional yaitu sebesar 1.57%. Penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau yaitu sebesar 5.28% sedangkan kelompok pengeluaran dengan inflasi terendah adalah kesehatan yaitu sebesar 0.04%.

Gambar 2.40
Perbandingan Inflasi Kota Lhokseumawe, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2026



Selanjutnya pada tahun 2025 inflasi Kota Lhokseumawe sebesar 5.56% lebih rendah dibandingkan inflasi Aceh yaitu 6.10% dan lebih tinggi dari inflasi nasional yaitu sebesar 2.83%. Penyumbang inflasi terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya yaitu sebesar 11.99% dengan komoditas dominan yaitu emas perhiasan sedangkan kelompok pengeluaran dengan inflasi terendah yaitu informasi, komunikasi dan jasa keuangan yaitu sebesar 0.16%.

2.1.3.7.3 Total Kredit/PDRB dan Dana Pihak Ketiga/PDRB

Dalam proses intermediasi di sektor keuangan terdapat hubungan antara Ultimate Lender (UL), yaitu pemilik dana di masyarakat, dengan Ultimate Jadi, tidak berlebihan jika dikatakan bank memiliki tempat yang teramat penting dalam perekonomian. Karena peran bank sebagai lembaga yang dapat Borrower (UB), yaitu pengguna dana untuk menjalankan aktivitas ekonomi. Ultimate Lender adalah kelompok “penabung”. Jumlah mempengaruhi kegiatan perekonomian melalui perannya di dalam proses penciptaan kredit serta berbagai jasa keuangan lain yang diberikan. Seluruh tabungan kelompok ini membentuk penawaran loanable funds. Sementara ultimate borrower adalah kelompok masyarakat yang memerlukan dana untuk operasi atau perluasan usahanya. Jenis kelompok yang terakhir ini didominasi oleh golongan pengusaha, perusahaan, atau industri. Lembaga keuangan, termasuk dengan bank, berada di antara ultimate lender dan ultimate borrower untuk menjembatani hubungan khas antara keduanya, memberikan jasa intermediasi berupa proses keperantaraan antara surplus unit dengan defisit unit dalam ekonomi. Perkembangan intermediasi sektor keuangan di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 sebagai berikut.

Tabel 2.51
Total Kredit dan dana Pihak Ketiga Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025 (juta)

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Total Kredit	3.870.255	4.332.324	4.352.104	5.528.759	6.140.357
2	Total Dana Pihak Ketiga	4.451.995	4.640.859	4.376.562	4.846.497	3.051.782
3	PDRB ADHB	9.431.385.9	10.277.625.4	11.169.632.1	11,848,236.9	12.720.907.1
Kredit/PDRB		41,04	42,15	38,96	46,66	48,27
Dana Pihak Ketiga/PDRB		47,20	45,15	39,18	40,90	23,99

Sumber : Bank Indonesia, 2026 dan LDA 2026

2.1.3.7.4 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan TPAKD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (supply side) dan permintaan (demand side) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Indeks ini memberikan gambaran yang informatif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional dalam merumuskan

program dan kebijakan yang lebih efektif. Tujuan dari IKAD adalah sebagai berikut:

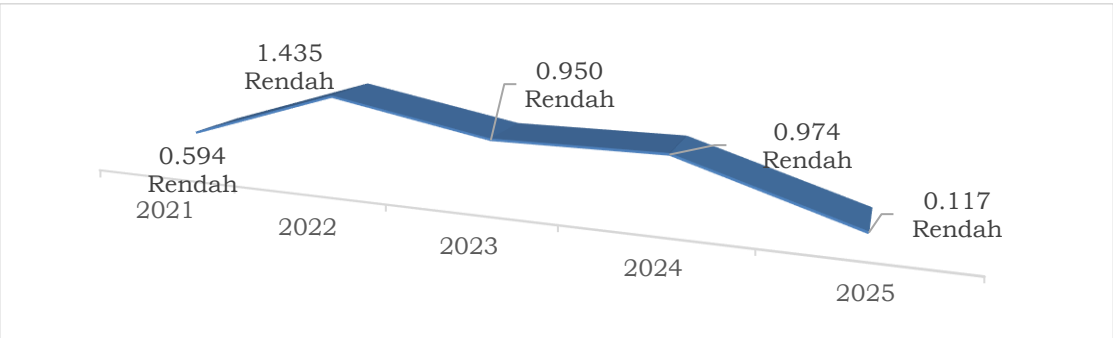
1. Memperkuat pengambilan keputusan strategis dalam penyusunan dan implementasi program inklusi keuangan di daerah berbasis data dan informasi yang komprehensif;
2. Memperkuat pemantauan kinerja dan efektivitas program TPAKD di tingkat daerah (kabupaten/kota) dan memberi informasi yang berguna bagi pemangku kepentingan dalam merancang program dan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan akses keuangan yang inklusif;
3. Melengkapi Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), memperluas cakupan, serta memberikan potret kondisi inklusi keuangan yang lebih mendalam.

Hasil Pengukuran Indeks Akses Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 adalah sebesar 3,88 berada pada posisi ketiga setelah Kota Sabang sebesar 5,44 dan Kota Banda Aceh sebesar 5,26. Dan Tahun 2025 Indeks Akses Keuangan Daerah Kota Lhokseumawe sebesar 5.27 berada pada posisi kedua setelah Kota Banda Aceh sebesar 6.60.

2.1.3.7.5 Indeks Kemandirian Fiskal

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Berikut Indeks Kapasitas Fiskal Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2025.

Gambar 2.41
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025



Sumber : Kementerian Keuangan, 2026

Dari gambar di atas dapat dilihat Indeks kapasitas fiskal Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025 fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Tahun 2021 Indeks kapasitas fiskal lhokseumawe sebesar 0.594 dengan kategori rendah dan tahun 2025 menurun menjadi 0.117 masih dalam kategori rendah.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

2.1.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi

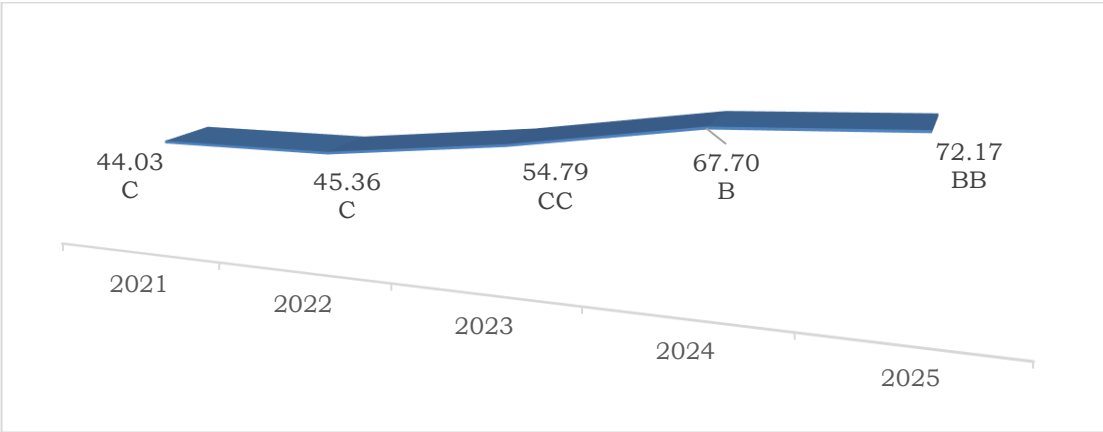
Pelayanan umum sebagai muara dari penyelenggaraan pemerintahan dapat ditinjau melalui kualitas birokrasi sebagai sistem



hulu dan kualitas pelayanan publik sebagai sistem hilir. Kualitas birokrasi dapat diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Reformasi Birokrasi adalah program pemerintah dalam membangun aparatur negara sebagai respon atas tuntutan reformasi pasca krisis tahun 1998 yang dilandasi keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokrasi dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.

Penerapan reformasi birokrasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good government) sebagai prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Reformasi birokrasi pada pemerintah daerah menggambarkan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih berkenaan dengan roadmap nasional. Kinerja reformasi birokrasi di Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.42
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025



Sumber: Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2025

Kinerja reformasi birokrasi Kota Lhokseumawe belum menunjukkan nilai yang baik setiap tahunnya ditandai dengan rendahnya capaian hasil evaluasi selama 3 (tiga) tahun dengan predikat C (kurang), namun pada tiga tahun selanjutnya mulai tahun 2023 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe meningkat menjadi prediket CC dengan poin 54.79 dan tahun 2024 kembali meningkat menjadi 67.70 atau predikat B dan tahun 2025 meningkat menjadi 72.17 atau predikat BB. Capaian yang meningkat ini tidak lepas dari perubahan metode pengukuran yang menyertakan komponen reformasi birokrasi tematik yang menjadi pengungkit utama. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Lhokseumawe telah berusaha menciptakan dampak dalam upaya reformasi birokrasi.

2.1.4.1.2 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

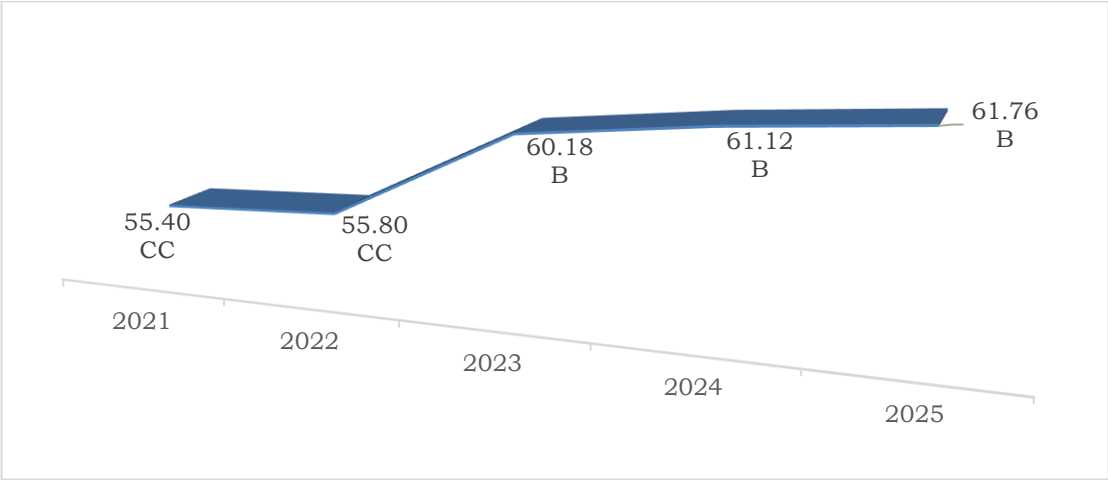
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,



pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi SAKIP dapat memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran yang merupakan hasil dari implementasi manajemen kinerja dan anggaran, berbasis kinerja secara berkesinambungan.

Penilaian SAKIP pemerintah daerah dibagi menjadi 7 kategori, yakni paling rendah D dengan rentang nilai 0-30. Kemudian kategori C untuk nilai 30-50, CC untuk nilai 50-60, B untuk nilai 60-70, BB untuk nilai 70-80, dan A untuk nilai 80-90. Adapun kategori tertinggi yaitu AA dengan hasil penilaian 90-100. Perkembangan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan dari tahun 2020-2024. Tahun 2020 nilai SAKIP Kota Lhokseumawe sebesar 55.00 (kategori CC) sedangkan tahun 2025 meningkat menjadi 61.76 yang termasuk dalam kategori B. Perkembangan Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe periode 2021-2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.43
Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025



Sumber: Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2026

Selanjutnya nilai komponen hasil evaluasi SAKIP Kota Lhokseumawe tahun 2021 s.d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Capaian Komponen nilai SAKIP
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Komponen Nilai SAKIP	Bobot	2021	Bobot	2022	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	20.22	30	20.29	22.15	22.37	21.98
2	Pengukuran Kinerja	25	9.22	30	13.05	14.09	14.32	14.32
3	Pelaporan Kinerja	15	8.75	15	8.76	9.19	9.37	9.52
4	Evaluasi internal	10	5.83	25	13.70	14.75	15.06	15.94
5	Capaian Kinerja	20	11.38	-	-	-	-	-
Nilai Hasil SAKIP		100	55.40	100	55.80	60.18	61.12	61.76
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC		CC	B	B	B

Sumber: Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2026



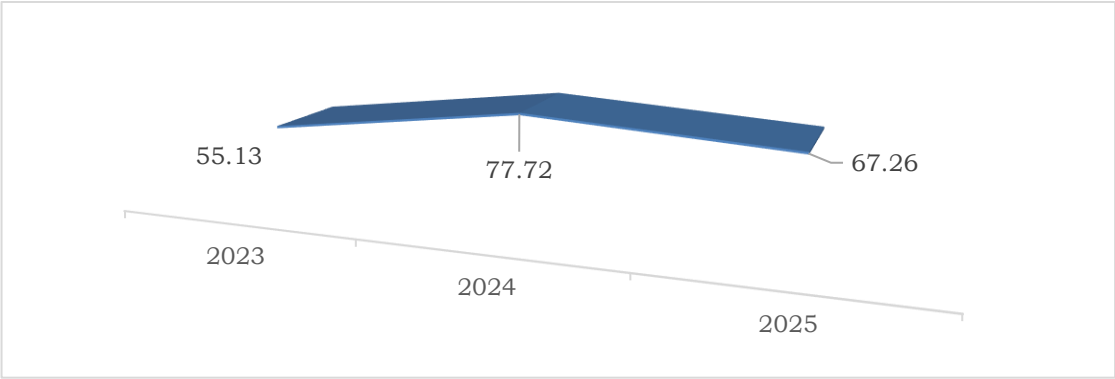
2.1.4.1.3 Indeks Reformasi Hukum

Salah satu komponen strategis dalam upaya perwujudan reformasi birokrasi adalah penataan regulasi dengan pelaksanaan reformasi hukum. Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas, bersih dan akuntabel pada pemerintah daerah yang diukur dengan Indeks Reformasi Hukum (IRH).

Capaian Indeks Reformasi Hukum Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 55,13 dan pada tahun 2024 Indeks Reformasi Hukum Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 77,72 namun tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 67.26.

Gambar 2.44

Indeks Reformasi Hukum Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2025



Sumber: Bagian Hukum Setdako Lhokseumawe, 2026

2.1.4.1.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia, dengan struktur penilaian:

- a. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Penilaian domain kebijakan SPBE terdiri atas kebijakan tata kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE. Domain tata kelola SPBE akan dievaluasi dari aspek kelembagaan, strategi dan perencanaan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sedangkan domain layanan SPBE akan dievaluasi dari aspek administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Tabel 2.53

Nilai Indeks SPBE
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai Indeks SPBE	1.54 Kurang	NA	2.35 Cukup	2.80 Baik	2.80 Baik

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, 2026

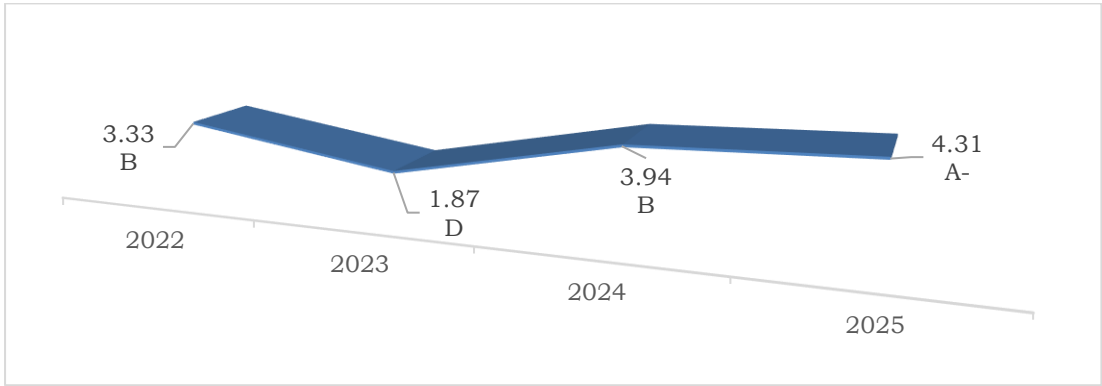


Hasil evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kota Lhokseumawe sejak tahun 2021 masuk dalam kategori kurang dan tahun 2023 Nilai Indeks SPBE kota Lhokseumawe meningkat menjadi 2.35. Tahun 2024, evaluasi penyelenggaraan SPBE di Kota Lhokseumawe menunjukkan kategori baik dengan nilai Indeks SPBE 2,80 dan tahun 2025 masih tetap 2.80.

2.1.4.1.5 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan 6 (enam) Aspek Kebijakan Pelayanan yaitu Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi Pelayanan. Indeks Pelayanan Publik Kota Lhokseumawe Tahun 2022 sebesar 3.33 dengan kategori (B-) dengan Lokus penilaian pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada Tahun 2023 Nilai IPP Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi sebesar 1.87 dengan kategori (D) dengan lokus penilaian pada Dinas Sosial dan Kecamatan Blang Mangat. Sedangkan tahun 2024 kembali meningkat menjadi 3.94 dengan kategori B dengan Lokus Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tahun 2025 IPP Kota Lhokseumawe meningkat menjadi sebesar 4.31 dengan kategori A-

Gambar 2.45
Indeks Pelayanan Publik Kota Lhokseumawe
Tahun 2022-2025



Sumber: Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2026

2.1.4.1.6 Indeks Integritas Nasional

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh KPK sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) serta upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan. Survei melibatkan 3 sumber data, yaitu sumber internal yang merupakan pegawai di K/L/PD, sumber eksternal yang merupakan pengguna layanan publik, vendor, dan penerima manfaat dari pelaksanaan tugas dan fungsi K/L/PD, serta sumber eksper atau narasumber ahli yang terdiri dari auditor BPK, BPKP, Ombudsman, dsb. Untuk menjaga objektivitas angka indeks, SPI juga menggunakan data objektif sebagai faktor koreksi.



Tabel 2.54
Capaian Survei Penilaian Integritas Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
SPI KPK	66,33	70,94	69,44	64,37	74.31

Sumber: Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2026

Dari tabel di atas capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK di Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 sebesar 66,33 dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 70,94 dan tahun 2023 menurun menjadi sebesar 69.44 selanjutnya tahun 2024 kembali turun menjadi sebesar 64,37. Indeks tersebut menempatkan Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam kategori rentan yang berarti Pemerintah Kota Lhokseumawe sangat rentan terpapar praktik korupsi. Hal ini akibat sistem pencegahan yang lemah/tidak berjalan dan/atau meningkatnya jumlah oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas yang menempati posisi/jabatan/layanan strategis/kunci di lembaga, sehingga meningkatkan risiko korupsi lembaga secara keseluruhan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa upaya dan program pencegahan korupsi dilakukan lembaga saat ini tidak efektif. Namun tahun 2025 capaian SPI KPK Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 74.31.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

2.1.4.2.1 Persentase Penegakan Perda

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) mempunyai tugas menegakkan Qanun dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan syariat islam. Satpol PP Kota Lhokseumawe memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga yang mengganggu ketertiban umum, melakukan pemeriksaan dan tindakan Represif non-yustisial terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Tabel 2.55
Persentase Penegakan Peraturan Daerah/Qanun
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Penegakan Perda/Qanun	8	19	24	67	120
2.	Jumlah Pelanggaran Perda/Qanun	15	20	27	70	120
Persentase		53,00	95,00	88,00	95,00	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2026

Dari tabel di atas, dapat terlihat pada tahun 2021-2025 persentase penegakan Peraturan Daerah/Qanun yang terjadi di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 persentase penegakan Peraturan Daerah/Qanun sebesar 53% dan selanjutnya di tahun 2022 meningkat tajam menjadi 95% dan menurun menjadi 88%

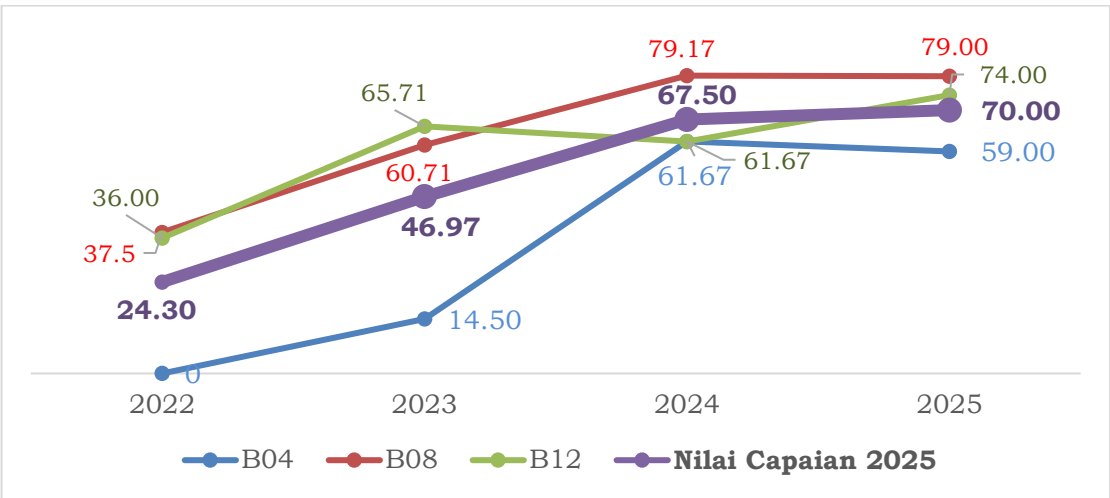


di tahun 2023 dan meningkat kembali menjadi 95%. Peningkatan persentase penegakan perda/qanun merupakan salah satu wujud strategi penegakan yang lebih berprioritas secara preemtif dan preventif dengan tidak mengendurkan strategi penegakan secara represif yustisi dan non yustisi. Dan tahun 2025 meningkat menjadi sebesar 100%.

2.1.4.2.2 Persentase Capaian Aksi HAM

RANHAM merupakan rencana aksi nasional yang memuat berbagai kegiatan dan target yang harus dicapai dalam rangka memastikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM diIndonesia. Pemerintah melalui RANHAM berusaha untuk memastikan Hak Asasi Manusia dihormati dan dilindungi serta dipenuhi dan ditegakkan dengan baik. RANHAM memiliki berbagai sasaran strategis seperti peningkatan kapasitas aparatur negara dalam penanganan HAM peningkatan akses masyarakat terhadap informasi HAM serta partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM. Capaian Aksi HAM Kota Lhokseumawe tahun 2022 s.d 2025 adalah sebagai berikut.

Gambar 2.46
Persentase Capaian Aksi HAM Kota Lhokseumawe
Tahun 2022-2025



Sumber : Kemenkumham, 2026

Pelaporan Aksi HAM periode B04, periode pelaksanaan bulan januari-april merupakan periode perencanaan pelaksanaan Aksi HAM, periode B-08, periode bulan januari-agustus, merupakan periode implementasi Aksi HAM dan periode B12, periode bulan januari-november/desember merupakan periode evaluasi pelaksanaan aksi HAM tahun berkenaan. Capaian Aksi HAM kota Lhokseumawe dari tahun 2022 s.d 2025 terus mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 24.3 persen menjadi 70.00 persen pada tahun 2025.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.1.4.3.1 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah merupakan upaya untuk mengukur dan mengetahui kondisi daya saing suatu daerah ditinjau dari komponen lingkungan pendukung, SDM, pasar, dan ekosistem



inovasi. Ditinjau dari sisi daya dukung wilayah dan sumberdaya manusia, Kota Lhokseumawe memiliki peluang dalam meningkatkan daya saing secara nasional dan bersaing dengan kabupaten/kota lain. Namun saat ini Kota Lhokseumawe masih terkendala dengan isu rendahnya kesempatan kerja dengan tingginya pengangguran terbuka dan kemiskinan sehingga iklim investasi dan tingkat pendidikan merupakan masalah dalam pembangunan Kota Lhokseumawe. Dari hasil pemetaan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025, Kota Lhokseumawe mencapai kategori tinggi yaitu 3,90. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.56						
Indeks Daya Saing Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025						
Aspek	Pilar	Indeks/Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Lingkungan Pendukung	Institusi	3.25	3.88	3.99	4.25	4.58
	Infrastruktur	1.75	1.74	2.48	2.98	2.98
	Adopsi TIK	2.25	3.55	4.47	4.75	4.91
	Stabilitas ekonomi makro	2.02	2.15	2.88	4.11	4.15
SDM	Kesehatan	4.25	4.00	3.99	3.93	3.94
	Ketrampilan	2.46	4.02	4.21	3.82	4.03
PASAR	Pasar produk	1.58	3.79	3.84	4.39	4.47
	Pasar tenaga kerja	2.00	3.10	3.34	4.51	3.89
	Sistem keuangan	1.00	1.10	1.47	2.61	3.21
	Ukuran pasar	4.67	0.48	3.98	4.00	4.02
Ekosistem Inovasi	Dinamisme bisnis	0.42	5.00	2.70	2.73	3.23
	Kapabilitas inovasi	0.42	1.94	3.51	2.87	3.43
SKOR IDSD		2.26	2.89	3.40	3.75	3.90

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2026

Dari Tabel di atas Indeks Daya Saing Daerah Kota Lhokseumawe tahun 2022 sebesar 2,89 meningkat dari IDSD 2021 yaitu 2.26 namun masih berada di bawah Indeks Daya Saing Daerah Propinsi Aceh sebesar 3,15 dan di bawah Indeks Daya Saing Daerah Nasional yaitu sebesar 3.26. Dari 4 Komponen dan 12 Pilar IDSD, komponen pasar pada pilar 10: ukuran pasar skor nya masih rendah yaitu 0.48. Dan pada tahun 2023 Indeks Daya Saing Daerah Kota Lhokseumawe meningkat menjadi sebesar 3.40 dan tahun 2025 kembali meningkat menjadi 3.90 berada di atas IDSD Aceh sebesar 3.61 dan Nasional 3,50.

2.1.4.3.2 Indeks Pembangunan Syariah

Pelaksanaan Syariat Islam diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang pelaksanaannya meliputi aqidah, syariah dan akhlak. Implementasi pelaksanaan syariat Islam salah satu capaiannya diukur dengan Survey Indeks Pembangunan Syariah (IPS) yang dalam hal ini untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai syariat islam dan mengukur sejauh mana penerapan dan pelaksanaannya agar tercapai maqasid syariah (kriteria dan indikator Indeks Pembangunan Syariah).



Indeks Pembangunan Syariah terdiri dari 7 dimensi pembangunan yaitu Akidah, Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan membayar Zakat di Baitul Mal, Melek Al quran, Manajemen Mesjid, Hukum Jinayat dan Akhlak. Adapun Indeks Pembangunan Syariah Kota Lhokseumawe tahun 2024 sebesar 83,91 dengan skor masing-masing dimensi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57
Dimensi Indeks Pembangunan Syariah
Kota Lhokseumawe Tahun 2021 dan 2024-2025

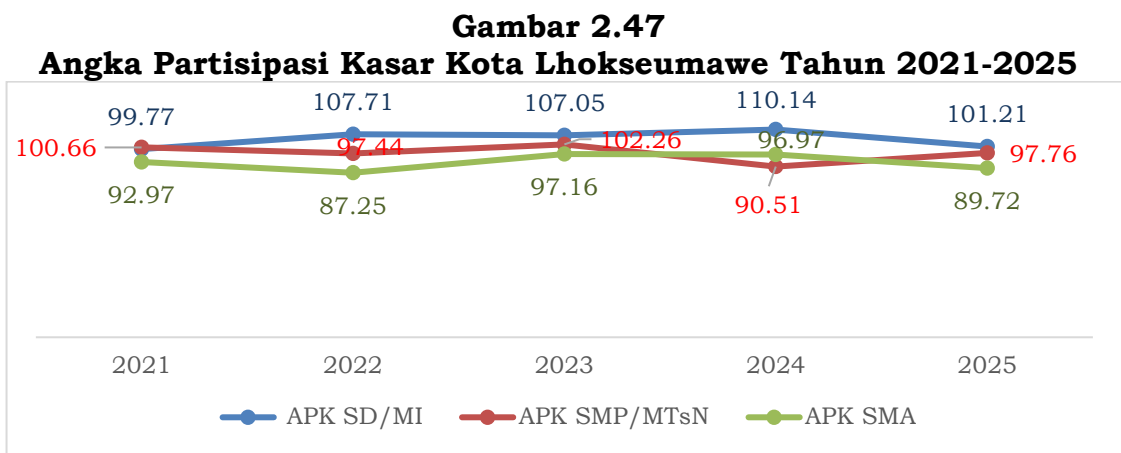
No	Dimensi IPS	2021	2024	2025
1	Akidah	95.83	85,74	85.94
2	Lembaga Keuangan Syariah	79.15	85.97	81.23
3	Kepatuhan membayar Zakat di Baitul Mal	77.12	85.81	81.41
4	Melek Al Quran	87.59	84.56	73.33
5	Manajemen Mesjid	79.15	82.90	81.96
6	Hukum Jinayat	73.03	79.60	79.78
7	Akhlak	88.01	82.76	82.70
8	Kesadaran dan Ketaatan Pelaksanaan Syariat Islam	-	-	75.00
9	Ketahanan Keluarga	-	-	82.75
10	Pembinaan Muallaf, Anak Yatim, serta Fakir Miskin	-	-	76.94
Indeks Pembangunan Syariah		80.65	83,91	80.11

Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh, 2026

Pada tahun 2025 nilai Indeks Pembangunan Syariah Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 80.11 atau turun 3.80 poin. Tahun 2025 Dimensi IPS bertambah menjadi 10 dimensi atau indikator untuk menjawab dinamika kehidupan masyarakat dan implementasi syariat Islam.

2.1.4.4 Kinerja Urusan Pemerintah Daerah
2.1.4.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar
2.1.4.4.1.1 Pendidikan
A. Angka Partisipasi Kasar

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan apapun menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan. Berikut adalah grafik APK di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025.



Sumber: <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>, LDA 2026

Apabila melihat gambar di atas, nilai perentase APK dari jenjang pendidikan SD/MI memiliki persentase lebih dari 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak penduduk dari luar Kota Lhokseumawe yang bersekolah di Kota Lhokseumawe. Angka partisipasi kasar pada jenjang SMA dalam kurun waktu 2022 mengalami penurunan dan tahun 2023 APK SMA mengalami peningkatan, namun tahun 2024-2025 mengalami penurunan kembali. Pada tahun 2022-2024 terjadi kenaikan angka APK pada jenjang SD/MI dikarenakan tingginya daya tampung sekolah di Kota Lhokseumawe dan mutu sekolah yang baik di Kota Lhokseumawe sehingga menjadi pilihan masyarakat dari daerah lain.

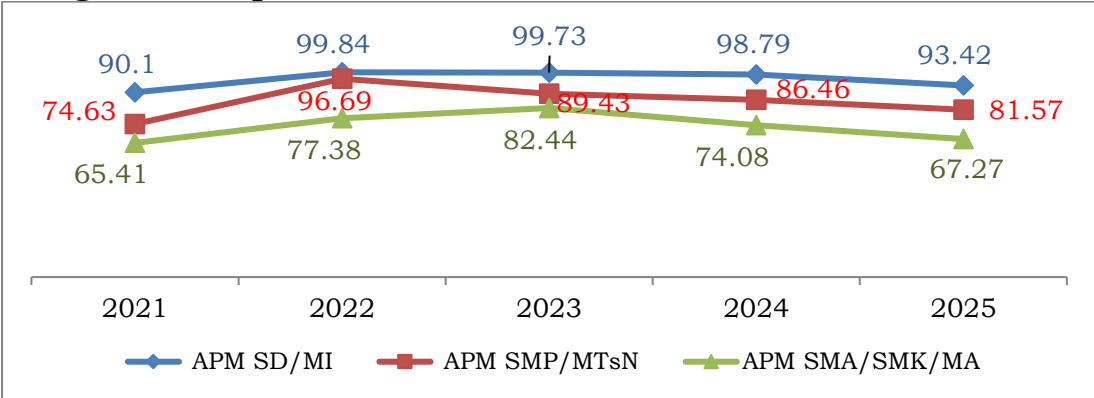
Pada kurun waktu 2021-2024 angka APK pada jenjang SMP/MTsN fluktuatif cenderung menurun. Penurunan tersebut karena penerapan Permendikbud tentang PPDB berdasar sistem zonasi yang menyebabkan minat penduduk luar kota bersekolah di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan. Dan tahun 2025 mengalami sedikit peningkatan.

Angka APK pada jenjang SMA pada kurun waktu 2021-2022 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun yaitu dari 92.97 persen di tahun 2021 menjadi 87.25 persen di tahun 2022. Selanjutnya di Tahun 2023 APK SMA mengalami peningkatan menjadi 97.16 persen. Peningkatan APK disebabkan adanya keinginan untuk melanjutkan pendidikan SMA di Kota Lhokseumawe, namun tahun 2024-2025 mengalami penurunan menjadi 89.72 persen.

B. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah dari penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (7-12, 13-15, 16-18 tahun) di suatu jenjang pendidikan tertentu (SD/Sederajat, SMP/Sederajat, dan SMA/Sederajat) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu dikalikan 100%. Berikut adalah grafik Angka Partisipasi Murni di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025.

Gambar 2.48
Angka Partisipasi Murni Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025



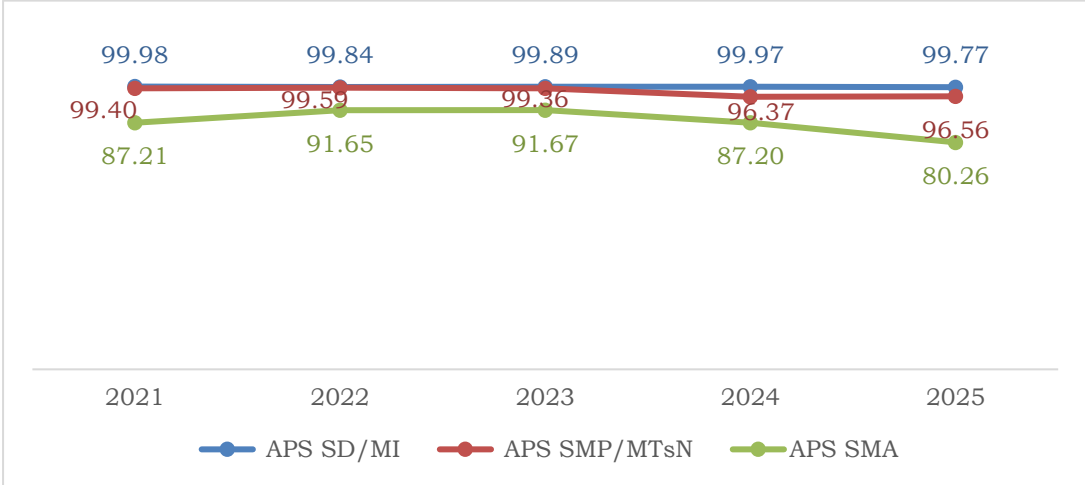
Sumber: <http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/>, LDA 2026

Angka APM SD/MI dalam kurun waktu 2021-2025 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021 APM SD/MI sebesar 90.1 persen. Angka tersebut berfluktuasi menjadi 93,42 persen tahun 2025. Adapun angka APM pada jenjang SMP/MTsN dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 APM SMP/MTsN sebesar 74.63 Namun tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 96.69 persen dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi sebesar 89.43 persen dan kembali turun menjadi 81.57 pada tahun 2025. Pada jenjang SMA pada 2021 sebesar 65.41, namun pada tahun 2022-2023 terus meningkat. Peningkatan ini disebabkan sekolah di Lhokseumawe menjadi rujukan masyarakat, namun tahun 2024-2025 mengalami penurunan kembali menjadi 67.27.

C. Angka Partisipasi Sekolah

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah perhitungan mengenai ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Menurut Lampiran 1 Permendagri Nomor 86/2017, cara penghitungannya adalah dengan membagi jumlah siswa kelompok usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah. Data APS Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 dapat dilihat di bawah ini.

Gambar 2.49
Angka Partisipasi Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025



Sumber : BPS, 2026



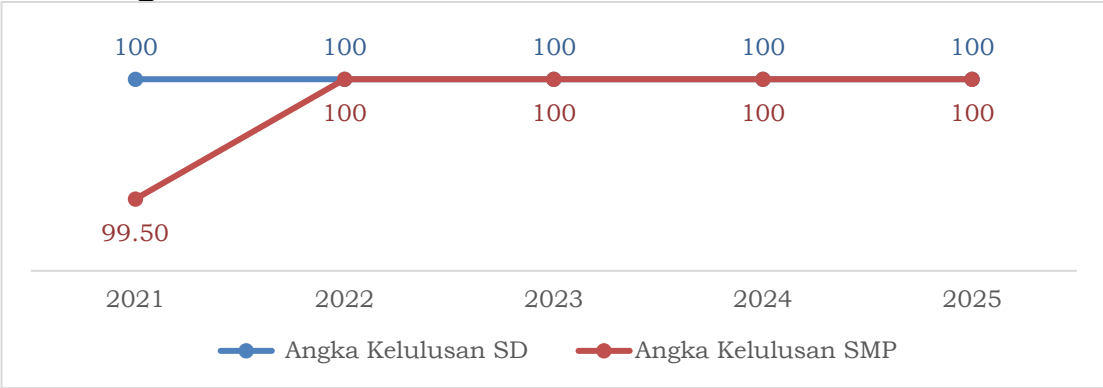
Berdasarkan gambar diatas, angka partisipasi sekolah SD/MI di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2021-2025 cenderung menurun. Pada tahun 2021 APS SD/MI sebesar 99.98% kemudian pada tahun 2022 terjadi penurunan APS menjadi 99.84% dan sedikit meningkat menjadi 99.97% di tahun 2024 dan menurun kembali tahun 2025 menjadi 99.77%. Adapun angka partisipasi sekolah SMP/MTs dalam kurun waktu 2021-2025 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 APS SMP/MTS 99.40% dan mengalami peingkatan menjadi sebesar 99.59% tahun 2022, pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan menjadi 99.36% dan meningkat menjadi 99.37 di tahun 2024 dan tahun 2025 meningkat menjadi 96.56.

Adapun APS pada jenjang SMA dalam kurun waktu 2021-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 APS SMA sebesar 87.21% dan menjadi 91.67% pada tahun 2023. APS SMA mengalami peningkatan disebabkan adanya peningkatan jumlah siswa SMP/MTs usia 16-18 tahun jumlah siswa sekolah madrasah 16-18 tahun yang mendapat dan memiliki kesempatan untuk bersekolah. Pada Tahun 2025 APS SMA mengalami penurunan menjadi 80.26%.

D. Angka Kelulusan

Indikator ini menghitung perbandingan antara jumlah siswa yang lulus ujian akhir atau ujian nasional dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian nasional tersebut. Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan. Berikut merupakan data angka kelulusan di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.

Gambar 2.50
Angka Kelulusan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, 2026

Berdasarkan data di atas, angka kelulusan jenjang SD di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2021-2025 menunjukkan besaran yang tetap yakni 100%. Angka kelulusan jenjang SMP tahun 2021-2025 meningkat. Pada tahun 2021 Angka kelulusan SMP sebesar 99.50% dan mengalami kenaikan menjadi sebesar 100%. Pada tahun 2022-2025 angka kelulusan jenjang SMP mencapai 100%.

E. Fasilitas Pendidikan

Pelaksanaan Pendidikan Nasional harus menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus

memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana. Data ruang kelas SD/MI dalam kondisi baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.

Tabel 2.58
Kondisi Ruang Kelas Jenjang SD dan SMP
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

Tahun	Jenjang Pendidikan	Kondisi Ruang Kelas					Total Ruang Kelas	% Kondisi Baik
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Rusak Total		
2021	SD	406	415	0	0	0	821	49.45
	SMP	188	161	0	0	0	349	53.87
2022	SD	405	148	123	40	0	716	56.56
	SMP	212	64	64	24	0	364	58.24
2023	SD	405	150	148	42	0	745	54.36
	SMP	209	82	60	31	0	382	54.71
2024	SD	805	35	0	0	0	840	95.83
	SMP	427	17	0	0	0	444	96.17
2025	SD	340	121	149	130	0	740	45.95
	SMP	175	53	68	73	0	369	47.43

Sumber: npd.kemendikbud.go.id, dapodik 2026

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa ruang kelas dengan kondisi baik pada jenjang pendidikan SD pada tahun 2021 sebesar 49.45% mengalami penurunan pada tahun 2025 persentase ruang kelas dalam kondisi baik menjadi sebesar 45.95%. Hal ini dikarenakan adanya bencana hidrometrologi yang terjadi pada hampir seluruh wilayah di Aceh pada bulan november 2025.

Persentase ruang kelas dalam kondisi baik pada jenjang SMP cenderung mengalami peningkatan dari 53.87% pada tahun 2021 terus meningkat, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan hal ini dikarenakan adanya bencana hidrometrologi yang terjadi pada hampir seluruh wilayah di Aceh pada bulan november 2025.

F. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar yang dilaksanakan urusan Pendidikan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Untuk penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, dan penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tahun 2025 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.59
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
Tahun 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	3601	3601	100	100
Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	25.648	25.648	100	100
Pendidikan Kesetaraan;	Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	278	278	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

2.1.4.4.1.2 Kesehatan
A. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Berikut adalah tabel AKB di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.

Tabel 2.60
Angka Kematian Bayi di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun)	bayi	16	23	54	34	42
2	Jumlah kelahiran Hidup	bayi	4069	3853	3533	3576	3302
Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)			3.93	5.97	15.28	9.5	12.72

Sumber : Dinas Kesehatan, 2026

Berdasarkan data di atas, angka kematian bayi di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021 angka kematian bayi sebesar 3.93 per 1.000 kelahiran hidup dan meningkat menjadi 5.97 di tahun 2022, jumlah kematian bayi mencapai angka 23 kasus dari 3853 kelahiran hidup. Angka kematian bayi kemudian meningkat cukup tinggi pada tahun 2023 menjadi 15.28. Penyebab tingginya kematian bayi di Kota Lhokseumawe yaitu karena berat badan lahir rendah/pre term, asfiksia (gagal nafas), sepsis (infeksi kelahiran), dan kelainan konginental. Namun tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 9.50 per 1.000 kelahiran hidupdan tahun 2025 meningkat kembali menjadi 12.72 per 1000 kelahiran.



Penyebab ini sangat dipengaruhi status kesehatan ibu sejak sebelum hamil. Sedangkan, kesehatan ibu hamil memiliki beberapa tantangan diantaranya masih tingginya prevalensi anemia ibu hamil karena kurangnya asupan mikronutrien, lebih awal lagi masih tingginya prevalensi anemia pada remaja putri. Selain itu, terdapat faktor sosial ekonomi yang menyebabkan kurangnya asupan mikronutrien pada ibu hamil dan perlunya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanda bahaya pada bayi, serta faktor kondisi kesehatan lingkungan yang kurang baik seperti infeksi maternal karena virus rubella yang menyebabkan tingginya kematian bayi di Kota Lhokseumawe yang disebabkan BBLR, asfiksia (gagal nafas), sepsis (infeksi kelahiran), dan kelainan konginetal.

B. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia satu tahun. Angka kelangsungan hidup bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia di bawah satu tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Berikut merupakan angka kelangsungan hidup bayi di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.61
Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka Kematian Bayi AKB)	3.69	4.93	15.28	9.50	12.72
Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) →(1000 AKB)		996.31	995.07	984.72	990.50	987.28

Sumber : Dinas Kesehatan, 2026

Berdasarkan tabel di atas, angka kelangsungan hidup bayi di Kota Lhokseumawe bersifat fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2021 angka kelangsungan hidup bayi sebesar 996.31. Selanjutnya pada tahun 2022 angka kelangsungan hidup bayi menurun menjadi 995.07, yang berarti setiap 1.000 kelahiran bayi terdapat 995 bayi yang dapat hidup sampai dengan usia satu tahun. Pada tahun 2023, angka kelangsungan bayi menurun menjadi 984.72. Tahun 2025 angka kelangsungan bayi menurun menjadi 987.28. Penurunan ini selaras dengan meningkatnya angka kematian bayi pada tahun tersebut.

C. Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. Berikut ini merupakan data angka kematian balita di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025.

Tabel 2.62
Angka Kematian Balita di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kematian balita (berumur kurang 5 tahun)	balita	2	2	2	31	42
2	Jumlah kelahiran Hidup	balita	4069	3853	3533	3576	3302
Angka kematian balita (per 1.000 kelahiran hidup)			0.49	0.51	0.56	8.6	12.72

Sumber : Dinas Kesehatan, 2026



Angka kematian balita di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2021-2025 mengalami peningkatan. Angka kematian balita pada tahun 2021 sebesar 0.49 per 1.000 kelahiran hidup. Selanjutnya tahun 2021, angka kematian balita mengalami peningkatan yang tajam dari tahun 2021 sebesar 0.49 per 1.000 kelahiran hidup menjadi sebesar 12.72 per 1.000 kelahiran hidup di tahun 2025.

Peningkatan angka kematian balita ini menunjukkan derajat kesehatan balita setiap tahunnya cenderung kurang baik. Masih terdapatnya kematian balita perlu dijadikan kewaspadaan dini karena artinya prevelensi anemia ibu hamil masih tinggi, faktor sosial ekonomi yang menyebabkan kurangnya asurapan mikronutrien pada ibu hamil dan faktor dari balita itu sendiri. Upaya yang dilaksanakan untuk menurunkan kematian anak balita di Kota Lhokseumawe adalah dengan pemeriksaan Antenatal Care (ANC) terpadu dan berkualitas, peningkatan pemanfaatan buku KIA dan peningkatan ASI eksklusif.

D. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Indikator ini menunjukkan jumlah kematian bayi pada masa neonatus (kurang dari satu bulan) dalam 1000 kelahiran hidup. Berikut merupakan angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2021 angka kematian neotanus sebesar 3.93 per 1.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2025 meningkat menjadi 11.81 per 1.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.63
Angka Kematian Neonatus di Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan)	bayi	16	20	37	4	39
2	Jumlah kelahiran Hidup	bayi	4069	3853	3533	3576	3302
Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)			3.93	5.19	10.47	1.12	11.81

Sumber: Dinas Kesehatan, 2026

E. Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Berikut adalah tabel Angka Kematian Ibu di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025.

Tabel 2.64
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Ibu Hamil yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas	orang	14	3	8	1	6
2	Jumlah kelahiran Hidup	orang	4069	3853	3533	3576	3302



No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup		344.06	77.86	226.44	27.96	181.71

Sumber : Dinas Kesehatan, 2026

Pendataan angka kematian ibu dilakukan kepada seluruh ibu hamil yang merupakan penduduk Kota Lhokseumawe dan menggunakan fasilitas kesehatan di Kota Lhokseumawe. Angka kematian ibu pada kurun waktu 2021-2025 mengalami fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Angka kematian ibu tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 344.06. Selanjutnya, pada tahun 2024 angka kematian ibu mengalami penurunan menjadi 27.96 sehingga menjadi angka kematian ibu terendah dalam lima tahun terakhir. Angka kematian ibu kembali mengalami kenaikan yang cukup tinggi di tahun 2023, yaitu sebesar 226.44 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2025 sebesar 181.71 per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa faktor penyebab kematian ibu hamil antara lain:

- a. kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga adanya keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan mengenali tanda dan gejala permasalahan kesehatan;
- b. masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk mengakses pelayanan ANC (Antenatal Care).

Kesehatan ibu merupakan indikator derajat kesehatan masyarakat di suatu daerah, oleh karena itu kesakitan dan kematian ibu, bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, mengingat penyebab dan latar belakang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi tanggung jawab sektor dan pihak lain sehingga penanganannya membutuhkan kerjasama secara sinergis.

F. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu merupakan fasilitas kesehatan sebagai tempat memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat kota (terutama ibu dan anak), sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu. Posyandu di Kota Lhokseumawe dibedakan menjadi empat kategori, yaitu posyandu pratama, madya, purnama, dan mandiri. Pada perhitungan indikator ini, posyandu yang dihitung adalah seluruh posyandu tanpa mengkategorikan jenis-jenis posyandu tersebut. Berikut ini merupakan data rasio posyandu per satuan balita di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025.

Tabel 2.65
Rasio Posyandu Per Satuan
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	Jumlah Posyandu	unit	101	101	100	100	100
2	Jumlah Balita	Anak	20.231	19.948	15.677	14.171	14.248
	Rasio posyandu per satuan balita	Unit/anak	4.99	5.06	6.38	7.05	7.02

Sumber : Dinas Kesehatan, 2026



Berdasarkan data di atas, rasio posyandu per satuan balita di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2021-2025 bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021, rasio posyandu per satuan balita 4.99. Angka tersebut kembali meningkat menjadi 5.06 yang berarti setiap 1.000 balita dilayani oleh 5 posyandu pada tahun 2022. Kenaikan rasio posyandu per satuan balita karena jumlah balita yang mengalami penurunan dari tahun lalu sedangkan jumlah posyandu tetap. Rasio posyandu per satuan balita kemudian meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 6.38 unit/anak, dikarenakan jumlah posyandu menurun, dan jumlah balita juga mengalami penurunan, sehingga mengakibatkan pelayanan posyandu menjadi lebih padat. Pada tahun 2025 rasio posyandu menjadi 7.02 dengan jumlah posyandu tetap namun jumlah balita meningkat.

G. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk

Puskesmas, klinik, dan puskesmas pembantu (pustu) merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Indikator rasio puskesmas per 1.000 penduduk adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas. Berikut adalah rasio puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.66
Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Puskesmas	7	7	7	7	7
	Poliklinik	10	10	10	10	24
	Puskesmas Pembantu	23	22	22	22	22
	Jumlah puskesmas, poliklinik, dan pustu	40	39	39	39	53
2	Jumlah Penduduk	189.941	191.396	196.067	198.705	200.876
	Rasio Puskesmas persatuan penduduk	0.21	0.20	0.20	0.20	0.26

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Berdasarkan data di atas, rasio puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2021-2025 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021, rasio puskesmas/klinik/pustu yaitu 0.21, artinya terdapat 0.21 puskesmas/klinik/pustu setiap 1.000 penduduk atau dalam 100.000 terdapat 21 puskesmas/klinik/pustu. Rasio puskesmas/klinik/pustu terus menurun hingga menjadi 0.20 puskesmas/klinik/pustu per 1.000 penduduk pada tahun 2024. Menurunnya rasio puskesmas/klinik/pustu di tahun 2022 disebabkan oleh menurunnya jumlah puskesmas dan pustu. Namun tahun 2025 rasio puskesmas/klinik/pustu meningkat menjadi 0.26 atau 26 puskesmas/klinik/pustu setiap 100.000 penduduk. Peningkatan rasio puskesmas/klinik/pustu ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah poliklinik.

H. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rumah sakit adalah salah satu fasilitas kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan yang lengkap dan baik. Berikut ini merupakan data rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025.

Tabel 2.67
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	-	-	-	-	-
2	Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah	-	-	-	-	-
3	Rumah Sakit AD/ AU/ AL/ Polri	1	1	1	1	1
4	Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	1
5	Rumah Sakit Swasta	9	9	9	9	9
6	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	10	10	10	10	11
7	Jumlah Penduduk	189.941	191.396	196.067	198.705	200.876
	Rasio	0.053	0.052	0.051	0.050	0.055

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Berdasarkan data di atas, rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung stabil. Pada tahun 2021 terdapat 10 rumah sakit AD/swasta. Kemudian sampai dengan tahun 2025, jumlah rumah sakit bertambah satu unit, dan rasio rumah sakit di Kota Lhokseumawe tahun 2021 sebesar 0.053 kemudian tahun 2025 sebesar 0,055 di pengaruhi oleh bertambahnya 1 unit rumah sakit dan jumlah penduduk. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 0,05 rumah sakit, atau dalam 100.000 penduduk tersedia 5 (lima) rumah sakit.

I. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator ini menggambarkan banyaknya jumlah dokter per satuan penduduk. Dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang dimaksud merupakan dokter yang memberikan pelayanan kesehatan di Kota Lhokseumawe, baik berstatus PNS maupun bukan PNS. Jumlah dokter dihitung berdasarkan Surat Izin Praktik (SIP) dokter di Kota Lhokseumawe. Berikut merupakan rasio dokter per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025.

Tabel 2.68
Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Dokter Umum	67	32	55	51	64
2	Dokter Spesialis	0	0	4	5	3



No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
3	Dokter Gigi	16	16	25	24	24
	Jumlah Dokter	83	48	84	80	91
	Jumlah Penduduk	189.941	191.396	196.067	198.705	200.876
	Rasio dokter per satuan penduduk	0.35	0.43	0.43	0.40	0.45

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Berdasarkan data di atas, rasio dokter per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2021-2025. Pada tahun 2021, rasio dokter sebesar 0.35 yang artinya terdapat satu dokter di setiap 1.000 penduduk. Dan tahun 2022-2023 meningkat menjadi 0.43. Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 0.40 dikarenakan ada dokter yang sedang tugas belajar dan beralih ke jabatan struktural. Dari data di atas dapat terlihat bahwa Kota Lhokseumawe masih kekurangan Dokter, dimana dalam 1.000 terdapat 0.40 dokter tidak sampai 1 orang dokter. Tahun 2025 jumlah dokter bertambah menjadi 91 orang atau dengan rasio 0,45 namun belum signifikan dengan pertambahan penduduk.

J. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Indikator ini menghitung seberapa banyak tenaga medis yang tersedia per 1.000 penduduk. Tenaga medis yang dimaksud meliputi perawat gigi, perawat, dan bidan. Berikut adalah rasio tenaga medis per satuan penduduk.

Tabel 2.69
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Perawat	212	212	289	306	445
2	Perawat Gigi	0	12	20	18	19
3	Bidan	248	248	302	293	459
	Jumlah Total	460	478	611	617	923
	Jumlah Penduduk	189.941	191.396	196.067	198.705	200.876
	Rasio Perawat	1.12	1.11	1.47	1.54	2.21
	Rasio Perawat Gigi	0	0.06	0.10	0.09	0.09
	Rasio Bidan	1.31	1.29	1.54	1.47	2.28
	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	2.42	2.49	3.12	3.10	4.59

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada kurun waktu 2021-2025 fluktuatif. Rasio tenaga kesehatan meningkat dari tahun 2021 ke tahun 2025. Rasio perawat memiliki kecenderungan meningkat. Kenaikan ini terjadi akibat jumlah kelulusan tenaga kesehatan meningkat, sehingga pengajuan SIP juga meningkat. Rasio perawat gigi memiliki kecenderungan meningkat dari tahun 2021 sebesar 0 menjadi 0.09 di tahun 2025. Sedangkan rasio bidan fluktuatif, karena terjadi penurunan di tahun 2022 menjadi 1.29 dan meningkat kembali sampai dengan tahun 2025 menjadi 2.28 per satuan penduduk.



K. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang ditangani

Indikator ini menghitung seberapa banyak komplikasi kebidanan yang ditangani. Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas yang mengancam jiwa ibu dan/atau bayi. Sebagaimana yang disebutkan, komplikasi kebidanan dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan fase ibu, yaitu (1) komplikasi dalam kehamilan meliputi abortus, hyperemesis gravidarum, perdarahan per vaginam, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), kehamilan lewat waktu, ketuban pecah, (2) komplikasi dalam persalinan meliputi kelainan letak/presentasi janin, partus macet/distosia, hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), perdarahan pasca persalinan, infeksi berat/sepsis, kontraksi dini/persalinan prematur, kehamilan ganda, dan (3) komplikasi dalam nifas meliputi hipertensi dalam kehamilan (preeklamsia, eklamsia), infeksi nifas, perdarahan nifas.

Indikator ini menghitung jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025.

Tabel 2.70
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja	499	481	563	806	736
2	Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	833	879	879	879	736
Persentase		59.9	54.7	64.05	91.69	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Berdasarkan data di atas, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Lhokseumawe mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat yaitu dari 59.9% menjadi 100%. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2025. Persentase komplikasi yang ditangani oleh tenaga kesehatan trampil sesuai kompetensi menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan dalam menangani kasus gawat-darurat kebidanan, ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan/atau dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Tahun 2021, jumlah cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 59.9% dan tahun 2022 menurun menjadi sebesar 54.7%. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus komplikasi kebidanan belum semua dapat tertangani, tahun 2025 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 100%.



L. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan klinis kebidanan sesuai standar. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2025.

Tabel 2.71
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh
Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan	3687	3841	3543	3571	3245
2	Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	3798	4198	4198	4198	4076
Persentase		97.08	91.50	84.40	85.06	79.61

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Berdasarkan data di atas, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2021-2025 mengalami fluktuatif dan belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda persalinan dan pendampingan Ibu hamil yang kurang optimal. Pada tahun 2021, angka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga yang memiliki Kompetensi Kebidanan sebesar 97.08% dan tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 79.61%, penurunan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan juga karena mengikuti penurunan jumlah ibu hamil. Cakupan yang tertinggi adalah pada tahun 2021, menunjukkan ibu bersalin di fasilitas kesehatan sudah mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.

M. Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah istilah untuk tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025.

Tabel 2.72
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Desa/Kelurahan UCI	11	9	15	15	11
2	Jumlah Desa/Kelurahan	68	68	68	68	68
Cakupan Desa UCI		16.20	13.24	22.06	22.06	16.17

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2021-2025, fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021 Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI) sebesar 16.20%, pada tahun 2021 menurun menjadi 13.24% pada tahun 2022, namun pada tahun 2023-2024 meningkat kembali menjadi 22.06% dan tahun 2025 menurun menjadi 16.17%.

N. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita gizi buruk merupakan balita dengan status gizi menurut berat badan (BB) dan umur (U) dengan Z-score <-3 SD dan atau dengan tanda-tanda klinis (*marasmus*, *kwasiorkor*, dan *marasmus-kwasiorkor*). Balita gizi buruk yang mendapat perawatan merupakan balita gizi buruk yang dirawat atau ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Berikut ini merupakan tabel perkembangan cakupan balita gizi buruk di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025.

Tabel 2.73
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan	8	33	61	20	38
2	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan	8	33	61	20	38
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan		100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Jumlah balita gizi buruk dari tahun 2021-2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, jumlah balita gizi buruk meningkat cukup besar dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 balita gizi buruk sebanyak 8 anak dan menjadi 61 anak di tahun 2023 dan menurun menjadi 20 anak di tahun 2024, meningkat menjadi 38 anak tahun 2025. Kasus balita gizi buruk yang ditemukan di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2021-2025 seluruhnya telah mendapatkan perawatan.

O. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Di Imunisasi Campak

Persentase Imunisasi Campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur satu tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur satu tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia satu tahun adalah anak usia 12-23 bulan. Indikator ini merupakan ukuran



pemantauan untuk cakupan imunisasi dasar. Imunisasi campak diberikan pada usia 9-11 bulan, sehingga indikator ini dapat menunjukkan kelengkapan imunisasi anak. Di samping itu imunisasi campak yang diberikan kepada anak, dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit campak, yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan angka kematian balita. Cakupan imunisasi campak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ketersediaan tenaga kesehatan berkompeten, kualitas sistem pelayanan kesehatan anak, partisipasi masyarakat di suatu wilayah.

Tabel 2.74
Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun	2406	2413	2214	2449	2613
2	Jumlah anak usia I Tahun pada wilayah dan Tahun yang sama	4299	4237	3874	3896	3878
Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak		55.97	56.95	57.15	62.85	67.38

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Berdasarkan tabel di atas, persentase anak usia satu tahun yang diimunisasi campak Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025 terus mengalami peningkatan. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2025 yaitu sebesar 67.38% dan terendah adalah tahun 2021 dengan angka sebesar 55.97%. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak terus mengalami peningkatan sampai tahun 2025. Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak baru mencapai 67.38% hal ini disebabkan kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi dan terdapat sasaran balita yang tidak hadir untuk imunisasi campak sesuai jadwalnya.

P. Cakupan penemuan dan penanganan penderita Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk

Kasus AFP (*acute flaccid paralysis*) adalah semua anak berusia kurang dari 15 tahun dengan kelumpuhan yang sifatnya *flaccid* (layuh), terjadi secara akut (mendadak), bukan disebabkan oleh rudapaksa/trauma/kecelakaan. AFP dapat terjadi pada beberapa penyakit salah satunya karena virus polio. *AFP non polio* adalah kasus AFP yang pada pemeriksaan spesimen tidak ditemukan virus polio liar atau kasus AFP yang ditetapkan oleh tim ahli sebagai kasus *AFP non polio* dengan kriteria tertentu. Berdasarkan Kepmenkes 636/Menkes/SK/VII/1997 tentang pelaksanaan surveilans AFP menuju Indonesia bebas Polio, pengukuran indikator *non polio* AFP rate ini bertujuan untuk meningkatkan sensitifitas penemuan kasus polio karena penilaiannya dilakukan pada semua kasus kelumpuhan atau AFP.



Tabel 2.75
Cakupan Persentase Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kasus SFP nonPolio yang dilaporkan	4	0	4	2	2
2	jumlah penduduk < 15 Tahun	44.294	58.338	53.558	58.338	52.804
Cakupan Persentase Non PolioAFP rate per 100.000 penduduk		9.03	0	7.47	3.42	3.78

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2026.

Berdasarkan data di atas, jumlah kasus AFP non polio di Kota Lhokseumawe secara umum mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 terdapat 4 orang penderita. Kemudian pada tahun 2022 tidak terdapat jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan sehingga pada kurun waktu 2021-2023, *rate*-nya berada pada rentang 0–9,03 per 100.000 penduduk. Angka AFP non polio tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 9.03 per 100.000 penduduk. Angka AFP non polio terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu 0 per 100.000 penduduk. Standar yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan untuk Non polio AFP Rate adalah minimal 3. Kemudian tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah kasus SFP non polio yang dilaporkan sebanyak 4 orang, sehingga *rate* non polio AFP menjadi 7,47 per 100.000 penduduk. Tahun 2024 menurun menjadi 3.42 per 100.000 penduduk dan tahun 2025 meningkat Kembali menjadi 3.78 per 100.000 penduduk. Peningkatan non polio AFP Rate ini disebabkan tim surveilans AFP sudah lebih banyak melakukan kegiatan sehingga kasus yang ditemukan menjadi lebih banyak. Hal ini menggambarkan sistem kewaspadaan dini dan respon yang sudah lebih baik untuk kewaspadaan polio.

Q. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat/kesukaran bernafas. Gejala penyakit pneumonia yaitu menggigil, demam, sakit kepala, batuk, mengeluarkan dahak dan sesak nafas. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 Tahun, usia lanjut lebih dari 65 Tahun dan orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imonulogi). Diberikan tatalaksana atau ditangani adalah diberikan pelayanan sesuai klasifikasinya, untuk pneumonia diberikan antibiotika dan pneumonia berat dirujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai.

Tabel 2.76
Cakupan Penemuan Pneumonia Pada Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penderita balita pneumonia yang ditangani	22	16	24	122	11
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	902	2223	950	973	907
Cakupan Penemuan Pneumonia		2.43	0.72	2.53	12.5	1.21

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.



Pada kurun waktu 2021-2025, cakupan balita Pneumonia yang ditangani terus mengalami peningkatan dari angka 0.04% di tahun 2021 hingga 12.5% di tahun 2024. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pnemonia yang ditangani yaitu melalui program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), update tata laksana pneumonia, validasi data pneumonia dan meningkatkan koordinasi dengan rumah sakit. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan pada angka cakupan balita Pneumonia yang ditangani yaitu sebesar 24 anak dari 22 anak pada tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami penurunan cakupan balita pneumonia yang ditangani yaitu menjadi 16 anak. Dan tahun 2025 kembali terjadi penurunan penderita balita pneumonia yang ditangani menjadi 11 anak dari 907 jumlah perkiraan penderita. Peningkatan jumlah penderita Pneumonia karena adanya kegiatan screening ke wilayah, sehingga banyak penderita pneumonia balita yang ditemukan dan ditangani.

R. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) merupakan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) di Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.77
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja selama 1 Tahun	569	833	1087	1006	927
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama	1115	1003	1071	692	927
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA		51.03	83.05	101.49	145.4	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Secara umum, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA bersifat fluktuatif. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA pada tahun 2021 sebesar 51.03%, dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 83.05%. Penurunan angka cakupan seiring dengan meningkatnya jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dan terjadinya peningkatan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+). Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penemuan penderita baru TBC BTA yaitu dengan cara penyisiran data aktif ke rumah sakit dan peningkatan pencatatan serta pelaporan. Jumlah penemuan pasien TB tahun 2022-2024 meningkat menjadi 83.05% dan 145.4% dan tahun 2025 cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sebesar 100%. Peningkatan angka cakupan karena skrining TB sudah dilakukan baik di Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik dan Dokter Praktik



Mandiri sehingga penemuan kasus TB dapat ditemukan sedini mungkin.

S. Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Prevalensi TB adalah banyaknya kasus penderita TBC baik pasien lama maupun pasien baru dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah yang sama dalam waktu tertentu dan dinyatakan dalam per 100.000 penduduk.

Tabel 2.78
Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama)	569	833	1131	1006	927
2	Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama	189.941	191.396	196.067	198.705	200.876
Tingkat Tuberkulosis Prevalensi		299.6	435.2	576.8	506.3	461.48

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Jumlah penderita kasus TBC (baru dan lama) di Kota Lhokseumawe bersifat fluktuatif dengan jumlah kasus terendah sebanyak 569 kasus di tahun 2021 dan kasus tertinggi sebanyak 1131 kasus di tahun 2023. Pada tahun 2021 tingkat prevalensi tuberculosi sebesar 299,6 per 100.000 penduduk. Kemudian pada tahun 2022, terjadi peningkatan kasus penderita TBC sebesar 833 penderita dengan tingkat prevelensi 435,2. Dan pada tahun 2023 jumlah penderita kasus TBC menjadi 1131 penderita sehingga tingkat prevelensi menjadi 576,8 dan tahun 2024 jumlah penderita kasus TBC menjadi 1006 penderita sehingga tingkat prevelensi menjadi 506,3. Tahun 2025 tingkat prevalensi menurun menjadi 461,48 dengan jumlah penderita turun menjadi 927 penderita.

T. Tingkat Kematian Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)

Tingkat kematian karena Tuberkulosis (TB) adalah jumlah pasien TB yang meninggal dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah yang sama, pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam per 100.000. Tingkat kematian TB di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.79
Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Paise TB yang meninggal	6	2	2	18	9
2	Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama	189.941	191.396	196.067	198.705	200.876
Tingkat Kematian Tuberkulosis		3.15	1.04	1.02	9.05	4.48

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kasus kematian karena tuberculosi bersifat fluktuatif dengan kecenderungan

menurun. Pada tahun 2021 tingkat kematian karena tuberculosis sebesar 3.15 dengan jumlah pasien TB yang meninggal sebanyak 6 orang. Tingkat kematian tertinggi karena tuberculosis terjadi tahun 2024 sebesar 9.05 artinya terdapat 18 pasien TB yang meninggal per 100.000 penduduk. Hal ini dikarenakan banyak ditemukan kasus TB dengan komorbid, atau penyakit penyerta lainnya ditambah adanya pandemic Covid-19 pada tahun 2021 yang dapat memperburuk kondisi sehingga tuberculosis kematian penderita TB menjadi 3.15 per 100.000 penduduk. Selanjutnya pada tahun 2022-2023 tingkat kematian karena tuberculosis sebesar 1.04 dan 1.02 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2021. Penurunan angka kematian karena peningkatan tatalaksana pengobatan pasien TB di Puskesmas dan Rumah Sakit, deteksi dini adanya komorbid pada pasien TB untuk mencegah terjadinya perburukan penyakit dan pemberian penanganan yang tepat, namun tahun 2024 tingkat kematian penderita TB meningkat menjadi 9.05 dan tahun 2025 menurun menjadi 4.48.

U. Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Di Obati Dan Sembuh Dalam Program DOTS

DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*) adalah strategi pengendalian Tuberkulosis (TB) yang dikembangkan oleh WHO dan telah direkomendasikan sebagai strategi pengendalian TB sejak 1995. Bank Dunia menyatakan strategi DOTS sebagai salah satu intervensi kesehatan yang secara ekonomi sangat efektif. Berikut merupakan tabel proporsi jumlah tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.

Tabel 2.80
Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2021 - 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pasien tuberculosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS	277	344	1087	923	816
2	Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	312	344	1028	1006	691
Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS		88,78	100	105.7	91.75	118.09

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS bersifat fluktuatif. Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 105,7%. Sementara itu, proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS terendah terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 88,78%. Jumlah pasien baru TB paru BTA dari kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan jumlah pasien baru TB paru BTA paling sedikit terjadi pada tahun 2020 dan tertinggi terjadi pada tahun 2023. Kasus penemuan tuberculosis meningkat ini karena adanya kegiatan penyisiran data kasus TB di rumah sakit untuk mengurangi data yang tidak dilaporkan (*under reporting*). Hal ini



menyebabkan proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS meningkat menjadi 105.7%. Sedangkan tahun 2025 Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS menurun sebesar 118.09%.

V. Proporsi Kasus Tuberkulosis yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS

Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS adalah jumlah seluruh pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh dibagi dengan jumlah pasien TB Paru BTA yang diobati yang dinyatakan dalam persen. Tabel berikut ini merupakan data proporsi indikator tersebut di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025.

Tabel 2.81
Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh
Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2021 - 2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pasien tuberkulosis paru BTA yang sembuh	243	870	655	957	778
2	Jumlah pasien TB paru BTA yang diobati di wilayah dan pada kurun waktu yang sama	686	883	1076	1077	981
Proporsi Kasus Tuberculosis Yang diobati dan sembuh dalam Program DOTS		35.42	98.52	60.87	88.85	79.31

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Secara umum, proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh mengalami fluktuasi dari tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021 persentase kasus TB yang diobati dan sembuh dalam program DOTS sebesar 35.42%. Selanjutnya pada tahun 2022, proporsi TB yang diobati dan sembuh meningkat drastis menjadi 98.52%. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya peningkatan tatalaksana, pemberian PMT, dan pemberian reward. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan jumlah kasus tuberkulosis paru BTA yang sembuh, sehingga proporsi kasus yang diobati dan sembuh dalam program DOTS juga meningkat menjadi 98.52%. Hal ini disebabkan karena adanya optimalisasi pengobatan serta pemantauan pasien TB selama tahun 2022. Namun Tahun 2023 proporsi TB yang diobati menurun menjadi 60.87% dan tahun 2025 menurun menjadi 79.31%. Proporsi kasus tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS belum mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa belum semua pasien yang diobati berhasil sembuh.

W. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan penanggulangan fokus (PF). Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.82
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun	58	47	86	68	72
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama	58	47	86	68	72
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD		100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Dalam kurun waktu 2021-2025, jumlah penderita DBD terbanyak di tahun 2023. Kasus DBD yang ditemukan dan yang ditangani pada tahun 2021-2025 fluktuatif dari 58 penderita menjadi 47 penderita di tahun 2022. Tahun 2023 jumlah penderita DBD meningkat menjadi 86 penderita, dan tahun 2025 menurun menjadi 72 penderita, hal ini dikarenakan masih kurangnya sosialisasi tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), belum maksimalnya pemeriksaan jentik berkala, masih rendahnya kesadaran masyarakat menjaga kebersihan lingkungan dan masih adanya saluran air yang tidak lancar sehingga dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Secara umum, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2020-2024 telah mencapai 100%. Hal ini menandakan bahwa seluruh penderita penyakit DBD sudah ditemukan dan ditangani.

X. Penderita Diare yang Ditangani

Penderita diare yang ditangani adalah jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Sarana kesehatan yang dimaksud adalah semua sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta (puskesmas, pustu, RS, balai pengobatan, praktek dokter).

Tabel 2.83
Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader suatu wilayah tertentu dalam waktu satu Tahun	3071	2568	5014	1115	2581
2	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	5555	9014	16108	4134	2562
Persentase		55.28	28.49	31.13	26.97	100.74

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Penderita diare yang ditangani di tahun 2021 sebesar 55.28% dan di tahun 2025 meningkat menjadi 100.74%. Tahun 2022-2024



terjadi penurunan persentase penderita diare yang ditangani dikarenakan penurunan jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader. Penurunan jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader dikarenakan peningkatan sarana sanitasi. Pada tahun 2022 jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader menurun menjadi 28.49% dan di tahun 2023 kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 31.13% dan tahun 2025 cakupan penderita diare yang ditangani meningkat menjadi 100.74% diman jumlah penderita diare melebihi perkiraan.

Y. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

Prevalensi HIV AIDS dari total populasi ini menunjukkan banyaknya jumlah pasien HIV dan AIDS dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dalam kurun waktu yang sama. Data prevalensi HIV AIDS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.84
Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x	8	4	25	27	32
2	Jumlah penduduk disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	189.941	191.396	196.067	198.705	200.876
Prevalensi HIV/AIDS		0.004	0.002	0.013	0.013	0.016

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pasien HIV AIDS di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Jika dilihat dari prevalensinya angka terlihat sangat kecil yaitu <1%. Prevalensi HIV AIDS terendah terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 0.002%. Sementara itu, nilai tertinggi terjadi pada tahun 2025 yaitu mencapai 0,016% dengan jumlah pasien HIV AIDS mencapai 32 orang.

Z. Cakupan Kunjungan Bayi

Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan seberapa besar persentase jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar. Indikator cakupan kunjungan bayi merupakan cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan minimal empat kali, yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, satu kali pada umur 3-5 bulan, satu kali pada umur 6-8 bulan, dan satu kali pada umur 9-11 bulan sesuai standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Dengan indikator cakupan kunjungan bayi yang dihitung ini kemudian dapat diketahui efektivitas, *continuum of care*, dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Berikut ini merupakan data perkembangan cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025.



Tabel 2.85
Cakupan Kunjungan Bayi
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	2268	2196	2338	2112	3248
2	Jumlah seluruh bayi lahir hidup	4069	3853	3533	3576	3248
Cakupan kunjungan Bayi		55.74	56.99	66.17	59.06	100

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Tabel di atas menggambarkan cakupan kunjungan bayi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Secara umum cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Cakupan kunjungan bayi pada tahun 2021 sebesar 55.74%, selanjutnya terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2025 menjadi sebesar 100%.

Standar kunjungan bayi setelah dilahirkan adalah sebanyak 4 kali. Standar tersebut merupakan KN Lengkap (Kunjungan Lengkap). Pada saat bayi dilahirkan adalah KN 1 atau kunjungan yang pertama. Menurunnya cakupan kunjungan bayi disebabkan karena sang ibu tidak melakukan kunjungan yang ke 2 dan 3 maupun seterusnya. Hal tersebut terjadi karena si bayi sama sekali tidak melanjutkan kunjungan ke fasilitas kembali. Sebagai catatan, fasilitas kesehatan yang tercatat dalam indikator ini adalah Puskesmas yang terdapat di Kota Lhokseumawe.

AA. Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (*basic six*) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Jangkauan wilayah atau unit kerja puskesmas adalah Kecamatan. Indikator cakupan puskesmas ini untuk melihat jangkauan puskesmas di daerah.

Tabel 2.86
Cakupan Puskesmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Puskesmas	7	7	7	7	7
2	Jumlah Kecamatan	4	4	4	4	4
Cakupan Puskesmas		175	175	175	175	175

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah seluruh puskesmas di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025 sebanyak 7 unit puskesmas. Jumlah Kecamatan di Kota Lhokseumawe berjumlah 4 Kecamatan, sehingga cakupan puskesmas adalah 175%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Kecamatan minimal sudah memiliki satu unit puskesmas. Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan di tingkat Kecamatan, sehingga idealnya minimal dalam satu Kecamatan terdapat satu puskesmas



sebagai pusat kesehatan masyarakat setempat. Selain itu, terdapat 3 Kecamatan yang memiliki 2 puskesmas.

BB. Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas pembantu (pustu) merupakan suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang mencakup bagian wilayah kerja puskesmas disesuaikan dengan keadaan setempat dan merupakan bagian integral dari puskesmas. Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat karena pustu menjangkau wilayah yang lebih kecil.

Tabel 2.87
Cakupan Puskesmas Pembantu
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pustu	23	22	22	22	22
2	Jumlah Desa	68	68	68	68	68
Cakupan Puskesmas		33.82	32.35	32.35	32.35	32.35

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026.

Cakupan puskesmas pembantu di Kota Lhokseumawe tahun 2021 sebesar 33.82%, namun tahun 2022-2025, cakupan puskesmas pembantu menjadi 32.35 karena jumlah puskesmas pembantu berkurang 1 unit di tahun 2022 sehingga puskesmas pembantu tersedia 22 unit.

CC. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Ibu hamil K4 adalah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit empat kali, dengan distribusi pemberian pelayanan yang dianjurkan adalah minimal satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga umur kelahiran. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam melindungi ibu hamil sehingga janin terjamin melalui penyediaan pelayanan antenatal.

Tabel 2.88
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	4191	4069	3643	4134	3793
2	Jumlah sasaran Ibu Hamil	4366	4397	4396	4397	4127
Persentase		96.0	92.5	82.87	94.02	91.91

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu sebesar 96.0% dan terendah pada tahun 2023 yaitu 82.87%. Pada tahun 2021 lebih tinggi cakupan kunjungan yang didorong banyak faktor, antara lain: adanya perbaikan dalam upaya pencatatan dan pelaporan pemantauan ibu hamil di wilayah kerja puskesmas, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan



pemeriksaan kehamilan seawal mungkin dan lebih sedikit jumlah sasaran ibu hamil di puskesmas setiap tahunnya. Cakupan kunjungan ibu hamil ini sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 92.5% dan tahun 2023 mengalami penurunan kembali menjadi 82.87%, namun tahun 2024 kembali meningkat menjadi 94.02% dan tahun 2025 sebesar 91.91%.

DD. Cakupan Pelayanan Nifas

Cakupan pelayanan nifas adalah pelayanan kepada ibu dan neonatal pada masa enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan sesuai standar. Masa nifas adalah periode mulai dari enam jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Pelayanan nifas sesuai standar adalah pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya tiga kali, pada enam jam pasca persalinan sampai dengan tiga hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian Vitamin A dua kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB Pasca Persalinan. Dalam pelaksanaan pelayanan nifas dilakukan juga pelayanan neonatus sesuai standar sedikitnya tiga kali, pada 6-24 jam setelah lahir, pada 3-7 hari dan pada 28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatan maupun kunjungan rumah.

Tabel 2.89
Cakupan Pelayanan Nifas
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Peserta Ibu Nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	4064	3736	3458	3371	3245
2	Jumlah seluruh ibu nifas disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu	4167	4198	4198	4198	4076
Cakupan Pelayanan Nifas		97.5	89.0	82.37	80.3	79.61

Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2026

Tabel di atas menunjukkan cakupan pelayanan nifas tahun 2021-2025 di Kota Lhokseumawe bersifat fluktuatif. Secara umum cakupan pelayanan nifas pada tahun 2021-2025 mengalami penurunan dari tahun 2021, yaitu dari 97.5% menjadi 79.61%. Pelayanan ibu nifas yang melakukan kunjungan nifas sesuai dengan waktunya belum mencapai 100% sehingga perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu nifas.

EE. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Neonatus dengan komplikasi adalah neonatus dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti *asfiksia*, *ikterus*, *hipotermia*, *tetanus neonatorum*, *infeksi/sepsis*, trauma lahir, BBLR (berat badan lahir rendah <2500 gr), sindroma gangguan pernafasan, kelainan kongenital. Neonatus dengan komplikasi yang ditangani adalah neonatus komplikasi yang mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, dokter, dan



bidan di sarana pelayanan kesehatan. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi.

Tabel 2.90
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani	314	285	274	152	97
2	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada	648	639	274	799	487
Persentase		48.6	44.6	100	19.02	19.92

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2026.

Secara umum cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebesar 48.6%. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program KIA dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada neonatus dengan komplikasi. Meskipun jumlah neonatusnya cenderung fluktuatif, akan tetapi jika dilihat dari cakupannya, data diatas menunjukkan trend yang positif. Hal ini menunjukkan kemampuan sarana pelayanan kesehatan menangani kasus kegawatdaruratan neonatal, ditindaklanjuti sesuai kewenangannya dan/atau dirujuk ke tingkat pelayanan yang lebih tinggi. Kasus komplikasi neonatus yang tertangani diantaranya asfiksia, ikterik neonatrum, hipotermia, hipoglikemia, masalah pemberian ASI, prematur, dan BBLR. Namun, pada tahun 2022, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani mengalami penurunan menjadi 44.6% dan pada tahun 2023 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani meningkat menjadi 100% artinya semua neonates dengan komplikasi berhasil ditangani. Pada tahun 2024 cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani menurun menjadi 19.02% dan meningkat sedikit tahun 2025 menjadi 19.91%.

FF. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita adalah anak balita (12-59 bulan) yang memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Setiap anak umur 12-59 bulan memperoleh pelayanan pemantauan pertumbuhan setiap bulan, minimal delapan kali dalam setahun yang tercatat di Kohort Anak Balita dan Pra Sekolah, Buku KIA/KMS, atau buku pencatatan dan pelaporan lainnya. Sedangkan pemantauan pertumbuhan adalah pengukuran berat badan per tinggi/panjang badan (BB/TB). Pemantauan perkembangan meliputi penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya dengar, serta daya lihat.



Tabel 2.91
Cakupan Pelayanan Anak Balita
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pada waktu tertentu	13600	12698	13194	11378	15939
2	Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama	15933	15677	15677	15677	17825
Cakupan Pelayanan Anak Balita		85.3	81.0	84.16	72.57	89.42

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2026

Cakupan pelayanan anak balita pada kurun waktu 2021-2025 fluktuatif. Cakupan tertinggi terjadi pada tahun 2025, yaitu 89.42%. Sedangkan cakupan terendah pada tahun 2024 yaitu 72.57%. Selama lima tahun terakhir cakupan pelayanan anak balita belum mencapai 100%. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan balita terutama di posyandu masih kurang. Selain itu, beberapa indikator pelayanan kesehatan balita tidak terpenuhi, misalnya pemantauan perkembangan dengan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan pelayanan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Pada tahun 2021, cakupan pelayanan anak balita mengalami penurunan dari 85,3%. Terjadinya pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan cakupan ini. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita di posyandu yang merupakan indikator pelayanan anak balita tidak dapat dilaksanakan rutin setiap bulan pada masa pandemi. Namun, pada tahun 2022, cakupan pelayanan anak balita menunjukkan penurunan kembali menjadi 81.0%, dan tahun 2023 cakupan pelayanan anak balita meningkat menjadi 84.16%, namun tahun 2024 menurun menjadi 72.57%.

GG. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Gawat darurat level satu adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum *on site* 24 jam dengan kualifikasi GELS (*General Emergency Life Support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma Life Support*) + ACLS (*Advance Cardiac Life Support*), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi.

Tabel 2.92
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	9	10	10	10	11
2	Jumlah Rumah Sakit	10	10	10	10	11
Persentase		90	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2026

Berdasarkan data pada tabel di atas, cakupan pelayanan Gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kota



Lhokseumawe tahun 2021 belum mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua RS yang ada di Kota Lhokseumawe memberikan pelayanan gawat darurat level 1. Hal ini disebabkan beberapa RS belum memiliki dokter umum *on site* 24 jam dengan kualifikasi GELS (*General Emergency Life Support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma Life Support*) + ACLS (*Advance Cardiac Life Support*), serta memiliki alat transportasi dan komunikasi. Namun pada tahun 2022 s.d 2025 cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang diberikan sudah mencapai 100%. Seluruh Rumah Sakit yang ada di Kota Lhokseumawe merupakan Rumah Sakit Swasta karena Kota Lhokseumawe belum memiliki Rumah Sakit Umum Pemerintah.

HH.Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam

Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <24 jam adalah kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani <24 jam oleh kabupaten/kota terhadap KLB periode/kurun waktu tertentu. Kelurahan mengalami KLB bila terjadi peningkatan kesakitan atau kematian penyakit potensial KLB, penyakit karantina atau keracunan makanan. Sedangkan KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu kelurahan dalam waktu tertentu.

Tabel 2.93
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi ≤ 24 jam Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah KLB didesa/kelurahan yang ditangani ≥ 24 jam dalam periode tertentu	4	2	4	2	1
2	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama	4	2	4	2	1
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam		100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2026

Berdasarkan data tabel di atas, selama periode tahun 2021-2025 terdapat sejumlah KLB di Kota Lhokseumawe. Tahun 2021 jumlah kejadian KLB sebanyak 4 kasus. KLB yang tercatat pada tahun 2022 turun menjadi 2 kasus dan tahun 2023 meningkat kembali menjadi 4 kasus dan 2024 menurun menjadi 2 kasus. Namun dari seluruh KLB yang terjadi, semuanya sudah mampu ditangani <24 jam. Sehingga cakupan kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam sudah 100%. Keberhasilan penyelidikan epidemiologi <24 jam dikarenakan jejaring dan kemitraan yg bagus, adanya petugas surveilans puskesmas dan surveilans desa yang menjalankan tugas dengan baik, serta adanya sistem kewaspadaan dini dan respon yang baik.

II. Capaian Indikator Rencana Induk Bidang Kesehatan

Sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyusun alokasi anggaran



kesehatan sesuai program kesehatan nasional yang tercantum dalam Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK). RIBK merupakan penerjemahan dari RPJMN untuk sektor Kesehatan, dengan tujuan menciptakan keselarasan vertikal dan horizontal untuk seluruh pemangku kepentingan sektor Kesehatan.

Tabel 2.94
Capaian Indikator Rencana Induk Bidang Kesehatan
Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah lansia usia ≥60 tahun yang mandiri	11.024	10.593	12.670	13.158	16.161
	Jumlah seluruh lansia usia ≥60 tahun yang diperiksa	15.342	14.924	16.244	16.447	18.576
	Persentase Lanjut Usia yang Mandiri	71.86	70.98	78.00	80.00	87.00
2	Jumlah orang yang mendapat pemeriksaan kesehatan gratis	0	0	0	0	35.019
	Jumlah sasaran yang seharusnya diperiksa	0	0	0	0	203.410
	Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	0	0	0	0	17.22
3	Jumlah penderita hipertensi dengan tekanan darah terkontrol	0	0	4.883	3.580	3.319
	Jumlah seluruh penderita hipertensi yang dipantau	0	0	35.189	13.436	12.893
	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	0	0	13.88	26.64	25.74
4	Jumlah penduduk usia ≥10 tahun dengan aktivitas fisik cukup	38	56	76	56	53
	Jumlah penduduk usia ≥10 tahun yang diukur	180	262	262	171	240
	Proporsi Penduduk Dengan Aktifitas Fisik Cukup	21.10	21.40	29.00	32.75	22.08
5	Jumlah kasus kusta yang terdaftar	15	15	15	17	8
	Jumlah penduduk	189.941	191.396	196.067	198.705	200.876
	Eliminasi Kusta	0.79	0.78	0.77	0.86	0.40
6	Jumlah penduduk usia ≥15 tahun yang mengalami depresi	39	26	25	7	27
	Jumlah penduduk usia ≥15 tahun yang diwawancarai/diukur	2.377	6.368	8.339	9.411	14.686
	Prevelensi Depresi Pada Usia ≥15 tahun	1.64	0.41	0.30	0.07	0.18
7	Jumlah penduduk usia 10-21 tahun yang merokok	0	0	0	29.153	516
	Jumlah penduduk usia 10-21 tahun yang diukur	0	0	0	41.520	41.520
	Persentase Merokok Penduduk 10-21 Tahun	0	0	0	70.21	1.24
8	Jumlah penduduk usia ≥18 tahun yang obesitas	1.450	7.109	5.626	4.760	5.654
	Jumlah penduduk usia ≥18 tahun yang diukur	30.185	138.467	138.467	121.372	121.372



No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Prevelensi Obesitas ≥ 18 Tahun		4.80	5.13	4.06	3.92	4.66
9	Jumlah desa yang memiliki unit pelayanan kesehatan sesuai standar	68	68	68	68	68
10	Jumlah puskesmas terakreditasi paripurna	0	0	4	0	0
	Jumlah seluruh Puskesmas	7	7	7	7	7
Persentase Puskesmas terakreditasi paripurna		0	0	57.10	0	0
11	Jumlah puskesmas yang memiliki SDMK sesuai standar	7	7	7	7	7
	Jumlah seluruh Puskesmas	7	7	7	7	7
Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar		100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2026

Capaian Indikator Rencana Induk Kesehatan tahun 2021-2025 belum menunjukkan hasil yang memuaskan, sehingga perlu sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, peneliti, organisasi profesi, serta masyarakat untuk mendapatkan hasil yang lebih baik kedepannya.

JJ. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.95
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Tahun 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	4127	3793	100	91.91
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai Standar	4076	3245	100	79.61
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3837	3248	100	84.65
Pelayanan kesehatan balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	17825	15939	100	89.42
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	30771	30771	100	100
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	137227	117974	100	85.97



Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	18748	18576	100	99.08
Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	13411	12893	100	96.14
Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penderita Diabetes Mellitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4491	4245	100	94.52
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	427	499	100	116.8
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase penderita TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	3359	5344	100	159.1
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AIDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan Pemeriksaan HIV AIDs	8136	9520	100	117.01

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, 2026

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Kesehatan pada tahun 2025 seluruh capaiannya belum ada yang mencapai 100%. Dengan belum tercapainya target SPM tahun 2025 artinya kinerja Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat belum dapat dikatakan baik.

2.1.4.4.2 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
A. Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk

Indikator rasio panjang jalan per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah panjang jalan dengan jumlah penduduk. Indikator ini dihitung untuk melihat kemudahan akses ke semua bagian kota dengan mudah. Berdasarkan survei dan analisa data di lapangan serta berdasarkan evaluasi terhadap Keputusan Walikota Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Lhokseumawe, maka terdapat ketidaksesuaian panjang jalan, peningkatan status jalan dan pembukaan jalan baru sehingga Keputusan Walikota Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Lhokseumawe diubah dengan Keputusan Walikota Nomor 285 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 400 Tahun 2013 tentang penetapan ruas-ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan Kota Lhokseumawe.



Tabel 2.96
Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Panjang Jalan	412,468	412,468	412,468	412,468	342,61
2	Jumlah Penduduk	189.941	191.396	196.067	198.705	200.876
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		2,171	2,155	2,104	2,076	1,705

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2026

Perkembangan rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2021-2024 memiliki nilai yang fluktuatif. Nilai yang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun ini dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor yang pertama adalah faktor panjang jalan yang tidak bertambah setiap tahun dan faktor yang kedua yaitu jumlah penduduk Kota Lhokseumawe yang fluktuatif. Kondisi tersebut tidak dapat terelakkan mengingat luasan Kota Lhokseumawe yang cukup sempit dan tidak cukup ruang untuk penambahan jalan. Sehingga, langkah yang dilakukan ialah meningkatkan kualitas kondisi jalan rusak menjadi baik, dan kondisi jalan yang kurang baik ditingkatkan kembali menjadi kondisi jalan yang lebih baik. Namun tahun 2025 panjang jalan Kota Lhokseumawe mengalami penurunan dikarenakan adanya evaluasi terhadap ruas jalan Kota.

B. Pesentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Ketersediaan jalan dalam kondisi mantap mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Tabel 2.97
Persentase Panjang Jaringan Jalan Kondisi Mantap
(Baik dan Sedang) Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (Km)

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Panjang Jalan Baik	171,297	279,983	258,494	234,81	176,198
2	Panjang Jalan Sedang	106,994	37,493	28,254	30,81	27,782
3	Panjang Jalan Mantap	278,291	317,476	286,748	265,62	203,98
4	Panjang seluruh jalan	412,468	412,468	412,468	412,468	342,61
Persentase jalan dalam kondisi mantap		67.47	76,97	69,52	64,40	59,54

Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Kondisi jalan mantap di Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2025 cenderung menurun. Pada tahun 2021 sebesar 67.47% jalan dalam kondisi mantap. Persentase jalan dalam kondisi mantap



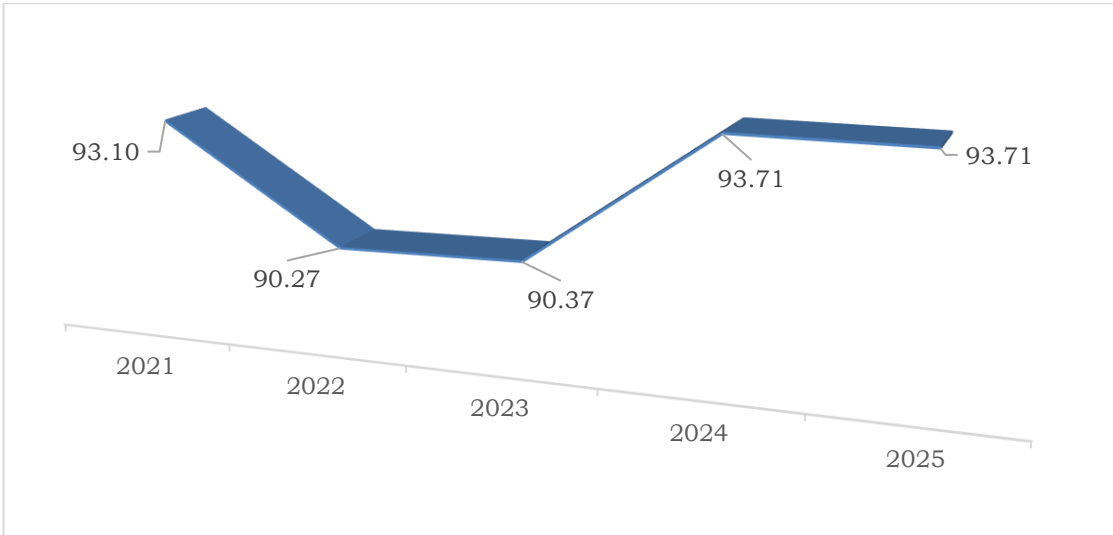
meningkat pada tahun 2022 menjadi 76.97%. Peningkatan jalan dalam kondisi mantap ini dilakukan dengan kegiatan pembangunan, peningkatan/rekontruksi dan rehabilitasi jalan menggunakan dana APBD maupun non APBD seperti Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Pada tahun 2023-2025 jalan dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi sebesar 69.52% dan tahun 2025 menurun kembali menjadi 59,54% karena adanya penyesuaian penetapan ruas jalan kota.

C. Cakupan Layanan Sanitasi Layak

Keberadaan sanitasi merupakan bagian dari kebutuhan pokok minimal seperti yang tercantum dalam Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif, dengan penggunaan air hanya untuk minum, masak, cuci pakaian, mandi (termasuk sanitasi), bersih rumah, dan ibadah. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan. Salah satu indikator dalam melihat kondisi kesehatan lingkungan adalah ketersediaan tempat buang air besar dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) rumah tangga.

Sanitasi layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan dan memiliki tempat penampungannya. Proporsi rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak adalah perbandingan antara rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi dengan jumlah rumah tangga. Berikut akses masyarakat atau rumah tangga terhadap sanitasi layak di Kota Lhokseumawe.

Gambar 2.51
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2026

Secara umum, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Kota Lhokseumawe 2021-2025 mengalami fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021 persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak sebesar 93.10% dan pada tahun 2025 menjadi 93.71%.



D. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 01/PRT/M/2014, tersedianya sistem jaringan drainase adalah ukuran pencapaian kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan penyediaan sistem drainase di wilayahnya. Guna menjamin kualitas ketersediaan sistem drainase, dilakukan penghitungan panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat yang dihitung dengan formula panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air dibagi dengan panjang seluruh drainase kota.

Tabel 2.98
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (km)	79,829	96,000	97,856	98,502	101,547
2	Panjang seluruh drainase (km)	116,408	116,408	117,408	131,462	137,768
Persentase		68,58	82,47	83.35	74,93	73,70

Sumber: Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Tren panjang drainase di Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan yakni sebesar 116,408 km pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 137,68 km pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengelolaan air permukaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan terlaksana dengan baik.

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat secara umum menunjukkan grafik yang meningkat. Kondisi drainase di Kota Lhokseumawe sudah berada dalam kondisi yang baik dengan cakupan drainase dalam kondisi baik lebih besar dari 80%, walau terjadi penurunan pada tahun 2025 menjadi sebesar 73,71% dikarenakan panjang drainase seluruhnya bertambah. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kota Lhokseumawe, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam memperbaiki kualitas lingkungan di Kota Lhokseumawe terutama dalam perbaikan drainase berhasil sehingga dapat mengurangi kemungkinan tergenangnya air di beberapa titik tertentu pada saat musim hujan datang.

E. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Indikator persentase penduduk berakses air minum di Kota Lhokseumawe didapatkan dari persentase jumlah penduduk berakses air minum dengan jumlah penduduk keseluruhan Kota Lhokseumawe. Air Minum berkualitas (layak) di Kota Lhokseumawe bersumber dari sumur gali terlindungi, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa dan PDAM.

Jumlah penduduk berakses air minum di Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2025 memiliki kecenderungan yang meningkat. Namun, persentase penduduk berakses air minum perpipaan di Kota Lhokseumawe secara umum baru sebesar 17.71%. Persentase air Minum Kota Lhokseumawe masih sangat kecil karena Kota Lhokseumawe tidak memiliki Sumber Air Baku.



Tabel 2.99
Persentase Akses Rumah Tangga (RT) berakses Air Minum
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pelanggan PDAM Ie Beusare Rata	1.954	2.419	2.350	2.349	2.349
2	Jumlah Pelanggan PDAM Tirta Mon Pase (Aceh Utara)	4.942	4.848	4.936	5.023	4.909
3	Sumur dalam terlindungi	148	148	148	538	1.028
4	PMSIMAS	0	0	0	49	0
5	Jumlah Rumah Tangga	42.354	43.930	45.504	46.315	46.778
Persentase		16.63	16.88	16.34	16.42	17.71

Sumber: PDAM Ie Beusare Rata Tahun 2026

Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 melalui jaringan PDAM adalah sebanyak 7.258 rumah tangga atau sebesar 15,51% dan melalui sumur dalam terlindungi perpipaan sebesar 2,19%. Minimnya persentase akses jaringan rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih ini dikarenakan jaringan pipa air PDAM baru terpasang untuk wilayah Kecamatan Banda Sakti, Muara Dua dan Muara Satu.

F. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk didapatkan dari perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dikalikan 1000. Data jumlah tempat ibadah secara detailnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.100
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	URAIAN	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Tempat Ibadah					
	a. Mesjid	52	52	52	52	52
	b. Mushalla	93	93	93	93	93
	c. Meunasah	68	68	68	68	68
	d. Gereja	3	3	3	3	3
	e. Vihara	1	1	1	1	1
	Jumlah Rumah Ibadah	217	217	217	217	217
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	189.941	191.396	196.067	198.705	200.876
3	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk					
	a. Mesjid	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26
	b. Mushalla	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46
	c. Meunasah	0.35	0.35	0.34	0.34	0.33
	d. Gereja	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	e. Vihara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2026

Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa jumlah tempat ibadah dengan jumlah paling banyak adalah Mushalla. Keberadaan masjid di Kota Lhokseumawe tahun 2021 sebanyak 52 unit. Mushalla di Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2025 berjumlah 93 unit.



Meunasah pada tahun 2021-2025 berjumlah 68 unit sesuai jumlah Gampong di Kota Lhokseumawe.

Gereja dan Vihara di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 berjumlah tetap masing-masing 3 unit gereja dan 1 unit vihara. Secara umum kurun waktu 2021-2025 rasio jumlah tempat ibadah per 1000 penduduk di Kota Lhokseumawe memiliki rasio tetap, Penurunan dan peningkatan hanya dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang berkurang dan bertambah.

G. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Indikator dalam Lampiran 1 Permendagri No.86 Tahun 2017 salah satunya adalah indikator rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah baik yang berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) maupun luas wilayah yang berstatus Hak Guna Bangunan (HGB). Badan Pertanahan Kota Lhokseumawe mencatat data luas wilayah berstatus HPL atau HGB berdasarkan sertifikat yang diterbitkan setiap tahunnya. Rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HPL atau HGB dihitung dengan membandingkan luas RTH terhadap luas wilayah yang berstatus HPL dan HGB.

Tabel 2.101
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber HPL/HGU Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas Ruang Terbuka Hijau (Ha)	24.36	24.36	24.36	24.36	24.36
2	Luas wilyah ber HPL (Ha)	101	101	101	101	152
3	Luas wilayah ber HGB (Ha)	20,399	73,624	162,439	164,359	167,646
Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HPL		0.24	0.24	0.24	0.24	0.16
Rasio RTH persatuan luas wilayah ber HGU		1.19	0.33	0.15	0,15	0.14

Sumber: DLH Kota Lhoksemauwe dan Badan Pertanahan Tahun 2026

Berdasarkan data yang ada, rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HPL dari tahun 2021-2025 tetap. Nilai yang fluktuatif ini dikarenakan data berdasarkan usulan permohonan sertifikat yang masuk. Dengan adanya luas RTH dan tetapnya luas wilayah yang bertatus HPL, menyebabkan rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HPL tetap dari 2021-2025. rasio RTH per satuan luas wilayah berstatus HGB menurun dari tahun 2021-2025 dikarenakan luas wilyah HGB bertambah. Besaran luas wilayah ber-HPL dan ber-HGB tergantung pada jumlah permohonan yang diajukan masyarakat ke Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe.

H. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Indikator kesesuaian pemanfaatan ruang ini didapatkan dengan membagi antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan dikalikan dengan angka 100. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri



(Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdapat lima kriteria penilaian realisasi kinerja, yaitu: (1) Sangat Tinggi, dengan nilai $x > 90$; (2) Tinggi, dengan nilai $75 < x \leq 90$; (3) Sedang, dengan nilai $65 < x \leq 75$; (4) Rendah, dengan nilai $50 < x \leq 65$; dan (5) Sangat Rendah, dengan nilai $x < 50$.

Kajian kesesuaian pemanfaatan pola ruang di Kota Lhokseumawe berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang Kota Lhokseumawe, dan perhitungan kesesuaian untuk masing-masing fungsi didasarkan juga dengan data permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), pengadaan tanah, dan adanya penambahan angka kesesuaian pemanfaatan pola ruang Kota Lhokseumawe yang tersebar di 4 Kecamatan yaitu Banda Sakti, Muara Dua, Blang Mangat, dan Muara Satu.

Perubahan tata ruang ini bersifat dinamis, sehingga pemanfaatan ruang yang berbeda selalu diikuti dengan review RTRW maupun RDTR. Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam masalah ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan RTRW yaitu dengan cara melakukan review RTRW dan melakukan kebijakan ketentuan dominasi pada suatu cakupan wilayah, sehingga semisal pada peruntukkan perdagangan boleh saja digunakan untuk permukiman asal dominasinya masih pada perdagangan.

Tabel 2.102
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pemanfaatan Ruang sesuai zonasi	11.091,16	11.260,06	11.431,54	11.605,62	11.726,79
2	Luas Pola ruang sesuai RTRW	15.343,51	15.343,51	13.297,36	13.297,36	13.297,36
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		72,29	73,39	85,96	87,28	88.19

Sumber : PUPR Kota Lhokseumawe, 2026

I. Penerbitan Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung disyaratkan adanya rekomendasi teknis dari DPUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dalam penerbitan perijinan gedung oleh DPMPSTP dan Naker (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja) yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung serta prasarana dan sarana bangunan sesuai dengan standar teknis bangunan. Letak geografis Kota



Lhokseumawe yang masuk dalam daerah dengan potensi bencana gempa sehingga membutuhkan penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna.

Tabel 2.103
Jumlah Rekomendasi Perijinan Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	224	234	280	126	102

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan berbanding lurus dengan jumlah permohonan rekomendasi teknis sebagai persyaratan dalam penerbitan perijinan bangunan gedung.

J. Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Tahun 2025

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pekerjaan umum tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.104
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Pemenuhan kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan	545	545	100	100
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	12	12	100	100

Sumber : Laporan SPM Tahun 2025, Dinas PUPR Tahun 2026

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator SPM di bidang Pekerjaan Umum pada tahun 2025 seluruh capaiannya telah mencapai 100%, baik dari pemenuhan rumah tangga dalam memiliki akses air minum melalui SPAM maupun rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

2.1.4.4.3 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Luas Permukiman Layak Huni

Menurut Permen PU Nomor 01/PRT/M/2014, permukiman didefinisikan sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian secara menyeluruh dan terpadu, yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Luas permukiman layak huni ini di Kota Lhokseumawe terlihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.105
Luas Permukiman Layak Huni
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas Permukiman Layak Huni (Ha)	4664,54	4622,13	4700,33	4994,33	4994,33

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Luas permukiman layak huni didapatkan dari pengurangan total luas permukiman di Kota Lhokseumawe dengan total luas permukiman kumuh yang ada. Adapun luas permukiman layak huni di Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2025 fluktuatif. Fenomena tersebut terjadi dikarenakan updating data rumah layak huni Kemudian pada tahun 2021 jumlah penanganan yang dilakukan dari Dinas PUPR sangat sedikit, hal ini terkait kebijakan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19. Begitu pula tahun 4 yang juga mengalami peningkatan luas permukiman layak huni menjadi 4994,33 Ha.

B. Areal Kawasan Kumuh

Indikator ini dapat merepresentasikan luasan kumuh yang ada di Kota Lhokseumawe secara time series yaitu dari tahun 2021-2025. Berdasarkan pendataan yang dilakukan, luasan kawasan kumuh yang ada di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2021-2025 menunjukkan data yang cukup fluktuatif.

Tabel 2.106
Areal Kawasan Kumuh
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	78,46	78,46	42.67	42.67	42.67

Sumber: 1. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 395 Tahun 2019

2. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020

3. SK Walikota Lhokseumawe Nomor 246 Tahun 2024

Luasan kawasan kumuh dari tahun 2021-2022 tidak berubah tetap sebesar 78.46 Ha. Kenaikan luasan kawasan kumuh ini tidak bergantung pada alokasi APBK, melainkan bergantung pada pendataan yang dilakukan. Pada tahun 2020 dilakukan pendataan kembali luasan kawasan kumuh oleh Korkot Kota Lhokseumawe, Satker/PPK PIP Kota Lhokseumawe, dan Pokja PKP Kota Lhokseumawe maka didapatkan hasil peningkatan kumuh sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar 78.46 Ha.

Penanganan kumuh dilakukan intervensi sesuai dengan indikasi kegiatan yang ada dalam Rencana Penataan Lingkungan Pemukiman (RPLP) yang telah disusun oleh gampong didanai oleh APBN dari pinjaman Luar Negeri melalui Islamic developman Bank (IDB). Secara garis besar kegiatan NSUP-KOTAKU di Kota Lhokseumawe pada tahun intervensi 2020-2021 meliputi

- a. kegiatan skala lingkungan meliputi
 - 1. infrastruktur lingkungan yaitu kegiatan bantuan Pemerintah untuk masyarakat (BPM) tahun 2019-2020, infrastruktur livelihood tahun 2021, Kegiatan bantuan masa pandemic covid



- dengan cash for work (CFW) dan kegiatan skala kota tahun 2020-2021
2. peningkatan ekonomi yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil yang sudah punya usaha rumahan dan akan memulai usaha di program kotaku pendampingan dilakukan simpan pinjam kelompok usaha yang difasilitasi oleh unit pengelolaan keuangan (UPK)
 3. Kelembagaan dan kolaborasi, setiap gampong diharuskan membentuk suatu badan yang dinamai dengan LKM/BKM
- b. Kegiatan Skala Kawasan
- Kegiatan penentasan kumuh skala kawasan di Kota Lhokseumawe diusulkan dari tahun 2017 hasil memorandum program terdapat 4 kawasan prioritas yaitu:
1. Kawasan Mongeudong
 2. Kawasan Bathupat
 3. Kawasan Jagu
 4. Kawasan Pusong

Pemerintah Kota Lhokseumawe masih harus berusaha lagi untuk mengurangi luas kawasan kumuh yang ada dengan melakukan program-program perbaikan lingkungan, termasuk lingkungan tempat tinggal. Salah satu programnya adalah dengan melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSPS RTLH) di beberapa Gampong di Kota Lhokseumawe yang merupakan program kerjasama antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Kementerian Perumahan Rakyat. Kemudian, terdapat program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang juga dapat menjadi sarana pengurangan pemukiman kumuh di Kota Lhokseumawe.

C. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) perumahan rakyat pada tahun 2025 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.107
Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n/jumlah total rencana unit rumah yang aan ditangani pada tahun n	67	67	100	100
Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Rumah Tanggapenerima penyediaan rumah layak huni/jumlah total rumah tangga yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria pelayanan	67	67	100	100

Sumber : Laporan SPM Tahun 2025, Dinas PUPR Tahun 2026

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa baik pelayanan dasar penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana maupun penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena



relokasi program Pemerintah Daerah di tahun 2025 seluruhnya sebesar 100%.

2.1.4.4.4 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Rasio Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) per 10.000 penduduk

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa Ketentraman, ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Petugas perlindungan masyarakat (linmas) memiliki tujuan untuk mendukung pelayanan keamanan ketertiban sampai pada instansi terbawah yaitu Gampong. Menurut Permendagri No. 26 Tahun 2020, Pelindungan Masyarakat atau Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Berikut adalah rasio polisi pamong praja dan petugas linmas di Kota Lhokseumawe per 10.000 penduduk.

Tabel 2.108
Rasio Satuan Polisi Pamong Praja dan Petugas Linmas
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja	243	250	278	325	350
2	Jumlah Linmas	1040	1040	1173	526	105
3	Jumlah penduduk	189.941	191.396	196.067	198.705	200.876
Rasio Polisi Pamong Praja		12.79	13.06	14.17	16,35	17.42
Rasio Linmas		54.75	54.33	59.82	26,47	5.23

Sumber: Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Dari tabel rasio satuan polisi pamong praja dan petugas Linmas di atas, dapat dilihat rasio satuan polisi pamong praja dari tahun 2021-2025 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 rasio satuan polisi pamong praja per 10.000 penduduk sebesar 12,79 dan pada tahun 2025 menjadi 17.42. Sedangkan jumlah petugas Linmas Kota Lhokseumawe tahun 2021-2022 tetap sebanyak 1040 orang dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 1173 orang hal ini terjadi untuk mencukupi jumlah petugas linmas di tiap TPS di Kota Lhokseumawe saat pemilu. Sedangkan rasio petugas linmas tahun 2021 sebesar 54.75 dan menjadi 5.23 tahun 2025.



B. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari’at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun.

Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari syari’at Islam ini meliputi ahwal al-syakshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam. Khusus jinayah atau hukum pidana, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari’at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan masyarakat Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.109
Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No.6 Tahun 2014)	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pasal 15 tentang Khamar	-	-	1	30	2
2.	Pasal 16 tentang menyimpan, menimbun dan menjual Khamar	2	-	1	-	-
3.	Pasal 18 tentang Maisir	-	-	-	16	1
4.	Pasal 20 tentang Menyediakan Fasilitas Jarimah Maisir	4	7	-	-	-
5.	Pasal 22 tentang Jarimah percobaan Maisir	-	-	-	-	-
6.	Pasal 23 tentang Khalwat	31	124	60	242	65
7.	Pasal 25 tentang Ikhtilath	45	-	2	20	65
8.	Pasal 27 tentang Melakukan Jarimah Ikhtilath dengan berhubungan Mahran dengannya	-	-	-	-	-
9.	Pasal 33 tentang Zina	10	8	-	-	-
10.	Pasal 46 tentang Pelecahan Seksual	-	2	-	-	-
11.	Pasal 47 Pelecehan seksual terhadap anak	-	-	-	-	-
12.	Pasal 50 tentang melakukan Pemerkosaan terhadap Anak	-	-	-	-	-
13.	Pasal 64 tentang Musahaqah	-	-	-	-	-
Jumlah Kasus		92	141	64	308	133

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah Pelanggaran Syariat Islam sejak tahun 2021-2022 menunjukkan angka yang meningkat. Tahun 2021 jumlah kasus pelanggaran syariat islam sebanyak 92 kasus dan menjadi 141 kasus pada tahun 2022. Selanjutnya kasus Pelanggaran Khalwat menjadi kasus tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 124 kasus dimana pada tahun 2021



sebelumnya hanya ada 31 kasus. Sedangkan untuk kasus Ikhtilath mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tahun 2021 terjadi sebanyak 45 kasus ikhtilath dan tidak ditemukan kasus ikhtilath sama sekali di tahun 2022. Pada tahun 2024 kasus pelanggaran syariat islam mengalami peningkatan menjadi 308 kasus dan tahun 2025 pelanggaran syariat islam menurun menjadi 133 kasus.

C. Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman

Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Data Penertiban yang dilakukan Satpol PP dan WH untuk menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe sebagai berikut:

Tabel 2.110
Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Jenis Penertiban	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Penertiban Pasar	249	250	5	5	6
2.	Penertiban IMB dan HO	-	-	10	-	-
3.	Penertiban Pedagang Kaki Lima	249	250	6	12	15
4.	Penertiban Spanduk	-	2	-	6	6
5.	Penertiban Pelajar Bolos Sekolah	1	5	-	8	48
6.	Penertiban Café dan Tempat Hiburan Malam	-	-	-	60	48
7.	Penertiban Keramaian Umum	-	-	-	-	-
8.	Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak	-	-	-	1	-
9.	Pengamanan Demo	-	-	3	6	2
10.	Pengamanan Upacara dan Hari Besar Lainnya	-	2	-	6	6
11.	Penertiban Pengelolaan Air Kotor/Limbah	-	-	-	-	-
12.	Penertiban Penindakan PNS	-	-	-	3	48
13.	Penertiban Ketertiban Sosial, Adab, Susila dan Premanisme, Tuna Wisma, Gepeng/Pengemis	2	250	-	98	48
14.	Penertiban Izin Milik Ruang Jalan (Galian C dll)	-	-	-	-	-
Jumlah Kasus		501	759	25	205	227

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2026.

Penertiban untuk menjaga Ketertiban dan Ketentraman yang dilakukan Tahun 2020 pada penertiban pasar sebanyak 249 penertiban dan tahun 2025 menurun menjadi 6 penertiban. Pada Tahun 2021 Penertiban Pedagang Kaki Lima sebanyak 249 penertiban dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 250 penertiban, dan tahun



2025 menurun menjadi 15 penertiban. Penertiban Ketertiban Sosial, Adab, Susila dan Premanisme, Tuna Wisma, Gepeng/Pengemis pada tahun 2021 sebanyak 2 penertiban dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 250 penertiban dan tahun 2025 menjadi 48 penertiban dilakukan.

D. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Laporan kejadian kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir di Kota Lhokseumawe mengalami beberapa bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, gelombang ekstrim/abrasi. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBD menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kejadian bencana dari tahun 2021 hingga 2025. Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.111
Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025

Jenis Bencanas	Frekuensi Terjadinya Bencana (Kejadian)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Banjir	5	3	8	1	60
Puting Beliung	1	6	2	5	14
Tanah Longsor	1	3	1	16	25
Gempa Bumi	-	-	-	-	-
Gelombang Ekstrim/Abrasi	2	-	-	-	8
Jumlah	9	12	11	22	107

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2026.

Pada tabel di atas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2025 kejadian bencana banjir meningkat menjadi 60 kali, bencana puting beliung sebanyak 14 kali, bencana tanah longsor 25 kali, sedangkan gelombang ekstrim/abrasi sebanyak 8 kali serta tidak ada kejadian gempa bumi yang menimbulkan kerugian/bencana di Kota Lhokseumawe.

E. Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Kebakaran merupakan bencana yang sering melanda wilayah perkotaan. Sifat perkampungan yang padat, jarak antar bangunan yang sangat dekat, dan kondisi instalasi listrik yang kurang terpelihara dapat menjadi pemicu terjadinya bencana kebakaran. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pelayanan bencana kebakaran di Kota Lhokseumawe sangat diperlukan. Penanggulangan Kebakaran adalah semua usaha yang dilakukan untuk mencegah, menyiagakan, memadamkan dan penanganan akibat kebakaran. Api dapat timbul jika terjalin interaksi ketiga unsur "segitiga api" yaitu: oksigen (dari udara), bahan yang dapat menyala (bahan bakar) dan panas. Persentase cakupan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran tahun 2021-2025 sebagai berikut.



Tabel 2.112
Persentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan
Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kejadian kebakaran yang ditanggulangi	32	38	103	109	93
2	Jumlah kejadian bencana non kebakaran yg ditanggulangi	9	12	23	22	102
3	Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang ditanggulangi	41	50	126	131	195
4	Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran yang terjadi	41	50	126	131	195
Persentase Cakupan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2026

F. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2025 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.113
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	120	120	100	100
Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	25	25	100	100
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	40	40	100	100
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	43	43	100	100
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	43	43	100	100

Sumber: Laporan SPM Tahun 2026

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2025 SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang



terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar dengan 5 indikator telah tercapai 100%.

2.1.4.4.5 Sosial

A. Penanganan PPKS

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah berupaya untuk menangani permasalahan sosial khususnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). PPKS adalah seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dengan lingkungan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani, dan sosial) secara wajar. Pelayanan dasar yang diberikan mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018.

Bentuk pelayanan dasar yang diberikan merupakan penanganan berupa rehabilitasi sosial kepada penyandang disabilitas, anak telantar, lanjut usia telantar, dan tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis, serta perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. Bentuk rehabilitasi tersebut dapat berupa pembinaan dan pelatihan keterampilan, pemulangan PPKS ke daerah asal, pemberian permakanan dan pembinaan mental.

Tabel 2.114
Penanganan PPKS
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah PPKS yang ditangani	10.814	16.450	16.851	13.223	9.675
2.	Jumlah PPKS yang ada	101.500	101.209	94.178	93.996	104.145
3.	Persentase PPKS yang ditangani	10,65	16,25	17,89	14,07	9,29
4.	Jumlah Penduduk	189.941	191.396	196.067	198.705	200.876
5.	Persentase PPKS terhadap jumlah penduduk	53,43	52,87	48,03	47,30	51,84

Sumber: Dinas Sosial, 2026

Pada tabel di atas diketahui bahwa jumlah PPKS di tahun 2025 meningkat dari 101.500 orang menjadi 104.145 orang, dengan persentase PPKS yang ditangani sebanyak 9.29 persen. Meski persentase penanganan tersebut mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2021, namun persentase PPKS terhadap jumlah penduduk cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukannya usaha yang lebih untuk dapat menurunkan rasio jumlah PPKS terhadap jumlah penduduk, meskipun ada jenis PMKS yang secara status memang tidak dapat berubah, misalnya penyandang cacat, lansia dan orang dengan gangguan mental tetap. Mereka semua tetap ditangani Dinas Sosial melalui pemberian permakanan dan pembinaan mental.

B. PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena

suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Persentase PPKS yang memperoleh bantuan adalah proporsi jumlah PPKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.115
PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah PPKS yang diberikan bantuan	157	160	178	340	250
2.	Jumlah PPKS yang seharusnya menerima bantuan	185	197	207	340	250
Persentase		84.86	81.22	85.99	100	100

Sumber: Dinas Sosial, 2026

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2021-2025 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 berada pada angka 84.86%, dan mengalami peningkatan tahun 2025 menjadi 100%.

C. Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Indikator ini merupakan persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial dengan jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial.

Tabel 2.116
Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial	60	4515	14053	384	4181
2.	Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial	60	4515	14053	384	4181
Persentase		100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, 2026

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa persentase korban yang menerima bantuan sosial pada tahun 2021-2025 sudah mencapai 100% dan angka tersebut stabil di setiap tahunnya. Adanya kenaikan kuantitas korban bencana penerima bantuan sosial karena adanya bencana alam dan sosial serta wabah pandemi Covid-19 yang tidak bisa diprediksi yang kemudian berdampak pada banyaknya implementasi kebijakan atau program pemberdayaan sosial.

D. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pengembangan alternatif-



alternatif intervensi di bidang kesejahteraan sosial, peningkatan kemampuan dan kompetensi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial serta penetapan standardisasi dan legislasi pelayanan sosial. Adapun yang dimaksud dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam.

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM Kesos masyarakat serta berbagai pelaku usaha kesejahteraan sosial baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, namun juga dunia usaha dan masyarakat sekitar, sehingga dengan program ini diharapkan mampu mendorong partisipasi dan rasa kesetiakawanan sosial di masyarakat. Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Karang Taruna, PSM, Orsos, dan forum-forum sosial lainnya perlu terus dikembangkan, sehingga mampu menjadi mitra dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial.

Tujuan pemberdayaan PSKS ini adalah untuk mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya, serta memperbaiki kualitas hidup, dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang terdapat di Kota Lhokseumawe terdiri dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 10 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak sebanyak 12 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lansia sebanyak 2 orang, Penyuluh Sosial sebanyak 6 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 4 orang dengan 1 orang pada masing-masing kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 75 orang yang tersebar pada 68 desa di Kota Lhokseumawe.

E. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial pada tahun 2023 selengkapnya terlihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.117
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
Tahun 2025

Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	133	133	100	100
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah warga negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	28	35	100	125
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	Jumlah Warga Negara lanjut usia terkantar yang	89	89	100	100



Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Sasaran		Target (%)	Realisasi (%)
		Total yang dilayani	Total yang terlayani		
terlantar di luar panti	memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti				
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara tuna sosial khususnya gendangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial	14	14	100	100
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	4181	4181	100	100

Sumber : Laporan SPM Tahun 2026

Dilihat dari tabel diatas pada tahun 2025 SPM bidang sosial yang terdiri dari 5 jenis pelayanan dasar dengan 5 indikator telah tercapai 100%.

2.1.4.4.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.4.4.2.1 Tenaga Kerja

A. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja adalah ukuran seberapa banyak hasil pekerjaan yang dapat dihasilkan oleh individu atau kelompok dalam waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja meliputi keterampilan tenaga kerja, perkembangan teknologi, dan strategi manajerial. Metode perhitungannya adalah nilai tambah dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang dibayar. Capaian produktivitas tenaga kerja Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.118
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2021 s.d 2025
Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	PDRB (ADHB)	9.431.385,9	10.277.625,4	11.169.632,1	11.848.236,9	12.720.900
2.	Jumlah tenaga kerja (orang)	86.031	89.894	85.373	87.132	89.436
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (juta)		109,63	114,33	130,83	135,96	142,23

Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, 2026 (diolah)

Tingkat produktivitas tenaga kerja Kota Lhokseumawe kurun waktu 2021-2025 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, produktivitas tenaga kerja Kota Lhokseumawe mencapai 142,23 juta per tenaga kerja pertahun. Angka ini jauh lebih besar dari capaian pada tahun 2021 yaitu sebesar 109,63 juta per tenaga kerja pertahun.



B. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Per Tahun

Hubungan antara pengusaha dan pekerja merupakan sebuah simbiosis mutualisme di mana kedua pihak memiliki peranannya masing-masing dan hanya akan mencapai keuntungan seperti yang diinginkan apabila kerjasama antar kedua pihak terjaga dengan baik. Oleh karena itu, berbagai kasus sengketa yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, baik karena perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja akan memberikan efek buruk terhadap kinerja perindustrian.

Tabel 2.119
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah sengketa pengusaha-pekerja	54	29	43	27	11
2.	Jumlah perusahaan	52	164	93	105	57
Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja		103.85	17.68	46.24	25.71	19.30

Sumber: DPMTSP dan Naker, 2026

Angka sengketa pengusaha-pekerja dihitung berdasarkan proporsi jumlah sengketa yang terjadi dengan jumlah keseluruhan perusahaan yang ada dikalikan dengan 1.000. Selama tahun 2021-2025, angka sengketa pengusaha-pekerja di Kota Lhokseumawe menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2021 jumlah sengketa antara pengusaha dan pekerja sebesar 54 sengketa. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 29 sengketa dan meningkat kembali tahun 2023 menjadi 43 sengketa Hal ini mengindikasikan bahwa iklim kerja di Kota Lhokseumawe kurang kondusif mengingat tingkat kasus sengketa meningkat, tetapi jumlah perusahaan juga menurun dan tahun 2025 kembali turun menjadi sebesar 11 sengketa.

C. Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama

Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) adalah indikator yang menghitung persentase kasus yang diselesaikan dengan PB dari keseluruhan kasus yang tercatat pada tahun tersebut. Persentase kasus yang terselesaikan dengan Perjanjian Bersama di Kota Lhokseumawe tahun 2021 semua kasus terselesaikan namun pada tahun 2022 mengalami penurunan sehingga menjadi sebesar 58.62%, dari 29 kasus terdapat 17 kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), sedangkan lainnya ada yang belum terselesaikan dan ada kasus yang dilimpahkan ke tingkat provinsi. Selanjutnya tahun 2023 tingkat penyelesaian kasus sebesar 90.47% dan tahun 2025 turun menjadi 18.18%.

Tabel 2.120
Besaran Kasus yang diselesaikan dengan PB
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Pejanjian Bersama (PB)	46	17	38	9	2
2.	Jumlah kasus yang tercatat	46	29	42	27	11
Tingkat Penyelesaian Kasus		100	58.62	90.47	33.33	18.18

Sumber: DPMTSP dan Naker, 2026



D. Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan

Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar.

Tabel 2.121
Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan	189	44	30	23	27
2.	Pencari kerja yang mendaftar	482	549	402	258	716
Pencari Kerja yang ditempatkan		39.21	8.01	7.46	8.91	3.77

Sumber: DPMTSP dan Naker, 2026

Pada tahun 2021, jumlah pencari kerja sebanyak 482 orang, tetapi mengalami fluktuatif mulai tahun 2022 hingga 2025. Pada tahun 2025 jumlah pencari kerja yang mendaftar mengalami peningkatan menjadi 716 orang, hal ini dikarenakan ada banyaknya peserta CPNS Kota Lhokseumawe yang mendaftar untuk mendapatkan kartu kuning, tetapi belum ada kepastian terkait penempatannya. Hal ini yang memberikan pengaruh terhadap turunya jumlah pencari kerja yang ditempatkan.

E. Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan

Tenaga Kerja perlu ditingkatkan kualitas dan *skill*-nya dengan kegiatan pelatihan berbasis kompetensi supaya lebih menguasai bidangnya. Jumlah tenaga kerja yang telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2022, persentase tenaga kerja terbina kompetensi mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya dikarenakan jumlah pencari kerja yang terdaftar semakin meningkat. Selanjutnya, pada tahun 2021-2025 persentase tenaga kerja terbina kompetensi menunjukkan fluktuatif dengan kecenderungan penurunan. Pelatihan Tenaga Kerja yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja beragam menurut bakat dan minat tenaga kerja yang diarahkan untuk lebih menguasai bidangnya seperti pelatihan perbengkelan, pelatihan tata rias dan pelatihan lainnya.

Tabel 2.122
Besaran Tenaga Kerja Terbina Kompetensi
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah tenaga kerja yang dilatih	95	144	106	80	204
2.	Jumlah pencari kerja terdaftar	482	549	402	258	716
Persentase		19.71	26.22	26.37	31.01	28.49

Sumber: DPMTSP dan Naker, 2026

2.1.4.4.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
A. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan. Cara untuk mengetahui persentase partisipasi perempuan di lembaga



pemerintahan adalah dengan membandingkan jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dengan jumlah seluruh pekerja perempuan.

Tabel 2.123
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	2121	2099	2036	2660	5.582
2.	Jumlah pekerja perempuan	32.529	34.992	33.681	33.742	35.188
Persentase		6,52	5,99	6,04	7,88	15,86

Sumber: DP3AP2KB, 2026

Berdasarkan data di atas, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2021-2025 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah sebesar 6,52% hingga pada tahun 2023 turun menjadi 6,04%. Pada tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi sebesar 15,86% hal tersebut disebabkan karena adanya proses mobilisasi penduduk seperti perpindahan penduduk, adanya perubahan jumlah seleksi CPNS, dan mutasi kerja di setiap tahunnya.

B. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRK

Indikator ini bertujuan untuk mengetahui proporsi perempuan yang menduduki kursi DPRK. Jumlah kursi di keanggotaan DPRK Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2020-2024 memiliki jumlah tetap, yakni 25 orang, sedangkan jumlah kursi keanggotaan yang diduduki oleh perempuan memiliki jumlah yang cenderung meningkat. Pada tahun 2020, terdapat 4 orang perempuan yang menduduki kursi keanggotaan DPRK dengan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRK sebesar 16%. Selanjutnya tetap hingga tahun 2023 di mana jumlah kursi DPRK yang diduduki perempuan meningkat menjadi 6 orang yang terdiri dari Partai Aceh 1 orang, Partai Gerindra 1 orang, Partai Demokrat 1 orang, PKB 1 orang, PKS 2 orang dan Partai Golkar 1 orang, dengan proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD sebesar 28% yang disebabkan karena adanya pergantian antar waktu (PAW). Namun, sejak tahun 2021-2025, besaran proporsi keterwakilan perempuan di DPRK Lhokseumawe belum dapat memenuhi kuota yang ditentukan yakni sebesar 30%.

Tabel 2.124
Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRK
Lhokseumawe Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah kursi DPRK yang diduduki perempuan	4	4	6	7	7
2.	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRK	25	25	25	25	25
Persentase		16	16	24	28	28

Sumber: Sekretariat DPRK Lhokseumawe, 2026



C. Rasio KDRT

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar rasio KDRT di Kota Lhokseumawe. Rasio KDRT dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah KDRT dengan jumlah rumah tangga. Berikut ini merupakan rasio KDRT di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025.

Tabel 2.125
Rasio KDRT Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah KDRT	18	29	24	23	28
2.	Jumlah rumah tangga	42.354	43.930	45.504	46.315	47.301
Rasio KDRT		0.042	0.066	0.052	0.049	0.059

Sumber: DP3AP2KB, 2026

Berdasarkan data di atas, rasio KDRT di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2021-2025 mengalami fluktuasi kecenderungan menurun. Pada tahun tahun 2021, jumlah KDRT adalah sebesar 18 kasus dengan rasio KDRT sebesar 0,042%. Pada tahun 2022 jumlah kasus KDRT mengalami kenaikan menjadi 29 dengan nilai rasio KDRT sebesar 0,066%. kenaikan jumlah kasus KDRT di tahun 2022 terjadi karena jumlah korban yang melapor semakin banyak, hal ini dapat diindikasikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran tindak KDRT sudah baik. Kemudian, di tahun 2025, jumlah KDRT sedikit meningkat daripada tahun 2024 menjadi sebanyak 28 kasus dengan persentase rasio KDRT sebesar 0,059%. Meningkatnya jumlah KDRT tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga, selain itu meningkatnya jumlah KDRT juga dipengaruhi salah satunya oleh faktor ekonomi.

D. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase partisipasi angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar partisipasi angkatan kerja perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Berikut ini merupakan data partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025.



Tabel 2.126
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	48.15	48.33	51.50	50.25	49.98

Sumber: BPS, 2026

Pada tahun 2021-2025, partisipasi angkatan kerja perempuan fluktuatif, pada tahun 2021 sebesar 48.15% hingga mencapai 50.25% pada tahun 2024. Peningkatan angka partisipasi angkatan kerja perempuan menandakan bahwa terdapat lebih dari setengah jumlah perempuan di Kota Lhokseumawe yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi. Namun pada tahun 2025 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan mengalami penurunan menjadi 49.98%.

E. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam UPT.

Tabel 2.127
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Pengaduan/Laporan yang ditindak lanjuti oleh UPT	56	75	68	72	70
2.	Jumlah Pengaduan/Laporan yang masuk ke UPT	56	75	68	72	70
Cakupan korban kekerasan		100	100	100	100	100

Sumber: DP3AP2KB, 2026

Secara umum, cakupan penanganan sudah mencapai 100%. Dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan jumlah pengaduan/laporan di tahun 2021 menjadi 56 laporan meningkat tahun 2022 menjadi 75 laporan dan meningkat kembali menjadi 72 laporan pada tahun 2024 dan tahun 2025 perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan sebanyak 70 laporan. Sosialisasi dan adanya penguatan dari pihak keluarga, pelatihan yang intensif terhadap masyarakat untuk penanganan kasus, sehingga kesadaran masyarakat meningkat dalam melaporkan kasus kekerasan.

F. Kota Layak Anak (KLA)

Kota Layak Anak merupakan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan,

program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Tabel 2.128
Capaian Kota Layak Anak dan Gampong Layak Anak
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024

No	Indikator	2021	2023	2024
1	Gampong Layak Anak	6	11	11
2	Jumlah Gampong	68	68	68
3	Persentase Gampong Layak Anak	8.82	16.17	16.17
4	Nilai Kota Layak Anak	-	616,47	728.14
5	Predikat Kota Layak Anak	Pratama	Madya	Nindya

Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2026

Pada tahun 2021, Kota Lhokseumawe mendapatkan predikat pratama untuk Kota Layak Anak dan tahun 2023 meningkat menjadi predikat madya dengan nilai 616,47 dan tahun 2024 menjadi predikat nindya dengan nilai 728,14. Untuk tahun 2025 akan dilakukan penilaian pada tahun 2026.

2.1.4.4.2.3 Pangan
A. Skor Pola Pangan Harapan

Kuantitas dan kualitas pangan masyarakat juga termasuk aspek kesejahteraan masyarakat, karena kelebihan atau kekurangan terhadap satu atau beberapa jenis pangan akan mengakibatkan keadaan malnutrisi (gizi salah) serta penyakit yang menyertainya kemudian. Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi salah satu indikator yang dihitung dalam analisis kesejahteraan masyarakat. PPH adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama. Melalui pendekatan ini, kualitas konsumsi pangan penduduk dapat dicerminkan dari besaran skor PPH, dengan skor maksimal 100.

Tabel 2.129
Pola Pangan Harapan
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	76.79	76.33	77.54	77.54	88.90
2	Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	77.10	81.60	76.47	84.92	89.94

Sumber : DKP3 Kota Lhokseumawe 2026

Dalam konteks ketahanan pangan, produksi pangan utama menjadi dasar untuk penentuan kecukupan rasio konsumsi normatif penduduk terhadap kebutuhan pangan. Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025 mengalami defisit dalam pemenuhan karbohidarat utama karena daerah perkotaan.

Pada kurun tahun 2021-2025, skor pola pangan harapan Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan. Skor pola pangan harapan ketersediaan pada tahun 2021 sebesar 76.79 dan pada tahun 2025 Skor pola pangan harapan ketersediaan Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan menjadi sebesar 88.90. Pola konsumsi yang beragam dan bergizi seimbang merupakan salah satu kunci dalam pencapaian skor PPH ideal. Pola pangan harapan konsumsi pada



tahun 2021 sebesar 77.10 dan tahun 2025 meningkat menjadi 89.94. Capaian SPPH tingkat konsumsi pada tahun 2025 sebesar 89.94 poin. Dengan skor ini artinya pola konsumsi pangan di Kota Lhokseumawe masih perlu ditingkatkan kembali.

B. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dapat dilihat dengan menghitung rasio antara rata-rata ketersediaan pangan utama per Tahun (Kg) dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.130
Ketersediaan Pangan Utama
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg)	23.610.220	24.981.840	26.689.340	54.135.790	52.671.000
2.	Jumlah Penduduk	189.941	191.396	196.067	198.705	200.876
Ketersediaan Pangan		124,30	130,52	136,12	272.44	262,21

Sumber : DKP3 Kota Lhokseumawe 2026

Ketersediaan pangan di Kota Lhokseumawe berasal dari daerah lain di sekitar Kota Lhokseumawe dan juga hasil produksi di wilayah Kota Lhokseumawe. Perkembangan positif ketersediaan pangan utama di Kota Lhokseumawe ini mengindikasikan bahwa kebutuhan penduduk akan pangan utama dapat tercukupi dengan baik.

C. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman, dan keamanannya. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketersediaan pangan dan cadangan pangan, salah satunya dioperasikan melalui indikator ketersediaan energi dan protein per kapita. Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 Kkal/Kapita/Hari dan protein 57 Gram/Perkapita/Perhari.

Tabel 2.131
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Per Hari						
1.	Energi (Kkal)	1960,97	2355	2460,64	2460,64	2301
2.	Protein (Gram)	66.53	98.11	84,65	84,65	89.4
Angka Kecukupan Gizi (AKG) Energi dan Protein Per Kapita Per Hari						
3	Energi (Kkal)	1943.3	2046.7	1711.5	1885.3	1893.95
4	Protein (Gram)	60.0	62.6	54.1	61.4	61.18
Persentase Pemenuhan Energi dan Protein Perkapita Perhari						
5	Energi (%)	90.4	97.5	81.5	89.8	90.18
6	Protein (%)	105.3	109.8	94.5	107.7	107.33

Sumber : DKP3 Kota Lhokseumawe 2026

Ketersediaan energi dan protein di Kota Lhokseumawe pada kurun waktu lima tahun terakhir tergolong baik karena telah memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan. Pada tahun 2025, tersedia energy sebesar 2301 kkal per kapita per hari dan protein sebanyak 89.4 gram per kapita per hari. Penurunan ketersediaan energi per kapita per hari ini terjadi pada jenis bahan makanan, padi-padian, gula, buah-buahan, sayuran, daging, susu, ikan, dan minyak-lemak. Energi dan protein yang tersedia dapat memenuhi angka kecukupan gizi energi dan protein. Selain itu, ketersediaan bahan pangan sudah mencukupi.

2.1.4.4.2.4 Pertanian

A. Luas Lahan Bersertifikat

Luas lahan bersertifikat yang ditampilkan pada data berikut merupakan tanah milik pemerintah dan tanah milik masyarakat. Dari luas lahan wilayah Kota Lhokseumawe sebesar 181.060.000 m2, Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki lahan bersertifikat hak milik sebesar 4.958.100 m² sedangkan lahan bersertifikat hak milik masyarakat sebesar 6.292.930 m², kondisi tersebut merupakan kondisi sampai dengan tahun 2023. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 2.132
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik
Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas lahan bersertifikat milik pemerintah (m2)	1.433.330	3.550.630	4.958.100	6.384.610	5.106.843
2	Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m2)	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000
Persentase		0, 79	1.96	2.74	3.53	2.81

Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2026

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2021 lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Lhokseumawe seluas 1.433.330 m2 atau 0.79% dari total luas wilayah Kota Lhokseumawe. Terakhir tahun 2025 luas lahan bersertifikat milik pemerintah seluas 5.106.843 m2 yaitu sebesar 2.81% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.133
Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat di
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas lahan bersertifikat milik masyarakat (m2)	2.932,830	1.964.782	6.292.930	49.496.998	
2	Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m2)	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000
Persentase		1.62	1.08	3.5	27,33	

Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2026

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa luas lahan bersertifikat milik masyarakat di Kota Lhokseumawe, tahun 2021 luas lahan bersertifikat milik masyarakat seluas 2.932.830 m² atau 1.62% dan tahun 2024 luas lahan bersertifikat milik masyarakat meningkat



signifikan menjadi seluas 49.496.998 m² yaitu sebesar 27.33% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe karena meningkatnya pengurusan prona setiap tahunnya dan meningkatnya pembangunan perumahan KPR.

B. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang, sampai dengan tahun 2025 luas lahan yang digunakan untuk Hak Guna Bangunan (HGB) Kota Lhokseumawe seluas 16.764.600 m².

Tabel 2.134
Persentase Luas Hak Guna Bangunan yang Dipetakan
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Luas Hak Guna bangunan (m2)	203.990	73.624	1.624.390	16.435.900	16.764.600
2	Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m2)	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000	181.060.000
	Persentase	0, 11	0,041	0.89	9.07	9.25

Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2026

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa Luas Hak Guna Bangunan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2021 sebesar 203.990 m2 atau 0,11% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2025 Luas Hak Guna Bangunan di Kota Lhokseumawe menjadi 16.764.600 m2 atau 9.25% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe. Hal ini disebabkan karena banyaknya Perusahaan yang membeli tanah Masyarakat sehingga menjadi penurunan hak menjadi SHGB.

2.1.4.4.2.5 Lingkungan Hidup

A. Tersusunnya RPPLH Kota

Perintisan RPPLH dilakukan sejak diterbitkannya Surat Edaran Menteri LHK Nomor SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan RPPLH Daerah dan dimulai dengan penyusunan data melalui Inventarisasi RPPLH Kota Lhokseumawe. Dokumen RPPLH Lhokseumawe masih dalam proses pengusulan penetapan Qanun. Kehadiran Qanun RPPLH akan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Lhokseumawe dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencan Pembangunan Jangka Panjang Lhokseumawe (RPJPK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK).

B. Terselenggaranya KLHS untuk Kota

Perwujudan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan telah diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain dilakukan melalui upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Salah satu instrumen pertimbangan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan



lingkungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sampai saat ini Dokumen KLHS yang sudah tersedia adalah KLHS RTRW 2024-2044. Pada Tahun 2023 telah dilakukan penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045 dan Tahun 2024 sedang dilakukan penyusunan KLHS RPJMK 2025-2029.

C. **Timbulan Sampah yang ditangani**

Indikator timbulan sampah yang ditangani daidapatkan dari pembangian volume timbulan sampah yang ditangani dengan total timbulan sampah dikalikan dengan dengan bilangan 100. Timbulan sampah yang ditangani di Kota Lhokseumawe pada kurun waktu 2021-2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.135
Timbulan Sampah yang ditangani
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah sampah yang tertangani (ton)	29.672	28.470	27.824	28.105	37.240
2	Total jumlah timbulan sampah di Kota (ton)	34.403	35.091	35.793	36.509	37.293
Persentase		86,25	81,13	77.73	76.98	99.86

Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2026

Dari tabel di atas Tahun 2021 dari jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 34.403 ton yang ditangani sebanyak 29.672 ton, dapat dilihat capaian penanganan sampah 86.25%. Pada Tahun 2022 persentase sampah yang tertangani menurun menjadi 81.13%. Selanjutnya pada tahun 2025 meningkat, jumlah timbulan sampah sebanyak 37.293 ton dan yang tertangani sebanyak 37.240 ton sehingga sebesar 99.86%.

Penyebab kurangnya tertangani sampah di Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 dan 2024 antara lain adalah banyaknya keterbatasan armada pengangkutan sampah, sarana prasarana pendukung pengelolaan persampahan yang masih kurang serta kondisi armada pengangkut sampah yang sudah tua atau kurang baik. Sarana prasarana persampahan tahun 2024-2025 Kota Lhokseumawe sebagai berikut.

Tabel 2.136
Sarana Prasarana Persampahan
Kota Lhokseumawe Tahun 2024-2025

No	Jenis Armada	Kondisi	Jumlah	
			2024	2025
1	Dump Truk (unit)	Baik	14	16
2	Arm Roll (unit)	Baik	4	5
3	Pick Up (unit)	Rusak berat	-	1
		Baik	5	7
		Rusak Ringan	2	-
4	Truck Penyedot Lumpur dan Penyiraman (unit)	Baik	1	1
5	Truck Tangga (unit)	Baik	1	2
6	Truck Siram (unit)	Baik	1	3



No	Jenis Armada	Kondisi	Jumlah	
			2024	2025
		Rusak berat	-	1
7	Alat Berat (unit)	Baik	1	2
		Rusak	2	2

Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2026

Tabel di atas menggambarkan jumlah sarana dan prasarana Persampahan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dimana jumlah dump truck yang dimiliki sebanyak 16 unit dalam kondisi baik, Arm Roll sebanyak 4 unit dalam kondisi baik, Pick Up sebanyak 7 unit yang dalam kondisi baik, serta alat berat sebanyak 4 unit dalam kondisi baik 2 unit dan 2 unit rusak. Selain itu untuk menunjang permasalahan lingkungan DLH juga didukung dengan 2 unit truck tangga, 3 unit truck siram dan 1 unit truck penyedot lumpur dan penyiraman.

D. Persentase Cakupan Area Pelayanan

Indikator ini didapat dari luas area pelayanan pengelolaan sampah (km²/ha) dengan luas area kota(km²/ha) dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui persentase cakupan area pelayanan pengelolaan sampah. Persentase cakupan area pelayanan sampah di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.137
Persentase Cakupan Area Pelayanan
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km2/ha)	165	166	174	175	175
2.	Luas area kabupaten/kota (km2/ha)	181,06	181,06	181,06	181.06	181.06
	Persentase	91,13	91.68	96.10	96.65	96.65

Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase cakupan area pelayanan di Kota Lhokseumawe terjadi peningkatan yang signifikan seperti terlihat pada Tahun 2021 persentase cakupan area pelayanan sebesar 91.13%, dan Tahun 2022 meningkat menjadi 91.68% dan Tahun 2023 mengalami peningkatan kembali menjadi 96.10% tahun 2024 hanya bertambah 1 km2/ha sehingga menjadi 96,65% dah tahun 2025 tetap sebesar 96,65%.

E. Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan (IKPS)

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik tentang pencapaian pengelolaan sampah, dan juga sebagai *instrument* untuk mengukur keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola sampah. Entitas pengukuran IKPS dimulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional baik yang berkenaan dengan lingkup pengelolaan (penanganan dan pengurangan sampah) maupun yang berkenaan dengan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaannya.



Nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sangat berpengaruh pada nilai anggaran, nilai kebijakan, nilai sumber Daya Manusia (SDM), nilai sarana dan prasarana, nilai sosialisasi, nilai implementasi, nilai capaian target, nilai efesiensi anggaran, nilai kota bersih dan nilai Indeks Kualitas Air. Berikut capaian IKPS Kota Lhokseumawe tahun 2023-2024.

Tabel 2.138
Capaian Indeks Pengelolaan Sampah Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2025

No	Indikator	2023	2024	2025
1	Nilai Kebijakan	5.5	18	-
2	Nilai SDM	1	1	-
3	Nilai Sarpras	5	5	-
4	Nilai Anggaran	2	1	-
5	Nilai Sosialisasi	0	5	-
6	Nilai Implementasi	0	1	-
7	Nilai Capaian Target	6	4	-
8	Nilai Efesiensi Anggaran	0	1	-
9	Nilai Kota Bersih	0	0	-
10	Nilai IKA	6	7	-
IKPS		25.5	43	-

Sumber: DLHK Aceh, 2026

Capaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 sebesar 25,5 poin dan tahun 2024 nilainya meningkat menjadi 43 poin, namun masih tetap dalam kuartal Pemerintah Kota yang memiliki kinerja sangat kurang dalam hal pengelolaan sampah. Dari keseluruhan dimensi penilaian IKPS poinnya dibawah rata-rata/standar, kecuali Indeks Kualitas Air. Nilai IKPS Kota Lhokseumawe tahun 2025 tidak dikeluarkan mengingat Kota Lhokseumawe berstatus terdampak bencana hal ini sebagai bentuk penyesuaian atas kondisi *force majeure* (bencana alam).

2.1.4.4.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

A. Rasio Penduduk Ber-KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI). KTP akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan juga dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat surat-surat tertentu seperti SKCK, akta pernikahan, NPWP, SIM, dan sebagainya. KTP wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk yang memiliki KTP. Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di Indonesia. Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah). Berikut merupakan data kepemilikan KTP di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025.



Tabel 2.139
Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP	126.300	129.740	132.586	135.902	137.747
2	Jumlah penduduk wajib KTP> 17 atau pernah/sudah menikah	130.633	132.102	138.705	138.099	141.106
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk		0,97	0.98	0.96	0.98	0.98

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Kepemilikan KTP di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2021-2025 cenderung meningkat. Jika dilihat dari nilai rasio penduduk ber-KTP memang nilainya cenderung tetap tetapi peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk usia > 17 tahun yang ber-KTP dari tahun 2021-2025. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan rasio penduduk ber-KTP dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah penduduk usia >17 yang ber KTP dan jumlah penduduk wajib KTP > 17 atau pernah/sudah menikah meningkat lebih besar dan tahun 2024-2025 kembali meningkat.

B. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Administrasi kependudukan sangat penting dimiliki agar setiap masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara. Begitupun dengan bayi yang baru lahir yang memiliki perlakuan yang sama. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan. Kepemilikan akta kelahiran bagi bayi merupakan hal yang penting karena kelak akan berguna sampai masa depan. Akta kelahiran dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke dalam dunia pendidikan atau pembuatan surat-surat penting lainnya, serta kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal. Akta kelahiran merupakan sumber data jumlah kelahiran di suatu daerah dan data tersebut sangat penting untuk proyeksi penduduk ke depan. Apabila rasio akta kelahiran minim, maka akan menyulitkan pemerintah untuk memproyeksikan penduduk yang dapat berdampak pada tidak maksimalnya program pembangunan. Dengan kata lain, indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa banyak bayi yang memiliki akta kelahiran. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa suatu kelahiran telah dicatat dalam data kependudukan.

Tabel 2.140
Rasio Bayi ber Akta Kelahiran
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Bayi ber Akta Kelahiran	18.532	20.567	19.563	18.990	18.356
2	Jumlah Bayi	18.589	20.753	20.234	19.591	18.843
Rasio		0,97	0.99	0.97	0.97	0.97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026.



Apabila melihat tabel di atas, rasio bayi berakta kelahiran mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Pada awal periode yaitu tahun 2021 rasio bayi yang memiliki akta kelahiran sebesar 0,97. Angka tersebut terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 mencapai 0.99. Namun pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya pembuatan akta kelahiran semakin meningkat. Pencapaian ini didukung dengan adanya program *3 in 1* di Dinas dan Rumah Sakit. Program *3 in 1* adalah salah satu program yang ditujukan kepada masyarakat untuk mendapat layanan pengurusan dan penerimaan akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak di rumah sakit tempat dilahirkan. Adanya peningkatan rasio bayi yang memiliki akta kelahiran juga disebabkan penambahan jumlah rumah sakit yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk layanan kepengurusan Akta Kelahiran, diantaranya Rumah Sakit ABBY, Rumah Sakit Arun, dan Rumah Sakit MNC.

C. Rasio Pasangan Berakta Nikah

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akta nikah. Akta nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama. Kepemilikan akta nikah memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakta nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakta nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, diketahui bahwa belum semua pasangan nikah yang ada di Kota Lhokseumawe sudah berakta nikah. Berikut adalah data rasio pasangan berakta nikah di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025.

Tabel 2.141
Rasio Pasangan Berakta Nikah
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pasangan berakta nikah	40.731	45.648	49.198	52.917	54.157
2	Jumlah keseluruhan pasangan nikah	80.639	80.972	81.573	81.950	82.014
Rasio pasangan berakta nikah		0.51	0.56	0.60	0.65	0.66

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan rasio pasangan berakta nikah dari tahun 2021 ke 2025 menjadi 0,66 di tahun 2025. Akta nikah dikeluarkan untuk warga masyarakat non muslim. Hal ini didukung dengan adanya kegiatan dari Bidang Capil agar warga secara aktif melaporkan akta nikah yang dimiliki. Namun, rasio pasangan berakta nikah ini belum mencapai kondisi yang optimal, masih berada di bawah 1.

D. Rasio Anak Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar anak yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan program yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) sesuai dengan



Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. KIA berfungsi sama dengan KTP yang diperuntukkan untuk anak berusia 0-5 tahun, dan 5-17 tahun kurang satu hari. Perbedaannya, KIA untuk bayi dan balita tidak menampilkan foto, sedangkan KIA untuk 5-17 tahun kurang satu hari menampilkan foto.

Tujuan adanya KIA adalah untuk melindungi hak konstitusional anak sebagai warga negara Indonesia. Meskipun secara fungsional sama dengan KTP-el, tetapi KIA tidak memiliki *chip* seperti KTP-el. Dilansir dari Permendagri 2 tahun 2016, KIA memiliki beberapa manfaat diantara lain, (1) melindungi pemenuhan hak anak, (2) menjamin akses sarana umum, (3) menjadi bukti identifikasi diri ketika anak mengalami peristiwa buruk, (4) mencegah terjadinya perdagangan anak, dan (5) memudahkan anak mendapatkan akses pada pelayanan publik seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, perbankan, transportasi, dan imigrasi. Berikut adalah data anak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025.

Tabel 2.142
Rasio Anak yang Memiliki KIA
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah anak yang memiliki KIA	16.955	19.104	22.121	25.137	28.530
2	Jumlah penduduk wajib KIA <17 tahun	58.980	57.863	61.066	60.606	59.770
Rasio anak yang memiliki KIA		0.29	0.33	0.36	0.41	0.48

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan rasio anak yang memiliki KIA dari tahun 2021 ke 2025 menjadi 0,48 di tahun 2025. Namun, rasio anak yang memiliki KIA ini belum mencapai kondisi yang optimal, masih berada di bawah 1.

E. Akta Kematian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya dalam pencatatan peristiwa kematian atau lahir mati, maka pihak keluarga wajib melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pencatatan sipil. Berikut data Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Lhokseumawe pada tahun 2021-2025.

Tabel 2.143
Persentase Akte Kematian yang dikeluarkan
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah akta kematian yang dikeluarkan	978	869	1.154	1.162	1.810
2	Jumlah permohonan akte kematian	978	869	1.154	1.162	1.810
Persentase Akte Kematian yang dikeluarkan		100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026



Berdasarkan data di atas jumlah akte kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan dari tahun 2021-2025. Pada tahun 2021 jumlah akte kematian berjumlah 978 lembar dan menjadi 1.810 lembar pada tahun 2025. Jumlah pembuatan akte kematian meningkat karena kebutuhan akan kelengkapan administrasi ahli waris. Persentase Akte Kematian yang dikeluarkan mencapai 100% karena akte kematian yang dikeluarkan sesuai dengan permohonan dari ahli waris yang membutuhkan akte kematian.

2.1.4.4.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

A. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Gampong yang Baik

Perkantoran pemerintahan gampong merupakan sarana prasarana penunjang pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, terutama di tingkat gampong. Indikator ini menggambarkan kualitas baik atau buruknya kantor pemerintahan gampong di Kota Lhokseumawe. Kualitas perkantoran pemerintahan gampong yang baik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal terhadap masyarakat. Berikut adalah cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan gampong di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.144
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Gampong yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Kondisi Kantor	Jumlah Kondisi Kantor Geuchik				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kantor Dalam Kondisi Baik	59	59	60	57	43
2	Kantor Dalam Kondisi Rusak	4	4	3	6	20
3	Belum Memiliki Kantor	5	5	5	5	5
Jumlah		68	68	68	68	68
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan gampong yang baik		86.76	86.76	88.24	83.82	63.24

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2026.

Dari tabel di atas dapat dilihat cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan gampong yang baik cenderung meningkat, dari yang awalnya pada tahun 2021 adalah sebesar 86.76% meningkat mencapai 94.12% di tahun 2022. Pada tahun 2024 sedikit mengalami penurunan menjadi 83.82% dan tahun 2025 mengalami penurunan kembali menjadi 63.24%. Hal ini dikarenakan terdapat perubahan kondisi kantor pemerintahan gampong kondisi rusak menjadi bertambah menjadi 20 unit. Sementara itu, terdapat 5 Gampong yang belum memiliki kantor pemerintah gampong yaitu Gampong Hagu Teungoh, Jambo Timu, Batuphat Timur, Blang Panyang, Batuphat Timurn Cot Trieng. Berikut cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan gampong yang baik per Kecamatan tahun 2021-2025.



Tabel 2.145
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No.	Kecamatan	Jumlah Gampong	2021		2022		2023		2024		2025	
			Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana	Jumlah kantor yang baik	cakupan sarana prasarana
1	Banda Sakti	18	16	88,88	16	88,88	16	88,88	16	88,88	11	61.11
2	Muara Satu	11	7	65.63	7	63.63	8	72.72	7	65.65	5	63.64
3	Blang Mangat	22	19	95,45	19	95,45	19	95,45	17	77.27	12	59.09
4	Muara Dua	17	17	100	17	100	17	100	17	100	15	88.24
Jumlah		68	59	86.76	59	86.76	60	88.23	57	83.82	43	67.65

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2026.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik di Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 sebesar 79.41%, tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan menjadi sebesar 86.76%. Peningkatan cakupan sarana prasarana perkantoran tersebut menjadi baik pembangunannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Pada tahun 2025 mengalami penurunan sehingga menjadi 67.65%.

B. Cakupan Pembinaan Pengelolaan Bantuan Keuangan Gampong

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang salah satunya dilakukan melalui penyaluran Dana Desa oleh pemerintah pusat kepada Desa telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Pemerintah Gampong dituntut lebih profesional dalam melaksanakan pembangunan karena pemerintah gampong sendiri yang merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkannya. Dana Gampong digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong yang diatur dan diurus oleh gampong. Selain dana gampong sumber pendapatan gampong yang diperoleh dari pos bantuan keuangan kepada gampong menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seperti terlihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.146
Bantuan Keuangan Gampong dari Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Realisasi Penyaluran Dana ke Gampong				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Kurang Bayar ADG	44.587.713.353	43.990.585.700	45.048.128.300	47.022.296.500	48.930.636.100
2	Dana Desa (DD)	61.858.474.338	53.900.119.902	61.401.253.255	62.402.165.000	52.451.077.418
3	Bagi Hasil Pajak Daerah (BHPD)	1.542.801.500	1.659.031.000	2.843.458.400	3.493.888.252	4.345.037.604
4	Bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD)	251.267.448	198.394.770	340.108.444	353.856.305	283.938.988
Jumlah		108.319.969.912	107.831.150.469	109.632.948.399	113.272.206.057	106.010.690.110

Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2026



Dari tabel di atas menunjukkan bantuan keuangan kepada gampong berupa alokasi dana gampong mengalami peningkatan, pada tahun 2021 alokasi bantuan keuangan gampong sebesar Rp.108.319.969.912,- selanjutnya mengalami penurunan di Tahun 2022 dan tahun 2025. Bagi hasil pajak mengalami fluktuasi hal ini disebabkan karena realisasi penyalurannya ke desa berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah. Untuk Bagi hasil retribusi mengalami fluktuasi disebabkan karena realisasi penyalurannya ke desa berdasarkan realisasi penerimaan retribusi daerah.

C. Persentase PKK Aktif

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu, peran PKK menjadi sangat strategis dalam merealisasikan visi dan misi pemerintah pada lingkup paling kecil. Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program pembangunan. Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran sertanya dalam mencapai tujuan pembangunan. Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa kegiatan PKK di Kota Lhokseumawe muncul di tiap-tiap jenjang administrasi, mulai dari Gampong, Kecamatan hingga Kota. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk meningkatkan kreativitas di berbagai bidang yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga.

Tabel 2.147
Jumlah PKK Aktif Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah TP.PKK Kota Lhokseumawe	1	1	1	1	1
2	Jumlah TP.PKK Kecamatan se-Kota Lhokseumawe	4	4	4	4	4
3	Jumlah TP. PKK Gampong se Kota Lhokseumawe	68	68	68	68	68
4	Jumlah Kel PKK RW se-Kota Lhokseumawe	276	276	276	276	276
6	Jumlah Kel Dasawisma	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe, 2026

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kelompok PKK di tingkat RT jumlahnya tetap sejak tahun 2021-2025, sudah semua nya aktif. Namun tetap perlu perhatian khusus, mengingat keaktifan kelompok PKK bertujuan untuk memantau usaha-usaha aktif di tingkat paling bawah dalam merealisasikan program-program pembangunan. Tanpa adanya kegiatan PKK yang aktif, maka akan lebih sulit dalam kegiatan realisasi program pembangunan pada tingkatan bawah.



D. Persentase Posyandu Aktif

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) adalah program pemerintah untuk memberikan fasilitas kesehatan, terutama vaksinasi kepada bayi dan balita. Kegiatan yang dilakukan di posyandu harus didampingi oleh tenaga kesehatan. Selain berfungsi sebagai pelayanan kesehatan, posyandu juga menjadi tempat pelayanan keluarga berencana. Indikator posyandu aktif dihitung berdasarkan jumlah posyandu yang aktif dibandingkan dengan total seluruh posyandu yang ada. Berikut ini merupakan data posyandu aktif di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.148
Posyandu Aktif Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Posyandu Aktif	100	100	100	100	100
2	Jumlah seluruh Posyandu	100	100	100	100	100
Persentase Posyandu Aktif		100	100	100	100	100

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe, 2026

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa persentase posyandu aktif dari tahun 2021-2025 sudah mencapai 100%. Posyandu yang masuk katagori posyandu aktif apabila memenuhi 5 kriteria, yaitu jumlah hari buka minimal 10 kali dalam 12 bulan, jumlah kader minimal 5 orang, capaian program minimal 50%, kepemilikan sarana pemantauan pertumbuhan dan perkembangan dan adanya kegiatan pengembangan. Apabila salah satu kriteria tidak terpenuhi maka posyandu dikatakan tidak aktif.

2.1.4.4.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sasaran utama dari pelayanan keluarga berencana adalah Pasangan Usia Subur (PUS). Pemberi layanan KB antara lain adalah Rumah Sakit, Puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek swasta dan bidan desa. Pemerintah Kota Lhokseumawe terus memberikan dukungan dan kebijakan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Lhokseumawe. Berikut Capaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 sebagai berikut.

Tabel 149
Capaian Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern CPR	n.a	48.36	43.82	50.2	48.7
Total Fertility Rate (TFR)	2.68	2.39	2.32	2.28	2.28
Unmet Need	n.a	17.23	18.5	15.9	16.10
Prevalensi Pemakaian MKJP	n.a	8.71	14.17	10.9	14.6
ASFR 15-19	-	10.1	11.9	8.5	9.6
DCR (Angka Putus Pakai KB)	26.8	22.3	17.81	20.3	25.5



Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	59.4	61.8	64.6	67.2	68.3
Demand Satisfied	72.3	74.8	77.2	79.2	75.1
Persentase Kehamilan Tidak direncanakan	19.00	17.2	15.4	13.8	12.5
Indeks Lansia Berdaya	56.2	58.9	61.7	64.3	65.9
Indeks Pengasuhan Remaja	57.8	60.9	63.1	65.6	85.2
Persentase Kampung Mandiri	17.6	23.5	30.9	38.2	42.65

Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2026

Angka pemakaian kontrasepsi modern, atau Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), adalah persentase perempuan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi modern pada waktu tertentu. Metode kontrasepsi modern meliputi pil KB, kondom, suntik KB, implan, IUD, dan lain-lain. Pada tahun 2025 angka pemakaian kontrasepsi Modern CPR sebesar 48.7 persen.

Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total adalah rata-rata jumlah anak yang diperkirakan akan dilahirkan oleh seorang wanita selama masa suburnya (biasanya 15-49 tahun) jika ia mengikuti pola kelahiran pada tahun tertentu. TFR adalah indikator yang menunjukkan tingkat kesuburan rata-rata dalam suatu populasi. Capaian TFR Kota Lhokseumawe Tahun 2025 sebesar 2.28 lebih rendah dari capaian tahun 2023

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 sebesar 16.10. capaian ini lebih rendah dari tahun 2022 sebesar 17.23. Selanjutnya untuk Prevelensi Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2022 sebesar 8.71% menjadi 14.6% tahun 2025.

ASFR adalah indikator demografi yang mengukur tingkat kelahiran pada kelompok umur tertentu, biasanya dihitung per 1000 wanita dalam kelompok usia tersebut. ASFR Kota Lhokseumawe tahun 2022 sebesar 10.10% dan mengalami penurunan menjadi 9.6% tahun 2025. Selanjutnya Angka putus pakai KB adalah angka yang menunjukkan berapa banyak akseptor KB yang berhenti menggunakan alat atau cara kontrasepsi tertentu setelah periode waktu tertentu, biasanya 12 bulan, karena berbagai alasan. DCR Kota Lhokseumawe Tahun 2021 sebesar 26.8% dan mengalami penurunan menjadi 25.5% pada tahun 2025.

2.1.4.4.2.9 Perhubungan

A. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Indikator jumlah arus penumpang umum ini adalah indikator yang menjelaskan tentang jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah selama 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, data penumpang angkutan umum yang digunakan di Kota Lhokseumawe adalah data penumpang bis yang masuk Terminal.

Tabel 2.150
Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

Tahun	Unit Kendaraan	Jumlah Penumpang	
		Keluar	Masuk
2021	15.151	33.160	31.176
2022	15.330	41.980	36.650
2023	17.155	71.550	37.550
2024	14.135	10.789	12.362
2025	16.340	17.398	17.640

Sumber: Dinas Perhubungan, 2026.

Berdasarkan data diatas jumlah penumpang bus yang ada di Terminal Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2023 mengalami fluktuatif kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021 kondisi pandemi masih belum berakhir dan adanya pembatasan aktivitas masyarakat sehingga masyarakat mengurangi mobilitasnya untuk bepergian keluar kota dengan kendaraan umum. Pada tahun 2022 sudah mulai mengalami peningkatan jumlah penumpang dan pada tahun 2023 jumlah penumpang bis meningkat dari tahun 2022, namun tahun 2024 terjadi penurunan dan tahun 2025 meningkat kembali.

B. Rasio Ijin trayek

Ijin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas Negara, jaringan trayek antarkota antar provinsi, jaringan trayek antarkota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan dan jaringan trayek perdesaan. Rasio ijin trayek didapat dari jumlah ijin trayek yang dikeluarkan dibandingkan dengan jumlah penduduk. Rasio ijin trayek Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025 sebagai berikut.

Tabel 2.151
Rasio Ijin Trayek di Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Ijin Trayek	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636
2	Jumlah Penduduk	189.941	191.396	196.067	198.705	200.876
Rasio Ijin Trayek		0,009	0.008	0.008	0.008	0.008

Sumber : Dinas Perhubungan, 2026

Pada tabel di atas tahun 2021-2025 jumlah ijin trayek tetap sebanyak 1.636. Rasio ijin trayek pada tahun 2021 sebesar 0,009, dan tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0.008 Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk dari Tahun 2021. Dan tahun 2025 jumlah ijin trayek tetap. Rasio ijin trayek dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang berkurang dan bertambah.

C. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud, merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Pengujian yang



dimaksud meliputi (1) Uji tipe, yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya; dan (2) Uji berkala, yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Tabel 2.152
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Uji KIR angkutan umum	3.078	3.154	3.252	2.107	1.634

Sumber : Dinas Perhubungan, 2026

Berdasarkan data yang ada, jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2023 cenderung meningkat yaitu sebanyak 3.078 unit pada tahun 2021 menjadi 3.252 unit pada tahun 2023. Peningkatan jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Lhokseumawe dikarenakan meningkatnya kesadaran untuk melakukan uji KIR dan beberapa kendaraan dari luar daerah Lhokseumawe melaksanakan numpang uji di Lhokseumawe karena gedung pengujian dan alat uji di kabupaten kota tetangga masih ada yang tidak beroperasi karena belum terakreditasi untuk gedung dan lulus kalibrasi alat uji oleh pusat sehingga Kota Lhokseumawe mendapat limpahan kendaraan yang melakukan uji kendaraan di gedung uji. Tahun 2024-2025 mengalami penurunan menjadi 1.634 unit.

D. Jumlah Terminal Bus

Terminal bus diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.

Tabel 2.153
Jumlah Terminal Bus
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Terminal Bus	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan, 2026

Terdapat dua terminal bus di Kota Lhokseumawe, yakni Terminal Keude Aceh yang merupakan Terminal Tipe C di Kecamatan Banda Sakti yang hanya melayani kendaraan umum angkutan perkotaan dan/atau pedesaan dan Terminal Kandang yang merupakan Terminal tipe A yang terdapat di Kecamatan Muara Dua yang berfungsi untuk melayani kendaraan umum angkutan antar Kota

Antar Propinsi (AKAP) dan angkutan Antar Kota Dalam Propinsi dan angkutan perdesaan.

E. Persentase Layanan Angkutan Darat

Indikator persentase layanan angkutan darat ini didapatkan dari pembagian jumlah angkutan darat dengan jumlah penumpang angkutan darat lalu dikalikan dengan bilangan 100. Indikator ini akan memperlihatkan jumlah perbandingan banyaknya angkutan darat dengan jumlah orang yang menggunakan angkutan darat (penumpang) pada tahun tersebut.

Tabel 2.154
Persentase Layanan Angkutan Darat
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah angkutan darat	3.195	3.612	3.682	2.324	3.125
2	Jumlah Penumpang angkutan darat	33.160	41.980	171.550	36.720	32.180
Persentase layanan angkutan darat		9.63	8.60	2.15	6.32	9.71

Sumber : Dinas Perhubungan, 2026

Berdasarkan data yang ada, persentase layanan angkutan darat di Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2024 cenderung menurun dari 9.63% pada tahun 2021 menjadi 6.32% di tahun 2024. Pada tahun 2020 jumlah penumpang angkutan darat di Kota Lhokseumawe menurun akibat dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan aktivitas masyarakat berkurang serta adanya pemberlakuan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga mempengaruhi persentase layanan angkutan darat mengalami kenaikan karena jumlah penumpangnya mengalami penurunan. Pada tahun 2025 persentase layanan angkutan darat mengalami penningkatan dari tahun 2024.

F. Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan

Untuk menghubungkan antar wilayah tentunya diperlukan prasarana berupa jaringan jalan beserta perlengkapannya. Untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas perlu dilakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan perlengkapan jalan sebagai bagian dari prasarana jalan. Kondisi fasilitas kelengkapan jalan secara keseluruhan baik posisi di jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kota dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.155
Data Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Ketersediaan					Jumlah yang seharusnya ada 2025	Satuan	Yang tersedia (%) 2025
		2021	2022	2023	2024	2025			
1	Rambu-rambu lalu lintas dan RPPJ (rambu Pendahulu Petunjuk Jalan)	0	0	0	0	0	195	Buah	71.79



No	Prasarana Perhubungan dan Fasilitas Perlengkapan Jalan	Jumlah Ketersediaan					Jumlah yang seharusnya ada	Satuan	Yang tersedia (%)
		2021	2022	2023	2024	2025			
2	Cermin Tikungan	3	0	3	0	0	24	Unit	25,00
3	Marka Jalan	4.516	682	1.021	0	0	35.580	m ²	95,3
4	Traffic Light (APILL)	0	0	0	0	0	0	Unit	0
5	Warning Light	0	0	0	0	0	12	Unit	0,0
6	Guard Rall (Pagar Pengaman)	0	0	0	0	0	3.000	Meter	0,0
7	Halte	0	0	0	0	0	0	Unit	0,0
8	Lampu Penerangan Jalan Umum	0	10	0	0	0	485	Titik	2,06

Sumber : Dinas Perhubungan, 2026

Pembangunan LPJU yang dilaksanakan selama ini mengacu pada kewenangan jalan yang ada, dimana LPJU hanya bisa dipasang di jalur jalan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan kewenangan provinsi sedangkan jalan kalurahan yang menjadi kewenangan gampong belum bisa diakses dengan kegiatan Pembangunan LPJU yang ada di Dinas Perhubungan. Kebutuhan penerangan jalan untuk jalur jalan kewenangan gampong juga sangat diperlukan, oleh karena itu, ke depan diharapkan penerangan Jalan gampong bisa dilaksanakan dengan pembiayaannya berkolaborasi antara pemerintah kota, PLN dan masyarakat pengguna penerangan jalan. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di Kota Lhokseumawe masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan capaian pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan yang masih jauh di bawah yang seharusnya ada.

Jumlah Rambu-rambu lalu lintas dan RPPJ (Rambu Pendahulu Petunjuk Arah) yang ada di Kota Lhokseumawe masih belum bisa memenuhi jumlah ideal yang dibutuhkan. Dari 195 buah rambu dan RPPJ yang dibutuhkan baru terpenuhi sejumlah 80 atau sebesar 71,79% pada Tahun 2024. Jumlah rambu yang ada masih perlu untuk terus ditingkatkan untuk kelancaran para pengguna jalan serta meminimalkan tingkat kecelakaan lalu lintas.

Cermin tikungan dibutuhkan pada persimpangan jalan yang tertutup untuk dapat membantu pengemudi melihat situasi atau kendaraan dari arah yang berlawanan. Jumlah cermin tikungan yang ada masih sangat terbatas dan perlu untuk ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, terutama pada wilayah rawan kecelakaan.

Dalam rangka memberikan informasi/panduan bagi pengguna jalan, marka jalan merupakan elemen perlengkapan jalan yang juga penting keberadaannya. Fungsi marka jalan secara umum adalah untuk mengatur dan mengarahkan arus lalu lintas di jalan, serta memberikan batasan daerah untuk kepentingan lalu lintas tersebut. Dalam lalu lintas jalan, salah satu perlengkapan jalan yang penting dan sangat dibutuhkan terutama persimpangan ruas jalan yang volume kendaraanya sudah tinggi yaitu lampu lalu lintas (APILL). Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di



persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*), dan tempat harus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar-arus yang ada. APILL sudah terpasang disetiap persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*), dan tempat harus lalu lintas lainnya sehingga telah cukup.

Selain APILL, warning light juga diperlukan untuk memberikan peringatan bagi pengendara kendaraan bermotor agar berhati hati. Warning light yang butuh Kota Lhokseumawe sebanyak 12 unit, namun satupun belum ada. Sebagai konsekuensi dari kontur jalan di Kota Lhokseumawe yang sebagian berada pada daerah perbukitan, pagar pengaman jalan (*Guardraill*) sangat diperlukan untuk menjaga keselamatan pengguna jalan agar tidak jatuh ke dalam tebing/ jurang yang berada di kanan kiri jalan. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa pengaman jalan masih jauh dibawah jumlah ideal yang dibutuhkan karena belum tersedia dari sekitar 3000 meter jumlah kebutuhan.

G. Rasio Panjang per Jumlah Kendaraan

Formula yang digunakan untuk menghitung rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan adalah perbandingan antara panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan ini dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dalam memberikan akses kepada setiap kendaraan yang melewatinya.

Tabel 2.156
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Panjang Jalan	412,468	412,468	412,468	412,468	342,61
2	Jumlah Kendaraan	55.461	50.546	50.646	50.646	50.646
Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan		0.0074	0.0081	0.0081	0.0081	0.0068

Sumber: Dinas Perhubungan, 2026

Jumlah kendaraan di Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi, yakni 55.461 unit kendaraan pada tahun 2021 menurun menjadi 50.546 unit kendaraan pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan adanya mutasi kendaraan keluar Kota Lhokseumawe. Jumlah kendaraan di Kota Lhokseumawe tahun 2022 adalah sebanyak 50.546 kendaraan, mengalami penurunan sebesar 4.915 kendaraan dibanding tahun 2021. Penurunan jumlah kendaraan ini dikarenakan kendaraan sudah pindah alamat, kendaraan sudah dijual dan ada pula kendaraan rusak berat sehingga tidak melakukan PU/perpanjangan STNK lagi. Hal tersebut juga karena kondisi perekonomian yang belum pulih akibat pandemi covid 19. Paa tahun 2023-2025 jumlah kendaraan sedikit meningkat menjadi 50.646 unit.



H. Kinerja Jalan (V/C ratio atau rata-rata kecepatan kendaraan)

Kinerja lalu lintas jalan (V/C atau VCR) didapatkan dari survei yang dilakukan pada 3 (tiga) fungsi jalan yakni, jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder dan jalan lokal. Nilai V/C berada dalam skala 0 – 1, semakin kecil angka V/C nya atau semakin mendekati angka 0 maka semakin tinggi kinerjanya karena jumlah kendaraan yang lewat masih dalam batas lancar dan kecepatan di jalan tergolong normal.

Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997, Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina Jalan Kota, volume lalu-lintas ruas jalan adalah jumlah atau banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik tertentu pada ruas jalan dalam suatu satuan waktu tertentu. Volume lalu-lintas biasa diukur dengan VC Ratio atau *Volume Capacity Ratio*, yaitu perbandingan antara volume lalu-lintas dengan kapasitas jalan, semakin tinggi volume kendaraan yang lewat maka tingkat pelayanan jalan tersebut semakin rendah, begitu juga sebaliknya.

Pada tahun 2025 dari 13 ruas jalan Kota yang diukur VC Rationya 0.57. Tiga belas ruas jalan kota yang diukur terletak Kecamatan Banda Sakti. Dari tabel di bawah dapat dilihat di Kecamatan Banda Sakti ada 5 (lima) ruas jalan dengan tingkat pelayanan jalan B atau V/C Rasio antara 0.2-0.4 (lalu lintas lancar) selanjutnya ada 6 (enam) ruas jalan dengan tingkat pelayanan Jalan C atau V/C Rasio anatar 0.4-0.6 (lalu lintas agak padat), 1 (satu) ruas jalan dengan tingkat pelayanan jalan D atau V/C Rasio antara 0.6-0.8 (lalu lintas padat) dan 1 (satu) ruas jalan dengan tingkat pelayanan jalan E atau V/C Rasio antara 0.8-1.0 (lalu lintas sangat padat). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.157
VC Ratio dan Tingkat Pelayanan Jalan Kota di Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Nama Kecamatan	Nama Ruas Jalan		Panjang (Km)	Co	FCcw	FCsp	FCsf	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	Level Of Service (LOS)
Banda Sakti	Listrik	Sp.BI - Sp.Hagu Barat Laut	2,521	3400	1,28	1	0.95	876	2907	0,30	B
Banda Sakti	Perdagangan-Sukaramai	2,521	1,037	3400	1,92	1	0.86	1488	2907	0,51	C
Banda Sakti	Merdeka	1,037	1,664	5100	1,28	1	0.86	2548	3632	0,70	C
Banda Sakti		1,664	1,664	5100	1,28	1	0.86	2514	3632	0,69	C
Banda Sakti	Darussalam	1,664	1,357	5100	1,00	1	0.86	3027	3632	0,83	D
Banda Sakti		1,357	1,357	5100	1,00	1	0.86	3164	3632	0,87	E
Banda Sakti	Samudera	1,357	1,698	3400	1,28	1	0.95	1114	2674	0,42	B
Banda Sakti	Iskandar Muda	1,698	1,698	2800	1,28	1	0.82	1601	2356	0,68	C
Banda Sakti	T. Hamzah Bendahara	1,698	0.563	3400	0,85	1	0.95	1182	2907	0,41	B
Banda Sakti		0,563	0.563	3400	0,85	1	0.95	1195	2907	0,41	B
	Kenari	0.563	3,700	2800	0,85	1	0.82	973	2066	0,47	C
	Pase	3,700	1,552	5100	1,14	1	0.91	2639	3843	0,69	C
		1,552	1.552	5100	1,14	1	0.91	1124	3843	0,29	B
	Kinerja Ruas Jalan Kota Lhokseumawe 2025							23.445	40.938	0,57	C

Sumber: Dinas Perhubungan, 2026

2.1.4.4.2.10 Komunikasi dan Informatika

A. Satu Data Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Data memiliki peran penting dalam setiap tahapan pembangunan terutama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan data dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan terselenggaranya SDI ini, dibutuhkan peran, kolaborasi serta dukungan dari berbagai pihak. Dalam Perpres No. 39 Tahun 2019 diatur pula mengenai penyelenggara SDI serta peran dan tugasnya. Pada tingkat daerah, Badan Pusat Statistik (BPS) berperan sebagai pembina data, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berperan sebagai walidata, serta Perangkat Daerah berperan sebagai produsen data. Keterlibatan kepala daerah juga menjadi hal yang penting dalam mewujudkan penyelenggaraan SDI ini, salah satunya untuk dapat menjalankan koordinasi antara pembina data, walidata, dan produsen data.

Dalam mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kota Lhokseumawe. Selanjutnya pada tahun 2024 juga telah ditetapkan Form Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 104 Tahun 2024 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe. Untuk penyajian dan pengelolaan data, Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan penginputan data pada portal Satu Data Lhokseumawe yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe selaku Walidata Kota Lhokseumawe, dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe selaku Produsen Data.

2.1.4.4.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

A. Peresentase Koperasi Aktif

Koperasi berperan penting dalam perekonomian suatu wilayah dan berfungsi sebagai salah satu sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah, yaitu dengan mendukung usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil, mikro, menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat mampu memberikan kesempatan kerja yang besar di luar sektor formal. Peran koperasi ini salah satunya melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga kecil kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, keberadaan koperasi, terutama simpan pinjam sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya.



Tabel 2.158
Persentase Koperasi Aktif
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Koperasi Aktif	107	107	181	130	149
2	Jumlah Koperasi	208	208	312	335	295
Persentase Koperasi Aktif		51.44	51.44	58.01	38.80	50,51

Sumber: Disperindagkop, 2026.

Jumlah koperasi yang aktif di Kota Lhokseumawe selama tahun 2020-2023 menunjukkan nilai yang meningkat. Dari 107 unit koperasi aktif di tahun 2021, meningkat menjadi 181 unit koperasi aktif pada tahun 2023. Tahun 2025 jumlah koperasi aktif menurun menjadi 149 unit koperasi. Penurunan jumlah koperasi ini dikarenakan penghentian operasional beberapa koperasi oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

B. Persentase BPR/LKM Aktif

BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima pelayanan simpanan dan menyalurkan dana tersebut sebagai usaha BPR. Sementara LKM merupakan lembaga keuangan mikro non bank yang menyediakan berbagai jasa keuangan yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Keberadaan LKM ini ikut memengaruhi pengembangan UMKM yang ada di suatu wilayah melalui kegiatan simpan pinjamnya.

Tabel 2.159
Jumlah BPR/LKM Kota Lhokseumawe
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Variabel	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Unit Simpan Pinjam	163	163	161	161	183
2	Koperasi Simpan Pinjam	6	4	2	2	1
3	Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah	1	5	6	6	8
4	Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah	-	10	12	12	16
Jumlah		170	172	181	181	208

Sumber: Disperindagkop, 2026.

Berdasarkan data di atas secara keseluruhan jumlah LKM mengalami peningkatan dari tahun 2021-2025. Namun untuk Koperasi Simpan Pinjam mengalami penurunan. Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan jumlah LKM adalah karena jumlah anggota mengalami pengurangan sehingga menghambat operasional dari LKM tersebut dan akhirnya memutuskan untuk membubarkan diri atau berhenti beroperasi. Selain itu disebabkan oleh angsuran yang kurang lancar dan pengajuan permohonan penundaan/perpanjangan jatuh tempo pinjaman, sehingga untuk penyaluran pinjaman sangat selektif dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

C. Persentase Usaha Mikro dan Kecil

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan usaha informal yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang tidak ada hubungannya dengan usaha pada level di atasnya (bukan berupa



cabang). Keberadaan UMKM membuka kesempatan kerja yang lebih besar bagi masyarakat, terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Perbedaan usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah hanya terletak pada nilai aset dan omsetnya. Usaha mikro dan kecil juga merupakan salah satu sektor usaha dalam perekonomian yang potensial, oleh karena itu sektor ini perlu diperhatikan dan dikembangkan.

Tabel 2.160
Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	5679	6292	6787	6837	6.887
2	Jumlah seluruh UKM	5739	6353	6848	6898	6.947
Persentase Usaha Mikro dan Kecil		98.95	99.04	99.11	99.12	99.13

Sumber: Disperindagkop, 2026.

Berdasarkan tabel diatas, jumlah usaha mikro dan kecil mengalami peningkatan dari tahun 2021-2025 yaitu mencapai 6.887 unit. Pelaku yang memperoleh IUM melalui OSS tidak hanya pelaku usaha mikro saja tapi juga pelaku usaha kecil. Dalam OSS spesifikasi usaha (meliputi perdagangan, perindustrian, perhubungan, transportasi) tidak seperti spesifikasi usaha yang menjadi kewenangan daerah (*fashion*, kuliner, kerajinan/ *craft*, dan jasa).

D. Nilai Omset UKM yang dibina

Nilai Omset UKM yang dibina menjadi salah satu indikator SDGs Kota Lhokseumawe. Capaian nilai omset UKM yang dibina di tahun 2021 masih dibawah 100% namun tahun 2022-2025 sudah di atas 100%, yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.161
Nilai Omset UKM yang dibina
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah UKM	Nilai Omset Usaha Kecil Mikro (UKM)		
		Tahun Dasar (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2021	5739	4.846.05	4.615,60	95.24
2022	6353		5.510,65	113.71
2023	6848		5.525,80	114.02
2024	6898		8.027,90	165.66
2025	6947		8.037,90	165.86

Sumber: Disperindagkop, 2026.

2.1.4.4.2.12 Pananaman Modal

A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Penanaman modal merupakan salah satu sumber biaya pembangunan yang potensial di suatu wilayah. Dengan adanya penanaman modal berskala nasional, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi perekonomian wilayah dan mampu menstimulasi perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Penanaman modal yang ada di Kota Lhokseumawe banyak diarahkan pada sektor tersier,



seperti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; perdagangan besar dan eceran; transportasi dan pergudangan; informasi dan komunikasi; dan lain sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristik Kota Lhokseumawe sebagai pusat pertumbuhan dengan morfologi perkotaan.

Tabel 2.162
Realisasi Kumulatif Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Investor PMA	1	1	1	3	7
2	Investor PMDN	432	459	412	475	688
Total		433	460	413	478	695

Sumber: DPMPSTSP Kota Lhokseumawe, 2026.

Jumlah Investor PMA di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025 mengalami peningkatan dari 1 investor di tahun 2021 menjadi 7 investor di tahun 2025. Sedangkan jumlah Investor PMDN tahun 2021 sebanyak 432 investor. Tahun 2022 mengalami peningkatan yaitu menjadi 459 investor. Dan tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 412 investor dan 2025 meningkat menjadi 688 investor. Jika dilihat dari total investor, di tahun 2021 sebesar 433 unit pada tahun 2021 dan menjadi 695 unit pada tahun 2025. Hal ini didukung dengan adanya kemudahan perizinan berusaha secara elektronik, yaitu melalui *online single submission* (OSS) sehingga proses pengurusan izin dipermudah. Pada tahun 2021 total investor menjadi 433 unit. Hal ini diakibatkan oleh dampak Covid-19 yang sangat mempengaruhi kegiatan penanaman modal dan usaha.

B. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Nilai Investasi di Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 baik Investasi PMDN/PMA sebesar 2.489,517 (milyar) dan pada tahun 2022 jumlah Investasi PMDN/PMA mengalami penurunan menjadi sebesar 1.112,716 (milyar) dan pada tahun 2023 menurun secara drastis menjadi sebesar 249,540 milyar dan tahun 2025 meningkat kembali menjadi sebesar 1.306,10 milyar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.163
Realisasi Kumulatif Nilai Investasi PMDN dan PMA
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (milyar rupiah)

No	Jenis Perusahaan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	PMA	508	19,250	0	13,683	33,071
2	PMDN	2.489,008	1.093,466	249,540	512,508	1.273,029
Total		2.489,517	1.112,716	249,540	526,191	1.306,10

Sumber: DPMPSTSP Kota Lhokseumawe, 2026.

Jumlah investasi tahun 2022 Rp. 1.112.716.277.156 dan Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 249.539.799.410 Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan K-UMKM dan Peraturan Kementrian Investasi/BKPM RI mengklasifikasikan UMKM berdasarkan Aset dan Omset Usaha dengan kategori: Usaha mikro < 1 M, Usaha kecil 1M-5 M, Usaha Menengah 5M-10 M dan Usaha Besar >10 M. maka



pencatatan investasi berpengaruh pada klifikasi tersebut, sehingga terjadi penurunan nilai Investasi. Dengan berlakunya sistem OSS RBA, penambahan angka realisasi investasi hanya berlaku untuk pelaku usaha Non UMK (>1M), sementara pelaku usaha UMK (<1M) tidak masuk kategori penambahan realisasi. Dengan tidak tercatatnya penambahan realisasi LKPM pelaku usaha UMK, maka terjadi penurunan realisasi investasi.

C. Pelayanan Perizinan

Dengan adanya Peraturan tentang kemudahan dalam penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dampak diterbitkannya PP No. 24 Tahun 2018 adalah:

- 1. Pelaku usaha diberikan fasilitas berupa kemudahan dalam melakukan proses perizinan dengan menggunakan aplikasi OSS. Pelaku usaha dapat melakukan proses perizinan secara mandiri tanpa harus datang ke DPMPTSP dan dapat dilakukan kapan saja karena OSS dapat di akses dimana saja dan kapan saja.
- 2. Pelaku usaha dimungkinkan mendapatkan kemudahan dalam mengurus dokumen izin yang lain.

Dalam hal perizinan, kondisi pelayanan perizinan ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.164
Pelayanan Perizinan
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Satuan	Realisasi				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah perizinan yang diterbitkan	izin	1174	2891	3349	3914	3374
2	Jumlah pengajuan perizinan	izin	1528	2901	3375	4249	3422
	Capaian	%	76.83	99.65	99.22	92.11	98.60
3	Jumlah aduan yang terselesaikan	aduan	5	9	22	18	13
4	Jumlah aduan yang masuk	aduan	5	9	22	18	13
	Capaian	%	100	100	100	100	100
5	Jumlah survey yang dilakukan (dalam 1 tahun)	survei	61	68	73	33	31
6	Jumlah target izin wajib survey (dalam 1 tahun)	survei	96	96	69	55	27
	Capaian	%	63.54	70.83	105.79	60.0	114.8

Sumber: DPMPTSP Kota Lhokseumawe, 2026.

2.1.4.4.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

A. Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif, sehingga pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk



melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku berisiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipatif serta keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio-ekonomi dan politik.

Tabel 2.165
Organisasi Pemuda yang aktif
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Organisasi Pemuda yang aktif	50	16	16	16	18
2	Jumlah seluruh Organisasi Pemuda	60	20	20	16	18
Persentase		83.3	80	80	100	100

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2026

Jumlah organisasi pemuda yang aktif di Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025 mengalami penurunan yaitu sebanyak 34 organisasi dari yang semula 50 organisasi pemuda yang aktif menjadi 18 organisasi pemuda yang aktif.

B. Cakupan Pembinaan Olahraga

Indikator ini menggambarkan cabang olahraga yang dibina oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.166
Cakupan Pembinaan Olahraga
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah cabang olahraga yang dibina	36	35	35	35	44
2	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	44	45	45	45	45
Persentase cakupan pembinaan olahraga		81.82	77.77	77.77	77.77	77.77

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2026

Berdasarkan data tersebut, jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar dari tahun 2021-2025 terjadi peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar sebanyak 44. Selanjutnya pada tahun 2025 meningkat menjadi 45. Pada tahun 2022 terdapat pengurangan cabang olahraga yang dibina, yaitu menjadi 35. Cakupan pembinaan olahraga di Kota Lhokseumawe belum mencapai 100%. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh cabang olahraga yang terdaftar belum terbina dengan baik.

C. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Indikator ini menggambarkan pelatih yang sudah memiliki sertifikat. Sertifikat yang dimaksud dalam data ini adalah sertifikat A, B, dan C. Pelatih tersebut biasanya merupakan mantan atlet ataupun lulusan bidang olahraga.



Tabel 2.167
Cakupan Pelatih yang Bersertifikat
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pelatih bersertifikat	53	60	60	49	49
2	Jumlah seluruh pelatih	146	87	87	84	84
Persentase cakupan pelatih bersertifikat		36,3	68,9	68,9	58.3	58.3

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2026

Kota Lhokseumawe memiliki 49 pelatih yang bersertifikat, sedangkan jumlah seluruh pelatih yang ada hingga Tahun 2025 adalah 84. Terjadi penurunan persentase cakupan pelatih yang bersertifikasi pada tahun 2024 dibandingkan dengan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa cabang olahraga yang tidak lagi aktif, pelatih yang meninggal dunia atau berpindah daerah.

2.1.4.4.2.14 Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan serta evaluasi pembangunan yang lebih tepat sasaran. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan terpercaya. Data dan informasi statistik yang berkualitas menjadi rujukan semua pihak dalam merancang kebijakan maupun dalam melakukan pemantauan dan evaluasi agar sasaran yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menyebutkan bahwa jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS. Data yang dibutuhkan dalam proses perencanaan adalah data sampai dengan $n+2$, sedangkan data yang tersedia adalah $n-1$. Hal ini kemudian diantisipasi dengan memproyeksikan suatu data hingga diperoleh proyeksi data untuk acuan perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan urusan statistik dilaksanakan dengan penyusunan dokumen analisis makro ekonomi, analisis PDRB, analisis IPM, dokumen database daerah, pengelolaan Portal Satu Data Kota Lhokseumawe serta koordinasi pengelolaan data bersama dengan BPS.

2.1.4.4.2.15 Persandian

Program Persandian diselenggarakan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi guna mendukung stabilitas kemananan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan adanya pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan teknologi persandian. Saat ini isu pengamanan informasi mengarah pada pengamanan sistem informasi manajemen pemerintah, sehingga dilakukan upaya pengamanan



terhadap sistem informasi manajemen pemerintah yang ada di Pemerintah Kota Lhokseumawe secara bertahap.

Di zaman serba teknologi yang terus berkembang saat ini, keamanan dalam lingkup pemerintahan kota sangat diperlukan. Penggunaan sandi dalam komunikasi perangkat daerah sangat penting demi keamanan sistem informasi dan komunikasi yang ada di dalamnya. Dengan adanya penggunaan sandi maka dapat memperkecil kemungkinan adanya peretas maupun hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

Tabel 2.168
Persentase PD yang telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi PD di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah	1	1	1	34	34
2	Jumlah total perangkat daerah	34	34	34	34	34
Persentase PD yang menggunakan sandi		2.94	2.94	2.94	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi, informasi dan Persandian, 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi hanya satu Perangkat Daerah saja yaitu Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian. Sedangkan Perangkat Daerah yang ada di Kota Lhokseumawe terdapat 34 Perangkat Daerah. Pada tahun 2025 seluruh Perangkat Daerah telah menggunakan sandi dalam komunikasi.

2.1.4.4.2.16 Kebudayaan

A. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Festival seni di setiap daerah merupakan perayaan tahunan yang menjadi wadah untuk mempertunjukan keunikan budaya dari berbagai daerah. Festival ini biasanya berlangsung selama beberapa hari yang dimeriahkan dengan musik, tarian, hingga ritual dalam paradenya.

Kota Lhokseumawe memiliki berbagai jenis kesenian yang mengandung nilai-nilai islami, bersifat demokratis yang mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya jenis tarian dilakukan secara berkelompok sebagai simbol dari keanekaragaman masyarakat Aceh, dinamis iringannya yang disertai lagu dan pantun yang mengandung nasehat yang baik bagi kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.169
Penyelenggaraan Pertunjukan Seni dan Budaya di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2025

No	Kegiatan	Tahun
1	Teluk Samawi	2022
2	Pameran Budaya	2022
3	Pekan Kebudayaan Aceh Ke-8	2023
4	Panteu Meuseuraya	2023



No	Kegiatan	Tahun
5	Pameran Budaya	2023
6	Workshop Seni dan Budaya di era digitalisasi	2024
7	Pelatihan Hikayat dan Seumapa	2024
8	Belajar Bersama Canag Ceureukeuh	2024
9	Kajian Rapai Uroeh	2024
10	Workshop Rapai Uroeh	2025
11	Workshop Pagelaran Seni Rapai	2025
12	Pameran Temporer (Koleksi Museum)	2025
13	Festival Kultural Museum	2025
14	Seminar Alat Musik Canang Ceureukeuh	2025
15	Belajar Bersama Seni Tutur Aceh/Hikayat	2025
16	Workshop Konservasi Koleksi Museum	2025
17	Pelatihan Seudati Antar Gampong	2025

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Dari Tabel di atas dapat tergambarkan bahwa dalam wilayah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2025 terdapat 9 jenis kegiatan seni budaya tarian Aceh dalam penyelenggaraan festival seni budaya yang dilaksanakan.

B. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Benda, situs dan kawasan cagar budaya merupakan peninggalan sejarah yang harus dilestarikan. Benda, situs dan kawasan cagar budaya berguna untuk pembelajaran bagi generasi penerus agar tidak lupa pada sejarah dan budaya bangsa.

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.170
Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe

No.	Lokasi (Kecamatan) / Nama Situs			
	Banda Sakti	Muara Satu	Blang Mangat	Muara Dua
1	Makam Tgk. Chik Ditunong dan Tgk. Dibuah	Makam Putroe Neng	Makam Prajurit Tgk. Abd. Jalil Cot Plieng	Tugu Perlawanan TKR
2	Makam Tgk. Di Lhokseumawe	Makam Tgk. Syiah Hudam	Makam Mualem Taufiq Shaleh	Rumah Adat Ulee Balang
3	Makam Tgk. Maharaja Abdul Hamid dan Meriam Belanda	Makam Tgk. Chik Dipaloh	Makam Tgk. Batee Meutarah	-
4.	Makam Tgk. Sayed Muhammad Nadir	Makam Tgk. Jrat Meuindram	Tugu Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	-
5.	Makam Tgk. Ulei Utan	Makam Tgk. Chik Buket Bruek Kreung	-	-



No.	Lokasi (Kecamatan) / Nama Situs			
	Banda Sakti	Muara Satu	Blang Mangat	Muara Dua
6.	Makam Tgk. Syaikh Al Kalaliy	Gua Jepang	-	-
7.	Tugu Pahlawan TNI	Gua Tgk. Ibrahim Tapa dan Cot Bu Kulah	-	-
8.	Rumoh Aceh Kota Lhokseumawe	-	-	-
9.	Kurok-Kurok	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2026

Dari tabel di atas menggambarkan bahwa Kota Lhokseumawe memiliki 22 (dua puluh dua) unit situs/bangunan cagar budaya diantaranya situs makam sebanyak 9 (sembilan) makam yang terdapat di 3 (tiga) Kecamatan, situs tugu sebanyak 2 (dua) tugu di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Blang Mangat, situ benteng dan goa sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdapat di 2 (dua) Kecamatan dan tempat bersejarah sebanyak 4 (empat) yang terdapat di Kecamatan Muara Satu.

2.1.4.4.2.17 Perpustakaan

A. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun

Keberadaan sebuah perpustakaan tidak terlepas dari pengunjungnya. Untuk itulah pengunjung perlu dimonitor sehingga dapat diketahui animo pengunjung dari waktu ke waktu. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan banyaknya pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam kurun waktu satu tahun. Jumlah pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui system pendataan pengunjung. Data dalam tabel di bawah ini merupakan data pengunjung perpustakaan kota per tahunnya.

Tabel 2.171
Rasio Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah kunjungan ke perpustakaan	8.700	13.310	12.045	15.715	13.481
2	Jumlah populasi yang harus dilayani	189.941	191.396	196.067	198.705	164.115
Rasio jumlah pengunjung perpustakaan		0.045	0.069	0.061	0.079	0.082

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2026

Data tersebut menunjukkan terjadi peingkatan jumlah pengunjung perpustakaan, dimulai pada tahun 2021 jumlah kunjungan ke perpustakaan sebanyak 8.700 kunjungan menjadi 15.715 kunjungan tahun 2024. Kenaikan jumlah pengunjung pada tahun 2024 menunjukkan kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah pengunjung ini menunjukkan minat membaca masyarakat yang semakin besar dan juga adanya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sehingga dapat mencakup masyarakat yang lebih luas. Tahun 2025 mengalami sedikit penurunan pengunjung perpustakaan.



B. Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah

Koleksi judul buku dan jumlah buku di perpustakaan memiliki pengaruh besar terhadap jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya variasi judul buku dan jumlah buku yang dikoleksi perpustakaan akan menimbulkan ketertarikan bagi masyarakat Kota Lhokseumawe untuk berkunjung mencari bahan pustaka. Berikut ini merupakan tabel informasi terkait koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2025.

Tabel 2.172
Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul)	8339	9516	9516	9516	9516
2	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan (Eksemplar)	27.276	29.512	29.512	30.456	30.456
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		0.30	0.32	0.32	0.31	0.31

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan Kota Lhokseumawe mengalami stagnan pada tahun 2022-2025. Hal ini karena keterbatasan anggaran sehingga tidak ada pengadaan buku di perpustakaan. Peningkatan jumlah koleksi judul sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk merespon perkembangan, sedangkan penambahan koleksi buku (jumlah eksemplar) merupakan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas.

C. Rasio Perpustakaan per Satuan Penduduk

Dengan peran krusial yang dimiliki perpustakaan dalam meningkatkan kualitas masyarakat, jumlah perpustakaan juga dapat menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk mengakomodasi peningkatan budaya literasi di kalangan masyarakat. Semakin banyak jumlah perpustakaan, maka diharapkan minat membaca masyarakat dapat terakomodasi. Selain itu penting juga untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan daya tampung layanan perpustakaan dengan melihat rasio perpustakaan dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Tabel 2.173
Rasio Jumlah Perpustakaan per 10.000 Penduduk
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Perpustakaan Umum/ Perpustakaan Daerah	15	15	15	15	15
2	Perpustakaan Sekolah	163	163	158	158	158
3	Perpustakaan Perguruan Tinggi	13	13	14	14	14
4	Perpustakaan Khusus	14	14	12	13	13
5	Perpustakaan Pesantren/Dayah	8	14	8	6	6
6	Jumlah Perpustakaan	213	219	207	206	206
7	Jumlah penduduk	189.941	191.396	196.067	198.705	200.876



No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
	Rasio jumlah perpustakaan per 1.000 penduduk	1,12	1,14	1,06	1.04	1.02

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2026

Dari tabel di atas, jumlah perpustakaan di Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Pada tahun 2021-2025, rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan, yaitu dari 1,12 menjadi 1,02. Hal ini dikarenakan adanya beberapa sekolah yang mengalami *regrouping*. Tahun 2021 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk mengalami penurunan menjadi 1,12, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 1,14 karena penambahan jumlah perpustakaan. Tahun 2025 jumlah perpustakaan tetap namun jumlah penduduk meningkat sehingga rasio jumlah perpustakaan menjadi 1,02.

D. Jumlah rata-rata pengunjung Perpustakaan per Tahun

Dari data mengenai jumlah pengunjung perpustakaan setiap tahunnya, dapat diambil rata-rata jumlah pengunjung. Hal ini untuk dapat mengetahui jangkauan perpustakaan terhadap masyarakat dalam lima tahun terakhir. Jumlah rata-rata pengunjung dalam lima tahun terakhir yaitu sejak 2020 hingga tahun 2024 yaitu sebesar 2168.2 jiwa pengunjung.

Tabel 2.174
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pengunjung	8.700	13.310	12.045	15.715	13.481
2	Rata-rata jumlah pengunjung					12.650

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2025 jumlah pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan jumlah pengunjung perpustakaan ini dikarenakan adanya inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Lhokseumawe. Namun pada tahun 2021 jumlah pengunjung mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga pihak perpustakaan mengambil kebijakan dengan menerapkan protokol kesehatan diantaranya pembatasan kuota pengunjung dan penyesuaian jam layanan perpustakaan.

E. Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai yang Memiliki Sertifikat

Dalam hal tata kelola perpustakaan, dibutuhkan petugas perpustakaan yang andal dan dapat mengatur segala kepentingan dan kebutuhan perpustakaan supaya dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Salah satu hal yang dapat mengindikasikan kompetensi petugas perpustakaan adalah dengan melihat jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang bersertifikat. Terkait pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat Kota Lhokseumawe belum memilikinya.



2.1.4.4.2.18 Kearsipan

A. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku

Secara umum tujuan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang rencana, pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan, serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah. Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Pengelolaan arsip terkadang masih dilakukan tanpa pedoman dan perlakuan yang baku. Hal tersebut yang mengakibatkan kegiatan kearsipan membutuhkan pedoman yang baku.

Tabel 2.175
Jumlah OPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah OPD yang mengelola arsip secara baku	15	8	8	15	15
2	Jumlah OPD	34	34	34	34	34
Persentase		44.11	23.53	23.53	44.11	44.11

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2026.

Menurut data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe, pada tahun 2021 jumlah persentase pengelolaan arsip secara baku sebesar 44.11% atau 15 OPD dari Jumlah 34 OPD. Persentase pengelolaan arsip tetap dikarenakan jumlah OPD yang mengelola Arsip di Kota Lhokseumawe berkisar pada angka 15 OPD. Dan pada tahun 2022-2023 menurun menjadi 8 OPD dan tahun 2024-2025 bertambah menjadi 15 OPD.

2.1.4.4.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.1.4.4.3.1 Pariwisata

A. Kunjungan Wisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang mampu memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah, sehingga pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mendorong meningkatnya pendapatan daerah (PAD), meningkatnya pendapatan masyarakat, memperluas penciptaan kesempatan kerja seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan. Tingkat keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dari perkembangan tingkat kunjungan wisatawannya.



Tabel 2.176
Jumlah Kunjungan Wisatawan
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Indikator	Jumlah Pengunjung				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kunjungan wisata	150.297	245.374	321.499	309.092	310.030

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, 2026

Penurunan jumlah wisatawan di Kota Lhokseumawe di tahun 2021 dipengaruhi oleh adanya pandemi virus Covid-19. Dampak dari Pandemi Covid-19 dilakukan pembatasan aktivitas masyarakat, terutama dengan penerapan PPKM (Juli-September 2021) dan juga adanya pembatasan cuti bagi ASN, TNI-Polri, karyawan BUMN maupun swasta. Dari runtutan kebijakan yang berlaku sepanjang tahun memberikan efek pada pengetatan sektor pariwisata yang pada akhirnya memberikan dampak pada berkurangnya jumlah wisatawan.

B. Objek Wisata

Kunjungan wisata di Kota Lhokseumawe terdiri dari wisatawan domestik dan wisatawan manca negara. Pada umumnya wisatawan lebih banyak mengunjungi destinasi wisata alam, baik pada akhir pekan maupun saat liburan. Berikut ini adalah objek wisata Kota Lhokseumawe meliputi; 1. Objek wisata alam, 2. Objek Wisata budaya/spiritual, dan 3. Objek wisata buatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.177
Objek Wisata Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Lokasi	Ket
1. Wisata Alam			
a.	Pantai Ujon Blang	Kecamatan Banda Sakti	
b.	Pulau semadu	Kecamatan Muara Satu	
c.	Pantai pulo daruet	Kecamatan Muara Dua	
2. Wisata Budaya/Spiritual			
a.	Benteng (kurok-kurok) tentara Jepang	Gp. Ujong Blang (Banda Sakti)	
b.	Gua Jepang cot Panggoi	Gp. Blang Panyang (Muara Satu)	
c.	Meriam Belanda	Gp. Kuta Blang (Banda Sakti)	
d.	Tugu Pahlawan TKR	Gp. Peukan Cunda (Muara Dua)	
e.	Tugu lokasi syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	Gp. Blang Buloh (Kec. Blang Mangat)	
f.	Tiang gantungan Tgk. Chik Ditungong	Gp. Jawa Lama (Banda Sakti)	
g.	Mon tujoh	Gp. Mesjid (Blang Mangat)	
h.	Makam Tgk. Dihokseumawe	Gp. Banda Masen (Banda Sakti)	
i.	Makam Tgk. Chik Ditunong	Gp. Mon Geudong (Banda Sakti)	
j.	Makam prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng	Gp. Blang Buloh (Blang Mangat)	
k.	Makam Mualim Taufik Shaleh	Gp. Blang Weu Panjo (Blang Mangat)	
l.	Makam Putroe Neng	Gp. Blang Pulo (Muara Satu)	
m.	Makam Tgk. Syiah Hudam	Gp. Blang Pulo (Muara Satu)	
n.	Makam Tgk. Chik Dipaloh	Gp. Cot Trieng (Muara Satu)	
o.	Makam Tgk. Jrad Meuindram	Gp. Cot Trieng (Muara Satu)	
p.	Makam Tgk. Chik Buket Krueng	Gp. Cot Trieng (Muara Satu)	
q.	Museum P. Ramli	Gp. Paloh (Muara Dua)	



No	Uraian	Lokasi	Ket
3.	Wisata Buatan		
a.	Reservoir (Waduk)	Gp. Pusong (Banda Sakti)	
b.	Taman Riyadah	Kecamatan Banda Sakti	
c.	Taman Mangat Cerita	Kecamatan Blang Mangat	
d.	Waduk Jeulikat	Kecamatan Blang Mangat	

Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2026.

C. PAD Sektor Pariwisata

Besaran PAD sektor pariwisata juga menggambarkan kontribusi sektor pariwisata untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum. PAD sektor pariwisata bisa berupa pajak dan retribusi pada objek pariwisata di wilayah Kota Lhokseumawe. PAD sektor pariwisata selama lima tahun terakhir 2021-2025 mengalami peningkatan, di tahun 2021 persentase PAD yang dihasilkan dari sektor pariwisata mencapai 6.48% menjadi sebesar 8.68% di tahun 2025.

Tabel 2.178
PAD Sektor Pariwisata
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Komponen	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pajak Hotel	287.803.500	534.054.623	744.194.756	1.020.576.163	801.316.352
	Pajak Restoran	3.587.507.600	5.563.411.570	6.139.818.064	5.789.281.826	5.818.218.819
3	Pajak Hiburan	170.092.200	218.205.800	348.147.200	331.402.219	289.157.546
4	Total Sektor Pariwisata	4.045.403.300	6.315.671.993	7.232.160.020	7.141.260.208	6.908.692.717
5	Total PAD	62.415.913.242	68.212.506.871	68.047.614.286	60.028.921.251	79.616.746.506
6	Persentase (%)	6.48	9.26	10.63	11.90	8.68

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2026 Hasil Olahan 2026

Penurunan jumlah PAD sektor pariwisata pada tahun 2021 merupakan dampak dari kebijakan penanganan pandemi Covid-19 diantaranya penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan pembatasan jam operasional objek wisata ataupun penutupan tempat wisata untuk sementara.

2.1.4.4.3.2 Pertanian

A. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Analisis produktivitas sektor pertanian di suatu daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Jika dilihat dari proporsi produksinya, padi merupakan tanaman pangan utama di Kota Lhokseumawe sementara tanaman pangan lainnya hanya memiliki proporsi yang sangat kecil.

Tabel 2.179
Produksi Padi atau Bahan Pangan Lokal Lainnya
Di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Produksi Padi (Ton)	5.957	6.859	7294.71	9801	9.894
2	Luas Panen Padi (Ha)	1083	1247	1326.31	1782	1.798
Produktivitas Lahan (Ton/Ha)		5.3	5.5	5.5	5.5	5.5

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, DKPPP Kota Lhokseumawe, 2026.



Pada tahun 2021 produksi padi di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan. Tahun 2021 produksi padi mencapai 5.957 ton dan terus meningkat menjadi 9.894 ton di tahun 2025. Tahun 2020 luas lahan baku sawah Kota Lhokseumawe yang ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN yaitu 1.102,34 Ha dari luasan sebelumnya 2.050 Ha, penyesuaian luas baku sawah telah mempengaruhi capaian produksi padi.

Naik turunnya produksi padi ini secara umum disebabkan karena berkurangnya luas tanam padi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di wilayah Kota Lhokseumawe. Tak dapat dipungkiri seiring berkembangnya suatu wilayah akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang untuk berkegiatan, dimana ciri khas perkotaan dengan kegiatan bisnis sehingga berpengaruh terhadap perubahan fungsi lahan yang dinamis. Namun pada tahun 2022-2025 produksi padi mengalami peningkatan yang disebabkan oleh meningkatnya produktivitas lahan. Salah satu faktor pendorong peningkatan produktivitas lahan ini adalah dengan penerapan sistem-sistem budidaya pertanian yang telah dikembangkan, sehingga dapat memaksimalkan fungsi lahan yang tersedia.

2.1.4.4.3.3 Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Rumah tangga pengguna listrik menunjukkan indikator jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kota Lhokseumawe. Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga pengguna listrik dengan jumlah seluruh rumah tangga. Persentase rumah tangga pengguna listrik sering disebut juga dengan Rasio Elektrifikasi.

Tabel 2.180
Rumah Tangga Pengguna Listrik
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah rumah tangga pengguna listrik	49.976	51.460	53.549	56.584	55.732
2	Jumlah rumah tangga	42.354	43.930	45.504	46.315	46.778
Persentase rumah tangga		117.99	117.14	117,68	122,17	119,14

Sumber: PLN Kota Lhokseumawe, 2026

Jumlah rumah tangga pengguna listrik di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu tahun 2021-2025 menunjukkan peningkatan. Berdasarkan data di atas, persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Lhokseumawe sebesar 117.99% di tahun 2021 dan meningkat menjadi 122.17% di tahun 2024. Tahun 2025 mengalami penurunan dikarenakan saat bencana ada proses nonaktif pada sejumlah pelanggan terdampak bencana. Persentase rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2022 mengalami peningkatan dikarenakan pertumbuhan jumlah rumah tangga lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga pengguna PLN. Adapun faktor persentase rumah tangga pengguna listrik PLN melebihi 100% yakni ada rumah tangga yang memasang meteran lebih dari satu atau rumah



tangga yang memiliki rumah lebih dari satu atau penggunaan untuk rumah kontrakan/rumah kos.

B. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Indikator rasio ketersediaan daya listrik merupakan hasil perbandingan antara jumlah daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan listrik. Data yang didapatkan dari Kantor Perusahaan Listrik Negara adalah persentase ketersediaan daya listrik dengan menggunakan perbandingan antara daya listrik terpasang dengan jumlah kebutuhan dikalikan dengan bilangan 100.

Tabel 2.181
Rasio Ketersediaan Daya Listrik
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Daya Listrik terpasang	240	240	240	240	240
2	Jumlah kebutuhan	106.72	111.42	117.07	129.08	132.84
Rasio ketersediaan daya listrik		2.25	2.15	2.05	1.86	1.81

Sumber: PLN Kota Lhokseumawe, 2026

Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah, maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat.

2.1.4.4.3.4 Perdagangan

A. Ekspor Bersih Perdagangan

Ekspor bersih perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dan nilai impor suatu wilayah. Data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik adalah nilai ekspor netto.

Tabel 2.182
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Lhokseumawe
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (juta rupiah)

No	Indikator	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai Ekspor Neto	-391,39	-43,67	105,85	34,51	-19,54
2	Persentase nilai Ekspor Neto	-5.4	-0.58	1.35	0.42	-0.23

Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2026

Dari tahun 2021-2025, nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Lhokseumawe menunjukkan nilai yang fluktuatif. Nilai ekspor bersih perdagangan di Kota Lhokseumawe sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan nilai negatif, artinya nilai ekspor lebih rendah daripada nilai impor, namun tahun 2023-2024 menunjukkan peningkatan dan tahun 2025 nilai ekspor mengalami kontraksi Kembali menjadi (19.54)

B. Pendapatan Sektor Perdagangan

Urusan perdagangan selain melaksanakan fungsi sebagai pelayanan kepada masyarakat dan pendorong bagi pengembangan perekonomian daerah juga berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Realisasi pendapatan sektor perdagangan ditunjukkan pada tabel berikut.



Tabel 2.183
Realisasi Pendapatan Sektor Perdagangan di Pasar Tradisional
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Komponen	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pelayanan Persampahan /Kebersihan	312.692.500	464.260.000	370.105.000	284.485.000	443.167.500
2	Retribusi Pelayanan Pasar	746.525.000	708.311.000	922.465.000	862.610.000	815.255.000
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	14.449.500	11.323.000	12.535.000	0	0
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	30.217.000	41.400.000	57.750.000	50.000.000	68.500.000
Jumlah		1.103.886.021	1.225.296.022	1.362.857.023	1.197.095.000	1.326.922.500

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2026

Pendapatan sektor perdagangan pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 10.84% dari tahun lalu dengan nilai penurunan sebesar Rp 129.827.500. Peningkatan terbesar dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan peningkatan sebesar 55,77% dan retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 37%, dilanjutkan retribusi pelayanan pasar dengan penurunan mencapai 5,49%.

2.1.4.4.3.5 Perindustrian
A. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Berdasarkan informasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Lhokseumawe, diketahui bahwa jumlah kelompok pengrajin merupakan jumlah kelompok pengrajin yang potensial untuk dibina. Bantuan yang diberikan oleh Pemda kepada kelompok pengrajin bukan berupa barang melainkan fasilitas dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan pameran. Jumlah fasilitas yang diberikan bergantung pada dinamika industri di Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.184
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kelompok pengrajin yang mendapat bantuan pemda	25	40	43	37	40
2	Total Kelompok Pengrajin	96	107	107	109	90
Persentase bina kelompok pengrajin		26,04	37,38	40,18	33,94	44,44

Sumber: Disperindagkop Kota Lhokseumawe, 2026

Pada tahun 2021 terdapat 25 kelompok pengrajin dan angka tersebut meningkat menjadi 43 kelompok pada tahun 2023. Persentase bina kelompok pengrajin pada tahun 2021 mencapai 26.04%, dan angka tersebut meningkat menjadi 40.18% pada tahun 2023. Namun di tahun 2024 jumlah kelompok pengrajin kembali turun menjadi 37 kelompok atau 33.94%, hal ini dikarenakan pemberian bantuan kepada pengrajin tidak dialokasikan secara rutin sesuai



dengan kebijakan yang berlaku. Tahun 2025 meningkat sedikit menjadi 40 kelompok atau 44.44%.

2.1.4.4.3.6 Kelautan dan Perikanan

A. Produksi Perikanan

Peran sektor kelautan dan perikanan dalam pengembangan perekonomian di Lhokseumawe sangat strategis, karena sektor ini sangat diperlukan dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan (protein hewani), menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya tahun 2021-2025 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.185
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Produksi Ikan Tangkap (Ton)	14.615	12.852	13.119	12.968	10.270
2	Produksi Ikan Budidaya (Ton)	3.400	8.065	1.995	2006.65	1.778,05
Total Produksi (Ton)		18.015	20.917	15.114	14.974,6	12.048,05

Sumber: DKPPP 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat total produksi perikanan tangkap dan budidaya Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2025 fluktuatif cenderung menurun. Total produksi ikan tahun 2021 tercapai 18.015 Ton dan pada tahun 2025 menurun menjadi 12.048,05 ton.

2.1.4.4.4 Aspek Penunjang Urusan

2.1.4.4.4.1 Perencanaan Pembangunan

A. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD yang telah Ditetapkan dengan PERDA

Rencana pembangunan jangka panjang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara periodik, khususnya dengan jangka waktu pembangunan 20 tahun. Peran dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sangat penting yaitu agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara tepat dan dapat tergambar dengan jelas.

Tabel 2.186
Tersedianya Dokumen Perencanaan
RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2026

Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD di Kota Lhokseumawe telah ada berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe tahun 2025-2045. Ketersediaan dokumen perencanaan RPJPD hendaknya tidak hanya dipahami secara



administratif, sebagai sebuah kewajiban untuk memenuhi ketentuan normatif. Lebih dari itu ketersediaan dokumen perencanaan hendaknya memenuhi fungsi substantifnya. Dengan demikian perhatian terhadap visi dan misi menjadi sangat penting agar dapat memaknai fungsi dari dokumen perencanaan RPJPD.

B. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen turunan dari RPJPD yang lebih substansial dan ditetapkan oleh peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah (Perkada). Dokumen ini bertujuan untuk menentukan rangkaian pembangunan untuk lima tahun ke depan yang sudah bersifat legal. RPJMD merupakan dokumen pembangunan yang merupakan penjabaran langkah-langkah pemerintah daerah di tiap lima tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah yang diwujudkan dalam program-program selama lima tahun dan berpedoman terhadap RPJPD.

Tabel 2.187
Tersedianya Dokumen Perencanaan
RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2026

Seperti halnya RPJPD, perencanaan daerah yang lebih substansial yaitu RPJMD juga telah tersedia di tataran pemerintahan Kota Lhokseumawe. RPJMD yang ada dalam lima tahun terakhir telah melewati dua periode ketetapan RPJMD. Untuk tahun 2017-2022, RPJMD ditetapkan melalui Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022. Kemudian untuk tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026 serta Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

C. Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang Telah ditetapkan Dengan PERKADA

Operasionalisasi rencana pembangunan menjadi sebuah kebutuhan eksplisit. Dengan rencana yang lebih operasional, maka menjadi mudah untuk direalisasikan. Pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu tertentu perlu diturunkan ke dalam dokumen yang lebih teknis dan operasional. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan secara eksplisit. Untuk itulah RKPD disusun setiap tahun dengan menerjemahkan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Qanun. Data mengenai tersedianya dokumen perencanaan RKPD Kota Lhokseumawe tahun 2021-2025 telah ditetapkan.



Tabel 2.188
Tersedianya Dokumen Perencanaan
RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

No	Uraian	RKPD Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada, Perwal No.51 Tahun 2020	Ada, Perwal No.24 Tahun 2021	Ada, Perwal No 17 Tahun 2022	Ada, Perwal No 22 Tahun 2023	Ada, Perwal No.18 Tahun 2024

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2026

Ketersediaan RKPD memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga setiap OPD dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran yang jelas dan memperjuangkan pencapaian visi misi dengan koordinasi satu sama lain. Dasar hukum berupa Qanun dalam penetapan RKPD memberikan kekuatan hukum. Dari data di atas, pemenuhan dasar hukum berupa Qanun yang selalu mengiringi RKPD memberikan kepastian hukum dan keabsahan, sehingga menjadi dasar bertindak untuk merealisasikan program-program pembangunan mencapai target secara kuantitas dan kualitas, dan mengantarkan pencapaian *outcome* yang diharapkan.

D. Tersedianya RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA

Seperti halnya dokumen-dokumen perencanaan sebelumnya, rencana tata ruang wilayah (RTRW) juga menjadi dokumen yang krusial dan penting dimiliki oleh pemerintah Kota Lhokseumawe. Hal ini dikarenakan RTRW merupakan dokumen yang menjadi pedoman dalam pembangunan daerah dalam jangka panjang yaitu 20 tahun.

Tabel 2.189
Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan
dengan PERDA Kota Lhokseumawe

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Tersedianya Dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe, 2026

Dokumen RTRW yang berlaku 2024 merupakan dokumen RTRW yang ditetapkan berdasarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe tahun 2023-2044. Adanya ketersediaan RTRW ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembangunan daerah. Tidak hanya menjadi dokumen formalitas belaka namun juga diimplementasikan dan menjadi dasar pengawasan dalam pembangunan sehingga pembangunan daerah yang terjadi dapat sesuai dan terhindar dari pelanggaran yang tidak diinginkan.

E. Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD

Sebuah rencana yang semakin khusus dengan lingkup yang lebih terbatas tentunya berinduk kepada perencanaan di atasnya. RKPD merupakan sebuah perencanaan tahunan yang berinduk kepada RPJMD. Untuk itulah RKPD merupakan bentuk turunan yang menerjemahkan RPJMD. Di samping itu, keberadaan RKPD adalah bentuk pembaruan sebuah rencana untuk menampung



perkembangan capaian setahun sebelumnya dan perkembangan tuntutan baru yang dihadapi pada tahun yang bersangkutan.

Tabel 2.190
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD
di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan	182	152	183	173	174
2	Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun	189	189	182	186	182
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD		96.29	80.42	100	93.01	95.60

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD yaitu pada tahun 2021-2025 fluktuatif. Kecenderungan OPD memasukkan banyak program dalam RPJMD namun tidak di masukkan dalam RKPD. Diperlukan kecermatan dalam menerjemahkan RPJMD ke dalam RKPD. Dengan memperhatikan RPJMD dengan program yang sifatnya lebih umum, lalu diturunkan kepada program-program yang lebih implementatif. Untuk itu, semestinya jumlah maupun bentuk program di RKPD lebih bersifat detail, kecil satuannya, dan mencerminkan *sequence* antar RKPD. Oleh karena itu, dengan hanya melihat jumlah program yang ada dalam RKPD dibandingkan dengan jumlah program di RPJMD secara substansial belum dapat dimaknai. Jika dilihat dari jumlah program, cenderung menurun dari tahun 2021 ke tahun 2022, hal ini dikarenakan Program RKPD tahun 2021 menyesuaikan nomenklatur program yang ditetapkan di Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

2.1.4.4.2 Keuangan
A. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan penilaian profesional dari BPK mengenai kewajaran laporan keuangan suatu institusi yang didasarkan kepada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK menggambarkan tingkat kedisiplinan keuangan suatu instansi berdasarkan empat kriteria tersebut. Semakin baik opini BPK atas informasi keuangan suatu daerah, maka semakin baik pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah kemudian dapat menjadi tarikan bagi para investor untuk masuk ke dalam wilayah yang bersangkutan. Dalam rentang Tahun 2021-2025, Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan opini BPK sangat baik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).



Tabel 2.191
Opini BPK “WTP” Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Opini BPK “WTP”	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2026

B. Persentase SILPA

SILPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran. SILPA tahun berjalan akan menjadi SILPA di tahun yang akan datang. Dalam kurun waktu 2021-2025, persentase SILPA Kota Lhokseumawe menunjukkan fluktuasi dengan besaran SILPA terbesar terjadi pada tahun 2021 dan SILPA terkecil di tahun 2024.

Tabel 2.192
Persentase SILPA Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

Tahun	Total SILPA	Total APBD	Persentase SILPA
2021	52.399.883.518,38	879.310.221.282	5.96
2022	10.541.034.674,37	874.851.664.000	1.28
2023	37.480.808.630	798.260.907.647	4.64
2024	1.264.786.679	847.032.964.141	0.15
2025	45.601.060.697,76	837.447.857.636,65	5.44

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2026

C. Persentase Belanja Pendidikan (20%)

Persentase Belanja Pendidikan juga mempengaruhi analisis urusan penunjang karena syarat wajib minimal belanja pendidikan daerah sebanyak 20% harus dipenuhi untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Dalam kurun waktu 2021-2025, persentase belanja urusan pendidikan terhadap total APBD menunjukkan fluktuasi namun tetap memenuhi syarat minimal 20%. Belanja pendidikan terbesar terjadi pada tahun 2025, yaitu senilai 30.47% dari total APBD Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.193
Persentase Belanja Pendidikan
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Belanja Urusan Pendidikan	Total APBD	Persentase
2021	194.345.855.680	879.310.221.282	22.10
2022	195.258.081.775	874.851.664.000	22.32
2023	177.628.068.026	798.260.907.647	22.25
2024	222.470.125.307	847.032.964.141	26.26
2025	255.163.704.315	837.447.857.636,65	30.47

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2026

D. Perbandingan Belanja Daerah

Proporsi penggunaan anggaran dapat ditinjau dari komponen belanja daerah Kota Lhokseumawe. Pada tahun 2021 terjadi perubahan klasifikasi belanja daerah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 0503708 tahun 2020. Klasifikasi belanja daerah pada APBD 2021 dan seterusnya terbagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.



Tabel 2.194
Proporsi Belanja Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (milyar)

Variabel	2021	2022	2023	2024	2025
Belanja Operasi	590,3	605,5	595,2	619,1	627,9
%	67.14	69.21	74.57	73.09	74.98
Belanja Modal	168,4	156,6	82,3	103,7	80,4
%	19.15	17.90	10.31	12.25	9,6
Belanja Tidak Terduga	4,5	3,0	0,05	1,1	4,9
%	0.51	0.34	0.01	0.14	0.59
Belanja Transfer	116.1	109,7	120,6	122,9	124,18
%	13.20	12.54	15.11	14.52	14,83
Total APBD	879,3	874,8	798,2	847,0	837,4

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, 2026

E. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. IPKD diukur melalui 6 (enam) dimensi meliputi:

- a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. Pengalokasian anggaran belanja APBD;
- c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah;
- d. Penyerapan anggaran;
- e. Kondisi keuangan daerah; dan
- f. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD.

Tabel 2.195
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024

No	Indikator	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	61,5587	64,1924	71,262	67,5457
		B	B	B	B

Sumber: <https://ipkd-bskdn.kemendagri.go.id>, 2026

IPKD didapat dengan menjumlahkan Indeks pada setiap dimensi. IPKD Kota Lhokseumawe tahun 2024 mendapatkan skor sebesar 67,5457. Rata-rata nilai IPKD Kota dari 90 Kota yang terindetifikasi diperoleh nilai rata-rata sebesar 71.85. Nilai IPKD Kota Lhokseumawe ada di bawah rata-rata Nasional. Untuk tahun 2025 dilakukan pengukuran di tahun 2026.

2.1.4.4.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

A. Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural

Selain pendidikan dan pelatihan formal yang telah dipaparkan sebelumnya, terdapat pula pendidikan dan pelatihan struktural bagi pejabat ASN. Data yang ada didapatkan dengan membandingkan antara jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dengan jumlah total Struktural.



Tabel 2.196
Persentase Pejabat ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural	45	0	37	24	13
2	Jumlah total struktural	513	305	208	307	292
Persentase		8.77	0	17.78	7.82	4.45

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2026

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural jumlahnya terus menurun dari tahun 2021 sejumlah 8.77% sampai dengan tahun 2022 menjadi 0%. Namun pada tahun 2023 meningkat menjadi 17,78% dan tahun 2024 menurun menjadi 7.82% serta tahun 2025 menurun kembali menjadi 4.45%. Jika dicermati pada tabel diatas, penambahan jumlah ASN yang mengikuti pelatihan tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kuota pihak penyelenggara dan pada tahun 2022 tidak tersedia anggaran untuk diklat struktural.

B. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah

Jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah memiliki peran dan fungsi dalam memimpin serta memotivasi aparatur sipil negara (ASN) pada instansi pemerintahan. Yang termasuk dalam jabatan pimpinan tinggi yaitu pada tingkat eselon II. Jabatan pimpinan tinggi hanya dapat diduduki paling lama lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian dan berkoordinasi dengan komisi aparatur sipil negara.

Tabel 2.197
Jumlah Pemangku Jabatan Tinggi pada Instansi Pemerintah di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	32	32	32	32	29

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2026

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah pemangku jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah di Kota Lhokseumawe sebanyak 32 orang namun di tahun 2025 menurun menjadi 29 orang dikarenakan ada kekosongan pemangku jabatan. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

C. Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah

Jabatan fungsional pada instansi pemerintah merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan



keterampilan tertentu. Jabatan fungsional ASN terdiri dari dua macam jabatan yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional terdiri dari beberapa rumpun jabatan yang ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Tabel 2.198
Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Umum pada Instansi Pemerintah di Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1770	1.939	1.749	912	1.678

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2026

Pada tabel di atas terlihat data mengenai jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe bersifat fluktuatif selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu sebanyak 1.770 orang, dan tahun 2022 meningkat menjadi 1.939 orang hal ini disebabkan adanya tambahan CPNS rekrutmen tahun 2021-2022 jabatan fungsional tertentu yang terdiri atas guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis fungsional lainnya. Namun di tahun 2023 jumlah ini kembali turun menjadi 1.749 orang hal ini disebabkan oleh adanya pejabat fungsional tertentu yang pensiun terutama tenaga guru. Tahun 2024 kembali turun menjadi 912 orang dan tahun 2025 meningkat menjadi 1.678 orang.

Jabatan Fungsional sebagian besar pada Tenaga Kesehatan dan tenaga Pendidik dan sebagian kecil JFT teknis di OPD yang secara berkala didata untuk pelaporan IKK (LPPD). Sebelum tahun 2020 pelaksanaan inpassing ke JFT masih rendah dari Lembaga Pembina dan pengangkatan JFT Teknis masih kecil. Akan tetapi pada awal Januari 2022 telah terjadi perampangan birokrasi (meritokrasi) sebagian jabatan eselon 4 setara pejabat pengawas menjadi sub koordinator sebagai JFT Ahli Muda di beberapa OPD.

D. Penilaian Sistem Merit

Penilaian mandiri penerapan sistem merit terdiri dari 8 tahapan yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi. Dan untuk tahun 2023-2024 Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan nilai buruk pada capaian penerapan sistem merit.

Tabel 2.199
Capaian Penerapan Sistem Merit pada Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2025

No	Aspek	Maksimal	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kebutuhan	40	5	12.5	
2	Pengadaan	40	12	8	
3	Pengembangan Karir	130	-	2.5	
4	Promosi dan Mutasi	40	10	17.5	
5	Manajemen Kinerja	80	5	27.5	



No	Aspek	Maksimal	2023	2024	2025
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	2.5	17.5	
7	Perlindungan dan Pelayanan	16	0	8	
8	Sistem Informasi	24	0	2	
Nilai Capaian		410	34,5	95.5	
		Kategori	Buruk	Buruk	
		Indeks	0,08	0,23	

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2026.

Berdasarkan hasil penilain tersebut maka BKPSDM akan menindaklanjuti melalui berbagai program/kegiatan antara lain penyusunan pola karier, penyempurnaan SIMPEG, penyelenggaraan diklat, penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

E. Penilaian Indeks Profesioanal ASN

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019, indeks profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Pengukuran indeks profesionalisme ASN dilakukan berdasarkan prinsip dan dimensi penilaian indeks tersebut. Adapaun prinsip pengukuran indeks profesionalisme ASN sebagai berikut:

- a. Koheran, kriteria yang digunakan bersumber dari sistem merit;
- b. Kelayakan, indeks profesionalisme ASN disusun dengan mempertimbangkan ketersediaan data objektif atau data rill yang melekat secara individual pada setiap pegawai ASN;
- c. Akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan tingkat kredibilitasnya;
- d. Dapat ditiru dan dibandingkan sesuai periode waktu dan lokus pengukuranya; dan
- e. Multi-dimensional.

Indeks profesionalisme ASN adalah nilai hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN yang didasarkan pada dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dari para ASN. Adapun penjelasan mengenai dimensi pengukuran indeks profesionalitas ASN sebagai berikut:

- a. Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal ASN dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Porsi dimensi kualifikasi adalah 25% dari total pengukuran indeks profesionalisme ASN;
- b. Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh ASN dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Porsi dimensi kompetensi adalah 40% dari total pengukuran indeks profesionalisme ASN;
- c. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Porsi dimensi ini 30% dari total pengukuran, indikatornya adalah nilai SKP dan PKP; dan



- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS. Porsi dimensi ini adalah 5% yang terdiri dari penjatuhan hukuman disiplin (berat, sedang, ringan).

Adapun lima kriteria indeks profesionalitas ASN yang dihasilkan dari pengukuran dimensi diatas, yaitu skor 91-100 dengan predikat “sangat tinggi”; skor 81-90 dengan predikat “tinggi”; skor 71-80 dengan predikat “sedang”; skor 61-70 dengan predikat “rendah”; serta skor dibawah 60 dengan predikat “sangat rendah.

Tabel 2.200
Indeks Profesionalitas ASN
di Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2025

No	Indikator	2022	2023	2024
1	Kualifikasi	21.4	21.44	21.55
2	Kompetensi	8,59	25.89	27.51
3	Kinerja	3,01	24.57	25.37
4	Disiplin	5	5	4.99
Nilai Indeks Profesional ASN		37,98	76.89	79.42
Kategori		kurang	sedang	sedang

Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2025

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2022 indeks profesionalitas ASN di Kota Lhokseumawe sebesar 37,98 sehingga masuk pada kategori kurang dan tahun 2023 sedikit meningkat menjadi 76.89 masih dalam kategori sedang dan 2024 meningkat menjadi 79.42.

2.1.4.4.4 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.

Dalam mengelola sebuah negara, perlu sebuah gagasan-gagasan baru yang dapat menciptakan kemajuan daerah. Baik pemerintah maupun pihak swasta harus melakukan pengembangan gagasan-gagasan itu supaya ada inovasi yang tercipta. Dalam hal ini, bukan hanya pemerintah pusat yang harus berinovasi, melainkan juga pemerintah daerah.

Pemerintah pusat menetapkan sebuah peraturan yang membuka kesempatan bagi daerah dan warganya untuk dapat berkreasi dan menciptakan terobosan baru (inovasi). Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Selain untuk berkreasi, pemerintah berharap Inovasi Daerah dapat meningkatkan daya saing dan kinerja penyelenggara pemerintahan sehingga nantinya daerah-daerah dapat mengalami kemajuan.



Kota Lhokseumawe dalam percepatan pembangunan daerah adalah dengan melakukan inovasi daerah. Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 ada 8 Perangkat Daerah yang telah menginput data inovasi ke dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri pada tahun 2023. Jumlah inovasi yang diinput sebanyak 8 dengan rincian BKPSDM Kota Lhokseumawe menyumbang 2 (dua) inovasi dengan nilai kematangan masing-masing sebesar 91 dan 90. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 1 (satu) inovasi dengan nilai kematangan sebesar 81. BPKD Kota Lhokseumawe dengan 1 (satu) inovasi memiliki nilai kematangan sebesar 70. DPMTSP dan Naker Kota Lhokseumawe dengan 3 inovasi memiliki nilai kematangan sebesar 56-65. Dan Pemerintah Gampong Kuta Blang dengan 1 inovasi dan memiliki nilai kematangan sebesar 66.

Tabel 2.201
Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2025

No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah / Inisiator	Nilai Kematangan Inovasi
Tahun 2023			
1.	Aplikasi e-Kinerja Kota Lhokseumawe	BKPSDM Kota Lhokseumawe	91
2.	Aplikasi Presensi Kota Lhokseumawe	BKPSDM Kota Lhokseumawe	90
3.	Percepatan Pencapaian Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan (PEKAD 3 in 1 Plus)	Disdukcapil Kota Lhokseumawe	81
4.	Layanan Chat WA Pajak dan Retribusi (CAWAPRES)	BPKD Kota Lhokseumawe	70
5.	Sistem Informasi Gampong dan Layanan Online (SIGAMLON)	Pemerintah Gampong Kuta Blang	66
6.	Sistem Perizinan dan Layanan Antar Jemput Izin (SIPERI WET WET)	DPMTSP & Naker Kota Lhokseumawe	65
7.	Klinik Layanan Perizinan Sistem Online dan Verifikasi Cepat (KLIPPER SINOVA)	DPMTSP & Naker Kota Lhokseumawe	58
8.	Integrasi Layanan Menerapkan Online System Submission (Whatsapp & On Call)	DPMTSP & Naker Kota Lhokseumawe	56
Tahun 2024			
1	Bidan Ceting (Bidan Dampingi Ibu Cegah Stunting)	Puskesmas Mon Geudong	91.00
2	HKG (Hari Kesehatan Gampong)	Puskesmas Mon Geudong	86.00
3	Ahad Festival (Penyediaan Akses Pasar Lokal Bagi Pelaku UMKM)	Disperindagkop & UKM	85.00
4	Ceudah Brat (Cerdas Elektronik untuk Digital Arsip Berani dan Akurat)	Disperindagkop & UKM	79.00
5	Dasibangsida (Database Hasil Penelitian, Informasi Pembangunan dan Inovasi Daerah)	BAPPEDA	78.00
6	Umbi Kanjai (UMKM Center, Majukan Bisnis Ciptakan Kejayaan)	Disperindagkop & UKM	75.00
7	Sipentalmu (Aplikasi Presensi Digital SD Muhammadiyah)	SDS Muhammadiyah	73.00
8	Pliek Digata (Pelayanan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital Untuk Anda)	Disdukcapil	72.00
9	Kolaborasi Pemasaran Olahraga Senam Pada Kegiatan Ahad Festival	Disporapar	70.00
10	Peusijuk (Perekaman Untuk Siswa/i Jangkau Usia KTP)	Disdukcapil	70.00



No.	Nama Inovasi	Perangkat Daerah / Inisiator	Nilai Kematangan Inovasi
11	Pelataran PBB-P2 (Pelayanan Antar Himbauan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan)	BPKD	63.00
Tahun 2025			
1	DASIBANGSIDA (Database Hasil Penelitian, Informasi Pembangunan dan Inovasi Daerah)	Bappeda	81
2	LALAT (Lapak Alat Literasi)	Disperpusip	59
3	PASTA GA PARAH (Pasar Tani dan Gerakan Pangan Murah)	DKPPP	57
4	Beravsi (Belajar Dari Video Animasi)	SMP Negeri 3 Lhokseumawe	55
5	Konsumen Perpus	Disperpusip	55
6	Cemara Eksdanxa	SD Negeri 1 Banda Sakti	50

Sumber : <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

Untuk tahun 2024 Kota Lhokseumawe memiliki 11 Perangkat Daerah yang telah menginput data inovasi ke dalam Sistem Indeks Inovasi Daerah Kemendagri pada tahun 2024 meningkat dari tahun 2023, dengan Tingkat kematangan inovasitertinggi sebesar 91 dan terendah sebesar 63.

2.1.4.4.5 Pengawasan

A. Level Kapabilitas APIP

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*) dan tata kelola (*governance*) organisasi. Pencapaian kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel, dimana di tahun 2020-2024 telah berada pada level 3 untuk Kapabilitas APIP Kota Lhokseumawe.

Tabel 2.202
Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2026



B. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Tingkat maturitas ini dapat digunakan sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan SPIP. Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 (tiga) komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP akan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan pengendalian yang menjadi area perbaikan. Untuk capaian Tingkat Maturitas SPIP dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.2.203
Capaian Tingkat Maturitas SPIP
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Maturitas SPIP	Level 2 2.314	Level 2 2.314	Level 3 3.031	Level 3 3.031	Level 3 3.037

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2026

C. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Pada model penilaian MRI, parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 area dalam 3 komponen utama yaitu 1. Perencanaan dengan penilaian atas komponen perencanaan dilakukan untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan. 2. Kapabilitas dengan penilaian atas komponen terhadap area-area kepemimpinan, kapabilitas, SDM, kemitraan dan proses pengelolaan risiko. 3. Hasil dengan penilaian atas komponen aktivitas penanganan risiko dan outcome. Capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2022 masih sama yaitu level 2 dengan nilai 2,092. Dan pada tahun 2023-2024 masih berada pada level 2 namun dengan nilai 2.832 meningkat sedikit dari tahun 2022. Tahun 2025 meningkat menjadi level 3 dengan poin 3.059

Tabel.2.204
Capaian Manajemen Risiko Indeks (MRI)
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
ManajemenRisiko Indeks (MRI)	Level 2 2.092	Level 2 2.092	Level 2 2.832	Level 2 2.832	Level 3 3.059

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2026

D. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. Dimensi IEPK merupakan pengembangan dari Fraud Control Plan



(FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dimensi dan indikator IEPK dikelompok dalam 3 (tiga) pilar yaitu pilar kapabilitas pengelola risiko korupsi, pilar penerapan strategi pencegahan dan pilar penanganan kejadian korupsi. Untuk tahun 2021 IEPK Kota Lhokseumawe berada pada level 2 dengan nilai 2,276. Untuk tahun 2022-2024 IEPK Kota Lhokseumawe masih berada pada level 2 dengan nilai 2.800 meningkat dari tahun 2021. Dan Tahun 2025 masih di level dengan dengan poin 2.904.

Tabel.2.205
Capaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Efektivitas	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2
Pengendalian Korupsi	2.276	2.800	2.800	2.800	2.904

Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2026

2.1.4.4.4.6 Sekretariat DPRK

A. Pesentase Rancangan Qanun yang ditetapkan

Dalam proses penyusunan Qanun, Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang partisipatif memiliki kedudukan yang sangat penting karena akan menjadi acuan mengenai skala prioritas penyusunan Rancangan Qanun selama 1 tahun periode sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Oleh karena itu Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota dan DPRK sebagai pemegang kewenangan penyusunan Program Legislasi Daerah harus melalui mekanisme yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder yang ada sehingga Program legislasi Daerah yang dihasilkan merupakan usulan-usulan Rancangan Qanun yang aspiratif dan partisipatif yang dalam pelaksanaannya usulan-usulan Rancangan Qanun tersebut dapat dibuat secara berencana, terpadu, dan sistematis.

Tabel 2.206
Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan
Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Rancangan Qanun yang ditetapkan	7	4	5	6	9
2	Jumlah Prolegda	17	10	8	11	12
	Persentase	41.18	40.00	65.50	54.55	75.00

Sumber : Sekretariat DPRK Lhokseumawe, 2025

Persentase Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 berfluktuasi setiap tahunnya sebagaimana terlihat pada tabel. Pada tabel tersebut terlihat bahwa tahun 2021 persentase rancangan qanun yang ditetapkan sebesar 41.18% dan di tahun 2022 menurun menjadi 40.00%. Selanjutnya pada tahun 2023 persentase rancangan qanun yang ditetapkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 65.50%, walaupun di tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi 54.55% dan tahun 2025 meningkat menjadi 75.00%.



2.1.4.4.4.7 Sekretariat Daerah

Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, indeks reformasi birokrasi, indeks pelayanan publik dan indeks reformasi hukum. Hasil capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.207

Hasil Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021-2025						
No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Reformasi Birokrasi	C 44.03	C 45.36	CC 54.79	B 66.85	BB 72.17
2	Nilai SAKIP	CC 55.40	CC 55.80	B 60.18	B 61.12	B 61.76
3	Indeks Pelayanan Publik	N/A	B- 3.33	D 1.87	B 3.94	A- 4.31
4	Indeks Reformasi Hukum	N/A	N/A	55.13	77.72	67.26

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Lhokseumawe, 2026

2.1.4.4.4.8 Unsur Kekhususan

1. Pelaksanaan Syariat Islam

Pelaksanaan Syariat Islam diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat yang pelaksanaannya meliputi aqidah, syariah dan akhlak. Implementasi pelaksanaan syariat Islam salah satu capaiannya diukur dengan Survey Indeks Pembangunan Syariah (IPS) yang dalam hal ini untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai syariat islam dan mengukur sejauh mana penerapan dan pelaksanaannya agar tercapai maqasid syariah (kriteria dan indikator Indeks Pembangunan Syariah).

Indeks Pembangunan Syariah terdiri dari 7 dimensi pembangunan yaitu Akidah, Lembaga Keuangan Syariah, Kepatuhan membayar Zakat di Baitul Mal, Melek Al quran, Manajemen Mesjid, Hukum Jinayat dan Akhlak. Adapun Indeks Pembangunan Syariah Kota Lhokseumawe tahun 2024 sebesar 83,91 dengan skor masing-masing dimensi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.208

Dimensi Indeks Pembangunan Syariah
Kota Lhokseumawe Tahun 2021 dan 2024-2025

No	Dimensi IPS	2021	2024	2025
1	Akidah	95.83	85,74	85.94
2	Lembaga Keuangan Syariah	79.15	85.97	81.23
3	Kepatuhan membayar Zakat di Baitul Mal	77.12	85.81	81.41
4	Melek Al Quran	87.59	84.56	73.33
5	Manajemen Mesjid	79.15	82.90	81.96
6	Hukum Jinayat	73.03	79.60	79.78
7	Akhlak	88.01	82.76	84.93
8	Kesadaran dan Ketaatan menjalankan Syariat Islam	-	-	75.00
9	Ketahanan Keluarga	-	-	82.75
10	Pembinaan Muallaf, Anak Yatim, dan Fakir Miskin	-	-	76.94
Indeks Pembangunan Syariah		80,65	83,91	80,11

Sumber : Dinas Syariat Islam Aceh, 2026



2. Pendidikan Dayah

Pemerintah Aceh terus berupaya dalam meningkatkan jumlah dayah yang berstandar dan terakreditasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu dayah dalam berbagai aspek, baik itu kurikulumnya, fasilitas sarana dan prasarana maupun para tenaga pendidik. Tahun 2021 Gubernur Aceh telah menetapkan/mengangkat anggota Majelis Akreditasi Dayah yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan akreditasi dayah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani akreditasi dayah, menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengembangan sistem akreditasi dayah serta menetapkan prosedur, mekanisme dan tahapan pelaksanaan akreditasi dayah dengan harapan kedepannya dayah-dayah yang terakreditasi di Aceh bisa lebih meningkat.

Tabel 2.209
Jumlah Dayah Terakreditasi Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Dayah	Dayah				
			Tipe A+	Tipe A	Tipe B	Tipe C	Tipe D (Non Tipe)
1	2021	55	1	5	8	27	12
2	2022	55	1	5	8	27	12
3	2023	60	1	5	11	27	16
4	2024	60	1	5	11	27	16
5	2025	64	1	4	7	25	27

Sumber : Dinas Syariat Islam, 2026

Jumlah Dayah terakreditasi berdasarkan tipe datah di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan pada tahun 2021 jumlah dayah terakreditasi sebanyak 55 dayah dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 60 dayah dengan tipe A plus sebanya 1 dayah, tipe A sebanyak 5 dayah , tipe B sebanyak 11 dayah, tipe C sebanyak 27 dayah dan tipe D (non tipe) sebanyak 16 dayah.

3. Baitul Mal

Lahirnya Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 17 Januari 2008 tentang Baitul Mal sebagai turunan dari UUPA dimana di dalam pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa Baitul Mal adalah lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Fungsi dan kewenangan Baitul Mal tercantum dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 pasal 8 ayat 1 yaitu mengurus dan mengelola zakat, wakaf dan harta agama, melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat; melakukan sosialisasi zakat, wakaf, dan harta agama lainnya, menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hokum. Instrument harta agama ini memiliki nilai yang cukup strategis dalam pemberdayaan ummat.



Tabel 2.210
Pendapatan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah
Tahun 2021-2025

No	Tahun	Pendapatan ZIS	Persentase Peningkatan ZIS	Penyaluran ZIS
1	2021	6.862.200.359	(10.26)	6.815.193.600
2	2022	7.009.819.033	2.15	8.449.648.975
3	2023	6.726.500.196,23	(4.04)	6.714.100.000
4	2024	7.296.324.646,79	8.47	6.883.851.000
5	2025	4.607.658.256	(36.85)	5.749.685.000

Sumber : Sekretariat Baitul Mal, 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat pendapatan ZIS Kota Lhokseumawe fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2022 ZIS mengalami peningkatan dari tahun 2021, namun pada tahun 2023 sedikit menurun. Hal ini disebabkan ZIS Kota Lhokseumawe sangat bergantung kepada pendapatan ASN setiap tahunnya. Sedangkan untuk penyaluran ZIS tahun 2022 melebihi pendapatan ZIS, hal ini disebabkan oleh terdapat sisa-sisa ZIS tahun sebelumnya yang tidak habis dibagikan, direalisasikan pada tahun selanjutnya. Tahun 2025 pendapatn ZIS menurun drastis sebesar 36.65%.

4. Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Aceh

Pembinaan adat istiadat dilaksanakan melalui sosialisasi dan pelatihan yaitu pembinaan Adat Seumapa/Nariet Maja dan Meunasib, sosialisasi adat istiadat, Pemasyarakatan Adat Doda Idi, Pembinaan Keluarga meuadab dan Adat Perkawinan serta Pembinaan Putroe Phang tentang adat perkawinan. Namun dengan keterbukaan dan kemajuan teknologi informasi serta media sosial sangat rentan mempengaruhi kehidupan adat istiadat masyarakat Aceh oleh budaya luar. Adapun pembinaan adat istiadat yang telah dilakukan melalui sosialisasi dan pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.211
Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat Tahun 2021-2025

No	Nama Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penguatan Peradilan Adat	-	-	50 Org	50 Org	20 Org
2	Pelaksanaan Peradilan Adat Gampong	-	-	-	-	-
3	Pelatihan Dalail Khairat dan Meurukon	-	-	-	-	-
4	Peradilan Adat Gampong Bagi Pelajar	-	-	-	-	
5	Sosialisasi Adat Istiadat	5 Sekolah 150 Org	5 Sekolah 150 Org	50 Org	30 Org	5 Sekolah 20 Org
6	Rapat Koordinasi Peradilan Adat Gampong	68 Desa	68 Desa	68 Desa	-	40 Org
7	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja	-	-	-	50 Org	27 Org
8	Pemasyarakatan Adat Do DA Idi	-	-	-	50 Org	20 Org



No	Nama Kegiatan	2021	2022	2023	2024	2025
9	Pembinaan Keluarga Meoadab dan Adat Perkawinan	-	-	-	-	32 Org
10	Publikasi Adat dan Adat Istiadat melalui Media Luar Ruang (Peusijuk)	-	-	-	-	8 Kali

Sumber : Sekretariat MAA Kota Lhokseumawe, 2026

Pembinaan dan pengembangan hukum adat untuk bertujuan penyelesaian sengketa adat yang terjadi dalam masyarakat secara adat seperti Perselisihan dalam rumah tangga, perselisihan antar warga, sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh, khalwat mesum, pencurian ringan dan lain sebagainya.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Tahun 2025 dan Realisasi RPJMK sampai dengan Tahun 2025

2.2.1. Capaian Indikator Makro Kota Lhokseumawe

Penetapan indikator makro daerah bertujuan untuk memberi gambaran serta ukuran dalam pencapaian kinerja daerah. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, penurunan emisi GRK.

2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Selama lima tahun terakhir (2017-2022) pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe mengalami peningkatan yang fluktuatif dari waktu ke waktu terutama tanpa migas. Pertumbuhan ekonomi di target dalam RKPK Tahun 2024 ditargetkan sebesar 4,11 persen dan telah mencapai target sebesar 4,46 persen. Sedangkan untuk tahun 2025 target pertumbuhan ekonomi ditetapkan dalam RKPK Tahun 2025 sebesar 4.40-4.50 dan tercapai sebesar 3,39 persen dari target yang telah ditetapkan, artinya pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari tahun lalu, hal ini disebabkan kombinasi inflasi tinggi (mencapai 4,32% pada Agustus 2025), perlambatan pendapatan asli daerah (PAD), serta dampak bencana hidrometeorologi. Faktor lain termasuk kontraksi sektor industri/pertambangan dan kebijakan belanja modal yang rendah (sumber BPS Lhokseumawe).

2.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Secara general pengangguran terbuka dapat didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe sudah mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai 2024. Pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 9,05 persen dan capaiannya sebesar 8,47 persen. Meskipun tingkat pengangguran Kota Lhokseumawe terus mengalami penurunan dari target RKPK namun

bila dibandingkan dengan aceh dan nasional masih tinggi, perlu upaya keras Pemerintah Kota Lhokseumawe dan semua pihak untuk menyelesaikan masalah pengangguran. Untuk Tahun 2025 tingkat pengangguran ditetapkan dalam RKPK sebesar 7,98 – 7.48 dan mengalami peningkatan dari target yang telah ditetapkan yaitu menjadi 8,24 persen namun bila dilihat dari pencapaian tahun 2024 mengalami penurunan.

2.2.1.3. Rasio Gini

Rasio gini merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan atau kekayaan di suatu wilayah atau populasi. Rasio gini berkisar antara 0 hingga 1, dimana 0 menunjukkan kesetaraan sempurna dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. Rasio gini Kota Lhokseumawe dari tahun 2021-2023 masih dibawah 0,4 yang berarti ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tergolong rendah. Untuk capaian rasio gini tahun 2024 sebesar 0,326. Pada tahun 2025 Rasio Gini yang ditetapkan dalam P RKPK sebesar 0,293 kemudian untuk capaian 2025 sebesar 0,344 dari target 0,293. Dari target mengalami kenaikan dan dari tahun 2024 juga mengalami kenaikan ketimpangan salah satunya disebabkan, Infrastruktur yang Belum Merata, fokus pemko masih pada pembangunan infrastruktur strategis untuk mengurangi ketimpangan wilayah, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan sarana dan prasarana masih terjadi antara kawasan tertentu, kemudian Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan: Meskipun ada penurunan angka kemiskinan, isu pengangguran terbuka akibat penyerapan tenaga kerja yang belum maksimal di sektor formal masih menjadi tantangan yang memengaruhi distribusi pendapatan dan inflasi Komoditas: Adanya peningkatan inflasi year-on-year (y-on-y) di Kota Lhokseumawe (seperti tercatat 5,56 persen pada Desember 2025), yang seringkali lebih berat dampaknya bagi kelompok pendapatan rendah dibandingkan pendapatan tinggi, sehingga melebarkan jarak ketimpangan.

2.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM juga merupakan penentu peringkat atau level pembangunan suatu wilayah. Selain itu IPM juga merupakan data strategis karena sebagai ukuran kinerja pemerintah, dalam RKPK Tahun 2024 ditetapkan sebesar 78,9 persen dan telah tercapai di tahun 2024 sebesar 80,89 persen, ini artinya IPM Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan dan dibandingkan dengan aceh dan nasional, IPM Kota Lhokseumawe masih lebih tinggi. IPM Kota Lhokseumawe tahun 2025 ditargetkan sebesar 81,65-83,65 dan telah tercapai sebesar 81,75, naik dari tahun 2024 dan target dalam RKPK Lhokseumawe tahun 2025.

2.2.1.5. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe terus mengalami penurunan sejak tahun 2021-2024, terakhir di tahun 2024 tingkat kemiskinan sebesar 10,44 mengalami penurunan dari target yang ditetapkan sebesar 10,74 persen.



Sedangkan pada RKPK Tahun 2025 tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe ditarget sebesar 10,33-10,13 persen dan mengalami penurunan dari target yang telah di tetapkan menjadi 9,01 persen. Untuk target dan capaian indikator makro lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.212
Target dan Capaian Indikator Makro Kota Lhokseumawe
Tahun 2025

No	Indikator	Tahun 2024 Baseline	Tahun 2025	
			Target	Capaian
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,46	4.40-4.50	3,39
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,47	7,98-7,48	8,24
3	Rasio Gini	0,326	0,293	0,344
4	Indeks Pembangunan Manusia	80,89	81,65 - 83,65	81,75
5	Tingkat Kemiskinan (%)	10,44	10.33-10.13	9,01

Sumber : RKPK Tahun 2025 dan BPS Kota Lhokseumawe 2025

Dari capaian indikator makro Kota Lhokseumawe Tahun 2025 masih banyak yang tidak tercapai sesuai target yang telah di tetapkan dalam RKPK 2025 diantaranya pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan rasio gini.

2.2.2. Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan

Secara umum, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe masih bertumpu pada Pendapatan Transfer dengan kisaran 86,9 persen, sedangkan PAD hanya menyumbang sebesar 10,9 persen dan Lain-lain Pedapatan daerah yang sah menyumbang sebesar 2,2 persen lebih Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Lhokseumawe masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya.

2.2.2.1. Realisasi Pendapatan

Pendapatan Kota Lhokseumawe dalam P-RKPK Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp825.812.911.627.32 dan telah tercapai sebesar Rp794.849.026.863,17 atau sebesar 96,3 persen dari target yang telah di tetapkan dalam P- RKPK Tahun 2025. Capaian Realisasi terbesar yaitu pada objek pendapatan tranfer sebesar 97,3 persen dari target yang telah di tetapkan pada P-RKPK Tahun 2025 kemudian pada lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 92,0 persen dari target yang telah ditetapkan dalam P-RKPK dan kemudian pada pendapatan asli daerah tercapai sebesar 88,6 persen dari target yang telah di tetapkan. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.213
Capaian Pendapatan Tahun 2025 Semester 2 terhadap
Target P-RKPK Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	RKPK 2025	P RKPK 2025	REALISASI 2025	Capaian Realisasi terhadap target RKPK 2025 (%)
1	2	3	4	5	6= (5/ 4) * 100
4	PENDAPATAN DAERAH	816.384.456.234	825.812.911.627,32	794.849.026.865,17	96,3%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	72.381.799.031	90.154.073.340	79.919.099.158,17	88,6%
4.1.01	Pajak Daerah	40.610.299.031	61.065.908.796	62.741.065.750	102,7%
4.1.02	Retribusi Daerah	3.451.500.000	3.566.500.000	2.803.341.402	78,6%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.500.000.000	14.822.175.116	4.928.391.225	33,3%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	12.820.000.000	10.699.489.428,32	9.446.300.781,17	88,3%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	730.656.039.360	717.644.889.552	698.358.088.863	97,3%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	655.218.442.940	690.836.560.000	635.638.922.698	92,0%
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur		34.385.907.000		0,0%
4.2.01.05	Dana Desa	60.415.070.000	60.814.139.000	52.451.077.418	86,2%
4.2.01.06	Insentif Fiskal	-	7.385.226.000	7.385.226.000	100,0%
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	19.384.221.000	20.977.415.000	22.176.741.000	105,7%
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	471.706.718.940	463.323.358.000	453.532.225.134	97,9%
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	103.712.433.000	103.950.515.000	100.093.653.146	96,3%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	75.437.596.420	26.808.329.552	62.719.166.165	234,0%
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	75.437.596.420	24.403.444.216	25.958.051.440	106,4%
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.560.043.420	24.403.444.216	25.958.051.440	106,4%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan		2.404.885.336	36.761.114.725	0,00%
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi		2.204.885.336	36.761.114.725	0,00%
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota		200.000.000	-	0,00%
	Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)	34.877.553.000	-	-	0,00%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.346.617.843	18.013.948.735,00	16.571.838.844	92,0%
4.3.02	Dana Darurat		4.000.000.000	5.800.000.000	145,0%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	13.346.617.843	14.013.948.735	10.771.838.844	76,9%
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	13.346.617.843	14.013.948.735	10.771.838.844	76,9%
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	13.346.617.843	14.013.948.735	10.771.838.844	76,9%

Sumber : P RKPK Tahun 2025 dan LRA Tahun 2025*)
) unaudited



2.2.2.2. Realisasi Belanja

Belanja Daerah yang ditargetkan dalam P RKPK Tahun 2025 sebesar Rp837.447.857.636,65 dan telah tercapai sebesar Rp760.165.589.237,10 atau sebesar 90,8 persen, anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program yang terbagi dalam pada 34 perangkat daerah di Kota Lhokseumawe. Realisasi terbesar berasal dari belanja daerah pada Belanja Modal yang terserap sebesar Rp.74.558.049.324 atau 92,7 persen dari target dalam P-RKPK sebesar Rp80.402.842.084 kemudian pada belanja operasi ditargetkan dalam P-RKPK Tahun 2025 Rp627.918.574.020,65 dan tercapai sebesar Rp579.206.471.122,10 atau sebesar 92,2 persen dari target yang telah ditetapkan dalam P-RKPK Tahun 2025 selanjutnya belanja transfer tercapai sebesar Rp106.010.779.827,00 atau sebesar 85,4 persen dari target yang telah ditetapkan dalam P-RKPK Tahun 2025 sebesar Rp124.182.355.196,00. Dan pada Kemudian belanja tidak terduga tercapai sebesar Rp 390.288.964 atau tercapai sebesar 7,9 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp4.944.086.336,00. dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.214
Capaian Belanja Tahun 2025 Semester 2 terhadap
Target P RKPK Tahun 2025

Kode Rekening	URAIAN	RKPK 2025	P-RKPK 2025	REALISASI 2025	Capaian Realisasi terhadap RKPK Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6 =(5/4)*100 %
5	BELANJA DAERAH	816.384.456.234	837.447.857.636,65	760.165.589.237,10	90,8%
5.1	BELANJA OPERASI	599.279.401.985	627.918.574.020,65	579.206.471.122,10	92,2%
5.1.01	Belanja Pegawai	379.621.372.711	411.696.253.518,85	379.803.152.111,00	92,3%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.611.656.124	187.906.716.615,80	172.450.479.788,10	91,8%
5.1.04	Belanja Subsidi	483.000.000	1.021.000.000,00	1.021.000.000,00	100,0%
5.1.05	Belanja Hibah	6.249.467.180	12.419.474.218,00	12.236.172.770,00	98,5%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	28.313.905.970	14.875.129.668,00	13.695.666.453,00	92,1%
5.2	BELANJA MODAL	94.327.685.129	80.402.842.084	74.558.049.324	92,7%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.498.610.094	28.431.436.290	25.979.699.630	91,4%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.874.578.023	20.737.620.505	19.538.032.588	94,2%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.982.182.380	26.184.457.089	24.008.203.106	91,7%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.972.314.632	5.049.328.200	5.032.114.000	99,7%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3.981.680.998	4.944.086.336	390.288.964	7,9%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3.981.680.998	4.944.086.336	390.288.964	7,9%
5.4	BELANJA TRANSFER	118.795.688.122	124.182.355.196	106.010.779.827	85,4%



Kode Rekening	URAIAN	RKPK 2025	P-RKPK 2025	REALISASI 2025	Capaian Realisasi terhadap RKPK Tahun 2025 (%)
1	2	3	4	5	6 =(5/4)*100 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.568.178.722	7.673.546.069	4.629.066.309	60,3%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	108.227.509.400	116.508.809.127	101.381.713.518	87,0%

Sumber : P RKPK Tahun 2025 dan LRA Tahun 2025*)

*)Unaudited

2.2.2.3. Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan Daerah berasal dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Pembiayaan Kota Lhokseumawe yang telah di targetkan dalam P RKPK Tahun 2025 sebesar Rp11.634.946.009,00 yang berasal dari penerimaan pembiayaan Rp12.634.946.009,00 dan pengeluaran pembiayaan Rp1.000.000,00. Pada tahun 2025 penerimaan pembiayaan Kota Lhokseumawe yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu terealisasi sebesar Rp12.634.946.009,35 atau tercapai sebesar 100,0 persen. Dan untuk penyertaan modal belum ada realisasi. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai realisasi pembiayaan dimaksud, dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2.215
Capaian Pembiayaan Tahun 2024 terhadap
Target P RKPK Tahun 2024

Kode Rekening	URAIAN	Target P -RKPK	REALISASI 2024 Semester 2	Capaian terhadap P RKPK (%)
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH	11.634.946.009	12.634.946.009,35	108,6%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	12.634.946.009	12.634.946.009,35	100,0%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	12.634.946.009	12.634.946.009,35	100,0%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000	0,00	0,0%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000	0	0,0%
	PEMBIAYAAN NETTO	11.634.946.009	12.634.946.009,35	108,6%

Sumber : RKPK Tahun 2025 dan LRA Tahun 2025*)

*)Unaudited

2.2.3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan

2.2.3.1. Metode Evaluasi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Tujuan evaluasi hasil RKPK adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPK dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Evaluasi hasil RKPK dilaksanakan setiap semester oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja SKPK. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala SKPK wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja SKPK setiap semester berdasarkan realisasi DPA SKPK. Evaluasi Hasil RKPK

- a. Bappeda melakukan Evaluasi Hasil RKPK setiap semester berdasarkan Hasil Evaluasi Renja SKPK yang dilaporkan/disampaikan Kepala SKPK.
- b. Evaluasi Hasil RKPK selanjutnya digunakan untuk penyusunan Perubahan RKPK Tahun Berjalan atau RKPK Tahun berikutnya.
- c. Formulir Evaluasi Hasil RKPK Provinsi/Kabupaten/Kota adalah seperti dapat dilihat pada tabel 4.4 yang menyerupai Formulir Evaluasi Hasil Renja.

Untuk lebih jelas mengenai mekanisme pengisian Evaluasi Hasil RKPK Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat dilihat sebagai berikut:

- Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud.
- Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

Skala Nilai Peringkat Kinerja Semester 1		Skala Nilai Peringkat Kinerja Semeter 2	
INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
45,5% ≤ 50%	Sangat tinggi	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
38% ≤ 45%	Tinggi	76% ≤ 90%	Tinggi
33% ≤ 37,5%	Sedang	66% ≤ 75%	Sedang
25,5% ≤ 32,5%	Rendah	51% ≤ 65%	Rendah
≤ 25%	Sangat Rendah	≤ 50%	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Khusus Untuk Evaluasi hingga semester 1, nilai capaian kinerja K dan Rp. Harus dikalikan 2 terlebih dahulu sebelum melihat skala penilaian kinerja.

Catatan :

1. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan atas pelaksanaan RKPK pada triwulan I dan triwulan II, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPK untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda provinsi/kabupaten/kota dengan melakukan perubahan RKPK.
2. Dalam hal dilakukan perubahan RKPK, data dan informasi pada Kolom (7) disesuaikan dengan data dan informasi yang tercantum dalam perubahan RKPK.

Setelah Formulir Evaluasi Hasil RKPK diisi, maka diketahuilah tingkat capaian kinerja untuk masing-masing program, masing-masing urusan maupun masing-masing SKPK.

2.2.3.2. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran

2.2.3.2.1. Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam RPK 2023-2026 dan telah diubah dalam Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024 terdapat 32 Indikator kinerja utama, diantaranya 6 Indikator Tujuan dan 26 Indikator sasaran. Dari 32 Indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat sebanyak 48,5 persen indikator yang telah tercapai, 36,4 persen indikator yang tidak tercapai dan 12,1 persen indikator dalam proses penilaian.

Selanjutnya capaian kinerja utama yang telah ditetapkan dalam RKPK 2025 sebanyak 33 indikator diantaranya 6 Indikator Tujuan dan 27 Indikator sasaran. Dari 33 Indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat sebanyak 42,4 persen indikator yang telah tercapai, 45,5 persen indikator yang tidak tercapai dan 12,1 persen indikator dalam proses penilaian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.216
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target dan Capaian 2025						Keterangan	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
						RPD 2025	Perubahan Target 2025 RPD	Target RKPK 2025	Capaian 2025	Status				
										Perubahan 2025 RPD	RKPK 2025			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
1.	Tujuan 1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi		Kategori/ Poin	Proses	CC 51.00	CC 60.01	B 60.01	-	K	K		CC 62.00	SETDAKO
1.1	Sasaran : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	1	Nilai LPPD Kota	Kategori/ Poin	Tinggi 3,4290	Sangat Tinggi 4,22	Sangat Tinggi 4,22	Sangat Tinggi 4,22	-	K	K		Sangat Tinggi 4,25	SETDAKO
		2	Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori/ Poin	CC 55.50	B 61.00	B 61.00	B 61.00	B 61.76	H	H		B 61.50	SETDAKO, BAPPEDA
		3	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	Proses	WTP	WTP	WTP	-	K	K	Blm dilakukan Pemeriksaan oleh BPK	WTP	BPKD, INSPEKTORAT
		4	Tingkat Maturitas SPIP Terintegrasi	Level	Level 3	-	Level 3	Level 3	Level 3	H	H		Level 3	BPKD, INSPEKTORAT
		5	Tingkat Manajemen Risiko	Level	Level 3	-	Level 3	Level 3	Level 3	H	H		Level 3	BPKD, INSPEKTORAT



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target dan Capaian 2025						Keterangan	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
						RPD 2025	Perubahan Target 2025 RPD	Target RKPK 2025	Capaian 2025	Status				
										Perubahan 2025 RPD	RKPK 2025			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
		6	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik	Kategori/ Poin	B 82.52	A 89.31	A 89.31	A 89.31	B 87,50	M	M	Tidak tercapainya target nilai SKM disebabkan masih adanya indikator pelayanan yang belum optimal, keterbatasan sarana prasarana pendukung, serta belum konsistennya penerapan standar pelayanan dan peningkatan kompetensi aparatur di seluruh unit pelayanan.	A 89.81	SETDAKO, BAPPEDA (LITBANG), DISDUKCAPIL, SETWAN, KOMINFO, BKPSDM, PERPUS, KESBANGPOL, 4 KEC, DPMG, PERTANAHAN, DP3AP2KB (PP), SATPOL PP DAN WH, BPBD
2.	Tujuan 2 Memperkuat pelaksanaan syariat islam		Indeks Pembangunan Syariat Islam	Indeks	80,65	80,95	80,95	80,95	80,11	M	M	Tidak mencapai terget, Pada tahun 2025, DSI Aceh melakukan penambahan pengukuran IPS menjadi 10 indikator	81,00	DSI, MPU, BAITUL MAL



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target dan Capaian 2025						Keterangan	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
						RPD 2025	Perubahan Target 2025 RPD	Target RKPK 2025	Capaian 2025	Status				
										Perubahan 2025 RPD	RKPK 2025			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
2.1	Sasaran : Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat	7	Persentase Penegakan Pelanggaran Syariat Islam Dalam Bermasyarakat	Persen	100	-	100	100	69	M	M	Rumus tersebut dinilai tidak valid karena tidak menggunakan pembanding yang jelas dan konsisten, sehingga hasil pengukuran tidak mencerminkan target yang diharapkan.	100	DSI, MPU
		9	Persentase Penerima ZIS	%		-	12,00	14,50	100,00	H	H		11,75	BAITUL MAL
2.2	Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya	10	Persentase Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah	Persen	50,00	61,54	59,09	59,09	0,00	M	M	dibutuhkan SK Wali Kota, namun terkendali keterbatasan anggaran untuk penetapan cagar budaya	68,18	PK, MAA
3.	Tujuan 3 Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,57	77,73	81,65	81.65-83.65	81,75	H	H		77,75	BPS, PK, PP, DINKES
3.1	Meningkatnya kualitas pendidikan	11	Harapan lama sekolah	Tahun	15,21	15,24	15,24	15.92	15,56	H	M	Tidak mencapai target karena target Harapan Lama Sekolah di Tahun 2024 adalah 15.24	15,25	PK, MPD



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target dan Capaian 2025					Keterangan	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data	
						RPD 2025	Perubahan Target 2025 RPD	Target RKPK 2025	Capaian 2025	Status				
										Perubahan 2025 RPD				RKPK 2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
											dan mencapai realisasi 15.56 namun pada tahun 2025 target yang ditetapkan terlalu tinggi yaitu 15.92 sedangkan yang terealisasi hanya 15.56 terdapat selisih 0.36 biasanya kenaikan pertahun ditetapkan hanya sekitar 0.01 - 0.02			
		12	Rata-Rata lama sekolah	Tahun	11,10	-	11,15	11.50	11,64	H	H	Melebihi target karena Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal yang mencerminkan bahwa jumlah penduduk usia 15 tahun keatas di Kota	11,16	PK, MPD



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target dan Capaian 2025						Keterangan	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
						RPD 2025	Perubahan Target 2025 RPD	Target RKPK 2025	Capaian 2025	Status				
										Perubahan 2025 RPD	RKPK 2025			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
												Lhokseumawe yang menempuh pendidikan semakin meningkat		
3.2	Meningkatnya kualitas generasi muda	13	Persentase Pemuda Berprestasi dan Atlit Berprestasi	%	80,2%	-	59,1%	65.20	42,0%	M	M		76,4%	DISPORAPAR
3.3	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	14	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,64	71,72	74,95	74,94	75,29	H	H		75.00	BPS, DINKES
4.	Tujuan 4 Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	63,7	65,8	65,80	65.80		K	K		66,25	DLH
4.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	15	Indek Kuaitas Air	Nilai	55	-	58	61,23	75,61	H	H		59	DLH
		16	Indeks Kualitas Udara	Nilai	91	-	94	94,00	82,03	M	M		95	DLH
		17	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	22	-	25,00	25,00	45,17	H	H		26	DLH
			Persentase RTH Publik			2,69	-	2,69		P	M			



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target dan Capaian 2025						Keterangan	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
						RPD 2025	Perubahan Target 2025 RPD	Target RKPK 2025	Capaian 2025	Status				
										Perubahan 2025 RPD	RKPK 2025			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
5.	Tujuan 5 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing		Persentase Pertumbuhan Ekonomi	Persen	1,98	3,65	4,40	4,40-4.50	3,39	M	M		3,70	BPS
5.1	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi	18	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Rp. Miliar	3.403	3.612	500	500	1.306	H	H	Realisasi investasi meningkat disebabkan karena bertambahnya kegiatan usaha pada beberapa sektor strategis Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDM) dan Penanam Modal Asing (PMA)	525	DPMPTSP NAKER
		19	Jumlah Investor (PMDN/ PMA)	Perusahaan	432	492	492	492	695	H	H	Terjadi Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDM dan PMA karena adanya konsistensi pemerintah dalam hal peningkatan nilai dan daya tarik investasi.	512	DPMPTSP NAKER



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target dan Capaian 2025						Keterangan	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
						RPD 2025	Perubahan Target 2025 RPD	Target RKPK 2025	Capaian 2025	Status				
										Perubahan 2025 RPD	RKPK 2025			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
5,2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	20	Tingkat kemiskinan	Persen	11,16	11,05	10,33	10,33	9,01	H	H		10,13	BPS, DINSOS
5,4	Meningkatnya Kesempatan Kerja	21	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	11,16	11,06	7,98	7,98-7,48	8,24	M	M	Persentase TPT mengikuti data BPS yang didapatkan berdasarkan hasil survey kepada sejumlah responden yang telah ditentukan melalui Sakernas. Persentase TPT biasanya dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Namun dibandingkan tahun sebelumnya, TPT tahun 2025 mengalami penurunan yang menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi	7,48	BPS, DMPTSP



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target dan Capaian 2025						Keterangan	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
						RPD 2025	Perubahan Target 2025 RPD	Target RKPK 2025	Capaian 2025	Status				
										Perubahan 2025 RPD	RKPK 2025			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
												kearah yang lebih baik di Kota Lhokseumawe.		
5,5	Meningkatnya Daya Saing Daerah	22	PDRB Perkapita	Rp. (Juta)	33,20	33,39	59,08	59,08	62,54	H	H		59,80	BPS, DKPPP, DISPORAPAR (PARIWISATA)
5,6		23	Laju Inflasi	Persen	1,97	2,07	1,35	1,35	5,56	M	M		1,20	BPS, DISPERINDAG KOP &UKM
6.	Tujuan 6 Meningkatkan infrastruktur berkualitas		Cakupan Ketersediaan Infrastruktur Berkualitas	Persen	32,74	37,73	37,73	37,73	29,85	M	M	berkurangnya sumber dana transfer daerah (DOKA, DAK)	39,56	PUPR
6.1	Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas	24	Persen Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen	65,05	75,19	75,19	75,19	59,54	M	M	tidak ada pembangunan jalan DAK (defisit anggaran)	78,91	PUPR
6,2		25	Persentase lingkungan permukiman kumuh	Persen	0,43	0,27	0,27	0,27	0,16	H	H	Target program/kegiatan belum tercapai akibat keterbatasan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terbatas dan belum optimal.	0,21	PUPR



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal (2021)	Target dan Capaian 2025						Keterangan	Kondisi Akhir	Perangkat Daerah / Sumber Data
						RPD 2025	Perubahan Target 2025 RPD	Target RKPK 2025	Capaian 2025	Status				
										Perubahan 2025 RPD	RKPK 2025			
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)
		26	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen	47,80	67,80	67,80	98,00	79,07	H	M	masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengajuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	74,47	PUPR
		27	Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan	Indeks	-	-	0,50	0,50	0,48	M	M	Tidak tercapainya target disebabkan masih adanya keterbatasan sarana prasarana pendukung, serta terjadinya efesiensi anggaran di seluruh unit pelayanan.		DISHUB

Sumber : Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024



2.2.3.2.2. Hasil Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam RPK 2023-2026 dan telah diubah dalam Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024, terdapat 62 Indikator kinerja utama perangkat daerah. Secara garis besar indikator yang telah mencapai target sebesar 51,6 persen atau sebanyak 32 indikator, kemudian sebanyak 46,8 persen atau sebanyak 29 indikator tidak mencapai target dan sebanyak 1,6 persen atau sebanyak 1 indikator dalam proses perhitungan yaitu nilai kapabilitas APIP. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel. 2.217
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2025

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja dan capaian OPD			Keterangan	Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2025				
						Target	Capaian	Status		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
1	Tujuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik									
1	Setdako	Meningkatnya kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase peningkatan kualitas kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah	%	95,99	99,13	90,39	M	Capaiannya belum memenuhi target karena ada beberapa jumlah kebijakan pada Bagian PBJ tidak tersusun sesuai target	99,13
		Meningkatkan kualitas layanan kemasyarakatan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B 82.52	A 89.31	A 89.71	H	Peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe dipengaruhi oleh perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan, antara lain melalui penyederhanaan prosedur layanan, peningkatan kompetensi aparatur, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan koordinasi antarbagian	A 89.81
2	Bappeda	Meningkatnya kualitas kinerja perencanaan pembangunan daerah	Nilai SAKIP Kota Lhokseumawe untuk komponen perencanaan kinerja	Nilai	20,22	22		M	Menunggu hasil Evaluasi dari Kemenpan RB	
			Persentase konsistensi dokumen perencanaan	%	100	100	100	H		100
		Meningkatnya Inovasi daerah	indeks inovasi daerah	satinov	10.60	39,54	29,68	M	Jumlah Inovasi OPD tidak mencapai target	40,33



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja dan capaian OPD			Keterangan	Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2025				
						Target	Capaian	Status		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
3	Inspektorat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Persenatse Nilai SAKIP OPD Kategori Baik	%	70	92	97	H		100
			Persentase Kapatuhan OPD terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah	%	72,72	88	82,31	M	- Terdapat rekomendasi TL BPK yang belum ditindaklanjuti - Terdapat eviden yang masih dalam proses penyusunan	94
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan APIP yang efektif	Nilai Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	-	K	Dalam proses penilaian	Level 3
4	BPKD	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah	%	84,25	100,00	106,30	H	Ini dikarenakan oleh Realisasi PAD yang melebihi target, adanya pemukhtahiran data dan menggali potensi pajak dari segi PBB, air tanah, hotel, hiburan dan restoran serta opsen PKB dan BBNKB dimana kita berharap ke depannya wajib pajak lebih taat lagi dlm membayar pajak dan retribusi	100,00
5	DISDUKCAPIL	Meningkatnya pelayanan adminsitrasi kependudukan dan catatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B 82.52	A 89.31	A 89,92	H	Hasil ini mencerminkan komitmen tinggi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, pelaksanaan standar pelayanan yang efektif, serta respons positif masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.	A 89.81
6	SETWAN	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK	Persentase penigkatan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK	%	70,59	90,91	87,50	M	Sesuai dengan daftar penetapan Ranc. Proleg DPRK 2025 (sumber data Bag. Peridangan dan Per-UU-ngan) dan Sesuai dengan data pada Bag. Fasilitas Penganggaran dan Pengawasansan)	91,67



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja dan capaian OPD			Keterangan	Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2025				
						Target	Capaian	Status		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
7	KOMINFO	Meningkatnya informasi daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B 82.52	A 89.31	A	H		A 89.81
8	BKPSDM	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase fasilitasi pelayanan Administrasi kepegawaian	%	52,19	54,02	66,83%	H		54,94
9	DISPUSIP	Meningkatnya minat baca masyarakat	masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan	%	1,78	2,02	10,92	H		2,14
10	KESBANGPOL	Meningkatnya penyelesaian konflik sosial	Persentase peningkatan penyelesaian konflik sosial	%	0	59,29	2,34	M		60,14



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja dan capaian OPD			Keterangan	Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2025				
						Target	Capaian	Status		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
11	DPMG	Meningkatnya pembinaan penyelelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa	%	57,61	81,84	66,65	M	1) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Pemerintah Gampong belum menyusun APBG Tahun Anggaran 2025 disebabkan belum adanya Qanun tentang APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 dan Perwal tentang Penjabaran APBK Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 , sehingga Perwal Juknis APBG Tahun Anggaran 2025 belum bisa ditetapkan oleh Wali Kota Lhokseumawe sebagai dasar hukum penyusunan APBG Tahun Anggaran 2025; 2) Sisa Dana Desa yang tidak tersalurkan dikarenakan tidak dibayarkannya Dana Non Earmark Tahap 2 untuk 60 Gampong oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan sisa dari Kurang bayar ADG Tahun 2019-2021, BHPD dan BHRD Tahun 2021 menjadi pagu tambahan pada Triwulan IV, namun tidak dapat disalurkan ke gampong oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.	98,75
12	PERTANAHAN	Meningkatnya kinerja layanan pertanahan	Persentase Lahan bersertifikat milik pemerintah daerah	%	0,51	0,63	2,81	H		0,67
13	DP3AP2KB	Meningkatnya Produktivitas terhadap Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	77,57	95	96,59	H		95



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja dan capaian OPD			Keterangan	Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2025				
						Target	Capaian	Status		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
		Menurunnya Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Prevelensi kekerasan terhadap perempuan	%	0,24	0,06	0,06%	H		0,06
			Prevelensi kekerasan terhadap anak	%	0,12	0,05	0,06%	M	Saat ini UPTD PPA sudah ada layanan pengaduan berbasis online jadi masyarakat dan dulunya tidak tau melaporkan jika terjadi kasus pada mereka SDH mulai menggunakan layanan pengaduan secara online (WA)	0,05
		Terkendalnya peningkatan penduduk secara signifikan	Persentase angka kelahiran	%	2,058	2,17		M		2,16
14	SATPOL PP DAN WH	Meningkatnya penanganan gangguan trantibum	Persentase penanganan gangguan trantibum	Persen	100	100	100	H		100
15	BPBD	Meningkatnya penanggulangan bencana	Persentase penanggulangan bencana	Persen	100	100	100	H		100
16	4 KECAMATAN	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B 82.52	A 89.31	A	H		A 89.81
2	Tujuan Memperkuat pelaksanaan syariat islam									
1	Dinas Syariat Islam	Meningkatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat	Persentase Penegakan Pelanggaran Syariat Islam Dalam Bermasyarakat		100	100	69	M	Rumus tersebut dinilai tidak valid karena tidak menggunakan pembanding yang jelas dan konsisten, sehingga hasil pengukuran tidak mencerminkan target yang diharapkan.	100



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja dan capaian OPD			Keterangan	Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2025				
						Target	Capaian	Status		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
2	Baitul Mal	Meningkatnya pengelolaan ZIS	Persentase Penerima ZIS	%		12,00	100%	H		11,75
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah	%	50	57,67	4,0	M	Belum ada SK Wali Kota	68,47
4	MAA	Meningkatnya Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh	Persentase Pelaksanaan Tradisi Adat Aceh	%	100	100	100	H		100
3	Tujuan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia									
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatnya kualitas pendidikan	Angka Kelulusan	Tahun	99	100	100	H		100
			Angka Partisipasi Kasar	%	100	100	99,49	M	kurangnya anak di luar usia sekolah yang ikut bersekolah	100
			Angka Partisipasi Murni	%	100	100	87,65	M	adanya ketidaksesuaian kelompok usia dari siswa yang bersekolah	100
			Angka Partisipasi Sekolah	%		100	98,17	M	terdapat anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan di luar Kota Lhokseumawe, ataupun mengikuti pendidikan di dayah	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman Budaya Lokal	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	50	55	44	M	dibutuhkan SK Wali Kota, namun terkendali keterbatasan anggaran untuk penetapan cagar budaya	55



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja dan capaian OPD			Keterangan	Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2025				
						Target	Capaian	Status		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
		berdasarkan Nilai-nilai syariat islam								
			Persentase Partisipasi Masyarakat terhadap Budaya Lokal	%	75	76	27	M	Tingginya angka pembanding	76
2	Dinas Kesehatan	Sasaran Meningkatnya Akses pelayanan kesehatan yang berkualitas	Persentase pelayanan capaian kesehatan yang memenuhi standar	%	86,41	100,00	99,8	M	Capaian Mencapai Target	100,00
			Persentase Balita Stunting	%	6,35	14	4,8	M	Capaian melebihi target karena keberhasilan dalam penanganan balita stunting sudah tepat sasaran	14
			Persentase Imunisasi Dasar Lengkap	%	53,72	63	61,3	M	Capaian tidak mencapai target karena masih ada orang tua yang belum memahami pentingnya imunisasi untuk pencegahan penyakit	65,02
		Meningkatnya Keselamatan Ibu,Bayi, Anak dan Reproduksi	Angka Kematian ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	per 100.000	77,88	147,46	181,7	M	Capaian tidak mencapai target karena ada ibu meninggal karena hipertensi, kejang, gagal jantung dan penyakit ginjal	146,66
			Angka Kematian Bayi Per 1000 Kelahiran Hidup	per 100.000	5,97	5,41	12,7	M	Capaian tidak mencapai target karena ada bayi yang lahir dengan berat badan lahir dibawah normal sehingga mengalami komplkasi pada organ pernafasan dan jantung yang mengakibatkan kematian, dan bayi yang mengalami komplikasi karena	5,13



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja dan capaian OPD			Keterangan	Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2025				
						Target	Capaian	Status		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
									kelainan bawaan dari ibu yang mengalami komplikasi	
			Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	per 100.000	4,93	5,9	12,7	M	Capaian tidak mencapai target karena perhitungan kematian balita termasuk kematian bayi	5,87
	DISPORAPAR	Meningkatnya Partisipasi dan Peran aktif pemuda dalam Pembangunan	Persentase Organisasi Pemuda yang aktif	%	100	100	100	H		100
		Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga pada even PORA	%	-	-	10 Cabor			
4	MPD	Terwujudnya pelayanan lembaga Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (Set. MPD) Kota Lhokseumawe yang Optima	Jumlah rumusan/ rekomendasi Majelis Pendidikan Daerah (Set. MPD) Kota Lhokseumawe yang menjadi kebijakan pemerintah Kota Lhokseumawe	rekomen dasi	2	2	2	H	Mencapai target karena setiap bidang sudah dapat merealisasikan secara optimal	2
4	Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup									
1	Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%		65,8	71,54	H		66
			Persentase RTH Publik	%		2.60	24,36	H		3.00



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja dan capaian OPD			Keterangan	Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2025				
						Target	Capaian	Status		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
			Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	%		90	90	H		95
5	Tujuan Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing									
1	DMPTSP dan Naker	Terciptanya Iklim Usaha Yang Kondusif dan Kemudahan Investasi	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	Rupiah (Milyar)	3,403	3,612	1.306	M	Terdapat perbedaan nilai target antara tabel Lampiran I (IKU Walikota) dan Lampiran II (IKU PD) pada SK Walikota No. 241 Tahun 2024, maka nilai target yang seharusnya 500 M menjadi 3,612 M merupakan kesalahan penulisan	3,684
			Investor (PMDN/ PMA) Kota Lhokseumawe	Perusahaan	432	492	695	H	Terjadi Peningkatan Jumlah Perusahaan PMDM dan PMA karena adanya konsistensi pemerintah dalam hal peningkatan nilai dan daya tarik investasi.	512
2	Dinsos	Menurunnya Angka Kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan	%	11,16	11,05	9,01	H		10,95
		Meningkatnya pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat	Indeks perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	%	67,47	68,51 %	161,71 %	H		68,60
3	DPMTSP Naker	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Tingkat pengangguran terbuka	%	11,16	11,06	8,24	H	Terdapat perbedaan nilai target antara tabel Lampiran I (IKU Walikota) dan Lampiran II (IKU PD) pada SK Walikota No. 241 Tahun 2024, maka nilai target yang seharusnya 7,98% menjadi	11,04



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja dan capaian OPD			Keterangan	Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2025				
						Target	Capaian	Status		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
									11,06% merupakan kesalahan penulisan	
4	DKP3	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Jumlah produksi perikanan	ton	13.661.026	13.934.246	11.767.626	M		14212931,12
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	Ketersediaan Pangan Utama	%	-	13,6115632	14,06859898	H		136128
			Jumlah Produksi Padi	Ton		7.589	9.894	H		7741
5	DISPORAPAR	Meningkatnya pertumbuhan kunjungan destinasi wisata	Persentase peningkatan kunjungan destinasi wisata	%	50,23	5	0,30	M		5
6	DISPRINDAGK OP	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Nilai PDRB Sektor perdagangan terhadap dasar harga berlaku	Rp/Trilyun	2.013	2.676	2.882	H	proyeksi kenaikan PDRB sebesar 4,67% dr tahun sebelumnya(Data BPS Belum Rilis)	2863,64
		Meningkatnya pertumbuhan UMKM	Omset bersih pelaku UMKM	Rp/Milyar	4.615	5.343	8.038	H		5609,9
		Meningkatnya pertumbuhan koperasi aktif	Volume usaha koperasi aktif	Rp/Milyar	15,4	17,83	15,068	M		18,72
		Meningkatnya kinerja sektor perindustrian	Nilai PDRB Sektor perindustrian terhadap dasar harga berlaku	Rp/Trilyun	1.787	2.446	2.071	M	proyeksi kenaikan PDRB sebesar 4,67% dr tahun sebelumnya(Data BPS Belum Rilis)	2616,96
6	Tujuan Meningkatkan infrastruktur berkualitas									
1	DINAS PUPR	Kualitas infrastruktur pekerjaan umum dan	Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	%	71,42	81,58	73,13	M	Beberapa kegiatan strategis belum berfungsi maksimal	85,31



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

No	Nama OPD	Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah (setelah Perubahan)	IKU OPD	Satuan	Kondisi Awal 2021	Target Kineja dan capaian OPD			Keterangan	Kondisi Kinerja s.d Tahun 2026
						2025				
						Target	Capaian	Status		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)
		penyelenggaraan penataan ruang meningkat								
			Indeks pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan tata ruang	%	47,8%	67,80 %	79,07%	H	Minimnya ketersediaan anggaran	74,47%
		Kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman meningkat	Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	%	51,22%	53,21 %	66,56%	H	Minimnya ketersediaan anggaran	55,29%
2	Dinas Perhubungan		Indeks Layanan Infrastruktur Perhubungan	%	0,37	0,50	0,48	M	Tidak tercapainya target disebabkan masih adanya keterbatasan sarana prasarana pendukung, serta terjadinya efesiensi anggaran di seluruh unit pelayanan.	0,50
7	Rata-rata persentase pencapaian program pada Seluruh perangkat daerah					100	64,95	M		

Sumber : Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024



2.2.3.2.3. Hasil Capaian Indikator Kinerja Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Indikator kinerja daerah merupakan indikator untuk mencapai target program yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah. Indikator kinerja daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam RPK 2023-2026 dan telah diubah dalam Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024, terdapat sebanyak 192 Indikator kinerja daerah. Untuk indikator yang telah mencapai target sebesar 66,7 persen atau sebanyak 128 indikator selanjutnya sebanyak 31,8 persen atau sebanyak 61 indikator tidak mencapai target dan 1,6 persen atau sebanyak 3 indikator masih dalam proses perhitungan.

Indikator Daerah yang telah ditetapkan dalam RKPK Tahun 2025 sebanyak 191 indikator kinerja, yang telah mencapai target sebesar 63,9 persen atau 122 indikator, selanjutnya sebanyak 34,0 persen atau 65 indikator tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan sebanyak 1,6 persen atau 3 indikator yang masih dalam proses perhitungan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.218
Indikator Kinerja Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2025

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022					Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status		(9)	(10)
										RPD	RKPD		
			TOTAL BELANJA DAERAH										
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										MPD
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H	Mencapai target karena jumlah dokumen yang tersedia sesuai dengan jumlah yang ditargetkan	MPD
1	01	08	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Persentase Sekolah yang Menerapkan Asessment Kompetensi Minimum (AKM)	Persen		94,02	100,00	100,00	H	H	Mencapai target karena seluruh sekolah sudah melaksanakan AKM	MPD
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										PK
1	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H		PK
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar	Persen		98,80	100,00	99,49	H	M		PK
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Kelulusan Dan Ketercapaian	Persen		100,00	100,00	100	H	H		PK



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022					Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status		(9)	(10)
										RPD	RKPD		
				Kurikulum di Satuan Pendidikan									
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru dan Tendik Yang Mendapatkan Pembinaan	Persen		91,94	91,94	5,25	M	M	kegiatan hanya dilaksanakan untuk kepala sekolah, dikarenakan keterbatasan anggaran	PK
1	01	05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Sekolah yang Memperoleh Izin	Persen		100	100	94	M	M	ada 1 sekolah yang tidak mendapatkan izin, karena tidak sesuai kriteria (tidak cukup peserta didik)	PK
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										DSI-PD
1	01	07	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Persentase Dayah dengan Type A	Dayah		10,26	15,26	7,81	M	M	Tidak mencapai target disebabkan oleh keterbatasan pemenuhan standar dan persyaratan klasifikasi Dayah Tipe A.	DSI-PD
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										DINKES
1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen	#DIV/0!	100	100	100	H	H	Capaian Mencapai Target	DINKES
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	Persen	#DIV/0!	100,00	100,00	99,8	M	M	Capaian Mencapai Target	DINKES
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Persen	#DIV/0!	5,41	12,00	12,79	H	H	Capaian Melebihi Target	DINKES
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan	Persen	#DIV/0!	100,00	100,00	100,00	H	H	Capaian Mencapai Target	DINKES



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status	(9)	(10)	
											RPD	RKPD		
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persen	#DIV/0!	93,17	93,17	95,54	H	H		Capaian Melebihi Target	DINKES
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG											PUPR
1	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H			PUPR
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Persen		59,46	92,31	78,13	M	H		Karena adaya bencana alam Hidrometrologi yang terjadi pada akhir tahun 2025	PUPR
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	Persen		23,10	23,10	20,00	M	M		Karena Belum Berfungsinya SPAM PT. TOYA PERDANA	PUPR
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen		74,21	74,21	74,16	M	M		Tidak ada Kegiatan Sanitasi di Tahun 2025	PUPR
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Persen		78,22	85,22	85,75	M	H		Karna adanya pemeliharaan dan pembangunan drainase di Tahun 2025	PUPR
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase penataan bangunan gedung	Persen		7,69	7,69	7,69	H	H			PUPR
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	Persen		75,19	75,19	59,54	M	M		tidak ada pembangunan jalan DAK (defisit anggaran)	PUPR



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status		(9)	(10)
										RPD	RKPD		
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Persen		67,8	98,00	79,07	M	H	masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengajuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	PUPR
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										PUPR
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rasio rumah layak huni	Persen		69,88	69,88	29,84	M	M	Target program/kegiatan belum tercapai akibat keterbatasan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terbatas dan belum optimal.	PUPR
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	Persen		0,27	0,27	0,16	H	H	Target program/kegiatan belum tercapai akibat keterbatasan anggaran, sehingga pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terbatas dan belum optimal.	PUPR
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rasio PSU dalam kondisi baik	Rasio		0,143	0,143	0,155	H	H	Karena adanya Kegiatan Pembangunan dan Rehab PSU	PUPR
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										BPBD
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H		BPBD
1	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	Persen		100	100	100	H	H	Seluruh kejadian bencana alam dan & Non alam	BPBD



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status	(9)	(10)	
										RPD	RKPD		
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen		100	100	100	H	H	Penanggulangan bencana oleh pemadam kebakaran	BPBD
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										SATPOL PP WH
1	05	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H		SATPOL PP WH
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman	Persen		100	100	100	H	H		SATPOL PP WH
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										DINSOS
1	06	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100,00	H	H		DINSOS
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu	Persen		76,80	76,80	38,70	M	M		DINSOS



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022					Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status		(9)	(10)
										RPD	RKPD		
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial	Persen		100	100	100	H	H		DINSOS
1	06	05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen		47,00	43,76	79,59	H	H		DINSOS
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat	Persen		100	100	100,00	H	H		DINSOS
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang dikelola	Persen		100	100	100,00	H	H		DINSOS
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										DPMTSP NAKER
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H	Semua Kegiatan Administrasi Pemerintah Daerah terlaksana sesuai dengan target	DPMTSP NAKER
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan	Persen		15,00	26,70	28,49	H	H	Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan pelatihan telah meningkatkan jumlah pencari kerja yang dapat menerima/mengikuti program pelatihan.	DPMTSP NAKER



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status		(9)	(10)
										RPD	RKPD		
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	Persen		55,63	55,63	3,77	M	M	Rendahnya angka penempatan tenaga kerja disebabkan oleh ketidaksesuaian kompetensi pencari kerja terdaftar dengan kebutuhan industri.	DPMTSP NAKER
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Persen		100,00	100,00	18,18	M	M	Penyelesaian perkara perselisihan yang telah dicatatkan tidak hanya diselesaikan dengan Perjanjian Bersama, namun terdapat langkah lain seperti Bipartit dan Anjuran untuk diajukan pada Pengadilan PPHI.	DPMTSP NAKER
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										DP3AP2 KB
2	08	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H		DP3AP2 KB
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender	Persen		58,58	58,58	82,11	H	H	Karena ada penambahan dana TAPE sehingga semua OPD dapat mengikuti sosialisasi PUG dan PPRG	DP3AP2 KB
2	08	03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Perlindungan Perempuan dan Anak	Persen		100,00	100,00	100,00	H	H		DP3AP2 KB
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Pembinaan Kelompok Perempuan	Persen		93,83	93,83	-	M	M	TIDAK DAPAT DICAPAI KARENA KEGAITAN YG DILAKUKAN MENGGUNAKAN DANA DOKA. UTK 2025 TIDAK ADA LAGI DANA DOKA. INDIKATOR DI GANTI	DP3AP2 KB



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status	(9)	(10)
										RPD RKPD		
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Kebutuhan Data SIGA/SDGA	Persen		32,35	32,35	32,35	H H		DP3AP2 KB
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pemenuhan Hak Anak	Persen		39,86	39,86	44,34	H H		DP3AP2 KB
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen		100	100	100	H H		DP3AP2 KB
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									DKPPP
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H H		DKPPP
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Pangan Utama	Kg/jiwa		0,43	100,00	273,90	H H		DKPPP
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Informasi Kerawanan Pangan	Persen		66,67	66,67	66,67	H H		DKPPP



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status	(9)	(10)	
										RPD	RKPD		
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Konsumsi Pangan Segar	Persen		63,64	63,64	63,64	H	H		DKPPP
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										PERTANA HAN
2	10	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H		PERTANA HAN
2	10	05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Santunan Persertifikatan	Persen		83,33	83,33	-	M	M		PERTANA HAN
2	10	08	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase Penanganan Tanah Kosong	Persen		25,00	25,00	-	M	M		PERTANA HAN
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah	Persen		0,63	0,63	2,81	H	H		PERTANA HAN
2	10	12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat	Persen		46,42	46,42	36,32	M	M		PERTANA HAN
2	10	13	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN	Persentase Tanah yang Dipetakan	Persen		67,07	67,07	-	M	M		PERTANA HAN
2	10	14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN	Persentase Pembinaan SDM Pertanahan	Persen		57,02	57,02	16,18	M	M		PERTANA HAN



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status		(9)	(10)
										RPD	RKPD		
2	10	15	PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU	Persentase Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir dan Sempadan Pantai	Persen		62,50	62,50	-	M	M		PERTANA HAN
2	10	16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN	Ketersediaan Sistem Informasi Pertanahan	Ada/ Tidak		Tidak	Tidak	Tidak	H	H		PERTANA HAN
2	10	17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN	Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanahan	Persen		60	60	100	H	H		PERTANA HAN
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										DLH
2	11	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H		DLH
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Tersusunnya RPPLH Kab/Kota	Ada/ Tidak		Ada	Ada	Ada	H	H		DLH
				Persentase peningkatan kajian lingkungan hidup	Persen								DLH
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai		65,80	65,80	71,94	H	H		DLH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase luasan taman	Persen		76,70	76,70	70	M	M		DLH



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022					Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status		(9)	(10)
											RPD	RKPD		
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penanganan limbah B3	persen			90,00	90,00	90	H	H		DLH
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten / Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten / kota.	persen			90,00	90,00	90	H	H		DLH
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase aparatur desa yang terlatih	Persen			7,35	7,35	0	M	M		DLH
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada/Tidak			Ada	Ada	Ada	H	H		DLH
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persen			100	100	100	H	H		DLH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang ditangani	Persen			91,08	100,00	99,86	H	M		DLH



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022					Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status		(9)	(10)
										RPD	RKPD		
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										DISDUK CAPIL
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H	Hasil perhitungan capaian dokumen administrasi menunjukkan bahwa hampir seluruh dokumen administrasi pemerintah daerah telah tersedia dan dilaksanakan sesuai target perencanaan. Persentase capaian ini menggambarkan bahwa tata kelola administrasi berjalan efektif dan mendukung pelaksanaan pelayanan publik dan fungsi pemerintahan yang optimal.	DISDUK CAPIL
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persen		74,88	74,88	81,69	H	H	Penerbitan KTP dan KK telah menjangkau sebagian besar wajib layanan, sedangka KIA menunjukkan bahwa pelayanan ini masih perlu diperkuat terutama dalam hal sosialisasi, akses layanan, serta kemudahan prosedur agar lebih banyak anak yang memperoleh KIA	DISDUK CAPIL
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Persen		88,85	88,85	90,36	H	H		DISDUK CAPIL
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen		100	100	100	H	H		DISDUK CAPIL



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status	(9)	(10)	
										RPD	RKPD		
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan	Ada/Tidak		Ada	Ada	Ada	H	H	DISDUK CAPIL	
				Persenatse peningkatan pengelolaan informasi Profil Kependudukan			100		100	H	P	DISDUK CAPIL	
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									DPMG	
2	13	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H	DPMG	
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Gampong yang Baik	Persen		95,59	95,59	67,65	M	M	Terdapat 22 Kantor Keuchik di Kota Lhokseumawe yang rusak akibat banjir bandang Hidrometeorologi pada Akhir November 2025.	DPMG
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Kerjasama Gampong	Persen		73,53	73,53	14,71	M	M	1) Tidak tersedia anggaran untuk memfasilitasi kerjasama antar desa di tahun 2025; 2) Capaian 10 Desa tersebut adalah adanya MoU Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kota Lhokseumawe tentang Pengawasan Pelaksanaan Dana Desa.	DPMG
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase peningkatan Administras Pemerintahan Gampong	Persen		81,84	81,84	66,65	M	M	1) Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Pemerintah Gampong belum menyusun APBG Tahun Anggaran 2025 disebabkan belum adanya Qanun tentang APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran	DPMG



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status	(9)	(10)	
										RPD	RKPD		
												2025 dan Perwal tentang Penjabaran APBK Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025 , sehingga Perwal Juknis APBG Tahun Anggaran 2025 belum bisa ditetapkan oleh Wali Kota Lhokseumawe sebagai dasar hukum penyusunan APBG Tahun Anggaran 2025; 2) Sisa Dana Desa yang tidak tersalurkan dikarenakan tidak dibayarkannya Dana Non Earmark Tahap 2 untuk 60 Gampong oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan sisa dari Kurang bayar ADG Tahun 2019-2021, BHPD dan BHRD Tahun 2021 menjadi pagu tambahan pada Triwulan IV, namun tidak dapat disalurkan ke gampong oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.	
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persen		91,54	91,54	50,00	M	M	1) Kurangnya dukungan anggaran untuk melakukan pembinaan LKD Karang Taruna; 2) LKD LPM/Tuha Lapan tidak terbentuk di Gampong dikarenakan tidak adanya dukungan Insentif Pengurus dan biaya operasional LPM/Tuha Lapan sebagai LKD.	DPMG
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										DP3AP2 KB



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status		(9)	(10)
										RPD	RKPD		
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	Persen		67,65	67,65	61,76	M	M	Karena keterbatasan anggaran sehingga ada 2 OPD yang tidak bisa di ikut sertakan lagi dalam pengelolaan kampung keluarga berkualitas	DP3AP2 KB
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peningkatan Pembinaan Keluarga Berencana	Persen		51,08	51,08	52,58	H	H	Meningkatnya persentase pada program ini di sebabkan semakin tingginya akseptor yang menggunakan MKJP	DP3AP2 KB
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Peningkatan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Persen		112,13	100	117,65	H	H		DP3AP2 KB
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										DISHUB
2	15	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H		DISHUB
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan	Persen		45,83	45,83	45,83	H	H		DISHUB
2	15	03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Ketersediaan Pelabuhan Laut	Ada / Tidak		Tidak	Tidak	Tidak	H	H		DISHUB
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										KOMINFO
2	16	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H		KOMINFO



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022					Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status		(9)	(10)
										RPD	RKPD		
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Penyebaran Informasi Publik	Persen		26,32	34,21	90,00	H	H	Capaian Program Informasi dan Komunikasi melebihi target, namun pelaksanaannya tidak mencapai 100% karena ada Informasi yang tidak dapat publikasi terkait kerahasiaan data pribadi sebagaimana amanat UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kerahasiaan Data Pribadi	KOMINFO
2	16	03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelayanan Publik Yang Terintegrasi	Persen		17,65	27,65	100,00	H	H	capaian indiaktor program melebihi target karena seluruh perangkat daerah sudah terintegrasi	KOMINFO
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										DISKOP
2	17	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H		DISKOP
2	17	02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi yang memiliki USP	Persen		1,36	95,00	2,71	H	M	bertambahnya koperasi yang memiliki unit simpan pinjam sehingga terjadi peningkatan capaian	DISKOP
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Mandiri	Persen		83,49	83,49	50,51	M	M	PENDAFTARAN JUMLAH KOPERASI (KOPERASI MERAH PUTIH) NAMUN BELOM BEROPERASI ONAL	DISKOP
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi yang Sehat	Persen		7,27	17,27	46,15	H	H	DARI 26 KOPERASI YANG MENYAMPAIKAN RAT TERDAPAT 12 KOOPERASI YANG MENDAPAT PENILAIAN SEHAT (46%)	DISKOP
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Fasilitasi UMKM	Persen		27,26	27,26	4,28	M	M	BERKURANGNYA KEGIATAN PENINGKATAN SDM MELALUI KEGIATAN PELATIHAN	DISKOP



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status	(9)	(10)	
										RPD	RKPD		
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pengembangan UMKM	Persen		7,87	7,87	5,0%	M	M	TERJADI PENURUNAN KEGIATAN PENDAMPINGAN UKM KARENA KETIADA TERSEDIAN TENAGA FASILITATOR UKM	DISKOP
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										DPMTSP NAKER
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Kemudahan Penanaman Modal	Persen		40,00	40,00	0	M	M	Kebijakan daerah tentang kemudahan berusaha sedang dilakukan penyesuaian sehingga kemajuan belum optimal	DPMTSP NAKER
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Sektor pada Promosi Penanman Modal	Persen		30,00	30,00	100,00	H	H	Kegiatan terlaksana dengan baik	DPMTSP NAKER
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan	Indeks		87,98	100,00	98,50	H	M	Tercapainya target perizinan dikarenakan banyak pelaku usaha yang semakin sadar akan pentingnya izin usaha, sehingga tingkat pengaduan menjadi kecil	DPMTSP NAKER
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Indeks Pemantauan dan Pengawasan Investasi	Indeks		75,98	75,98	46,95	M	M	Kegiatan terlaksana namun beberapa pelaku usaha mengalami kendala sistem, tidak adanya kegiatan dan juga terkait kepatuhan	DPMTSP NAKER
2	18	06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Ketersediaan Database Perizinan	Ada/Tidak		Ada	Ada	Ada	H	H	Tersedianya Database Perizinan	DPMTSP NAKER
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										DISPORAPAR



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status	(9)	(10)	
										RPD	RKPD		
2	19	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H		DISPORAPAR
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif	Persen		100	100	100	H	H		DISPORAPAR
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga	Cabor		7	7	10	H	H		DISPORAPAR
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan Pramuka	Persen		42,86	44,98	42,86	H	M		DISPORAPAR
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										KOMINFO
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang melakukan pengamanan data dan informasi terintegrasi	Persen		11,76	9,95	100,00	H	H	capaian indiaktor program melebihi target karena seluruh perangkat daerah sudah menggunakan sandi dalam komunikasi	KOMINFO
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										PK
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kegiatan pengembangan budaya	Persen		61,54	61,54	100	H	H		PK
2	22	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase pembinaan sanggar seni	Persen		6,90	6,90	100	H	H		PK
2	22	04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase objek sejarah	Persen		56,25	56,25	8	M	M	keterbatasan anggaran untuk Tim Ahlli Cagar Budaya penetapan cagar budaya	PK



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status	(9)	(10)	
										RPD	RKPD		
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	Persen		59,09	59,09	-	M	M	dibutuhkan SK Wali Kota, namun terkendali keterbatasan anggaran untuk penetapan cagar budaya	PK
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										MAA
2	22	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H		MAA
2	22	07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)	Persentase Fasilitasi sengketa adat	Persen		100	100	0	M	M	TIDAK DAPAT DICAPAI KARENA TIDAK ADA SENGKETA ADA YANG DI LAPORKAN	MAA
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										ARPUS
2	23	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H		ARPUS
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Layanan Perpustakaan	Persen		11,10	11,10	55,46	H	H		ARPUS
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										ARPUS
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Pengelolaan arsip sesuai standar	Persen		14,29	14,29	8,93	M	M		ARPUS
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Penyelamatan Arsip	Persen		30,77	30,77	7,69	M	M		ARPUS
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										DKPPP



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status	(9)	(10)	
										RPD	RKPD		
3	25	03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Pembinaan Kelompok Nelayan	Persen		49,54	49,54	24,92	M	M	Belum Tercapai dikarenakan sarana dan prasarana pengolahan ikan masih minim	DKPPP
				Produksi Perikanan Tangkap	Ton				11766080				DKPPP
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan bina kelompok pembudidaya	Persen		53,14	53,14	54,78	M	M	Belum tercapai target disebabkan adanya keterbatasan sumberdaya yaitu anggaran yang rendah, peralatan dan pelatihan..	DKPPP
				Produksi Perikanan Budidaya					1546,321	H	H		DKPPP
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persen		49,17	49,17	100,00	H	H		DKPPP
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persen		100	100	89	M	M		DKPPP
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										DISPORAPAR
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Persen		70,00	70,00	10,00	M	M	awalnya banyak usulan berupa event (bukan kegiatan) tetapi karena efisiensi, maka belum bisa terlaksana	DISPORA PAR
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatkan Kunjungan Wisata	Persen		96,97	96,97	93,94	M	M	kenapa tidak tercapai? Berkurangnya jumlah kunjungan wisata	DISPORA PAR



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022					Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status		(9)	(10)
										RPD	RKPD		
3	26	05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pembinaan SDM Pariwisata	Persen		100,00	100,00	50,00	M	M	kelompok sadar wisata yang masih aktif tersisa 3 kelompok diakhir tahun	DISPORA PAR
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										DKPPP
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Kelompok Tani	Persen		41,35	41,35	42,64	M	M		DKPPP
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian	Persen		42,93	42,93	9,53	M	M		DKPPP
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verternier	Persen		44,12	44,12	83,00	H	H		DKPPP
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Persen		54,68	54,68	100,00	H	H		DKPPP
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan penyuluhan pertanian	Persen		42,93	42,93	60,12	H	H		DKPPP
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										DISKOP



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status		(9)	(10)
										RPD	RKPD		
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase peningkatan sarana distribusi pedagang	Persen		0,40	0,40	0,42	H	H	TERJADI PENINGKATAN JUMLAH SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN(PASAR) YANG DIREHAB MELALUI DANA DOKA DAN POKIR	DISKOP
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persenatase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persen		59,98	59,98	64	H	H	BEBERAPA UPAYA UNTUK PENSTABILAN HARGA DENGAN KEGIATAN OPERASI PASAR REGULER BAIK YANG DILAKUKAN OLN PEMKO MAUPUN PEMPROV CUKUP EFEKTIF UNTUK MENEKAN KENAIKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK	DISKOP
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Partisipasi pada Promosi Dagang	Persen		80,00	80,00	40,0	M	M	BEBERAPA EVENT PAMERAN YANG TIDAK DIKUTI KARENA KETERBATASAN ANGGARAN DAN PEMBATALAN EVENT	DISKOP
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Tera Tera Ulang UTP	Persen		74,07	76,07	76,22	H	H		DISKOP
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										DISKOP
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pembinaan, Pengawasan dan Promosi Industri Kecil Menengah	Persen		5,77	7,77	9,29	H	H	PENINGKATAN KONSULTANSI IKM OLEH KONSULTAN DINAS SERTA PENDAFTARAN PRODUK IKM YANG LEBIH DARI SATU	DISKOP
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase IKM yang memiliki Izin	Persen		5,33	5,33	8,01	H	H	PENINGKATAN PENDAFTARAN IKM THDP USAHANYA PADA APLIKASI NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA)	DISKOP
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Ketersediaan Informasi yang dibutuhkan	Ada/Ti dak		Ada	Ada	Ada	H	H	TERSEDIANYA DATABASE IKM	DISKOP



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status	(9)	(10)
										RPD	RKPD	
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	01		SEKRETARIAT DAERAH									SETDAKO
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen		100	100	100	H	H		SETDAKO
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persen		98,70	98,70	100,00	H	H	Capaian melebihi target karena jumlah rancangan produk hukum melebihi dari target yang disusun	SETDAKO
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persen		92,00	92,00	85,00	M	M	Capaiannya belum memenuhi target karena jumlah kebijakan pada Bagian PBJ tidak tersusun sesuai target	SETDAKO
4	02		SEKRETARIAT DPRD									SETWAN
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persen		100	100	100	H	H		SETWAN
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persen		81,82	81,82	75	M	M	Sesuai dengan daftar penetapan Ranc. Proleg DPRK 2025 (sumber data Bagian Peridangan dan Perundangan-undangan)	SETWAN
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	01		PERENCANAAN									BAPPEDA



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status	(9)	(10)	
										RPD	RKPD		
5	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100%	H	H	BAPPEDA	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada/Tidak		Ada	Ada	Ada	H	H	BAPPEDA	
				Persentase capaian perencanaan pembangunan daerah		100%	100%		100%	H	P	BAPPEDA	
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK	Persen		100	100	95,60	M	M	Terdapat beberapa OPD yang programnya telah tercantum dalam RPJM, namun pada tahun berjalan tidak dilaksanakan dalam RKPK akibat keterbatasan anggaran.	BAPPEDA
5	02		KEUANGAN									BPKD	
5	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100,00	H	H	BPKD	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	H	H	BPKD	
5	02	02		Opini BPK	Opini		WTP	WTP	-	K	K	Dalam Proses penilaian	BPKD



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status	(9)	(10)	
										RPD	RKPD		
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen		100,00	100,00	87,04	M	M	capaian hanya 87,04 % dikarenakan kegiatan penghapusan aset daerah tidak terealisasi 100 %, hal ini terjadi karena ada OPD yang sudah mengusulkan untuk pemusnahan, namun ketika akan dilakukan pemusnahan OPD tidak memiliki lokasi yang bisa untuk dilakukan pemusnahan, karena terkendala dengan biaya untuk dilakukan pemusnahan ke tempat lain sehingga batal dilakukan pemusnahan disamping itu, tahun 2025 blm ada data untuk Rencana kebutuhan Barang Milik daerah khususnya Rencana Pemusnahan.	BPKD
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penerimaan PAD	Persen		100	100	112,61	H	H	Realisasi PAD melebihi target di sebabkan adanya pemukhtahiran data dan menggali potensi pajak dari segi PBB, air tanah, hotel, hiburan dan restoran serta opsen PKB dan BBNKB dimana kita berharap ke depannya wajib pajak lebih taat lagi dlm membayar pajak dan retribusi	BPKD
5	03		KEPEGAWAIAN										BKPSDM
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100%	H	H		BKPSDM
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase fasilitasi pelayanan Administrasi kepegawaian	Persen		54,02	54,02	66,8%	H	H		BKPSDM
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										BKPSDM



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status		(9)	(10)
										RPD	RKPD		
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat struktural	Persen		10,14	35,60	4,5%	M	M	Target tidak tercapai dikarenakan tidak cukup anggaran untuk penambahan peserta diklat/ ASN struktural	BKPSDM
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										BAPPEDA
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	Persen		75,00	86,20	100%	H	H		BAPPEDA
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6	01		INSPEKTORAT DAERAH										INSPEKTO RAT
6	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H		INSPEKTO RAT
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan	Persen		82,60	84,60	90,91	H	H		INSPEKTO RAT
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi	Point / Kategori i		CC 51.00	B 60,01	-	K	K	Dalam proses penilaian	INSPEKTO RAT
6	01	03		Level Kapabilitas APIP	Level		Level 4	Level 4	-	K	K	Dalam proses penilaian	INSPEKTO RAT



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status	(9)	(10)	
										RPD	RKPD		
6	01	03		Tingkat Maturitas SPIP Pemko Lhokseumawe	Level		Level 3 3.5	Level 3 3.5	Level 3 3.037	M	M	-Pimpinan Pemda dan OPD belum sepenuhnya mendorong penerapan manajemen risiko melalui penggunaan kinerja manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja - pegawai belum sepenuhnya mendapatkan pemahaman dan keterampilan kompetensi di bidang manajemen risiko	INSPEKTO RAT
7			UNSUR KEWILAYAHAN										
7	01		KECAMATAN										B. SAKTI
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H	Realisasi Indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yang telah ditetapkan	B. SAKTI
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen		55,56	100,0 0	94,44	H	H	Realisasi Indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan, jumlah pkk gamongnya mengalami penambahan	B. SAKTI
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Persen		100	100	100	H	H	Realisasi Indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yang telah ditetapkan	B. SAKTI
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen		100	100	100	H	H	Realisasi Indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yang telah ditetapkan	B. SAKTI
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen		100	100	100	H	H	Realisasi Indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yang telah ditetapkan	B. SAKTI
7	01		KECAMATAN										B. MANGAT



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022					Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status		(9)	(10)
										RPD	RKPD		
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H	realisasi indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yg telah ditetapkan	B. MANGAT
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Fasilitas Publik	Persen		100	100	100	H	H	realisasi indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yg telah ditetapkan	B. MANGAT
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen		90,91	90,91	90,91%	H	H	realisasi indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yg telah ditetapkan	B. MANGAT
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Persen		100,00	100,00	100,00	H	H	realisasi indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yg telah ditetapkan	B. MANGAT
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen		22,73	22,84	22,73	H	M	realisasi indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yg telah ditetapkan	B. MANGAT
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen		100	100	100	H	H	realisasi indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yg telah ditetapkan	B. MANGAT
7	01		KECAMATAN										M. SATU
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H	realisasi indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yg telah ditetapkan	M. SATU
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pembinaan PKK Gampong	Persen		100	100	100,00	H	H	realisasi indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yg telah ditetapkan	M. SATU



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022					Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status		(9)	(10)
										RPD	RKPD		
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Persen		42,86	82,86	100,00	H	H	realisasi indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yg telah ditetapkan	M. SATU
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen		100	100	100,00	H	H	realisasi indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yg telah ditetapkan	M. SATU
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen		100	100	100	H	H	realisasi indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yg telah ditetapkan	M. SATU
7	01		KECAMATAN										M. DUA
7	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H	realisasi indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yg telah ditetapkan	M. DUA
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN	Persentase pembinaan PKK	Persen		17,65	100,00	29,41	M	M	realisasi indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yg telah	M. DUA
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penertiban	Persen		23,53	24,00	47,06	H	H	realisasi indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 melebihi target yg telah ditetapkan	M. DUA
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persen		17,65	18,00	29,41	H	H	realisasi indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yg telah ditetapkan	M. DUA
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	Persen		100	100	100	H	H	realisasi indikator yang dihasilkan pada tahun 2025 mencapai target yg telah ditetapkan	M. DUA
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022					Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status	(9)	(10)
										RPD	RKPD	
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									KESBANGPOL
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H	KESBANGPOL
8	01	02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan	Persen		2,20	50,00	2,21	M	M	KESBANGPOL
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rasio partisipasi masyarakat dalam partai politik	Rasio		81,02	81,02	0,82	M	M	KESBANGPOL
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Ormas	Persen		18,57	18,57	0,20	M	M	KESBANGPOL
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase pembinaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, PEKAT, serta Kerukunan Umat Beragama	Persen		3,61	3,61	0,04	M	M	KESBANGPOL



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022				Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian			
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status	(9)	(10)
										RPD	RKPD	
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial yang tertangani	Persen		100	100	1,00	M	M	KESBANG POL
9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN									
9	01		KEKHUSUSAN ACEH									MPU
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H	MPU
9	01	03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH	Persentase Fatwa yang tersebarluaskan	Persen		71,43	100,00	71,43	H	M	MPU
9	01		KEKHUSUSAN ACEH									B. MAL
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H	B. MAL
9	01	04	PROGRAM BAITUL MAL	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	Rasio		0,99	0,99	0,99	H	H	B. MAL
9	01		KEKHUSUSAN ACEH									DSI-PD
9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah	Persen		100	100	100	H	H	Mencapai Target DSI-PD



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Setelah perubahan	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPK Tahun 2022					Keterangan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Perubahan Target RPD	Targe t RKPK 2025	Capaian				
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	Status		(9)	(10)
										RPD	RKPD		
9	01	02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH	Persentase Peningkatan Pembinaan Syariat Islam	Persen		53,88	53,88	47,89	M	M	Tidak Mencapai Target, Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga jumlah kegiatan pembinaan yang dapat dilaksanakan menjadi terbatas dan berdampak pada rendahnya capaian indikator.	DSI-PD

Sumber : Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024



2.2.3.2.4. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, terhadap capaian realisasi anggaran dari target yang telah ditetapkan dalam RKPK Tahun 2025 dengan kategori sangat tinggi (ST) sebesar 124,73 persen untuk rata-rata capaian kinerja sub kegiatan, pencapaian melebihi seratus persen ini dikarenakan kinerja yang ditetapkan dalam RKPK lebih kecil dari kinerja dalam dokumen Anggaran perangkat Daerah. Sedangkan capaian realisasi anggaran rata-rata terhadap RKPK dengan kategori tinggi (T) sebesar 86,67 persen, hal ini juga disebabkan anggaran yang ditetapkan lebih besar dalam RKPK Tahun 2025 dibandingkan pada pada dokumen anggaran perangkat daerah yang di tetapkan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.219
Rekapitulasi Capaian SKPD pada Evaluasi Hasil RKPK
Lhokseumawe Tahun 2025

No.	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	
			Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	1.286.246.158,00	229,82	1.141.809.853,00	88,77
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	229.461.233.368,00	26,48	213.960.923.768,00	93,24
3	Dinas Kesehatan	127.553.456.176,00	70,77	120.507.078.940,00	94,48
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.458.624.279,00	420,49	6.703.707.563,00	70,87
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	14.677.666.966,00	49,92	11.587.734.907,00	78,95
7	Dinas Sosial	4.764.730.700,00	45,67	4.416.258.071,00	92,69
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.973.522.180,00	176,64	5.687.901.639,00	81,56
9	Dinas Pertanahan	3.395.053.370,00	158,8	3.159.866.055,00	93,07
10	Dinas Lingkungan Hidup	49.748.086.913,00	864,85	47.994.622.486,00	96,48
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.370.342.914,00	111,43	3.860.073.532,00	88,32
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	4.422.259.342,00	64,25	3.876.880.288,00	87,67
13	Dinas Perhubungan	6.782.641.430,00	63,07	5.694.518.034,00	83,96
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	5.783.710.714,00	191,43	5.260.954.181,00	90,96
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	7.679.033.275,00	168,57	7.165.639.429,00	93,31
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6.534.416.526,00	92,96	6.119.394.294,00	93,65
17	Sekretariat Majelis Adat Aceh	1.819.777.413,00	100	1.692.448.224,00	93
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.586.095.239,00	39,57	3.067.442.425,00	85,54
19	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	10.208.675.175,00	35,91	9.139.103.805,00	89,52



No.	Uraian Bidang Urusan	Pagu RKPD	Rata-rata Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	
			Ind Sub Keg	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	10.311.539.769,00	42,38	8.862.664.423,00	85,95
21	Sekretariat Daerah	34.245.503.106,00	95,68	30.288.897.914,00	88,45
22	Sekretariat DPRK	31.356.552.099,00	96,96	30.097.832.178,00	95,99
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.618.042.808,00	74,27	5.916.494.336,00	89,4
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	144.955.953.372,00	843,47	120.341.514.120,00	83,02
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.006.482.256,00	53,40	7.304.881.380,00	91,24
26	Inspektorat	9.816.164.893,00	114,65	8.790.966.993,00	89,56
27	Kecamatan Banda Sakti	3.536.246.138,00	64,29	3.177.438.847,00	89,85
28	Kecamatan Blang Mangat	3.878.329.554,00	28,33	3.536.890.400,00	91,2
29	Kecamatan Muara Satu	2.544.858.408,00	148,11	1.952.244.544,00	76,71
30	Kecamatan Muara Dua	2.716.603.700,00	84,67	2.532.518.577,00	93,22
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.414.124.241,00	76,35	4.919.597.392,00	90,88
32	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	3.471.307.657,00	16,67	3.238.626.150,00	93,3
33	Sekretariat Baitul Mal	7.720.564.197,00	14,4	606.484.345,00	7,86
34	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	12.304.830.611,00	30,96	10.452.157.244,00	84,94
	Jumlah	837.447.857.637,00		725.785.339.487,00	
	Rata-rata capaian kinerja (%)		124,73		86,67
	Predikat kinerja		Sangat tinggi		Tinggi

Sumber : SIPD RI Tahun 2025

2.2.3.2.5. Tantangan dan Hambatan Pencapaian Kinerja

Dari hasil evaluasi terhadap program, kegiatan dan keuangan dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 dan APBK Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh OPD, terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja maupun anggaran, antara lain :

1. Masih banyak perangkat daerah yang tidak konsisten dalam penyusunan program maupun kegiatan pada RPJMK, RKPK dan APBK sehingga banyak kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan tidak dilaksanakan.
2. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam melakukan pengukuran kinerja terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan. Jika ditinjau lebih mendalam, maka kelemahan tersebut terkait erat dengan permasalahan indikator kinerja. Perangkat daerah seringkali gagal dalam menentukan rumus perhitungan indikator kinerja program/kegiatan secara tepat.
3. Saat penyusunan RKPK Tahun 2025 masih mengakomodir seluruh tanpa memikirkan kebutuhan dan program kegiatan yang

lebih prioritas sehingga pada saat penyesuaian kapasitas keuangan daerah dilakukan pada saat penyusunan KUA PPAS sebagai dasar penyusunan APBK, sehingga harus dilakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran.

4. Keterbatasan SDM personal dan sering berganti-ganti SDM yang mengampu perencanaan.
5. Masih didapati satuan indikator program (outcome), kegiatan dan sub kegiatan pada data evaluasi RKPK yang belum konsisten.

2.2.3.2.6. Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Kesimpulan hasil evaluasi terhadap RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Untuk capaian indikator makro Kota Lhokseumawe Tahun 2025 tidak semuanya mencapai target yang telah ditetapkan seperti : pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini sedangkan untuk indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan telah mencapai target yang di tetapkan dalam RKPK 2025.
2. Untuk Capaian Realisasi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2025 terhadap Target pendapatan yang ditetapkan dalam RKPK 2025 sebesar 94,3 persen dari target yang telah di tetapkan dalam P- RKPK Tahun 2025. Capaian Realisasi terbesar yaitu pada objek pendapatan tranfer sebesar 95,1 persen dari target yang telah di tetapkan pada P-RKPK Tahun 2025 kemudian pada lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 92,0 persen dari target yang telah ditetapkan dalam P-RKPK dan kemudian pada pendapatan asli daerah tercapai sebesar 88,3 persen dari target yang telah di tetapkan
3. Belanja Daerah yang ditargetkan dalam P RKPK Tahun 2025 sebesar 82,5 persen. Realisasi terbesar berasal dari belanja daerah pada Belanja Modal yang terserap sebesar 88,6 persen kemudian pada belanja transfer tercapai sebesar 85,4 persen dari target yang telah ditetapkan dalam P-RKPK Tahun 2025 Dan pada belanja operasi ditargetkan sebesar 81,8 persen dari target yang telah ditetapkan dalam P-RKPK Tahun 2025. Kemudian belanja tidak terduga tercapai sebesar 8,0 persen dari target yang telah ditetapkan.
4. capaian realisasi anggaran dari target yang telah ditetapkan dalam RKPK Tahun 2025 dengan kategori sangat tinggi (ST) sebesar 124,73 persen untuk rata-rata capaian kinerja sub kegiatan, pencapaian melebihi seratus persen ini dikarenakan kinerja yang ditetapkan dalam RKPK lebih kecil dari kinerja dalam dokumen Anggaran perangkat Daerah. Sedangkan capaian realisasi anggaran rata-rata terhadap RKPK dengan kategori tinggi (T) sebesar 86,67 persen, hal ini juga disebabkan anggaran yang ditetapkan lebih besar dalam RKPK Tahun 2025 dibandingkan pada pada dokumen anggaran perangkat daerah yang di tetapkan
5. Masih belum terjadi sinkronisasi antara dokumne perencanaan terutama pada penentuan target kinerja.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat disampaikan dari kesimpulan hasil evaluasi terhadap RKPK Lhokseumawe Tahun 2025 semester 2 sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah agar tetap menerapkan prinsip efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran;
2. Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan Renstra, Renja dapat merencanakan kegiatan-kegiatan yang paling penting untuk di laksanakan, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan seluruhnya dalam Dokumen Anggaran dan nantinya tidak ada kegiatan yang muncul di luar perencanaan.
3. Perangkat Daerah agar tetap memperhatikan kesesuaian dan sinkronisasi target pada semua dokumen perencanaan.
4. Untuk Perangkat daerah dalam menentukan target kinerja pada dokumen anggaran harus benar-benar diperhatikan dan di sesuaikan dengan dokumen perencanaan diatasnya (renstra dan renja) dan apabila terjadi penyesuaian anggaran maka target kinerja juga dapat di sesuaikan sehingga terjadi sinkronisasi.

TABEL 2.220
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
PEMERINTAH KOTA LHOKEUMAWE

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			963.462.962.706		-		234.370.868.044		218.649.425.109	43.74	93.29		218.649.425.109	22.47	22.69		
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.756.382.248		-		1.242.769.655		1.105.750.628	80.95	88.97		1.105.750.628	24.68	16.37	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja	Nilai SAKIP OPD (Angka)	64				0		62,7		0	0	62,7		97.97	0		
			Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
2.	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			48.000.000		-		6.637.231		6.546.598	100	98.63		6.546.598	20	13.64		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,										0	0			0	0		
3.	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			48.000.000		-		6.637.231		6.546.598	100	98.63		6.546.598	20	13.64		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	50		0		10		10		100	0	10		20	0		
4.	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.417.277.768		-		928.496.850		817.711.179	100	88.07		817.711.179	15	18.51		
		Terlaksananya Administrasi keuangan Pada										0	0			0	0		
5.	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.417.277.768		-		928.496.850		817.711.179	100	88.07		817.711.179	15	18.51		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.120		0		168		168		100	0	168		15	0		
6.	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat										0	0			0	0		
7.	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	18		0		50		0		0	0	0		0	0		
8.	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			300.928.000		-		72.626.093		69.616.102	100	95.86		69.616.102	19.97	23.13		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0			0	0		
9.	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			41.000.000		-		12.186.093		12.161.620	100	99.8		12.161.620	20	29.66		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	200		0		40		40		100	0	40		20	0		
10.	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			29.000.000		-		5.300.000		5.300.000	100	100		5.300.000	20	18.28		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.150		0		230		230		100	0	230		20	0		
11.	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			25.000.000		-		5.000.000		4.999.682	100	99.99		4.999.682	20	20		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	15		0		3		3		100	0	3		20	0		
12.	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.928.000		-		1.140.000		1.140.000	100	100		1.140.000	19.84	19.23		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.840		0		365		365		100	0	365		19.84	0		
13.	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			200.000.000		-		49.000.000		46.014.800	100	93.91		46.014.800	20	23.01		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	185		0		37		37		100	0	37		20	0		
14.	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			120.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang										0	0			0	0		
15.	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			120.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		32		0		0	0	0		0	0		
16.	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.504.176.480		-		168.566.481		150.463.349	100	89.26		150.463.349	13.33	10		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah										0	0			0	0		
17.	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			5.000.000		-		1.000.000		996.919	100	99.69		996.919	20	19.94		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	10		0		2		2		100	0	2		20	0		
18.	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
19.	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.497.176.480		-		167.566.481		149.466.430	100	89.2		149.466.430	20	9.98		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.860		0		372		372		100	0	372		20	0		
20.	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			326.000.000		-		66.443.000		61.413.400	77.78	92.43		61.413.400	55	18.84		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang										0	0			0	0		
21.	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan			165.500.000		-		33.180.000		32.359.500	100	97.53		32.359.500	100	19.55		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
22.	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			127.500.000		-		25.500.000		21.661.900	33.33	84.95		21.661.900	100	16.99		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		0		3		1		33.33	0	1		100	0		
23.	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	4.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
24.	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	80	29.000.000	0		16	7.763.000	16	7.392.000	100	95.22	16	7.392.000	20	25.49		
25.	1.01.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH		1.220.716.596				43.476.503		36.059.225		646.67 82.94		36.059.225		15.46 2.95		Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	
		Meningkatnya mutu pendidikan dengan kebijakan/rekomendasi yang dihasilkan terkait	Persentase Sekolah yang Menerapkan Asesment Kompetensi Minimum (AKM) (Persen)	0				94.02		100		106.36	0	100		0	0		
			Persentase rekomendasi yang dihasilkan terkait Penyelenggaraan Pendidikan Aceh (%)	100				0		100		0	0	100		100	0		
26.	1.01.08.7.01	Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh		300.000.000								0 0				0 0			
		Meningkatnya Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan										0 0				0 0			
27.	1.01.08.7.01.0001	Penetapan Standar Pendidikan Aceh		100.000.000								0 0				0 0			
		Standar Pendidikan Aceh Tersusun	Jumlah Standar Pendidikan Aceh Tersusun (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
28.	1.01.08.7.01.0002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh		200.000.000								0 0				0 0			
		Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh (Satuan Pendidikan)	2		0		1		0		0	0	0		0	0		
29.	1.01.08.7.03	Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh		305.716.596				3.915.388		3.614.956		100 92.33		3.614.956		33.33 1.18			
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kurikulum dan										0 0				0 0			
30.	1.01.08.7.03.0001	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah		140.000.000								0 0				0 0			
		Terusunnya Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Tersusun (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
31.	1.01.08.7.03.0002	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah		145.716.596				3.915.388		3.614.956		100 92.33		3.614.956		100 2.48			
		Terlaksananya Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah (Dokumen)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
32.	1.01.08.7.03.0003	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami		20.000.000								0 0				0 0			
		Terimplementasi Kurikulum Aceh yang Islami	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Aceh yang Islami (Satuan Pendidikan)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
33.	1.01.08.7.04	Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh		180.000.000				5.966.001				0 0				0 0			
		Terseleenggaranya Peningkatan Mutu Pendidik dan										0 0				0 0			
34.	1.01.08.7.04.0001	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah		180.000.000				5.966.001				0 0				0 0			
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	25		0		45		0		0	0	0		0	0		
35.	1.01.08.7.05	Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh		435.000.000				33.595.114		32.444.269		1566.67 96.57		32.444.269		13.03 7.46			
		Terseleenggaranya Penjaminan dan Pengendalian Mutu										0 0				0 0			
36.	1.01.08.7.05.0002	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu		195.000.000				20.572.501		19.722.232		2000 95.87		19.722.232		20 10.11			
		Terlaksananya Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh (Satuan Pendidikan)	200		0		2		40		2000	0	40		20	0		
37.	1.01.08.7.05.0003	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh		160.000.000				13.022.613		12.722.037		1133.33 97.69		12.722.037		19.1 7.95			
		Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya (Satuan Pendidikan)	178		0		3		34		1133.33	0	34		19.1	0		
38.	1.01.08.7.05.0004	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah		80.000.000								0 0				0 0			
		Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal (Satuan Pendidikan)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
39.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		714.156.129.260				177.724.153.667		163.841.398.304		19.73 92.19		163.841.398.304		15.91 22.94		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		92,26		92.26	0	92,26		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	66,43				0		66,3		0	0	66,3		99,8	0		
40.	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		543.204.780				231.684.591		205.265.839		14.29 88.6		205.265.839		1.54 37.79			
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan										0 0				0 0			
41.	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		325.704.780				231.684.591		205.265.839		100 88.6		205.265.839		20 63.02			
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	50		0		10		10		100	0	10		20	0		
42.	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		25.000.000								0 0				0 0			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	15		0		15		0		0	0	0		0	0		
43.	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	15	22.500.000	0	-	15	-	0	-	0	0	-	-	0	0		
44.	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	15	25.000.000	0	-	15	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
45.	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	15	25.000.000	0	-	15	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
46.	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	25.000.000	0	-	5	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
47.	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5	25.000.000	0	-	5	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
48.	1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
49.	1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	1	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
50.	1.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
51.	1.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2	5.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
52.	1.01.01.2.01.0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	1	20.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
53.	1.01.01.2.01.0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	1	10.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
54.	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			671.887.797.000		-	175.743.476.335	-	162.465.754.993	-	12,5	92,44	162.465.754.993	-	10,16	24,18		
55.	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.600	671.702.797.000	0	-	1300	-	1.300	-	100	92,44	162.465.754.993	-	81,25	24,19		
56.	1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	25.000.000	0	-	5	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
57.	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	20.000.000	0	-	4	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
58.	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	4	25.000.000	0	-	4	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
59.	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	25.000.000	0	-	4	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
60.	1.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	4	15.000.000	0	-	4	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
61.	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			50.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket							
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	16		0		16		0		0	0	0		0	0		
62.	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	25.000.000	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
63.	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		175.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
64.	1.01.01.2.03.0001	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)		25.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4		0	-	4	-	0	-	0	0	0		0	0		
65.	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	25.000.000	0	-	4	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
66.	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	25.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	4		0	-	4	-	0	-	0	0	0		0	0		
67.	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	25.000.000	0	-	4	-	0	-	0	0	0		0	0		
68.	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	25.000.000	0	-	4	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		0	-	4	-	0	-	0	0	0		0	0		
69.	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		25.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4		0	-	4	-	0	-	0	0	0		0	0		
70.	1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	25.000.000	0	-	4	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
71.	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4	1.555.313.100		-		-		-	0	0		-	0	0		
72.	1.01.01.2.05.0001	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)		212.504.600		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	10		0	-	10	-	0	-	0	0	0		0	0		
73.	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.400	1.000.000.000	0	-	1400	-	0	-	0	0	0		0	0		
74.	1.01.01.2.05.0003	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)		25.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0	-	5	-	0	-	0	0	0		0	0		
75.	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5	20.000.000	0	-	5	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)				-		-		-	0	0		-	0	0		
76.	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)		42.808.500		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	5		0	-	5	-	0	-	0	0	0		0	0		
77.	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	20	80.000.000	0	-	20	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
78.	1.01.01.2.05.0010	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		75.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20		0	-	20	-	0	-	0	0	0		0	0		
79.	1.01.01.2.05.0011	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)		100.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	20		0	-	20	-	0	-	0	0	0		0	0		
80.	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)		908.000.000		-		-	65.339.399	65.107.899	60	99.65		65.107.899	50	7.17		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				-		-			0	0			0	0		
81.	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	240.000.000	0	-	4	-	15.308.740	15.100.556	100	98.64		15.100.556	100	6.29		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)				-		-			100	0	4		100	0		
82.	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	100.000.000	0	-	4	-	12.000.000	11.999.943	100	100		11.999.943	100	12		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)				-		-			100	0	4		100	0		
83.	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	10	10.000.000	0	-	10	-	0	-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)				-		-			0	0	0		0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
84.	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			500.000.000				38.030.659		38.007.400	100	99.94		38.007.400	100	7.6		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	80		0		80		80		100	0	80		100	0		
85.	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			33.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	100		0		100		0		0	0	0		0	0		
86.	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			25.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
87.	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.436.105.000				432.051.174		191.525.096	17.78	44.33		191.525.096	17.78	5.57		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang										0	0			0	0		
88.	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.480.000.000						59.439.500	100	0		59.439.500	100	4.02		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2		0		2		2		100	0	2		100	0		
89.	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			280.000.000							0	0			0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		2		0		0	0	0		0	0		
90.	1.01.01.2.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			14.000.000							0	0			0	0		
		Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	2		0		2		0		0	0	0		0	0		
91.	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			150.000.000							0	0			0	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3		0		3		0		0	0	0		0	0		
92.	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			40.000.000							0	0			0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		3		0		0	0	0		0	0		
93.	1.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			50.000.000							0	0			0	0		
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		3		0		0	0	0		0	0		
94.	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			600.000.000							0	0			0	0		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
95.	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			687.105.000				30.000.000		29.734.596	0	99.12		29.734.596	0	4.33		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		3		0		0	0	0		0	0		
96.	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			135.000.000				402.051.174		102.351.000	60	25.46		102.351.000	60	75.82		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		10		6		60	0	6		60	0		
97.	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			34.875.709.380				1.011.749.608		878.728.677	56.25	86.85		878.728.677	56.25	2.52		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah										0	0			0	0		
98.	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			27.500.000				8.828.728		8.816.907	25	99.87		8.816.907	25	32.06		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4		0		4		1		25	0	1		25	0		
99.	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.167.000.000				174.760.000		117.825.330	100	67.42		117.825.330	100	10.1		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		0		3		3		100	0	3		100	0		
100.	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			226.398.500							0	0			0	0		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		0		4		0		0	0	0		0	0		
101.	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			33.454.810.880				828.160.880		752.086.440	100	90.81		752.086.440	100	2.25		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		5		5		100	0	5		100	0		
102.	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			775.000.000				239.852.560		35.015.800	28.57	14.6		35.015.800	28.57	4.52		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang										0	0			0	0		
103.	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan			125.000.000				26.980.000			0	0			0	0		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2		0		2		0		0	0	0		0	0		
104.	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			75.000.000				20.900.000		20.015.800	100	95.77		20.015.800	100	26.69		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		0		5		5		100	0	5		100	0		
105.	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel			25.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	200		0		200		0		0	0	0		0	0		
106.	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			25.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		5		0		0	0	0		0	0		
107.	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			25.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5		0		5		0		0	0	0		0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
108.	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			250.000.000				15.000.000		15.000.000	100	100		15.000.000	100	6		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3		0		3		3		100	0	3		100	0		
109.	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			250.000.000				176.972.560			0	0			0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	50		0		50		0		0	0	0		0	0		
110.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			218.792.667.263				50.489.067.034		48.945.440.892	24.12	96.94		48.945.440.892	24.29	22.37	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun (Persentase)	72,08				0		51,08		0	0	51,08		70.87	0		
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun (Persentase)	100				0		93,18		0	0	93,18		93.18	0		
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun (Persentase)	99,25				0		99		0	0	99		99.75	0		
			Angka Partisipasi Kasar (Persen)	0				98.80		100		101.21	0	100		0	0		
111.	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			98.882.833.436				31.121.313.940		30.685.555.753	36.7	98.6		30.685.555.753	61.02	31.03		
		Terkelolanya Satuan Pendidikan Sekolah Dasar										0	0			0	0		
112.	1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			2.400.000.000							0	0			0	0		
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
113.	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.759.180.000				576.000.000		573.135.864	100	99.5		573.135.864	50	32.58		
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		1		1		100	0	1		50	0		
114.	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.050.000.000							0	0			0	0		
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		1		0		0	0	0		0	0		
115.	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			1.600.000.000							0	0			0	0		
		Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		2		0		0	0	0		0	0		
116.	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			2.749.900.000				168.500.000		167.640.182	100	99.49		167.640.182	100	6.1		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		2		2		100	0	2		100	0		
117.	1.01.02.2.01.0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/			800.000.000							0	0			0	0		
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
118.	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			899.790.000							0	0			0	0		
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		3		0		0	0	0		0	0		
119.	1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			880.000.000							0	0			0	0		
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		3		0		0	0	0		0	0		
120.	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			761.550.000							0	0			0	0		
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		4		0		0	0	0		0	0		
121.	1.01.02.2.01.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/			500.000.000							0	0			0	0		
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0		0		0		0		0	0	0		0	0		
122.	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah			1.050.000.000				4.100.000.000		4.028.118.418	50	98.25		4.028.118.418	1	383.63		
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	100		0		2		1		50	0	1		1	0		
123.	1.01.02.2.01.0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			200.000.000							0	0			0	0		
		Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	100		0		3		0		0	0	0		0	0		
124.	1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			470.175.200							0	0			0	0		
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	200		0		1		0		0	0	0		0	0		
125.	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.000.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	0		0		2		0		0	0	0		0	0		
126.	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			2.300.000.000				95.680.000		95.679.736	57.48	100		95.679.736	1352	4.16		
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100		0		2352		1.352		57.48	0	1.352		1352	0		
127.	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi			1.995.839.436				3.141.800.000		2.890.097.832	100	91.99		2.890.097.832	500	144.81		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	200		0		1000		1.000		100	0	1.000		500	0		
128.	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar			2.500.000.000				60.000.000			0	0			0	0		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	200		0		0		0		0	0	0		0	0		
129.	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			1.100.000.000				135.522.000		135.105.072	100	99.69		135.105.072	67.27	12.28		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	110		0		74		74		100	0	74		67.27	0		
130.	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		55.000.000.000		-		17.789.540.000		17.789.540.000		0	100		17.789.540.000	0	32.34		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	110		0		75		0		0	0	0		0	0		
131.	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		497.525.800		-		3.102.940		2.674.640		100	86.2		2.674.640	68.18	0.54		
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	110		0		75		75		100	0	75		68.18	0		
132.	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar		2.586.050.000		-		-		-		0	0		-	0	0		
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	3		0		1		0		0	0	0		0	0		
133.	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar		1.350.000.000		-		-		-		0	0		-	0	0		
		Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		1		0		0	0	0		0	0		
134.	1.01.02.2.01.0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah		500.000.000		-		-		-		0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	200		0		300		0		0	0	0		0	0		
135.	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		250.000.000		-		-		-		0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	100		0		0		0		0	0	0		0	0		
136.	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan		40.000.000		-		-		-		0	0		-	0	0		
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
137.	1.01.02.2.01.0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		250.000.000		-		-		-		0	0		-	0	0		
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	100		0		0		0		0	0	0		0	0		
138.	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		50.000.000		-		-		-		0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
139.	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		50.000.000		-		-		-		0	0		-	0	0		
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
140.	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan		100.000.000		-		-		-		0	0		-	0	0		
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
141.	1.01.02.2.01.0042	Penyediaan infrastruktur TIK		400.000.000		-		-		-		0	0		-	0	0		
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	50		0		0		0		0	0	0		0	0		
142.	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		500.000.000		-		-		-		0	0		-	0	0		
		Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
143.	1.01.02.2.01.0044	Penataan Ruang/Sudut Baca		40.000.000		-		-		-		0	0		-	0	0		
		Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
144.	1.01.02.2.01.0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik		700.000.000		-		-		-		0	0		-	0	0		
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	250		0		0		0		0	0	0		0	0		
145.	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik		1.030.000.000		-		285.000.000		284.042.445		100	99.66		284.042.445	1.67	27.58		
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	300		0		5		5		100	0	5		1.67	0		
146.	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru		3.700.000.000		-		-		-		0	0		-	0	0		
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2		0		3		0		0	0	0		0	0		
147.	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1.450.000.000		-		-		-		0	0		-	0	0		
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5		0		5		0		0	0	0		0	0		
148.	1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan		40.000.000		-		-		-		0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	10		0		0		0		0	0	0		0	0		
149.	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		210.000.000		-		9.890.000		8.989.900		100	90.9		8.989.900	31.82	4.28		
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	110		0		35		35		100	0	35		31.82	0		
150.	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah		3.772.823.000		-		4.291.830.000		4.248.399.524		50	98.99		4.248.399.524	200	112.61		
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		20		10		50	0	10		200	0		
151.	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		750.000.000		-		-		-		0	0		-	0	0		
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	50		0		50		0		0	0	0		0	0		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																				
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			
152.	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			1.600.000.000				464.449.000			133.33	99.5		462.132.140	8	28.88			
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	50		0		3		4		133.33	0	4		8	0			
153.	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			80.709.195.927				14.584.107.300			22.81	98.73		14.398.256.441	22.73	17.84			
		Terkelolanya Satuan Pendidikan Sekolah Menengah										0	0			0	0			
154.	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			2.792.080.282				-		-	0	0		-	0	0			
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0			
155.	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			2.100.000.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		2		0		0	0	0		0	0			
156.	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			1.900.000.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		5		0		0	0	0		0	0			
157.	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			2.700.000.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		2		0		0	0	0		0	0			
158.	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium			3.000.000.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		1		0		0	0	0		0	0			
159.	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula			1.800.000.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	1		0		1		0		0	0	0		0	0			
160.	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah			1.950.000.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	0		0		1		0		0	0	0		0	0			
161.	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/	Penjaga Sekolah		1.109.350.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0			
162.	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir			1.000.000.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		2		0		0	0	0		0	0			
163.	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah			848.800.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0			
164.	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			4.361.500.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5		0		1		0		0	0	0		0	0			
165.	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			2.100.000.000				-		1.822.823.000	1.818.113.667	100	99.74		1.818.113.667	100	86.58		
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		5		5		100	0	5		100	0			
166.	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			750.000.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3		0		0		0		0	0	0		0	0			
167.	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			2.100.000.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5		0		1		0		0	0	0		0	0			
168.	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			1.000.000.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		2		0		0	0	0		0	0			
169.	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula			1.000.000.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1		0		1		0		0	0	0		0	0			
170.	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/	Penjaga Sekolah		400.000.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/	1		0		2		0		0	0	0		0	0			
		Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)																	
171.	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir			250.000.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0			
172.	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah			250.000.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0			
173.	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			1.000.000.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2		0		2		0		0	0	0		0	0			
174.	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah			1.363.715.550				-		1.405.000.000	1.382.405.833	100	98.39		1.382.405.833	12	101.37		
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	150		0		18		18		100	0	18		12	0			
175.	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah			500.000.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	100		0		100		0		0	0	0		0	0			
176.	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah			500.000.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	100		0		1		0		0	0	0		0	0			
177.	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			800.000.000				-		-	0	0		-	0	0			
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2		0		1		0		0	0	0		0	0			

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
178.	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			400.000.000							0	0			0	0		
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100		0		100		0		0	0	0		0	0		
179.	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			2.500.000.000				98.380.000		97.769.442	0	99.38		97.769.442	0	3.91		
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	100		0		1822		0		0	0	0		0	0		
180.	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		200.000.000				1.238.000.000		1.121.390.788	100	90.58		1.121.390.788	600	560.7		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	100		0		600		600		100	0	600		600	0		
181.	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			2.250.000.000				70.708.360		33.608.037	100	47.53		33.608.037	100	1.49		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	200		0		200		200		100	0	200		100	0		
182.	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			400.000.000				17.160.000		17.079.200	0	99.53		17.079.200	0	4.27		
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	25		0		35		0		0	0	0		0	0		
183.	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			26.700.000.000				9.270.050.000		9.270.050.000	100	100		9.270.050.000	140	34.72		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	25		0		35		35		100	0	35		140	0		
184.	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			125.000.000				3.084.940		2.569.700	100	83.3		2.569.700	58.33	2.06		
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	60		0		35		35		100	0	35		58.33	0		
185.	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah			250.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2.000		0		1		0		0	0	0		0	0		
186.	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			250.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	60		0		0		0		0	0	0		0	0		
187.	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			100.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	4		0		0		0		0	0	0		0	0		
188.	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			100.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
189.	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			50.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	4		0		0		0		0	0	0		0	0		
190.	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			100.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
191.	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			250.000.000							0	0			0	0		
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
192.	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan			100.000.000							0	0			0	0		
		Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
193.	1.01.02.2.02.0056	Penataan Ruang/Sudut Baca			40.000.000							0	0			0	0		
		Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
194.	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik			220.000.000				6.572.000		5.671.845	100	86.3		5.671.845	30.43	2.58		
		Terseleenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	115		0		35		35		100	0	35		30.43	0		
195.	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru			2.649.950.095				320.000.000		319.888.169	100	99.97		319.888.169	50	12.07		
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2		0		1		1		100	0	1		50	0		
196.	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			40.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	10		0		0		0		0	0	0		0	0		
197.	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik			4.100.000.000				115.329.000		112.814.800	0	97.82		112.814.800	0	2.75		
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	25.000		0		1000		0		0	0	0		0	0		
198.	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik			500.000.000							0	0			0	0		
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	500		0		150		0		0	0	0		0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
199.	1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah			800.000.000														
		Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
200.	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			858.800.000														
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/ Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		2		0		0	0	0		0	0		
201.	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik			1.650.000.000				217.000.000		216.894.960	66.67	99.95		216.894.960	0.1	13.15		
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	2.000		0		3		2		66.67	0	2		0.1	0		
202.	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK			500.000.000														
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	20		0		0		0		0	0	0		0	0		
203.	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			29.895.637.900				3.633.088.567		3.552.903.600	20.13	97.79		3.552.903.600	7.58	11.88		
		Terkelolanya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini										0	0			0	0		
204.	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			1.745.649.500														
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	2		0		7		0		0	0	0		0	0		
205.	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD			1.100.000.000														
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	250		0		3		0		0	0	0		0	0		
206.	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD			420.852.800														
		Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	250		0		250		0		0	0	0		0	0		
207.	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD			500.000.000				568.081.000		567.500.000	100	99.9		567.500.000	10	113.5		
		Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	100		0		10		10		100	0	10		10	0		
208.	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			850.177.400														
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	100		0		100		0		0	0	0		0	0		
209.	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi	Satuan PAUD		400.000.000				195.600.000		178.800.000	100	91.41		178.800.000	74	44.7		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	50		0		37		37		100	0	37		74	0		
210.	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			950.000.000				45.645.287										
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	100		0		100		0		0	0	0		0	0		
211.	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			100.000.000				51.103.600		51.103.600	100	100		51.103.600	100	51.1		
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	76		0		76		76		100	0	76		100	0		
212.	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD			8.000.000.000				2.755.500.000		2.755.500.000	102.63	100		2.755.500.000	104	34.44		
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	150		0		152		156		102.63	0	156		104	0		
213.	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			500.000.000														
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	300		0		350		0		0	0	0		0	0		
214.	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah			100.000.000														
		Terpeliharanya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara (Unit)	30		0		25		0		0	0	0		0	0		
215.	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan			100.000.000														
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	50		0		0		0		0	0	0		0	0		
216.	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan			40.000.000														
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
217.	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan			80.000.000														
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50		0		0		0		0	0	0		0	0		
218.	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			40.000.000														
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1		0		75		0		0	0	0		0	0		
219.	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan			40.000.000														
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
220.	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			1.000.000.000														
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
221.	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan			60.000.000														
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
222.	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru			1.000.000.000														
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	2		0		2		0		0	0	0		0	0		
223.	1.01.02.2.03.0031	Penyediaan infrastruktur TIK			120.000.000														
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		

II-273

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
224.	1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	5	50.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
225.	1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2	1.000.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
226.	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	100	400.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
227.	1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	100	200.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
228.	1.01.02.2.03.0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	750.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
229.	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	2	250.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
230.	1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	1	200.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
231.	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	10	40.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
232.	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	2.000.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
233.	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	100	500.000.000	0		100		0		0	0	0		0	0		
234.	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	2	80.000.000	0		4		0		0	0	0		0	0		
235.	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5	1.032.363.200	0		3		0		0	0	0		0	0		
236.	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	250	2.025.995.000	0		1		0		0	0	0		0	0		
237.	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	115	125.000.000	0		200	17.158.680	0		0	0	0		0	0		
238.	1.01.02.2.03.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	1.000.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
239.	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	5	1.000.000.000	0		1		0		0	0	0		0	0		
240.	1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3	1.200.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
241.	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	895.600.000	0		1		0		0	0	0		0	0		
242.	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Terkelolanya Satuan Pendidikan			9.305.000.000		-	1.150.557.227	308.725.098	11.76	26.83			308.725.098	5.26	3.32			
243.	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	60	500.000.000	0		100		0		0	0	0		0	0		
244.	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Orang)	2	80.000.000	0		2	124.400.000	97.293.596	100	78.21		97.293.596	100	121.62			
245.	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	300	300.000.000	0		20		0		0	0	0		0	0		
246.	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			75.000.000		-	434.947.227	211.431.502	100	48.61			211.431.502	100	281.91			

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	5	Rp	0	Rp	5	Rp	5	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
247.	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	2	100.000.000	0	-	2	576.290.000	0	-	0	0	0	-	0	0		
248.	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)		100.000.000		-		14.920.000		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	10		0		20		0		0	0	0		0	0		
249.	1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	220	970.000.000	0	-	225		0	-	0	0	0	-	0	0		
250.	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	20	40.000.000	0	-	0		0	-	0	0	0	-	0	0		
251.	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	1	40.000.000	0	-	0		0	-	0	0	0	-	0	0		
252.	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	20	40.000.000	0	-	0		0	-	0	0	0	-	0	0		
253.	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	2	250.000.000	0	-	76		0	-	0	0	0	-	0	0		
254.	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	20.000.000	0	-	0		0	-	0	0	0	-	0	0		
255.	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi (Komunitas)	1	20.000.000	0	-	0		0	-	0	0	0	-	0	0		
256.	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi (Kegiatan)	1	100.000.000	0	-	0		0	-	0	0	0	-	0	0		
257.	1.01.02.2.04.0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi (Orang)	10	20.000.000	0	-	0		0	-	0	0	0	-	0	0		
258.	1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia (Paket)	1	120.000.000	0	-	0		0	-	0	0	0	-	0	0		
259.	1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata (Ruang)	1	20.000.000	0	-	0		0	-	0	0	0	-	0	0		
260.	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	10	120.000.000	0	-	0		0	-	0	0	0	-	0	0		
261.	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	1	100.000.000	0	-	0		0	-	0	0	0	-	0	0		
262.	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	50	100.000.000	0	-	0		0	-	0	0	0	-	0	0		
263.	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	2	800.000.000	0	-	0		0	-	0	0	0	-	0	0		
264.	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1	400.000.000	0	-	1		0	-	0	0	0	-	0	0		
265.	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	40.000.000	0	-	150		0	-	0	0	0	-	0	0		
266.	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	2	250.000.000	0	-	4		0	-	0	0	0	-	0	0		
267.	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	2	20.000.000	0	-	0		0	-	0	0	0	-	0	0		
268.	1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium			400.000.000		-				-	0	0		-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2		0		1		0		0	0	0		0	0		
269.	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun (Unit)	1	400.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
270.	1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	100.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
271.	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	200	800.000.000	0		225		0		0	0	0		0	0		
272.	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	1	800.000.000	0		1		0		0	0	0		0	0		
273.	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	1	100.000.000	0		150		0		0	0	0		0	0		
274.	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan (Unit)	1	80.000.000	0		4		0		0	0	0		0	0		
275.	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun (unit)	2	400.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
276.	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	200	300.000.000	0		225		0		0	0	0		0	0		
277.	1.01.02.2.04.0056	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	200.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
278.	1.01.02.2.04.0057	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	500.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
279.	1.01.02.2.04.0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	1	200.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
280.	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	2	400.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
281.	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			2.376.900.000		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	100				0		100		0	0	100		100	0		
			Kelulusan Dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
282.	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan			1.386.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
283.	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	4	250.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
284.	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia (Buku)	450	731.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
285.	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkatkan Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya (Orang)	110	250.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
286.	1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah (Buku)	1	80.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
287.	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	2	50.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
288.	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	2	25.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
289.	1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan			990.900.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
290.	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	4	160.000.000	0		4		0		0	0	0		0	0		
291.	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			630.900.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia (Buku)	300		0		165		0		0	0	0		0	0		
292.	1.01.03.2.02.0004	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai/ ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai (Buku)	1	40.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
293.	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun (Dokumen)	1	80.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
294.	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	80.000.000	0		4		0		0	0	0		0	0		
295.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			390.000.000		-	32.704.585		16.694.897	50	51.05		16.694.897	50	4.28		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru dan Tendik Yang Mendapatkan Pembinaan (Persen)	0				91.94		91.94		100	0	91,94		0	0		
			Indeks Pemerataan Guru (Angka)	0,7				0		0,57		0	0	0,57		81.43	0		
			Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	31				0		91.94		0	0	91,94		296.58	0		
296.	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan			390.000.000		-	32.704.585		16.694.897	50	51.05		16.694.897	50	4.28			
297.	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	4	195.000.000	0		4		0		0	0	0		0	0		
298.	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Laporan)	4	195.000.000	0		4		4		100	97.09	4		100	8.56		
299.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			720.222.050		-	15.920.000		15.819.336	66.67	99.37		15.819.336	40	2.2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	100				0		29.96		0	0	29,96		29.96	0		
			Persentase Sekolah yang Memperoleh Izin (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
300.	1.01.05.2.01	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Tersedianya Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul			300.222.050		-	-		-		0	0	-		0	0		
301.	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	4	150.000.000	0		4		0		0	0	0		0	0		
302.	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	4	150.222.050	0		0		0		0	0	0		0	0		
303.	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Tersedianya Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul			420.000.000		-	15.920.000		15.819.336	100	99.37		15.819.336	66.67	3.77			
304.	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	4	150.000.000	0		4		4		100	99.37	4		100	0		
305.	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	4	120.000.000	0		4		4		100	99.37	4		100	6.59		
306.	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	1	150.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
307.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-		-	-		-		0	0	-		0	0		Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
			Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		0		0	0	0		0	0		
308.	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0	-		0	0		
309.	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										0	0	-		0	0		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
310.	1.01.07	PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH			19.049.945.289		-		4.822.776.600		4.688.261.827	36.25	97.21		4.688.261.827	37.68	24.61	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
		Meningkatnya Jumlah Dayah yang ber Type A	Persentase Dayah dengan Type A (Persen)	15,15				10,26		5		48.73	0	5		33	0		
311.	1.01.07.7.01	Pengelolaan Pendidikan Dayah			19.049.945.289		-		4.822.776.600		4.688.261.827	36.25	97.21		4.688.261.827	37.68	24.61		
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Dayah										0	0			0	0		
312.	1.01.07.7.01.0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah			1.968.190.500		-		178.000.000		177.934.660	100	99.96		177.934.660	60	9.04		
		Sarana dan Prasarana Dayah Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun (Unit)	50		0		30		30		100	0	30		60	0		
313.	1.01.07.7.01.0002	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah			200.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Sarana dan Prasarana Dayah Terehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi (Unit)	3		0		3		0		0	0	0		0	0		
314.	1.01.07.7.01.0003	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah			14.779.899.995		-		4.288.211.800		4.189.461.521	100	97.7		4.189.461.521	101.96	28.35		
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Meningkatkan Mutunya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkatkan Mutunya (Orang)	2.301		0		2346		2.346		100	0	2.346		101.96	0		
315.	1.01.07.7.01.0004	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri			703.606.300		-		300.029.800		288.006.280	100	95.99		288.006.280	220	40.93		
		Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan (Peserta Didik)	25		0		55		55		100	0	55		220	0		
316.	1.01.07.7.01.0005	Pembinaan Manajemen Dayah			159.205.800		-		22.475.000		-	0	0		-	0	0		
		Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan (Satuan Pendidikan)	66		0		50		0		0	0	0		0	0		
317.	1.01.07.7.01.0006	Penelitian dan Pengembangan Dayah			177.000.000		-		17.350.000		17.349.608	100	100		17.349.608	125.71	9.8		
		Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan (Satuan Pendidikan)	70		0		88		88		100	0	88		125.71	0		
318.	1.01.07.7.01.0007	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah			330.042.694		-		8.700.000		8.599.977	100	98.85		8.599.977	15.15	2.61		
		Dayah yang Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah Dayah yang Meningkatkan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya (Satuan Pendidikan)	66		0		10		10		100	0	10		15.15	0		
319.	1.01.07.7.01.0008	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah			210.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia (Buku)	20		0		20		0		0	0	0		0	0		
320.	1.01.07.7.01.0009	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah			80.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Direhabilitasi (Unit)	3		0		10		0		0	0	0		0	0		
321.	1.01.07.7.01.0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah			80.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah (Dokumen)	2		0		2		0		0	0	0		0	0		
322.	1.01.07.7.01.0011	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren			82.000.000		-		8.010.000		6.909.781	80	86.26		6.909.781	80	8.43		
		Terlaksananya Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Terakreditasi (Satuan Pendidikan)	10		0		10		8		80	0	8		80	0		
323.	1.01.07.7.01.0012	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian			100.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya (Satuan Pendidikan)	10		0		20		0		0	0	0		0	0		
324.	1.01.07.7.01.0013	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Satuan Pendidikan)	2		0		2		0		0	0	0		0	0		
325.	1.01.07.7.01.0014	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah			100.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun	Jumlah Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun (Dokumen)	1		0		2		0		0	0	0		0	0		
326.	1.01.07.7.01.0015	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala			20.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Jumlah Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar (Peserta Didik)	5		0		20		0		0	0	0		0	0		
327.	1.01.07.7.01.0016	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh			20.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh (Dokumen)	1		0		2		0		0	0	0		0	0		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			495.007.216.326		-		127.553.456.176		120.507.078.940	70.77	94.48		120.507.078.940	42.66	24.34		
328.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			358.069.184.205		-		88.903.484.809		88.218.670.803	82.35	99.23		88.218.670.803	13.36	24.64	Dinas Kesehatan	
		Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja	Nilai SAKIP OPD (Angka)	68,98				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
329.	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			110.000.000		-		6.750.000		6.748.000	100	99.97		6.748.000	6	6.13		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,										0	0			0	0		
330.	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			110.000.000		-		6.750.000		6.748.000	100	99.97		6.748.000	6	6.13		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	50		0		3		3		100	0	3		6	0		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
331.	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan			321.586.520.845	-			86.844.130.000		86.394.725.631	100	99.48		86.394.725.631	19.48	26.87		
332.	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			321.586.520.845	-			86.844.130.000		86.394.725.631	100	99.48		86.394.725.631	19.48	26.87		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	56.980		0		11100		11.100		100	0	11.100		19.48	0		
333.	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			760.000.000	-			12.196.000		3.325.496	33.33	27.27		3.325.496	6.67	0.44		
		Tersusunnya Data dari Laporan Administrasi										0	0			0	0		
334.	1.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			400.000.000	-		-		-	-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	11.100		0		11100		0		0	0	0		0	0		
335.	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			105.000.000	-			3.360.000		3.325.496	100	98.97		3.325.496	20	3.17		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	50		0		10		10		100	0	10		20	0		
336.	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			255.000.000	-			8.836.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	400		0		30		0		0	0	0		0	0		
337.	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.277.280.000	-			122.749.449		121.445.429	100	98.94		121.445.429	17.5	5.33		
		Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat										0	0			0	0		
338.	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.040.000.000	-			24.653.449		24.467.775	100	99.25		24.467.775	7.5	2.35		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	40		0		3		3		100	0	3		7.5	0		
339.	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			220.000.000	-			14.000.000		14.000.000	100	100		14.000.000	20	6.36		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
340.	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			450.000.000	-			30.000.000		29.203.515	100	97.35		29.203.515	20	6.49		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		0		2		2		100	0	2		20	0		
341.	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.280.000	-			1.596.000		1.590.000	100	99.62		1.590.000	20	12.95		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10		0		2		2		100	0	2		20	0		
342.	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			555.000.000	-			52.500.000		52.184.139	100	99.4		52.184.139	20	9.4		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200		0		40		40		100	0	40		20	0		
343.	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			310.000.000	-			-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah										0	0			0	0		
344.	1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			310.000.000	-			-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
345.	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28.858.583.360	-			1.206.279.360		1.150.296.547	100	95.36		1.150.296.547	15.83	3.99		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan										0	0			0	0		
346.	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			7.500.000	-			1.200.000		1.200.000	100	100		1.200.000	7.5	16		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	400		0		30		30		100	0	30		7.5	0		
347.	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			3.949.400.000	-			725.560.000		714.826.707	100	98.52		714.826.707	20	18.1		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.250		0		250		250		100	0	250		20	0		
348.	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			24.901.683.360	-			479.519.360		434.269.840	100	90.56		434.269.840	20	1.74		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	50.000		0		10000		10.000		100	0	10.000		20	0		
349.	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.166.800.000	-			711.380.000		542.129.700	75	76.21		542.129.700	15	13.01		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang										0	0			0	0		
350.	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan			171.800.000	-			50.980.000		50.038.500	100	98.15		50.038.500	20	29.13		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
351.	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			3.040.000.000	-			605.400.000		472.091.200	100	77.98		472.091.200	20	15.53		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	175		0		35		35		100	0	35		20	0		
352.	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			615.000.000	-			35.000.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4		0		4		0		0	0	0		0	0		
353.	1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			340.000.000	-			20.000.000		20.000.000	100	100		20.000.000	20	5.88		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	150		0		30		30		100	0	30		20	0		
354.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			131.741.583.820	-			37.444.503.872		31.564.568.951	72.07	84.3		31.564.568.951	61.74	23.96	Dinas Kesehatan	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat (Persen)	0				100		99,8		99,8	0	99,8		0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Jumlah Faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan daerah kab/Kota (Faskes)	0				7		7		100	0			0	0		
			Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (Angka)	76,54				0		4,8		0	0	4,8		6,27	0		
			Angka Kematian Ibu (AKI) (Angka)	446				0		181,7		0	0	181,7		40,74	0		
355.	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			44.632.058.178	-		13.930.419.116		13.768.543.947		46.15	98.84		13.768.543.947	177.76	30.85		
		Terpenuhi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di										0	0			0	0		
356.	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya			12.885.293.049	-		-		-		0	0		-	0	0		
		Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
357.	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas			-		-	-		-		0	0		-	0	0		
		Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun (Unit)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
358.	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			40.000.000	-		-		-		0	0		-	0	0		
		Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
359.	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			200.000.000	-		-		-		0	0		-	0	0		
		Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun (Unit)	2		0		2		0		0	0	0		0	0		
360.	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas			2.000.000.000	-		-		-		0	0		-	0	0		
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
361.	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya			2.000.000.000	-		-		-		0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	2		0		2		0		0	0	0		0	0		
362.	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			2.681.070.500	-		582.643.000		571.763.200		100	98.13		571.763.200	20	21.33		
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)	35		0		7		7		100	0	7		20	0		
363.	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			6.130.000.000	-		4.477.386.305		4.296.732.190		100	95.97		4.296.732.190	20	70.09		
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)	100		0		20		20		100	0	20		20	0		
364.	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			80.000.000	-		-		-		0	0		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Unit)	2		0		2		0		0	0	0		0	0		
365.	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			5.002.000.000	-		2.668.141.645		2.636.310.000		100	98.81		2.636.310.000	1000	52.71		
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	5		0		50		50		100	0	50		1000	0		
366.	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi			3.000.000.000	-		-		-		0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)	7		0		0		0		0	0	0		0	0		
367.	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			770.872.000	-		263.679.500		218.977.724		100	83.05		218.977.724	20	28.41		
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)	500		0		100		100		100	0	100		20	0		
368.	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas			7.524.822.629	-		5.820.568.666		5.932.143.333		100	101.92		5.932.143.333	714.29	78.83		
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	35		0		250		250		100	0	250		714.29	0		
369.	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			80.000.000	-		-		-		0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga)	200		0		200		0		0	0	0		0	0		
370.	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan			2.238.000.000	-		118.000.000		112.617.500		100	95.44		112.617.500	714.29	5.03		
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)	35		0		250		250		100	0	250		714.29	0		
371.	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			86.195.165.642	-		23.358.250.124		17.638.267.147		64.8	75.51		17.638.267.147	22.82	20.46		
		Terpenuhinya Layanan Kesehatan untuk Perorangan										0	0			0	0		
372.	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			1.923.150.000	-		543.089.800		355.949.800		127.14	65.54		355.949.800	21.82	18.51		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	24.042		0		4127		5.247		127.14	0	5.247		21.82	0		
373.	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			572.060.000		-		700.000		-	0	0		-	0	0		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.860		0		4076		0		0	0	0		0	0		
374.	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			538.868.000		-		9.000.000		-	0	0		-	0	0		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	4.627		0		3837		0		0	0	0		0	0		
375.	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			2.167.213.000		-		160.700.000		700.000	0.28	0.44		700.000	0.05	0.03		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	93.888		0		17825		50		0.28	0	50		0.05	0		
376.	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			1.537.150.000		-		172.700.000		150.500.000	50.05	87.15		150.500.000	9.7	9.79		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	158.790		0		30771		15.400		50.05	0	15.400		9.7	0		
377.	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			881.830.858		-		31.100.000		24.000.000	8.02	77.17		24.000.000	1.46	2.72		
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	755.048		0		137227		11.000		8.02	0	11.000		1.46	0		
378.	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			1.751.780.000		-		182.999.407		62.750.604	53.34	34.29		62.750.604	10.92	3.58		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	91.569		0		18748		10.000		53.34	0	10.000		10.92	0		
379.	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			840.000.000		-		23.841.632		13.341.632	223.7	55.96		13.341.632	12.34	1.59		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	243.055		0		13411		30.000		223.7	0	30.000		12.34	0		
380.	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			1.761.925.000		-		4.500.000		4.500.000	11.13	100		4.500.000	1.89	0.26		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Orang)	26.486		0		4491		500		11.13	0	500		1.89	0		
381.	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			479.380.000		-		171.600.000		157.000.000	93.68	91.49		157.000.000	15.37	32.75		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar (Orang)	2.602		0		427		400		93.68	0	400		15.37	0		
382.	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			1.786.233.700		-		357.184.739		111.751.009	80.38	31.29		111.751.009	22.8	6.26		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	11.844		0		3359		2.700		80.38	0	2.700		22.8	0		
383.	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			867.000.000		-		58.106.849		10.175.000	24.58	17.51		10.175.000	6.81	1.17		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar (Orang)	29.363		0		8136		2.000		24.58	0	2.000		6.81	0		
384.	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)			320.000.000		-		4.200.000		4.200.000	30	100		4.200.000	20	1.31		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar (Dokumen)	15		0		10		3		30	0	3		20	0		
385.	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau			385.000.000		-		38.550.325		38.310.325	100	99.38		38.310.325	20	9.95		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar (Dokumen)	500		0		100		100		100	0	100		20	0		
386.	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			2.194.301.305		-		1.850.612.000		823.249.400	100	44.49		823.249.400	20	37.52		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat (Dokumen)	50		0		10		10		100	0	10		20	0		
387.	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			472.697.750		-		99.189.456		76.360.414	100	76.98		76.360.414	25	16.15		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga (Dokumen)	40		0		10		10		100	0	10		25	0		
388.	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1.035.656.865		-		458.287.000		331.201.288	100	72.27		331.201.288	20	31.98		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan (Dokumen)	50		0		10		10		100	0	10		20	0		
389.	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1.853.445.000		-		502.921.800		442.950.048	100	88.08		442.950.048	20	23.9		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan (Dokumen)	50		0		10		10		100	0	10		20	0		
390.	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			346.000.000		-		6.070.000		6.070.000	100	100		6.070.000	20	1.75		
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya (Dokumen)	50		0		10		10		100	0	10		20	0		
391.	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			592.810.000		-		143.601.400		110.791.400	100	77.15		110.791.400	20	18.69		
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan (Dokumen)	50		0		10		10		100	0	10		20	0		
392.	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			307.125.000		-		50.850.000		40.800.000	100	80.24		40.800.000	0.04	13.28		
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	258.957		0		100		100		100	0	100		0.04	0		
393.	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			1.813.865.000		-		472.421.096		471.201.096	100	99.74		471.201.096	14.97	25.98		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Orang)	334		0		50		50		100	0	50		14.97	0		
394.	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan (Dokumen)	10	210.000.000	0		10		0		0	0	0		0	0		
395.	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular (Dokumen)	50	3.248.160.000	0		10	483.311.750	10	358.646.750	100	74.21	10	358.646.750	20	11.04		
396.	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)		38.287.933.056				14.043.948.735		11.515.684.192	100	82		11.515.684.192	20	30.08		
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dokumen)	35		0		7		7		100	0	7		20	0		
397.	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan (Paket)	750	156.000.000	0		100	15.000.000	1	800.000	1	5.33		800.000	0.13	0.51		
398.	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (Dokumen)	1	430.297.376	0		1		0		0	0	0		0	0		
399.	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas (Unit)	7	336.000.000	0		7		0		0	0	0		0	0		
400.	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas (Dokumen)	35	12.440.531.000	0		7	1.040.531.000	7	889.931.054	100	85.53		889.931.054	20	7.15		
401.	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dokumen)	10	4.847.169.732	0		2	1.688.920.000	2	1.348.190.000	100	79.83		1.348.190.000	20	27.81		
402.	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota (Unit)	1	336.000.000	0		1		0		0	0	0		0	0		
403.	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Laporan)	12	265.500.000	0		2		0		0	0	0		0	0		
404.	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah (Dokumen)	50	233.000.000	0		1	7.230.135	2	7.230.135	200	100	2	7.230.135	4	3.1		
405.	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) (Unit)	1	240.000.000	0		1		0		0	0	0		0	0		
406.	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi (Dokumen)	1	90.152.000	0		0	90.152.000	1	68.315.000	0	75.78		68.315.000	100	75.78		
407.	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Dokumen)	1	401.731.000	0		0	401.731.000	1	18.268.000	0	4.55		18.268.000	100	4.55		
408.	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutan (Dokumen)	1	62.600.000	0		0	62.600.000	1	49.800.000	0	79.55		49.800.000	100	79.55		
409.	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi (Dokumen)	1	182.600.000	0		0	182.600.000	2	145.600.000	0	79.74		145.600.000	200	79.74		
410.	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			580.660.000				143.834.632		145.757.857	700	101.34		145.757.857	20	25.1		
411.	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (Dokumen)	35	580.660.000	0		1	143.834.632	7	145.757.857	700	101.34		145.757.857	20	25.1		
412.	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Terbitnya Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas			333.700.000				12.000.000		12.000.000	50	100		12.000.000	10	3.6		
413.	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	50	201.400.000	0		10	12.000.000	10	12.000.000	100	100	10	12.000.000	20	5.96		
414.	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			132.300.000							0	0			0	0		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar (Unit)	10		0		10		0		0	0	0		0	0		
415.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			1.790.784.590		-		856.895.295		577.289.434	80	67.37		577.289.434	16	32.24	Dinas Kesehatan	
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan (Persen)	0				5,41		66,13		1222,37	0	66,13		0	0		
			Persentase nakes (dokter, drg, bidan, perawat) di fasyankes yang dilakukan kredensialing (%)	288,5				0		50,57		0	0	50,57		17,53	0		
			Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	407,48				0		12,79		0	0	12,79		3,14	0		
			Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP (%)	433,95				0		75,25		0	0	75,25		17,34	0		
			Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu (%)	500				0		72,58		0	0	72,58		14,52	0		
416.	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			298.000.000		-		9.040.000		9.039.601	50	100		9.039.601	10	3.03		
		Terpenuhihnya Kebutuhan Sumber Daya Manusia										0	0			0	0		
417.	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan			114.000.000		-		9.040.000		9.039.601	100	100		9.039.601	20	7.93		
		Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
418.	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta	Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		184.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan (Dokumen)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
419.	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah			357.371.000		-		44.413.295		24.043.564	100	54.14		24.043.564	20	6.73		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan										0	0			0	0		
420.	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan			114.000.000		-		4.945.895		4.945.512	100	99.99		4.945.512	20	4.34		
		Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
421.	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			243.371.000		-		39.467.400		19.098.052	100	48.39		19.098.052	20	7.85		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
422.	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah			1.135.413.590		-		803.442.000		544.206.269	100	67.73		544.206.269	20	47.93		
		Terlaksananya Peserta Pengembangan Mutu dan										0	0			0	0		
423.	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah			1.135.413.590		-		803.442.000		544.206.269	100	67.73		544.206.269	20	47.93		
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya (Orang)	200		0		40		40		100	0	40		20	0		
424.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			2.244.726.654		-		269.828.200		113.535.752	50	42.08		113.535.752	10	5.06	Dinas Kesehatan	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi,	Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	500				0		71		0	0	71		14.2	0		
425.	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Terbitnya Izin Apotek dan Toko Obat Sesuai Standar	dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		579.995.204		-		88.139.400		76.778.275	100	87.11		76.778.275	20	13.24		
426.	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat			579.995.204		-		88.139.400		76.778.275	100	87.11		76.778.275	20	13.24		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dokumen)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
427.	1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Terbitnya Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi	Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan		199.105.200		-		-		-	0	0		-	0	0		
												0	0			0	0		
428.	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga (Dokumen)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
429.	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk			274.250.000		-		2.953.200		2.953.200	100	100		2.953.200	20	1.08		
		Terbitnya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah										0	0			0	0		
430.	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah			274.250.000		-		2.953.200		2.953.200	100	100		2.953.200	20	1.08		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga (Dokumen)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
431.	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah			348.855.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terbitnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat										0	0			0	0		
432.	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi			348.855.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

II-283

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) (Dokumen)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
433.	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Terbitnya Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan			305.712.500		-		-			0	0		-	0	0		
434.	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan (Dokumen)	1	305.712.500	0	-	1	-	0		0	0	0	-	0	0		
435.	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman			536.808.750		-		178.735.600		33.804.277	100	18.91		33.804.277	20	6.3		
436.	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan (Unit)	50	536.808.750	0		10		10		100	0	10		20	0		
437.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			1.160.937.057		-		78.744.000		33.014.000	25	41.93		33.014.000	4	2.84	Dinas Kesehatan	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	100				0		60,2		0	0	60,2		60.2	0		
			Cakupan Promsi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (Persen)	0				93.17		95,54		102.54	0	95,54		0	0		
438.	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah			447.235.306		-		-			0	0		-	0	0		
439.	1.02.05.2.01.0001	Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dokumen)	1	282.560.556	0	-	1	-	0		0	0	0	-	0	0		
440.	1.02.05.2.01.0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi			164.674.750		-		-			0	0		-	0	0		
		Tersedianya Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman (Unit)	10		0		0		0		0	0	0		0	0		
441.	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			191.934.556		-		-			0	0		-	0	0		
442.	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			110.000.000		-		-			0	0		-	0	0		
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (Dokumen)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
443.	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat (Keluarga)	1	81.934.556	0	-	20		0		0	0	0	-	0	0		
444.	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah			521.767.195		-		78.744.000		33.014.000	100	41.93		33.014.000	20	6.33		
445.	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Terlaksanaan Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (Dokumen)	5	521.767.195	0		1		1		100	0	1		20	0		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				221.206.952.343		-		43.896.843.374		22.729.773.150	47.65	51.78		22.729.773.150	44.53	10.28		
446.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			43.537.014.358		-		8.111.724.466		6.565.271.095	63.34	80.94		6.565.271.095	74.45	15.08	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		86		86	0	86		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	70,55				0		0		0	0	0		0	0		
447.	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			719.843.943		-		60.828.270		60.407.279	25	99.31		60.407.279	37.5	8.39		
448.	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			608.361.667		-		59.507.846		59.092.841	50	99.3		59.092.841	50	9.71		
449.	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			50.000.000		-		-		1.314.438	0	0		1.314.438	100	2.63		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		1		0	0	1		100	0		
450.	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			50.000.000		-		-			0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
451.	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	11.482.276	0	-	1	1.320.424	0	-	0	0	0	-	0	0		
452.	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			32.236.947.336		-		6.658.841.596		5.364.361.675	100	80.56		5.364.361.675	3.93	16.64		
		Terpenuhiya Administrasi Keuangan Dinas PUPR										0	0			0	0		
453.	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.400	32.236.947.336	0	-	55	6.658.841.596	55	5.364.361.675	100	80.56	55	5.364.361.675	3.93	16.64		
454.	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			646.775.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat										0	0			0	0		
455.	1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	100	200.000.000	0	-		-		-	0	0		-	0	0		
456.	1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	446.775.000		-	20		0		0	0	0		0	0		
457.	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.274.772.395		-		194.867.326		184.697.177	70.36	94.78		184.697.177	41.99	14.49		
		Terpenuhihnya Pelayanan Administrasi Umum										0	0			0	0		
458.	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	120.000.000	0	-	0		0		0	0	0		0	0		
459.	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	200.939.809	0	-	1	36.069.326	1	35.058.477	100	97.2	1	35.058.477	100	17.45		
460.	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	800	114.822.750	0	-	1	14.000.000	1	14.000.000	100	100	1	14.000.000	0.13	12.19		
461.	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	86.117.063	0	-	5	9.000.000	0		0	0	0	-	0	0		
462.	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365	6.544.897	0	-	365	798.000	365	760.000	100	95.24		760.000	100	11.61		
463.	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	56	746.347.876	0	-	56	135.000.000	29	134.878.700	51.79	99.91	29	134.878.700	51.79	18.07		
464.	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.645.326.461		-		121.602.534		121.339.687	0	99.78		121.339.687	66.67	4.59		
		Terpenuhihnya Pengadaan Barang										0	0			0	0		
465.	1.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	600.000.000	0	-	0		0		0	0	0	-	0	0		
466.	1.03.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1.273.487.153	0	-	1		0		0	0	0	-	0	0		
467.	1.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	771.839.308	0	-	0		6		0	0	6		200	0		
468.	1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	-	0	-	13	121.602.534	0		0	0	0	-	0	0		
469.	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.052.748.707		-		758.204.740		525.196.177	69.01	69.27		525.196.177	88.44	12.96		
		Terpenuhihnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan										0	0			0	0		
470.	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	500	11.482.274	0	-	96	1.600.000	160	1.600.000	166.67	100		1.600.000	32	13.93		
471.	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	96	2.066.809.500	0	-	240	288.720.000	96	147.007.172	40	50.92		147.007.172	100	7.11		
472.	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9	1.974.456.933	0	-	3408	467.884.740	12	376.589.005	0.35	80.49	12	376.589.005	133.33	19.07		
473.	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.960.600.516		-		317.380.000		309.269.100	107.81	97.44		309.269.100	210.28	15.77		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang										0	0			0	0		
474.	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	191.179.879	0	-	4	28.980.000	1	27.332.500	25	94.32	1	27.332.500	100	14.3		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										25	0			100	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket							
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
475.	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	612.148.936	0	-	8	88.400.000	4	83.556.600	50	94.52	4	83.556.600	80	13.65		
476.	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	1.042.448.951	0	-	8	180.000.000	1	178.930.000	12.5	99.41	1	178.930.000	50	17.16		
477.	1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	9	114.822.750	0	-	16	20.000.000	55	19.450.000	343.75	97.25	55	19.450.000	611.11	16.94		
478.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			17.113.750.214		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	31,53			-	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
479.	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	50	4.375.385.501		-	0	0		0	0	0	0	0	0	0		
480.	1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi (Unit)	8	450.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
481.	1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara (Unit)	3	1.300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
482.	1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun (Titik)	1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
483.	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun (Unit)	1	1.975.385.501	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
484.	1.03.02.2.01.0129	Rehabilitasi Embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi (Unit)	5	450.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
485.	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah			12.738.364.713		-		-		-	0	0		-	0	0		
486.	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun (KM)	1	1.850.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
487.	1.03.02.2.02.0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun (KM)	1	3.928.354.344	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
488.	1.03.02.2.02.0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun (KM)	0,5	1.507.951.026	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
489.	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan (KM)	0,3	800.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
490.	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi (KM)	0,3	880.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
491.	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara (KM)	1	520.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
492.	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun (Dokumen)	1	502.059.343	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
493.	1.03.02.2.02.0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi (UNIT)	1	2.750.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
494.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			21.492.753.836		-		6.477.437.097		6.217.823.000	28.18	95.99		6.217.823.000	183.96	28.93	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/ Kota (%)	4,97			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Persentase Penduduk Berakses Air Minum (Persen)	0			-	23.10	20		86.58	0	20		0	0			
495.	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			21.492.753.836		-		6.477.437.097		6.217.823.000	28.18	95.99		6.217.823.000	183.96	28.93		
496.	1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun (Unit)	24	5.903.112.857	0	-	110	1.008.879.847	14	872.581.000	12.73	86.49	14	872.581.000	58.33	14.78		
497.	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dokumen)	1	800.000.000	0	-	2	0	0	0	0	0	0	-	0	0		
498.	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan			10.361.184.548		-		5.468.557.250		5.345.242.000	100	97.75		5.345.242.000	677.51	51.59		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Liter/Detik)	51,66		0		350		350		100	0	350		677.51	0		
499.	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	108	4.428.456.431	0		848		0		0	0	0		0	0		
500.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			14.176.452.705		-	292.207.002		285.429.338		50	97.68		285.429.338	33.33	2.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (Persen)	0				74.21		74,16		99.93	0	74,16		0	0		
			Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman) (%)	1,26				0		0		0	0	0		0	0		
501.	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			14.176.452.705		-	292.207.002		285.429.338		50	97.68		285.429.338	33.33	2.01		
		Terkelola dan Berkembangnya Sistem Air Limbah										0	0			0	0		
502.	1.03.05.2.01.0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman			2.520.612.100		-	292.207.002		285.429.338		100	97.68		285.429.338	100	11.32		
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan (M ³ /Hari)	553		0		553		553		100	0	553		100	0		
503.	1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					-		-			0	0			0	0		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
504.	1.03.05.2.01.0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat			9.941.664.921		-		-			0	0			0	0		
		Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan /sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob. (Rumah Tangga)	195		0		0		0		0	0	0		0	0		
505.	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			1.714.175.684		-		-			0	0			0	0		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
506.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			12.969.316.647		-	4.610.000.000		4.096.842.217		87.49	88.87		4.096.842.217	138.33	31.59	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	78,69				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat (Persen)	0				78.22		85,75		109.63	0	85,75		0	0		
507.	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah			12.969.316.647		-	4.610.000.000		4.096.842.217		87.49	88.87		4.096.842.217	138.33	31.59		
		Terkelola dan Berkembangnya Sistem Drainase yang										0	0			0	0		
508.	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan			3.300.000.000		-		-			0	0			0	0		
		Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Sistem Drainase Perkotaan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
509.	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			2.532.411.117		-	550.000.000		547.977.717		0.93	99.63		547.977.717	100	21.64		
		Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Sistem Drainase Perkotaan)	3		0		324		3		0.93	0	3		100	0		
510.	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			5.937.875.030		-	3.380.000.000		3.349.315.500		161.54	99.09		3.349.315.500	420	56.41		
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun (Sistem Drainase Perkotaan)	5		0		13		21		161.54	0	21		420	0		
511.	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			1.199.030.500		-	680.000.000		199.549.000		100	29.35		199.549.000	33.33	16.64		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun (Dokumen)	3		0		1		1		100	0	1		33.33	0		
512.	1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			250.000.000		-		-			0	0			0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		Meningkatnya Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik (%)	0				0		0		0	0	0		0	0		
513.	1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-			0	0			0	0		
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Infrastruktur pada										0	0			0	0		
514.	1.03.07.2.01.0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			250.000.000		-		-			0	0			0	0		
		Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar (Rumah Tangga)	17		0		0		0		0	0	0		0	0		
515.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			12.011.939.244		-	5.858.053.610		5.564.407.500		100	94.99		5.564.407.500	60	46.32	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	86,67				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase penataan bangunan gedung (Persen)	0				7,69		7,69		100	0	7,69		0	0		
516.	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan			12.011.939.244		-	5.858.053.610		5.564.407.500		100	94.99		5.564.407.500	60	46.32		
		Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah										0	0			0	0		
517.	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			12.011.939.244		-	5.858.053.610		5.564.407.500		100	94.99		5.564.407.500	60	46.32		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Bangunan Gedung)	5		0		3		3		100	0	3		60	0		
518.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			91.714.437.341		-		18.456.181.199		-	0	0		-	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap (Persen)	0				75.19		56,54		75.2	0	56,54		0	0		
			Tingkat Kemantapan Jalan (%)	71,54				0		0		0	0	0		0	0		
519.	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			91.714.437.341		-		18.456.181.199		-	0	0		-	0	0		
		Terselenggaranya Pelayanan Jalan										0	0			0	0		
520.	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis	Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis		2.756.383.375		-		1.411.806.250		-	0	0	0	-	0	0		
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun (Dokumen)	1		0		100		0		0	0	0		0	0		
521.	1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan			-		-		10.823.011.244		-	0	0		-	0	0		
		Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	0		0		100		0		0	0	0		0	0		
522.	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan			-		-		3.386.665.705		-	0	0	0	-	0	0		
		Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	0		0		100		0		0	0	0		0	0		
523.	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			2.850.500.000		-		50.000.000		-	0	0		-	0	0		
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya (KM)	312,61		0		100		0		0	0	0		0	0		
524.	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan			-		-		2.784.698.000		-	0	0		-	0	0		
		Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	0		0		100		0		0	0	0		0	0		
525.	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan			4.467.845.766		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin (KM)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
526.	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan			22.909.323.863		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan (KM)	4.493		0		0		0		0	0	0		0	0		
527.	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan			6.914.090.497		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)	1,03		0		0		0		0	0	0		0	0		
528.	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan			2.852.642.198		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian (Meter)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
529.	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan			43.711.151.642		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi (KM)	2,3		0		0		0		0	0	0		0	0		
530.	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan			5.252.500.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun (Meter)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
531.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			314.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kontruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	38,46				0		0		0	0	0		0	0		
532.	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			222.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kompetensi Tenaga										0	0			0	0		
533.	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihnannya (Dokumen)	1	14.000.000	0	-	0		0		0	0	0	-	0	0		
534.	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis			208.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih (Orang)	20		0		0		0		0	0	0		0	0		
535.	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			92.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Jumlah Dokumen Ketersediaan Informasi Jasa										0	0			0	0		
536.	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota			92.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
537.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			7.627.287.998		-		91.240.000		-	0	0		-	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW (Persen)	0				67.8		79,07		116.62	0	79,07		0	0		
			Persentase Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPR (Persentase)	73,24				0		0		0	0	0		0	0		
538.	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			4.041.332.163		-		60.840.000		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang										0	0			0	0		
539.	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota			817.927.123		-		46.500.000		-	0	0		-	0	0		
		Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
540.	1.03.12.2.01.0007	Penyebartuasan Informasi Penataan Ruang			900.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersampainya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
541.	1.03.12.2.01.0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW	Kabupaten/Kota		842.555.040		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
542.	1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
543.	1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang			980.850.000		-		14.340.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang. (Laporan)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
544.	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			500.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi										0	0			0	0		
545.	1.03.12.2.02.0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang			500.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
546.	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.685.955.835		-		30.400.000		-	0	0		-	0	0		
		Terselaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang										0	0			0	0		
547.	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			1.115.671.892		-		30.400.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Dokumen)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
548.	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang			570.283.943		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	20		0		0		0		0	0	0		0	0		
549.	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			1.400.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi										0	0			0	0		
550.	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK			600.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	20		0		0		0		0	0	0		0	0		
551.	1.03.12.2.04.0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan			500.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
552.	1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR			300.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			54.468.469.697		-	8.148.339.316			-	0	0		-	0	0		
553.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			2.500.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		Meningkatnya Persentase Warga Negara yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	1,25				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	100				0		0		0	0	0		0	0		
554.	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		500.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi										0	0			0	0		
555.	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			125.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
556.	1.04.02.2.01.0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			125.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
557.	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			125.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
558.	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			125.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
559.	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		2.000.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Jumlah Dokumen Pembangunan dan Rehabilitasi										0	0			0	0		
560.	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			100.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi (Unit Rumah)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
561.	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			475.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit Rumah)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
562.	1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota (Unit Rumah)	3	1.425.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
563.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			17.346.533.049		-		21.900.000		-	0	0		-	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Rasio Rumah Layak Huni (Rasio)	0				69,88		29,84		42,7	0	29,84		0	0		
			Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani (%)	18,37				0		0		0	0	0		0	0		
564.	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			900.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Kawasan yang Aman dan Nyaman										0	0			0	0		
565.	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP			900.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
566.	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			16.446.533.049		-		21.900.000		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh										0	0			0	0		
567.	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	25	4.090.000.000	0		28		0		0	0	0		0	0		
568.	1.04.03.2.03.0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi (Dokumen)	1	90.826.149	0		0		0		0	0	0		0	0		
569.	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)	1,5	7.676.764.075	0		0		0		0	0	0		0	0		
570.	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha (Unit)	8	4.588.942.825	0		0		0		0	0	0		0	0		
571.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			10.626.106.295		-		3.877.182.571		-	0	0		-	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh (Persen)	0				0,27		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Peningkatan Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh (%)	341				0		0		0	0	0		0	0		
572.	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			10.626.106.295		-		3.877.182.571		-	0	0		-	0	0		
		Terhindarnya Perumahan dan Kawasan Permukiman										0	0			0	0		
573.	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki (Unit Rumah)	10	6.026.106.295	0		75		0		0	0	0		0	0		
574.	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh (Unit)	6	4.600.000.000	0		47		0		0	0	0		0	0		
575.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			23.995.830.353		-		4.249.256.745		-	0	0		-	0	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Rasio PSU Dalam Kondisi Baik (Rasio)	0				0,143		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum) (%)	68,48				0		0		0	0	0		0	0		
576.	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			23.995.830.353		-		4.249.256.745		-	0	0		-	0	0		
		Terselenggara nya PSU Perumahan										0	0			0	0		
577.	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			1.280.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
578.	1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian					-		4.249.256.745		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian (Lokasi)	0		0		4		0		0	0	0		0	0		
579.	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			230.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan (Laporan)	4		0		0		0		0	0	0		0	0		
580.	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang			280.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
581.	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan			100.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan (Lokasi)	4		0		0		0		0	0	0		0	0		
582.	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)	4	22.105.830.353	0		0		0		0	0	0		0	0		
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN			129.618.448.220		-		24.136.291.245		18.291.442.470	184.32	75.78		18.291.442.470	39.81	14.11		
583.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			42.177.958.582		-		9.058.317.381		6.314.304.194	630.93	69.71		6.314.304.194	79.53	14.97	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja	Nilai SAKIP OPD (Angka)	63,8				0		62		0	0	62		97.18	0		
			Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
584.	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			530.000.000		-		6.136.985		6.136.105	46.67	99.99		6.136.105	2.55	1.16		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran										0	0			0	0		
585.	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			110.000.000		-		6.136.985		6.136.105	46.67	99.99		6.136.105	28	5.58		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25		0		15		7		46.67	0	7		28	0		
586.	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	12		0		0		0		0	0	0		0	0		
587.	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
588.	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
589.	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
590.	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
591.	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
592.	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
593.	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			60.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	10		0		0		0		0	0	0		0	0		
594.	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	8		0		0		0		0	0	0		0	0		
595.	1.05.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
596.	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.362.024.182		-		6.653.927.412		4.064.057.222	2450	61.08		4.064.057.222	15	26.46		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat										0	0			0	0		
597.	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.242.024.182		-		6.653.927.412		4.064.057.222	2450	61.08		4.064.057.222	30	26.66		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.450		0		30		735		2450	0	735		30	0		
598.	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			120.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	20		0		0		0		0	0	0		0	0		
599.	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada										0	0			0	0		
600.	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			20.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
601.	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.427.000.000		-		84.398.000		76.398.000	4000	90.52		76.398.000	666.67	5.35		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat										0	0			0	0		
602.	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			600.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
603.	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			617.000.000		-		76.398.000		76.398.000	8000	100		76.398.000	2666.67	12.38		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3		0		1		80		8000	0	80		2666.67	0		
604.	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
605.	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			170.000.000		-		8.000.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4		0		2		0		0	0	0		0	0		
606.	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.771.242.300		-		353.553.279		326.159.479	20	92.25		326.159.479	14.29	8.65		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0			0	0		
607.	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			120.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
608.	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			215.000.000		-		9.551.214		9.541.214	0	99.9		9.541.214	0	4.44		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		2		0		0	0	0		0	0		
609.	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			203.142.300		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
610.	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			2.302.400.000		-		301.400.000		279.195.000	0	92.63		279.195.000	0	12.13		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		3		0		0	0	0		0	0		
611.	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			50.000.000		-		7.804.065		7.804.065	0	100		7.804.065	0	15.61		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		1		0		0	0	0		0	0		
612.	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.700.000		-		798.000		570.000	0	71.43		570.000	0	10		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12		0		1		0		0	0	0		0	0		
613.	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			875.000.000		-		34.000.000		29.049.200	100	85.44		29.049.200	100	3.32		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
614.	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.856.420.100		-		49.151.161		49.151.161	0	100		49.151.161	10	0.55		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan										0	0			0	0		
615.	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.000.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
616.	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			400.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
617.	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			4.000.000.000		-		-		22.633.458	0	0		22.633.458	50	0.57		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		2		0	0	2		50	0		
618.	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.016.852.500		-		22.633.458		26.517.703	0	117.16		26.517.703	0	1.31		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		2		0		0	0	0		0	0		
619.	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			439.567.600		-		26.517.703		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		2		0		0	0	0		0	0		
620.	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			9.207.972.000		-		1.466.180.544		1.373.862.827	166.67	93.7		1.373.862.827	40	14.92		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah										0	0			0	0		
621.	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			21.500.000		-		2.000.000		2.000.000	100	100		2.000.000	100	9.3		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
622.	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			925.000.000		-		110.400.000		109.499.395	0	99.18		109.499.395	0	11.84		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		0		1		0		0	0	0		0	0		
623.	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			8.261.472.000		-		1.353.780.544		1.262.363.432	400	93.25		1.262.363.432	20	15.28		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		0		1		4		400	0	4		20	0		
624.	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.003.300.000		-		444.970.000		418.539.400	65	94.06		418.539.400	26.67	13.94		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang										0	0			0	0		
625.	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan			173.300.000		-		29.120.000		27.770.000	100	95.36		27.770.000	100	16.02		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
626.	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15	1.900.000.000	0		10	387.850.000	10	362.899.400	100	93.57	10	362.899.400	66.67	19.1		
627.	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	60.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
628.	1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	120.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
629.	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	170.000.000	0		2	18.000.000	0	17.950.000	0	99.72	0	17.950.000	0	10.56		
630.	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15	380.000.000	0		5	10.000.000	3	9.920.000	60	99.2	3	9.920.000	20	2.61		
631.	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25	200.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
632.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			18.757.316.000		-		338.128.898		327.225.853	47.64	96.78		327.225.853	8.31	1.74	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100				0		100		0	0	100		100	0		
			Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100				0		100		0	0	100		100	0		
			Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100				0		100		0	0	100		100	0		
			Persentase Penanggulangan Bencana (Persen)	0			100			100		100	0	100		0	0		
633.	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman)		765.000.000		-		55.347.900		55.346.470	0	100		55.346.470	0	7.23		
634.	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun (Orang)	1.000	465.000.000	0		50	55.347.900	0	55.346.470	0	0	0	55.346.470	0	11.9		
635.	1.05.03.2.01.0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	300.000.000	0		1		0		0	0	0		0	0		
636.	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1	9.336.036.300	0		0	111.858.796	0	107.517.114	41.67	96.12		107.517.114	14.44	1.15		
637.	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani (Kegiatan)	1	400.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
638.	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya (Unit)	10	841.628.500	0		10	29.957.100	0	29.957.100	0	100	0	29.957.100	0	3.56		
639.	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota (Orang)	200	1.200.000.000	0		200		0		0	0	0		0	0		
640.	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	50	840.303.300	0		50		0		0	0	0		0	0		
641.	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			1.650.000.000		-					0	0			0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana (Kawasan)	K 4	Rp	K 0	Rp	K 0	Rp	K	Rp	K	% 0 0	K 0	Rp	K 0	% 0 0		
642.	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana (Orang)	50	431.229.200	0	-	10	53.938.927	15	50.097.247	150	92.88	15	50.097.247	30	11.62		
643.	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	1.200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
644.	1.05.03.2.02.0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	500.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
645.	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1	432.875.300	0	-	1	11.431.181	1	11.431.180	100	100	1	11.431.180	100	2.64		
646.	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	0	1.000.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
647.	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana (Kawasan)	4	840.000.000	0	-	4	16.531.588	0	16.031.587	0	96.98	0	16.031.587	0	1.91		
648.	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi		5.084.997.900		-		154.680.339		148.122.869	87	95.76		148.122.869	2.74	2.91		
649.	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas (Laporan)	1	650.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
650.	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat (Dokumen)	1	470.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
651.	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana (Orang)	415	831.997.900	0	-	50	107.325.778	43	106.959.269	86	99.66	43	106.959.269	10.36	12.86		
652.	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis (Orang)	40	530.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
653.	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (Orang)	500	1.658.000.000	0	-	50	47.354.561	44	41.163.600	88	86.93	44	41.163.600	8.8	2.48		
654.	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Pandemi/Wabah Penyakit	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu (Dokumen)	1	610.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
655.	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota (Laporan)	1	335.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
656.	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Tertatanya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		3.571.281.800		-		16.241.863		16.239.400	100	99.98		16.239.400	8.33	0.45		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
657.	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1	325.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
658.	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana (Dokumen)	2	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
659.	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia (Dokumen)	1	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
660.	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Laporan)	1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
661.	1.05.03.2.04.0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah SDM aparaturnya penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi (Orang)	5	800.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
662.	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) (Orang)	50	389.136.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
663.	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan (Kegiatan)	1	336.955.000	0	-	1	16.241.863	1	16.239.400	100	99.98	1	16.239.400	100	4.82		
664.	1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal (Lembaga)	2	160.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
665.	1.05.03.2.04.0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana (Laporan)	1	130.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
666.	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	140.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
667.	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	230.190.800	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
668.	1.05.03.2.04.0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun (Dokumen)	1	60.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
669.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	100	7.802.288.400		-	0		100		0	0	100		100	0		
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Persen)	0				100		400		400	0	400		0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp			K	%
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
			Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100				0		100		0	0	100		100	0		
670.	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun			5.293.988.400		-		62.178.000		62.177.516	66.67	100		62.177.516	9.23	1.17		
		Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian,										0	0			0	0		
671.	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000		-		-			0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
672.	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			113.400.000		-		6.120.000		6.119.516	100	99.99		6.119.516	100	5.4		
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
673.	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			200.000.000		-		-			0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
674.	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000		-		-			0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
675.	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			200.000.000		-		-			0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
676.	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			425.000.000		-		-			0	0		-	0	0		
		Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1		0		10		0		0	0	0		0	0		
677.	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)			500.000.000		-		-			0	0		-	0	0		
		Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
678.	1.05.04.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)			300.000.000		-		-			0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0		0		0		0		0	0	0		0	0		
679.	1.05.04.2.01.0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran			300.000.000		-		-			0	0		-	0	0		
		Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran (laporan)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
680.	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)			200.000.000		-		-			0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0		0		0		0		0	0	0		0	0		
681.	1.05.04.2.01.0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran			200.000.000		-		-			0	0		-	0	0		
		Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
682.	1.05.04.2.01.0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan			50.000.000		-		-			0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	0		0		0		0		0	0	0		0	0		
683.	1.05.04.2.01.0016	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran			200.000.000		-		-			0	0		-	0	0		
		Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
684.	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			1.405.588.400		-		56.058.000		56.058.000	100	100		56.058.000	20	3.99		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	10		0		2		2		100	0	2		20	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
685.	1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
686.	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	25	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
687.	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			408.300.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
688.	1.05.04.2.02.0001	Tersedianya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			200.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1		0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
689.	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			208.300.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1		0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
690.	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran			200.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Investigasi Penyebab Kejadian					-		-		-	0	0		-	0	0		
691.	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
692.	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			850.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pemberdayaan Masyarakat Dalam					-		-		-	0	0		-	0	0		
693.	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	100	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
694.	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			300.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	2		0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
695.	1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar (Dokumen)	2	350.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
696.	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			1.050.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terselenggaranya Operasi Pencarian dan Pertolongan					-		-		-	0	0		-	0	0		
697.	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1	125.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
698.	1.05.04.2.05.0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	1	125.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
699.	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
700.	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	1	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
701.	1.05.04.2.05.0006	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			150.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
702.	1.05.04.2.05.0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
703.	1.05.04.2.05.0009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
704.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			39.338.090.464		-	11.281.248.352		8.577.710.907		47.61	76.04	8.577.710.907		38.45	21.81	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja	Nilai SAKIP OPD (Angka)	64,1				0		62,7		0	0	62,7		97,82	0		
			Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
705.	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			53.500.000		-	6.442.500		5.783.401		33.33	89.77	5.783.401		270	10.81		
706.	1.05.01.2.01.0001	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25	50.000.000	0	-	6.000.000		5.506.801		100	91.78	5.506.801		40	11.01		
707.	1.05.01.2.01.0002	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10		10		100	0	10		40	0		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		-		-	-	-		-		0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		5		0		0	0	0		0	0		
708.	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		-		-	-	-		-		0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		5		0		0	0	0		0	0		
709.	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		-		-	-	-		-		0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0		0		15		0		0	0	0		0	0		
710.	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		-		-	-	-		-		0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0		0		15		0		0	0	0		0	0		
711.	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			3.500.000		-	442.500		276.600		100	62.51	276.600		500	7.9		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		5		5		100	0	5		500	0		
712.	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			27.369.140.052		-	9.703.091.000		7.152.631.615		8.97	73.71	7.152.631.615		20	26.13		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat										0	0			0	0		
713.	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			27.369.140.052		-	9.703.091.000		7.152.631.615		26.92	73.71	7.152.631.615		20	26.13		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	70		0		52		14		26.92	0	14		20	0		
714.	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		-		-	-	-		-		0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0		0		7		0		0	0	0		0	0		
715.	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		-		-	-	-		-		0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0		0		12		0		0	0	0		0	0		
716.	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-		-	-	-		-		0	0		-	0	0		
												0	0			0	0		
717.	1.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-		-	-	-		-		0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0		0		3		0		0	0	0		0	0		
718.	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			3.623.481.000		-	13.528.000		11.511.800		64.29	85.1	11.511.800		2.52	0.32		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat										0	0			0	0		
719.	1.05.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			4.000.000		-	-		-		0	0	0	-	0	0		
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
720.	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			3.396.481.000		-	-		-		0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.750		0		1		0		0	0	0		0	0		
721.	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			21.000.000		-	3.238.000		3.210.000		100	99.14	3.210.000		6.67	15.29		

II-298

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	60		0		4		4		100	0	4		6.67	0		
722.	1.05.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	12	20.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
723.	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	85	101.000.000	0		1	7.000.000	1	6.117.200	100	87.39	1	6.117.200	1.18	6.06		
724.	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	275	81.000.000	0		35	3.290.000	20	2.184.600	57.14	66.4	20	2.184.600	7.27	2.7		
725.	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			493.575.000		-		76.266.428		74.909.065	57.44	98.22		74.909.065	37.56	15.18		
726.	1.05.01.2.06.0001	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0			0	0		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	20.000.000	0		1		0		0	0	0		0	0		
727.	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	50	122.875.000	0		80	26.868.428	55	25.614.265	68.75	95.33	55	25.614.265	110	20.85		
728.	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.500	39.000.000	0		1050	5.600.000	1.050	5.580.000	100	99.64	1.050	5.580.000	42	14.31		
729.	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10	101.000.000	0		2	3.000.000	2	2.938.800	100	97.96	2	2.938.800	20	2.91		
730.	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	5.700.000	0		12	798.000	12	798.000	100	100		798.000	20	14		
731.	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
732.	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30	205.000.000	0		30	40.000.000	10	39.978.000	33.33	99.95	10	39.978.000	33.33	19.5		
733.	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.185.308.600		-		90.000.000		88.700.000	20	98.56		88.700.000	12	7.48		
734.	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	204.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
735.	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	208.430.760	0		1		0		0	0	0		0	0		
736.	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	4.000.000	0		1		0		0	0	0		0	0		
737.	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	688.877.840	0		0		0		0	0	0		0	0		
738.	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	80.000.000	0		5	90.000.000	3	88.700.000	60	98.56	3	88.700.000	60	110.88		
739.	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.241.425.612		-		1.135.740.424		1.081.585.326	75	95.23		1.081.585.326	36.25	20.64		
740.	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	8.088.900	0		12	1.200.000	12	1.104.000	100	92	12	1.104.000	100	13.65		
741.	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	602.500.000	0		12	126.500.000	12	110.871.524	100	87.65	12	110.871.524	20	18.4		
742.	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	20.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
743.	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	4.610.836.712	0		12	1.008.040.424	3	969.609.802	25	96.19	3	969.609.802	25	21.03		
744.	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.371.660.200		-		256.180.000		162.589.700	80	63.47		162.589.700	24.67	11.85		
745.	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan			137.975.000		-		26.980.000		22.688.200	100	84.09		22.688.200	20	16.44		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
746.	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	25	622.113.200	0		5	204.200.000	5	119.901.500	100	58.72	5	119.901.500	20	19.27		
747.	1.05.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	4.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
748.	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25	141.152.000	0		2	15.000.000	2	15.000.000	100	100	2	15.000.000	8	10.63		
749.	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	16	100.000.000	0		16	5.000.000	16	5.000.000	100	100	16	5.000.000	100	5		
750.	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	366.420.000	0		16	5.000.000	0		0	0	0		0	0		
751.	1.05.01.2.13	Penataan Organisasi			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
752.	1.05.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	0		0		10		0		0	0	0		0	0		
753.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			21.542.794.774		-		3.396.418.614		3.010.024.000	55.77	88.62		3.010.024.000	48.03	13.97	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman (Persen)	0			100			100		100	0	100		0	0		
			Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100			0			100		0	0	100		100	0		
			Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (%)	97,3			0			100		0	0	100		102.77	0		
			Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	17,35			0			17,25		0	0	17,25		99.42	0		
			Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100			0			0		0	0	0		0	0		
754.	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			4.160.122.498		-		357.119.000		339.283.800	45	95.01		339.283.800	3	8.16		
		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman										0	0			0	0		
755.	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	87.207.850	0		1	11.091.500	1	10.779.000	100	97.18	1	10.779.000	20	12.36		
756.	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	12	600.000.000	0		1		0		0	0	0		0	0		
757.	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpra dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	0		0		37	10.385.500	37	10.230.000	100	98.5		10.230.000	0	0		
758.	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	30	200.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
759.	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	8	40.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
760.	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Orang)	50	120.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
761.	1.05.02.2.01.0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah (Dokumen)	1	60.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
762.	1.05.02.2.01.0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan			120.000.000		-					0	0			0	0		

II-300

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan. (Orang)	7		0		0		0		0	0	0		0	0		
763.	1.05.02.2.01.0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	534	600.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
764.	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	54	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
765.	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	12	1.472.914.648	0	-	12	335.642.000	3	318.274.800	25	94.83	3	318.274.800	25	21.61		
766.	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1	80.000.000	0	-	3	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
767.	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	30	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
768.	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	30	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
769.	1.05.02.2.01.0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas (Dokumen)	1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
770.	1.05.02.2.01.0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	15	60.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
771.	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	702.900.000	-	79.838.000	79.616.000	100	99.72	79.616.000	22.22	11.33								
772.	1.05.02.2.02.0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (laporan)	1	80.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
773.	1.05.02.2.02.0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (dokumen)	1	40.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
774.	1.05.02.2.02.0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (unit)	3	140.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
775.	1.05.02.2.02.0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	50	80.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
776.	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan (laporan)	5	80.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
777.	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda (Dokumen)	50	80.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
778.	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	6	60.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
779.	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	81.400.000	-	79.838.000	79.616.000	100	99.72	79.616.000	200	97.81								

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	30		0		60		60		100	0	60		200	0		
780.	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Tterlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	2	61.500.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
781.	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			887.600.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri										0	0			0	0		
782.	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah			80.200.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah (Dokumen)	6		0		0		0		0	0	0		0	0		
783.	1.05.02.2.03.0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah			725.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah (Laporan)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
784.	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			82.400.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	5		0		1		0		0	0	0		0	0		
785.	1.05.02.7.04	Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh			15.792.172.276		-		2.959.461.614		2.591.124.200	66.67	87.55		2.591.124.200	143.64	16.41		
		Terlaksananya Pengelolaan Satuan Polisi Pamong										0	0			0	0		
786.	1.05.02.7.04.0001	Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam			80.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun dan Ditetapkan (Dokumen)	6		0		0		0		0	0	0		0	0		
787.	1.05.02.7.04.0002	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam			1.189.616.976		-		265.146.300		260.425.200	100	98.22		260.425.200	240	21.89		
		Terlaksananya Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam (Laporan)	5		0		12		12		100	0	12		240	0		
788.	1.05.02.7.04.0003	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Terlaksananya Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam (Laporan)	1	101.000.000	0		12		12		100	0	12		1200	0		
789.	1.05.02.7.04.0004	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam			204.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam (Laporan)	30		0		3		0		0	0	0		0	0		
790.	1.05.02.7.04.0005	Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota			200.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota (Laporan)	30		0		0		0		0	0	0		0	0		
791.	1.05.02.7.04.0006	Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayahul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota			140.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayahul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayahul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota (Laporan)	12		0		0		0		0	0	0		0	0		
792.	1.05.02.7.04.0007	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku			142.755.300		-		57.975.314		55.023.400	100	94.91		55.023.400	120	38.54		
		Terlaksananya Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku (Laporan)	5		0		6		6		100	0	6		120	0		
793.	1.05.02.7.04.0008	Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan			80.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam (Laporan)	12		0		0		0		0	0	0		0	0		
794.	1.05.02.7.04.0009	Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat			205.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim (Laporan)	30		0		6		0		0	0	0		0	0		
795.	1.05.02.7.04.0010	Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non			205.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi (Doumen)	30		0		0		0		0	0	0		0	0		
796.	1.05.02.7.04.0011	Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di			13.244.800.000		-		2.575.680.000		2.219.633.000	100	86.18		2.219.633.000	20	16.76		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam, yang Telah Dilakukan (Laporan)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			47.887.608.945		-		4.764.730.700		4.416.258.071	45.67	92.69		4.416.258.071	9.29	9.22		
797.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			27.353.256.885		-		3.460.011.635		3.218.056.073	105.86	93.01		3.218.056.073	16.5	11.76	Dinas Sosial	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja	Nilai SAKIP OPD (Angka)	333,07			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0			100		100		100	0	0	100		0	0		
798.	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			257.937.388		-		3.200.000		3.200.000	50	100		3.200.000	33.33	1.24		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran										0	0			0	0		
799.	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			133.383.558		-		3.200.000		3.200.000	100	100		3.200.000	100	2.4		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7	0	7		7		100	0	7		100	0		
800.	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			64.362.052		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)		3		0	5	0		0		0	0	0		0	0		
801.	1.06.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			60.191.778		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		1		0	0	0		0		0	0	0		0	0		
802.	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.040.979.102		-		3.005.760.000		2.786.623.312	100	92.71		2.786.623.312	20	21.37		
		Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0			0	0		
803.	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.040.979.102		-		3.005.760.000		2.786.623.312	100	92.71		2.786.623.312	20	21.37		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN		1.500		0	300	300		300		100	0	300		20	0		
804.	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			240.767.117		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0			0	0		
805.	1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			160.511.409		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		100		0	100	0		0		0	0	0		0	0		
806.	1.06.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			40.127.854		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		10		0	10	0		0		0	0	0		0	0		
807.	1.06.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			40.127.854		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		6		0	6	0		0		0	0	0		0	0		
808.	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.297.830.520		-		62.006.040		61.948.910	51.77	99.91		61.948.910	12.92	4.77		
		Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0			0	0		
809.	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			204.639.262		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		20		0	0	0		0		0	0	0		0	0		
810.	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			215.639.263		-		9.000.000		8.986.973	27.78	99.86		8.986.973	12.5	4.17		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		200		0	90	25		25		27.78	0	25		12.5	0		
811.	1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			60.191.778		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga		10		0	0	0		0		0	0	0		0	0		
812.	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			68.191.778		-		5.600.000		5.600.000	40	100		5.600.000	8	8.21		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor		1.000		0	200	80		80		40	0	80		8	0		
813.	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			106.313.239		-		3.608.040		3.607.337	42.86	99.98		3.607.337	42.86	3.39		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		35		0	35	15		15		42.86	0	15		42.86	0		
814.	1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.764.292		-		798.000		798.000	100	100		798.000	20	9.11		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		1.825		0	365	365		365		100	0	365		20	0		
815.	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			30.095.890		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Bahan/Material		6		0	6	0		0		0	0	0		0	0		
816.	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			603.995.018		-		43.000.000		42.956.600	100	99.9		42.956.600	20	7.11		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150		0	30	30		30		100	0	30		20	0		
817.	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9.560.364.955		-		29.680.046		29.526.000	15	99.48		29.526.000	3.75	0.31		
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah										0	0			0	0		
818.	1.06.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.006.392.624		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		1		0	0	0		0		0	0	0		0	0		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
819.	1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			300.958.892							0	0			0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	7		0		3		0		0	0	0		0	0		
820.	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			401.278.524							0	0			0	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0	0	0		0	0		
821.	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			401.278.524							0	0			0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0	0	0		0	0		
822.	1.06.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			401.278.524							0	0			0	0		
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	6		0		0		0		0	0	0		0	0		
823.	1.06.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.006.392.623							0	0			0	0		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
824.	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.006.392.622							0	0			0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
825.	1.06.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			2.036.392.622			29.680.046		29.526.000		30	99.48		29.526.000	30	1.45		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		10		3		30	0	3		30	0		
826.	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.772.125.790			282.342.880		260.736.631		194.2	92.35		260.736.631	25.51	14.71		
		Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan										0	0			0	0		
827.	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			11.331.324			960.000		958.078		300	99.8		958.078	20	8.46		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	150		0		10		30		300	0	30		20	0		
828.	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			356.958.892			50.800.000		48.867.304		100	96.2		48.867.304	20	13.69		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	150		0		30		30		100	0	30		20	0		
829.	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.403.835.574			230.582.880		210.911.249		182.61	91.47		210.911.249	36.52	15.02		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.150		0		230		420		182.61	0	420		36.52	0		
830.	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.183.252.013			77.022.669		76.021.220		301.43	98.7		76.021.220	35.75	6.42		
		Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah										0	0			0	0		
831.	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			195.111.410			27.240.000		27.039.000		400	99.26		27.039.000	80	13.86		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		1		4		400	0	4		80	0		
832.	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			265.967.114			20.700.000		19.900.000		400	96.14		19.900.000	53.33	7.48		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		0		2		8		400	0	8		53.33	0		
833.	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			170.511.410							0	0			0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20		0		0		0		0	0	0		0	0		
834.	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			60.127.853			20.000.000		20.000.000		20	100		20.000.000	4	33.26		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	25		0		5		1		20	0	1		4	0		
835.	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			90.255.702			9.082.669		9.082.220		385.71	100		9.082.220	77.14	10.06		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	35		0		7		27		385.71	0	27		77.14	0		
836.	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			401.278.524							0	0			0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
837.	1.06.01.2.13	Penataan Organisasi										0	0			0	0		
		Tersedianya Laporan Fasilitas Pelayanan Publik dan										0	0			0	0		
838.	1.06.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana										0	0			0	0		
		Terlaksananya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	5		0		10		0		0	0	0		0	0		
839.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			3.469.446.561			550.172.400		509.078.648		29.6	92.53		509.078.648	3.7	14.67	Dinas Sosial	
		Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial (%)	79,66				0		0		0	0	0		0	0		
			Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu (Persen)	0				76.80		38,7		50.39	0	38,7		0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKP Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
			Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA (%)	79,66				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	80				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	59,32				0		0		0	0	0		0	0		
840.	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			3.469.446.561		-		550.172.400		509.078.648	29.6	92.53		509.078.648	3.7	14.67		
		Terlaksananya Dukungan Terhadap Peningkatan										0	0			0	0		
841.	1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		10.527.800		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		50		0		0	0	0		0	0		
842.	1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		15.018.000		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		50		0		0	0	0		0	0		
843.	1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			160.110.966		-		487.905.690		481.538.837	128	98.7		481.538.837	25.6	300.75		
		Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	250		0		50		64		128	0	64		25.6	0		
844.	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan			1.289.675.802		-		27.549.410		27.539.811	20	99.97		27.539.811	4	2.14		
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	25		0		5		1		20	0	1		4	0		
845.	1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga			-		-		9.171.500		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota (Sertifikat)	0		0		4		0		0	0	0		0	0		
846.	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga			143.481.289		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		0		0		0	0	0		0	0		
847.	1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kewenangan Kabupaten/Kota			401.278.520		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya peran Puskesmas sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesmas desa/keurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	10		0		0		0		0	0	0		0	0		
848.	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota			617.342.934		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	50		0		0		0		0	0	0		0	0		
849.	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui			426.278.524		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi (Orang)	30		0		0		0		0	0	0		0	0		
850.	1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial			200.639.263		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti (Laporan)	12		0		0		0		0	0	0		0	0		
851.	1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			230.639.263		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis (orang)	10		0		0		0		0	0	0		0	0		
852.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			10.141.203.278		-		698.553.500		650.763.156	15.62	93.16		650.763.156	6.62	6.42	Dinas Sosial	
		Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	80				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	80				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	80				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	80				0		0		0	0	0		0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya (%)	60				0		0		0	0	0		0	0		
853.	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang			6.692.054.546			-	652.396.500		631.787.086	31.83	96.84		631.787.086	12.89	9.44		
854.	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan			2.206.392.620			-				0	0			0	0		
		Terpenuhihinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		0		100		0		0	0	0		0	0		
855.	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang			1.736.392.622			-	500.000.000		496.300.247	100	99.26		496.300.247	20	28.58		
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	500		0		100		100		100	0	100		20	0		
856.	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu			1.746.392.622			-	78.826.000		78.343.800	4	99.39		78.343.800	2	4.49		
		Terpenuhihinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		0		50		2		4	0	2		2	0		
857.	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			82.230.135			-				0	0			0	0		
		Terpenuhihinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		50		0		0	0	0		0	0		
858.	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			97.230.135			-	16.388.000		16.300.610	100	99.47		16.300.610	20	16.76		
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250		0		50		50		100	0	50		20	0		
859.	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	250	230.639.263	0		50	27.486.000	70	27.482.296	140	99.99	70	27.482.296	28	11.92		
860.	1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Terpenuhihinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Terpenuhihinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		50	16.220.000	0		0	0	0		0	0		
861.	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			72.230.135			-				0	0			0	0		
		Terpenuhihinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		50		0		0	0	0		0	0		
862.	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			72.230.135			-				0	0			0	0		
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		50		0		0	0	0		0	0		
863.	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan			52.166.209			-				0	0			0	0		
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		120		0		0	0	0		0	0		
864.	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			135.383.557			-	7.947.500		7.831.702	20	98.54		7.831.702	66.67	5.78		
		Terpenuhihinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		50		10		20	0	10		66.67	0		
865.	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan			130.383.557			-	5.529.000		5.528.431	18	99.99		5.528.431	18	4.24		
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		50		9		18	0	9		18	0		
866.	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10	130.383.556	0		0		0		0	0	0		0	0		
867.	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Kepada PMKS	Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Kepada PMKS		3.449.148.732			-	46.157.000		18.976.070	1.71	41.11		18.976.070	1.24	0.55		
868.	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			110.319.631			-	5.540.000		5.539.454	20	99.99		5.539.454	13.33	5.02		
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	75		0		50		10		20	0	10		13.33	0		
869.	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan			100.319.631			-				0	0			0	0		
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		50		0		0	0	0		0	0		
870.	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan			1.103.835.574			-				0	0			0	0		
		Terpenuhihinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	15		0		100		0		0	0	0		0	0		
871.	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang			401.278.524			-				0	0			0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		100		0		0	0	0		0	0		
872.	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu			616.917.787		-		13.572.000		13.436.616	4	99		13.436.616	4	2.18		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100		0		100		4		4	0	4		4	0		
873.	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti			401.278.524		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		50		0		0	0	0		0	0		
874.	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			40.127.853		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		50		0		0	0	0		0	0		
875.	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			225.639.263		-		27.045.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		50		0		0	0	0		0	0		
876.	1.06.04.2.02.0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			40.127.853		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		50		0		0	0	0		0	0		
877.	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			60.191.782		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		50		0		0	0	0		0	0		
878.	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			80.255.704		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		50		0		0	0	0		0	0		
879.	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			68.217.350		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		30		0		0	0	0		0	0		
880.	1.06.04.2.02.0013	Pemberian Layanan Rujukan			100.319.631		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	10		0		50		0		0	0	0		0	0		
881.	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			100.319.625		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		5		0		0	0	0		0	0		
882.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			3.440.867.457		-		16.924.000		5.254.857	11.8	31.05		5.254.857	2.5	0.15	Dinas Sosial	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	79,41				0		0		0	0	0		0	0		
			Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial (Persen)	0				47,00		79,59		169,34	0	79,59		0	0		
			Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	3,18				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	50				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi (%)	50				0		0		0	0	0		0	0		
883.	1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			1.003.196.311		-		-		-	0	0		-	0	0		
		terlaksananya Pemeliharaan terhadap Anak-anak										0	0			0	0		
884.	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			321.278.524		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		100		0		0	0	0		0	0		
885.	1.06.05.2.01.0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar			321.278.524		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		60		0		0	0	0		0	0		
886.	1.06.05.2.01.0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar			200.639.263		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		100		0		0	0	0		0	0		
887.	1.06.05.2.01.0004	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi			160.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi (Orang)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
888.	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			2.437.671.146		-		16.924.000		5.254.857	20.66	31.05		5.254.857	5	0.22		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir										0	0			0	0		
889.	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			215.639.263		-		7.709.000		5.254.857	82.63	68.17		5.254.857	20	2.44		
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	469.980		0		113755		93.996		82.63	0	93.996		20	0		
890.	1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			-		-		9.215.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pengentasan Keluarga Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	0		0		28439		0		0	0	0		0	0		
891.	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terpenuhihnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	0		0		100		0		0	0	0		0	0		
892.	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			802.557.048		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terpenuhihnya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30		0		100		0		0	0	0		0	0		
893.	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			1.203.835.572		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terpenuhihnya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30		0		0		0		0	0	0		0	0		
894.	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			215.639.263		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	28.439		0		0		0		0	0	0		0	0		
895.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA			2.591.875.709		-		9.237.000		9.231.086	5.71	99.94		9.231.086	1.67	0.36	Dinas Sosial	
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)	100				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100				0		0		0	0	0		0	0		
896.	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			2.136.520.475		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terselenggaranya Perlindungan Sosial Korban										0	0			0	0		
897.	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan			827.557.048		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terpenuhihnya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		100		0		0	0	0		0	0		
898.	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang			822.557.048		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terpenuhihnya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		100		0		0	0	0		0	0		
899.	1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	0		0		4		0		0	0	0		0	0		
900.	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			155.447.485		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terpenuhihnya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		10		0		0	0	0		0	0		
901.	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial			115.319.631		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terpenuhihnya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		10		0		0	0	0		0	0		
902.	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			215.639.263		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50		0		0		0		0	0	0		0	0		
903.	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap	Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		455.355.234		-		9.237.000		9.231.086	20	99.94		9.231.086	4.44	2.03		
		Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan										0	0			0	0		
904.	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			112.357.987		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	4		0		4		0		0	0	0		0	0		
905.	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			142.357.987		-		9.237.000		9.231.086	40	99.94		9.231.086	13.33	6.48		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	75		0		25		10		40	0	10		13.33	0		
906.	1.06.06.2.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	15	200.639.260	0		0		0		0	0	0		0	0		
907.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		890.959.055				29.832.165		23.874.251		100	80.03	23.874.251		6.67	2.68	Dinas Sosial	
		Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Taman Makam Pahlawan Yang dikelola (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
908.	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		890.959.055				29.832.165		23.874.251		100	80.03	23.874.251		6.67	2.68		
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman										0	0			0	0		
909.	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	4	464.680.531	0		0		0		0	0	0		0	0		
910.	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	5	225.639.263	0		1		1		100	80.03	23.874.251		20	10.58		
911.	1.06.07.2.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	4	200.639.261	0		0		0		0	0	0		0	0		
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		31.285.448.970				7.546.829.075		7.051.198.080		131.27	93.43	7.051.198.080		26.81	22.54		
912.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		27.691.576.970				6.299.618.158		5.806.826.618		97.38	92.18	5.806.826.618		38.26	20.97	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja	Nilai SAKIP OPD (Angka)	69,25				0		68,85		0	0	68,85		99,42	0		
			Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
913.	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		110.000.000				6.245.255		6.076.628		325	97.3	6.076.628		52	5.52		
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan										0	0			0	0		
914.	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25	110.000.000	0		4		13		325	0	13		52	0		
915.	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		23.060.793.286				5.526.420.000		5.147.058.415		100	93.14	5.147.058.415		20.11	22.32		
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan										0	0			0	0		
916.	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.480	23.060.793.286	0		700		700		100	93.14	5.147.058.415		20.11	22.32		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN										100	0	700		20.11	0		
917.	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		106.000.000				4.000.000				-	0	0		-	0	0	
		Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah										0	0			0	0		
918.	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	85	22.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
919.	2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	2.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
920.	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	7	82.000.000	0		4		0		0	0	0		0	0		
921.	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.076.822.984				104.986.007		104.826.109		86.6	99.85	104.826.109		60.92	9.73		
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi Administrasi										0	0			0	0		
922.	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	329.122.984	0		3		3		100	99.28	19.003.683		100	5.77		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor										100	0	3		100	0		
923.	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	64.000.000	0		2		2		100	100	7.700.000		100	12.03		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor										100	0	2		100	0		
924.	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	186.000.000	0		3		3		100	99.99	15.644.315		60	8.41		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan										100	0	3		60	0		
925.	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	5.700.000	0		1		1		100	100	798.000		100	14		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan										100	0	1		100	0		
926.	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	600	480.000.000	0		100		33		33	99.97	61.680.111		5.5	12.85		
		Terselaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										33	0	33		5.5	0		
927.	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		12.000.000								-	0	0		-	0	0	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
928.	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			319.000.000		-		50.000.000		5.938.500	0	11,88		5.938.500	5,83	1,86		
		Meningkatnya penggunaan BMD secara efektif dan										0	0			0	0		
929.	2.07.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
930.	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			108.000.000		-		50.000.000		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		5		0		0	0	0		0	0		
931.	2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			207.000.000		-		-		5.938.500	0	0		5.938.500	17,5	2,87		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	40		0		0		7		0	0	7		17,5	0		
932.	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.270.460.700		-		509.586.896		434.783.966	100	85,32		434.783.966	44,44	19,15		
		Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan										0	0			0	0		
933.	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			8.000.000		-		1.200.000		1.200.000	100	100		1.200.000	100	15		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
934.	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.057.131.100		-		171.320.976		137.026.086	100	79,98		137.026.086	16,67	12,96		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		2		2		100	0	2		16,67	0		
935.	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.205.329.600		-		337.065.920		296.557.880	100	87,98		296.557.880	16,67	24,6		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		2		2		100	0	2		16,67	0		
936.	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			748.500.000		-		98.380.000		108.143.000	100	109,92		108.143.000	53,75	14,45		
		Terperuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah										0	0			0	0		
937.	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas			169.500.000		-		26.980.000		26.890.000	100	99,67		26.890.000	100	15,86		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
938.	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Dinas			257.000.000		-		41.400.000		51.353.000	200	124,04		51.353.000	100	19,98		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		0		1		2		200	0	2		100	0		
939.	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			55.000.000		-		10.000.000		9.900.000	100	99		9.900.000	15	18		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	100		0		15		15		100	0	15		15	0		
940.	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			267.000.000		-		20.000.000		20.000.000	0	100		20.000.000	0	7,49		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		1		0		0	0	0		0	0		
941.	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			85.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang Menyusun Rencana Tenaga Kerja (%)	50				0		0		0	0	0		0	0		
942.	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			85.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya kualitas penyusunan Dokumen										0	0			0	0		
943.	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			85.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
944.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			1.873.872.000		-		1.152.830.182		1.150.692.985	343,03	99,81		1.150.692.985	20,56	61,41	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan (Persen)	0				15,00		28,49		189,93	0	28,49		0	0		
			Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya (%)	88,1				0		89,87		0	0	89,87		102,01	0		
945.	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			1.748.872.000		-		1.146.962.181		1.144.868.523	460	99,82		1.144.868.523	29,96	65,46		
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja berdasarkan										0	0			0	0		
946.	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster			1.583.872.000		-		1.144.619.795		1.142.849.487	680	99,85		1.142.849.487	76,98	72,16		
		Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	265		0		30		204		680	0	204		76,98	0		
947.	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana			90.000.000		-		2.342.386		2.019.036	240	86,2		2.019.036	12,9	2,24		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	93		0		5		12		240	0	12		12.9	0		
948.	2.07.03.2.01.0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah Kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n (Kesepakatan)	18	75.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
949.	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			105.000.000		-		5.868.001		5.824.462	109.09	99.26		5.824.462	12.9	5.55		
		Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan kerja swasta										0	0			0	0		
950.	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			105.000.000		-		5.868.001		5.824.462	109.09	99.26		5.824.462	12.9	5.55		
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaga)	93		0		11		12		109.09	0	12		12.9	0		
951.	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			20.000.000		-					0	0			0	0		
		Meningkatnya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga										0	0			0	0		
952.	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi			20.000.000		-					0	0			0	0		
		Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
953.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			917.000.000		-		18.539.349		18.538.781	127.9	100		18.538.781	16.23	2.02	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (%)	13,36				0		3,77		0	0	3,77		28.22	0		
			Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan (Persen)	0				55.63		3,77		6.78	0	3,77		0	0		
954.	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			343.000.000		-					0	0			0	0		
		Meningkatnya Pelayanan Antar Kerja di daerah										0	0			0	0		
955.	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja			40.000.000		-					0	0			0	0		
		Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi (Orang)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
956.	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja			47.000.000		-					0	0			0	0		
		Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL (Orang)	40		0		0		0		0	0	0		0	0		
957.	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			65.000.000		-					0	0			0	0		
		Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan (Orang)	100		0		0		0		0	0	0		0	0		
958.	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja			191.000.000		-					0	0			0	0		
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	20		0		0		0		0	0	0		0	0		
959.	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			102.000.000		-		13.609.349		13.609.328	220	100		13.609.328	122.22	13.34		
		Meningkatnya penerbitan Izin LPTKS										0	0			0	0		
960.	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS			102.000.000		-		13.609.349		13.609.328	220	100		13.609.328	122.22	13.34		
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	9		0		5		11		220	0	11		122.22	0		
961.	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			472.000.000		-		4.930.000		4.929.453	35.8	99.99		4.929.453	2.54	1.04		
		Meningkatnya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja										0	0			0	0		
962.	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			20.000.000		-					0	0			0	0		
		Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
963.	2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			72.000.000		-		4.930.000		4.929.453	35.8	99.99		4.929.453	7.62	6.85		
		Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) (Orang)	2.350		0		500		179		35.8	0	179		7.62	0		
964.	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja			380.000.000		-					0	0			0	0		
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	100		0		0		0		0	0	0		0	0		
965.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			718.000.000		-		75.841.386		75.139.696	45	99.07		75.139.696	12.86	10.47	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Persen)	0				100		18,18		18.18	0	18,18		0	0		
			Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (Orang)	450				0		0		0	0	0		0	0		
966.	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya			519.000.000		-					0	0			0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket							
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Meningkatnya penerapan PP dan PKB oleh perusahaan										0	0			0	0		
967.	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			162.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	15		0		0		0		0	0	0		0	0		
968.	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan			137.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	15		0		0		0		0	0	0		0	0		
969.	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
970.	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di			199.000.000		-		75.841.386		75.139.696	45	99.07		75.139.696	22.5	37.76		
		Meningkatnya pencegahan kasus perselisihan										0	0			0	0		
971.	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang			20.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	4		0		0		0		0	0	0		0	0		
972.	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang			127.000.000		-		75.841.386		75.139.696	45	99.07		75.139.696	90	59.17		
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan (Perkara)	10		0		20		9		45	0	9		90	0		
973.	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	4		0		0		0		0	0	0		0	0		
974.	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja		12.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja (Orang)	4		0		0		0		0	0	0		0	0		
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				35.320.249.752		-		4.998.002.781		4.268.930.562	95.59	85.41		4.268.930.562	17.04	12.09		
975.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			28.425.089.152		-		4.150.527.162		3.661.157.726	139.66	88.21		3.661.157.726	42.23	12.88	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	68,54				0		0		0	0	0		0	0		
976.	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			127.000.000		-		4.361.813		4.197.000	50	96.22		4.197.000	20	3.3		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										0	0			0	0		
977.	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			127.000.000		-		4.361.813		4.197.000	50	96.22		4.197.000	20	3.3		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35		0		14		7		50	0	7		20	0		
978.	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.542.028.472		-		3.596.601.000		3.187.488.404	1413.79	88.63		3.187.488.404	13.25	13.54		
		Terlaksananya Administrasi keuangan										0	0			0	0		
979.	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			23.542.028.472		-		3.596.601.000		3.187.488.404	1413.79	88.63		3.187.488.404	13.25	13.54		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.095		0		29		410		1413.79	0	410		13.25	0		
980.	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			453.000.000		-		4.600.000		12.414.300	0	269.88		12.414.300	0	2.74		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat										0	0			0	0		
981.	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			210.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50		0		50		0		0	0	0		0	0		
982.	2.08.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			110.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
983.	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			133.000.000		-		4.600.000		12.414.300	0	269.88		12.414.300	0	9.33		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15		0		3		0		0	0	0		0	0		
984.	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			974.040.000		-		89.018.749		88.176.600	90	99.05		88.176.600	43.75	9.05		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0			0	0		
985.	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			185.000.000		-		12.520.749		12.414.300	100	99.15		12.414.300	100	6.71		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				3		0		3		3		100	0	3		100	0		
986.	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		106.000.000		-		4.200.000		4.200.000		0	100	4.200.000		0	3.96		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		0	0	0		0	0		
987.	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		110.000.000		-		6.000.000		5.782.600		100	96.38	5.782.600		100	5.26		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		2		2		100	0	2		100	0		
988.	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		13.040.000		-		798.000		285.000		0	35.71	285.000		0	2.19		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		0		1		0		0	0	0		0	0		
989.	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		475.000.000		-		65.500.000		65.494.700		250	99.99	65.494.700		62.5	13.79		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40		0		10		25		250	0	25		62.5	0		
990.	2.08.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		85.000.000		-		-		-		0	0	-		0	0		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
991.	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		440.000.000		-		48.126.000		40.401.300		0	83.95	40.401.300		40	9.18		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang										0	0			0	0		
992.	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		440.000.000		-		-		40.401.300		0	0	40.401.300		40	9.18		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		4		0	0	4		40	0		
993.	2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		-		-		48.126.000		-		0	0	-		0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		8		0		0	0	0		0	0		
994.	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.909.920.680		-		318.577.880		250.831.597		100	78.73	250.831.597		66.67	13.13		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah										0	0			0	0		
995.	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		13.700.000		-		960.000		950.000		0	98.96	950.000		0	6.93		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3		0		3		0		0	0	0		0	0		
996.	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		376.000.000		-		50.000.000		45.615.677		200	91.23	45.615.677		100	12.13		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2		0		1		2		200	0	2		100	0		
997.	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.520.220.680		-		267.617.880		204.265.920		100	76.33	204.265.920		100	13.44		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		2		2		100	0	2		100	0		
998.	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		979.100.000		-		89.241.720		77.648.525		75	87.01	77.648.525		66.67	7.93		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang										0	0			0	0		
999.	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		210.300.000		-		27.160.000		23.837.000		100	87.77	23.837.000		100	11.33		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
1000.	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		435.800.000		-		52.081.720		43.811.525		100	84.12	43.811.525		100	10.05		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4		0		4		4		100	0	4		100	0		
1001.	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		250.000.000		-		-		-		0	0	-		0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
1002.	2.08.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		83.000.000		-		10.000.000		10.000.000		100	100	10.000.000		66.67	12.05		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12		0		8		8		100	0	8		66.67	0		
1003	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			730.000.000		-		48.210.857		42.063.700	40	87.25		42.063.700	5.67	5.76	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan	Persentase Anggaran Responsif Gender(ARG) (%)	3,9				0		3,1		0	0	3,1		79.49	0		
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	50,42				0		50,27		0	0	50,27		99.7	0		
			Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (Persen)	0				58.58		82,11		140.17	0	82,11		0	0		
1004.	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota		365.000.000		-		27.281.725		23.355.100		0	85.61	23.355.100		11.33	6.4		
		Mengintegrasikan PUG dalam kebijakan dan program										0	0			0	0		
1005.	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/ Kota		-		-		-		-		0	0	-		0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1006.	2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG (Orang)	0		0		0	25.501.925	0		0	0	0		0	0		
1007.	2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota (Orang)	0		0		15	1.779.800	0	1.779.800	0	100	0	1.779.800	0	0		
1008.	2.08.02.2.01.0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	28	135.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1009.	2.08.02.2.01.0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	150	230.000.000	0		0		34	21.575.300	0	0	34	21.575.300	22.67	9.38		
1010.	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan			180.000.000				8.799.574		7.555.500	100	85.86		7.555.500	0	4.2		
1011.	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		1		1		100	0	1		0	0		
1012.	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)	20	180.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1013.	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan			185.000.000				12.129.558		11.153.100	50	91.95		11.153.100	0	6.03		
1014.	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	0		0		15	12.129.558	15	11.153.100	100	91.95		11.153.100	0	0		
1015.	2.08.02.2.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP tingkat kab/kota (Orang)	0		0		15		0		0	0	0		0	0		
1016.	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	20	185.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1017	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			1.595.300.000				208.772.897		110.871.840	35.77	53.11		110.871.840	7.78	6.95	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Cakupan Perlindungan Perempuan dCakupan Perlindungan Perempuan dan Anakan Anak (Persen)	0				100.00		100		100	0	100		0	0		
			Cakupan Perlindungan Perempuan (Persen)	0				87,5		100		114.29	0	100		0	0		
			Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100				0		100		0	0	100		100	0		
1018.	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			590.000.000				58.682.897		49.544.840	50	84.43		49.544.840	0	8.4		
1019.	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		4	50.000.000	4	49.544.840	100	99.09		49.544.840	0	0		
1020.	2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota							8.682.897			0	0			0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Perangkat Daerah)	0		0		15		0		0	0	0		0	0		
1021.	2.08.03.2.01.0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan	KtP Kewenangan Kabupaten/Kota		140.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1022.	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada penerima kebijakan dan pemangku kepentingan	Jumlah penerima kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga)	20	450.000.000	0		0		0		0	0	0	-	0	0		
1023.	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi			635.500.000		-		120.290.000		55.327.000	43.08	45.99		55.327.000	0	8.71		
		Meningkatkan kualitas layanan rujukan lanjutan bagi										0	0			0	0		
1024.	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban		-		-			120.290.000		55.327.000	43.08	45.99		55.327.000	0	0		
		Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Layanan)	0		0		65		28		43.08	0	28		0	0		
1025.	2.08.03.2.02.0003	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan			91.500.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	45		0		0		0		0	0	0		0	0		
1026.	2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			92.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	45		0		0		0		0	0	0		0	0		
1027.	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			92.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	45		0		0		0		0	0	0		0	0		
1028.	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			90.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	45		0		0		0		0	0	0		0	0		
1029.	2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			90.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	45		0		0		0		0	0	0		0	0		
1030.	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			90.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	45		0		0		0		0	0	0		0	0		
1031.	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			90.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	40		0		0		0		0	0	0		0	0		
1032.	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah			369.800.000		-		29.800.000		6.000.000	0	20.13		6.000.000	77.78	1.62		
		Meningkatkan kinerja lembaga penyedia layanan										0	0			0	0		
1033.	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban		-		-			29.800.000		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Orang)	0		0		30		0		0	0	0		0	0		
1034.	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			369.800.000		-		-		6.000.000	0	0		6.000.000	77.78	1.62		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	45		0		0		35		0	0	35		77.78	0		
1035	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			230.000.000		-		9.996.000		9.788.105	100	97.92		9.788.105	0	4.26	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase Pembinaan Kelompok PerempuanPersentase Pembinaan kelompok perempuan (Persen)	0				93.83		0		0	0	0		0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	72,22				0		0		0	0	0		0	0		
1036.	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah			75.500.000		-		9.996.000		9.788.100	100	97.92		9.788.100	0	12.96		
		Meningkatkan kualitas hubungan keluarga yang										0	0			0	0		
1037.	2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		1	9.996.000	1	9.788.100	100	97.92	1	9.788.100	0	0		
1038.	2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen)	1	75.500.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota																	
1039.	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan			75.500.000		-		-		5	0	0		5	0	0		
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung										0	0			0	0		
1040.	2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	5	75.500.000	0		0		0		5	0	0	5	0	0		
		Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi									0	0	0			0	0		
1041.	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah			79.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung										0	0			0	0		
1042.	2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	20	79.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1043	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			260.000.000		-		9.634.983		2.555.000	0	26.52		2.555.000	0	0.98	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Kebutuhan Data SIGA/SDGA (Persen)	0				32,35		32,35		100	0	32,35		0	0		
			Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	64,71				0		35,29		0	0	35,29		54,54	0		
1044.	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat			260.000.000		-		9.634.983		2.555.000	0	26.52		2.555.000	0	0.98		
		Menyajikan data gender dan anak yang informatif dan										0	0			0	0		
1045.	2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		15	9.634.983	0	2.555.000	0	26.52	0	2.555.000	0	0		
		Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota										0	0	0		0	0		
1046.	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	260.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1047	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			1.261.260.600		-		62.446.100		59.935.535	100	95.98		59.935.535	0	4.75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Angka)	66,9				0		80		0	0	80		119,58	0		
			Cakupan Pemenuhan Hak Anak (Persen)	0				39,86		44,34		111,24	0	44,34		0	0		
1048.	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			956.260.600		-		27.772.000		27.430.510	100	98.77		27.430.510	0	2.87		
		Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah, non										0	0			0	0		
1049.	2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha (Organisasi)	0		0		7	27.772.000	7	27.430.510	100	98.77	7	27.430.510	0	0		
		Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota										100	0	0		0	0		
1050.	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	26	323.059.700	0		0		0		0	0	0		0	0		
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota																	

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1051.	2.08.06.2.01.0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	315.095.300	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1052.	2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	5	200.105.600	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1053.	2.08.06.2.01.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	118.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1054.	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Meningkatkan kualitas layanan peningkatan kualitas	Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan		305.000.000	-	-	34.674.100	-	32.505.025	-	100	93,74	32.505.025	0	10,66			
1055.	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	-	0	-	69297	-	8.842.100	-	100	94,45	8.351.250	0	0			
1056.	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	-	0	-	1	-	3.852.000	-	100	86,93	3.348.450	0	0			
1057.	2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	-	0	-	1	-	15.820.000	-	100	97,74	15.462.400	0	0			
1058.	2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	-	0	-	1	-	6.160.000	-	100	86,74	5.342.925	0	0			
1059.	2.08.06.2.02.0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	7	305.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1060	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			2.818.600.000	-	-	508.414.782	-	382.558.656	-	43,93	75,25	382.558.656	0	13,57	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak&	PersentasPersentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persen)	0			-	100	-	100	-	100	0	100		0	0		
			Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	80			-	0	-	100	-	0	0	100		125	0		
			Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Angka)	78,25			-	0	-	78	-	0	0	78		99,68	0		
1061.	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat			755.000.000	-	-	87.881.591	-	73.117.000	-	2,86	83,2	73.117.000	0	9,68			
1062.	2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terpadu	memwujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan Jumlah kegiatan pencegahan KiA terpadu (Kegiatan)	0	-	0	-	1	-	7.881.591	-	0	0	0	-	0	0		
1063.	2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan Terlaksananya advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Orang)	0	-	0	-	700	-	40	-	5,71	91,4	73.117.000	0	0			
1064.	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KiA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KiA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KiA tingkatKab/Kota (Kegiatan)	3	660.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1065.	2.08.07.2.01.0008	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan	KtA Kewenangan Kabupaten/Kota		95.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1066.	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat			1.485.000.000			-	361.933.191		295.722.866	70	81.71		295.722.866	0	19.91		
		Meningkatkan kualitas layanan bagi anak yang										0	0			0	0		
1067.	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat			-			-	361.933.191		295.722.866	70	81.71		295.722.866	0	0		
		Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan (Orang)	0		0		60		42		70	0	42		0	0		
1068.	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			185.625.000			-				0	0			0	0		
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		0		0		0	0	0		0	0		
1069.	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			185.625.000			-				0	0			0	0		
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		0		0		0	0	0		0	0		
1070.	2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			185.625.000			-				0	0			0	0		
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		0		0		0	0	0		0	0		
1071.	2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			185.625.000			-				0	0			0	0		
		layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		0		0		0	0	0		0	0		
1072.	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			185.625.000			-				0	0			0	0		
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		0		0		0	0	0		0	0		
1073.	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota			185.625.000			-				0	0			0	0		
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		0		0		0	0	0		0	0		
1074.	2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban			185.625.000			-				0	0			0	0		
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		0		0		0	0	0		0	0		
1075.	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak	Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota		185.625.000			-				0	0			0	0		
		Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)	40		0		0		0		0	0	0		0	0		
1076.	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus			578.600.000			-	58.600.000		13.718.790	100	23.41		13.718.790	0	2.37		
		Meningkatkan kualitas layanan bagi anak yang										0	0			0	0		
1077.	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat			-			-	58.600.000		13.718.790	100	23.41		13.718.790	0	0		
		Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK (Orang)	0		0		40		40		100	0	40		0	0		
1078.	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat			578.600.000			-				0	0			0	0		
		terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	40		0		0		0		0	0	0		0	0		
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			45.161.620.444			-	8.705.641.659		7.901.011.553	50.81	90.76		7.901.011.553	20.08	17.49		
1079	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			43.727.326.499			-	8.641.911.434		7.840.423.633	60.49	90.73		7.840.423.633	20.81	17.93	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja	Nilai SAKIP OPD (Angka)	66,65				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
1080.	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			183.666.408			-	20.900.001		20.886.276	100	99.93		20.886.276	20	11.37		
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan										0	0			0	0		
1081.	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			183.666.408			-	20.900.001		20.886.276	100	99.93		20.886.276	20	11.37		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	75		0		15		15		100	0	15		20	0		
1082.	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			38.124.149.700			-	7.549.008.000		6.651.524.952	50	88.11		6.651.524.952	10.14	17.45		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat										0	0			0	0		
1083.	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			38.124.149.700			-	7.549.008.000		6.651.524.952	100	88.11		6.651.524.952	10.14	17.45		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.280		0		840		840		100	0	840		10.14	0		
1084.	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						-				0	0			0	0		

II-318

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0		0		7		0		0	0	0		0	0		
1085.	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			54.109.915		-		-		-	0	0	-	0	0			
		Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada										0	0		0	0			
1086.	2.09.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			24.604.406		-		-		-	0	0	-	0	0			
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
1087.	2.09.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			29.505.509		-		-		-	0	0	-	0	0			
		Tersedianya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
1088.	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			302.332.035		-		-		-	0	0	-	0	0			
		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										0	0		0	0			
1089.	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			54.277.568		-		-		-	0	0	-	0	0			
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	50		0		200		0		0	0	0		0	0		
1090.	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			198.221.878		-		-		-	0	0	-	0	0			
		Tersedianya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		10		0		0	0	0		0	0		
1091.	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			49.832.589		-		-		-	0	0	-	0	0			
		Tersedianya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		5		0		0	0	0		0	0		
1092.	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			811.991.203		-		-		135.093.433	71.43	95.07		128.431.700	16.67	15.82		
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0		0	0			
1093.	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			136.388.674		-		-		16.495.433	100	98.84		16.303.700	20	11.95		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	400		0		80		80		100	0	80		20	0		
1094.	2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			66.833.204		-		-		-	0	0	-	0	0			
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0		1		0		0	0	0		0	0		
1095.	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			109.110.938		-		-		13.550.000	100	96.79		13.550.000	20	12.42		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.750		0		1150		1.150		100	0	1.150		20	0		
1096.	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			109.110.938		-		-		10.778.000	100	99.8		10.778.000	20	9.88		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	150		0		30		30		100	0	30		20	0		
1097.	2.09.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.770.103		-		-		798.000	100	95.24		760.000	20	9.78		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.650		0		730		730		100	0	730		20	0		
1098.	2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			-		-		-		-	0	0	-	0	0			
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1099.	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			382.777.346		-		-		93.000.000	100	93.59		87.040.000	20	22.74		
		Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300		0		60		60		100	0	60		20	0		
1100.	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			827.695.656		-		-		41.000.000	46.67	430.88		176.661.000	34	21.34		
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah										0	0		0	0			
1101.	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			222.777.346		-		-		30.624.800	100	0		30.624.800	100	13.75		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
1102.	2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			178.221.878		-		-		105.404.200	33.33	0		105.404.200	50	59.14		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		3		1		33.33	0	1		50	0		
1103.	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			110.641.352		-		-		-	0	0	-	0	0			
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		4		0		0	0	0		0	0		
1104.	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			89.110.938		-		-		-	0	0	-	0	0			
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		2		0		0	0	0		0	0		
1105.	2.09.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			226.944.142		-		-		41.000.000	100	99.1		40.632.000	20	17.9		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15		0		3		3		100	0	3		20	0		
1106.	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.343.902.091		-		-		705.890.000	100	93.25		658.258.705	20	28.08		
		Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan										0	0		0	0			
1107.	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			9.183.321		-		-		2.000.000	100	100		2.000.000	20	21.78		
		Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	150		0		30		30		100	0	30		20	0		
1108.	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			650.554.692		-		-		154.440.000	100	91.89		141.916.865	20	21.81		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	420		0		84		84		100	0	84		20	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
1109.	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.540	1.684.164.078	0	-	708	549.450.000	708	514.341.840	100	93.61	708	514.341.840	20	30.54		
1110.	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			1.079.479.491		-		190.020.000		204.661.000	100	107.7		204.661.000	40	18.96		
1111.	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	60	181.869.712	0	-	12	31.300.000	12	30.624.800	100	97.84	12	30.624.800	20	16.84		
1112.	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	120	602.554.692	0	-	24	116.040.000	24	105.404.200	100	90.83		105.404.200	20	17.49		
1113.	2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	163.666.408	0	-	1	14.680.000	1	28.000.000	100	190.74	1	28.000.000	100	17.11		
1114.	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	40	131.388.679	0	-	8	28.000.000	8	40.632.000	100	145.11	8	40.632.000	20	30.93		
1115	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			1.151.572.058		-		57.902.224		54.795.520	31.82	94.63		54.795.520	15.95	4.76	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan Pangan Utama (Persen)	0				43.47	2.739.002		6300902	0	0	2.739.002		0	0		
			Skor Pola Pangan Harapan (Angka)	79,25				0	0		0	0	0	0		0	0		
1116.	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan			559.938.449		-		34.169.723		31.707.920	50	92.8		31.707.920	3.89	5.66		
1117.	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	1	205.725.117	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1118.	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Pangan Pokok dan Pangan Lainnya Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	10	63.217.536	0	-	2	7.890.001	2	5.491.100	100	69.6	2	5.491.100	20	8.69		
1119.	2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Berkembangnya Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan (Unit)	0		0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1120.	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	30	124.435.070	0	-	1	26.279.722	1	26.216.820	100	99.76	1	26.216.820	3.33	21.07		
1121.	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal (Laporan)	5	88.789.581	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1122.	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	4	23.697.396	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1123.	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	3	54.073.749	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1124.	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan			237.400.910		-		-		-	0	0		-	0	0		
1125.	2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	3	62.217.536	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1126.	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	3	111.183.374	0	-	20	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1127.	2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara (Ton)	0		0	-	20	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1128.	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota (Ton)	3	22.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1129.	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara (Ton)	3	42.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1130.	2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Terlaksananya Penentuan Harga Minimum Daerah			62.217.536		-		-		-	0	0		-	0	0		
1131.	2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal			62.217.536		-		-		-	0	0		-	0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal (Laporan)	20		0		20		0		0	0	0		0	0		
1132.	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			292.015.163		-		23.732.501		23.087.600	50	97,28		23.087.600	66,67	7,91		
		Terlaksananya Pelaksanaan Pencapaian Target										0	0			0	0		
1133.	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	43.145.023	0	-	1	5.830.001	1	5.205.600	100	89,29	1	5.205.600	100	12,07		
1134.	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	1	205.725.117	0	-	2	17.902.500	1	17.882.000	50	99,89	1	17.882.000	100	8,69		
1135.	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1	43.145.023	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1136	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			210.489.768		-		5.828.001		5.792.400	50	99,39		5.792.400	50	2,75	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
		Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Ketersediaan Informasi Kerawanan Pangan (Persen)	0				66,67		66,67		100	0	66,67		0	0		
			Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	10,29				0		0		0	0	0		0	0		
1137.	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			85.102.903		-		5.828.001		5.792.400	100	99,39		5.792.400	100	6,81		
		Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan										0	0			0	0		
1138.	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	85.102.903	0	-	1	5.828.001	1	5.792.400	100	99,39	1	5.792.400	100	6,81		
1139.	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			125.386.865		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Kerawanan Pangan Kewenangan										0	0			0	0		
1140.	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	125.386.865	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1141	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			72.232.119		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Konsumsi Pangan Segar (Persen)	0				63,64		63,64		100	0	63,64		0	0		
			Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	100				0		0		0	0	0		0	0		
1142.	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			72.232.119		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar										0	0			0	0		
1143.	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	72.232.119	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			25.482.348.501		-		3.395.053.370		3.159.866.055	158,8	93,07		3.159.866.055	18,32	12,4		
1144	2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			22.532.020.594		-		3.290.178.190		3.074.143.812	188,4	93,43		3.074.143.812	18,47	13,64	Dinas Pertanahan	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		225,8		225,8	0	225,8		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	63,11				0		0		0	0	0		0	0		
1145.	2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			207.000.000		-		14.285.000		14.166.566	160	99,17		14.166.566	40	6,84		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0			0	0		
1146.	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	135.000.000	0	-	5	14.285.000	8	14.166.566	160	99,17		14.166.566	80	10,49		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)									160	0	8		80	0		
1147.	2.10.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	72.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1148.	2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.565.903.854		-		2.952.856.000		2.761.613.088	85,71	93,52		2.761.613.088	6,67	14,87		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Pada Dinas										0	0			0	0		
1149.	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.100	18.378.801.229	0	-	490	2.952.856.000	420	2.761.613.088	85,71	93,52	420	2.761.613.088	20	15,03		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN										85,71	0	0		20	0		
1150.	2.10.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2	93.425.625	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										0	0	0		0	0		
1151.	2.10.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			93.677.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	Rp	0	Rp	0	Rp	0	Rp	0	0	0	Rp	0	0		
1152.	2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			612.960.219		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian										0	0			0	0		
1153.	2.10.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			205.653.406		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	60		0		0		0		0	0	0		0	0		
1154.	2.10.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			90.512.625		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
1155.	2.10.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			90.512.625		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4		0		0		0		0	0	0		0	0		
1156.	2.10.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			226.281.563		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	10		0		0		0		0	0	0		0	0		
1157.	2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			903.043.624		-		78.285.630		69.452.362	307.48	88.72		69.452.362	15.7	7.69		
		Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat										0	0			0	0		
1158.	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			133.140.781		-		12.391.630		12.333.927	1000	99.53		12.333.927	20	9.26		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	150		0		3		30		1000	0	30		20	0		
1159.	2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			110.512.625		-		6.096.000		4.446.000	54.05	72.93		4.446.000	6.02	4.02		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.325		0		370		200		54.05	0	200		6.02	0		
1160.	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			110.512.625		-		9.000.000		8.999.235	300	99.99		8.999.235	20	8.14		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	45		0		3		9		300	0	9		20	0		
1161.	2.10.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			6.299.220		-		798.000		798.000	100	100		798.000	20	12.67		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.825		0		365		365		100	0	365		20	0		
1162.	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			542.578.373		-		50.000.000		42.875.200	83.33	85.75		42.875.200	12.5	7.9		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	160		0		24		20		83.33	0	20		12.5	0		
1163.	2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			495.766.779		-		15.000.000		11.940.000	25	79.6		11.940.000	2	2.41		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan										0	0			0	0		
1164.	2.10.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			135.768.938		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1165.	2.10.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			359.997.841		-		15.000.000		11.940.000	25	79.6		11.940.000	4	3.32		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		4		1		25	0	1		4	0		
1166.	2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			942.871.973		-		166.371.560		154.322.946	39.31	92.76		154.322.946	34.07	16.37		
		Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang										0	0			0	0		
1167.	2.10.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			11.341.263		-		800.000		800.000	76.25	100		800.000	12.2	7.05		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	500		0		80		61		76.25	0	61		12.2	0		
1168.	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			370.018.847		-		60.900.000		60.148.500	25	98.77		60.148.500	10	16.26		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	120		0		48		12		25	0	12		10	0		
1169.	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			561.511.863		-		104.671.560		93.374.446	16.67	89.21		93.374.446	80	16.63		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		0		48		8		16.67	0	8		80	0		
1170.	2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			804.474.145		-		63.380.000		62.648.850	225	98.85		62.648.850	35	7.79		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang										0	0			0	0		
1171.	2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan			184.003.521		-		26.980.000		26.976.850	400	99.99		26.976.850	80	14.66		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		1		4		400	0	4		80	0		
1172.	2.10.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			247.908.280		-		6.400.000		6.212.000	400	97.06		6.212.000	40	2.51		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	10		0		1		4		400	0	4		40	0		
1173.	2.10.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			249.781.563		-		20.000.000		20.000.000	100	100		20.000.000	20	8.01		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
1174.	2.10.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			122.780.781		-		10.000.000		9.460.000	0	94.6		9.460.000	0	7.7		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	40		0		15		0		0	0	0		0	0		
1175	2.10.12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH			665.000.000		-		7.000.000		-	0	0		-	0	0	Dinas Pertanahan	
		Meningkatnya kejelasan hak- hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat miskin	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (Angka)	4,73				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat (Persen)	0				46.42		0		0	0	0		0	0		
1176	2.10.12.7.01	Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Tersedianya Data Aset Tanah Pemerintah	Aset Pemerintah		345.000.000		-		7.000.000		-	0	0		-	0	0		
1177	2.10.12.7.01.0001	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah			345.000.000		-		7.000.000		-	0	0		-	0	0		
		Terinventarisasinya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah (Laporan)	1		0		5		0		0	0	0		0	0		
1178	2.10.12.7.02	Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Tersedianya Data Aset Tanah Milik Masyarakat Miskin	Milik Masyarakat Miskin		320.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
1179	2.10.12.7.02.0001	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin			320.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terinventarisasinya Tanah-Tanah Milik Masyarakat Miskin	Jumlah Data Tanah Milik Masyarakat Miskin (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1180	2.10.13	PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN			245.000.000		-		4.500.000		4.500.000	20	100		4.500.000	20	1.84	Dinas Pertanahan	
		Meningkatnya kejelasan hak milik atas tanah	Persentase Kejelasan Hak Milik Atas Tanah (%)	36,63				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Tanah yang Dipetakan (Persen)	0				67.07		123,61		184.3	0	123,61		0	0		
1181	2.10.13.7.01	Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong			245.000.000		-		4.500.000		4.500.000	20	100		4.500.000	20	1.84		
		Tersedianya Tanah Instansi Pemerintah dan										0	0			0	0		
1182	2.10.13.7.01.0001	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda			245.000.000		-		4.500.000		4.500.000	20	100		4.500.000	20	1.84		
		Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda (Dokumen)	5		0		5		1		20	0	1		20	0		
1183	2.10.14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN			665.000.000		-		32.438.125		28.756.000	80	88.65		28.756.000	40	4.32	Dinas Pertanahan	
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan SDM bidang pertanahan	Persentase SDM Bidang Pertanahan yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	59,65				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Pembinaan SDM Pertanahan (Persen)	0				57.02		182,89		320,75	0	182,89		0	0		
1184	2.10.14.7.01	Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten			665.000.000		-		32.438.125		28.756.000	80	88.65		28.756.000	40	4.32		
		Meningkatnya Jumlah Dokumen Pembinaan										0	0			0	0		
1185	2.10.14.7.01.0001	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan			345.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1186	2.10.14.7.01.0002	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan			320.000.000		-		32.438.125		28.756.000	80	88.65		28.756.000	80	8.99		
		Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan (Dokumen)	5		0		5		4		80	0	4		80	0		
1187	2.10.15	PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU			255.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Pertanahan	
		Meningkatnya tata kelola pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau	Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau yang Tertata (%)	63,81				0		0		0	0	0		0	0		
1188	2.10.15.7.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil,			255.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir,										0	0			0	0		
1189	2.10.15.7.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir			255.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir	Jumlah Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di Wilayah Pesisir (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1190	2.10.16	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN			230.000.000		-		32.924.267		28.924.243	50	87.85		28.924.243	40	12.58	Dinas Pertanahan	
		Meningkatnya tata kelola sistem informasi manajemen pertanahan	Persentase Informasi Pertanahan yang Dimanfaatkan (%)	0				0		87,85		0	0	87,85		0	0		
			Ketersediaan Sistem Informasi Pertanahan (Ada/Tidak)	0				Tidak		0		0	0	0		0	0		
1191	2.10.16.7.01	Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)			230.000.000		-		32.924.267		28.924.243	50	87.85		28.924.243	40	12.58		
		Tersedianya data Sistem Informasi Manajemen										0	0			0	0		
1192	2.10.16.7.01.0001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)			230.000.000		-		32.924.267		28.924.243	50	87.85		28.924.243	40	12.58		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) (Dokumen)	5		0		4		2		50	0	2		40	0		
1193	2.10.17	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENKETA DAN PERKARA PERTANAHAN			890.327.907		-		28.012.788		23.542.000	200	84.04		23.542.000	13.33	2.64	Dinas Pertanahan	
		Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan	Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanahan (Persen)	0				60		112,26		187.1	0	112,26		0	0		
			Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Pertanahan (%)	66,67				0		0		0	0	0		0	0		
1194	2.10.17.7.01	Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			890.327.907		-		28.012.788		23.542.000	200	84.04		23.542.000	13.33	2.64		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		konflik Pertanahan										0	0			0	0		
1195.	2.10.17.7.01.0001	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah	Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5	330.000.000	0	-	1	28.012.788	2	23.542.000	200	84.04	2	23.542.000	40	7.13		
1196.	2.10.17.7.01.0002	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan (Layanan)	1	325.000.000	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1197.	2.10.17.7.01.0004	Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Dnerah Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5	235.327.907	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			163.312.983.972		-		49.748.086.913		47.994.622.486	852.85	96.48		47.994.622.486	9.56	29.39		
1198	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			128.515.233.990		-		7.959.320.896		7.299.196.306	1567	91.71		7.299.196.306	23.93	5.68	Dinas Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja	Nilai SAKIP OPD (Angka)	63,8				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0			100			100		100	0	100		0	0		
1199.	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			316.100.000		-		9.100.000		8.914.750	100	97.96		8.914.750	6.67	2.82		
1200.	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	75	316.100.000	0	-	5	9.100.000	5	8.914.750	100	97.96	5	8.914.750	6.67	2.82		
1201.	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			19.668.368.305		-		3.655.976.000		3.247.253.122	100.23	88.82		3.247.253.122	96.67	16.51		
1202.	2.11.01.2.02.0001	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan PPPK			19.668.368.305		-		3.655.976.000		3.247.253.122	100.23	88.82		3.247.253.122	96.67	16.51		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	450		0	434			435		100.23	0	435		96.67	0		
1203.	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			50.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
1204.	2.11.01.2.03.0001	Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah			50.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0	0			0		0	0	0		0	0		
1205.	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.993.780.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
1206.	2.11.01.2.05.0002	Terlaksananya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi										0	0			0	0		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1.663.780.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	450		0	0			0		0	0	0		0	0		
1207.	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	330.000.000	0	0			0		0	0	0		0	0		
1208.	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			7.616.459.500		-		1.297.380.096		1.291.680.300	3834.2	99.56		1.291.680.300	38.34	16.96		
		Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan										0	0			0	0		
1209.	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	100	329.354.500	0	1		62.082.096	1	61.460.500	100	99	1	61.460.500	1	18.66		
1210.	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100	6.288.360.000	0	1		1.165.500.000	26,81	1.161.090.000	2681	99.62	26,81	1.161.090.000	26.81	18.46		
1211.	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	100	206.465.000	0	1		3.000.000	100	2.928.000	10000	97.6	100	2.928.000	100	1.42		
1212.	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	100	42.280.000		-		798.000		798.000	100	100		798.000	1	1.89		
1213.	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	100	750.000.000	0	1		66.000.000	62,9	65.403.800	6290	99.1	62,9	65.403.800	62.9	8.72		
1214.	2.11.01.2.07	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			862.787.100		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										0	0			0	0		
1215.	2.11.01.2.07.0002	Jumlah terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional										0	0			0	0		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	404.751.400	0	0		-	0		0	0	0	-	0	0		
1216.	2.11.01.2.07.0005	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			458.035.700		-		-		-	0	0		-	0	0		
1217.	2.11.01.2.08	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0	0			0		0	0	0		0	0		
1218.	2.11.01.2.08.0001	Tersedianya Pembayaran Tagihan Listrik			83.422.040.845		-		746.719.200		593.988.934	233.33	79.55		593.988.934	0.73	0.71		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat										0	0			0	0		
					34.000.000		-		1.200.000		1.000.000	200	83.33		1.000.000	0.4	2.94		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	500		0		1		2		200	0	2		0.4	0		
1219	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	500	79.665.891.687	0		1	64.000.000	4	62.952.198	400	98.36		62.952.198	0.8	0.08		
1220	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	100	3.722.149.158	0		1	681.519.200	1	530.036.736	100	77.77		530.036.736	1	14.24		
1221	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.585.698.240				2.250.145.600		2.157.359.200	100	95.88		2.157.359.200	39.38	14.79		
1222	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	167.460.000	0		1	24.640.000	1	21.999.000	100	89.28		21.999.000	100	13.14		
1223	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40	13.228.312.000	0		23	2.200.505.600	23	2.110.484.200	100	95.91		2.110.484.200	57.5	15.95		
1224	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	500	250.026.240	0		0		0		0	0	0		0	0		
1225	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		1	25.000.000	1	24.876.000	100	99.5		24.876.000	0	0		
1226	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	30	939.900.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1227	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			857.250.000				57.987.966		55.479.150	100	95.67		55.479.150	0.5	6.47	Dinas Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	1				0		0		0	0	0		0	0		
			Tersusunnya RPPLH Kab/Kota (Ada/Tidak)	0				Ada		100		0	0	100		0	0		
1228	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			413.000.000							0	0			0	0		
1229	2.11.02.2.01.0002	Jumlah Dokumen Lingkungan Hidup			120.000.000							0	0			0	0		
		Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	25		0		0		0		0	0	0		0	0		
1230	2.11.02.2.01.0004	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	25	60.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1231	2.11.02.2.01.0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan (Dokumen)	25	105.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1232	2.11.02.2.01.0006	Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi (Dokumen)	25	128.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1233	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			444.250.000				57.987.966		55.479.150	100	95.67		55.479.150	1	12.49		
1234	2.11.02.2.02.0002	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang tersusun			61.000.000				57.987.966		55.479.150	100	95.67		55.479.150	4	90.95		
		Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	25		0		1		1		100	0	1		4	0		
1235	2.11.02.2.02.0004	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota			165.000.000							0	0			0	0		
		Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	15		0		0		0		0	0	0		0	0		
1236	2.11.02.2.02.0005	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS			86.250.000							0	0			0	0		
		Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	10		0		0		0		0	0	0		0	0		
1237	2.11.02.2.02.0006	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota			132.000.000							0	0			0	0		
		Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun (Dokumen)	10		0		0		0		0	0	0		0	0		
1238	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			10.331.600.000				26.859.662.654		26.702.640.150	200	99.42		26.702.640.150	5.88	258.46	Dinas Lingkungan Hidup	
		Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan	Indeks Kualitas Air (Indeks)	72				0		0		0	0	0		0	0		
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Nilai)	0				65.80		71.94		109.33	0	71.94		0	0		
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)	93				0				0	0	0		0	0		
1239	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			9.374.600.000				26.818.942.654		26.662.914.825	300	99.42		26.662.914.825	12.5	284.42		
		Jumlah Dokumentasi Lingkungan Hidup										0	0			0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1240.	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	3	8.434.600.000	0	-	1	26.818.942.654	3	26.662.914.825	300	99.42	3	26.662.914.825	100	316.11		
1241.	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	5	190.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1242.	2.11.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan (Kegiatan)	10	85.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1243.	2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	5	170.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1244.	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut) (Lokasi)	20	140.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1245.	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun (Dokumen)	5	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1246.	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan (Paket)	20	130.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1247.	2.11.03.2.01.0019	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup Laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup	Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup (Laporan)	5	75.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1248.	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			365.000.000		-		40.720.000		39.725.325	100	97.56		39.725.325	0	10.88		
1249.	2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan (Laporan)	0	-	0	-	1	40.720.000	1	39.725.325	100	97.56		39.725.325	0	0		
1250.	2.11.03.2.02.0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Area Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi (Lokasi)	15	140.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1251.	2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan (Titik)	15	190.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1252.	2.11.03.2.02.0004	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)	7	35.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1253.	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			592.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
1254.	2.11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan (Dokumen)	10	80.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1255.	2.11.03.2.03.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	10	110.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1256.	2.11.03.2.03.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	10	87.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1257.	2.11.03.2.03.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota (Kegiatan)	10	85.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1258.	2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi			90.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan (Kegiatan)	10		0		0		0		0	0	0		0	0		
1259.	2.11.03.2.03.0014	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	10	140.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1260	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)		6.190.899.982		-	2.221.838.464		2.211.448.650		33.33	99.53	2.211.448.650		8.33	35.72	Dinas Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman	Persentase luasan taman (Persen)	0				76.70		70		91.26	0	70		0	0		
			Persentase RTH (%)	27,1				0		0		0	0	0		0	0		
1261.	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Tersedianya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan (Laporan)		6.190.899.982		-	2.221.838.464		2.211.448.650		33.33	99.53	2.211.448.650		8.33	35.72		
1262.	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun (Dokumen)	1	1.763.999.982	0		0		0		0	0	0		0	0		
1263.	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	2	346.000.000	0		0.25		22.848.879		21.874.600	0	95.74	21.874.600	0	6.32		
1264.	2.11.04.2.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	12	320.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
		Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Orang)			0		0		0		0	0	0		0	0		
1265.	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (Unit)	2	3.170.900.000	0		1		2.188.989.585		2.179.574.050	100	99.57	2.179.574.050	50	68.74		
1266.	2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	390.000.000	0		2		10.000.000		10.000.000	0	100	10.000.000	0	2.56		
1267.	2.11.04.2.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	200.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1268	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)		850.000.000		-	-		-		0	0			0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	55,22				0		0		0	0	0		0	0		
1269.	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan		400.000.000		-	-		-		0	0	0		0	0		
1270.	2.11.05.2.01.0005	Tersedianya Penyimpanan Limbah B3	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	1	400.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1271.	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan,		450.000.000		-	-		-		0	0			0	0		
1272.	2.11.05.2.02.0002	Tersedianya Dokumen Limbah B3	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	1	450.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1273	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya (Dokumen)		240.000.000		-	-		-		0	0			0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	60				0		0		0	0	0		0	0		
1274.	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)		240.000.000		-	-		-		0	0			0	0		
1275.	2.11.06.2.01.0001	Tersedianya Dokumen Rekomendasi	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH		120.000.000		-	-		-		0	0	0		0	0		
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
1276.	2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD (Orang)	3	120.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		

II-327

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
1277	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			850.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal,	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	19,12				0		0		0	0	0		0	0		
1278	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			350.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen dan Data Informasi MHA										0	0			0	0		
1279	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH (Dokumen)		1	350.000.000		-	0	0	0		0	0	0		0	0		
1280	2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan Tersedianya Dokumen Kelembagaan MHA			500.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
1281	2.11.07.2.02.0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan		3	500.000.000	0	0	0		0		0	0	0		0	0		
1282	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			945.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100				0		0		0	0	0		0	0		
1283	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tersedianya Penyelenggaraan Pendidikan dan			945.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
1284	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			305.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan (Dokumen)	200		0	0	0		0		0	0	0		0	0		
1285	2.11.08.2.01.0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman		68	340.000.000	0	0	0		0		0	0	0		0	0		
		Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Keluarga)																
1286	2.11.08.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga		3	300.000.000	0	0	0		0		0	0	0		0	0		
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/ kota yang terdaftar di kabupaten/ kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)																
1287	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			14.533.000.000		-		12.649.276.933		11.725.858.230	58.33	92.7		11.725.858.230	5.83	80.68	Dinas Lingkungan Hidup	
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase jumlah sampah yang ditangani (Persen)	0				91.08		99.86		109.64	0	99.86		0	0		
		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Angka)		58				0		0		0	0	0		0	0		
1288	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			13.933.000.000		-		12.644.276.933		11.720.869.030	50	92.7		11.720.869.030	7	84.12		
		Tertangani Pengolahan Timbunan Sampah										0	0			0	0		
1289	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			600.000.000		-		6.729.500		6.567.000	0	97.59		6.567.000	0	1.09		
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)	68		0	34	0		0		0	0	0		0	0		
1290	2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			150.000.000	0	1	218.322.500		212.893.900		100	97.51		212.893.900	50	141.93		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/ Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)	2						1		100	0	1		50	0		
1291	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota			7.701.700.000		-		12.390.827.046		11.473.094.380	50	92.59		11.473.094.380	20	148.97		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir (Unit)	5		0	2			1		50	0	1		20	0		
1292	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ kota			450.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/ kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/ kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1		0	0			0		0	0	0		0	0		
1293	2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah			1.000.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)	8		0		0		0		0	0	0		0	0		
1294.	2.11.11.2.01.0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	1	100.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1295.	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)	2.000	681.300.000	0		85	9.058.700	0	9.000.000	0	99.35		9.000.000	0	1.32		
1296.	2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan (Dokumen)	0		0		1	19.339.187	1	19.313.750	100	99.87	1	19.313.750	0	0		
1297.	2.11.11.2.01.0023	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah (Dokumen)	8	400.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1298.	2.11.11.2.01.0027	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus (Dokumen)	1	350.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1299.	2.11.11.2.01.0028	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan (Unit)	10	2.500.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1300.	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah (Laporan)		600.000.000				5.000.000		4.989.200	100	99.78		4.989.200	0	0.83		
1301.	2.11.11.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah (Laporan)	3	400.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1302.	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja (Unit)	0		0		1	5.000.000	1	4.989.200	100	99.78	1	4.989.200	0	0		
1303.	2.11.11.2.03.0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota (Laporan)	1	200.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			43.331.903.553			-	4.370.342.914		3.860.073.532	111.43	88.32		3.860.073.532	3050.7	8.91		
1304	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			31.638.944.053			-	3.821.401.172		3.314.727.345	123.53	86.74		3.314.727.345	34.67	10.48	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja	Nilai SAKIP OPD (Angka)	65,6				0		0		0	0	0		0	0		
		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)		0				100		100		100	0	100		0	0		
1305.	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)		120.000.000			-	6.081.001		6.064.829	100	99.73		6.064.829	17.14	5.05		
1306.	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	35	120.000.000	0		6	6.081.001	6	6.064.829	100	99.73	6	6.064.829	17.14	5.05		
1307.	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16.634.854.853			-	3.031.245.969		2.561.438.653	100	84.5		2.561.438.653	2.38	15.4		
1308.	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.260	16.634.854.853	0		30	3.031.245.969	30	2.561.438.653	100	84.5	30	2.561.438.653	2.38	15.4		
1309.	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			486.000.000			-	5.500.000		1.693.600	100	30.79		1.693.600	25	0.35		
1310.	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	120	351.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1311.	2.12.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	135.000.000	0		5	5.500.000	5	1.693.600	100	30.79	5	1.693.600	50	1.25		
1312.	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.735.540.000			-	66.396.096		66.361.990	200	99.95		66.361.990	3.04	3.82		
1313.	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			70.000.000			-				0	0			0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1314.	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			364.400.000		-		10.898.096		10.888.213	100	99,91		10.888.213	3,75	2,99		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	80		0		3		3		100	0	3		3,75	0		
1315.	2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			20.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
1316.	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			168.000.000		-		6.200.000		6.180.000	100	99,68		6.180.000	0,2	3,68		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.000		0		2		2		100	0	2		0,2	0		
1317.	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			160.000.000		-		9.000.000		8.999.877	100	100		8.999.877	3,33	5,62		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		0		1		1		100	0	1		3,33	0		
1318.	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			13.140.000		-		798.000		798.000	400	100		798.000	0,11	6,07		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.600		0		1		4		400	0	4		0,11	0		
1319.	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			780.000.000		-		39.500.000		39.495.900	300	99,99		39.495.900	20	5,06		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300		0		20		60		300	0	60		20	0		
1320.	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			120.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
1321.	2.12.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1322.	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			8.862.449.200		-		152.418.905		149.371.970	100	98		149.371.970	3,81	1,69		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Barang Milik										0	0			0	0		
1323.	2.12.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.789.400.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1324.	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			4.745.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1325.	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1326.	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			120.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1327.	2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			635.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1328.	2.12.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			550.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0	0	0		0	0		
1329.	2.12.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			983.049.200		-		152.418.905		149.371.970	100	98		149.371.970	26,67	15,19		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	75		0		20		20		100	0	20		26,67	0		
1330.	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.457.700.000		-		419.569.200		406.329.203	100	96,84		406.329.203	28,33	16,53		
		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan										0	0			0	0		
1331.	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			31.500.000		-		1.200.000		1.200.000	100	100		1.200.000	6,67	3,81		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	30		0		2		2		100	0	2		6,67	0		
1332.	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			816.200.000		-		124.900.000		114.195.580	100	91,43		114.195.580	40	13,99		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	10		0		4		4		100	0	4		40	0		
1333.	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1334.	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.570.000.000		-		293.469.200		290.933.623	100	99,14		290.933.623	66,67	18,53		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6		0		4		4		100	0	4		66,67	0		
1335.	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.342.400.000		-		125.280.000		123.467.100	100	98,55		123.467.100	119,69	9,2		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang										0	0			0	0		
1336.	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan			193.300.000		-		26.980.000		26.678.300	100	98,88		26.678.300	100	13,8		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1337.	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		334.100.000						48.300.000	100	97.12		46.908.000	75	14.04		
				4		0		3		3		100	0	3		75	0		
1338.	2.12.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		50.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1339.	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		20.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1340.	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		395.000.000						30.000.000	100	99.61		29.881.800	20	7.57		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5		0		1		1		100	0	1		20	0		
1341.	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		200.000.000						20.000.000	100	100		19.999.000	642.86	10		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		7		0		45		45		100	0	45		642.86	0		
1342.	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)		150.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		9		0		0		0		0	0	0		0	0		
1343.	2.12.01.2.13	Penataan Organisasi									14.910.001		0	0		0	0		
												0	0			0	0		
1344.	2.12.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Dokumen)								14.910.001		0	0		0	0		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana		0		0		2		0		0	0	0		0	0		
1345	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			3.572.408.000				142.126.003		141.731.913	100	99.72		141.731.913	12781	3.97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	40				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (%)	60				0		0		0	0	0		0	0		
			Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Persen)	0				74.88		0		0	0	0		0	0		
1346.	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			1.066.802.000				35.396.001		35.207.324	100	99.47		35.207.324	10100.8	3.3		
		Tersedianya Dokumen Pelayanan Pendaftaran										0	0			0	0		
1347.	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan (Dokumen)		179.076.000				12.496.001		12.330.868	100	98.68		12.330.868	66.67	6.89		
		Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan		3		0		2		2		100	0	2		66.67	0		
1348.	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk (Dokumen)		109.384.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		5		0		0		0		0	0	0		0	0		
1349.	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk (Orang)		109.384.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk		1.200		0		0		0		0	0	0		0	0		
1350.	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)		243.768.000				13.320.000		13.317.688	100	99.98		13.317.688	100	5.46		
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk		1		0		1		1		100	0	1		100	0		
1351.	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Dokumen)		109.384.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		5		0		0		0		0	0	0		0	0		
1352.	2.12.02.2.01.0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)		82.038.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan		1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1353.	2.12.02.2.01.0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan (Laporan)		82.038.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1354.	2.12.02.2.01.0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk (Dokumen)		151.730.000				9.580.000		9.558.768	100	99.78		9.558.768	80640	6.3		
		Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk		25		0		20160		20.160		100	0	20.160		80640	0		
1355.	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk			679.266.000				71.440.000		71.381.391	100	99.92		71.381.391	50	10.51		
		Tersedianya Dokumen Penataan Pendaftaran										0	0			0	0		
1356.	2.12.02.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun (Dokumen)		107.038.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk		2		0		0		0		0	0	0		0	0		
1357.	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran			572.228.000				71.440.000		71.381.391	100	99.92		71.381.391	100	12.47		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia (Dokumen)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
1358.	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			1.515.034.000		-		29.170.002		29.023.204	100	99.5		29.023.204	23412.5	1.92		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran					-					0	0			0	0		
1359.	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Laporan)	2	248.768.000	0	-	2	19.650.001	2	19.504.488	100	99.26		19.504.488	100	7.84		
		Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk					-					100	0	2		100	0		
1360.	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	3	191.422.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk					-					0	0	0		0	0		
1361.	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk (Laporan)	1	136.730.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk					-					0	0		-	0	0		
1362.	2.12.02.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan (Dokumen)	3	136.730.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk					-					0	0	0		0	0		
1363.	2.12.02.2.03.0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk (Laporan)	1	189.662.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk					-					0	0	0		0	0		
1364.	2.12.02.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	3	187.532.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk					-					0	0	0		0	0		
1365.	2.12.02.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk (Orang)	68	273.460.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk					-					0	0	0		0	0		
1366.	2.12.02.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia (Dokumen)	25	150.730.000	0	-	46800	9.520.001	46.800	9.518.716	100	99.99		9.518.716	187200	6.32		
		Tesedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk					-					100	0	46.800		187200	0		
1367.	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			311.306.000		-		6.120.000		6.119.994	100	100		6.119.994	66.67	1.97		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan					-					0	0			0	0		
1368.	2.12.02.2.04.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Dokumen)	1	64.692.000	0	-	2	6.120.000	2	6.119.994	100	100		6.119.994	200	9.46		
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk					-					100	0	2		200	0		
1369.	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk (Laporan)	1	109.384.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk					-					0	0	0		0	0		
1370.	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk (Laporan)	5	137.230.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk					-					0	0	0		0	0		
1371	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL			3.548.349.500		-		83.052.002		80.843.425	100	97.34		80.843.425	68	2.28	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100			-	0		0		0	0	0		0	0		
			Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil (Persen)	0			-	88.85		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100			-	0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100			-	0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100			-	0		0		0	0	0		0	0		
1372.	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			875.760.500		-		38.640.001		37.291.572	100	96.51		37.291.572	24	4.26		
		Tersedianya Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil					-					0	0			0	0		
1373.	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting (Dokumen)	5	154.456.500	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Laporan Peristiwa Penting					-					0	0	0		0	0		
1374.	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			204.076.000		-		24.320.001		24.317.822	100	99.99		24.317.822	20	11.92		
		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan (Layanan)	5		0	-	1		1		100	0	1		20	0		
1375.	2.12.03.2.01.0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil			216.422.000		-		14.320.000		12.973.750	100	90.6		12.973.750	100	5.99		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil (Dokumen)	5		0		5		5		100	0	5		100	0		
1376.	2.12.03.2.01.0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun (Dokumen)	10	136.730.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1377.	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil	5.000	164.076.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1378.	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			1.874.555.000		-		44.412.001		43.551.853	100	98.06		43.551.853	112.73	2.32		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil										0	0			0	0		
1379.	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam (Laporan)	1	164.076.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1380.	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	1	109.384.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1381.	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil (Laporan)	1	161.730.000	0		5		5	13.478.115	100	98.24		13.478.115	500	8.33		
1382.	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	5	161.730.000	0		12		12	12.721.685	100	95.51		12.721.685	240	7.87		
1383.	2.12.03.2.02.0005	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	5	163.844.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1384.	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil			136.730.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1385.	2.12.03.2.02.0007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	5	218.768.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1386.	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil			243.768.000		-		17.372.001		17.352.053	100	99.89		17.352.053	500	7.12		
		Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil (Laporan)	1		0		5		5		100	0	5		500	0		
1387.	2.12.03.2.02.0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil (Dokumen)	6	218.768.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1388.	2.12.03.2.02.0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil (Orang)	37	218.768.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1389.	2.12.03.2.02.0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	76.989.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1390.	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			798.034.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
1391.	2.12.03.2.03.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk			218.768.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil (Dokumen)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
1392.	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan (Laporan)	1	82.038.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1393.	2.12.03.2.03.0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan	1	164.076.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan (Laporan)																
1394.	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil (Laporan)	1	333.152.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1395	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			4.425.472.000		-	317.366.237		316.397.381		100	99.69	316.397.381		38.22	7.15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Persen)	0			100	0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (%)	100			0	0		0		0	0	0		0	0		
1396.	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Tersedianya Laporan Data Kependudukan			214.450.000		-	10.000.000		10.000.000		100	100	10.000.000		33.33	4.66		
												0	0			0	0		
1397.	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan (Dokumen)	12	84.200.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1398.	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2	72.150.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)									0	0	0		0	0		
1399.	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah (Laporan)	2	58.100.000	0	-	2	10.000.000	2	10.000.000	100	100	10.000.000		100	17.21		
1400.	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			96.200.000		-					0	0			0	0		
			Tersedianya Dokumen Penataan Pengelolaan Informasi									0	0			0	0		
1401.	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	2	96.200.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1402.	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			3.627.668.500		-	296.686.236		295.899.434		100	99.73	295.899.434		46.67	8.16		
			Tersedianya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi									0	0			0	0		
1403.	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	12	175.500.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1404.	2.12.04.2.03.0002	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri (Dokumen)	4	141.300.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1405.	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	5	2.715.918.500	0	-	12	284.574.235	12	284.099.250	100	99.83	284.099.250		240	10.46		
1406.	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dokumen)	2	78.150.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1407.	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	4	193.400.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1408.	2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi (Dokumen)	3	141.300.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1409.	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat (Laporan)	12	77.100.000	0	-	4	5.736.001	4	5.485.641	100	95.64	5.485.641		33.33	7.11		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1410.	2.12.04.2.03.0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan			105.000.000			-	6.376.000		6.314.543	100	99.04		6.314.543	100	6.01		
		Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan (Dokumen)	2		0		2		2		100	0	2		100	0		
1411.	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			487.153.500			-	10.680.001		10.497.947	100	98.3		10.497.947	33.33	2.15		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan										0	0			0	0		
1412.	2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			124.105.000			-	10.680.001		10.497.947	100	98.3		10.497.947	100	8.46		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Laporan)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
1413.	2.12.04.2.04.0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang		182.895.500			-				0	0			0	0		
		Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan (Dokumen)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
1414.	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data			180.153.000			-				0	0			0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan (Laporan)	6		0		0		0		0	0	0		0	0		
1415	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			146.730.000			-	6.397.500		6.373.468	100	99.62		6.373.468	50	4.34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan (Ada)	0				Ada		0		0	0	0		0	0		
			Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100				0		0		0	0	0		0	0		
1416.	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan			146.730.000			-	6.397.500		6.373.468	100	99.62		6.373.468	50	4.34		
		Tersedianya Profil Kependudukan										0	0			0	0		
1417.	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota			82.038.000			-				0	0			0	0		
		Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/ Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/ Kota (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1418.	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain		64.692.000			-	6.397.500		6.373.468	100	99.62		6.373.468	100	9.85		
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun (Dokumen)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			29.847.771.296			-	4.422.259.342		3.876.880.288	62.37	87.67		3.876.880.288	13.87	12.99		
1419	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			22.356.122.496			-	3.753.107.203		3.334.789.706	75.2	88.85		3.334.789.706	13.12	14.92	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	63,45				0		62,7		0	0	62,7		98.82	0		
1420.	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			70.000.000			-	6.390.000		6.354.518	100	99.44		6.354.518	20	9.08		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran										0	0			0	0		
1421.	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			70.000.000			-	6.390.000		6.354.518	100	99.44		6.354.518	20	9.08		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	75		0		15		15		100	0	15		20	0		
1422.	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.044.831.732			-	3.075.266.000		2.641.831.473	100	85.91		2.641.831.473	8.46	14.64		
		Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan										0	0			0	0		
1423.	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			18.044.831.732			-	3.075.266.000		2.641.831.473	100	85.91		2.641.831.473	8.46	14.64		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.806		0		322		322		100	0	322		8.46	0		
1424.	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			300.000.000			-				0	0			0	0		
		Tersusunnya Data dan Laporan Administrasi										0	0			0	0		
1425.	2.13.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			210.000.000			-				0	0			0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	65		0		60		0		0	0	0		0	0		
1426.	2.13.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						-				0	0			0	0		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0		0		3		0		0	0	0		0	0		
1427.	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			90.000.000			-				0	0			0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	4		0		2		0		0	0	0		0	0		
1428.	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			666.400.000			-	109.675.391		109.001.925	100.8	99.39		109.001.925	20.16	16.36		
		Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat										0	0			0	0		
1429.	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			75.000.000			-	20.586.558		20.582.092	100	99.98		20.582.092	20	27.44		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60		0		12		12		100	0	12		20	0		
1430.	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			75.000.000			-	14.900.000		14.900.000	100	100		14.900.000	20	19.87		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60		0		12		12		100	0	12		20	0		
1431.	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	60	75.000.000	0		12	8.390.833	12	8.176.833	100	97,45		8.176.833	20	10,9		
1432.	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.175	11.400.000	0		235	798.000	235	760.000	100	95,24		760.000	20	6,67		
1433.	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	125	430.000.000	0		25	65.000.000	26	64.583.000	104	99,36		64.583.000	20,8	15,02		
1434.	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		827.612.364				111.167.732		221.813.010	33,33	199,53		221.813.010	0	26,8		
1435.	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
1436.	2.13.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	368.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1437.	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1438.	2.13.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	15	459.612.364	0		0		0	110.906.505	0	0	0	110.906.505	0	24,13		
1439.	2.13.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		4	111.167.732	4	110.906.505	100	99,77	4	110.906.505	0	0		
1440.	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.420.878.400				365.816.080		271.446.566	100	74,2		271.446.566	20	19,1		
1441.	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60	10.580.000	0		12	2.200.000	12	2.188.043	100	99,46		2.188.043	20	20,68		
1442.	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	528.000.000	0		12	88.800.000	12	37.995.904	100	42,79		37.995.904	20	7,2		
1443.	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	882.298.400	0		12	274.816.080	12	231.262.619	100	84,15		231.262.619	20	26,21		
1444.	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.026.400.000				84.792.000		84.342.214	100	99,47		84.342.214	15	8,22		
1445.	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5	183.150.000	0		1	38.980.000	1	38.921.500	100	99,85	1	38.921.500	20	21,25		
1446.	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	140.250.000	0		1	35.900.000	1	35.567.633	100	99,07		35.567.633	20	25,36		
1447.	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	650.000.000	0		1		1		100	0			20	0		
1448.	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		22	9.912.000	22	9.853.081	100	99,41	22	9.853.081	0	0		
1449.	2.13.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	22	53.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1450	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA			392.844.000							0	0			0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
		Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Gampong yang Baik (Persen)	0				95,59	67,65		70,77	0	67,65			0	0		
			Persentase Fasilitas Penataan Desa (%)	38,24				0	8,82		0	0	8,82			23,06	0		
1451.	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			392.844.000							0	0			0	0		
1452.	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa										0	0			0	0		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa (Desa)	0		0		68		0		0	0	0		0	0		
1453.	2.13.02.2.01.0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya (Desa)	0		0		68		0		0	0	0		0	0		
1454.	2.13.02.2.01.0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa			59.664.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya (Desa)	26		0		68		0		0	0	0		0	0		
1455.	2.13.02.2.01.0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1456.	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			333.180.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi (Unit)	26		0		0		0		0	0	0		0	0		
1457	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			474.076.000		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
		Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Kerjasama Gampong (Persen)	0				73.53		14,71		20.01	0	14,71		0	0		
			Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	36,76				0		14,71		0	0	14,71		40.02	0		
			MENINGKATNYA KERJA SAMA ANTAR DESA (DOKUMEN)	0				68		14,71		21.63	0	14,71		0	0		
1458.	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			474.076.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Kerjasama Desa										0	0			0	0		
1459.	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			303.300.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	25		0		68		0		0	0	0		0	0		
1460.	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			170.776.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	8		0		68		0		0	0	0		0	0		
1461.	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (Dokumen)	0		0		68		0		0	0	0		0	0		
1462	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			2.902.332.000		-		124.554.695		123.449.552	80	99.11		123.449.552	15.39	4.25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	106,86				0		192,62		0	0	192,62		180.25	0		
			Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (%)	99,75				0		66,65		0	0	66,65		66.82	0		
			Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Persen)	0				81.84		67,65		82.66	0	67,65		0	0		
1463.	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			2.902.332.000		-		124.554.695		123.449.552	80	99.11		123.449.552	15.39	4.25		
		Terlaksannya Pembinaan dan Pengawasan										0	0			0	0		
1464.	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			60.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Dokumen)	1		0		68		0		0	0	0		0	0		
1465.	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			60.000.000		-		2.910.194		2.820.499	0	96.92		2.820.499	0	4.7		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa (Dokumen)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
1466.	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			128.000.000		-		9.359.927		9.359.600	100	100		9.359.600	26.67	7.31		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa (Dokumen)	15		0		4		4		100	0	4		26.67	0		
1467.	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			545.000.000		-		47.848.120		47.731.387	100	99.76		47.731.387	20	8.76		
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (Dokumen)	25		0		5		5		100	0	5		20	0		
1468.	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			440.000.000		-		2.742.317		2.716.276	100	99.05		2.716.276	20	0.62		
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	340		0		68		68		100	0	68		20	0		
1469.	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa			40.000.000		-		5.304.059		5.219.023	100	98.4		5.219.023	25	13.05		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa (Laporan)	4		0		1		1		100	0	1		25	0		
1470.	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa			40.000.000		-		-		-	0	0	-		0	0		
		Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1471.	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			255.000.000		-		2.719.803		2.714.946	100	99.82		2.714.946	20	1.06		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa (Dokumen)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
1472.	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			272.000.000		-		14.835.301		14.724.000	100	99.25		14.724.000	20	5.41		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Laporan)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				5		0		1		1		100	0	1		20	0		
1473.	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Laporan)	5	68.600.000	0	-	1	5.390.901	1	5.199.211	100	96.44	1	5.199.211	20	7.58		
1474.	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun (Dokumen)	4	82.500.000	0	-	1	6.885.026	1	6.704.800	100	97.38	1	6.704.800	25	8.13		
1475.	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa (Dokumen)	4	61.500.000	0	-	1	2.746.890	1	2.684.986	100	97.75	1	2.684.986	25	4.37		
1476.	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa (Dokumen)	5	71.500.000	0	-	1	5.320.000	1	5.274.449	100	99.14	1	5.274.449	20	7.38		
1477.	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas (Orang)	340	326.732.000	0	-	68	5.240.303	68	5.086.246	100	97.06	68	5.086.246	20	1.56		
1478.	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Desa)	5	235.000.000	0	-	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1479.	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa (Laporan)	1	61.500.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1480.	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan (Dokumen)	5	155.000.000	0	-	1	13.251.854	1	13.214.129	100	99.72	1	13.214.129	20	8.53		
1481	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			3.722.396.800		-		544.597.444		418.641.030	54.68	76.87		418.641.030	19.38	11.25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (Persen)	0			91.54	50		50		54.62	0	50		0	0		
			Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	86,27			0	73,53		73,53		0	0	73,53		85,23	0		
			Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	500			0	25		25		0	0	25		5	0		
1482.	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat			3.722.396.800		-		544.597.444		418.641.030	54.68	76.87		418.641.030	19.38	11.25		
1483.	2.13.05.2.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	0		0	68	0		0		0	0	0		0	0		
1484.	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Dokumen)	5	412.680.000	0	-	1	66.356.049	1	66.100.616	100	99.62	1	66.100.616	20	16.02		
1485.	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	5	165.600.000	0	68	1	17.558.188	1	17.335.972	1.47	98.73	1	17.335.972	20	10.47		
1486.	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat (Unit)	5	226.000.000	0	-	0		0		0	0	0		0	0		
1487.	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Dokumen)	4	90.400.000	0	1	1	7.072.045	1	6.807.107	100	96.25	1	6.807.107	25	7.53		
1488.	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (Laporan)	5	748.000.000	0	-	1	83.350.034	1	83.293.413	100	99.93	1	83.293.413	20	11.14		
1489.	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			67.800.000		-		4.920.034		4.911.600	100	99.83		4.911.600	25	7.24		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																				
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			
		Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (Laporan)	4		0		1		1		100	0	1		25	0			
1490.	2.13.05.2.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	4	67.800.000	0		1	5.341.094	1	5.273.356	100	98.73	1	5.273.356	25	7.78			
1491.	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa (Dokumen)	5	1.944.116.800	0		1	360.000.000	1	234.918.966	100	65.26	1	234.918.966	20	12.08			
1492.	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat (Keluarga)	0		0		680		0		0	0	0		0	0			
1493.	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	0		0		68		0		0	0	0		0	0			
1494.	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		13.203.033.000		-		1.975.519.399		1.418.971.077		285.42		71.83		1.418.971.077		74		10.75
1494.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		907.400.000		-		173.745.405		159.837.662		166.67		92		159.837.662		133.33		17.61
		Terkendalnya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Angka)	2,25				0		2,28		0	0	2,28		101.33	0			
			Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15- 19) (Angka)	5				0		9,6		0	0	9,6		192	0			
			Persentase Perangkat Daerah yang Berperan aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB (Persen)	0				67.65		61,76		91.29	0	61,76		0	0			
1495.	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		123.000.000		-		9.345.405		3.297.400		0		35.28		3.297.400		200		2.68
1496.	2.14.02.2.01.0016	Meningkatkan kualitas penduduk melalui Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)	2	123.000.000	0		0		4	3.297.400	0	0	4	3.297.400	200	2,68			
1497.	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan (Kegiatan)	0		0		1	9.345.405	0		0	0	0		0	0			
1498.	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		784.400.000		-		164.400.000		156.540.262		250		95.22		156.540.262		100		19.96
1499.	2.14.02.2.02.0012	Meningkatkan efektivitas program pengendalian Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	4	628.400.000	0		1	116.400.000	4	116.400.000	400	100	4	116.400.000	100	18.52			
1500.	2.14.02.2.02.0013	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)	4		0		1		4		400	0	4		100	0			
1500.	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)	1	156.000.000	0		1	48.000.000	1	40.140.262	100	83.63	1	40.140.262	100	25.73			
1501.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		8.811.233.000		-		1.276.535.946		788.749.015		361.75		61.79		788.749.015		63.69		8.95
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PCakupan Pembinaan Keluarga Berencanaambinaan Keluarga Berencana (Persen)	0				51.08		52,58		102.94	0	52,58		0	0			
			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) (%)	58,2				0		48,7		0	0	48,7		83.68	0			
			Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana (Persen)	0				51.08		52,58		102.94	0	52,58		0	0			
			Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Needs) (%)	8,11				0		16,1		0	0	16,1		198.52	0			
1502.	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan		4.326.000.000		-		661.000.000		358.991.565		104		54.31		358.991.565		97		8.3
		Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang metode Pengendalian Program KKBPK				-						0		0		0		0		0
1503.	2.14.03.2.01.0008					-		-		-		0		0		-		0		0

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)	0		0		3		0		0	0	0		0	0		
1504.	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	1	1.091.000.000	0		1	196.000.000	1	193.475.700	100	98.71	1	193.475.700	100	17.73		
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)																
1505.	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan)	1	400.000.000	0		1	80.000.000	1	7.400.000	100	9.25	1	7.400.000	100	1.85		
		Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	1	935.000.000			-	135.000.000		132.458.365	100	98.12		132.458.365	100	14.17		
1507.	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	25	1.900.000.000	0		10	250.000.000	22	25.657.500	220	10.26	22	25.657.500	88	1.35		
1508.	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Meningkatkan kualitas layanan KB yang diberikan		1.584.000.000			-	294.000.000		224.995.000	1190	76.53		224.995.000	100	14.2		
1509.	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	238	1.584.000.000	0		20	294.000.000	238	224.995.000	1190	76.53	238	224.995.000	100	14.2		
1510.	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	29	1.811.133.000	0		1	128.985.531		90.442.600	640	70.12		90.442.600	48	4.99		
1511.	2.14.03.2.03.0001	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	3.000	473.483.000	0		700	43.483.000	0	36.285.000	0	83.45	0	36.285.000	0	7.66		
1513.	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	4	400.000.000	0		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1514.	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	1	426.550.000	0		1	44.208.355	1	24.907.600	100	56.34	1	24.907.600	100	5.84		
1515.	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)	100	305.000.000	0		20	15.194.176	40	3.150.000	200	20.73	40	3.150.000	40	1.03		
1516.	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam	Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan		1.090.100.000			-	192.550.415		114.319.850	51.52	59.37		114.319.850	33.33	10.49		
1517.	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1518.	2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB (Laporan)	0		0		4	9.450.415	0		0	0	0		0	0		
1519.	2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	5	140.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1520.	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	68	733.100.000	0		44	183.100.000	68	114.319.850	154.55	62.44	68	114.319.850	100	15.59		
1521.	2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			217.000.000			-				0	0			0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1522	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			3.484.400.000		-		525.238.048		470.384.400	166.67	89.56		470.384.400	66.67	13.5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Pemberdayaan dan Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga SejahteraPeningkatan Keluarga Sejahtera (Persen)	0				112.13		117		104.34	0	117		0	0		
			Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	91,89				0		91		0	0	91		99.03	0		
1523.	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan kesejahteraan keluarga			1.058.600.000		-		76.438.048		21.584.400	50	28.24		21.584.400	50	2.04		
1524.	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Ketahanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
1525.	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK- R)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
1526.	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	10		0		1		0		0	0	0		0	0		
1527.	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)	1		0		1		1		100	59.57	1		100	6.91		
1528.	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan			2.425.800.000		-		448.800.000		448.800.000	400	100		448.800.000	100	18.5		
1529.	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan)	4		0		1		4		400	100	4		100	0		
1530.	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)	4		0		1		4		400	100	4		100	20.05		
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			34.448.135.760		-		6.782.641.430		5.694.518.034	53.89	83.96		5.694.518.034	25.7	16.53		
1531	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			25.007.239.780		-		5.352.867.775		4.338.182.054	76.22	81.04		4.338.182.054	43.59	17.35	Dinas Perhubungan	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		62		62	0	62		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	64,11				0		62		0	0	62		96.71	0		
1532.	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			363.000.000		-		42.478.000		40.068.831	200	94.33		40.068.831	83.33	11.04		
1533.	2.15.01.2.01.0001	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										0	0			0	0		
1533.	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			350.000.000		-		42.478.000		40.068.831	200	94.33		40.068.831	66.67	11.45		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3		0		1		2		200	0	2		66.67	0		
1534.	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000		-					0	0			100	0		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1		0		0		1		0	0	1		100	0		
1535.	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.627.500.000		-		3.477.800.000		2.899.679.365	320.69	83.38		2.899.679.365	14.48	18.55		
		Tersedianya Penyediaan Administrasi Keuangan										0	0			0	0		
1536.	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.617.500.000		-		3.477.800.000		2.899.679.365	320.69	83.38		2.899.679.365	28.95	18.57		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	288		0		26		83,38		320.69	0	83,38		28.95	0		
1537.	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1538.	2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			36.500.000		-					0	0			50	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik										0	0			0	0		
1539.	2.15.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	19.000.000	0		0		2		0	0	2		100	0		
1540.	2.15.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	17.500.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1541.	2.15.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			30.500.000		-		3.220.000		-	100	0		-	100	0		
		Tersedianya Dokumentasi Administrasi Pendapatan										0	0			0	0		
1542.	2.15.01.2.04.0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah			30.500.000		-		3.220.000		-	100	0		-	100	0		
		Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
1543.	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			650.000.000		-		115.654.450		115.306.850	50	99.7		115.306.850	33.33	17.74		
		Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian										0	0			0	0		
1544.	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			436.000.000		-		103.200.000		102.852.400	100	99.66		102.852.400	100	23.59		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
1545.	2.15.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	4.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1546.	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2	210.000.000	0		2		0		0	0	0		0	0		
1547.	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.606.720.000		-		103.338.495		109.984.906	54	106.43		109.984.906	45	6.85		
		Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum										0	0			0	0		
1548.	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	84.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1549.	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	300.000.000	0		2		2		100	190.97	2		100	8.11		
1550.	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	165.000.000	0		2		1		50	99.29	1		50	4.21		
1551.	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	235.000.000	0		2		2		100	99.02	2		100	9.61		
1552.	2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	12.720.000	0		1		0		0	35.71	0		0	2.24		
1553.	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	810.000.000	0		50		10		20	93.07	10		20	6.89		
1554.	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.981.408.500		-				29.350.000	0	0		29.350.000	30	1.48		
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah										0	0			0	0		
1555.	2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2	246.408.500	0		0		0		0	0	0		0	0		
1556.	2.15.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (Unit)	1	900.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1557.	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5	245.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1558.	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	360.000.000	0		0		2		0	0	2		100	3.15		
1559.	2.15.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	230.000.000	0		0		1		0	0	1		50	7.83		
1560.	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.763.311.280		-		993.615.280		858.782.102	41.67	86.43		858.782.102	41.67	31.08		
		Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan										0	0			0	0		
1561.	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	15.000.000	0		1		0		0	100	0		0	8		
1562.	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	680.000.000	0		12		12		100	88.44	12		100	0		
1563.	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	2.068.311.280	0		12		3		25	86.19	3		25	37.27		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor										25	0	3		25	0		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1564.	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.948.300.000			-	616.761.550		285.010.000	45	46.21		285.010.000	45	14.63		
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah										0	0			0	0		
1565.	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		173.300.000		-	26.980.000		26.551.200	100	98.41		26.551.200	100	15.32		
1566.	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		1.415.000.000		-	560.030.000		258.458.800	80	46.15		258.458.800	80	18.27		
1567.	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	40		60.000.000		-	11.751.550		-	0	0		-	0	0		
1568.	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		300.000.000		-	18.000.000		-	0	0		-	0	0		
1569	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			7.905.895.980		-		1.429.773.655		1.356.335.980	26.79	94.86		1.356.335.980	12.5	17.16	Dinas Perhubungan	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (Indeks)	1				2.28		0,48		21.05	0	0,48		48	0		
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persen)	87,5				62.50		62,5		100	0	62,5		71.43	0		
			Cakupan Kualitas Layanan Transportasi (Persen)	0				45.83		0,48		1.05	0	0,48		0	0		
1570.	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			200.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Penyusunan Rencana Induk										0	0			0	0		
1571.	2.15.02.2.01.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		135.000.000		-	0		-	0	0	0	-	0	0		
1572.	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk	Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota (Dokumen)	1				0		0		0	0	0		0	0		
1573.	2.15.02.2.01.0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1		25.000.000		-	0		-	0	0	0	-	0	0		
1574.	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			3.648.591.500		-		57.500.000		48.448.000	50	84.26		48.448.000	50	1.33		
		Tersedianya Perlengkapan Jalan Yang Tersedia										0	0			0	0		
1575.	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun (Unit)	1		385.000.000		-	1		-	0	0	0	-	0	0		
1576.	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	110		2.573.591.500		-	120		-	0	0	0	-	0	0		
1577.	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	1		270.000.000		-	1		8.292.000	100	82.92		8.292.000	100	3.07		
1578.	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara (Unit)	19		420.000.000		-	19		40.156.000	100	84.54		40.156.000	100	9.56		
1579.	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			1.263.000.000		-		990.423.655		977.771.980	50	98.72		977.771.980	12.5	77.42		
		Tersedianya Terminal Yang Dikelola										0	0			0	0		
1580.	2.15.02.2.03.0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi (Dokumen)	2		48.000.000		-	0		-	0	0	0	-	0	0		
1581.	2.15.02.2.03.0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) (Unit)	2		875.000.000		-	0		-	0	0	0	-	0	0		
1582.	2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi. (Orang)	2		60.000.000		-	0		-	0	0	0	-	0	0		
1583.	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara (Unit)	2		280.000.000		-	2		977.771.980	50	98.72		977.771.980	50	349.2		
1584.	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			190.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
1585.	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			120.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1586.	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1	70.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1587.	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			664.000.000		-		69.580.000		23.121.000	25	33.23		23.121.000	16.67	3.48		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pengujian Berkala										0	0			0	0		
1588.	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			120.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1589.	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			100.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
1590.	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			190.000.000		-		40.000.000		15.300.000	0	38.25		15.300.000	0	8.05		
		Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Dokumen)	3.000		0		2600		0		0	0	0		0	0		
1591.	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			110.000.000		-		15.000.000		4.046.000	0	26.97		4.046.000	0	3.68		
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara (Unit)	8		0		8		0		0	0	0		0	0		
1592.	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			29.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1593.	2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			115.000.000		-		14.580.000		3.775.000	100	25.89		3.775.000	100	3.28		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Laporan)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
1594.	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			741.500.000		-		75.000.000		74.500.000	0	99.33		74.500.000	0	10.05		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Manajemen dan										0	0			0	0		
1595.	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			8.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	3.000		0		0		0		0	0	0		0	0		
1596.	2.15.02.2.06.0007	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan			6.500.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan (Laporan)	3.000		0		0		0		0	0	0		0	0		
1597.	2.15.02.2.06.0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)			20.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan)	3.000		0		0		0		0	0	0		0	0		
1598.	2.15.02.2.06.0010	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)			7.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi (Laporan)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
1599.	2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			330.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota (Laporan)	3.000		0		1		0		0	0	0		0	0		
1600.	2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			260.000.000		-		75.000.000		74.500.000	0	99.33		74.500.000	0	28.65		
		Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan (Dokumen)	3.000		0		35		0		0	0	0		0	0		
1601.	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			110.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi (Laporan)	3.000		0		0		0		0	0	0		0	0		
1602.	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			154.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu										0	0			0	0		
1603.	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			15.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin (Laporan)	15		0		0		0		0	0	0		0	0		
1604.	2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin			100.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi (Orang)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
1605.	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin			39.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi (Laporan)	3.000	Rp	0	Rp	0	Rp	0	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1606.	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			491.804.480		-		237.270.000		232.495.000	25	97.99		232.495.000	25	47.27		
		Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ										0	0			0	0		
1607.	2.15.02.2.08.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			70.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal (Laporan)	3.000		0		0		0		0	0	0		0	0		
1608.	2.15.02.2.08.0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C			105.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1609.	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem	Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum		271.804.480		-		237.270.000		232.495.000	25	97.99		232.495.000	100	85.54		
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (Laporan)	1		0		4		1		25	0	1		100	0		
1610.	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			45.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1611.	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah			362.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa										0	0			0	0		
1612.	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah			362.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksanaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1613.	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah			191.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya izin penyelenggaraan angkutan orang										0	0			0	0		
1614.	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek			101.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
1615.	2.15.02.2.14.0003	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan			90.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
1616	2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			1.535.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Perhubungan	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut	Konektivitas Laut (%)	0				0		0		0	0	0		0	0		
1617.	2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			1.535.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal Yang Dibangun										0	0			0	0		
1618.	2.15.03.2.12.0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal			1.535.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			21.775.356.749		-		5.758.595.436		5.210.810.897	176.32	90.49		5.210.810.897	41.09	23.93		
1619	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			17.735.356.749		-		2.715.066.436		2.206.530.667	242.86	81.27		2.206.530.667	44.88	12.44	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	63,4				0		0		0	0	0		0	0		
1620.	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			313.000.000		-		154.445.518		54.143.592	100	35.06		54.143.592	92.86	17.3		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,										0	0			0	0		
1621.	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			63.000.000		-		154.445.518		54.143.592	100	35.06		54.143.592	85.71	85.94		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7		0		6		6		100	0	6		85.71	0		
1622.	2.16.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			250.000.000		-		-		-	0	0		-	100	0		
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		0		1		0	0	1		100	0		
1623.	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.246.293.709		-		2.221.193.000		1.826.002.993	390	82.21		1.826.002.993	45.4	14.91		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat										0	0			0	0		
1624.	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.220.293.709		-		2.221.193.000		1.826.002.993	390	82.21		1.826.002.993	27.86	14.94		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	420		0		30		117		390	0	117		27.86	0		
1625.	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			13.000.000		-		-		-	0	0		-	100	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		1		0	0	1		100	0		
1626.	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			13.000.000		-		-		-	0	0		-	8.33	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12		0		0		1		0	0	1		8.33	0		
1627.	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			390.000.000		-		7.500.000		7.443.100	0	99.24		7.443.100	0	1.91		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat										0	0			0	0		
1628.	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			140.000.000		-		-			-	0		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		0		0		0		0	0	0		0	0		
1629.	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			250.000.000		-		7.500.000		7.443.100	0	99.24		7.443.100	0	2.98		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		5		0		0	0	0		0	0		
1630.	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.061.980.000		-		62.000.001		61.943.483	50	99.91		61.943.483	33.33	5.83		
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0			0	0		
1631.	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			18.000.000		-		-			-	0		-	0	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1632.	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			199.480.000		-		8.000.001		7.955.557	0	99.44		7.955.557	0	3.99		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		2		0		0	0	0		0	0		
1633.	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			120.000.000		-		7.000.000		6.990.000	0	99.86		6.990.000	0	5.83		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
1634.	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			70.000.000		-		3.000.000		2.997.926	100	99.93		2.997.926	100	4.28		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
1635.	2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			4.500.000		-		-			-	0		-	0	0		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1636.	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			650.000.000		-		44.000.000		44.000.000	100	100		44.000.000	100	6.77		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		0		20		20		100	0	20		100	0		
1637.	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.590.000.000		-		-			-	0		-	0	0		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan										0	0			0	0		
1638.	2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			300.000.000		-		-			-	0		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0		0	0	0		0	0		
1639.	2.16.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya			750.000.000		-		-			-	0		-	0	0		
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1640.	2.16.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			540.000.000		-		-			-	0		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12		0		0		0		0	0	0		0	0		
1641.	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.369.783.040		-		198.637.917		185.835.999	625	93.56		185.835.999	75	13.57		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan										0	0			0	0		
1642.	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			29.000.000		-		3.726.000		3.713.294	100	99.66		3.713.294	100	12.8		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
1643.	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			500.000.000		-		59.045.437		48.717.032	1200	82.51		48.717.032	100	9.74		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12		0		1		12		1200	0	12		100	0		
1644.	2.16.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			90.000.000		-		8.000.000		7.855.833	0	98.2		7.855.833	0	8.73		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
1645.	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			750.783.040		-		127.866.480		125.549.840	1200	98.19		125.549.840	100	16.72		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12		0		1		12		1200	0	12		100	0		
1646.	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			764.300.000		-		71.290.000		71.161.500	70	99.82		71.161.500	42.86	9.31		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang										0	0			0	0		
1647.	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan			169.400.000		-		27.280.000		27.195.800	100	99.69		27.195.800	100	16.05		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
1648.	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			125.000.000		-		28.300.000		28.259.700	100	99.86		28.259.700	100	22.61		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
1649.	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			130.000.000		-		-			-	0		-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1650.	2.16.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	75.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1651.	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	60.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1652.	2.16.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	49.900.000	0	10	15.710.000	15.706.000	10	99,97	10	99,97	15.706.000	100	31,47			
1653.	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	6	155.000.000	0	0		0	0		0	0	0		0	0		
1654	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			1.871.000.000			1.977.339.000	1.921.281.202	73.33	97.16			1.921.281.202	24.44	102.69		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	85,08			0		85,96	0	0	85,96			101,03	0			
			Persentase Penyebaran Informasi Publik (Persen)	0			26,32		90	341,95	0	90			0	0			
1655.	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.871.000.000			1.977.339.000	1.921.281.202	73.33	97.16			1.921.281.202	24.44	102.69			
1656.	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	1	52.000.000	0	0		0	0	0	0	0		0	0			
1657.	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	1	30.000.000	0	0		0	0	0	0	0		0	0			
1658.	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	10	204.000.000	0	30	51.230.000	43.374.802	0	84,67			43.374.802	0	21,26			
1659.	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	5	340.000.000	0	5	13.239.000	12.517.600	0	94,55			12.517.600	0	3,68			
1660.	2.16.02.2.01.0020	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	80	30.000.000	0	0		0	0	0	0	0		0	0			
1661.	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	10	1.125.000.000	0	10	1.912.870.000	1.865.388.800	220	97,52			1.865.388.800	220	165,81			
1662.	2.16.02.2.01.0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	1	30.000.000	0	0		0	0	0	0	0		0	0			
1663.	2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2	30.000.000	0	0		0	0	0	0	0		0	0			
1664.	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bintek/pelatihan (Orang)	1	30.000.000	0	0		0	0	0	0	0		0	0			
1665	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			2.169.000.000			1.066.190.000	1.082.999.028	51.8	101.58			1.082.999.028	47.22	49.93		Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Pelayanan Publik Yang Terintegrasi (Persen)	0			17,65		100	566,57	0	100			0	0			
1666.	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah	Indeks SPBE (Indeks)	3,3	44.125.000		0		2,8	0	0	2,8			84,85	0			
1667.	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2	44.125.000	0	100	10.150.000	10.150.000	0	100			10.150.000	0	23			
1668.	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.124.875.000			1.056.040.000	1.072.849.028	64,75	101,59			1.072.849.028	53,13	50,49			

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup										0	0			0	0		
1669.	2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional			20.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	4		0		0		0		0	0	0		0	0		
1670.	2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi			-		-		19.390.000		18.879.802	100	97.37		18.879.802	0	0		
		Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	0		0		2		2		100	0	2		0	0		
1671.	2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			-		-		21.580.000		20.120.000	0	93.23		20.120.000	0	0		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	0		0		4		0		0	0	0		0	0		
1672.	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota			1.320.000.000		-		1.000.000.000		999.899.424	34	99.99		999.899.424	100	75.75		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota (Perangkat Daerah)	34		0		100		34		34	0	34		100	0		
1673.	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi			100.000.000		-		15.070.000		15.070.000	125	100		15.070.000	125	15.07		
		Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	4		0		4		5		125	0	5		125	0		
1674.	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo			24.125.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1675.	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta			249.125.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1676.	2.16.03.2.02.0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta			324.125.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
1677.	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			13.375.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1678.	2.16.03.2.02.0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi			74.125.000		-		-		18.879.802	0	0		18.879.802	200	25.47		
		Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	1		0		0		2		0	0	2		200	0		
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			36.182.957.024		-		6.523.172.659		5.474.046.931	21.8	83.92		5.474.046.931	53.27	15.13		
1679	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			30.508.578.915		-		5.098.474.088		4.594.758.185	11.08	90.12		4.594.758.185	44.53	15.06	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	68,2				0		0		0	0	0		0	0		
1680.	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			666.000.000		-		53.340.000		53.340.000	16.67	100		53.340.000	37.5	8.01		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran,										0	0			0	0		
1681.	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			666.000.000		-		53.340.000		53.340.000	100	100		53.340.000	37,5	8,01		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8		0		3		3		100	0	3		37,5	0		
1682.	2.17.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1683.	2.17.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1684.	2.17.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1685.	2.17.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			-		-		-		-	0	0		-	0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1686.	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1687.	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			21.469.237.580		-		3.859.957.000		3.511.272.589	50	90.97		3.511.272.589	666.67	16.35		
		Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN										0	0			0	0		
1688.	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			21.469.237.580		-		3.859.957.000		3.511.272.589	100	90.97		3.511.272.589	666.67	16.35		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	63		0		420		420		100	0	420		666.67	0		
1689.	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1690.	2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			246.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik										0	0			0	0		
1691.	2.17.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1692.	2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1693.	2.17.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1694.	2.17.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1695.	2.17.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			246.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1696.	2.17.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1697.	2.17.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			59.720.000		-		33.176.000		33.082.600	0	99.72		33.082.600	0	55.4		
		Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pendapatan										0	0			0	0		
1698.	2.17.01.2.04.0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah			-		-		27.416.000		27.373.800	0	99.85		27.373.800	0	0		
		Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1699.	2.17.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah			-		-		5.760.000		5.708.800	0	99.11		5.708.800	0	0		
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1700.	2.17.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			59.720.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1701.	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			97.038.000		-		8.000.000		6.836.600	1.43	85.46		6.836.600	2.13	7.05		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat										0	0			0	0		
1702.	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0		0		35		0		0	0	0		0	0		
1703.	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			97.038.000		-		8.000.000		6.836.600	2.86	85.46		6.836.600	2.13	7.05		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	47		0		35		1		2.86	0	1		2.13	0		
1704.	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			677.080.080		-		67.771.041		67.605.137	10	99.76		67.605.137	14.29	9.98		
		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah										0	0			0	0		
1705.	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1706.	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			99.580.000		-		9.531.041		9.473.400	0	99.4		9.473.400	0	9.51		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	9		0		8		0		0	0	0		0	0		
1707.	2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1708.	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			39.860.000		-		3.500.000		3.500.000	0	100		3.500.000	0	8.78		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
1709.	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	40.832.000	0	-	1	3.600.000	0	3.587.000	0	99.64	0	3.587.000	0	8.78		
1710.	2.17.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	6.808.080	0	-	1	1.140.000	1	1.140.000	100	100	1	1.140.000	100	16.74		
1711.	2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	-	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1712.	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	452.400.000	0	-	1	50.000.000	0	49.904.737	0	99.81	0	49.904.737	0	11.03		
1713.	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	15.000.000	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1714.	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	22.600.000	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1715.	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas			2.009.137.013		-		83.733.875		43.586.000	16.67	52.05		43.586.000	25	2.17		
1716.	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	850.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1717.	2.17.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	543.403.138	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1718.	2.17.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	-	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1719.	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	-	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1720.	2.17.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	200.000.000	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1721.	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	365.733.875	0	-	3	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1722.	2.17.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	50.000.000	0	-	4	83.733.875	4	43.586.000	100	52.05	4	43.586.000	100	87.17		
1723.	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan			2.501.816.837		-		492.923.680		441.639.917	12.5	89.6		441.639.917	16.67	17.65		
1724.	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	15	8.958.000	0	-	15	1.200.000	0	1.200.000	0	100	0	1.200.000	0	13.4		
1725.	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	84	1.110.982.400	0	-	84	158.474.400	21	140.574.757	25	88.71	21	140.574.757	25	12.65		
1726.	2.17.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	-	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1727.	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	708	1.381.876.437	0	-	708	333.249.280	177	299.865.160	25	89.98	177	299.865.160	25	21.7		
1728.	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah			2.782.549.405		-		499.572.492		437.395.342	11.31	87.55		437.395.342	16.96	15.72		
1729.	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	14	202.032.000	0	-	14	30.280.000	6	27.955.300	42.86	92.32	6	27.955.300	42.86	13.84		
1730.	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24	489.968.000	0	-	24	79.292.492	6	61.775.042	25	77.91	6	61.775.042	25	12.61		
1731.	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	-	0	-	50	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
1732.	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			1.990.829.405		-		380.000.000		337.665.000	0	88.86		337.665.000	0	16.96		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
1733.	2.17.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	99.720.000	0		1	10.000.000	0	10.000.000	0	100	0	10.000.000	0	10.03		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)									0	0	0		0	0		
1734.	2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)									0	0	0		0	0		
1735.	2.17.01.2.13	Penataan Organisasi										0	0			0	0		
												0	0			0	0		
1736.	2.17.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan										0	0			0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1737.	2.17.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana										0	0			0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1738.	2.17.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi										0	0			0	0		
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1739.	2.17.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah										0	0			0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1740	2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			50.000.000				55.869.999		54.672.350	0	97.86		54.672.350	0	109.34	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	27,8				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Koperasi yang memiliki USP (Persen)	0				1.36		3		220.59	0	3		0	0		
1741.	2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi	dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah		50.000.000				5.869.999		5.861.900	0	99.86		5.861.900	0	11.72		
		Tersedianya Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi										0	0			0	0		
1742.	2.17.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan	Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan		50.000.000				5.869.999		5.861.900	0	99.86		5.861.900	0	11.72		
		Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	2		0		1		0		0	0	0		0	0		
1743.	2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk							50.000.000		48.810.450	0	97.62		48.810.450	0	0		
												0	0			0	0		
1744.	2.17.02.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor	Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi						50.000.000		48.810.450	0	97.62		48.810.450	0	0		
		Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
1745	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			129.440.000				4.979.999		4.917.500	100	98.74		4.917.500	50	3.8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	10,56				0		5,28		0	0	5,28		50	0		
			Persentase Koperasi Mandiri (Persen)	0				83.49		51		61.09	0	51		0	0		
1746.	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah			129.440.000				4.979.999		4.917.500	100	98.74		4.917.500	50	3.8		
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi										0	0			0	0		
1747.	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi			119.440.000							0	0			0	0		
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	20		0		0		0		0	0	0		0	0		
1748.	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah			10.000.000				4.979.999		4.917.500	100	98.74		4.917.500	100	49.18		
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	20		0		20		20		100	0	20		100	0		
1749	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			109.440.000				5.495.000		5.133.200	200	93.42		5.133.200	100	4.69	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	44,18				0		39,4		0	0	39,4		89.18	0		
			Persentase Koperasi yang Sehat (Persen)	0				7.27		46		632.74	0	46		0	0		
1750.	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1			109.440.000				5.495.000		5.133.200	200	93.42		5.133.200	100	4.69		
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi										0	0			0	0		
1751.	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			109.440.000				5.495.000		5.133.200	200	93.42		5.133.200	100	4.69		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	20		0		10		20		200	0	20		100	0		
1752	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			290.500.000		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	17,61				0		0		0	0	0		0	0		
1753	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			290.500.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian										0	0			0	0		
1754	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi			290.500.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	25		0		0		0		0	0	0		0	0		
1755	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			310.500.000		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	10,56				0		0		0	0	0		0	0		
1756	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			310.500.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan										0	0			0	0		
1757	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			310.500.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	12		0		0		0		0	0	0		0	0		
1758	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			4.107.298.109		-		1.290.082.528		755.300.496	75	58.55		755.300.496	107.14	18.39	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	0,9				0		0		0	0	0		0	0		
			Pertumbuhan Wirausaha (%)	13,42				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Fasilitas UMKM (Persen)	0			27.26	4		14.67	0	4				0	0		
1759	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan			4.107.298.109		-		1.290.082.528		755.300.496	75	58.55		755.300.496	107.14	18.39		
		Terlaksananya Pemberdayaan UMKM										0	0			0	0		
1760	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			323.410.000		-		31.275.000		21.541.200	100	68.88		21.541.200	500	6.66		
		Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	20		0		100		100		100	0	100		500	0		
1761	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan (Unit Usaha)	0		0		20		0		0	0	0		0	0		
1762	2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			1.724.478.111		-		541.739.000		21.879.200	100	4.04		21.879.200	100	1.27		
		Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	20		0		20		20		100	0	20		100	0		
1763	2.17.07.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			596.920.000		-		717.068.528		711.880.096	100	99.28		711.880.096	150	119.26		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	20		0		30		30		100	0	30		150	0		
1764	2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil			268.600.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi (Unit Usaha)	25		0		0		0		0	0	0		0	0		
1765	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik			348.040.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	20		0		0		0		0	0	0		0	0		
1766	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro			298.600.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	20		0		0		0		0	0	0		0	0		
1767	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan			547.249.998		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	25		0		0		0		0	0	0		0	0		
1768	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			677.200.000		-		68.271.045		59.265.200	100	86.81		59.265.200	25	8.75	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase Pengembangan UMKM (Persen)	0				7.87		5		63.53	0	5		0	0		
			Proporsi UKM Menjaln Kemitraan dan Ekspor (%)	2,36				0		0		0	0	0		0	0		
1769.	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			677.200.000				68.271.045		59.265.200	100	86.81		59.265.200	25	8.75		
		Terlaksananya Fasilitasl UMKM										0	0			0	0		
1770.	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro			353.700.000				68.271.045		59.265.200	100	86.81		59.265.200	50	16.76		
		Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)	100		0		50		50		100	0	50		50	0		
1771.	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi			323.500.000							0	0			0	0		
		Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	100		0		0		0		0	0	0		0	0		
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			5.168.551.006		-		132.204.200		114.441.349	225	86.56		114.441.349	29.62	2.21		
1772	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			1.321.778.256		-		7.505.838		1.149.457	100	15.31		1.149.457	5	0.09	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	99,17				0		260		0	0	260		262,18	0		
			Persentase Kemudahan Penanaman Modal (Persen)	0				40.00		0		0	0	0		0	0		
1773.	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah			810.891.050		-		7.505.838		1.149.457	100	15.31		1.149.457	10	0.14		
		Meningkatnya Jumlah Penetapan Kerjasama										0	0			0	0		
1774.	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			479.891.050		-		7.505.838		1.149.457	100	15.31		1.149.457	20	0.24		
		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Dokumen)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
1775.	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota			331.000.000		-					0	0			0	0		
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah (Dokumen)	25		0		0		0		0	0	0		0	0		
1776.	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			510.887.206		-					0	0			0	0		
		Tersedianya Peta Potensi Penanaman Modal										0	0			0	0		
1777.	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)			248.287.206		-					0	0			0	0		
		Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
1778.	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			262.600.000		-					0	0			0	0		
		Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota (Dokumen)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
1779	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			121.772.750		-		12.295.051		11.890.054	100	96.71		11.890.054	58.33	9.76	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	4,2				0		45,4		0	0	45,4		1080.95	0		
			Persentase Sektor pada Promosi Penanaman Modal (Persen)	0				30.00		100		333.33	0	100		0	0		
1780.	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			121.772.750		-		12.295.051		11.890.054	100	96.71		11.890.054	58.33	9.76		
		Meningkatnya Jumlah Promosi Penanaman Modal										0	0			0	0		
1781.	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			62.576.250		-		4.222.508		3.855.350	100	91.3		3.855.350	16.67	6.16		
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Dokumen)	6		0		1		1		100	0	1		16.67	0		
1782.	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota			59.196.500		-		8.072.543		8.034.704	100	99.53		8.034.704	100	13.57		
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota (Dokumen)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
1783	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			1.510.000.000		-		51.998.954		51.266.316	475.89	98.59		51.266.316	54.93	3.4	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan (Indeks)	0				87.98		98,5		111.96	0	98,5		0	0		
			Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	96,76				0		99,5		0	0	99,5		102.83	0		
1784.	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi			1.510.000.000		-		51.998.954		51.266.316	475.89	98.59		51.266.316	54.93	3.4		
		Meningkatnya jumlah pelayanan perizinan kepada										0	0			0	0		
1785.	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			360.000.000		-		6.808.786		6.736.473	300	98.94		6.736.473	10	1.87		
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	30		0		1		3		300	0	3		10	0		
1786.	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi			340.000.000		-		13.250.000		13.245.200	1322.65	99.96		13.245.200	172.96	3.9		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	2.600		0		340		4.497		1322.65	0	4.497		172.96	0		
1787.	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko			435.000.000		-		11.580.066		11.562.359	150	99.85		11.562.359	16.67	2.66		
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik (Pelaku Usaha)	1.080		0		120		180		150	0	180		16.67	0		
1788.	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko			375.000.000		-		20.360.102		19.722.284	130.91	96.87		19.722.284	20.11	5.26		
		Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)	1.790		0		275		360		130.91	0	360		20.11	0		
1789	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			2.090.000.000		-		53.844.324		43.721.920	90.48	81.2		43.721.920	19.4	2.09	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	91,15				0		75,94		0	0	75,94		83.31	0		
			Indeks Pemantauan dan Pengawasan Investasi (Indeks)	0				75.98		46,95		61.79	0	46,95		0	0		
1790.	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			2.090.000.000		-		53.844.324		43.721.920	90.48	81.2		43.721.920	19.4	2.09		
		Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman										0	0			0	0		
1791.	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan			300.000.000		-		17.270.003		10.714.532	227.27	62.04		10.714.532	35.71	3.57		
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya (Kegiatan Usaha.)	70		0		11		25		227.27	0	25		35.71	0		
1792.	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			1.251.400.000		-		21.199.188		19.758.737	6.21	93.21		19.758.737	10	1.58		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Pelaku Usaha)	180		0		290		18		6.21	0	18		10	0		
1793.	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal			538.600.000		-		15.375.133		13.248.651	37.97	86.17		13.248.651	12.5	2.46		
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan Usaha)	240		0		79		30		37.97	0	30		12.5	0		
1794	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			125.000.000		-		6.560.033		6.413.602	0	97.77		6.413.602	0	5.13	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman	Ketersediaan Database Perizinan (Ada/Tidak)	0				Ada		100		0	0	100		0	0		
			Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	40,53				0		100		0	0	100		246.73	0		
1795.	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah			125.000.000		-		6.560.033		6.413.602	0	97.77		6.413.602	0	5.13		
		Meningkatnya kemudahan mengakses data dan										0	0			0	0		
1796.	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan			125.000.000		-		6.560.033		6.413.602	0	97.77		6.413.602	0	5.13		
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan (Dokumen)	6		0		2		0		0	0	0		0	0		
2.19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			37.055.995.709		-		6.415.354.121		6.000.590.517	87.09	93.53		6.000.590.517	19.79	16.19		
1797	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.632.995.709		-		3.429.918.560		3.209.253.474	119.29	93.57		3.209.253.474	14.16	17.22	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		91,59		91.59	0	91,59		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	67,2				0		65,5		0	0	65,5		97.47	0		
1798.	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			125.000.000		-		30.560.001		30.550.706	133.33	99.97		30.550.706	15.09	24.44		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat										0	0			0	0		
1799.	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			125.000.000		-		30.560.001		30.550.706	133.33	99.97		30.550.706	15.09	24.44		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	53		0		6		8		133.33	0	8		15.09	0		
1800.	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.002.027.107		-		2.912.949.000		2.742.638.526	156.67	94.15		2.742.638.526	13.43	21.09		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Disporapar										0	0			0	0		
1801.	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.002.027.107		-		2.912.949.000		2.742.638.526	156.67	94.15		2.742.638.526	13.43	21.09		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	350		0		30		47		156.67	0	47		13.43	0		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																				
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			
1802.	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80.000.000			-		-		0	0			0	0			
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada										0	0			0	0			
1803.	2.19.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			40.000.000			-		-		0	0			0	0			
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	4		0		0		0		0	0	0		0	0			
1804.	2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			40.000.000			-		-		0	0			0	0			
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	48		0		0		0		0	0	0		0	0			
1805.	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			302.760.000			-		-		0	0			0	0			
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian										0	0			0	0			
1806.	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			75.000.000			-		-		0	0			0	0			
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	125		0		0		0		0	0	0		0	0			
1807.	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			160.000.000			-		-		0	0			0	0			
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50		0		0		0		0	0	0		0	0			
1808.	2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			67.760.000			-		-		0	0			0	0			
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25		0		0		0		0	0	0		0	0			
1809.	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.002.140.000			-		70.393.319		70.219.157	100	99.75		70.219.157	8.92	7.01		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0			0	0			
1810.	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			210.000.000			-		23.595.319		23.556.790	100	99.84		23.556.790	2.58	11.22		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	155		0		4		4		100	0	4		2.58	0			
1811.	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			80.000.000			-		4.000.000		4.000.000	100	100		4.000.000	12	5		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	100		0		12		12		100	0	12		12	0			
1812.	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			45.000.000			-		3.000.000		2.972.567	100	99.09		2.972.567	10	6.61		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50		0		5		5		100	0	5		10	0			
1813.	2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			7.140.000			-		798.000		760.000	100	95.24		760.000	13.04	10.64		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	92		0		12		12		100	0	12		13.04	0			
1814.	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			660.000.000			-		39.000.000		38.929.800	100	99.82		38.929.800	6.98	5.9		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	215		0		15		15		100	0	15		6.98	0			
1815.	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.085.214.000			-		63.500.000		63.055.000	80	99.3		63.055.000	3.2	3.02		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Sebagai										0	0			0	0			
1816.	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			800.000.000			-				0	0			0	0			
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0	0	0		0	0			
1817.	2.19.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			200.000.000			-				0	0			0	0			
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0	0	0		0	0			
1818.	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			200.000.000			-				0	0			0	0			
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	16		0		0		0		0	0	0		0	0			
1819.	2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			540.214.000			-				0	0			0	0			
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0	0	0		0	0			
1820.	2.19.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			345.000.000			-		63.500.000		63.055.000	80	99.3		63.055.000	16	18.28		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		5		4		80	0	4		16	0			
1821.	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.498.854.602			-		271.636.240		225.925.085	166.67	83.17		225.925.085	14.97	15.07		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah										0	0			0	0			
1822.	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			13.500.000			-		1.200.000		1.190.661	300	99.22		1.190.661	4.92	8.82		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	61		0		1		3		300	0	3		4.92	0			
1823.	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			397.000.000			-		63.520.000		37.862.534	100	59.61		37.862.534	20	9.54		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		12		100	0	12		20	0			
1824.	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.088.354.602			-		206.916.240		186.871.890	100	90.31		186.871.890	20	17.17		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		12		100	0	12		20	0			
1825.	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			537.000.000			-		80.880.000		76.865.000	100	95.04		76.865.000	44	14.31		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang										0	0			0	0			
1826.	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan			166.500.000			-		28.980.000		28.980.000	100	100		28.980.000	100	17.41		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		1		1		100	0	1		100	0			

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1827.	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	127.500.000	0	-	1	21.900.000	1	18.000.000	100	82.19	1	18.000.000	100	14.12		
1828.	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	218.000.000	0	-	1	30.000.000	1	29.885.000	100	99.62	1	29.885.000	20	13.71		
1829.	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	21.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0		
1830.	2.19.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	4.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0		
1831	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			2.080.000.000		-		823.879.500		802.143.126	37.5	97.36		802.143.126	38.1	38.56	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (%)	11,78				0		12,02		0	0	12,02		102,04	0		
			Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif (Persen)	0				100		12,02		12,02	0	12,02		0	0		
1832.	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor			1.420.000.000		-		413.892.500		392.626.738	33.33	94.86		392.626.738	33.33	27.65		
1833.	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	60	425.000.000	0	-	100	396.580.000	100	375.792.780	100	94.76	100	375.792.780	166.67	88.42		
1834.	2.19.02.2.01.0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda (Orang)	6	180.000.000	0	-	50	17.312.500	0	16.833.958	0	97.24	0	16.833.958	0	9.35		
1835.	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda (Kegiatan)	150	250.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0		
1836.	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi (Orang)	100	160.000.000	0	-	50	-	0	-	0	0	0	0	0	0		
1837.	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	70	405.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0		
1838.	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			660.000.000		-		409.987.000		409.516.388	50	99.89		409.516.388	50	62.05		
1839.	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota			500.000.000		-		409.987.000		409.516.388	50	99.89		409.516.388	100	81.9		
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1		0		2		1		50	0	1		100	0		
1840.	2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota (Orang)	100	160.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0		
1841	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN			14.403.000.000		-		2.035.343.161		1.866.113.393	67.59	91.69		1.866.113.393	17.75	12.96	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Jumlah prestasi olahraga (Cabot)	0				7		1		14.29	0	1		0	0		
			Persentase Atlet yang Masuk Pelatda Propinsi (%)	1				0		1,15		0	0	1,15		115	0		
1842.	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah			4.865.000.000		-		295.583.452		172.945.156	5.56	58.51		172.945.156	12.5	3.55		
1843.	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan,	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	8	4.865.000.000	0	-	18	-	1	-	5.56	0	1	-	12.5	0		
1844.	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.153.000.000		-		314.878.801		314.012.922	100	99.73		314.012.922	1.83	5.1		
1845.	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	91	4.703.000.000	0	-	5	-	5	-	100	0	5		5.49	0		
1846.	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik			200.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota (Kegiatan)	4		0		0		0		0	0	0		0	0		
1847.	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	610	1.250.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1848.	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			455.000.000		-	198.204.000		198.203.845		100	100	198.203.845		13.89	43.56		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan										0	0			0	0		
1849.	2.19.03.2.03.0006	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi (Orang)	300	130.000.000		-					0	0			0	0		
1850.	2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga (Orang)	180	225.000.000	0		0		0		100	100	198.203.845		55.56	88.09		
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				0		100		100		100	0	100		55.56	0		
1851.	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota			25.000.000		-					0	0			0	0		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)		1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1852.	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota (Dokumen)	3	75.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1853.	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			2.354.400.000		-	1.191.000.000		1.145.492.600		100	96.18	1.145.492.600		25	48.65		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan										0	0			0	0		
1854.	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			2.354.400.000		-	1.191.000.000		1.145.492.600		100	96.18	1.145.492.600		25	48.65		
		Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4		0		1		1		100	0	1		25	0		
1855.	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			575.600.000		-	35.676.908		35.458.870		50	99.39	35.458.870		30	6.16		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan										0	0			0	0		
1856.	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi (Laporan)	2	100.000.000	0		2		1		50	99.38	18.503.283		50	18.5		
		Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi										50	0	1		50	0		
1857.	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			45.600.000		-					0	0			0	0		
		Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan (Laporan)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
1858.	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat			100.000.000		-					0	0			0	0		
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat (Dokumen)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
1859.	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	2	120.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1860.	2.19.03.2.05.0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	1	210.000.000	0		2		17.058.004		50	99.4	16.955.587		100	8.07		
1861	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			1.940.000.000		-	126.212.900		123.080.524		60	97.52	123.080.524		26.67	6.34	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	100				0		95		0	0	95		95	0		
		Pembinaan Pramuka (Persen)		0				42.86		95		221.65	0	95		0	0		
1862.	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			1.940.000.000		-	126.212.900		123.080.524		60	97.52	123.080.524		26.67	6.34		
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan										0	0			0	0		
1863.	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	5	350.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1864.	2.19.04.2.01.0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah			290.000.000		-	72.794.400		72.790.400		100	99.99	72.790.400		10	25.1		
		Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	250		0		25		25		100	0	25		10	0		
1865.	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah (Laporan)	2	500.000.000	0		1		1		100	99.98	33.349.724		50	6.67		
1866.	2.19.04.2.01.0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah			460.000.000		-	6.190.000		3.940.000		0	63.65	3.940.000		0	0.86		
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan (Unit)	1		0		10		0		0	0	0		0	0		
1867.	2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan			90.000.000		-	5.890.000		5.445.000		0	92.44	5.445.000		0	6.05		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
1868.	2.19.04.2.01.0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi)	1	250.000.000	0	-	1	7.982.000	1	7.555.400	100	94.66	1	7.555.400	100	3.02		
		Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan (Organisasi)	1		0	-	1		1		100	0	1		100	0		
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			450.000.000		-	25.115.278	50.143.284	0	199.65		50.143.284	66.67	11.14				
1869	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			450.000.000		-	25.115.278	50.143.284	0	199.65		50.143.284	66.67	11.14			Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	1,1			-	0		1		0	0	1		90.91	0		
			Persentase OPD yang melakukan pengamanan data dan informasi terintegrasi (Persen)	0			-	11.76		100		850.34	0	100		0	0		
1870.	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			360.000.000		-	25.115.278	50.143.284	0	199.65		50.143.284	100	13.93				
		Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan					-					0	0			0	0		
1871.	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)	0		0	-	34	13.326.278	0	13.291.642	0	99.74		13.291.642	0	0		
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Dokumen)	0		0	-	34		0		0	0	0		0	0		
1872.	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	11.789.000	11.780.000	0	99.92		11.780.000	0	0		0		
		Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi (Perangkat Daerah)	0		0	-	34		0		0	0	0		0	0		
1873.	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		175.000.000		-		-		11.780.000	0	0		11.780.000	100	6.73		
		Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	34		0	-	0		34		0	0	34		100	0		
1874.	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah		185.000.000		-		-		13.291.642	0	0		13.291.642	100	7.18		
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	34		0	-	0		34		0	0	34		100	0		
1875.	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			90.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Ditetapkannya Pola Hubungan Komunikasi Sandi					-					0	0			0	0		
1876.	2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah			90.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	34		0	-	0		0		0	0	0		0	0		
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			16.262.372.374		-	3.019.165.495	2.834.018.563	64.1	93.87		2.834.018.563	25.86	17.43				
1877	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			2.590.000.000		-	463.369.668	446.487.625	40	96.36		446.487.625	162.75	17.24			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam	Persentase kegiatan pengembangan budaya (Persen)	0			-	61.54		61,54		100	0	61,54		0	0		
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	40			-	0		15		0	0	15		37.5	0		
1878.	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.555.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Pembinaan Sumber Daya					-					0	0			0	0		
1879.	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			195.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	1		0	-	3		0		0	0	0		0	0		
1880.	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			160.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	50		0	-	50		0		0	0	0		0	0		
1881.	2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota			400.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan (Dokumen)	1		0	-	0		0		0	0	0		0	0		
1882.	2.22.02.2.01.0004	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan			400.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina (Orang)	50		0	-	0		0		0	0	0		0	0		
1883.	2.22.02.2.01.0005	Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan			400.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina (Lembaga)	1		0	-	0		0		0	0	0		0	0		
1884.	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.035.000.000		-		463.369.668		446.487.625	66.67	96.36		446.487.625	434	43.14		
		Tersedianya Objek kesenian tradisional yang					-					0	0			0	0		
1885.	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			825.000.000		-		321.944.384		307.077.354	100	95.38		307.077.354	1300	37.22		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	1		0		13		13		100	0	13		1300	0		
1886.	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	50	125.000.000	0		1	141.425.284	1	139.410.271	100	98.58		139.410.271	2	111.53		
1887.	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	1	85.000.000	0		20		0		0	0	0		0	0		
1888	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			415.000.000		-		122.250.000		117.670.982	50	96.25		117.670.982	66.67	28.35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam	Persentase pembinaan sanggar seni (Persen)	0				6.90		6.9		100	0	6.9		0	0		
			Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	66,67				0		75		0	0	75		112.49	0		
1889.	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			415.000.000		-		122.250.000		117.670.982	50	96.25		117.670.982	66.67	28.35		
		Tersedianya Objek kesenian tradisional yang										0	0			0	0		
1890.	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	50	250.000.000	0		100		100		100	96.25		117.670.982	200	47.07		
1891.	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	1	65.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
1892.	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	1	100.000.000	0		10		0		0	0	0		0	0		
1893	2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			525.244.255		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi	Persentase objek sejarah (Persen)	0				56.25		56.25		100	0	56.25		0	0		
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	83,33				0		46,67		0	0	46,67		56.01	0		
1894.	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			525.244.255		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Tempat Bersejarah yang dilestarikan										0	0			0	0		
1895.	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	20	125.000.000	0		20		0		0	0	0		0	0		
1896.	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah (Unit)	20	200.244.255	0		20		0		0	0	0		0	0		
1897.	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	2	200.000.000	0		2		0		0	0	0		0	0		
1898	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			3.449.000.000		-		15.361.414		14.545.926	14.29	94.69		14.545.926	2.22	0.42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapan (%)	100				0		40,7		0	0	40,7		40.7	0		
			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	55,15				0		24,52		0	0	24,52		44.46	0		
			Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan (Persen)	0				59.09		50		84.62	0	50		0	0		
1899.	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			551.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Cagar Budaya										0	0			0	0		
1900.	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	5	242.000.000	0		5		0		0	0	0		0	0		
1901.	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya			229.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
1902.	2.22.05.2.01.0003	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapan (Objek)	5		0		5		0		0	0	0		0	0		
		Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda			80.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan (Objek)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1903.	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			2.500.000.000		-		15.361.414		14.545.926	33.33	94.69		14.545.926	5	0.58		
		Tersedianya Cagar Budaya yang dikelola										0	0			0	0		
1904.	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya			250.000.000		-		15.361.414		14.545.926	100	94.69		14.545.926	20	5.82		
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
1905.	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya			1.800.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan (Objek)	2		0		2		0		0	0	0		0	0		
1906.	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya			250.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	5		0		5		0		0	0	0		0	0		
1907.	2.22.05.2.02.0004	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan			200.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

II-359

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi (Objek)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
1908.	2.22.05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		398.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar										0	0			0	0		
1909.	2.22.05.2.03.0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah		248.000.000		-		-		-	0	0	0		-	0	0	
		Terbitnya Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi (Objek)	5		0		5		0		0	0	0		0	0		
1910.	2.22.05.2.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah	Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah		150.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi (Laporan)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
1911	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			625.000.000		-		598.407.000		562.865.806	100	94.06		562.865.806	0.71	90.06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	13,84				0		13,76		0	0	13,76		99,42	0		
1912.	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			625.000.000		-		598.407.000		562.865.806	100	94.06		562.865.806	0.71	90.06		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum										0	0			0	0		
1913.	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu			60.000.000		-		598.407.000		562.865.806	100	94.06		562.865.806	5	938.11		
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	20		0		1		1		100	0	1		5	0		
1914.	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman			60.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya (Orang)	15		0		0		0		0	0	0		0	0		
1915.	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum			65.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1916.	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			100.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1917.	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum			100.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1918.	2.22.06.2.01.0013	Pengelolaan Koleksi Museum			160.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola (Unit)	50		0		0		0		0	0	0		0	0		
1919.	2.22.06.2.01.0014	Pengelolaan Operasional Museum			80.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum (Layanan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1920	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7.457.200.783		-		1.649.956.513		1.526.639.539	100	92.53		1.526.639.539	8.09	20.47	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	64				0		88,68		0	0	88,68		138,56	0		
1921.	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			37.316.410		-		4.354.500		4.352.638	100	99.96		4.352.638	5.67	11.66		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan penganggaran										0	0			0	0		
1922.	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			34.400.000		-		4.354.500		4.352.638	100	99.96		4.352.638	34	12.65		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	50		0		17		17		100	0	17		34	0		
1923.	2.22.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			500.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1924.	2.22.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			500.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1925.	2.22.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			500.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1926.	2.22.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			500.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1927.	2.22.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			916.410		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1928.	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.486.445.535		-		1.110.147.000		992.991.868	100	89.45		992.991.868	6.67	22.13		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat										0	0			0	0		
1929.	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.485.445.535		-		1.110.147.000		992.991.868	100	89.45		992.991.868	20	22.14		

II-360

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	560		0		112		112		100	0	112		20	0		
1930.	2.22.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		500.000	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1931.	2.22.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		500.000	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1932.	2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.000.000	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0		
		Tersusunnya Data dan Laporan Administrasi										0	0			0	0		
1933.	2.22.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	12	500.000	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)			0		0		0		0	0	0		0	0		
1934.	2.22.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)		500.000	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8		0		0		0		0	0	0		0	0		
1935.	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			311.500.000	-	-	51.734.343		50.726.241		100	98.05	50.726.241		16.19	16.28		
		Tersedianya Dokumen administrasi umum perangkat										0	0			0	0		
1936.	2.22.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	20	52.000.000	-	-	6.443.343		6.418.930		100	99.62	6.418.930		30	12.34		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)			0		6		6		100	0	6		30	0		
1937.	2.22.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	500.000	-	-	-		-		0	0	-	-	0	0		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0	0	0		0	0		
1938.	2.22.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	25	25.000.000	-	-	7.493.000		7.455.000		100	99.49	7.455.000		20	29.82		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)			0		5		5		100	0	5		20	0		
1939.	2.22.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	25	37.000.000	-	-	3.000.000		2.993.111		100	99.77	2.993.111		20	8.09		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)			0		5		5		100	0	5		20	0		
1940.	2.22.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	60	5.700.000	-	-	798.000		798.000		100	100	798.000		23.33	14		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)			0		14		14		100	0	14		23.33	0		
1941.	2.22.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	2	500.000	-	-	-		-		0	0	-	-	0	0		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)			0		0		0		0	0	0		0	0		
1942.	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	50	190.800.000	-	-	34.000.000		33.061.200		100	97.24	33.061.200		20	17.33		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)			0		10		10		100	0	10		20	0		
1943.	2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			131.200.000	-	-	-		-		0	0	-	-	0	0		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan										0	0			0	0		
1944.	2.22.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	30.400.000	-	-	-		-		0	0	-	-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0	0	0		0	0		
1945.	2.22.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	500.000	-	-	-		-		0	0	-	-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0	0	0		0	0		
1946.	2.22.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	31.200.000	-	-	-		-		0	0	-	-	0	0		
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0	0	0		0	0		
1947.	2.22.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	30.200.000	-	-	-		-		0	0	-	-	0	0		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0	0	0		0	0		
1948.	2.22.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	38.900.000	-	-	-		-		0	0	-	-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)			0		0		0		0	0	0		0	0		
1949.	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan			2.098.948.800	-	-	426.333.670		421.218.780		100	98.8	421.218.780		7.85	20.07		
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan										0	0			0	0		
1950.	2.22.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	9	10.000.000	-	-	800.000		800.000		100	100	800.000		11.11	8		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)			0		1		1		100	0	1		11.11	0		
1951.	2.22.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3	30.000.000	-	-	-		-		0	0	-	-	0	0		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)			0		0		0		0	0	0		0	0		
1952.	2.22.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2	60.200.000	-	-	-		-		0	0	-	-	0	0		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)			0		0		0		0	0	0		0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
1953.	2.22.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.998.748.800				425.533.670		420.418.780	100	98.8		420.418.780	20.3	21.03		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	660		0		134		134		100	0	134		20.3	0		
1954.	2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			390.790.038				57.387.000		57.350.012	100	99.94		57.350.012	12	14.68		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang										0	0			0	0		
1955.	2.22.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		1		1		100	99.94	1		20	17.1		
1956.	2.22.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		0		1		1		100	100		20.800.000	20	15.17		
1957.	2.22.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1958.	2.22.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		1		100	99.79	1		20	29.39		
1959.	2.22.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	23		0		0		0		0	0	0		0	0		
1960	2.22.07	PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)			1.200.927.336				169.820.900		165.808.685	88.89	97.64		165.808.685	15.14	13.81	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
		Meningkatnya pembinaan adat istiadat	Persentase Fasilitas sengketa adat (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Indeks Adat Istiadat Aceh (Nilai)	99				0		97,43		0	0	97,43		98.41	0		
1961.	2.22.07.7.01	Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat			538.046.748				65.719.000		63.379.345	80	96.44		63.379.345	36.9	11.78		
		Terlaksananya Pembinaan Adat Istiadat yang										0	0			0	0		
1962.	2.22.07.7.01.0001	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Terfasilitasinya Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional (Laporan)	3		0		1		0		0	0	0		0	0		
1963.	2.22.07.7.01.0002	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi (Lembaga)	10		0		9		9		100	97.61		11.137.369	90	14.65		
1964.	2.22.07.7.01.0003	Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat (Orang)	175		0		20		20		100	97.9		11.312.693	11.43	7.8		
1965.	2.22.07.7.01.0004	Pembinaan Keluarga Meudab dan Adat Perkawinan	Jumlah Keluarga Meudab dan Adat Perkawinan yang Dibina (Keluarga)	10		0		10		10		100	97.67	10		100	11.78		
1966.	2.22.07.7.01.0005	Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	Jumlah Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh (Buku)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
1967.	2.22.07.7.01.0006	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan (Dokumen)	10		0		2		2		100	99.91		17.970.280	20	17.97		
1968.	2.22.07.7.02	Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat			316.100.000				92.306.900		90.829.520	100	98.4		90.829.520	7	28.73		
		Terlaksananya Pembinaan Pengembangan hukum										0	0			0	0		
1969.	2.22.07.7.02.0001	Penguatan Peradilan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat (Orang)	250		0		20		20		100	98.55	20		8	10.38		
1970.	2.22.07.7.02.0002	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas) (Dokumen)	25		0		1		1		100	97.67	1		4	7.93		
1971.	2.22.07.7.02.0003	Pembinaan Mediasi Adat	Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat (Laporan)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
1972.	2.22.07.7.02.0004	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat (Orang)	250		0		40		40		100	98.44	40		16	75.7		
1973.	2.22.07.7.03	Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat			346.780.588				11.795.000		11.599.820	100	98.35		11.599.820	1.14	3.35		
1974.	2.22.07.7.03.0001	Pembinaan Kapasitas MAA	Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan (Orang)	20		0		0		0		0	0	0		0	0		
1975.	2.22.07.7.03.0002	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat (Orang)	250		0		20		20		100	98.35	20		8	0		
1976.	2.22.07.7.03.0003	Rapat Kerja MAA	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA (Dokumen)	4		0		0		0		0	0	0		0	0		
1977.	2.22.07.7.03.0004	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat			120.000.000							0	0			0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terbitnya Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan (Eksemplar)	100		0		0		0		0	0	0		0	0		
1978.	2.22.07.7.03.0005	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat			30.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina (Orang)	50		0		0		0		0	0	0		0	0		
1979.	2.22.07.7.03.0006	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat			30.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendataan dan Dokumentasi Kasus Sengketa Adat	Jumlah Kasus Sengketa Adat yang Terdata dan Terdokumentasi (Kasus)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
1980.	2.22.07.7.03.0007	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat			30.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Adat	Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat (Unit)	22		0		0		0		0	0	0		0	0		
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			22.792.795.813		-		3.577.200.239		3.058.548.100	47.89	85.5		3.058.548.100	31.96	13.42		
1981	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20.828.354.229		-		3.437.189.976		2.946.132.706	33.82	85.71		2.946.132.706	17.94	14.14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	63,9				0		61,2		0	0	61,2		95,77	0		
1982.	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			101.974.876		-		6.256.001		6.243.583	50	99.8		6.243.583	5.56	6.12		
		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan										0	0			0	0		
1983.	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			87.380.750		-		6.256.001		6.243.583	100	99.8		6.243.583	11.11	7.15		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	18		0		2		2		100	0	2		11.11	0		
1984.	2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.594.126		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5		0		1		0		0	0	0		0	0		
1985.	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			17.480.329.305		-		2.774.011.216		2.325.209.451	33.33	83.82		2.325.209.451	33.33	13.3		
		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat										0	0			0	0		
1986.	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			17.456.422.830		-		2.774.011.216		2.325.209.451	100	83.82		2.325.209.451	100	13.32		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	336		0		336		336		100	0	336		100	0		
1987.	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			10.270.250		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		1		0		0	0	0		0	0		
1988.	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			13.636.225		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	35		0		12		0		0	0	0		0	0		
1989.	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.770.076		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersusunnya Dokumen milik Daerah pada SKPD										0	0			0	0		
1990.	2.23.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			6.420.375		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	10		0		2		0		0	0	0		0	0		
1991.	2.23.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			14.349.701		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	60		0		12		0		0	0	0		0	0		
1992.	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			142.966.814		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat										0	0			0	0		
1993.	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			26.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	5		0		1		0		0	0	0		0	0		
1994.	2.23.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			9.166.814		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		1		0		0	0	0		0	0		
1995.	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			62.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		2		0		0	0	0		0	0		
1996.	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			45.800.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		1		0		0	0	0		0	0		
1997.	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			770.804.026		-		57.637.678		57.556.429	33.33	99.86		57.556.429	4.59	7.47		
		Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0			0	0		
1998.	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			65.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2		0		1		0		0	0	0		0	0		
1999.	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			154.000.000		-		14.839.678		14.838.865	100	99.99		14.838.865	20	9.64		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
2000.	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			42.721.250		-		-		-	0	0		-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5		0		1		0		0	0	0		0	0		
2001.	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	95.325.000	0		1	2.800.000	0	2.800.000	0	100	0	2.800.000	0	2.94		
2002.	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	58.010.100	0		1	4.200.000	0	4.199.964	0	100	0	4.199.964	0	7.24		
2003.	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5	11.892.798	0		1	798.000	1	760.000	100	95.24	1	760.000	20	6.39		
2004.	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	75	315.200.000	0		1	35.000.000	1	34.957.600	100	99.88	1	34.957.600	1.33	11.09		
2005.	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5	14.751.626	0		1	-	0	-	0	0	-	0	0			
2006.	2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5	13.903.252	0		1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2007.	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.197.800.000		-		50.000.000		49.287.500	25	98.58		49.287.500	33.33	4.11		
2008.	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	5	293.000.000	0		2	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2009.	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	6	383.000.000	0		0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2010.	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	15	120.000.000	0		5	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2011.	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	203.000.000	0		10	50.000.000	10	49.287.500	100	98.58	10	49.287.500	200	24.28		
2012.	2.23.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	177.000.000	0		0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2013.	2.23.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	21.800.000	0		1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2014.	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			805.477.632		-		433.805.081		397.371.343	62.5	91.6		397.371.343	39.17	49.33		
2015.	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	950.000	0		1	800.000	0	789.767	0	98.72	0	789.767	0	83.13		
2016.	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	72	526.000.000	0		12	120.074.472	12	112.440.741	100	93.64	12	112.440.741	16.67	21.38		
2017.	2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	960.000	0		1	3.234.769	1	3.201.761	100	98.98	1	3.201.761	20	333.52		
2018.	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	277.567.632	0		12	309.695.840	6	280.939.074	50	90.71	6	280.939.074	120	101.21		
2019.	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			308.231.500		-		115.480.000		110.464.400	50	95.66		110.464.400	22.78	35.84		
2020.	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	3.681.500	0		1	26.980.000	1	26.392.500	100	97.82	1	26.392.500	100	716.9		
2021.	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	60.000.000	0		1	72.500.000	1	68.391.900	100	94.33	1	68.391.900	20	113.99		
2022.	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	20	15.050.000	0		10	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2023.	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	60	41.500.000	0		10	16.000.000	10	15.680.000	100	98	10	15.680.000	16.67	37.78		
2024.	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			105.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	Rp	0	Rp	5	Rp	0	Rp	K	%	0	Rp	K	%		
2025.	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	83.000.000	0		2		0		0	0	0		0	0		
2026	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			1.887.441.584		-	140.010.263		112.415.394	84.69	80.29		112.415.394	74.13	5.96	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (Angka)	71,15				0		0		0	0	0		0	0		
			Cakupan Pembinaan Perpustakaan (Persen)	0				11.10		55,46		499,64	0	55,46		0	0		
2027.	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.526.392.466		-	91.759.309		76.439.125	77.89	83.3		76.439.125	99,33	5.01			
		Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat										0	0			0	0		
2028.	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan	Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan		138.492.874		-	12.000.001		11.999.466	100	100		11.999.466	11,03	8.66			
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	226,6		0		25		25		100	0	25		11,03	0		
2029.	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	98,1	145.992.871	0		1	11.448.000	1	11.147.996	100	97,38	11.147.996	1,02	7.64			
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya										100	0	1		1,02	0		
2030.	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi (Layanan)	6	138.492.874	0		3	11.136.000	3	11.135.360	100	99,99	11.135.360	50	8.04			
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi										100	0	3		50	0		
2031.	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan (Perpustakaan)	56	138.492.874	0		15	10.965.572	15	10.964.662	100	99,99	10.964.662	26,79	7.92			
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan										100	0	15		26,79	0		
2032.	2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Eksemplar)	90	138.492.874	0		0		0		0	0	0		0	0		
2033.	2.23.02.2.01.0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi (Dokumen)	34.483	142.492.874	0		0		0		0	0	0		0	0		
2034.	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)	128,6	138.492.874	0		4	13.687.699	4	13.676.160	100	99,92	13.676.160	3,11	9.87			
2035.	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan (Dokumen)	290,2	128.492.874	0		1	7.200.001	1	7.193.980	100	99,92	7.193.980	0,34	5.6			
		Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										100	0	1		0,34	0		
2036.	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan (Eksemplar)	3.089	137.992.876	0		1000	10.322.036	10	10.321.501	1	99,99	10.321.501	0,32	7.48			
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan										1	0	10		0,32	0		
2037.	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Eksemplar)	1	138.492.862	0		10	15.000.000	10		100	0	10		1000	0		
		Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota										100	0	10		1000	0		
2038.	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK (Perpustakaan)	45	140.463.739	0		1		0		0	0	0		0	0		
2039.	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		361.049.118				48.250.954		35.976.269		100	74.56	35.976.269		4,83	9.96		
		Terciptanya Gemar Membaca Tingkat Daerah										0	0			0	0		
2040.	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya (Orang)	40	90.262.787	0		6	12.233.938	6		100	0	6		15	0		
		Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota										100	0						
2041.	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan (Perpustakaan)	50	90.262.777	0		2	15.040.940	2	15.008.629	100	99,79	15.008.629	4	16.63			
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota										100	0	2		4	0		
2042.	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		90.260.777				8.976.076		8.972.374		100	99,96	8.972.374		0,19	9.94		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota (Orang)	3.166		0		6		6		100	0	6		0.19	0		
2043.	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat (Lokus)	62.766	90.262.777	0		80	12.000.000	80	11.995.266	100	99.96	11.995.266	0.13	13.29			
2044	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			77.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Meningkatnya Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang di miliki (%)	100				0		0		0	0	0		0	0		
2045.	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/ Kota			37.300.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Naskah Kuno Milik Daerah										0	0			0	0		
2046.	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno (Orang)	2	18.800.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
2047.	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan (Eksemplar)	1	18.500.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
2048.	2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			39.700.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
2049.	2.23.03.2.02.0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota (Eksemplar)	1	21.037.500	0		0		0		0	0	0		0	0		
2050.	2.23.03.2.02.0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/ Kota (Eksemplar)	1	18.662.500	0		0		0		0	0	0		0	0		
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			1.271.240.063		-		8.895.000		8.894.325	5	99.99		8.894.325	1.18	0.7		
2051	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			637.936.500		-		8.895.000		8.894.325	14.29	99.99		8.894.325	2.5	1.39	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	64.71				0		4,12		0	0	4,12		6,37	0		
			Persentase Pengelolaan arsip sesuai standar (Persen)	0				14,29		8,93		62,49	0	8,93		0	0		
2052.	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota			271.072.750		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya pengelola arsip dinamis										0	0			0	0		
2053.	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan (Berkas)	5	74.303.750	0		1		0		0	0	0		0	0		
2054.	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan (Berkas)	5	68.048.500	0		1		0		0	0	0		0	0		
2055.	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota (Laporan)	5	75.641.250	0		1		0		0	0	0		0	0		
2056.	2.24.02.2.01.0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis (Unit)	5	53.079.250	0		0		0		0	0	0		0	0		
2057.	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota			140.946.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya pengelola arsip statis										0	0			0	0		
2058.	2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI (Arsip)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2059.	2.24.02.2.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip (Naskah)	5	70.472.500	0		0		0		0	0	0		0	0		
2060.	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Arsip)	5	70.473.500	0		1		0		0	0	0		0	0		
2061.	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota			225.917.750		-		8.895.000		8.894.325	50	99.99		8.894.325	10	3.94		
2062.	2.24.02.2.03.0001	Terlaksananya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan										0	0			0	0		
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan	Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN		70.573.500		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN (Pengguna)	5		0		1		0		0	0	0		0	0		
2063.	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota			155.344.250		-		8.895.000		8.894.325	100	99.99		8.894.325	20	5.73		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
2064	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			633.303.563		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase Penyelamatan Arsip (Persen)	60				30,77		7,69		24,99	0	7,69		12,82	0		
2065	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10			76.530.057		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan										0	0			0	0		
2066	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan (Berkas)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2067	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun		76.530.057		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun (Arsip)	5		0		1		0		0	0	0		0	0		
2068	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana	yang Berskala Kabupaten/Kota		167.421.104		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya perlindungan dan penyelamatan arsip										0	0			0	0		
2069	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana			97.533.846		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	5		0		1		0		0	0	0		0	0		
2070	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana			69.887.258		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana (Arsip)	5		0		1		0		0	0	0		0	0		
2071	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran		200.680.692		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah										0	0			0	0		
2072	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta	Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan	5	95.117.563		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Daftar)			0		1		0		0	0	0		0	0		
2073	2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta	Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran	5	105.563.129		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Arsip)			0		1		0		0	0	0		0	0		
2074	2.24.03.2.03.0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran	Daerah Kecamatan		-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan (Arsip)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2075	2.24.03.2.03.0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran	Desa/Kelurahan		-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan (Arsip)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2076	2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			100.051.291		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil										0	0			0	0		
2077	2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		5	58.478.522		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)			0		1		0		0	0	0		0	0		
2078	2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		5	41.572.769		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip (Arsip)			0		1		0		0	0	0		0	0		
2079	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			88.620.419		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota										0	0			0	0		
2080	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang			45.718.173		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan (Arsip)	5		0		1		0		0	0	0		0	0		
2081	2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang (Arsip)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2082	2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip	(DPA)		42.902.246		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman (Arsip)	5		0		1		0		0	0	0		0	0		
2083	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			7.057.557.776		-		821.582.093		613.759.662	32.29	74.7		613.759.662	8.41	8.7		
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			4.261.855.107		-		588.665.482		462.503.140	40.74	78.57		462.503.140	13.33	10.85	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	15.906,4				0		0		0	0	0		0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
			Cakupan bina kelompok nelayan (Persen)	0				49.54		24,92		50.3	0	24,92		0	0		
2084.	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Terlaksananya pengelolaan Penangkapan ikan di			150.451.343		-	2.908.001		2.870.780		50	98.72	2.870.780		10	1.91		
2085.	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			25.064.478		-	2.908.001		2.870.780		100	98.72	2.870.780		20	11.45		
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	60		0		12		12		100	0	12		20	0		
2086.	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			125.386.865		-			-		0	0			0	0		
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	15		0		15		0		0	0	0		0	0		
2087.	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			4.001.081.374		-	575.099.980		450.108.250		100	78.27	450.108.250		20	11.25		
		Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam										0	0			0	0		
2088.	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			3.900.823.464		-	543.164.627		419.587.050		100	77.25	419.587.050		20	10.76		
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	1.000		0		200		200		100	0	200		20	0		
2089.	3.25.03.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil			100.257.910		-	31.935.353		30.521.200		100	95.57	30.521.200		20	30.44		
		Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	40		0		8		8		100	0	8		20	0		
2090.	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					-			-		0	0			0	0		
												0	0			0	0		
2091.	3.25.03.2.03.0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					-			-		0	0			0	0		
		Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	0		0		5		0		0	0	0		0	0		
2092.	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)					-			-		0	0			0	0		
		Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	0		0		3		0		0	0	0		0	0		
2093.	3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,			110.322.390		-	10.657.501		9.524.110		33.33	89.37	9.524.110		10	8.63		
		Terlaksananya Penerbitan Tasnda daftar Kapal										0	0			0	0		
2094.	3.25.03.2.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10			25.064.478		-			-		0	0			0	0		
		Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	8		0		8		0		0	0	0		0	0		
2095.	3.25.03.2.04.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan	Berukuran sampai dengan 10 GT		85.257.912		-	10.657.501		9.524.110		66.67	89.37	9.524.110		20	11.17		
		Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	1.000		0		300		200		66.67	0	200		20	0		
2096.	3.25.03.2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10					-			-		0	0			0	0		
												0	0			0	0		
2097.	3.25.03.2.05.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal					-			-		0	0			0	0		
		Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	0		0		8		0		0	0	0		0	0		
2098	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			2.198.671.028		-	232.916.611		151.256.522		39.4	64.94	151.256.522		9.55	6.88	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Cakupan bina kelompok pembudidaya (Persen)	0				53.14		54,78		103.09	0	54,78		0	0		
			Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	2.067,61				0		0		0	0	0		0	0		
2099.	3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah			120.322.388		-			-		0	0			0	0		
		Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di										0	0			0	0		
2100.	3.25.04.2.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang			70.193.433		-			-		0	0			0	0		
		Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing (Rekomendasi)	8		0		8		0		0	0	0		0	0		
2101.	3.25.04.2.01.0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau			50.128.955		-			-		0	0			0	0		
		Terlayannya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan (Rekomendasi)	5		0		5		0		0	0	0		0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																				
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket	
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%			
2102.	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			290.902.685			-	16.750.000		46.583.300	66.67	278.11		46.583.300	22.5	16.01			
		Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan										0	0			0	0			
2103.	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil			210.644.775			-	16.750.000		16.062.100	100	95.89		16.062.100	20	7.63			
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	60		0		12		12		100	0	12		20	0			
2104.	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			80.257.910			-			30.521.200	100	0		30.521.200	25	38.03			
		Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	120		0		30		30		100	0	30		25	0			
2105.	3.25.04.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha			0			-			-	0	0			-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	0		0		20		0		0	0	0		0	0			
2106.	3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil			87.449.541			-	-		-	0	0		-	0	0			
		Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi										0	0			0	0			
2107.	3.25.04.2.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1			25.064.478			-			-	0	0		-	0	0			
		Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Rekomendasi)	5		0		5		0		0	0	0		0	0			
2108.	3.25.04.2.03.0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah			62.385.063			-			-	0	0		-	0	0			
		Terlayannya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Rekomendasi)	2		0		0		0		0	0	0		0	0			
2109.	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			1.699.996.414			-	216.166.611		104.673.222	45.46	48.42		104.673.222	12	6.16			
		Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan										0	0			0	0			
2110.	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			50.128.955			-	2.880.001		2.858.350	100	99.25		2.858.350	20	5.7			
		Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	50		0		10		10		100	0	10		20	0			
2111.	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			210.644.775			-	10.567.500		10.267.000	100	97.16		10.267.000	20	4.87			
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	5		0		1		1		100	0	1		20	0			
2112.	3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			-			-			-	0	0		-	0	0			
		Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	0		0		600		0		0	0	0		0	0			
2113.	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			90.257.910			-	7.895.110		7.732.300	66.1	97.94		7.732.300	20	8.57			
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	585		0		177		117		66.1	0	117		20	0			
2114.	3.25.04.2.04.0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			150.451.342			-			-	0	0		-	0	0			
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0			
2115.	3.25.04.2.04.0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			-			-			83.815.572	6.67	0		83.815.572	0	0			
		Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	0		0		30		2		6.67	0	2		0	0			
2116.	3.25.04.2.04.0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			1.198.513.432			-	194.824.000			0	0		-	0	0			
		Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan (Dokumen)	2		0		2		0		0	0	0		0	0			
2117	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			276.000.000			-			-	0	0		-	0	0	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
		Meningkatnya kelestarianlaut dan keanekaragaman hayati	Persentase Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Persen)	0				49.17		100		203.38	0	100		0	0			
			Luasan Kawasan Konservasi (Ha)	1				0		0		0	0	0		0	0			
2118.	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang			276.000.000			-	-		-	0	0		-	0	0			
		Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di										0	0			0	0			
2119.	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai			139.000.000			-			-	0	0		-	0	0			
		Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	32		0		30		0		0	0	0		0	0			
2120.	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			137.000.000			-			-	0	0		-	0	0			
		Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	50		0		20		0		0	0	0		0	0			

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2121	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			321.031.641		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Persen)	0				100		89		89	0	89		0	0		
			Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	72,78				0		0		0	0	0		0	0		
2122	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			100.322.388		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha										0	0			0	0		
2123	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	12		0		12		0		0	0	0		0	0		
2124	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			220.709.253		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan										0	0			0	0		
2125	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	5	120.386.865	0	-	5	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2126	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	32	100.322.388	0	-	30	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			4.847.000.000		-		119.062.405		118.803.777	105	99.78		118.803.777	8.8	2.45		
2127	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			2.600.000.000		-		26.062.405		25.984.734	100	99.7		25.984.734	2.08	1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	20				0		3		0	0	3		15	0		
			Persentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata (Persen)	0				70.00		2		2.86	0	2		0	0		
2128	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			943.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan										0	0			0	0		
2129	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	4	400.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)										0	0	0		0	0		
2130	3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota (Lokasi)	10	350.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2131	3.26.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Laporan)	4	115.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2132	3.26.02.2.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan (Orang)	80	78.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota										0	0	0		0	0		
2133	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			903.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Kota										0	0			0	0		
2134	3.26.02.2.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	253.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										0	0	0		0	0		
2135	3.26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										0	0	0		0	0		
2136	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Unit)	2	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										0	0	0		0	0		
2137	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	2	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										0	0	0		0	0		
2138	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan (Orang)	60	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan										0	0	0		0	0		
2139	3.26.02.2.02.0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	1	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										0	0	0		0	0		
2140	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			754.000.000		-		26.062.405		25.984.734	100	99.7		25.984.734	4.17	3.45		

II-370

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket							
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Destinasi Pariwisata Kota Lhokseumawe										0	0			0	0		
2141.	3.26.02.2.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			160.000.000	-	-	-	-	-	0	0		-	0	0			
		Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (Lokasi)	4		0		0		0		0	0	0		0	0		
2142.	3.26.02.2.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			220.000.000	-	-	-	-	-	0	0		-	0	0			
		Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Dokumen)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
2143.	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			55.000.000	-	-	-	-	-	0	0		-	0	0			
		Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
2144.	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata		105.000.000	-	-	-	-	-	0	0		-	0	0			
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
2145.	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			40.000.000	-	-	-	-	-	0	0		-	0	0			
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
2146.	3.26.02.2.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Lokasi)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2147.	3.26.02.2.03.0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota (Dokumen)	3		0		1		1		100	99.7		25.984.734	33.33	24.99		
2148.	3.26.02.2.03.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
2149	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			1.417.000.000	-	-		58.000.000		57.859.685	100	99.76		57.859.685	42.19	4.08	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Kunjungan Wisata (Persen)	0				96.97		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	94,12				0		0		0	0	0		0	0		
2150.	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata			1.417.000.000	-	-		58.000.000		57.859.685	100	99.76		57.859.685	42.19	4.08		
		Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar										0	0			0	0		
2151.	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri (Dokumen)	6		0		3		3		100	99.48	3		50	7.74		
2152.	3.26.03.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata			157.500.000	-	-	-	-	-	0	0		-	0	0			
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Dokumen)	4		0		0		0		0	0	0		0	0		
2153.	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	1		0		1		1		100	99.84	1		100	3.02		
2154.	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	16		0		3		3		100	100	3		18.75	6.19		
2155	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			830.000.000	-	-		35.000.000		34.959.358	125	99.88		34.959.358	3.57	4.21	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
		Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi	Persentase Pembinaan SDM Pariwisata (Persen)	0				100.00		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	35,71				0		0		0	0	0		0	0		
2156.	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			710.000.000	-	-		35.000.000		34.959.358	125	99.88		34.959.358	4.46	4.92		
		Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi										0	0			0	0		
2157.	3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif (Laporan)	4		0		0		0		0	0	0		0	0		
2158.	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	140		0		20		25		125	0	25		17.86	0		
2159.	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata			200.000.000	-	-	-	-	-	0	0		-	0	0			

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata (Orang)	20		0		0		0		0	0	0		0	0		
2160.	3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Laporan)	4	120.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2161.	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			120.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
2162.	3.26.05.2.02.0001	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pelaku Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			120.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif (Orang)	80		0		0		0		0	0	0		0	0		
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			13.840.168.322		-		681.451.423		624.332.590	21.14	91.62		624.332.590	8.33	4.51		
2163	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			3.892.052.710		-		134.115.001		126.108.400	10.77	94.03		126.108.400	4.44	3.24	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	3				0		0		0	0	0		0	0		
			Cakupan Sarana Kelompok Tani (Persen)	0				41.35		42.64		103.12	0	42.64		0	0		
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	5,83				0		0		0	0	0		0	0		
			Peningkatan Produksi Hortikultura (%)	4,58				0		0		0	0	0		0	0		
2164.	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			2.463.037.307		-		126.025.001		118.596.400	40	94.11		118.596.400	20	4.82		
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana										0	0			0	0		
2165.	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			2.463.037.307		-		126.025.001		118.596.400	40	94.11		118.596.400	20	4.82		
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	10		0		5		2		40	0	2		20	0		
2166.	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			150.307.687		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Genetik										0	0			0	0		
2167.	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			150.307.687		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	5		0		5		0		0	0	0		0	0		
2168.	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	0		0		3		0		0	0	0		0	0		
2169.	3.27.02.2.02.0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	0		0		3		0		0	0	0		0	0		
2170.	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah			125.307.350		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Peredaran										0	0			0	0		
2171.	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/Tanaman Skala Kecil			75.184.410		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3		0		3		0		0	0	0		0	0		
2172.	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak			50.122.940		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	5		0		5		0		0	0	0		0	0		
2173.	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
												0	0			0	0		
2174.	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	0		0		100		0		0	0	0		0	0		
2175.	3.27.02.2.04.0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak (Kasus)	0		0		2		0		0	0	0		0	0		
2176.	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam			250.855.439		-		8.090.000		7.512.000	33.33	92.86		7.512.000	6.67	2.99		
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan										0	0			0	0		
2177.	3.27.02.2.05.0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak			75.184.410		-		8.090.000		7.512.000	100	92.86		7.512.000	20	9.99		
		Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak (Dokumen)	30		0		6		6		100	0	6		20	0		
2178.	3.27.02.2.05.0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan			50.323.555		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	2		0		2		0		0	0	0		0	0		
2179.	3.27.02.2.05.0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak			125.347.474		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	5		0		5		0		0	0	0		0	0		
2180.	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah			902.544.927		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan										0	0			0	0		
2181.	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			802.072.649		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton)	20		0		20		0		0	0	0		0	0		
2182.	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			100.472.278		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor)	6		0		0		0		0	0	0		0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket		
				5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%					
1	2	3	4	K		Rp		K		Rp		K		%		K		%		12	13
2183.	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Dosis)	0		0		6		0		0	0	0		0	0				
2184	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			4.678.969.752		-		28.200.000		25.794.000	11.11	91.47		25.794.000	2.86	0.55	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan			
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana	Cakupan Prasarana Kelompok Tani (Persen)	0				42,93		9,53		22,2	0	9,53		0	0				
			Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapan Meniadi LP2B (Ha)	179,85				0		0		0	0	0		0	0				
2185.	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			-		-		-		-	0	0		-	0	0				
												0	0			0	0				
2186.	3.27.03.2.01.0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	0		0		100		0		0	0	0	-	0	0				
												0	0			0	0				
2187.	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pertanian		3.518.754.096		-		-		-	0	0		-	0	0				
												0	0			0	0				
2188.	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	263.147.032	0	-	3	-	0	-	0	0	0	-	0	0				
2189.	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	10	663.294.065	0	-	10	-	0	-	0	0	0	-	0	0				
2190.	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	2	538.330.823	0	-	2	-	0	-	0	0	0	-	0	0				
2191.	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	5	678.316.120	0	-	5	-	0	-	0	0	0	-	0	0				
2192.	3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3	293.147.032	0	-	3	-	0	-	0	0	0	-	0	0				
2193.	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	1	1.082.519.024	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0				
2194.	3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	0	-	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0				
2195.	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	25	1.160.215.656	0	-	5	-	28.200.000	-	25.794.000	100	91.47	25.794.000	20	2.22				
		Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit										0	0			0	0				
2196.	3.27.03.2.03.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	25	1.160.215.656	0	-	5	-	28.200.000	-	25.794.000	100	91.47	25.794.000	20	2.22				
2197	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			812.458.815		-		11.854.500		8.587.000	20	72.44		8.587.000	4	1.06	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan			
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%)	100				0		0		0	0	0		0	0				
			Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (%)	93,75				0		0		0	0	0		0	0				
			Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verternier (Persen)	0				44,12		83		188,12	0	83		0	0				
2198.	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan,		200.684.988		-		-		-	0	0		-	0	0				
2199.	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali Penyakit Hewan Menular	100	200.684.988	0	-	100	-	0	-	0	0	0	-	0	0				
2200.	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Jasa		290.973.041		-		11.854.500		8.587.000	50	72.44		8.587.000	10	2.95				
												0	0			0	0				
2201.	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	100	205.695.029	0	-	100	-	0	-	0	0	0	-	0	0				
2202.	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	25	85.278.012	0	-	5	-	11.854.500	-	8.587.000	100	72.44	8.587.000	20	10.07				
2203.	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis		120.105.757		-		-		-	0	0		-	0	0				
												0	0			0	0				
2204.	3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	0		0	-	6	-	0	-	0	0	0	-	0	0				
2205.	3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan			120.105.757		-		-		-	0	0		-	0	0				

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi (Orang)	12		0		0		0		0	0	0		0	0		
2206.	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			200.695.029		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan										0	0			0	0		
2207.	3.27.04.2.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan	Sesuai Kewenangannya		200.695.029		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani (Kasus)	5		0		3		0		0	0	0		0	0		
2208	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			262.774.526		-		10.366.920		9.529.900	25	91.93		9.529.900	25	3.63	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Persen)	0				54.68		100		182.88	0	100		0	0		
			Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	60				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase)	70				0		0		0	0	0		0	0		
2209.	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kabupaten/Kota		262.774.526		-		10.366.920		9.529.900	25	91.93		9.529.900	25	3.63		
		Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan										0	0			0	0		
2210.	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	2	63.184.410	0	-	2	10.366.920	2	9.529.900	100	91.93		9.529.900	100	15.08		
		Terkenalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	5	15.036.881	0	-	50		0		0	0	0		0	0		
2212.	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	25	62.184.410	0	-	25		0		0	0	0		0	0		
2213.	3.27.05.2.01.0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis (laporan)	4	122.368.825	0	-	4		0		0	0	0		0	0		
2214	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			192.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
		Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan (%)	93,02				0		0		0	0	0		0	0		
2215.	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			192.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang										0	0			0	0		
2216.	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi (Laporan)	20	192.000.000	0	-	0		0		0	0	0		0	0		
2217	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			4.001.912.519		-		496.915.002		454.313.290	75	91.43		454.313.290	17.5	11.35	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
		Meningkatnya pertanian bidang penyuluh kapasitas SDM	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (%)	91,67				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (%)	70,59				0		0		0	0	0		0	0		
			Cakupan Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Petani (Persen)	0				42.93		60,12		140.04	0	60,12		0	0		
2218.	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			4.001.912.519		-		496.915.002		454.313.290	75	91.43		454.313.290	17.5	11.35		
		Terlaksananya Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian										0	0			0	0		
2219.	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	15	250.695.029	0	-	3	77.858.001	3	72.273.200	100	92.83		72.273.200	20	28.83		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa										100	0	3		20	0		
2220.	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	10	1.236.601.472	0	-	3	165.987.001	3	156.199.220	100	94.1		156.199.220	30	12.63		
2221.	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	20	2.371.171.199	0	-	4	253.070.000	4	225.840.870	100	89.24		225.840.870	20	9.52		
2222.	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	1	143.444.819	0	-	1		0		0	0	0		0	0		
		Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	1		0	-	1		0		0	0	0		0	0		
3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			13.701.152.800		-		3.040.171.754		2.669.439.460	52.5	87.81		2.669.439.460	61.36	19.48		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2223	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			6.874.038.000			-	1.746.600.000		1.394.527.568	50	79.84		1.394.527.568	50	20.29	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Cakupan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan (Persen)	0				0,40		0,42		105	0	0,42		0	0		
			Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	16				0		0		0	0	0		0	0		
2224	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			6.772.000.000		-		1.740.000.000		1.388.155.568	0	79.78		1.388.155.568	0	20.5		
		Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang										0	0			0	0		
2225	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			6.772.000.000		-		1.740.000.000		1.388.155.568	0	79.78		1.388.155.568	0	20.5		
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
2226	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			102.038.000		-		6.600.000		6.372.000	100	96.55		6.372.000	100	6.24		
		Terlaksananya Pembinaan terhadap Penagih Retribusi										0	0			0	0		
2227	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			102.038.000		-		6.600.000		6.372.000	100	96.55		6.372.000	100	6.24		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
2228	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			4.072.590.800		-		1.017.269.482		1.016.919.000	31.25	99.97		1.016.919.000	37.5	24.97	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Cakupan Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persen)	0				59.98		64		106.7	0	64		0	0		
			Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	60,55				0		64		0	0	64		105.7	0		
2229	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			4.072.590.800		-		1.017.269.482		1.016.919.000	62.5	99.97		1.016.919.000	37.5	24.97		
		Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang										0	0			0	0		
2230	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang			156.730.000		-		14.269.482		14.096.800	25	98.79		14.096.800	25	8.99		
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	56		0		56		14		25	0	14		25	0		
2231	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			3.915.860.800		-		1.003.000.000		1.002.822.200	100	99.98		1.002.822.200	50	25.61		
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	4		0		2		2		100	0	2		50	0		
2232	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
												0	0			0	0		
2233	3.30.04.2.03.0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi (Laporan)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2234	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% (Laporan)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2235	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			2.160.172.000		-		248.481.956		230.417.900	35	92.73		230.417.900	66.67	10.67	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Rp. Juta Per Tahun)	46,32				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Partisipasi pada Promosi Dagang (Persen)	0				80.00		40		50	0	40		0	0		
2236	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang			2.160.172.000		-		248.481.956		230.417.900	35	92.73		230.417.900	66.67	10.67		
		Terlaksananya Event Pameran dagang dan Promosi										0	0			0	0		
2237	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional			1.020.380.000		-		77.400.000		61.315.800	0	79.22		61.315.800	0	6.01		
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang (Pelaku Usaha)	3		0		3		0		0	0	0		0	0		
2238	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal			1.020.380.000		-		164.040.000		163.564.300	100	99.71		163.564.300	100	16.03		
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal (Pelaku Usaha)	2		0		2		2		100	0	2		100	0		
2239	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan			119.412.000		-		7.041.956		5.537.800	5	78.64		5.537.800	100	4.64		
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)	2		0		40		2		5	0	2		100	0		
2240	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			398.152.000		-		27.820.316		27.574.992	100	99.12		27.574.992	100	6.93	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Tera Tera Ulang UTTP (Persen)	0				74.07		76,2		102.88	0	76,2		0	0		
			Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	77,71				0		0		0	0	0		0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2241.	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Tersedianya Sarana Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			398.152.000		-		27.820.316		27.574.992	100	99.12		27.574.992	100	6.93		
2242.	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			204.076.000		-		21.305.317		21.093.513	100	99.01		21.093.513	100	10.34		
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang (Unit)	4		0		4		4		100	0	4		100	0		
2243.	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal			129.384.000		-		3.914.999		3.881.479	100	99.14		3.881.479	100	3		
		Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina (Orang)	12		0		12		12		100	0	12		100	0		
2244.	3.30.06.2.01.0003	Penyidikan Metrologi Legal			64.692.000		-		2.600.000		2.600.000	100	100		2.600.000	100	4.02		
		Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal (Unit)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
2245	3.30.07	PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			196.200.000		-				-	0	0			0	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	60				0		0		0	0	0		0	0		
2246.	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Promosi, pemasaran dan peningkatan			196.200.000		-				-	0	0			0	0		
		Terlaksananya promosi, pemasaran dan peningkatan										0	0			0	0		
2247.	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			196.200.000		-				-	0	0			0	0		
		Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)	50		0		0		0		0	0	0		0	0		
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			3.134.180.129		-		748.195.356		719.178.032	33.33	96.12		719.178.032	42.86	22.95		
2248	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			2.912.705.410		-		742.105.357		714.603.532	33.33	96.29		714.603.532	40	24.53	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Promosi Industri Kecil Menengah (Persen)	0				5.77		9		155.98	0	9		0	0		
			Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (%)	6,27				0		0		0	0	0		0	0		
2249.	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			2.912.705.410		-		742.105.357		714.603.532	33.33	96.29		714.603.532	40	24.53		
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Promosi										0	0			0	0		
2250.	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota			298.460.000		-				-	0	0			0	0		
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
2251.	3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan	Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan	-		-			4.590.000		4.245.400	0	92.49		4.245.400	0	0		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2252.	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			107.038.000		-		68.656.359		68.287.100	100	99.46		68.287.100	100	63.8		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
2253.	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			234.187.617		-		13.768.999		11.878.700	0	86.27		11.878.700	0	5.07		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
2254.	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			1.999.419.793		-		650.700.000		630.192.332	100	96.85		630.192.332	100	31.52		
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
2255.	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			-		-		4.389.999		-	0	0			0	0		
		Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2256.	3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota			273.600.000		-				-	0	0			0	0		
		Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2257	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			119.440.000		-				-	0	0			0	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Tersedianya dokumen penerbitan izin usaha	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	5,65				0		8		0	0	8		141.59	0		
2258.	3.31.03.2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi			119.440.000		-				-	0	0			0	0		
		Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/ Kota										0	0			0	0		
2259.	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi			119.440.000		-				-	0	0			0	0		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	~Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)	1	Rp	0	Rp	0	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				0				0		0		0	0	0		0	0		
2260	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			102.034.719		-		6.089.999		4.574.500	33.33	75.11		4.574.500	100	4.48	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini (Persentase)	98				0		100		0	0	100		102.04	0		
			Ketersediaan Informasi yang dibutuhkan (Ada/Tidak)	0				Ada		1		0	0	1		0	0		
2261.	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri	untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan		102.034.719		-		6.089.999		4.574.500	33.33	75.11		4.574.500	100	4.48		
		Tersedianya dokumen informasi industri untuk IUI,										0	0			0	0		
2262	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup			102.034.719		-		6.089.999		4.574.500	100	75.11		4.574.500	100	4.48		
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
2263.	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2264.	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH			178.425.579.508		-		34.245.503.106		30.288.897.914	93.68	88.45		30.288.897.914	36.34	16.98		
2265	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			163.308.907.152		-		32.684.084.877		28.934.152.874	87.12	88.53		28.934.152.874	40.25	17.72	Sekretariat Daerah	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja	Nilai SAKIP OPD (Angka)	327,5				0		63,95		0	0	63,95		19.53	0		
			Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
2266.	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			112.000.000		-		12.180.648		10.440.300	100	85.71		10.440.300	26.67	9.32		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran										0	0			0	0		
2267.	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			112.000.000		-		12.180.648		10.440.300	100	85.71		10.440.300	26.67	9.32		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		0		8		8		100	0	8		26.67	0		
2268.	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			72.929.000.000		-		13.664.059.000		12.233.360.543	100	89.53		12.233.360.543	20	16.77		
		Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan										0	0			0	0		
2269.	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			72.929.000.000		-		13.664.059.000		12.233.360.543	100	89.53		12.233.360.543	20	16.77		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12.040		0		2408		2.408		100	0	2.408		20	0		
2270.	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			653.000.000		-		100.000.000		95.000.000	0	95		95.000.000	0	14.55		
		Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian										0	0			0	0		
2271.	4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			500.000.000		-		100.000.000		95.000.000	0	95		95.000.000	0	19		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
2272.	4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			153.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	8		0		8		0		0	0	0		0	0		
2273.	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			29.181.668.214		-		6.563.862.652		6.022.541.122	100	91.75		6.022.541.122	151.9	20.64		
		Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat										0	0			0	0		
2274.	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.609.864.000		-		179.462.741		172.576.730	100	96.16		172.576.730	33.33	10.72		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3		0		1		1		100	0	1		33.33	0		
2275.	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.211.703.600		-		172.700.001		132.763.096	100	76.87		132.763.096	10	6		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10		0		1		1		100	0	1		10	0		
2276.	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			7.088.750.000		-		2.688.268.000		2.679.680.989	100	99.68		2.679.680.989	10	37.8		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		1		1		100	0	1		10	0		
2277.	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			872.696.614		-		88.420.000		86.679.163	100	98.03		86.679.163	20	9.93		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
2278.	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			2.098.654.000		-		762.011.910		283.922.500	100	37.26		283.922.500	4.76	13.53		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	21		0		1		1		100	0	1		4.76	0		
2279.	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			15.300.000.000			-	2.673.000.000		2.666.918.644	100	99.77		2.666.918.644	833.33	17.43		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		500		500		100	0	500		833.33	0		
2280.	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			11.378.059.760			-	4.110.221.978		3.845.483.713	66.67	93.56		3.845.483.713	4.47	33.8		
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah										0	0			0	0		
2281.	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.100.000.000			-	-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	10		0		9		0		0	0	0		0	0		
2282.	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			5.150.000.000			-	2.756.929.104		2.711.029.103	100	98.34		2.711.029.103	13.33	52.64		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	15		0		2		2		100	0	2		13.33	0		
2283.	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			950.000.000			-	-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2284.	4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.178.059.760			-	1.353.292.874		1.134.454.610	100	83.83		1.134.454.610	4.55	35.7		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	22		0		1		1		100	0	1		4.55	0		
2285.	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			14.069.411.218			-	3.130.551.512		2.841.191.288	100	90.76		2.841.191.288	16.39	20.19		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan										0	0			0	0		
2286.	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			80.000.000			-	13.000.000		13.000.000	100	100		13.000.000	20	16.25		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
2287.	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			4.675.000.000			-	751.390.552		656.327.808	100	87.35		656.327.808	20	14.04		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		12		100	0	12		20	0		
2288.	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.609.840.000			-	72.500.000		12.000.000	100	16.55		12.000.000	5.56	0.75		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	18		0		1		1		100	0	1		5.56	0		
2289.	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			7.704.571.218			-	2.293.660.960		2.159.863.480	100	94.17		2.159.863.480	20	28.03		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60		0		12		12		100	0	12		20	0		
2290.	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			18.201.242.960			-	3.014.336.721		2.137.627.512	95	70.92		2.137.627.512	27.06	11.74		
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah										0	0			0	0		
2291.	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan			5.237.738.960			-	852.401.915		623.389.700	100	73.13		623.389.700	20	11.9		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	90		0		18		18		100	0	18		20	0		
2292.	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			2.813.000.000			-	338.429.197		321.716.300	100	95.06		321.716.300	57.58	11.44		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	33		0		19		19		100	0	19		57.58	0		
2293.	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.269.240.000			-	1.089.950.000		858.127.870	100	78.73		858.127.870	26.32	26.25		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	19		0		5		5		100	0	5		26.32	0		
2294.	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.216.064.000			-	436.355.609		230.269.500	100	52.77		230.269.500	20.69	7.16		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	29		0		6		6		100	0	6		20.69	0		
2295.	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			3.665.200.000			-	297.200.000		104.124.142	75	35.04		104.124.142	10.71	2.84		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	28		0		4		3		75	0	3		10.71	0		
2296.	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			3.445.525.000			-	632.305.000		563.130.306	100	89.06		563.130.306	20	16.34		
		Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan dan										0	0			0	0		
2297.	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			975.525.000			-	182.305.000		149.991.392	100	82.27		149.991.392	20	15.38		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	140		0		28		28		100	0	28		20	0		
2298.	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			470.000.000			-	50.000.000		17.138.914	0	34.28		17.138.914	20	3.65		
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang)	10		0		0		2		0	0	2		20	0		
2299.	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2.000.000.000			-	400.000.000		396.000.000	100	99		396.000.000	20	19.8		
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Orang/Bulan)	120		0		24		24		100	0	24		20	0		
2300.	4.01.01.2.12	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			1.624.000.000			-	300.000.000		170.000.000	66.67	56.67		170.000.000	13.33	10.47		
		Terlaksananya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat										0	0			0	0		
2301.	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			666.000.000			-	130.000.000			0	0		-	0	0		

II-378

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
2302.	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan (Paket)	5	608.000.000	0		1	100.000.000	1	100.000.000	100	100	1	100.000.000	20	16.45		
2303.	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)	5	350.000.000	0		1	70.000.000	1	70.000.000	100	100	1	70.000.000	20	20		
2304.	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan (Paket)		8.635.000.000		-		793.753.422		653.027.907	100	82.27		653.027.907	20	7.56		
2305.	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	5	2.665.000.000	0		1	159.902.086	1	132.556.560	100	82.9	1	132.556.560	20	4.97		
2306.	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	5	4.150.000.000	0		1	539.586.155	1	427.574.800	100	79.24	1	427.574.800	20	10.3		
2307.	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	5	1.820.000.000	0		1	94.265.181	1	92.896.547	100	98.55	1	92.896.547	20	5.1		
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah	Indeks Kematangan Organisasi (KOD) (Angka)	162				0		29		0	0	29		17.9	0		
2308.	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi			3.080.000.000		-		362.813.944		362.350.183	100	99.87		362.350.183	23.92	11.76		
2309.	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	37	850.000.000	0		6	59.917.683	6	59.832.213	100	99.86	6	59.832.213	16.22	7.04		
2310.	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	41	1.215.000.000	0		7	215.126.078	7	215.078.269	100	99.98		215.078.269	17.07	17.7		
2311.	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	13	1.015.000.000	0		5	87.770.183	5	87.439.701	100	99.62	5	87.439.701	38.46	8.61		
2312	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			9.961.107.720		-		1.135.753.279		1.015.598.969	99.54	89.42		1.015.598.969	22.36	10.2	Sekretariat Daerah	
		Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat (Persen)	0				98.70		100		101.32	0	100		0	0		
			Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	500				0		100		0	0	100		20	0		
2313.	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			3.061.107.720		-		365.296.037		279.760.820	100	76.58		279.760.820	20	9.14		
2314.	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual (Dokumen)	5	1.169.610.000	0		1	159.612.114	1	114.974.300	100	72.03	1	114.974.300	20	9.83		
2315.	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB (Dokumen)	5	1.091.897.720	0		1	121.764.439	1	104.888.320	100	86.14	1	104.888.320	20	9.61		
2316.	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas (Dokumen)	5	799.600.000	0		1	83.919.484	1	59.898.200	100	71.38	1	59.898.200	20	7.49		
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	500				0		100		0	0	100		20	0		
2317.	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			3.505.000.000		-		416.241.189		382.696.188	70.83	91.94		382.696.188	23.31	10.92		
2318.	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun (Dokumen)	48	1.350.000.000	0		6	101.947.454	6	101.515.001	100	99.58	6	101.515.001	12.5	7.52		
2319.	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum (Kasus)	63	1.510.000.000	0		16	281.795.556	2	248.748.435	12.5	88.27	2	248.748.435	3.17	16.47		
2320.	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi (Dokumen)	129	645.000.000	0		70	32.498.179	70	32.432.752	100	99.8	70	32.432.752	54.26	5.03		
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	500				0		100		0	0	100		20	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
			Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				500				0		100		0		100		20			
2321.	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			3.395.000.000		-	0	354.216.053		353.141.961	127.78	99.7		353.141.961	23.77	10.4		
		Terlaksananya Administrasi Tata Pemerintahan					-					0	0			0	0		
2322.	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan			1.235.000.000		-		186.905.294		186.807.182	25	99.95		186.807.182	5.26	15.13		
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan (Dokumen)	19		0	4			1		25	0	1		5.26	0		
2323.	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			1.030.000.000		-		52.278.759		51.709.328	225	98.91		51.709.328	45	5.02		
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan (Dokumen)	20		0	4			9		225	0	9		45	0		
2324.	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			1.130.000.000		-		115.032.000		114.625.451	133.33	99.65		114.625.451	21.05	10.14		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah (Dokumen)	19		0	3			4		133.33	0	4		21.05	0		
2325	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			5.155.564.636		-		425.664.950		339.146.071	114.17	79.67		339.146.071	35.12	6.58	Sekretariat Daerah	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan (Persen)	0			92.00			0		0	0	0		0	0		
			Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	500			0			100		0	0	100		20	0		
2326.	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			1.070.000.000		-		89.881.031		64.531.100	200	71.8		64.531.100	60.74	6.03		
		Terlaksananya Administrasi Pembangunan					-					0	0			0	0		
2327.	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			185.000.000		-					0	0			0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah (Dokumen)	3		0	0			0		0	0	0		0	0		
2328.	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			450.000.000		-		47.620.995		34.417.600	100	72.27		34.417.600	2.22	7.65		
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan (Laporan)	180		0	4			4		100	0	4		2.22	0		
2329.	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			435.000.000		-		42.260.036		30.113.500	300	71.26		30.113.500	180	6.92		
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	20		0	12			36		300	0	36		180	0		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan	Tingkat Kematangan UKPEJ (Nilai)	9,75			0			9		0	0	9		92.31	0		
2330.	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			1.889.500.000		-		129.952.031		121.701.794	77.78	93.65		121.701.794	24.92	6.44		
		Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan					-					0	0			0	0		
2331.	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			990.000.000		-		66.265.419		63.523.300	53.33	95.86		63.523.300	38.1	6.42		
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen)	21		0	15			8		53.33	0	8		38.1	0		
2332.	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			344.500.000		-		26.815.419		24.548.264	120	91.55		24.548.264	28.57	7.13		
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen)	21		0	5			6		120	0	6		28.57	0		
2333.	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			555.000.000		-		36.871.193		33.630.230	60	91.21		33.630.230	8.11	6.06		
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Orang)	37		0	5			3		60	0	3		8.11	0		
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	500			0			100		0	0	100		20	0		
2334.	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			2.196.064.636		-		205.831.888		152.913.177	93.33	74.29		152.913.177	19.68	6.96		
		Terlaksananya Kebijakan Perekonomian					-					0	0			0	0		
2335.	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			955.363.502		-		102.287.152		69.162.229	50	67.62		69.162.229	10	7.24		
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD (Dokumen)	20		0	4			2		50	0	2		10	0		
2336.	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			906.573.502		-		82.605.000		68.735.328	80	83.21		68.735.328	19.05	7.58		
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian (Laporan)	21		0	5			4		80	0	4		19.05	0		
2337.	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			334.127.632		-		20.939.736		15.015.620	150	71.71		15.015.620	30	4.49		
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil (Dokumen)	10		0	2			3		150	0	3		30	0		
	4.02	SEKRETARIAT DPRD			163.633.506.865		-		31.356.552.099		30.097.832.178	82.92	95.99		30.097.832.178	53.63	18.39		
2338	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			135.187.709.673		-		24.884.007.990		23.639.263.145	75.38	95		23.639.263.145	54.99	17.49	Sekretariat DPRK	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja	Nilai SAKIP OPD (Angka)	75			0			0		0	0	0		0	0		
			Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0			100			100		100	0	100		0	0		
2339.	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			130.441.712		-		6.350.000		6.174.605	60	97.24		6.174.605	3.33	4.73		
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan					-					0	0			0	0		
2340.	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			61.750.000		-		6.350.000		6.174.605	60	97.24		6.174.605	20	10		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	60		0	20			12		60	0	12		20	0		
2341.	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			14.245.484		-					0	0			0	0		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1		0	0			0		0	0	0		0	0		
2342.	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			12.963.390		-					0	0			0	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1		0	0			0		0	0	0		0	0		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2343.	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			15.556.064							0	0			0	0		
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2344.	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			15.556.064							0	0			0	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2345.	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			10.370.710							0	0			0	0		
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2346.	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			39.449.043.808		-		7.098.737.000		6.408.912.248	100	90.28		6.408.912.248	37.11	16.25		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat										0	0			0	0		
2347.	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			39.449.043.808		-		7.098.737.000		6.408.912.248	100	90.28		6.408.912.248	37.11	16.25		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.339		0		868		868		100	0	868		37.11	0		
2348.	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			282.001.510		-		-			0	0			0	0		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat										0	0			0	0		
2349.	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			227.243.058		-		-			0	0			0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	6		0		0		0		0	0	0		0	0		
2350.	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			32.010.526		-		-			0	0			0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	62		0		0		0		0	0	0		0	0		
2351.	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			22.747.926		-		-			0	0			0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	75		0		0		0		0	0	0		0	0		
2352.	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			3.872.684.262		-		600.711.540		600.222.977	85.71	99.92		600.222.977	38.03	15.5		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0			0	0		
2353.	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			96.162.082		-		10.500.000		10.499.910	0	100		10.499.910	0	10.92		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	25		0		25		0		0	0	0		0	0		
2354.	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			539.350.676		-		99.123.540		99.022.190	100	99.9		99.022.190	100	18.36		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	75		0		75		75		100	0	75		100	0		
2355.	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			53.099.050		-		16.320.000		16.103.169	100	98.67		16.103.169	100	30.33		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2		0		2		2		100	0	2		100	0		
2356.	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.311.215.950		-		228.120.000		227.987.708	100	99.94		227.987.708	4	17.39		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4.500		0		180		180		100	0	180		4	0		
2357.	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			371.810.490		-		39.000.000		39.000.000	100	100		39.000.000	100	10.49		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		2		2		100	0	2		100	0		
2358.	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			476.520.000		-		60.648.000		60.610.000	100	99.94		60.610.000	14.37	12.72		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.044		0		150		150		100	0	150		14.37	0		
2359.	4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			90.180.090		-		-			0	0			0	0		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4		0		0		0		0	0	0		0	0		
2360.	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu			225.450.226		-		-			0	0			0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	200		0		0		0		0	0	0		0	0		
2361.	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			528.535.518		-		147.000.000		147.000.000	100	100		147.000.000	100	27.81		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40		0		40		40		100	0	40		100	0		
2362.	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			112.725.112		-		-			0	0			0	0		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	520		0		0		0		0	0	0		0	0		
2363.	4.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			67.635.068		-		-			0	0			0	0		
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
2364.	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.840.402.800		-		416.840.000		115.203.880	100	27.64		115.203.880	40	4.06		
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah										0	0			0	0		
2365.	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			2.008.400.200		-		-			0	0			0	0		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
2366.	4.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			404.600.400		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2367.	4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			427.402.200		-		416.840.000		115.203.880	100	27.64		115.203.880	120	26.95		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		12		12		100	0	12		120	0		
2368.	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			12.190.333.767		-		2.120.840.114		2.116.369.876	50	99.79		2.116.369.876	32.52	17.36		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan										0	0			0	0		
2369.	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			25.060.060		-		5.600.000		5.600.000	0	100		5.600.000	0	22.35		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	500		0		500		0		0	0	0		0	0		
2370.	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.796.945.519		-		337.477.794		337.477.744	100	100		337.477.744	100	18.78		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3		0		3		3		100	0	3		100	0		
2371.	4.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			75.465.036		-		12.000.000		12.000.000	0	100		12.000.000	0	15.9		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	7		0		7		0		0	0	0		0	0		
2372.	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			10.292.863.152		-		1.765.762.320		1.761.292.132	100	99.75		1.761.292.132	30.09	17.11		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	864		0		260		260		100	0	260		30.09	0		
2373.	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			4.581.112.392		-		1.255.060.000		1.110.767.558	100	88.5		1.110.767.558	243.81	24.25		
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah										0	0			0	0		
2374.	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan			1.195.244.324		-		847.080.000		824.189.858	100	97.3		824.189.858	685.71	68.96		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7		0		48		48		100	0	48		685.71	0		
2375.	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			920.213.736		-		92.980.000		76.982.200	100	82.79		76.982.200	333.33	8.37		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	18		0		60		60		100	0	60		333.33	0		
2376.	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			2.029.252.132		-		265.000.000		159.605.500	100	60.23		159.605.500	100	7.87		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
2377.	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			100.560.880		-		50.000.000		49.990.000	100	99.98		49.990.000	100	49.71		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
2378.	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			335.841.320		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
2379.	4.02.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			2.099.185.092		-		874.295.681		873.641.587	100	99.93		873.641.587	73.33	41.62		
		Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan										0	0			0	0		
2380.	4.02.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan			414.168.084		-		240.300.000		240.300.000	100	100		240.300.000	20	58.02		
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan (Laporan)	150		0		30		30		100	0	30		20	0		
2381.	4.02.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			1.300.848.924		-		357.562.587		356.962.234	100	99.83		356.962.234	100	27.44		
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan (Laporan)	3		0		3		3		100	0	3		100	0		
2382.	4.02.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan			384.168.084		-		276.433.094		276.379.353	100	99.98		276.379.353	100	71.94		
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan (Laporan)	3		0		3		3		100	0	3		100	0		
2383.	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			57.807.077.678		-		10.761.373.937		10.672.585.319	33.33	99.17		10.672.585.319	33.33	18.46		
		Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan										0	0			0	0		
2384.	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			55.017.395.131		-		10.380.913.000		10.292.124.382	100	99.14		10.292.124.382	100	18.71		
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	350		0		350		350		100	0	350		100	0		
2385.	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			2.104.532.675		-		255.460.937		255.460.937	0	100		255.460.937	0	12.14		
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	125		0		25		0		0	0	0		0	0		
2386.	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			685.149.872		-		125.000.000		125.000.000	0	100		125.000.000	0	18.24		
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	25		0		25		0		0	0	0		0	0		
2387.	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD			11.935.426.652		-		1.749.799.718		1.735.385.095	50	99.18		1.735.385.095	25	14.54		
		Tersedianya Layanan Administrasi DPRD										0	0			0	0		
2388.	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			55.308.094		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD (Dokumen)	25		0		0		0		0	0	0		0	0		
2389.	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD			147.081.531		-		14.000.000		48	0	0		48	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD (Laporan)	4		0		48		0		0	0	0		0	0		
2390.	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD (Laporan)	48	11.650.074.895	0		48	1.735.799.718	48	1.735.385.047	100	99.98		1.735.385.047	100	14.9		
2391.	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	3	82.962.132	0		0		0		0	0	0		0	0		
2392	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			28.445.797.192		-	6.472.544.109	6.458.569.033	89.25	99.78			6.458.569.033	52.17	22.7		Sekretariat DPRK	
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100		0		0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan (Persen)	0				81.82		75		91.66	0	75		0	0		
			Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Tepat Waktu)	100				0				0	0	0		0	0		
2393.	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			4.085.147.762		-	540.733.000	539.520.821	100	99.78			539.520.821	58.33	13.21			
2394.	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Dokumen)	1	211.670.140	0		1	7.790.000	1	6.891.800	100	88.47		6.891.800	100	3.26		
2395.	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	10	3.040.887.083	0		15	478.735.000	15	478.516.621	100	99.95		478.516.621	150	15.74		
2396.	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	2	496.883.235	0		2	54.208.000	2	54.112.400	100	99.82		54.112.400	100	10.89		
2397.	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi (Dokumen)	1	154.905.663	0		0		0		0	0	0		0	0		
2398.	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun (Dokumen)	1	160.801.641	0		0		0		0	0	0		0	0		
2399.	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Orang)	20	20.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
2400.	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			7.688.713.926		-	2.101.732.450	2.095.090.389	83.33	99.68			2.095.090.389	48.57	27.25			
2401.	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD (Dokumen)	1	900.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
2402.	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	25	1.212.305.106	0		25	405.617.650	25	405.617.650	100	100		405.617.650	100	33.46		
2403.	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	36	899.577.429	0		36	200.000.000	36	200.000.000	100	100		200.000.000	100	22.23		
2404.	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	48	1.002.649.740	0		48	204.880.000	48	204.880.000	100	100		204.880.000	100	20.43		
2405.	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat (Dokumen)	60	806.811.666	0		12	572.344.800	12	566.336.801	100	98.95		566.336.801	20	70.19		
2406.	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	2	29.067.720	0		2	3.500.000	0	3.500.000	0	100		3.500.000	0	12.04		
2407.	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD (Dokumen)	20	2.838.302.265	0		4	715.390.000	4	714.755.938	100	99.91		714.755.938	20	25.18		
2408.	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah			379.267.065		-	504.470.000	504.140.400	66.67	99.93			504.140.400	58.33	132.92			
2409.	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah (Dokumen)	12	74.335.835	0		6	72.670.000	2	72.640.400	33.33	99.96		72.640.400	16.67	97.72		
2410.	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	2	304.931.230	0		2	431.800.000	2	431.500.000	100	99.93		431.500.000	100	141.51		
		Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100				0		0		0	0	0		0	0		
2411.	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			2.891.289.525		-	585.900.000	585.321.248	100	99.9			585.321.248	56.67	20.24			
		Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran										0	0			0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket							
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2412.	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS			204.298.193	-	-	100	16.250.000	100	16.227.200	100	99.86	100	16.227.200	20	7.94		
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	50	0	10	10	10	10	100	0	10	0	10	20	0			
2413.	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			174.467.384	-	-	100	40.250.000	100	40.217.200	100	99.92	100	40.217.200	20	23.05		
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	50	0	10	10	10	10	100	0	10	0	10	20	0			
2414.	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD			1.612.489.251	-	-	100	216.000.000	100	215.548.608	100	99.79	100	215.548.608	100	13.37		
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	0	1	1	1	1	100	0	1	0	1	100	0			
2415.	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan			144.450.401	-	-	100	16.250.000	100	16.240.000	100	99.94	100	16.240.000	100	11.24		
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	0	1	1	1	1	100	0	1	0	1	100	0			
2416.	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester			24.082.730	-	-	100	-	100	0	100	0	100	0	0	0		
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester (Dokumen)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2417.	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			731.501.566	-	-	100	297.150.000	100	297.088.240	100	99.98	100	297.088.240	100	40.61		
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	0	1	1	1	1	100	0	1	0	1	100	0			
2418.	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			5.115.047.139	-	-	87.5	856.545.329	87.5	853.840.577	99.68	99.68	853.840.577	67.5	16.69			
		Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan						0		0	0	0	0		0	0			
2419.	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			895.921.309	-	-	100	407.130.000	100	406.931.186	100	99.95	100	406.931.186	100	45.42		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	10	0	10	10	100	0	100	0	10	0	10	100	0			
2420.	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			1.265.507.162	-	-	100	165.220.000	100	164.441.247	100	99.53	100	164.441.247	100	12.99		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	10	0	10	10	100	0	100	0	10	0	10	100	0			
2421.	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			1.205.482.256	-	-	100	110.212.000	100	109.590.648	100	99.44	100	109.590.648	100	9.09		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Laporan)	10	0	10	10	100	0	100	0	10	0	10	100	0			
2422.	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			1.250.385.154	-	-	100	115.879.100	100	115.851.699	100	99.98	100	115.851.699	100	9.27		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	10	0	10	10	100	0	100	0	10	0	10	100	0			
2423.	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			58.204.348	-	-	100	6.620.000	100	6.497.256	100	98.15	100	6.497.256	100	11.16		
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam (Laporan)	10	0	10	10	100	0	100	0	10	0	10	100	0			
2424.	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			58.941.358	-	-	0	6.820.000	0	6.719.224	98.52	98.52	6.719.224	0	11.4			
		Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2425.	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran			176.545.104	-	-	100	30.163.719	100	29.322.783	97.21	97.21	29.322.783	20	16.61			
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran (Dokumen)	50	0	10	10	100	0	100	0	10	0	10	20	0			
2426.	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			204.060.448	-	-	100	14.500.510	100	14.486.534	100	99.9	100	14.486.534	20	7.1		
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	50	0	10	10	100	0	100	0	10	0	10	20	0			
2427.	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			7.134.607.603	-	-	100	1.390.725.130	100	1.390.485.130	99.98	99.98	1.390.485.130	55	19.49			
		Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan						0		0	0	0	0		0	0			
2428.	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah			237.693.957	-	-	100	57.436.400	100	57.196.400	99.58	99.58	57.196.400	100	24.06			
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD (Laporan)	3	0	3	3	100	0	100	0	3	0	3	100	0			
2429.	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			58.121.888	-	-	100	2.620.000	100	2.620.000	100	100	100	2.620.000	100	4.51		
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	3	0	3	3	100	0	100	0	3	0	3	100	0			
2430.	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses			6.818.791.758	-	-	100	1.330.668.730	100	1.330.668.730	100	100	100	1.330.668.730	20	19.51		
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	15	0	3	3	100	0	100	0	3	0	3	20	0			
2431.	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah			20.000.000	-	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0			
		Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (Orang)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2432.	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			745.640.165	-	-	33.33	108.727.200	33.33	108.064.374	99.39	99.39	108.064.374	20	14.49			
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD						0		0	0	0	0		0	0			
2433.	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD			241.440.165	-	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0			
		Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2434.	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD			504.200.000	-	-	33.33	108.727.200	33.33	108.064.374	99.39	99.39	108.064.374	40	21.43			
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	5	0	6	2	33.33	0	2	33.33	0	2	40	0				
2435.	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			406.084.007	-	-	100	383.711.000	100	382.106.094	99.58	99.58	382.106.094	28	94.1			
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD						0		0	0	0	0		0	0			

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2436.	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			39.681.065							0	0			0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	12		0		0		0		0	0	0		0	0		
2437.	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD			212.542.046				7.000.000		7.000.000	100	100		7.000.000	100	3.29		
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun (Laporan)	6		0		6		6		100	0	6		100	0		
2438.	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah			70.267.667				339.950.000		338.355.094	100	99.53		338.355.094	20	481.52		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	60		0		12		12		100	0	12		20	0		
2439.	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			63.593.229				36.761.000		36.751.000	100	99.97		36.751.000	20	57.79		
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD (Dokumen)	90		0		18		18		100	0	18		20	0		
2440.	4.02.02.2.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus			20.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
5.01	PERENCANAAN				41.828.533.842				6.383.160.551		5.795.894.781	78.47	90.8		5.795.894.781	54.97	13.86		
2441	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			31.606.396.789				5.671.586.167		5.216.726.732	70.08	91.98		5.216.726.732	26.26	16.51	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	77,5				0		0		0	0	0		0	0		
2442.	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			113.700.000				10.952.290		10.922.264	100	99.73		10.922.264	37.5	9.61		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan										0	0			0	0		
2443.	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			113.700.000				10.952.290		10.922.264	100	99.73		10.922.264	37.5	9.61		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40		0		15		15		100	0	15		37.5	0		
2444.	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.321.107.329				4.889.454.000		4.600.889.041	50	94.1		4.600.889.041	100	19.73		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Pada Bappeda										0	0			0	0		
2445.	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			23.321.107.329				4.889.454.000		4.600.889.041	100	94.1		4.600.889.041	100	19.73		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	840		0		840		840		100	0	840		100	0		
2446.	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										0	0			0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0		0		7		0		0	0	0		0	0		
2447.	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada										0	0			0	0		
2448.	5.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			40.000.000							0	0			0	0		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
2449.	5.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			40.000.000							0	0			0	0		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
2450.	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			491.260.000				13.500.000		13.250.000	33.33	98.15		13.250.000	10	2.7		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat										0	0			0	0		
2451.	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			291.260.000							0	0			0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	200		0		200		0		0	0	0		0	0		
2452.	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			200.000.000				13.500.000		13.250.000	100	98.15		13.250.000	20	6.63		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	50		0		10		10		100	0	10		20	0		
2453.	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										0	0			0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		0		5		0		0	0	0		0	0		
2454.	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.645.626.604				160.579.114		157.749.381	66.67	98.24		157.749.381	16	9.59		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0			0	0		
2455.	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			245.840.800				23.000.000		22.967.232	100	99.86		22.967.232	20	9.34		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	400		0		80		80		100	0	80		20	0		
2456.	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			202.325.804				16.989.000		16.215.000	100	95.44		16.215.000	20	8.01		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.750		0		1150		1.150		100	0	1.150		20	0		
2457.	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			145.000.000				15.950.114		15.892.614	100	99.64		15.892.614	20	10.96		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	150		0		30		30		100	0	30		20	0		
2458.	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.660.000				1.140.000		1.083.000	0	95		1.083.000	0	8.55		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	730		0		1		0		0	0	0		0	0		
2459.	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material										0	0			0	0		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
2460.	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1.039.800.000				103.500.000		101.591.535	100	98.16		101.591.535	20	9.77		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	300		0		60		60		100	0	60		20	0		
2461.	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.935.410.000		-		92.637.986		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang										0	0			0	0		
2462.	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			800.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
2463.	5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			200.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		3		0		0	0	0		0	0		
2464.	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		4		0		0	0	0		0	0		
2465.	5.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			540.214.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		2		0		0	0	0		0	0		
2466.	5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			395.196.000		-		92.637.986		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		3		0		0	0	0		0	0		
2467.	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.715.752.576		-		377.082.777		316.722.046	100.4	83.99		316.722.046	20.08	11.66		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah										0	0			0	0		
2468.	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			23.000.000		-		3.000.000		3.000.000	100	100		3.000.000	20	13.04		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	150		0		30		30		100	0	30		20	0		
2469.	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.229.400.000		-		133.600.000		101.741.267	101.19	76.15		101.741.267	20.24	8.28		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	420		0		84		85		101.19	0	85		20.24	0		
2470.	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.463.352.576		-		240.482.777		211.980.779	100	88.15		211.980.779	20	14.49		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.540		0		708		708		100	0	708		20	0		
2471.	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.303.540.280		-		127.380.000		117.194.000	205.21	92		117.194.000	70	8.99		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang										0	0			0	0		
2472.	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan			241.264.000		-		28.280.000		27.288.200	8.33	96.49		27.288.200	100	11.31		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0		12		1		8.33	0	1		100	0		
2473.	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			369.276.280		-		69.100.000		64.920.800	12.5	93.95		64.920.800	20	17.58		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	15		0		24		3		12.5	0	3		20	0		
2474.	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			420.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
2475.	5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			273.000.000		-		30.000.000		24.985.000	800	83.28		24.985.000	160	9.15		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	40		0		8		64		800	0	64		160	0		
2476	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			6.123.584.343		-		399.784.971		286.532.343	73.33	71.67		286.532.343	40.35	4.68	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100				0		95,6		0	0	95,6		95,6	0		
			Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada (Ada/Tidak)	0				Ada		100		0	0	100		0	0		
			Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	100				0		100		0	0	100		100	0		
2477.	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			4.050.948.653		-		293.409.161		215.137.008	100	73.32		215.137.008	57.59	5.31		
		Terlaksananya Perencanaan dan Pendanaan Kota										0	0			0	0		
2478.	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			122.764.000		-		9.399.000		5.382.674	100	57.27		5.382.674	66.67	4.38		
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	3		0		2		2		100	0	2		66.67	0		
2479.	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya			265.826.995		-		13.415.629		5.832.475	100	43.48		5.832.475	21.43	2.19		
		Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Dokumen)	14		0		3		3		100	0	3		21.43	0		
2480.	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik			774.861.980		-		31.754.531		25.351.321	100	79.84		25.351.321	60	3.27		
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5		0		3		3		100	0	3		60	0		
2481.	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			270.255.000		-		2.783.627		2.436.255	100	87.52		2.436.255	20	0.9		
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	60		0		12		12		100	0	12		20	0		
2482.	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			964.788.065		-		71.038.018		57.248.390	100	80.59		57.248.390	200	5.93		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	1		0		2		2		100	0	2		200	0		
2483.	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1.020	60.051.000	0		204	4.592.876	204	2.947.289	100	64.17	204	2.947.289	20	4.91		
2484.	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	20	1.592.401.613	0		3	160.425.480	3	115.938.604	100	72.27	3	115.938.604	15	7.28		
2485.	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			440.895.000		-		33.082.000		21.190.329	33.33	64.05		21.190.329	8.33	4.81		
		Terlaksananya Analisis Data dan Informasi										0	0			0	0		
2486.	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	12	255.255.000	0		3	33.082.000	3	21.190.329	100	64.05	3	21.190.329	25	8.3		
2487.	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	15	92.820.000	0	-	15	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2488.	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	1	92.820.000	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2489.	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			1.311.786.790		-		59.503.810		38.409.201	100	64.55		38.409.201	78.57	2.93		
		Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan										0	0			0	0		
2490.	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	2	896.404.290	0	-	3	35.379.470	3	23.411.712	100	66.17	3	23.411.712	150	2.61		
2491.	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	14	415.382.500	0	-	1	24.124.340	1	14.997.489	100	62.17	1	14.997.489	7.14	3.61		
2492.	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			319.953.900		-		13.790.000		11.795.805	33.33	85.54		11.795.805	6.67	3.69		
		Terlaksananya Perencanaan Pembangunan yang										0	0			0	0		
2493.	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	92.820.000	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2494.	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	5	134.313.900	0	-	1	13.790.000	1	11.795.805	100	85.54	1	11.795.805	20	8.78		
2495.	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	92.820.000	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2496.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			4.098.552.710		-		311.789.413		292.635.706	91.3	93.86		292.635.706	90.42	7.14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100				0		100		0	0	100		100	0		
		Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK (Persen)		0				100		95,6		95.6	0	95,6		0	0		
2497.	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			1.999.283.220		-		112.382.361		99.035.544	100	88.12		99.035.544	159.17	4.95		
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang										0	0			0	0		
2498.	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	110.000.000	0	-	1	5.790.031	1	4.692.489	100	81.04	1	4.692.489	50	4.27		
2499.	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5	86.500.000	0	-		4.485.022		2.410.015	100	53.73		2.410.015	220	2.79		
2500.	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	70.000.000	0	-	1	6.125.017	1	4.716.990	100	77.01		4.716.990	100	6.74		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan										100	0	1		100	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2501.	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	3	349.283.220	0	-	1	15.299.646	1	13.559.559	100	88.63	1	13.559.559	33.33	3.88		
2502.	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	120.000.000	0	-	3	11.147.530	3	8.108.490	100	72.74	3	8.108.490	150	6.76		
2503.	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5	86.500.000	0	-	13	4.470.031	13	3.932.405	100	87.97	13	3.932.405	260	4.55		
2504.	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5	100.000.000	0	-	13	11.200.055	13	9.147.672	100	81.68	13	9.147.672	260	9.15		
2505.	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1.077.000.000	0	-	2	53.865.029	2	52.467.924	100	97.41	2	52.467.924	200	4.87		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100				0		100		0	0	100		100	0		
2506.	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang			1.175.769.490		-		86.579.694		85.185.929	114.29	98.39		85.185.929	55.83	7.25		
2507.	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	110.000.000	0	-	2	8.032.500	4	7.972.835	200	99.26	4	7.972.835	80	7.25		
2508.	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5	90.000.000	0	-	2	5.805.000	2	5.776.393	100	99.51	2	5.776.393	40	6.42		
2509.	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	172.800.000	0	-	1	17.450.500	1	17.307.031	100	99.18	1	17.307.031	100	10.02		
2510.	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	10	462.969.490	0	-	2	35.254.194	2	34.876.685	100	98.93	2	34.876.685	20	7.53		
2511.	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5	110.000.000	0	-	2	5.787.500	2	5.412.061	100	93.51	2	5.412.061	40	4.92		
2512.	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	3	70.000.000	0	-	2	5.807.500	2	5.688.660	100	97.95	2	5.688.660	66.67	8.13		
2513.	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	3	65.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2514.	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	95.000.000	0	-	1	8.442.500	1	8.152.264	100	96.56	1	8.152.264	100	8.58		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100				0		100		0	0	100		100	0		
2515.	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang	(Sumber Daya Alam)		923.500.000		-		112.827.358		108.414.233	62.5	96.09		108.414.233	56.25	11.74		
2516.	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	345.000.000	0	-	1	35.614.229	1	34.289.996	100	96.28	1	34.289.996	50	9.94		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
2517.	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	100.000.000	0	-	1	16.500.000	1	15.823.067	100	95.9	1	15.823.067	100	15.82		
2518.	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	100.000.000	0	-	1	18.500.000	1	18.093.053	100	97.8	1	18.093.053	100	18.09		
2519.	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1	153.500.000	0	-	1	25.000.000	1	23.850.731	100	95.4	1	23.850.731	100	15.54		
2520.	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	3	50.000.000	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2521.	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	50.000.000	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2522.	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	1	50.000.000	0	-	1	17.213.129	1	16.357.386	100	95.03	1	16.357.386	100	32.71		
2523.	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	75.000.000	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
	5.02	KEUANGAN			742.861.407.743		-		144.955.953.372		120.341.514.120	843.47	83.02		120.341.514.120	33.1	16.2		
2524	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			73.486.443.065		-		12.423.938.479		10.672.518.000	60.12	85.9		10.672.518.000	22.35	14.52	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja	Nilai SAKIP OPD (Angka)	68				0	66,15			0	0	66,15		97,28	0		
		Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)		0				100	100			100	0	100		0	0		
2525.	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			126.900.000		-		20.320.000		18.287.800	66.67	90		18.287.800	20	14.41		
		Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi										0	0			0	0		
2526.	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40	126.900.000	0	-	2	20.320.000	8	18.287.800	400	90	8	18.287.800	20	14.41		
2527.	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0	-	0	-	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0		
2528.	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0	-	0	-	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0		
2529.	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	-	0	-	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0		
2530.	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	-	0	-	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0		
2531.	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	-	0	-	2	0	0	0	0	0	0	-	0	0		
2532.	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			60.204.300.000		-		9.761.735.896		8.184.191.178	21	83.84		8.184.191.178	21	13.59		
2533.	5.02.01.2.02.0001	Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN			60.204.300.000		-		9.761.735.896		8.184.191.178	105	83.84		8.184.191.178	21	13.59		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	400		0		80	84			105	0	84		21	0		
2534.	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	-	0	-	77	0	0	0	0	0	0	-	0	0		
2535.	5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			-		-		-		-	0	0		-	0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0		0		400		0		0	0	0		0	0		
2536.	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-		-		-		0	0	-		0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2537.	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-		-		-		-		0	0	-		0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0		0		18		0		0	0	0		0	0		
2538.	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-		-		-		-		0	0	-		0	0		
												0	0			0	0		
2539.	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-		-		-		-		0	0	-		0	0		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0		0		2		0		0	0	0		0	0		
2540.	5.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	-		-		-		-		0	0	-		0	0		
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0		0		6		0		0	0	0		0	0		
2541.	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		580.000.000		-		10.000.000		9.660.000		8	96.6	9.660.000		4	1.67		
		Terkelolanya Dokumen Administrasi Kepegawaian										0	0			0	0		
2542.	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	480.000.000	-		1		0		0	0	0		0	0		
2543.	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	-		-		-		-		0	0	-		0	0		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2544.	5.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	-		-		-		-		0	0	-		0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2545.	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	-		-		-		-		0	0	-		0	0		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2546.	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100.000.000		-		10.000.000		9.660.000		40	96.6	9.660.000		8	9.66		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	25		0		5		2		40	0	2		8	0		
2547.	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.881.970.000		-		390.685.163		362.626.669		55	92.82	362.626.669		17.14	12.58		
		Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat										0	0			0	0		
2548.	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	75.000.000	-		7		0		0	0	0		0	0		
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		7		0		0	0	0		0	0		
2549.	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	375.000.000	-		64.441.328		60.845.000		100	94.42	60.845.000		20	16.23		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		3		3		100	0	3		20	0		
2550.	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	-		-		-		-		0	0	-		0	0		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0		0		4		0		0	0	0		0	0		
2551.	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	400.000.000		-		30.000.000		28.800.000		100	96	28.800.000		20	7.2		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	10		0		2		2		100	0	2		20	0		
2552.	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	75.000.000		-		39.150.000		39.057.000		100	99.76	39.057.000		20	52.08		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	10		0		2		2		100	0	2		20	0		
2553.	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	11.970.000		-		2.280.000		2.280.000		100	100	2.280.000		20	19.05		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	10		0		2		2		100	0	2		20	0		
2554.	5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	-		-		-		-		0	0	-		0	0		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2555.	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	850.000.000		-		145.000.000		129.535.969		100	89.34	129.535.969		20	15.24		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	20		0		4		4		100	0	4		20	0		
2556.	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	-		-		-		-		0	0	-		0	0		
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2557.	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1.095.000.000		-		109.813.835		102.108.700		50	92.98	102.108.700		20	9.32		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	10		0		4		2		50	0	2		20	0		
2558.	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1.585.000.000		-		393.457.530		390.503.500	78.89	99.25		390.503.500	0	24.64		
		Tersedia dan terpenuhinya Pengadaan Barang Milik										0	0			0	0		
2559.	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			450.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2560.	5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			515.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5		0		1		0		0	0	0		0	0		
2561.	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0		0		3		0		0	0	0		0	0		
2562.	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		2		0		0	0	0		0	0		
2563.	5.02.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	0		0		4		0		0	0	0		0	0		
2564.	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			620.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	30		0		0		0		0	0	0		0	0		
2565.	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-		-		393.457.530		390.503.500	473.33	99.25		390.503.500	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		15		71		473.33	0	71		0	0		
2566.	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			7.173.273.065		-		1.200.629.640		1.110.351.053	66.67	92.48		1.110.351.053	20	15.48		
		Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang										0	0			0	0		
2567.	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			45.000.000		-		7.735.000		6.963.500	100	90.03		6.963.500	20	15.47		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
2568.	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.202.500.000		-		292.200.000		241.486.833	66.67	82.64		241.486.833	20	10.96		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	10		0		3		2		66.67	0	2		20	0		
2569.	5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2570.	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			4.925.773.065		-		900.694.640		861.900.720	100	95.69		861.900.720	20	17.5		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	10		0		2		2		100	0	2		20	0		
2571.	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			935.000.000		-		647.110.250		596.897.800	172.5	92.24		596.897.800	54.5	63.84		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah										0	0			0	0		
2572.	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau			225.000.000		-		358.535.250		312.313.800	100	87.11		312.313.800	20	138.81		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	40		0		8		8		100	0	8		20	0		
2573.	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			500.000.000		-		207.175.000		203.904.000	100	98.42		203.904.000	20	40.78		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	10		0		2		2		100	0	2		20	0		
2574.	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			105.000.000		-		41.400.000		40.950.000	390	98.91		40.950.000	78	39		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	150		0		30		117		390	0	117		78	0		
2575.	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			105.000.000		-		40.000.000		39.730.000	100	99.33		39.730.000	100	37.84		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2		0		2		2		100	0	2		100	0		
2576	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			655.433.615.878		-		131.015.956.194		108.180.439.149	70.94	82.57		108.180.439.149	15.38	16.51	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan,	Opini BPK (Opini)	0				WTP		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	40,85				0		42,26		0	0	42,26		103.45	0		
			Persentase Penurunan SILPA (%)	-16,67				0		274,66		0	0	274,66		-1647,6	0		
			Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	100				0		100		0	0	100		100	0		
			Penetapan APBD Tepat Waktu (Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu)	0				Tepat Waktu		100		0	0	100		0	0		
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	21,17				0		20,25		0	0	20,25		95.65	0		
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	97,87				0		79,88		0	0	79,88		81.62	0		
2577.	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			13.844.035.326		-		1.294.892.341		1.210.001.135	70	93.44		1.210.001.135	14	8.74		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket							
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%	K	%		
2578.	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10	397.635.000	0	-	2	58.147.943	2	45.897.200	100	78.93	2	45.897.200	20	11.54		
2579.	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	10	373.355.416	0	-	2	57.258.619	2	56.469.200	100	98.62	2	56.469.200	20	15.12		
2580.	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	244.120.000	0	-	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0		
2581.	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	244.185.934	0	-	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0		
2582.	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	244.120.000	0	-	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0		
2583.	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	1	244.120.000	0	-	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0		
2584.	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	10	1.209.500.000	0	-	2	185.894.350	4	176.078.000	200	94.72	4	176.078.000	40	14.56		
2585.	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	10	1.209.500.000	0	-	2	131.552.711	2	123.566.200	100	93.93	2	123.566.200	20	10.22		
2586.	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	20	1.033.093.976	0	-	4	234.851.772	4	189.642.900	100	80.75	4	189.642.900	20	18.36		
2587.	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota (Orang)	220	8.644.405.000	0	-	44	627.186.946	44	618.347.635	100	98.59	44	618.347.635	20	7.15		
2588.	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Tesusunnya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan			5.220.000.000		-		288.149.070		277.336.433	104.09	96.25		277.336.433	19.9	5.31		
2589.	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	25	235.000.000	0	-	105	7.325.561	5	7.307.153	4.76	99.75	5	7.307.153	20	3.11		
2590.	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	850	1.120.000.000	0	-	105	22.679.530	170	22.593.730	161.9	99.62	170	22.593.730	20	2.02		
2591.	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	145	865.000.000	0	-	29	54.791.029	28	53.263.074	96.55	97.21	28	53.263.074	19.31	6.16		
2592.	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	20	235.000.000	0	-	35	5.267.773	4	2.957.773	11.43	56.15	4	2.957.773	20	1.26		
2593.	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	60	285.000.000	0	-	12	6.826.361	12	6.826.361	100	100	12	6.826.361	20	2.4		
2594.	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	340	1.060.000.000	0	-	68	63.934.648	68	62.608.666	100	97.93	68	62.608.666	20	5.91		
2595.	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	25	380.000.000	0	-	5	12.475.434	5	11.722.913	100	93.97	5	11.722.913	20	3.08		
2596.	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota			1.040.000.000		-		114.848.734		110.056.763	258.1	95.83		110.056.763	19.93	10.58		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	1.360		0		105		271		258.1	0	271		19.93	0		
2597.	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan	Keuangan Daerah		3.231.487.552		-		282.473.251		262.141.503	39.27	92.8		262.141.503	12.68	8.11		
2598.	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	360	168.142.800	0	-	80	16.397.180	72	14.728.551	90	89.82	72	14.728.551	20	8.76		
2599.	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	20	172.687.200	0	-	1150	12.479.999	4	12.321.673	0.35	98.73	4	12.321.673	20	7.14		
2600.	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Terlaksananya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	20	286.297.200	0	-	650	24.224.000	4	23.689.456	0.62	97.79	4	23.689.456	20	8.27		
2601.	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	200	560.097.300	0	-	40	45.666.076	25	45.225.559	62.5	99.04	25	45.225.559	12.5	8.07		
2602.	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Terlaksananya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	20	998.631.900	0	-	4	116.311.999	4	115.026.798	100	98.9	4	115.026.798	20	11.52		
2603.	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap Terlaksananya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	323.788.500	0	-	1	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2604.	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah (Dokumen)	5	135.763.952	0	-	7	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2605.	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Terlaksananya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dokumen)	10	151.669.348	0	-	2	15.082.999	2	13.676.323	100	90.67	2	13.676.323	20	9.02		
2606.	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Terlaksananya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	150.384.352	0	-	1	11.819.999	0	-	0	0	0	-	0	0		
2607.	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	700	284.025.000	0	-	0	40.490.999	100	37.473.143	0	92.55	100	37.473.143	14.29	13.19		
2608.	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Terlaksananya Laporan Pelaksanaan Penyaluran	Daerah Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)		633.138.093.000		-		129.150.441.532		106.430.960.078	100	82.41		106.430.960.078	20	16.81		
2609.	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Keuangan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Laporan)		633.138.093.000	0	-	272	129.150.441.532	272	106.430.960.078	100	82.41	272	106.430.960.078	20	16.81		
2610	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			6.648.000.000		-		691.038.797		672.717.407	455.56	97.35		672.717.407	17.78	10.12	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset tetap (%)	2,2				0		3,1		0	0	3,1		140.91	0		
		Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Persen)		0				100		87,04		87.04	0	87,04		0	0		
2611.	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			6.648.000.000		-		691.038.797		672.717.407	455.56	97.35		672.717.407	17.78	10.12		
		Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik										0	0			0	0		
2612.	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga			285.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1		0	-	1		0		0	0	0		0	0		
2613.	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Terlaksananya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5	335.000.000	0	-	1	28.199.999	1	26.135.200	100	92.68	1	26.135.200	20	7.8		
2614.	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Terlaksananya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	10	285.000.000	0	-	2	15.149.999	2	14.875.400	100	98.19	2	14.875.400	20	5.22		
2615.	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah			1.195.000.000		-		312.844.960		306.413.830	100	97.94		306.413.830	20	25.64		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	25		0	-	5		5		100	0	5		20	0		
2616.	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah			793.000.000		-		31.559.479		29.904.450	100	94.76		29.904.450	20	3.77		
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah (Laporan)	5		0	-	1		1		100	0	1		20	0		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2617.	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah			2.750.000.000			-	121.711.399		116.772.750	100	95.94		116.772.750	20	4.25		
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	50		0		10		10		100	0	10		20	0		
2618.	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik			285.000.000			-	17.040.463		16.422.400	100	96.37		16.422.400	20	5.76		
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
2619.	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			335.000.000			-	73.782.499		73.102.400	3400	99.08		73.102.400	20	21.82		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	170		0		1		34		3400	0	34		20	0		
2620.	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			385.000.000			-	90.749.999		89.090.977	100	98.17		89.090.977	20	23.14		
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
2621	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			7.293.348.800			-	825.019.902		815.839.564	5678.8	98.89		815.839.564	99.75	11.19	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi	Persentase penerimaan PAD (Persen)	0				100		112,61		112,61	0	112,61		0	0		
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	10,01				0		10,05		0	0	100,05		100,4	0		
			Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (%)	100				0		100		0	0	100		100	0		
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	91,41				0		90,46		0	0	90,46		98,96	0		
2622.	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			7.293.348.800			-	825.019.902		815.839.564	5678.75	98.89		815.839.564	99.75	11.19		
		Terupdate dan terkelolanya data Objek Pajak Daerah										0	0			0	0		
2623.	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			270.000.000			-	27.049.999		25.562.849	233.33	94.5		25.562.849	50	9.47		
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	14		0		3		7		233.33	0	7		50	0		
2624.	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			105.000.000			-	9.119.999		9.099.968	180	99.78		9.099.968	36	8.67		
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	50		0		10		18		180	0	18		36	0		
2625.	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			1.672.438.800			-	204.859.479		202.687.976	80	98.94		202.687.976	16	12.12		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	25		0		5		4		80	0	4		16	0		
2626.	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			1.000.000.000			-	89.627.999		89.285.513	5080	99.62		89.285.513	1016	8.93		
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	50		0		10		508		5080	0	508		1016	0		
2627.	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			422.350.000			-	44.952.879		44.941.074	140	99.97		44.941.074	28	10.64		
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	50		0		10		14		140	0	14		28	0		
2628.	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah			320.000.000			-	25.239.999		25.149.113	1265	99.64		25.149.113	18.81	7.86		
		Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	336.346		0		5000		63.250		1265	0	63.250		18.81	0		
2629.	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah			500.000.000			-	27.633.999		27.431.648	60695	99.27		27.431.648	17.95	5.49		
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	338.191		0		100		60.695		60695	0	60.695		17.95	0		
2630.	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			170.000.000			-	22.479.999		22.351.473	170	99.43		22.351.473	34	13.15		
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi (Dokumen)	50		0		10		17		170	0	17		34	0		
2631.	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah			982.800.000			-	141.970.995		141.470.950	166.67	99.65		141.470.950	20	14.39		
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	2.500		0		300		500		166.67	0	500		20	0		
2632.	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			343.980.000			-	13.599.999		13.584.000	60	99.88		13.584.000	20	3.95		
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah (Dokumen)	30		0		10		6		60	0	6		20	0		
2633.	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			982.800.000			-	82.575.058		82.082.000	15	99.4		82.082.000	20	8.35		
		Terlaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	30		0		40		6		15	0	6		20	0		
2634.	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah			343.980.000			-	135.909.498		132.193.000	60	97.27		132.193.000	20	38.43		
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	30		0		10		6		60	0	6		20	0		
2635.	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			180.000.000			-	-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
	5.03	KEPEGAWAIAN			41.375.630.621			-	6.831.077.552		6.168.073.180	42.92	90.29		6.168.073.180	86.29	14.91		
2636	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			29.411.146.098			-	5.579.422.259		5.165.686.429	49.96	92.58		5.165.686.429	39.09	17.56	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja	Nilai SAKIP OPD (Angka)	65,5				0		62,85		0	0	62,85		95,95	0		



No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
			Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) (Persen)	0				100		0		0	0	0		0	0		
2637.	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			113.822.250		-		9.181.948		8.962.000	100	97.6		8.962.000	20	7.87		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			113.822.250		-		9.181.948		8.962.000	100	97.6		8.962.000	20	7.87		
2638.	5.03.01.2.01.0001	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	50		0		10		10		100	0	10		20	0		
2639.	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			23.273.166.734		-		4.874.914.078		4.542.656.868	2.18	93.18		4.542.656.868	50	19.52		
		Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan					-					0	0			0	0		
2640.	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			23.259.093.321		-		4.874.914.078		4.542.656.868	2.18	93.18		4.542.656.868	100	19.53		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	67		0		3080		67		2.18	0	67		100	0		
2641.	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			14.073.413		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
2642.	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			14.073.413		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik					-					0	0			0	0		
2643.	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			14.073.413		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2644.	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			547.135.245		-		-		6.240.000	0	0		6.240.000	0	1.14		
		Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian					-					0	0			0	0		
2645.	5.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			450.349.200		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	170		0		0		0		0	0	0		0	0		
2646.	5.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			16.418.982		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6		0		0		0		0	0	0		0	0		
2647.	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			80.367.063		-		-		6.240.000	0	0		6.240.000	0	7.76		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
2648.	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.245.527.868		-		68.248.000		81.934.781	21.78	120.05		81.934.781	30	6.58		
		Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat					-					0	0			0	0		
2649.	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			395.291.000		-		-		14.041.000	0	0		14.041.000	20	3.55		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	150		0		0		30		0	0	30		20	0		
2650.	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			155.000.000		-		6.450.000		6.438.000	0.61	99.81		6.438.000	20	4.15		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	50		0		1650		10		0.61	0	10		20	0		
2651.	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			113.205.026		-		6.000.000		5.730.000	75	95.5		5.730.000	100	5.06		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		0		40		30		75	0	30		100	0		
2652.	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			8.176.706		-		798.000		760.000	3.29	95.24		760.000	20	9.29		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	60		0		365		12		3.29	0	12		20	0		
2653.	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			16.888.096		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	5		0		5		0		0	0	0		0	0		
2654.	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			556.967.040		-		55.000.000		54.965.781	30	99.94		54.965.781	20	9.87		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	60		0		40		12		30	0	12		20	0		
2655.	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			763.670.626		-		176.598.873		96.135.520	12.5	54.44		96.135.520	10	12.59		
		Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah					-					0	0			0	0		
2656.	5.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			328.379.626		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		2		0		0	0	0		0	0		
2657.	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			435.291.000		-		176.598.873		96.135.520	25	54.44		96.135.520	20	22.09		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	25		0		20		5		25	0	5		20	0		
2658.	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.575.112.279		-		356.999.360		338.159.519	54.44	94.72		338.159.519	46.67	13.13		
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang					-					0	0			0	0		
2659.	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			19.418.982		-		2.400.000		2.400.000	30	100		2.400.000	20	12.36		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	60		0		40		12		30	0	12		20	0		
2660.	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			843.126.313		-		92.800.000		82.317.999	33.33	88.7		82.317.999	20	9.76		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60		0		36		12		33.33	0	12		20	0		
2661.	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.712.566.984		-		261.799.360		253.441.520	100	96.81		253.441.520	100	14.8		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2		0		2		2		100	0	2		100	0		
2662.	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			878.637.683		-		93.480.000		91.597.741	100	97.99		91.597.741	100	10.42		
		Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik					-				0	0			0	0			
2663.	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	198.289.813	0	-	1	27.780.000	1	26.706.492	100	96.14	1	26.706.492	100	13.47		
2664.	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	189.689.813	0	-	1	20.700.000	1	20.191.249	100	97.54	1	20.191.249	100	10.64		
2665.	5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	311.468.250	0	-	5	30.000.000	5	30.000.000	100	100	5	30.000.000	100	9.63		
2666.	5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	179.189.807	0	-	5	15.000.000	5	14.700.000	100	98	5	14.700.000	100	8.2		
2667	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			11.964.484.523		-		1.251.655.293		1.002.386.751	36.3	80.08		1.002.386.751	138.2	8.38	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase fasilitasi pelayanan Administrasi kepegawaian (Persen)	0				54,02		66,83		123,71	0	66,83		0	0		
			Skor Pengembangan Karir ASN dalam penilaian Sistem Merit (Skor)	60				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (%)	82,5				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	16,52				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	70,55				0		79,06		0	0	79,06		112,06	0		
2668.	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			3.345.500.000		-		216.861.500		160.746.826	40	74.12		160.746.826	28.57	4.8		
		Tersedianya Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan					-				0	0			0	0			
2669.	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (Dokumen)	1	160.000.000	0	-	1	7.958.500	1	6.455.800	100	81.12	1	6.455.800	100	4.03		
2670.	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK (Dokumen)	2	225.000.000	0	-	0		0		0	0	0		0	0		
2671.	5.03.02.2.01.0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN (Laporan)	1	1.505.000.000	0	-	1	137.532.000	1	120.514.426	100	87.63	1	120.514.426	100	8.01		
2672.	5.03.02.2.01.0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN (Dokumen)	1	145.000.000	0	-	0		0		0	0	0		0	0		
2673.	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Lembaga)	1	1.135.000.000	0	-	1	58.279.000	0	20.921.600	0	35,9		20.921.600	0	1.84		
2674.	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	115.000.000	0	-	1	13.092.000	0	12.855.000	0	98.19		12.855.000	0	11.18		
2675.	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian (Dokumen)	1	60.500.000	0	-	1		0		0	0	0		0	0		
2676.	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			977.000.000		-		174.006.503		126.482.600	85,7	72.69		126.482.600	801,36	12.95		
		Tersedianya laporan Mutasi dan Promosi ASN					-					0	0			0	0		
2677.	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah (Dokumen)	5	166.500.000	0	-	100	29.458.001	117	28.223.900	117	95,81	117	28.223.900	2340	16,95		
2678.	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dokumen)	1.250	428.000.000	0	-	1000	61.494.501	601	33.710.400	60,1	54.82	601	33.710.400	48,08	7.88		
2679.	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN (Dokumen)	50	382.500.000	0	-	10	83.054.001	8	64.548.300	80	77.72	8	64.548.300	16	16.88		
2680.	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			5.694.984.523		-		712.691.139		572.467.740	20	80.32		572.467.740	16,67	10.05		
		Tersedianya Laporan Pengembangan Kompetensi ASN					-					0	0			0	0		
2681.	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	0		0	-	200	52.540.000	0	52.170.948	0	99,3	0	52.170.948	0	0		
		Meningkatnya Kapasitas ASN					-					0	0	0		0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2682.	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center			3.732.456.335				497.190.139		367.053.192	0	73.83		367.053.192	0	9.83		
		Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center (Dokumen)	3		0		1		0		0	0	0		0	0		
2683.	5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN			157.528.188				9.462.000		9.225.000	100	97.5		9.225.000	100	5.86		
		Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN (Dokumen)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
2684.	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			685.000.000				128.487.000		127.029.000	0	98.87		127.029.000	0	18.54		
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan (Orang)	150		0		100		0		0	0	0		0	0		
2685.	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			595.000.000				-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2686.	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN			340.000.000				25.012.000		16.989.600	0	67.93		16.989.600	0	5		
		Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan (Orang)	8		0		50		0		0	0	0		0	0		
2687.	5.03.02.2.03.0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN			185.000.000				-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2688.	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1.947.000.000				148.096.151		142.689.585	15	96.35		142.689.585	15	7.33		
		Tersedianya Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja										0	0			0	0		
2689.	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1.305.000.000				102.967.040		101.948.785	0	99.01		101.948.785	0	7.81		
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (Dokumen)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
2690.	5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			182.000.000				17.336.002		15.561.200	60	89.76		15.561.200	60	8.55		
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan (Orang)	250		0		250		150		60	0	150		60	0		
2691.	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai			230.000.000				12.835.000		10.702.400	0	83.38		10.702.400	0	4.65		
		Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa (Orang)	250		0		150		0		0	0	0		0	0		
2692.	5.03.02.2.04.0010	Evaluasi Disiplin ASN			230.000.000				14.958.109		14.477.200	0	96.78		14.477.200	0	6.29		
		Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN (Laporan)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			13.538.043.200				1.175.404.704		1.136.808.200	75	96.72		1.136.808.200	0	8.4		
2693	5.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-				21.216.701		-	0	0		-	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
			Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
2694.	5.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-				-		-	0	0		-	0	0		
												0	0			0	0		
2695.	5.04.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-				-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		5		0		0	0	0		0	0		
2696.	5.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-				7.000.000		-	0	0		-	0	0		
												0	0			0	0		
2697.	5.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			-				-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0		0		6		0		0	0	0		0	0		
2698.	5.04.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-				7.000.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0		0		15		0		0	0	0		0	0		
2699.	5.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-				14.216.701		-	0	0		-	0	0		
												0	0			0	0		
2700.	5.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			-				14.216.701		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0		0		80		0		0	0	0		0	0		
2701	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			13.538.043.200				1.154.188.003		1.136.808.200	100	98.49		1.136.808.200	0	8.4	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	2,6				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	5,19				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat struktural (Persen)	0				10.14		4,45		43.89	0	4,45		0	0		
2702.	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis			925.000.000				31.816.001		15.200.300	200	47.78		15.200.300	0	1.64		
		Tersedianya Laporan Pengembangan Kompetensi										0	0			0	0		
2703.	5.04.02.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi			-				31.816.001		15.200.300	400	47.78		15.200.300	0	0		

II-397

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	0		0		1		4		400	0	4		0	0		
2704.	5.04.02.2.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Tersedianya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2705.	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi	Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (Orang)	100	925.000.000	0		100		0		0	0	0		0	0		
2706.	5.04.02.2.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Tersedianya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum (Dokumen)	0		0		1		4		400	0	4		0	0		
2707.	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			12.613.043.200		-		1.122.372.002		1.121.607.900	50	99.93		1.121.607.900	0	8.89		
2708.	5.04.02.2.02.0001	Tersedianya Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2709.	5.04.02.2.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik (Lembaga)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2710.	5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)	0		0		100		0		0	0	0		0	0		
2711.	5.04.02.2.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pembang Kompetensi, dan Sumber Belajar (Laporan)	0		0		100		0		0	0	0		0	0		
2712.	5.04.02.2.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2713.	5.04.02.2.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2714.	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan (Laporan)	5	12.613.043.200	0		1		0		0	0	0		0	0		
2715.	5.04.02.2.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Tersedianya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama (Dokumen)	0		0		1		4		400	99.93		1.121.607.900	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2716	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			2.944.000.000		-		234.882.257		120.599.555	33.33	51.34		120.599.555	37.5	4.1		
	5.05.02				1.665.000.000		-		234.882.257		120.599.555	33.33	51.34		120.599.555	50	7.24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya pemanfaatan hasil Kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)	100				0		100		0	0	100		100	0		
			Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan (Persen)	0				75.00		33,3		44.4	0	33,3		0	0		
2717	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		770.000.000		-		87.707.876		11.935.413	20	13.61		11.935.413	33.33	1.55		
		Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan										0	0			0	0		
2718	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		300.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2719	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2720	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2721	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi		-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2722	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1	170.000.000	0	-	1	22.308.198	1	11.935.413	100	53.5	1	11.935.413	100	7.02		
2723	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)		300.000.000		-		65.399.678		-	0	0		-	0	0		
2724	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			150.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan										0	0			0	0		
2725	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	0	75.000.000	0	-	0		0		0	0	0		0	0		
2726	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	0	-	0	-	1		0		0	0	0		0	0		
2727	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	0	75.000.000	0	-	0		0		0	0	0		0	0		
2728	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			160.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan										0	0			0	0		
2729	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	0	40.000.000	0	-	0		0		0	0	0		0	0		
2730	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	0	-	0	-	1		0		0	0	0		0	0		
2731	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1	75.000.000	0	-	0		0		0	0	0		0	0		
2732	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0	45.000.000	0	-	0		0		0	0	0		0	0		
2733	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			585.000.000		-		147.174.381		108.664.142	100	73.83		108.664.142	100	18.58		
		Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi										0	0			0	0		
2734	5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	300.000.000	0	-	1	78.757.500	1	64.091.481	100	81.38	1	64.091.481	100	21.36		
2735	5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			235.000.000		-		68.416.881		44.572.661	100	65.15		44.572.661	100	18.97		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	Rp	0	Rp	1	Rp	1	Rp	100	%	1	Rp	100	%		
2736.	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	0	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2737	5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			1.279.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	83,78				0		81,25		0	0	81,25		96,98	0		
2738.	5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Tersedianya Hasil Penelitian, Pengembangan,			60.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
2739.	5.05.03.2.01.0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan)	0	60.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2740.	5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi Tersedianya Dokumen Invensi dan Inovasi			1.219.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
2741.	5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2742.	5.05.03.2.02.0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan kluster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	60.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2743.	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	1	684.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2744.	5.05.03.2.02.0018	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	0	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2745.	5.05.03.2.02.0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi (Laporan)	0	75.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH			64.400.133.003		-		9.816.164.893		8.790.966.993	114.65	89.56		8.790.966.993	24.56	13.65		
2746	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			41.886.309.810		-		8.074.930.241		7.421.826.645	117.13	91.91		7.421.826.645	16.38	17.72	Inspektorat	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
		Nilai SAKIP OPD (Angka)		68,7				0		0		0	0	0		0	0		
2747.	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			69.173.527		-		6.380.251		6.366.937	100	99.79		6.366.937	12	9.2		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran										0	0			0	0		
2748.	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			29.056.524		-		6.380.251		6.366.937	100	99.79		6.366.937	24	21.91		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	25		0		6		6		100	0	6		24	0		
2749.	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	40.117.003	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
2750.	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			30.265.653.680		-		6.114.831.697		5.850.361.105	100	95.67		5.850.361.105	68.67	19.33		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Pada Perangkat										0	0			0	0		
2751.	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	83	30.265.653.680	0		57		57		100	95.67		5.850.361.105	68.67	19.33		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN										100	0	57		68.67	0		
2752.	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.078.115		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada										0	0			0	0		
2753.	6.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			20.078.115		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2754.	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.756.716.926		-		123.220.000		96.645.151	237.5	78.43		96.645.151	18.03	5.5		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat										0	0			0	0		
2755.	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	80		0		0		0		0	0	0		0	0		
2756.	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			25.063.926		-		3.220.000		3.214.764	100	99.84		3.214.764	20	12.83		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
2757.	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	44	1.731.653.000	0		4	120.000.000	15	93.430.387	375	77.86	15	93.430.387	34.09	5.4		
2758.	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.703.239.243				213.862.804		193.774.785	100	90.61		193.774.785	4.4	11.38		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0			0	0		
2759.	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	60	147.421.913	0		1	27.866.804	1	27.765.965	100	99.64	1	27.765.965	1.67	18.83		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor										100	0	1		1.67	0		
2760.	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	60	30.063.926	0		1	14.000.000	1	13.990.000	100	99.93	1	13.990.000	1.67	46.53		
2761.	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	20	40.115.066	0		1	5.400.000	1	5.399.862	100	100	1	5.399.862	5	13.46		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan										100	0	1		5	0		
2762.	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	10	11.429.150	0		2	1.596.000	2	1.520.000	100	95.24	2	1.520.000	20	13.3		
2763.	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	1.434.081.693	0		1	165.000.000	1	145.098.958	100	87.94	1	145.098.958	2.5	10.12		
2764.	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2	20.063.926	0		0		0		0	0	0		0	0		
2765.	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	2	20.063.569	0		0		0		0	0	0		0	0		
2766.	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			3.488.746.483				828.212.529		608.145.600	166.67	73.43		608.145.600	20	17.43		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang										0	0			0	0		
2767.	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0		0		0		0		0	0	0		0	0		
2768.	6.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	450.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
2769.	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	50	3.038.746.483	0		6	828.212.529	10	608.145.600	166.67	73.43	10	608.145.600	20	20.01		
2770.	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.652.832.234				295.242.960		277.855.279	75	94.11		277.855.279	6.67	16.81		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah										0	0			0	0		
2771.	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	20	6.012.784	0		1	1.600.000	1	1.592.000	100	99.5		1.592.000	5	26.48		
2772.	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	481.026.872	0		1	80.960.000	1	72.706.039	100	89.8	1	72.706.039	1.67	15.11		
2773.	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	130.383.557	0		1		0		0	0	0		0	0		
2774.	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	1.035.409.021	0		1	212.682.960	1	203.557.240	100	95.71		203.557.240	20	19.66		
2775.	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.929.869.602				493.180.000		388.677.788	116.67	78.81		388.677.788	38.13	13.27		
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang										0	0			0	0		
2776.	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	166.925.749	0		1	26.980.000	1	26.590.200	100	98.56		26.590.200	100	15.93		
2777.	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5	644.142.904	0		1	104.500.000	1	101.898.848	100	97.51	1	101.898.848	20	15.82		
2778.	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	1.622.401.152	0		1	282.000.000	1	206.049.000	100	73.07	1	206.049.000	12.5	12.7		
2779.	6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			496.399.797				79.700.000		54.139.740	166.67	67.93		54.139.740	20	10.91		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	100		0		12		20		166.67	0	20		20	0		
2780	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			17.778.386.394		-		1.331.484.428		1.120.144.613	130.98	84.13		1.120.144.613	39.82	6.3	Inspektorat	
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	85,3				0		82,31		0	0	82,31		96,49	0		
			Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan (Persen)	0				82,6		90,91		110,06	0	90,91		0	0		
2781.	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			14.323.746.078		-		1.080.309.627		917.005.900	129,35	84,88		917.005.900	41,19	6,4		
		Terlaksananya pengawasan internal										0	0			0	0		
2782.	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			1.777.998.765		-		130.030.142		94.870.898	66,67	72,96		94.870.898	12,77	5,34		
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	47		0		9		6		66,67	0	6		12,77	0		
2783.	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			1.565.266.511		-		114.506.381		106.595.153	76	93,09		106.595.153	74,51	6,81		
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	51		0		50		38		76	0	38		74,51	0		
2784.	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja			1.786.521.681		-		138.212.501		117.574.892	160	85,07		117.574.892	19,51	6,58		
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	82		0		10		16		160	0	16		19,51	0		
2785.	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan			3.413.734.427		-		233.602.500		200.032.957	200	85,63		200.032.957	12,12	5,86		
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	165		0		10		20		200	0	20		12,12	0		
2786.	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa			3.623.432.387		-		255.074.001		236.605.550	281,82	92,76		236.605.550	27,43	6,53		
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	113		0		11		31		281,82	0	31		27,43	0		
2787.	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal			596.852.610		-		62.765.001		44.744.826	100	71,29		44.744.826	100	7,5		
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1		0		1		1		100	0	1		100	0		
2788.	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			1.559.939.697		-		146.119.101		116.581.624	21	79,79		116.581.624	42	7,47		
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	50		0		100		21		21	0	21		42	0		
2789.	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			3.454.640.316		-		251.174.801		203.138.713	136,67	80,88		203.138.713	35	5,88		
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu										0	0			0	0		
2790.	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			562.037.924		-		43.966.500		23.623.600	200	53,73		23.623.600	50	4,2		
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	4		0		1		2		200	0	2		50	0		
2791.	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			2.892.602.392		-		207.208.301		179.515.113	73,33	86,64		179.515.113	20	6,21		
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	55		0		15		11		73,33	0	11		20	0		
2792	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			4.735.436.799		-		409.750.224		248.995.735	82,7	60,77		248.995.735	33,05	5,26	Inspektorat	
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3,5				0				0	0	0		0	0		
			Tingkat Maturitas SPIP Pemko Lhokseumawe (Level (Point))	0				Level 3 (3,5)		3,037		9065,67	0	3,037		0	0		
			Level Kapabilitas APIP (Level)	0				Level 4		0		0	0	0		0	0		
			Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3,6				0		3,031		0	0	3,031		84194,4	0		
			Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi (Kategori/Point)	0				CC/51,0 0		0		0	0	0		0	0		
2793.	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan			2.504.439.363		-		204.627.222		165.870.803	64,29	81,06		165.870.803	12,38	6,62		
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang										0	0			0	0		
2794.	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			1.406.938.779		-		87.842.801		85.919.450	28,57	97,81		85.919.450	20	6,11		
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	50		0		35		10		28,57	0	10		20	0		
2795.	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan			1.097.500.584		-		116.784.421		79.951.353	100	68,46		79.951.353	4,76	7,28		
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	21		0		1		1		100	0	1		4,76	0		
2796.	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			2.230.997.436		-		205.123.002		83.124.932	91,91	40,52		83.124.932	43,38	3,73		
		Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi										0	0			0	0		
2797.	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			844.092.395		-		110.020.000		7.894.550	100	7,18		7.894.550	100	0,94		
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	34		0		34		34		100	0	34		100	0		
2798.	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			432.400.235		-		25.972.500		22.669.600	67,65	87,28		22.669.600	13,53	5,24		
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	170		0		34		23		67,65	0	23		13,53	0		
2799.	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			434.024.434		-		27.122.501		15.610.000	100	57,55		15.610.000	40	3,6		
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	5		0		2		2		100	0	2		40	0		
2800.	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			520.480.372		-		42.008.001		36.950.782	100	87,96		36.950.782	20	7,1		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
				170		0		34		34		100	0	34		20	0		
	7.01	KECAMATAN			82.516.568.919		-	12.676.037.800		11.199.092.368	69.96	88.35		11.199.092.368	248.42	13.57			
2801	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			20.674.326.823		-	3.380.379.634		3.021.768.459	53.3	89.39		3.021.768.459	27.15	14.62		Kecamatan Banda Sakti	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	62,4				0		0		0	0	0		0	0		
2802.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			132.000.000		-	6.405.001		6.401.952	100	99.95		6.401.952	6.52	4.85			
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan										0	0			0	0		
2803.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			90.000.000		-	6.405.001		6.401.952	100	99.95		6.401.952	13.04	7.11			
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	46		0		6		6		100	0	6		13.04	0		
2804.	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			42.000.000		-	-		-		0	0		-	0	0		
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2805.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.316.849.030		-	2.868.388.470		2.537.616.710	28.57	88.47		2.537.616.710	17.14	19.06			
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat										0	0			0	0		
2806.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.316.849.030		-	2.868.388.470		2.537.616.710	85.71	88.47		2.537.616.710	17.14	19.06			
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.960		0		392		336		85.71	0	336		17.14	0		
2807.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					-			-		0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2808.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					-			-		0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0		0		3		0		0	0	0		0	0		
2809.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					-			-		0	0		-	0	0		
												0	0			0	0		
2810.	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					-			-		0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0		0		12		0		0	0	0		0	0		
2811.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			735.664.120		-			-		0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat										0	0			0	0		
2812.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			301.550.750		-			-		0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	80		0		51		0		0	0	0		0	0		
2813.	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			82.000.000		-			-		0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		3		0		0	0	0		0	0		
2814.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			352.113.370		-			-		0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
2815.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			906.810.226		-	78.353.442		78.289.686	71.43	99.92		78.289.686	15.99	8.63			
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0			0	0		
2816.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			172.350.974		-	16.013.441		16.005.488	100	99.95		16.005.488	19.92	9.29			
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	246		0		49		49		100	0	49		19.92	0		
2817.	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					-			-		0	0		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0		0		6		0		0	0	0		0	0		
2818.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			85.367.063		-	7.000.001		6.994.996	100	99.93		6.994.996	15	8.19			
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	40		0		6		6		100	0	6		15	0		
2819.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			85.367.063		-	7.200.000		7.199.602	100	99.99		7.199.602	31.43	8.43			
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	35		0		11		11		100	0	11		31.43	0		
2820.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.700.000		-	1.140.000		1.140.000	100	100		1.140.000	0.05	20			
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.825		0		1		1		100	0	1		0.05	0		
2821.	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material					-			-		0	0		-	0	0		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0		0		2		0		0	0	0		0	0		
2822.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			558.025.126		-	47.000.000		46.949.600	100	99.89		46.949.600	13.57	8.41			
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	199		0		27		27		100	0	27		13.57	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
2823.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.687.346.150				30.000.000		29.986.108	25	99.95		29.986.108	9.04	1.12		
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah										0	0			0	0		
2824.	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.390.000.000							0	0			0	0		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
2825.	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			282.258.863							0	0			0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		1		0		0	0	0		0	0		
2826.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-							0	0			0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		4		0		0	0	0		0	0		
2827.	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			1.015.087.287				30.000.000		29.986.108	100	99.95		29.986.108	27.12	2.95		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	59		0		16		16		100	0	16		27.12	0		
2828.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.864.990.567				333.842.721		306.756.503	100	91.89		306.756.503	60.04	16.45		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan										0	0			0	0		
2829.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			26.455.687				800.001		789.767	100	98.72		789.767	164.67	2.99		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	150		0		247		247		100	0	247		164.67	0		
2830.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			286.200.000				45.960.000		42.640.097	100	92.78		42.640.097	15	14.9		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	240		0		36		36		100	0	36		15	0		
2831.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.552.334.880				287.082.720		263.326.639	100	91.73		263.326.639	0.45	16.96		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.640		0		12		12		100	0	12		0.45	0		
2832.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.030.666.730				63.390.000		62.717.500	60	98.94		62.717.500	56	6.09		
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah										0	0			0	0		
2833.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			333.094.573				27.480.000		26.879.500	100	97.81		26.879.500	20	8.07		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
2834.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			121.031.347							0	0			0	0		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2		0		1		0		0	0	0		0	0		
2835.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			397.291.000				26.000.000		25.928.000	100	99.72		25.928.000	20	6.53		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
2836.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			51.911.376				9.910.000		9.910.000	100	100		9.910.000	240	19.09		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		0		36		36		100	0	36		240	0		
2837.	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			127.338.434							0	0			0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15		0		3		0		0	0	0		0	0		
2838	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.244.328.687				117.451.502		117.265.302	100	99.84		117.265.302	16.8	9.42	Kecamatan Banda Sakti	
		Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	339				0		100		0	0	100		29.5	0		
			Persentase pembinaan PKK Gampong (Persen)	0				55.56		94.44		169.98	0	94.44		0	0		
2839.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			919.404.752				105.416.001		105.325.307	100	99.91		105.325.307	20	11.46		
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan										0	0			0	0		
2840.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			165.734.126				25.000.000		24.909.646	100	99.64		24.909.646	20	15.03		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
2841.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			753.670.626				80.416.001		80.415.661	100	100		80.415.661	20	10.67		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
2842.	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			154.872.750				6.067.500		5.979.610	100	98.55		5.979.610	20	3.86		
		Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga										0	0			0	0		
2843.	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			154.872.750				6.067.500		5.979.610	100	98.55		5.979.610	20	3.86		
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
2844.	7.01.03.7.04	Pemberdayaan Mukim			170.051.185				5.968.001		5.960.385	100	99.87		5.960.385	12	3.51		
		Terlaksananya Pemberdayaan Mukim										0	0			0	0		
2845.	7.01.03.7.04.0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim			121.139.813				5.968.001		5.960.385	100	99.87		5.960.385	24	4.92		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Meningkatnya Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	50		0		12		12		100	0	12		24	0		
2846.	7.01.03.7.04.0004	Pelantikan Imeum Mukim			48.911.372			-		-		0	0			0	0		
		Terlaksananya Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim (Laporan)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
2847	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			175.039.432		-		10.380.001		10.375.110	100	99.95		10.375.110	220	5.93	Kecamatan Banda Sakti	
		Meningkatnya lingkungan yang aman, terib, dan tenang	Persentase Penertiban (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat. (%)	500				0		100		0	0	100		20	0		
2848.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			175.039.432		-		10.380.001		10.375.110	100	99.95		10.375.110	220	5.93		
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan										0	0			0	0		
2849.	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5	103.822.750	0		22	10.380.001	22	10.375.110	100	99.95	22	10.375.110	440	9.99		
2850.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1	71.216.682	0		-		-		0	0			0	0		
2851	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			197.389.813		-		14.055.000		14.055.000	100	100		14.055.000	20	7.12	Kecamatan Banda Sakti	
		Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Persentase kebijakan urusan pemerintahan (%)	500				0		100		0	0	100		20	0		
2852.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			197.389.813		-		14.055.000		14.055.000	100	100		14.055.000	20	7.12		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan										0	0			0	0		
2853.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	5	197.389.813	0		1	14.055.000	1	14.055.000	100	100		14.055.000	20	7.12		
2854	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			405.468.250		-		13.980.001		13.974.976	100	99.96		13.974.976	95	3.45	Kecamatan Banda Sakti	
		Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	500				0		100		0	0	100		20	0		
			Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
2855.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Pengawasan Pemerintahan Desa		405.468.250		-		13.980.001		13.974.976	100	99.96		13.974.976	95	3.45		
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi										0	0			0	0		
2856.	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	90	80.367.063	0		18	6.960.001	18	6.956.713	100	99.95	18	6.956.713	20	8.66		
2857.	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	18	62.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
2858.	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	18	42.000.000		-					0	0			0	0		
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	18		0		0		0		0	0	0		0	0		
2859.	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	5	221.101.187	0		18	7.020.000	18	7.018.263	100	99.98		7.018.263	360	3.17		
2860	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.642.243.439		-		3.578.874.235		3.245.452.525	15.36	90.68		3.245.452.525	24.03	16.52	Kecamatan Blang Mangat	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	60,42				0		0		0	0	0		0	0		
2861.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			129.000.000		-		6.275.020		6.275.020	28.57	100		6.275.020	10	4.86		
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan										0	0			0	0		
2862.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10	88.000.000	0		7	6.275.020	2	6.275.020	28.57	100		6.275.020	20	7.13		
2863.	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1	41.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
2864.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.744.584.799		-		2.456.037.000		2.128.726.328	12.5	86.67		2.128.726.328	8.71	19.81		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat										0	0			0	0		
2865.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	264	10.664.584.799	0		276	2.456.037.000	69	2.128.726.328	25	86.67		2.128.726.328	26.14	19.96		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	264		0		276		69		25	0	69		26.14	0		
2866.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	40.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
2867.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			40.000.000		-			-		0	0			0	0		



No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3		0		2		0		0	0	0		0	0		
2868.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80.000.000		-		-			0	0			0	0		
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada										0	0			0	0		
2869.	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			40.000.000		-		-			0	0			0	0		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		2		0		0	0	0		0	0		
2870.	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			40.000.000		-		-			0	0			0	0		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
2871.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			525.760.000		-		-			0	0			0	0		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat										0	0			0	0		
2872.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			214.000.000		-		-			0	0			0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	70		0		2		0		0	0	0		0	0		
2873.	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			41.000.000		-		-			0	0			0	0		
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		1		0		0	0	0		0	0		
2874.	7.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian			-		-		-			0	0			0	0		
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2875.	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			40.000.000		-		-			0	0			0	0		
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2876.	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			160.000.000		-		-			0	0			0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	22		0		0		0		0	0	0		0	0		
2877.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			70.760.000		-		-			0	0			0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
2878.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			980.540.800		-		233.034.101		233.033.915	24.56	100		233.033.915	50.45	23.77		
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah										0	0			0	0		
2879.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			221.840.800		-		76.714.441		76.714.441	30.7	100		76.714.441	138.57	34.58		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	70		0		316		97		30.7	0	97		138.57	0		
2880.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			193.000.000		-		60.961.660		60.961.658	50	100		60.961.658	47	31.59		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	600		0		564		282		50	0	282		47	0		
2881.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			130.000.000		-		4.560.000		4.560.000	0	100		4.560.000	0	3.51		
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	30		0		20		0		0	0	0		0	0		
2882.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			5.700.000		-		798.000		798.000	0	100		798.000	0	14		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365		0		365		0		0	0	0		0	0		
2883.	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			-		-		-			0	0			0	0		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
2884.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			430.000.000		-		90.000.000		89.999.816	66.67	100		89.999.816	66.67	20.93		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	30		0		30		20		66.67	0	20		66.67	0		
2885.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			4.342.214.000		-		59.352.310		59.352.310	0	100		59.352.310	0	1.37		
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah										0	0			0	0		
2886.	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.200.000.000		-		-			0	0			0	0		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
2887.	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			1.122.000.000		-		-			0	0			0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0	0	0		0	0		
2888.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			120.000.000		-		-			0	0			0	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0	0	0		0	0		
2889.	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			240.000.000		-		-			0	0			0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0	0	0		0	0		
2890.	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			800.000.000		-		-			0	0			0	0		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2891.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			540.214.000		-		-			0	0			0	0		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5		0		2		0		0	0	0		0	0		
2892	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5	320.000.000	0		10	59.352.310	0	59.352.310	0	100	0	59.352.310	0	18.55		
2893	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1.873.753.840		-		346.695.804		341.377.530	16.67	98.47		341.377.530	34.03	18.22		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan										0	0			0	0		
2894	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	30	22.000.000	0		115	797.800	0	791.200	0	99.17	0	791.200	0	3.6		
2895	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	72	226.492.720	0		72	45.298.644	18	44.359.050	25	97.93	18	44.359.050	25	19.59		
2896	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	288	1.625.261.120	0		888	300.599.360	222	296.227.280	25	98.55	222	296.227.280	77.08	18.23		
2897	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		966.390.000		-		477.480.000		476.687.422	34.13	99.83		476.687.422	59.52	49.33		
2898	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	289.000.000	0		1	37.480.000	0,25	37.172.999	25	99.18	0,25	37.172.999	25	12.86		
2899	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	8	35.440.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
2900	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3	40.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
2901	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5	40.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
2902	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	410.000.000	0		1	420.000.000	0,25	419.514.423	25	99.88	0,25	419.514.423	25	102.32		
2903	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	45.000.000	0		21	20.000.000	11	20.000.000	52.38	100	11	20.000.000	366.67	44.44		
2904	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	15	106.950.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
2905	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			-		-		7.951.459		-	0	0		-	0	0	Kecamatan Blang Mangat	
		Persentase Peningkatan Fasilitas Publik (Persen)		0				100		100		100	0	100		0	0		
2906	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			-		-		7.951.459		-	0	0		-	0	0		
2907	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	0		0		1	7.951.459	0		0	0	0		0	0		
2908	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.025.360.460		-		191.431.456		191.365.555	27.08	99.97		191.365.555	21.67	18.66	Kecamatan Blang Mangat	
		Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	70				0		63		0	0	63		90	0		
		Persentase pembinaan PKK Gampong (Persen)		0				90.91		90.91		100	0	90.91		0	0		
2909	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			590.360.460		-		110.548.456		110.548.455	25	100		110.548.455	25	18.73		
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										0	0			0	0		
2910	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	1	100.000.000	0		1	25.000.000	0	25.000.000	0	100	0	25.000.000	0	25		
2911	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	490.360.460	0		1	85.548.456	0,5	85.548.455	50	100	0,5	85.548.455	50	17.45		
2912	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			49.000.000		-		74.235.000		74.169.101	50	99.91		74.169.101	50	151.37		
		Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga										0	0			0	0		
2913	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			49.000.000		-		74.235.000		74.169.101	50	99.91		74.169.101	50	151.37		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2914.	7.01.03.7.04	Pemberdayaan Mukim			386.000.000		-		6.648.000		6.647.999	8.33	100		6.647.999	4.17	1.72		
		Terlaksananya Pemberdayaan Mukim										0	0			0	0		
2915.	7.01.03.7.04.0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim			365.000.000		-		6.648.000		6.647.999	8.33	100		6.647.999	8.33	1.82		
		Meningkatnya Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	12		0		12		1		8.33	0	1		8.33	0		
2916.	7.01.03.7.04.0004	Pelantikan Imeum Mukim			21.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim (Laporan)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
2917	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			171.000.000		-		18.968.647		18.968.645	50	100		18.968.645	50	11.09	Kecamatan Blang Mangat	
		Meningkatnya lingkungan yang aman, tertib, dan tentram	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat. (%)	100				0		100		0	0	100		100	0		
			Persentase Penertiban (Persen)	0				100.00		100		100	0	100		0	0		
2918.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			171.000.000		-		18.968.647		18.968.645	50	100		18.968.645	50	11.09		
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan										0	0			0	0		
2919.	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1		0		1		0,5		50	0	0,5		50	0		
2920.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			41.000.000		-		8.891.784		8.891.783	50	100		8.891.783	50	21.69		
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	1		0		1		0,5		50	0	0,5		50	0		
2921	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			173.200.000		-		14.090.000		14.090.000	25	100		14.090.000	25	8.14	Kecamatan Blang Mangat	
		Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam	Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam (Persen)	0				22.73		22,73		100	0	22,73		0	0		
			Persentase kebijakan urusan pemerintahan (%)	100				0		100		0	0	100		100	0		
2922.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai	Penugasan Kepala Daerah		173.200.000		-		14.090.000		14.090.000	25	100		14.090.000	25	8.14		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan										0	0			0	0		
2923.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			173.200.000		-		14.090.000		14.090.000	25	100		14.090.000	25	8.14		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		0		1		0,25		25	0	0,25		25	0		
2924	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			342.000.000		-		67.013.756		67.013.675	25	100		67.013.675	25	19.59	Kecamatan Blang Mangat	
		Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100				0		100		0	0	100		100	0		
			Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
2925.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			342.000.000		-		67.013.756		67.013.675	25	100		67.013.675	25	19.59		
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi										0	0			0	0		
2926.	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			90.000.000		-		14.863.216		14.863.135	25	100		14.863.135	50	16.51		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		2		0,5		25	0	0,5		50	0		
2927.	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			61.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	22		0		0		0		0	0	0		0	0		
2928.	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			41.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	22		0		0		0		0	0	0		0	0		
2929.	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			150.000.000		-		52.150.540		52.150.540	25	100		52.150.540	50	34.77		
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	1		0		2		0,5		25	0	0,5		50	0		
2930	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			15.332.494.625		-		2.381.068.780		1.780.018.891	202,3	74.76		1.780.018.891	1154,3	11.61	Kecamatan Muara Satu	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	61				0		0		0	0	0		0	0		
2931.	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			132.000.000		-		6.252.500		6.247.979	100	99.93		6.247.979	16.67	4.73		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,										0	0			0	0		
2932.	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			90.000.000		-		6.252.500		6.247.979	100	99.93		6.247.979	33.33	6.94		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30		0		10		10		100	0	10		33.33	0		
2933.	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			42.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2934.	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.746.775.286		-		1.883.647.000		1.352.569.372	1700	71.81		1.352.569.372	33.33	17.46		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN										0	0			0	0		
2935.	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.666.775.286		-		1.883.647.000		1.352.569.372	1700	71.81		1.352.569.372	100	17.64		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	204		0		12		204		1700	0	204		100	0		
2936.	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2937.	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2938.	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			80.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik										0	0			0	0		
2939.	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2940.	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2941.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			651.500.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian										0	0			0	0		
2942.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	40		0		17		0		0	0	0		0	0		
2943.	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
2944.	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
2945.	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0		0	0	0		0	0		
2946.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
2947.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.844.525.804		-		81.535.117		76.457.638	181.89	93.77		76.457.638	5223.81	4.15		
		Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat										0	0			0	0		
2948.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	400		0		22		80		363.64	99.99	80		20	9.34		
2949.	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.150		0		0		0		0	0	0		0	0		
2950.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	150		0		240		30		12.5	0	30		20	0		
2951.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	730		0		12		12		100	0	12		1.64	0		
2952.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1		0		365		365		100	93.75	365		36500	1.68		
2953.	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	60		0		0		0		0	0	0		0	0		
2954.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	200		0		15		50		333.33	0	50		25	0		
2955.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.601.829.706		-		38.455.247		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah										0	0			0	0		
2956.	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2957.	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
2958.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	4		0		0		0		0	0	0		0	0		
2959.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			697.488.456		-		-		-	0	0		-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8		0		0		0		0	0	0		0	0		
2960.	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	-		-		38.455.247		-		0	0	-		0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		6		0		0	0	0		0	0		
2961.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.075.022.463		-	294.385.316		267.968.885		75	91.03	267.968.885		34.57	24.93		
		Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan										0	0			0	0		
2962.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			45.929.100		-	800.000		789.767		100	98.72	789.767		24	1.72		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	50		0		12		12		100	0	12		24	0		
2963.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	84		0		12		12		100	79.74	52.227.519		14.29	11.62		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)									100	0	12		14.29	0		
2964.	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			155.000.000		-	-		-		0	0			0	0		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
2965.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			424.743.215		-	228.085.316		214.951.599		25	94.24	214.951.599		100	50.61		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3		0		12		3		25	0	3		100	0		
2966.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.200.841.366		-	76.793.600		76.775.017		33.33	99.98	76.775.017		20	6.39		
		Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah										0	0			0	0		
2967.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas yang Disediakan (Unit)	216.000.000		-		36.793.600		36.787.300		100	99.98	36.787.300		100	17.03		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1		0				1		100	0	1		100	0		
2968.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20.000.000		-		-		-		0	0	-		0	0		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
2969.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			32.000.000		-	-		-		0	0	-		0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
2970.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			867.841.366		-	30.000.000		29.987.717		0	99.96	29.987.717		0	3.46		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
2971.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			65.000.000		-	10.000.000		10.000.000		0	100	10.000.000		0	15.38		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		0		0	0	0		0	0		
2972	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			2.488.543.626		-	116.245.000		116.236.300		25	99.99	116.236.300		16.67	4.67	Kecamatan Muara Satu	
		Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pembinaan PKK Gampong (Persen)	0				100		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100				0		0		0	0	0		0	0		
2973.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			626.670.624		-	102.710.000		102.704.846		50	99.99	102.704.846		50	16.39		
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan										0	0			0	0		
2974.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			25.000.000		-	25.000.000		25.000.000		0	100	25.000.000		0	100		
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	5		0		1		0		0	0	0		0	0		
2975.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			601.670.624		-	77.710.000		77.704.846		100	99.99	77.704.846		100	12.91		
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5		0		5		5		100	0	5		100	0		
2976.	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			1.592.873.002		-	6.690.000		6.688.521		0	99.98	6.688.521		0	0.42		
		Kelompok PKK di tingkat Desa dari gampong yang										0	0			0	0		
2977.	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			1.592.873.002		-	6.690.000		6.688.521		0	99.98	6.688.521		0	0.42		
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	400		0		12		0		0	0	0		0	0		
2978.	7.01.03.7.04	Pemberdayaan Mukim			269.000.000		-	6.845.000		6.842.933		0	99.97	6.842.933		0	2.54		
		Tersenggaranya Kegiatan Mukim										0	0			0	0		
2979.	7.01.03.7.04.0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim			140.000.000		-	6.845.000		6.842.933		0	99.97	6.842.933		0	4.89		
		Meningkatnya Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	8		0		8		0		0	0	0		0	0		
2980.	7.01.03.7.04.0003	Peresmian Mukim			67.000.000		-	-		-		0	0	-		0	0		
		Terlaksananya Peresmian Mukim	Jumlah Dokumen Hasil Peresmian Mukim (Dokumen)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
2981.	7.01.03.7.04.0004	Pelantikan Imeum Mukim			62.000.000		-	-		-		0	0	-		0	0		
		Terlaksananya Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim (Laporan)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
2982	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			110.000.000				10.450.000		10.305.229	100	98.61		10.305.229	6	9.37	Kecamatan Muara Satu	
		Meningkatnya lingkungan yang aman, tertib, dan tentram	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Keamanan Dan Ketertiban Yang Dilakukan (%)	500				0		100		0	0	100		20	0		
			Persentase Penertiban (Persen)	0				42.86		100		233.32	0	100		0	0		
2983	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			110.000.000				10.450.000		10.305.229	100	98.61		10.305.229	6	9.37		
		Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat										0	0			0	0		
2984	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	100		0		6		6		100	98.61		10.305.229	6	9.37		
2985	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			254.300.000				17.472.500		17.320.818	8.33	99.13		17.320.818	100	6.81	Kecamatan Muara Satu	
		Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh	Persentase kebijakan urusan pemerintahan (%)	100				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
2986	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Penugasan Kepala Daerah		254.300.000				17.472.500		17.320.818	8.33	99.13		17.320.818	100	6.81		
												0	0			0	0		
2987	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1		0		12		1		8.33	0	1		100	0		
2988	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			408.000.000				19.622.128		28.363.306	31.82	144.55		28.363.306	50	6.95	Kecamatan Muara Satu	
		Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	500				0		100		0	0	100		20	0		
			Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong (Persen)	0				100		0		0	0	0		0	0		
2989	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Dokumen	Pengawasan Pemerintahan Desa		408.000.000				19.622.128		28.363.306	31.82	144.55		28.363.306	50	6.95		
												0	0			0	0		
2990	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	4		0		11		4		36.36	0	4		100	0		
2991	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2992	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Terlaksananya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
2993	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	3		0		11		3		27.27	0	3		100	0		
2994	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16.515.745.286				2.564.764.500		2.381.643.775	71.57	92.86		2.381.643.775	36.47	14.42	Kecamatan Muara Dua	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	61,4				0		100		0	0	100		162.87	0		
2995	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan	Perangkat Daerah		150.000.000				6.808.500		6.802.804	116.67	99.92		6.802.804	8.54	4.54		
												0	0			0	0		
2996	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	41		0		6		7		116.67	0	7		17.07	0		
2997	7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Terlaksananya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
2998	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan			9.132.825.356				2.024.088.000		1.762.842.626	50	87.09		1.762.842.626	7.58	19.3		
												0	0			0	0		
2999	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.540		0		350		350		100	0	350		22.73	0		
3000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
3001	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	8		0		0		0		0	0	0		0	0		
3002	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada			80.000.000							0	0			0	0		
												0	0			0	0		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3003.	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			40.000.000														
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
3004.	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			40.000.000														
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
3005.	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			901.253.806														
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat																	
3006.	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			393.335.000														
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	80		0		50		0		0	0	0		0	0		
3007.	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			75.000.000														
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3		0		5		0		0	0	0		0	0		
3008.	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			65.000.000														
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
3009.	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			196.940.000														
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10		0		0		0		0	0	0		0	0		
3010.	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			170.978.806														
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
3011.	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.062.660.000														
		Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Umum																	
3012.	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			190.000.000														
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	400		0		30		30		100	0	30		7.5	0		
3013.	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			80.000.000														
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.150		0		0		0		0	0	0		0	0		
3014.	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			75.000.000														
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.750		0		5		5		100	0	5		0.09	0		
3015.	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			75.000.000														
		Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50		0		5		5		100	0	5		10	0		
3016.	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.660.000														
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2		0		1		0		0	0	0		0	0		
3017.	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material			80.000.000														
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	60		0		0		0		0	0	0		0	0		
3018.	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			550.000.000														
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	225		0		5		5		100	0	5		2.22	0		
3019.	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.895.172.960														
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah																	
3020.	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.520.000.000														
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		0		1		0	0	1		100	3.83		
3021.	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			600.000.000														
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
3022.	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel			135.000.000														
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
3023.	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			-														
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		0		0		0	0	0		0	0		
3024.	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			640.172.960														
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10		0		5		0		0	0	0		0	0		
3025.	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.260.562.653														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan																	
3026.	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			27.588.500														
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	240		0		200		200		100	0	200		83.33	0		
3027.	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			403.904.360														

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	420		0		15		15		100	0	15		3.57	0		
3028.	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	145.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0		
3029.	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	51	684.069.793	0	-	12	240.682.800	12	233.499.600	100	97.02	12	233.499.600	23.53	34.13		
3030.	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.033.270.511		-		136.680.000		236.304.000	100	172.89		236.304.000	186.67	22.87		
3031.	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	251.505.386	0	-	3	26.880.000	3	26.880.000	100	100		26.880.000	300	10.69		
3032.	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	163.202.000	0	-	0	-	1	99.812.000	0	0		99.812.000	33.33	61.16		
3033.	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	38.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0		-	0	0		
3034.	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	525.563.125	0	-	3	100.000.000	3	99.812.000	100	99.81		99.812.000	300	18.99		
3035.	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	55.000.000	0	-	3	9.800.000	3	9.800.000	100	100		9.800.000	300	17.82		
3036	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			2.564.823.385		-		113.679.000		113.549.394	75	99.89		113.549.394	91.39	4.43	Kecamatan Muara Dua	
		Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pembinaan PKK Gampong (Persen)	0				17.65		29.41		166.63	0	29.41		0	0		
			Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)	100				0		29.41		0	0	29.41		29.41	0		
3037.	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			1.182.375.000		-		100.400.000		100.287.348	50	99.89		100.287.348	16.67	8.48		
3038.	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	3	417.000.000	0	-	1	29.400.000	0	29.399.625	0	100		29.399.625	0	7.05		
3039.	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	3	765.375.000	0	-	1	71.000.000	1	70.887.723	100	99.84		70.887.723	33.33	9.26		
3040.	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			458.647.438		-		6.720.000		6.719.183	100	99.99		6.719.183	500	1.46		
3041.	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan (Lembaga Kemasyarakatan)	1	458.647.438	0	-	5	6.720.000	5	6.719.183	100	99.99		6.719.183	500	1.46		
3042.	7.01.03.7.04	Pemberdayaan Mukim			923.800.947		-		6.559.000		6.542.863	100	99.75		6.542.863	5	0.71		
3043.	7.01.03.7.04.0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	40	359.521.188	0	-	6	6.559.000	6	6.542.863	100	99.75		6.542.863	15	1.82		
3044.	7.01.03.7.04.0003	Peresmian Mukim	Jumlah Dokumen Hasil Peresmian Mukim (Dokumen)	2	205.000.000	0	-	0	-	0	-	0	0		-	0	0		
3045.	7.01.03.7.04.0004	Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim (Laporan)	2	359.279.759	0	-	0	-	0	-	0	0		-	0	0		
3046	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			114.000.000		-		7.129.000		7.120.000	100	99.87		7.120.000	150	6.25	Kecamatan Muara Dua	
		Meningkatnya lingkungan yang aman, terib, dan tentram	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat. (%)	100				0		47,06		0	0	47,06		47.06	0		
3047.	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			114.000.000		-	23.53	7.129.000		7.120.000	100	99.87		7.120.000	150	6.25		
3048.	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	106.000.000	0	-	3	7.129.000	3	7.120.000	100	99.87		7.120.000	300	6.72		
3049.	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			8.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	K 1	Rp	K 0	Rp	K 0	Rp	K 0	Rp	K 0	% 0	K 0	Rp	K 0	% 0		
3050	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			257.125.000		-		17.589.000		16.770.000	100	95.34		16.770.000	25	6.52	Kecamatan Muara Dua	
		Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh	Persentase kebijakan urusan pemerintahan (%)	100				0		29,41		0	0	29,41		29,41	0		
			Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam (Persen)	0				17,65		29,41		166,63	0	29,41		0	0		
3051.	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			257.125.000		-		17.589.000		16.770.000	100	95.34		16.770.000	25	6.52		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di										0	0			0	0		
3052.	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			257.125.000		-		17.589.000		16.770.000	100	95.34		16.770.000	25	6.52		
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	12		0		3		3		100	0	3		25	0		
3053	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			421.180.093		-		13.442.200		13.435.408	100	99.95		13.435.408	34.58	3.19	Kecamatan Muara Dua	
		Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong	persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100				0		100		0	0	100		100	0		
			Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
3054.	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			421.180.093		-		13.442.200		13.435.408	100	99.95		13.435.408	34.58	3.19		
		Terlaksananya rekomendasi pembinaan dan										0	0			0	0		
3055.	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			99.000.000		-		6.590.000		6.590.000	100	100		6.590.000	25	6.66		
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	4		0		1		1		100	0	1		25	0		
3056.	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			70.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
3057.	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa			72.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
3058.	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			180.180.093		-		6.852.200		6.845.408	100	99,9		6.845.408	113.33	3,8		
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	15		0		17		17		100	0	17		113.33	0		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			29.316.860.336		-		5.414.124.241		4.920.147.841	72.35	90.88		4.920.147.841	278.89	16.78		
3059	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			16.961.383.208		-		3.436.341.880		2.919.689.480	61.58	84.97		2.919.689.480	494.58	17.21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	61,4				0		89,31		0	0	89,31		145,46	0		
3060.	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			120.000.000		-		17.585.000		17.576.619	5	99.95		17.576.619	33.33	14.65		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran										0	0			0	0		
3061.	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			120.000.000		-		17.585.000		17.576.619	5	99.95		17.576.619	33.33	14.65		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15		0		100		5		5	0	5		33.33	0		
3062.	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.479.560.728		-		2.877.624.000		2.362.191.728	8.17	82.09		2.362.191.728	50	20.58		
		Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan										0	0			0	0		
3063.	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.479.560.728		-		2.877.624.000		2.362.191.728	8.17	82.09		2.362.191.728	50	20.58		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	50		0		306		25		8.17	0	25		50	0		
3064.	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			60.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Perlatan dan Perlengkapan Kantor										0	0			0	0		
3065.	8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
3066.	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			20.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
3067.	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0		0		12		0		0	0	0		0	0		
3068.	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1.500.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian										0	0			0	0		
3069.	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			1.000.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	250		0		0		0		0	0	0		0	0		
3070.	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			200.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	100		0		0		0		0	0	0		0	0		
3071.	8.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			300.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	35		0		0		0		0	0	0		0	0		
3072.	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.058.590.000		-		63.384.525		63.932.778	80	100,86		63.932.778	3.17	6,04		

II-414

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket							
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Tersedianya Pelaksanaan Pengadministrasian umum		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3073.	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		315.000.000	-		11.000.000	10.997.804	99,98	10.997.804	0	0	0	10.997.804	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	175		1		0		0		0	0	0		0	0		
3074.	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		150.000.000	-		4.800.000	4.800.000	100	100	100	100	1	4.800.000	0,45	3,2		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	224		1		1		100	0	1	0	1		0,45	0		
3075.	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		325.000.000	-		9.000.000	9.550.449	100	106,12	100	106,12	1	9.550.449	1,05	2,94		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	95		1		1		100	0	1	0	1		1,05	0		
3076.	8.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		21.140.000	-		1.140.000	1.140.000	100	100	100	100	12	1.140.000	6,94	5,39		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	173		12		12		100	0	12	0	12		6,94	0		
3077.	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		247.450.000	-		37.444.525	37.444.525	100	100	100	100	20	37.444.525	7,41	15,13		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	270		20		20		100	0	20	0	20		7,41	0		
3078.	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah		1.228.000.000	-		62.555.475	62.555.475	0	100		100		62.555.475	3,24	5,09		
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah								0	0		0			0	0		
3079.	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		200.000.000	-		-	-	0	0		0	0	-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	74		0		0		0	0	0	0	0		0	0		
3080.	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		200.000.000	-		-	-	0	0		0	0	-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	74		0		0		0	0	0	0	0		0	0		
3081.	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel		228.000.000	-		-	-	0	0		0	0	-	0	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5		0		0		0	0	0	0	0		0	0		
3082.	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya		-	-		-	-	0	0		0	0	-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0		0		4		0	0	0	0	0		0	0		
3083.	8.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		400.000.000	-		-	-	0	0		0	0	-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	74		0		0		0	0	0	0	0		0	0		
3084.	8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		200.000.000	-		62.555.475	62.555.475	0	100		100	12	62.555.475	16,22	31,28		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	74		0		0		12		0	0	12		16,22	0		
3085.	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja		226.632.480	-		259.272.880	257.512.880	74,51	99,32		99,32		257.512.880	5600	113,63		
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja								0	0		0			0	0		
3086.	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	-		1.760.000	-	0	0		0	0	-	0	0		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0		0		0		0	0	0	0	0		0	0		
3087.	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		75.000.000	-		40.480.000	40.480.000	100	100		100	12	40.480.000	1200	53,97		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1		0		12		12		100	0	12		1200	0		
3088.	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor		151.632.480	-		217.032.880	217.032.880	49,02	100		100		217.032.880	10000	143,13		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		204		100		49,02	0	100		10000	0		
3089.	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		1.288.600.000	-		155.920.000	155.920.000	100	100		100		155.920.000	15	12,1		
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah								0	0		0			0	0		
3090.	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		373.300.000	-		55.220.000	55.220.000	100	100		100		55.220.000	20	14,79		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
3091.	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		326.500.000	-		20.700.000	20.700.000	100	100		100		20.700.000	20	6,34		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
3092.	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		308.800.000	-		60.000.000	60.000.000	100	100		100	1	60.000.000	20	19,43		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		1		1		100	0	1		20	0		
3093.	8.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		280.000.000	-		20.000.000	20.000.000	0	100		100	0	20.000.000	0	7,14		
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5		0		0		0	0	0	0	0		0	0		
3094	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			577.180.800	-		964.804.038	987.480.038	100	102,35		102,35		987.480.038	4,7	171,09	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	32,14		0		50		0	0	50	0	50		155,57	0		
		Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan (Persen)		0		2,20		2,21		100,45	0	2,21	0	2,21		0	0		
3095.	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			577.180.800	-		964.804.038	987.480.038	100	102,35		102,35		987.480.038	4,7	171,09		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter										0	0			0	0		
3096.	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	735	173.180.800	0		100	10.931.788	100	10.931.788	100	100	100	10.931.788	13.61	6.31		
3097.	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang)	65	96.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
3098.	8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan)	88	116.000.000	0		0		4	22.676.000	0	0	4	22.676.000	4.55	19.55		
3099.	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka (Orang)	749	96.000.000	0		40	953.872.250	40	953.872.250	100	100	40	953.872.250	5.34	993.62		
3100.	8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang)		96.000.000							0	0			0	0		
3101	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		10	5.831.296.328	0		0	627.232.828	0	627.232.828	102.78	100	0	627.232.828	35	10.76	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Meningkatnya etika dan budaya politik	Rasio partisipasi masyarakat dalam partai politik (Rasio)	0				0.81	81,02		10002.5	0	81,02			0	0		
			Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	50				0	81,98		0	0	81,98			163.96	0		
3102.	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,			5.831.296.328				627.232.828		627.232.828	102.78	100		627.232.828	35	10.76		
3103.	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Dokumen)			0		20	543.852.187	40	543.852.187	200	100	40	543.852.187	0	0		
3104.	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	210	2.550.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
3105.	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang)	250	80.000.000	0		100	60.704.641	100	60.704.641	100	100	100	60.704.641	40	75.88		
3106.	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan)	1	180.000.000	0		12	22.676.000	1	22.676.000	8.33	100	1	22.676.000	100	12.6		
3107.	8.01.03.2.01.0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan)	87	3.021.296.328	0		0		0		0	0	0		0	0		
3108	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			1.077.000.000				100.700.000		100.700.000	25	100		100.700.000	33.33	9.35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Pembinaan Ormas (Persen)	0				18,57	18,57		100	0	18,57			0	0		
			Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	55,56				0	20,27		0	0	20,27			36.48	0		
3109.	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi			1.077.000.000				100.700.000		100.700.000	25	100		100.700.000	33.33	9.35		

II-416

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Persentase Organisasi kemasyarakatan yang aktif										0	0			0	0		
3110.	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	3	97.000.000	0		12	100.700.000	3	100.700.000	25	100	3	100.700.000	100	103.81		
3111.	8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang)	414	800.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
3112.	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan)	1	180.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
3113	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			2.990.000.000		-		67.709.999		67.709.999	13.33	100		67.709.999	22.22	2.26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase pembinaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, PEKAT, serta Kerukunan Umat Beragama (Persen)	0				3.61		3,61		100	0	3,61		0	0		
			Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	100				0		4,37		0	0	4,37		4,37	0		
3114.	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			2.990.000.000		-		67.709.999		67.709.999	13.33	100		67.709.999	22.22	2.26		
3115.	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Orang)	45	2.850.000.000	0		150	67.709.999	20	67.709.999	13.33	0	20	67.709.999	44.44	0		
3116.	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah (Laporan)	1	140.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
3117	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			1.880.000.000		-		217.335.496		217.335.496	100	100		217.335.496	51.52	11.56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	100				0		100		0	0	100		100	0		
3118.	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik			1.880.000.000		-		217.335.496		217.335.496	100	100		217.335.496	51.52	11.56		
3119.	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	87	83.200.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
3120.	8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan			123.200.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun (Dokumen)	20		0		0		0		0	0	0		0	0		
3121.	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga			233.200.000		-		23.229.999		23.229.999	100	100		23.229.999	20	9.96		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	150	Rp	0	Rp	30	Rp	30	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
3122.	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Orang)	190	133.200.000	0	-	30	13.652.499	30	13.652.499	100	100	30	13.652.499	15.79	10.25		
3123.	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (Laporan)	5	207.200.000	0	-	12	12.472.999	12	12.472.999	100	100	12	12.472.999	240	6.02		
3124.	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	36	1.100.000.000	0	-	12	167.979.999	12	167.979.999	100	100	12	167.979.999	33.33	15.27		
	9.01	KEKHUSUSAN ACEH			140.731.708.178	-	-		18.673.925.865		9.609.005.912	24.66	51.46		9.609.005.912	16.08	6.83		
3125	9.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			18.170.914.176	-	-		3.386.995.160		3.238.626.150	21.43	95.62		3.238.626.150	2.87	17.82	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	62,3				0		0		0	0	0		0	0		
3126.	9.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			64.000.000	-	-		6.557.500		6.549.641	200	99.88		6.549.641	40	10.23		
		Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah										0	0			0	0		
3127.	9.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	15	64.000.000	0	3	6	6.557.500	6	6.549.641	200	99.88	6	6.549.641	40	10.23		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)									200	0	6		40	0		
3128.	9.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.783.799.376	-	-		1.896.949.000		1.690.070.553	0	89.09		1.690.070.553	0	17.27		
		Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										0	0			0	0		
3129.	9.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	9.783.799.376	0	228	0	1.896.949.000	0	1.690.070.553	0	89.09	0	1.690.070.553	0	17.27		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)									0	0	0		0	0		
3130.	9.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			45.509.375	-	-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Administras kepegawaian perangkat										0	0			0	0		
3131.	9.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	45.509.375	0	0	0		0		0	0	0		0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)									0	0			0	0		
3132.	9.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			636.700.000	-	-		42.932.180		41.460.812	0	96.57		41.460.812	0	6.51		
		Tersedianya administrasi umum perangkat daerah										0	0			0	0		
3133.	9.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	57.000.000	0	3	0	5.992.180	0	5.797.688	0	96.75	0	5.797.688	0	10.17		
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)									0	0	0		0	0		
3134.	9.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	37.000.000	0	2	0	2.800.000	0	2.800.000	0	100	0	2.800.000	0	7.57		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)									0	0	0		0	0		
3135.	9.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	37.000.000	0	3	0	3.000.000	0	2.999.424	0	99.98	0	2.999.424	0	8.11		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)									0	0	0		0	0		
3136.	9.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	5.700.000	0	1	0	1.140.000	0	1.140.000	0	100	0	1.140.000	0	20		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)									0	0	0		0	0		
3137.	9.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	10	500.000.000	0	35	0	30.000.000	0	28.723.700	0	95.75	0	28.723.700	0	5.74		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)									0	0	0		0	0		
3138.	9.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			488.000.000	-	-		35.000.000		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya barang milik daerah sebagai penunjang										0	0			0	0		
3139.	9.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	345.000.000	0	1	0		0		0	0	0		0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)									0	0			0	0		
3140.	9.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			143.000.000	-	-		35.000.000		-	0	0		-	0	0		

II-418

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2		0		8		0		0	0	0		0	0		
3141.	9.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.570.155.425		-		1.309.766.480		1.309.649.840	33.33	99.99		1.309.649.840	0.08	19.93		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah										0	0			0	0		
3142.	9.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			15.000.000		-		800.000		800.000	100	100		800.000	0.17	5.33		
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	600		0		1		1		100	0	1		0.17	0		
3143.	9.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
3144.	9.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			6.555.155.425		-		1.308.966.480		1.308.849.840	0	99.99		1.308.849.840	0	19.97		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	4		0		5		0		0	0	0		0	0		
3145.	9.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			582.750.000		-		95.790.000		190.895.304	0	199.29		190.895.304	0	32.76		
		Tersedianya Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan										0	0			0	0		
3146.	9.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	4		0		4		0		0	0	0		0	0		
3147.	9.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			33.750.000		-		6.750.000		95.447.652	0	1414.04		95.447.652	0	282.81		
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	12		0		10		0		0	0	0		0	0		
3148	9.01.03	PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH			4.642.269.212		-		84.312.497		-	0	0		-	0	0	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
		Meningkatnya Fatwa yang tersebarluaskan	Persentase Fatwa yang tersebarluaskan (Persen)	0				71.43		71.43		100	0	71.43		0	0		
			Persentase Fatwa yang di sosialisasikan (%)	94,23				0		0		0	0	0		0	0		
3149.	9.01.03.7.01	Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama			4.642.269.212		-		71.642.498			0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Hasil Sidang Majelis Permusyawaratan										0	0			0	0		
3150.	9.01.03.7.01.0002	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama			336.401.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama (laporan)	4		0		0		0		0	0	0		0	0		
3151.	9.01.03.7.01.0003	Pendidikan Kader Ulama			-		-		45.899.999		-	0	0		-	0	0		
		Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan (Orang)	0		0		20		0		0	0	0		0	0		
3152.	9.01.03.7.01.0005	Muzakarah Masalah Keagamaan			1.181.010.548		-		12.265.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Muzakarah Masalah Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan (Laporan)	3		0		1		0		0	0	0		0	0		
3153.	9.01.03.7.01.0011	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam			1.119.402.664		-		13.477.499		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam (Laporan)	2		0		1		0		0	0	0		0	0		
3154.	9.01.03.7.01.0014	Pendidikan Kader Ulama			2.005.455.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan (Orang)	60		0		0		0		0	0	0		0	0		
3155.	9.01.03.7.02	Silaturahmi Ulama-Ulama			-		-		12.669.999		-	0	0		-	0	0		
												0	0			0	0		
3156.	9.01.03.7.02.0002	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah			-		-		12.669.999		-	0	0		-	0	0		
		Diterapkannya Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah (Orang)	0		0		40		0		0	0	0		0	0		
3157	9.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.692.091.516		-		1.899.934.197		606.484.345	27.69	31.92		606.484.345	5.43	3.08	Sekretariat Baitul Mal	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja	Nilai SAKIP OPD (Angka)	62,15				0		0		0	0	0		0	0		
			Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Persen)	0				100		100		100	0	100		0	0		
3158.	9.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			40.032.089		-		6.320.000		6.283.209	100	99.42		6.283.209	25	15.7		
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran,										0	0			0	0		
3159.	9.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			40.032.089		-		6.320.000		6.283.209	100	99.42		6.283.209	25	15.7		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	40		0		10		10		100	0	10		25	0		
3160.	9.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.723.263.584		-		1.160.543.000		600.201.136	260	51.72		600.201.136	100	7.77		
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat										0	0			0	0		
3161.	9.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.723.263.584		-		1.160.543.000		600.201.136	260	51.72		600.201.136	100	7.77		
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	26		0		10		26		260	0	26		100	0		
3162.	9.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			699.027.140		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian										0	0			0	0		
3163.	9.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			699.027.140		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3		0		0		0		0	0	0		0	0		
3164.	9.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			795.843.591		-		81.908.495		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat										0	0			0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
3165.	9.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25	94.301.711	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
3166.	9.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41	99.076.141	0	-	41	15.799.141	0	-	0	0	0	-	0	0		
3167.	9.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2	57.628.823	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
3168.	9.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	700	86.526.180	0	-	100	14.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0		
3169.	9.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4	22.631.695	0	-	3	21.311.354	0	-	0	0	0	-	0	0		
3170.	9.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1	4.932.027	0	-	12	798.000	0	-	0	0	0	-	0	0		
3171.	9.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	4	261.949.194	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
3172.	9.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	168.797.820	0	-	40	30.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0		
3173.	9.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Kendaraan		6.018.617.470		-		127.388.646		-	0	0		-	0	0		
3174.	9.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	2.557.542.744	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
3175.	9.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	3.288.517.341	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
3176.	9.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	172.557.385	0	-	64	127.388.646	0	-	0	0	0	-	0	0		
3177.	9.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Jasa Pelayanan Kantor		3.913.169.652		-		456.694.056		-	0	0		-	0	0		
3178.	9.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	12.483.979	0	-	87	2.080.000	0	-	0	0	0	-	0	0		
3179.	9.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	104.779.677	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
3180.	9.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	52.389.839	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
3181.	9.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	3.743.516.157	0	-	12	454.614.056	0	-	0	0	0	-	0	0		
3182.	9.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan		502.137.990		-		67.080.000		-	0	0		-	0	0		
3183.	9.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)	1	160.356.225	0	-	1	26.780.000	0	-	0	0	0	-	0	0		
3184.	9.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	133.467.656	0	-	1	22.300.000	0	-	0	0	0	-	0	0		
3185.	9.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	85.534.431	0	-	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
3186.	9.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	70.389.839	0	-	27	18.000.000	0	-	0	0	0	-	0	0		
3187.	9.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			52.389.839		-		-		-	0	0		-	0	0		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	Rp	0	Rp	0	Rp	0	Rp	0	%	0	Rp	0	%		
3188	9.01.04	PROGRAM BAITUL MAL			42.966.283.797		-		5.820.630.000		-	0	0		-	0	0	Sekretariat Baitul Mal	
		Meningkat Pengumpulan ZISWAF	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan (Persen)	0				100		0,99		0,99	0	0,99		0	0		
			Persentase Peningkatan ZISWAF (%)	15,24				0		0		0	0	0		0	0		
3189	9.01.04.7.01	Pengelolaan ZISWAF			183.974.597		-		9.100.000		-	0	0		-	0	0		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Ziswaf										0	0			0	0		
3190	9.01.04.7.01.0001	Penyusunan Perencanaan ZISWAF			183.974.597		-		9.100.000		-	0	0		-	0	0		
		Tersusunnya Perencanaan Ziswaf	Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun (Dokumen)	5		0		1		0		0	0	0		0	0		
3191	9.01.04.7.02	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal			3.984.237.908		-		61.530.000		-	0	0		-	0	0		
		Tersusunnya Dokumen tentang Pengembangan Data										0	0			0	0		
3192	9.01.04.7.02.0001	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF			1.853.644.357		-		27.300.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf (Orang)	612		0		1000		0		0	0	0		0	0		
3193	9.01.04.7.02.0002	Pembinaan dan Koordinasi Badan Baitul Mal			261.949.194		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal (Dokumen)	1		0		0		0		0	0	0		0	0		
3194	9.01.04.7.02.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM			800.847.581		-		9.800.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM (Dokumen)	1		0		6		0		0	0	0		0	0		
3195	9.01.04.7.02.0004	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal			1.067.796.776		-		24.430.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal (Dokumen)	1		0		5		0		0	0	0		0	0		
3196	9.01.04.7.03	Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf			38.798.071.292		-		5.750.000.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Kegiatan Penerimaan ZIS Ke										0	0			0	0		
3197	9.01.04.7.03.0001	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir			11.751.000.000		-		1.305.000.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir (Orang)	927		0		1145		0		0	0	0		0	0		
3198	9.01.04.7.03.0002	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin			12.200.000.000		-		2.200.000.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin (Orang)	381		0		1349		0		0	0	0		0	0		
3199	9.01.04.7.03.0003	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil			4.066.000.000		-		548.800.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil (Orang)	117		0		120		0		0	0	0		0	0		
3200	9.01.04.7.03.0004	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf			210.000.000		-		30.000.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf (Orang)	15		0		15		0		0	0	0		0	0		
3201	9.01.04.7.03.0005	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin			207.000.000		-		15.000.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin (Orang)	10		0		6		0		0	0	0		0	0		
3202	9.01.04.7.03.0006	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah			2.108.000.000		-		109.200.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah (Orang)	50		0		60		0		0	0	0		0	0		
3203	9.01.04.7.03.0007	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil			1.592.000.000		-		192.000.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir (Orang)	70		0		1040		0		0	0	0		0	0		
3204	9.01.04.7.03.0008	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq			6.464.071.292		-		1.350.000.000		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq (Orang)	410		0		330		0		0	0	0		0	0		
3205	9.01.04.7.03.0009	Pengelolaan Wakaf			200.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terkelolanya Wakaf	Jumlah Laporan Pengelolaan Wakaf (Laporan)	2		0		0		0		0	0	0		0	0		
3206	9.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			27.230.641.151		-		4.811.462.490		4.190.614.650	28.24	87.1		4.190.614.650	26.7	15.39	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah (Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah) (Persen)	0				100		0		0	0	0		0	0		
			Nilai SAKIP OPD (Angka)	62,2				0		61,35		0	0	61,35		98,63	0		
3207	9.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			155.200.000		-		11.080.000		11.067.195	16,67	99,88		11.067.195	28,57	7,13		
		Tersedianya Dokumen Perangkat Daerah										0	0			0	0		
3208	9.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			112.700.000		-		11.080.000		11.067.195	100	99,88		11.067.195	57,14	9,82		
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7		0		4		4		100	0	4		57,14	0		
3209	9.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
3210	9.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			-		-		-		-	0	0		-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
3211.	9.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
3212.	9.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		0		5		0		0	0	0		0	0		
3213.	9.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0		0		3		0		0	0	0		0	0		
3214.	9.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5	42.500.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
3215.	9.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			18.432.643.551		-		3.880.874.000		3.453.318.375	2,82	88,98		3.453.318.375	6,02	18,73		
3216.	9.01.01.2.02.0001	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan					-					0	0			0	0		
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	532	18.432.643.551	0		378		32		8,47	88,98		3.453.318.375	6,02	18,73		
3217.	9.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0		0		7		0		0	0	0		0	0		
3218.	9.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0		0		5		0		0	0	0		0	0		
3219.	9.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			20.000.000		-					0	0			0	0		
3220.	9.01.01.2.03.0001	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik					-					0	0			0	0		
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	20.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
3221.	9.01.01.2.03.0005	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					-					0	0			0	0		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
3222.	9.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			596.500.000		-					0	0			0	0		
		Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian					-					0	0			0	0		
3223.	9.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0		0		1		0		0	0	0		0	0		
3224.	9.01.01.2.05.0002	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					-					0	0			0	0		
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	160	340.000.000	0		75		0		0	0	0		0	0		
3225.	9.01.01.2.05.0003	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					-					0	0			0	0		
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	11.500.000	0		4		0		0	0	0		0	0		
3226.	9.01.01.2.05.0009	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					-					0	0			0	0		
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	245.000.000	0		6		0		0	0	0		0	0		
3227.	9.01.01.2.05.0010	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					-					0	0			0	0		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		0		5		0		0	0	0		0	0		
3228.	9.01.01.2.05.0011	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					-					0	0			0	0		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0		0		20		0		0	0	0		0	0		
3229.	9.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.037.050.000		-		81.598.258		78.844.261	51,39	96,62		78.844.261	51,23	7,6		
		Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat					-					0	0			0	0		
3230.	9.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	123.100.000	0		15		0		0	0	0		0	0		
3231.	9.01.01.2.06.0002	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	50	152.000.000	0		38		38		100	99,87		14.511.604	76	9,55		
3232.	9.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	8.000.000	0		3		0		0	0	0		0	0		
3233.	9.01.01.2.06.0004	Terlaksananya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					-					62,5	99,73		7.050.000	59,52	10,37		

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	420		0		400		250		62.5	0	250		59.52	0		
3234	9.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)		47.000.000		-		4.200.000		4.199.857	100	100		4.199.857	250	8.94		
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2		0		5		5		100	0	5		250	0		
3235	9.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		5.700.000		-		798.000		798.000	100	100		798.000	0.55	14		
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	365		0		2		2		100	0	2		0.55	0		
3236	9.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)		-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0		0		5		0		0	0	0		0	0		
3237	9.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)		621.250.000		-		55.000.000		52.284.800	100	95.06		52.284.800	23.75	8.42		
		Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	400		0		95		95		100	0	95		23.75	0		
3238	9.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)		12.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1		0		2		0		0	0	0		0	0		
3239	9.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.693.750.000		-		113.730.712		53.879.400	14.29	47.37		53.879.400	7.14	2		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Barang Milik										0	0			0	0		
3240	9.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)		1.017.750.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
3241	9.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)		400.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3		0		3		0		0	0	0		0	0		
3242	9.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		120.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2		0		6		0		0	0	0		0	0		
3243	9.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)		140.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3		0		5		0		0	0	0		0	0		
3244	9.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		598.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
3245	9.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		60.000.000		-		113.730.712		53.879.400	100	47.37		53.879.400	50	89.8		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		2		2		100	0	2		50	0		
3246	9.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		358.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4		0		5		0		0	0	0		0	0		
3247	9.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.359.197.600		-		569.999.520		453.437.419	75	79.55		453.437.419	20.75	13.5		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah										0	0			0	0		
3248	9.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)		13.500.000		-		1.600.000		1.592.481	100	99.53		1.592.481	8	11.8		
		Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.250		0		100		100		100	0	100		8	0		
3249	9.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)		1.840.500.000		-		359.100.000		274.972.207	100	76.57		274.972.207	60	14.94		
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5		0		3		3		100	0	3		60	0		
3250	9.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)		403.200.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1		0		6		0		0	0	0		0	0		
3251	9.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)		1.101.997.600		-		209.299.520		176.872.731	100	84.51		176.872.731	15	16.05		
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	20		0		3		3		100	0	3		15	0		
3252	9.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			936.300.000		-		154.180.000		140.068.000	42.86	90.85		140.068.000	39.29	14.96		
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang										0	0			0	0		
3253	9.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		170.300.000		-		36.580.000		31.708.800	100	86.68		31.708.800	8.33	18.62		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12		0		1		1		100	0	1		8.33	0		
3254	9.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)		229.000.000		-		30.600.000		21.905.500	100	71.59		21.905.500	4.17	9.57		
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	24		0		1		1		100	0	1		4.17	0		
3255	9.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)		20.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	2		0		8		0		0	0	0		0	0		
3256	9.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)		20.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2		0		7		0		0	0	0		0	0		
3257	9.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			110.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1		0		1		0		0	0	0		0	0		
3258.	9.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	225.000.000	0		21	87.000.000	21	86.453.700	100	99.37	21	86.453.700	262.5	38.42		
3259.	9.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	8	162.000.000	0		6		0		0	0	0		0	0		
3260.	9.01.01.2.13	Penataan Organisasi			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
3261.	9.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana (Laporan)	0		0		2		0		0	0	0	-	0	0		
3262.	9.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			-		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi (Dokumen)	0		0		4		0		0	0	0	-	0	0		
3263	9.01.02	PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH			28.029.508.326		-		2.670.591.521		1.573.280.767	30.23	58.91		1.573.280.767	23.45	5.61	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
		Meningkatnya Pembinaan Syariat Islam	Angka Melek Al-Qur'an (Angka)	88,87				0		0		0	0	0		0	0		
			Cakupan Pembinaan Syariat Islam (Persen)	0				53.88		47,89		88.88	0	47,89		0	0		
3264.	9.01.02.7.01	Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam			1.707.500.000		-		62.728.168		60.638.000	66.67	96.67		60.638.000	68.89	3.55		
		Terlaksananya Pelatihan Wawasan Keislaman bagi										0	0			0	0		
3265.	9.01.02.7.01.0001	Pelatihan Mawaris			369.000.000		-		11.239.908		11.077.000	100	98.55		11.077.000	104.62	3		
		Terlaksananya Pelatihan Mawaris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris (Orang)	65		0		68		68		100	0	68		104.62	0		
3266.	9.01.02.7.01.0002	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas yang Mengikuti TOT Modul Wawasan Keislaman (Orang)	25	120.000.000	0		55		0		0	0	0	-	0	0		
3267.	9.01.02.7.01.0003	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Orang)	80	295.000.000	0		90	17.184.097	90	16.339.000	100	95.08		16.339.000	112.5	5.54		
		Terbina dan Meningkatkan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam										100	0	90		112.5	0		
3268.	9.01.02.7.01.0004	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat			200.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat	Jumlah Tenaga Hisab dan Ru'yat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Orang)	10		0		20		0		0	0	0		0	0		
3269.	9.01.02.7.01.0005	Seminar Problematika Syariat Islam			375.000.000		-		14.124.000		13.642.500	100	96.59		13.642.500	106.25	3.64		
		Terlaksananya Seminar Problematika Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam (Orang)	80		0		85		85		100	0	85		106.25	0		
3270.	9.01.02.7.01.0006	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbinā Mental Spiritualnya (Orang)	100	348.500.000	0		90	20.180.163	90	19.579.500	100	97.02		19.579.500	90	5.62		
3271.	9.01.02.7.02	Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran			7.069.349.730		-		784.596.734		775.958.612	25	98.9		775.958.612	13.07	10.98		
		Terlaksananya kegiatan peningkatan pemahaman Al-										0	0			0	0		
3272.	9.01.02.7.02.0001	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran			1.000.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan (Lembaga)	3		0		2		0		0	0	0	-	0	0		
3273.	9.01.02.7.02.0002	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran			486.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran	Jumlah Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Orang)	30		0		50		0		0	0	0		0	0		
3274.	9.01.02.7.02.0003	Pembinaan Imam Hafidz pada Masjid			140.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pembinaan Imam Hafid pada Masjid	Jumlah Imam Hafid pada Masjid yang Mengikuti Pembinaan (Orang)	5		0		35		0		0	0	0		0	0		
3275.	9.01.02.7.02.0004	Pelaksanaan MTQ			5.317.349.730		-		784.596.734		775.958.612	100	98.9		775.958.612	78.45	14.59		
		Terlaksananya MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ (Orang)	232		0		182		182		100	0	182		78.45	0		
3276.	9.01.02.7.02.0005	Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional			60.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	Jumlah Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional yang Mengikuti Pelatihan/Training Center (Orang)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
3277.	9.01.02.7.02.0006	Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional			66.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional yang Diberangkatan (Orang)	5		0		0		0		0	0	0		0	0		
3278.	9.01.02.7.03	Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersedianya laporan Peningkatan Toleransi Umat										0	0			0	0		
3279.	9.01.02.7.03.0001	Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam			40.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam (Dokumen)	1		0		2		0		0	0	0		0	0		
3280.	9.01.02.7.04	Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam			4.440.570.326		-		353.235.566		194.683.899	40	55.11		194.683.899	26.79	4.38		
		Terlaksananya Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam										0	0			0	0		
3281.	9.01.02.7.04.0001	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam			917.000.000		-		156.325.200		122.601.490	100	78.43		122.601.490	33.33	13.37		

No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam (Dokumen)	3		0		1		1		100	0	1		33.33	0		
3282.	9.01.02.7.04.0002	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil Terbinanya Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	Jumlah Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil yang Mengikuti Pembinaan (Orang)	5	2.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
3283.	9.01.02.7.04.0003	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan Terbina dan Meningkatkan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan Meningkatkan Kualitasnya (Orang)	100	380.409.387	0		25		0		0	0	0		0	0		
3284.	9.01.02.7.04.0004	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Terbinanya Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan yang Mengikuti Pembinaan (Orang)	500	450.000.000	0		500	34.565.000	500	33.231.600	100	96.14		33.231.600	100	7.38		
3285.	9.01.02.7.04.0005	Pelatihan Takmir Mesjid Terlaksananya Pelatihan Takmir Mesjid	Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan (Orang)	104	453.160.939	0		100		0		0	0	0		0	0		
3286.	9.01.02.7.04.0006	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam Terlaksananya Cerdas Cermat Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Cerdas Cermat Syariat Islam (Orang)	80	380.000.000	0		100	42.434.000	100	26.990.500	100	63.61		26.990.500	125	7.1		
3287.	9.01.02.7.04.0007	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat Terbinanya Gampong Percontohan Syariat	Jumlah Gampong Percontohan Syariat yang Dibina (Gampong)	5	580.000.000	0		5		0		0	0	0		0	0		
3288.	9.01.02.7.04.0008	Pengiriman Khatib Jum"at Ke Gampong Terlaksananya Pengiriman Khatib Jum"at ke Kabupaten/Kota	Jumlah Khatib Jum"at yang Dikirim ke Kabupaten/Kota (Orang)	15	150.000.000	0		15		0		0	0	0		0	0		
3289.	9.01.02.7.04.0009	Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/ Mushalla Terlaksananya Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla	Jumlah Laporan Masjid/Meunasah/Mushalla yang Menyelenggarakan Ceramah Bulan Suci Ramadhan (Laporan)	1	48.000.000	0		3		0		0	0	0		0	0		
3290.	9.01.02.7.04.0010	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong Terselenggaranya Pengajian di Gampong	Jumlah Laporan Gampong yang Menyelenggarakan Ceramah (Laporan)	1	40.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
3291.	9.01.02.7.04.0011	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan Terlaksananya Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi (Unit)	10	415.000.000	0		9	119.911.366	9	11.860.309	100	9.89		11.860.309	90	2.86		
3292.	9.01.02.7.04.0012	Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	Jumlah Unit Rumah Ibadah dan Harta Agama yang Didata dan Dinvertarisir (Dokumen)	1	295.000.000	0		5		0		0	0	0		0	0		
3293.	9.01.02.7.04.0013	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunanannya (Unit)	10	330.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
3294.	9.01.02.7.05	Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam Tersedianya Laporan Pengkajian Pengembangan dan			7.799.490.900			938.767.181	46.630.216	25	4.97			46.630.216	29.23	0.6			
3295.	9.01.02.7.05.0001	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman Terlaksananya Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman (Laporan)	1	573.000.000	0		1	21.897.879	1	21.840.088	100	99.74		21.840.088	100	3.81		
3296.	9.01.02.7.05.0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam (Laporan)	1	200.000.000	0		1		0		0	0	0		0	0		
3297.	9.01.02.7.05.0003	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/ Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Imeum Masjid/Meunasah yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam (Orang)	52	200.000.000	0		100	24.790.462	100	24.790.128	100	100		24.790.128	192.31	12.4		
3298.	9.01.02.7.05.0004	Pembinaan Keluarga Islami Terbinanya Keluarga Islami	Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan (Keluarga)	50	380.000.000	0		85		0		0	0	0		0	0		
3299.	9.01.02.7.05.0005	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah Terbinanya Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Jumlah Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah yang Dibina (Pelaku Ekonomi)	50	350.000.000	0		0		0		0	0	0		0	0		
3300.	9.01.02.7.05.0006	Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat Terlaksananya Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat (Orang)	68	475.000.000	0		80		0		0	0	0		0	0		
3301.	9.01.02.7.05.0007	Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla Terlaksananya Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla (Orang)	25	4.886.490.900	0		65	892.078.840	0		0	0	0		0	0		
3302.	9.01.02.7.05.0008	Pembinaan Qari Qariah Terlaksananya Pembinaan Qari Qariah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Qari Qariah (Orang)	30	314.000.000	0		100		0		0	0	0		0	0		
3303.	9.01.02.7.05.0009	Pembinaan Hafizh Hafizhah Terlaksananya Pembinaan Hafizh Hafizhah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Hafizh Hafizhah (Orang)	25	221.000.000	0		100		0		0	0	0		0	0		
3304.	9.01.02.7.05.0010	Pemberian Beasiswa bagi Qari/Hafidz			200.000.000							0	0			0	0		

 Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027																			
No	Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Sub Kegiatan/ Kinerja	Indikator	Target RPJMD pada Tahun 2029 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (Tahun 2024)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggungjawab	Ket
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5 x 100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	%		
		Terlaksananya Pemberian Beasiswa bagi Qari/Hafidz	Jumlah Beasiswa bagi Qari/Hafidz yang Diberikan (Beasiswa)	10		0		0		0		0	0	0		0	0		
3305.	9.01.02.7.06	Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam			4.878.347.270		-		451.263.872		450.570.040	11.11	99.85		450.570.040	2.22	9.24		
		Terlaksananya Penguatan, Pengembangan,										0	0			0	0		
3306.	9.01.02.7.06.0001	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam			140.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Regulasi Syariat Islam (Laporan)	2		0		2		0		0	0	0		0	0		
3307.	9.01.02.7.06.0002	Bimbingan Teknis Peradilan Islam			200.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peradilan Islam (Orang)	55		0		60		0		0	0	0		0	0		
3308.	9.01.02.7.06.0003	Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin			100.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	Jumlah Korban Konflik dan Masyarakat Miskin yang Mengajukan Isbat Nikah (Orang)	30		0		85		0		0	0	0		0	0		
3309.	9.01.02.7.06.0004	Workshop dan FGD Perkara Syariah			250.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Workshop dan FGD Perkara Syariah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Workshop dan FGD Perkara Syariah (Orang)	55		0		85		0		0	0	0		0	0		
3310.	9.01.02.7.06.0005	Penyusunan Regulasi Syariat Islam			200.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Tersusunnya Regulasi Syariat Islam	Jumlah Regulasi Syariat Islam yang Disusun (Dokumen)	2		0		2		0		0	0	0		0	0		
3311.	9.01.02.7.06.0006	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam			257.500.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam (Laporan)	5		0		5		0		0	0	0		0	0		
3312.	9.01.02.7.06.0007	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam			1.635.409.540		-		188.573.980		188.115.950	100	99.76		188.115.950	20	11.5		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam (Laporan)	30		0		6		6		100	0	6		20	0		
3313.	9.01.02.7.06.0008	Penyelenggaraan Rukyatul Hilal			80.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyelenggaraan Rukyatul Hilal (Orang)	20		0		10		0		0	0	0		0	0		
3314.	9.01.02.7.06.0009	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah			2.015.437.730		-		262.689.892		262.454.090	0	99.91		262.454.090	0	13.02		
		Terlaksananya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah (Orang)	400		0		250		0		0	0	0		0	0		
3315.	9.01.02.7.07	Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah			2.094.250.100		-		80.000.000		44.800.000	20	56		44.800.000	4	2.14		
		Terselenggaranya Peribadatan dan Pengembangan										0	0			0	0		
3316.	9.01.02.7.07.0001	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah			480.000.000		-		80.000.000		44.800.000	100	56		44.800.000	20	9.33		
		Terbinanya Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman (Lembaga)	10		0		2		2		100	0	2		20	0		
3317.	9.01.02.7.07.0002	Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah			220.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah (Orang)	15		0		35		0		0	0	0		0	0		
3318.	9.01.02.7.07.0003	Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah			380.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah (Orang)	200		0		150		0		0	0	0		0	0		
3319.	9.01.02.7.07.0004	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah			200.000.000		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah	Jumlah Tutor yang Mengikuti Pelatihan Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah (Orang)	40		0		20		0		0	0	0		0	0		
3320.	9.01.02.7.07.0005	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah			814.250.100		-		-		-	0	0		-	0	0		
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala (Unit)	7		0		1		0		0	0	0		0	0		
												0	0			0	0		
			JUMLAH		4,018,156,453,465		0		837,447,857,637		725,785,889,936	124.73	86.67		725,785,889,936	168.45	18.06		
			Rata-rata capaian kinerja (%)																
			Predikat kinerja									Sangat tinggi	Tinggi			Sangat tinggi	Sangat Rendah		

2.3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Kota Lhokseumawe

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu-isu strategis merupakan tahapan fundamental dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tahapan ini menjadi dasar untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan dengan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program prioritas pembangunan daerah.

Isu strategis Pembangunan Kota Lhokseumawe merupakan kristalisasi dari berbagai permasalahan pembangunan daerah yang diidentifikasi melalui analisis kondisi eksisting (existing condition), evaluasi capaian pembangunan periode sebelumnya, serta telaah terhadap dinamika dan isu strategis pada tataran global, nasional, dan regional. Dengan demikian, isu strategis tidak hanya mencerminkan kebutuhan internal daerah, tetapi juga respons terhadap tantangan eksternal yang berkembang.

Dalam konteks RKPK Tahun 2027, analisis isu-isu strategis menjadi salah satu bagian terpenting karena berfungsi sebagai pijakan utama dalam penentuan tema pembangunan tahunan dan perumusan program prioritas. Adapun tema pembangunan yang menjadi fokus pada tahun 2027 sesuai, yaitu “Peningkatan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Publik, dan Ruang Publik Yang Berkualitas Guna Mendukung Produktivitas, Investasi, dan Pengembangan Industri Daerah”, menjadi landasan dalam merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Tahun 2027.

Sejalan dengan itu, RKPK Tahun 2027 juga mengintegrasikan agenda rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir Aceh Tahun 2025, yang berdampak terhadap infrastruktur dasar, fasilitas publik, kawasan permukiman, serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi diarahkan tidak hanya pada pemulihan kondisi fisik, tetapi juga pada penguatan ketahanan infrastruktur, peningkatan sistem mitigasi bencana, serta pembangunan lingkungan yang lebih aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Melalui pendekatan tersebut, RKPK Tahun 2027 diharapkan mampu menjawab permasalahan mendasar pembangunan, memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan kenyamanan dan keamanan lingkungan perkotaan, serta mendorong terciptanya ruang-ruang publik yang inklusif dan produktif bagi seluruh masyarakat.

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan sebelumnya. Pembangunan di Kota Lhokseumawe masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang harus diupayakan untuk diselesaikan, diantaranya :

2.3.1.1. Belum Optimalnya Implementasi Keistimewaan Aceh

1) Fokus Seni Budaya

Kota Lhokseumawe memiliki 22 situs cagar budaya yang tersebar di 4 (empat) kecamatan) situs cagar budaya tersebut terdiri dari dua jenis yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak



- benda, namun keseluruhan situs cagar budaya di Kota Lhokseumawe belum ada satupun yang terlegalisasi
- 2) Kebudayaan
Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe sebanyak 22 unit situs belum terlegalisasi secara hukum atau belum ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.
 - 3) Pembangunan Syariah
Berdasarkan data pembangunan Kota Lhokseumawe, Indeks Pembangunan Syariah turun dari 83,91 pada 2024 menjadi 80,11 pada 2025, terutama dimensi Melek Al-Quran yang menurun drastis dari 84,56 menjadi 73,33. Selain itu, dimensi Lembaga Keuangan Syariah dan Kepatuhan membayar zakat di Baitul Mal juga mengalami penurunan masing-masing menjadi 81,23 dan 81,41. Penurunan ini mencerminkan perlunya perhatian pada penguatan literasi Al-Quran, ketahanan keluarga, dan pembinaan sosial
 - 4) Baitul Mal
Pendapatan Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) pada tahun 2024 sejumlah Rp. 7.296.324.646,79 dan pada tahun 2025 adalah Rp. 4.607.658.256. Penurunan pendapatan Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) sebesar 36,65% pada tahun 2025 merupakan kondisi yang cukup signifikan dan perlu segera ditindaklanjuti dengan langkah strategis dengan membangun database muzakki potensial di luar ASN, lalu lakukan pendekatan yang lebih personal dan berkelanjutan.

2.3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Masih berada di bawah rata-rata Aceh dan Nasional

- 1) Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe pada periode 2024–2025 masih menunjukkan kinerja yang berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe tercatat sebesar 4,46 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh mencapai 4,66 persen. Selanjutnya pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 3,39 persen, sementara pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh meningkat menjadi 4,46 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe masih memerlukan upaya peningkatan melalui penguatan sektor ekonomi produktif, peningkatan investasi, serta pengembangan usaha masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih optimal.
- 2) Rasio pajak terhadap PDRB Kota Lhokseumawe
Rasio pajak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe pada periode 2024–2025 menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024, tax ratio tercatat sebesar 0,73, kemudian meningkat menjadi 0,81 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam kinerja penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB.



Meskipun mengalami peningkatan, tingkat tax ratio Kota Lhokseumawe masih tergolong rendah sehingga kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian daerah belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan efektivitas pemungutan pajak, perluasan basis pajak, penguatan pengawasan, serta optimalisasi potensi pendapatan daerah guna meningkatkan kontribusi pajak terhadap PDRB dan mendukung kemandirian fiskal daerah.

3) Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kota Lhokseumawe tahun 2024 Rp.59,12 juta dan tahun 2025 tercatat sebesar Rp.62,538 juta. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan PDRB per kapita Provinsi Aceh yang sebesar Rp45,77 juta. Namun demikian, capaian PDRB per kapita Kota Lhokseumawe masih berada di bawah rata-rata PDRB per kapita nasional yang mencapai Rp83,7 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pendapatan per kapita masyarakat Kota Lhokseumawe relatif lebih baik dibandingkan rata-rata Provinsi Aceh, namun masih terdapat kesenjangan apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional.

4) Laju Inflasi

Inflasi Kota Lhokseumawe di tahun 2024 2,79 % dan pada tahun 2025 sebesar 5,56 % lebih rendah dibandingkan inflasi Aceh yaitu 6,71% dan lebih tinggi dari inflasi nasional 2,92%. kelompok pengeluaran yang menyumbang inflasi tertinggi adalah pada kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yaitu dengan nilai Inflasi sebesar 5,16 persen dengan andil inflasi sebesar 1,84 persen .

5) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Lhokseumawe pada periode 2024–2025 menunjukkan tren yang menurun. Pada tahun 2024, TPT Kota Lhokseumawe tercatat sebesar 8,47 persen, kemudian menurun menjadi 8,24 persen pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Lhokseumawe.

Meskipun demikian, tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe masih relatif tinggi dibandingkan dengan Provinsi Aceh yang mencatat TPT sebesar 5,60 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesempatan kerja masih perlu terus dilakukan melalui pengembangan investasi, penguatan sektor usaha produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan program pelatihan dan penempatan tenaga kerja guna menekan angka pengangguran secara berkelanjutan.

6) Indeks Gini

Indeks Gini Kota Lhokseumawe pada periode 2024–2025 menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan. Pada tahun 2024, Indeks Gini tercatat sebesar 0,326 dan meningkat menjadi 0,344 pada tahun 2025. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan Indeks Gini Provinsi Aceh yang sebesar 0,274. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Lhokseumawe masih perlu mendapat perhatian melalui pemerataan kesempatan ekonomi, peningkatan pendapatan



masyarakat, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi yang inklusif.

7) Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe pada periode 2024–2025 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 10,44 persen, kemudian menurun menjadi 9,01 persen pada tahun 2025 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 19.900 jiwa. Meskipun lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Provinsi Aceh yang mencapai 12,33 persen pada tahun 2025, angka kemiskinan Kota Lhokseumawe masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional sebesar 8,57 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan dalam pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kesempatan kerja, penguatan ekonomi masyarakat, dan perluasan program perlindungan sosial.

8) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau PoU Kota Lhokseumawe

Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau Prevalence of Undernourishment (PoU) Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,16 persen. Angka ini masih berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh yang mencapai 8,60 persen, yang menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan masyarakat Kota Lhokseumawe relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi. Sementara itu pada tahun 2024, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Lhokseumawe tercatat sebesar 7,86 persen. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Aceh yang sebesar 9,10 persen maupun rata-rata nasional yang mencapai 8,27 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan di Kota Lhokseumawe masih berada pada tingkat yang relatif terkendali.

9) Ekspor Barang dan Jasa

Nilai ekspor barang dan jasa Kota Lhokseumawe pada periode 2024–2025 menunjukkan perlambatan kinerja. Pada tahun 2024, ekspor masih mencatat pertumbuhan positif, namun pada tahun 2025 kembali mengalami kontraksi sebesar 19,54 juta rupiah atau -0,23 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor daerah masih menghadapi tantangan sehingga diperlukan upaya peningkatan daya saing produk, diversifikasi pasar, serta penguatan sektor-sektor unggulan yang berorientasi ekspor guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

10) Kunjungan Wisata

Jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 tercatat sebanyak 310.030 orang. Angka ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 309.092 orang. Meskipun demikian, jumlah kunjungan tersebut masih belum melampaui capaian pada tahun 2023 yang mencapai 321.499 orang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kota Lhokseumawe masih memerlukan perhatian dan upaya



pengembangan yang lebih optimal. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu terus mendorong peningkatan daya tarik pariwisata melalui pengembangan dan penataan objek wisata, peningkatan fasilitas pendukung, serta promosi pariwisata yang lebih intensif guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

11) Perdagangan

Nilai ekspor neto perdagangan Kota Lhokseumawe pada periode 2024–2025 menunjukkan penurunan kinerja. Pada tahun 2024, ekspor neto masih mencatat nilai positif sebesar 34,51 juta rupiah atau tumbuh 0,42 persen, yang menunjukkan bahwa nilai ekspor masih lebih tinggi dibandingkan impor. Namun, pada tahun 2025 ekspor neto kembali mengalami kontraksi menjadi -19,54 juta rupiah atau -0,23 persen, yang mengindikasikan bahwa nilai impor telah melampaui nilai ekspor. Kondisi ini menunjukkan bahwa neraca perdagangan Kota Lhokseumawe masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara ekspor dan impor serta memperkuat daya saing sektor perdagangan daerah.

12) Pendapatan sektor perdagangan dari penerimaan retribusi daerah Kota Lhokseumawe pada periode 2024–2025 menunjukkan peningkatan. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2024, realisasi retribusi kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi Rp. 2.803.341.402. Retribusi pelayanan pasar tetap menjadi kontributor terbesar terhadap penerimaan retribusi sektor perdagangan, diikuti oleh retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa jenis retribusi yang belum optimal, sehingga diperlukan upaya peningkatan pengelolaan dan pengawasan guna mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor perdagangan.

13) Perindustrian

Jumlah kelompok pengrajin yang mendapat pembinaan di Kota Lhokseumawe pada periode 2024–2025 menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024, kelompok pengrajin yang dibina sebanyak 37 kelompok atau 33,94 persen, kemudian meningkat pada tahun 2025 menjadi 40 kelompok dari total 90 kelompok pengrajin atau sebesar 44,44 persen. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan pengrajin oleh pemerintah daerah. Meskipun demikian, cakupan pembinaan masih perlu terus ditingkatkan guna memperkuat kapasitas, daya saing, dan produktivitas sektor kerajinan daerah.

14) Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kota Lhokseumawe pada periode 2024–2025 menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2024, total produksi perikanan tercatat sebesar 14.974,65 ton, kemudian menurun cukup signifikan menjadi 12.048,05 ton pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa sektor perikanan masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian, antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana perikanan, penguatan kapasitas nelayan dan pembudidaya, serta pengelolaan sumber daya perikanan yang



- lebih optimal guna meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan daerah.
- 15) Rasio PDRB Industri Pengolahan
Rasio PDRB sektor industri pengolahan dalam struktur perekonomian Kota Lhokseumawe pada periode 2024–2025 menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2024, kontribusi sektor industri pengolahan tercatat sebesar 16,70 persen dan kembali menurun menjadi 15,73 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah cenderung melemah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sektor industri melalui peningkatan investasi, pengembangan kawasan industri, serta peningkatan daya saing dan produktivitas industri guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- 16) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Lhokseumawe pada periode 2024–2025 menunjukkan sedikit penurunan. Pada tahun 2024, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tercatat sebesar 50,25 persen, kemudian menurun menjadi 49,98 persen pada tahun 2025. Meskipun mengalami penurunan, tingkat partisipasi tersebut masih menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang cukup besar dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap kesempatan kerja, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi guna memperkuat kontribusinya dalam pembangunan daerah.
- 17) Jumlah koperasi aktif di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 tercatat sebanyak 130 unit dari total 335 koperasi yang terdaftar, atau sebesar 38,80 persen. Pada tahun 2025, jumlah koperasi aktif meningkat menjadi 149 unit dari total 295 koperasi yang terdaftar, atau sebesar 50,51 persen.
Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan tingkat keaktifan koperasi di Kota Lhokseumawe. Meskipun demikian, upaya pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan aktivitas usaha serta meningkatkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah.
- 18) Capaian pelayanan perizinan di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 menunjukkan bahwa izin yang diterbitkan sebanyak 3.914 izin dari total 4.249 pengajuan, atau sebesar 92,11 persen. Pada tahun 2025, kinerja pelayanan perizinan meningkat dengan jumlah izin yang diterbitkan mencapai 3.374 izin dari 3.422 pengajuan, atau sebesar 98,59 persen.
Secara umum, capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perizinan di Kota Lhokseumawe telah berjalan dengan baik dan mampu mempertahankan tingkat penerbitan izin yang tinggi. Peningkatan persentase penerbitan izin pada tahun 2025 mencerminkan semakin efektif dan efisiennya proses pelayanan perizinan kepada masyarakat dan pelaku usaha.



2.3.1.3. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kota Lhokseumawe Belum Optimal

- 1) Angka Literasi/Numerasi
Kompetensi literasi dan numerasi peserta didik di Kota Lhokseumawe masih berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2025, capaian literasi SD sebesar 53,39 persen dan numerasi SD sebesar 44,77 persen, sedangkan rata-rata nasional masing-masing mencapai 71,81 persen dan 69,58 persen. Pada jenjang SMP, capaian literasi sebesar 68,95 persen dan numerasi sebesar 60,49 persen, juga masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 72,07 persen dan 69,61 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kualitas pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.
- 2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 tercatat sebesar 58,41 dan berada dalam kategori sedang. Pada tahun 2025, IPLM mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 16,77. Jika dibandingkan dengan capaian tingkat provinsi dan nasional pada tahun 2025, IPLM Kota Lhokseumawe berada di bawah rata-rata IPLM Provinsi Aceh yang mencapai 45,29 dan nasional sebesar 75,90. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan program literasi masyarakat melalui peningkatan akses bahan bacaan, pemanfaatan perpustakaan, serta pengembangan budaya literasi di berbagai lapisan masyarakat.
- 3) Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan perkembangan yang bervariasi pada setiap jenjang pendidikan. Pada jenjang SD/MI, APM meningkat dari tahun sebelumnya hingga mencapai 93,42 persen pada tahun 2025. Sementara itu, APM SMP/MTs mengalami penurunan dan tercatat sebesar 81,57 persen pada tahun 2025. Pada jenjang SMA, APM juga mengalami penurunan dan berada pada angka 67,27 persen pada tahun 2025. Secara umum, APM pada jenjang pendidikan dasar menunjukkan kondisi yang relatif baik, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah masih diperlukan upaya peningkatan untuk mendorong keberlanjutan pendidikan dan menekan angka putus sekolah.
- 4) Angka Partisipasi Kasar (APK)
Pada tahun 2024 dan 2025, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP/MTs di Kota Lhokseumawe menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada tahun 2025 setelah mengalami penurunan pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mengurangi minat peserta didik dari luar daerah untuk bersekolah di Kota Lhokseumawe. Sementara itu, APK jenjang SMA pada tahun 2024 dan 2025 mengalami penurunan hingga mencapai 89,72 persen pada tahun 2025. Meskipun demikian, angka tersebut masih menunjukkan



tingkat partisipasi pendidikan menengah yang cukup baik, sehingga perlu terus didukung melalui berbagai program peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

5) Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,367 dan masih berada dalam kategori keluarga tidak sehat karena nilainya berada di bawah 0,500. Pada tahun 2025, capaian IKS tidak mengalami perubahan atau tetap berada pada angka 0,367. Jika dibandingkan dengan Indeks Keluarga Sehat Nasional tahun 2025 yang mencapai 0,77, capaian Kota Lhokseumawe masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan intervensi kesehatan keluarga untuk mendukung terwujudnya keluarga yang lebih sehat dan mandiri.

6) Jumlah Penduduk dan Kepadatan penduduk

Jumlah penduduk Kota Lhokseumawe terus mengalami peningkatan dalam periode 2024–2025. Pada tahun 2024 jumlah penduduk tercatat sebanyak 198.705 jiwa dan meningkat menjadi 200.876 jiwa pada tahun 2025.

Sejalan dengan itu, tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan, dengan kepadatan mencapai 1.109 jiwa/km² pada tahun 2025. Kecamatan Banda Sakti menjadi wilayah dengan kepadatan tertinggi sebesar 7.219 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Blang Mangat memiliki kepadatan terendah sebesar 522 jiwa/km². Peningkatan jumlah dan kepadatan penduduk perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, infrastruktur, dan sumber daya manusia guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

7) Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 tercatat sebesar 20,80 persen, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Aceh yang mencapai 28,60 persen, namun sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 19,80 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanganan stunting telah memberikan hasil yang positif, meskipun masih diperlukan langkah-langkah lanjutan untuk menurunkan prevalensi stunting hingga berada di bawah rata-rata nasional.

8) Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian balita per 1.000 kelahiran hidup di Kota Lhokseumawe mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2024 angka kematian balita mencapai 8,6 per 1.000 kelahiran hidup dengan 31 kasus kematian, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 12,72 per 1.000 kelahiran hidup dengan 42 kasus kematian. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan upaya pencegahan kematian balita.

9) Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rasio rumah sakit per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung stabil. Pada tahun 2021 terdapat 10 rumah sakit AD/swasta dengan rincian 1 rumah sakit AD/AU/AL/Polri dan 9 rumah sakit swasta. Kemudian sampai dengan tahun 2025, jumlah rumah sakit tetap,



dan rasio rumah sakit di Kota Lhokseumawe tahun 2021 sebesar 0.053 kemudian tahun 2025 sebesar 0,050 hanya di pengaruhi oleh bertambahnya penduduk. Hal ini berarti bahwa untuk setiap 1.000 penduduk dilayani 0,05 rumah sakit, atau dalam 100.000 penduduk tersedia 5 (lima) rumah sakit

10) Angka Kematian Ibu (AKI)

Pada tahun 2024, Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Lhokseumawe mencapai titik terendah sebesar 27,96 per 100.000 kelahiran hidup. Namun, pada tahun 2025 AKI kembali meningkat menjadi 181,71 per 100.000 kelahiran hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penurunan AKI masih perlu diperkuat melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan yang aman, serta edukasi kesehatan reproduksi dan pemanfaatan layanan antenatal secara optimal.

11) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe meningkat dari 0,40 pada tahun 2024 menjadi 0,46 pada tahun 2025. Dengan jumlah dokter sebanyak 91 orang dan jumlah penduduk 200.876 jiwa, setiap dokter melayani sekitar 2.183 penduduk. Meskipun mengalami peningkatan, ketersediaan dokter masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat secara optimal.

12) Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Rasio tenaga kesehatan per satuan penduduk pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,10 per 1.000 penduduk dan meningkat menjadi 4,65 per 1.000 penduduk pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan semakin baiknya ketersediaan tenaga kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

13) Cakupan penemuan dan penanganan penderita Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk.

Pada tahun 2024, Non Polio AFP Rate di Kota Lhokseumawe tercatat sebesar 3,42 per 100.000 penduduk dan meningkat menjadi 3,78 per 100.000 penduduk pada tahun 2025 dengan jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 2 kasus. Capaian tersebut telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan, yaitu sebesar 3 per 100.000 penduduk, serta menunjukkan sistem surveilans dan kewaspadaan dini terhadap polio yang berjalan dengan baik.

14) Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani

Cakupan balita pneumonia yang ditangani di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 mencapai 12,50 persen dengan jumlah kasus yang ditangani sebanyak 122 balita. Tingginya capaian tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan skrining di wilayah kerja yang meningkatkan penemuan kasus pneumonia pada balita sehingga dapat segera ditangani.

Pada tahun 2025, cakupan balita pneumonia yang ditangani menurun menjadi 1,21 persen dengan jumlah kasus yang ditangani sebanyak 11 balita. Penurunan jumlah kasus yang ditemukan dan ditangani ini menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya penanganan pneumonia balita terus dilakukan melalui program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), pembaruan tata laksana



- pneumonia, validasi data, serta peningkatan koordinasi dengan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- 15) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Cakupan penemuan dan penanganan penderita Tuberkulosis (TBC) BTA di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 mencapai 145,40 persen, menunjukkan tingginya keberhasilan dalam upaya penemuan dan penanganan kasus TBC. Namun, pada tahun 2025 capaian tersebut menurun menjadi 100 persen. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 masih menunjukkan bahwa seluruh target penemuan dan penanganan kasus TBC dapat terpenuhi. Kondisi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan dalam pengendalian TBC, meskipun diperlukan penguatan upaya deteksi dini, pelacakan kontak, dan kepatuhan pengobatan agar capaian dapat terus dipertahankan secara berkelanjutan.
- 16) Tingkat Kematian Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)
Tingkat kematian akibat tuberkulosis (TBC) di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 mencapai 9,05 per 100.000 penduduk dengan jumlah pasien meninggal sebanyak 18 orang. Pada tahun 2025 angka tersebut menurun menjadi 4,53 per 100.000 penduduk dengan jumlah kematian sebanyak 9 orang. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pengendalian TBC, meskipun penguatan deteksi dini, pengobatan, dan pemantauan pasien masih perlu terus ditingkatkan.
- 17) Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi
Pada tahun 2024 prevalensi HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe tercatat sebesar 0,013 persen dengan jumlah pasien sebanyak 27 orang. Pada tahun 2025 jumlah pasien meningkat menjadi 32 orang dengan prevalensi sebesar 0,016 persen. Meskipun prevalensinya masih tergolong sangat rendah, peningkatan jumlah kasus menunjukkan perlunya penguatan edukasi, pencegahan, deteksi dini, dan layanan penanganan HIV/AIDS secara berkelanjutan.
- 18) Cakupan Kunjungan Bayi
Cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 mencapai 59,06 persen. Pada tahun 2025 capaian ini meningkat sangat signifikan hingga mencapai 100 persen. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin optimalnya pelayanan kesehatan bayi melalui dukungan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta program kesehatan ibu dan anak.
- 19) Cakupan Pelayanan Nifas
Cakupan pelayanan nifas pada tahun 2024 tercatat sebesar 80,30 persen dan kembali menurun menjadi 79,61 persen pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan nifas masih belum mencapai target optimal, sehingga diperlukan peningkatan akses pelayanan, penguatan peran tenaga kesehatan, dan peningkatan kesadaran ibu untuk melakukan kunjungan nifas sesuai standar pelayanan.



- 20) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 sebesar 19,02 persen dan meningkat sedikit menjadi 19,92 persen pada tahun 2025. Meskipun terjadi peningkatan, capaian tersebut masih relatif rendah sehingga diperlukan penguatan deteksi dini, sistem rujukan, serta peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan neonatal agar seluruh neonatus dengan komplikasi dapat memperoleh penanganan yang optimal.
- 21) Cakupan Pelayanan Anak Balita
Cakupan pelayanan anak balita di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 tercatat sebesar 72,57 persen. Pada tahun 2025 capaian tersebut meningkat menjadi 89,20 persen. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan balita, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencapai target optimal sebesar 100 persen melalui penguatan pelayanan posyandu, SDIDTK, dan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).
- 22) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan
Pada tahun 2024, sebagian besar indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan masih belum mencapai target 100 persen. Namun, pada tahun 2025 terjadi perbaikan capaian, dimana beberapa indikator telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan kesehatan dasar, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memenuhi seluruh indikator SPM secara optimal.
- 23) Indeks Pembangunan Keluarga (iBAngga)
Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) Kota Lhokseumawe meningkat dari 65,86 pada tahun 2024 menjadi 72,50 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pembangunan keluarga yang mencakup aspek ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Capaian tersebut mencerminkan semakin baiknya kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kota Lhokseumawe.
- 24) Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Pada tahun 2024, Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Lhokseumawe mencapai 71,63, lebih tinggi dibandingkan IPA Provinsi Aceh sebesar 71,02 dan IPA Nasional sebesar 71,40. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas perlindungan anak di Kota Lhokseumawe berada pada tingkat yang cukup baik. Namun demikian, masih diperlukan penguatan kebijakan dan program perlindungan anak secara berkelanjutan agar capaian tersebut terus meningkat menuju nilai ideal.
- 25) Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Rasio KDRT di Kota Lhokseumawe meningkat dari 0,049 persen pada tahun 2024 menjadi 0,059 persen pada tahun 2025. Jumlah kasus KDRT juga meningkat dari 23 kasus menjadi 28 kasus, seiring dengan bertambahnya jumlah rumah tangga dari 46.315 menjadi 47.301 rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diperlukan penguatan upaya pencegahan, perlindungan



- korban, edukasi masyarakat, serta peningkatan layanan penanganan kasus KDRT.
- 26) Indeks Pemberdayaan Gender
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 mencapai 68,86, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 65,70. Capaian tersebut berada di atas rata-rata Provinsi Aceh yang sebesar 61,78, namun masih di bawah rata-rata nasional yang mencapai 77,62. Peningkatan nilai IDG menunjukkan adanya kemajuan dalam pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di Kota Lhokseumawe, terutama dalam aspek partisipasi perempuan pada bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Hal ini juga tercermin dari keterwakilan perempuan di DPRK Kota Lhokseumawe yang mencapai 7 orang atau sekitar 28 persen dari total anggota legislatif pada tahun 2024. Meskipun demikian, upaya peningkatan peran dan partisipasi perempuan masih perlu terus diperkuat untuk mengurangi kesenjangan dengan capaian nasional.
- 27) Angka Ketergantungan
Rasio ketergantungan (dependency ratio) Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 tercatat sebesar 46,45 persen dan menurun menjadi 46,25 persen pada tahun 2025. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15–64 tahun) menanggung sekitar 46 penduduk usia non-produktif (0–14 tahun dan ≥65 tahun). Penurunan rasio ketergantungan pada tahun 2025 mengindikasikan adanya perbaikan struktur penduduk, dimana proporsi penduduk usia produktif relatif lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif. Kondisi ini memberikan peluang bagi Kota Lhokseumawe untuk memanfaatkan bonus demografi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas ekonomi guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- 28) PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial
Pada tahun 2024 dan 2025, cakupan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial di Kota Lhokseumawe telah mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh PPKS yang menjadi sasaran program telah menerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.
- 29) Partisipasi angkatan kerja perempuan
Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 tercatat sebesar 50,25 persen dan sedikit menurun menjadi 49,98 persen pada tahun 2025. Meskipun mengalami penurunan, angka tersebut menunjukkan bahwa hampir separuh perempuan usia kerja berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Kondisi ini mencerminkan peran perempuan yang cukup signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.
- 30) Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu.



Pada tahun 2024 terdapat 72 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan, sedangkan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 70 kasus. Seluruh kasus yang dilaporkan pada kedua tahun tersebut telah mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih dengan cakupan penanganan mencapai 100 persen. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan layanan kepada korban kekerasan.

31) Kepemudaan dan Olahraga

A. Cakupan Pembinaan Olahraga

Cakupan pembinaan olahraga di Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 mencapai 97,78 persen, dengan 44 cabang olahraga yang dibina dari total 45 cabang olahraga yang terdaftar. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 77,77 persen atau 35 cabang olahraga yang dibina. Meskipun menunjukkan perbaikan yang sangat baik, masih diperlukan upaya untuk memastikan seluruh cabang olahraga yang terdaftar memperoleh pembinaan secara optimal guna mendukung peningkatan prestasi olahraga daerah.

B. Cakupan Pelatih yang bersertifikasi

Di Kota Lhokseumawe pelatih yang bersertifikat di tahun 2024 yaitu sebesar 58,3 persen dan pada tahun 2025 masih stagnan di angka 58,3.

2.3.1.4. Masih Belum Optimalnya Transformasi Tata Kelola Pemerintahan

1) Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang cukup baik dengan nilai 67,12 dan memperoleh predikat B. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Pada tahun 2025, nilai IRB tercatat sebesar 61,76. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut masih menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi terus berjalan. Perubahan metode evaluasi yang menekankan aspek reformasi birokrasi tematik turut mempengaruhi hasil penilaian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata bagi masyarakat guna meningkatkan capaian IRB pada periode selanjutnya.

2) Indeks Inovasi Daerah (IID) Kota Lhokseumawe

Indeks Inovasi Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 mencapai 43,66, namun menurun menjadi 29,68 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas inovasi perangkat daerah serta penguatan keberlanjutan inovasi untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.



- 3) Indeks Integritas Nasional
Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Lhokseumawe meningkat dari 64,37 pada tahun 2024 menjadi 74,31 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan tingkat integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, capaian tersebut masih berada pada kategori waspada sehingga diperlukan penguatan pengawasan, transparansi, akuntabilitas, serta budaya integritas guna meminimalkan risiko praktik korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
- 4) Perencanaan Pembangunan
a) Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD
Tingkat konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD Kota Lhokseumawe meningkat dari 93,01 persen pada tahun 2024 menjadi 95,60 persen pada tahun 2025. Dari 182 program yang direncanakan dalam RPJMD, sebanyak 174 program telah terakomodasi dalam RKPD Tahun 2025, sehingga masih terdapat 8 program yang belum dilaksanakan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program RPJMD telah diterjemahkan ke dalam RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan. Namun demikian, masih diperlukan penguatan sinkronisasi antara dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan agar seluruh program prioritas dapat diakomodasi secara optimal dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Tabel 2.221.

Daftar Program yang Mengalami Inkonsistensi antara
RPJMD dan RKPD Tahun 2025

No	Nama Program dalam RPJMD	Tercantum dalam RKPD	Perangkat Daerah	Keterangan
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tidak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program RPJMD tidak diakomodasi dalam RKPD
2	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Tidak	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program RPJMD tidak diakomodasi dalam RKPD
3	PROGRAM PENATAAN DESA	Tidak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Program RPJMD tidak diakomodasi dalam RKPD
4	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Tidak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Program RPJMD tidak diakomodasi dalam RKPD
5	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Tidak	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Program RPJMD tidak diakomodasi dalam RKPD
6	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tidak	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Program RPJMD tidak diakomodasi dalam RKPD



No	Nama Program dalam RPJMD	Tercantum dalam RKPD	Perangkat Daerah	Keterangan
7	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tidak	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program RPJMD tidak diakomodasi dalam RKPD
8	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tidak	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	Program RPJMD tidak diakomodasi dalam RKPD

Sumber : Bappeda Lhokseumawe, 2026

- 5) Keuangan
- a) Indeks Kapasitas Fiskal
Indeks Kapasitas Fiskal Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 sebesar 0,974 dan menurun menjadi 0,117 pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih berada pada kategori rendah, sehingga diperlukan upaya peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan daerah dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan yang lebih efektif.
 - b) Rasio Pajak Daerah
Rasio pajak Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 sebesar 0,73 persen, yang menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB masih relatif rendah. Kondisi ini mengindikasikan perlunya optimalisasi pendapatan asli daerah melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penguatan pengelolaan pendapatan daerah.
 - c) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 mencapai 67,55 dengan predikat B. Meskipun menunjukkan kinerja yang cukup baik, nilai tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional sehingga diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, terutama pada aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
- 6) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
- a.) Persentase pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2025 sebesar 4,5 persen, menurun dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 7,2 persen. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pengembangan kompetensi ASN melalui pelatihan struktural guna mendukung peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur.
 - b.) Jumlah pemangku Jabatan Fungsional Tertentu di Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 mencapai 1.678 orang, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 912 orang. Peningkatan ini menunjukkan penguatan jabatan fungsional sebagai bagian dari transformasi manajemen ASN berbasis kompetensi dan kinerja.



- c.) Indeks Profesionalitas ASN Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 mencapai 79,42 dengan kategori sedang. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan profesionalitas aparatur, namun masih diperlukan penguatan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja ASN untuk mencapai kategori yang lebih tinggi.
 - d.) Penilaian penerapan Sistem Merit di Kota Lhokseumawe
Nilai penerapan Sistem Merit Kota Lhokseumawe meningkat dari 34,5 pada tahun 2023 menjadi 95,5 pada tahun 2024 sehingga masih termasuk kategori buruk dari nilai capaian maksimal 410. Meskipun mengalami perbaikan, penerapannya masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek perencanaan kebutuhan ASN, pengembangan karier, manajemen talenta, dan sistem informasi kepegawaian guna mewujudkan pengelolaan ASN yang lebih profesional dan berbasis merit.
- 7) Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan Gampong
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan gampong yang baik di Kota Lhokseumawe menurun dari 83,82 persen pada tahun 2024 menjadi 63,24 persen pada tahun 2025. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kantor gampong dalam kondisi rusak dari 6 unit menjadi 20 unit, sementara masih terdapat 5 gampong yang belum memiliki kantor pemerintahan gampong. Penurunan ini dipengaruhi oleh kerusakan fasilitas akibat bencana banjir. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan gampong yang efektif dan berkualitas.
- 8) Perpustakaan
Rasio jumlah perpustakaan per 10.000 penduduk meningkat dari 1,04 pada tahun 2024 menjadi 1,26 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan dan sarana literasi sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.3.1.5. Masih Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Manajemen Kebencanaan

- 1) Indeks Risiko Bencana (IRB)
Nilai Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe meningkat dari 136,99 pada tahun 2024 menjadi 168,97 pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan tingginya tingkat risiko bencana di daerah sehingga diperlukan penguatan kapasitas penanggulangan bencana, mitigasi risiko, dan kesiapsiagaan masyarakat secara berkelanjutan.
- 2) Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kota Lhokseumawe meningkat sedikit dari 0,40 pada tahun 2024 menjadi 0,41 pada tahun 2025. Meskipun mengalami perbaikan, nilai tersebut menunjukkan bahwa kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana masih perlu terus ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat.



- 3) Frekuensi kejadian bencana di Kota Lhokseumawe meningkat signifikan dari 22 kejadian pada tahun 2024 menjadi 107 kejadian pada tahun 2025, yang didominasi oleh bencana banjir. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan upaya mitigasi, peningkatan infrastruktur pengendalian banjir, serta peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
- 4) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 mencapai 71,54 yang menunjukkan kondisi lingkungan hidup yang semakin baik. Peningkatan kualitas air menjadi salah satu faktor yang mendukung capaian tersebut. Namun demikian, penurunan kualitas udara masih menjadi perhatian sehingga diperlukan upaya pengendalian pencemaran dan peningkatan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.
- 5) Persentase timbulan sampah yang ditangani di Kota Lhokseumawe meningkat signifikan dari 76,98 persen pada tahun 2024 menjadi 99,86 persen pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan peningkatan kinerja pengelolaan persampahan daerah dalam menangani timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat.
- 6) Proporsi rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Kota Lhokseumawe.
Proporsi rumah tangga yang memperoleh layanan penuh pengumpulan sampah pada tahun 2024 dan 2025 tercatat sebesar 0,92 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa cakupan layanan persampahan masih sangat terbatas sehingga diperlukan perluasan jangkauan layanan, peningkatan sarana dan prasarana persampahan, serta penguatan partisipasi masyarakat untuk mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

2.3.1.6. Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Infrastruktur Kota Lhokseumawe belum optimal

- 1) Indeks infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kota Lhokseumawe Tahun 2024 sebesar 59,26 dan tahun 2025 menurun menjadi 58,00.
- 2) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak di Kota Lhokseumawe menurun dari 81,78 persen pada tahun 2024 menjadi 80,16 persen pada tahun 2025. Pada saat yang sama, jumlah rumah tidak layak huni meningkat dari 8.437 unit menjadi 9.383 unit. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan program perumahan dan permukiman guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan aman.
- 3) Rasio Panjang Jalan dengan Jumlah Penduduk
Pada tahun 2025, rasio panjang jalan per satuan penduduk di Kota Lhokseumawe tercatat sebesar 1,688, dengan jumlah penduduk sekitar 200.876 jiwa dan total panjang jalan 342,61 km. Nilai ini menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 2,076. Penurunan rasio tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, sementara panjang jalan tidak



- mengalami penambahan yang signifikan. Mengingat keterbatasan ruang wilayah Kota Lhokseumawe, upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, khususnya dengan memperbaiki kondisi jalan rusak agar menjadi lebih baik.
- 4) Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat
Pada tahun 2025, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat mencapai 100 persen, baik untuk pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana maupun fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.
 - 5) Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)
Persentase jalan dalam kondisi mantap di Kota Lhokseumawe menurun dari 64,40 persen pada tahun 2024 menjadi 59,54 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan pembangunan jalan untuk menjaga kualitas infrastruktur serta mendukung konektivitas wilayah.
 - 6) Persentase Drainase dalam Kondisi Baik
Persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Lhokseumawe menurun dari 74,93 persen pada tahun 2024 menjadi 73,71 persen pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan masih perlunya peningkatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan pengelolaan jaringan drainase guna mendukung kelancaran aliran air, mengurangi potensi genangan, serta meningkatkan kualitas infrastruktur perkotaan.
 - 7) Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum
Persentase akses rumah tangga terhadap layanan air minum di Kota Lhokseumawe meningkat dari 16,42 persen pada tahun 2024 menjadi 17,71 persen pada tahun 2025. Meskipun mengalami peningkatan, cakupan layanan air minum masih tergolong rendah sehingga diperlukan perluasan jaringan perpipaan, peningkatan kapasitas pelayanan penyedia air minum, serta pengembangan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
 - 8) Area Kawasan Kumuh
Luasan kawasan kumuh di Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 dan 2025 tercatat sebesar 42,67 hektare. Capaian ini menunjukkan adanya hasil penanganan kawasan kumuh dibandingkan kondisi beberapa tahun sebelumnya. Namun demikian, masih diperlukan upaya penataan permukiman, peningkatan infrastruktur dasar, dan rehabilitasi lingkungan permukiman secara berkelanjutan untuk mengurangi luas kawasan kumuh dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kota Lhokseumawe terus berupaya mengurangi luas kawasan kumuh melalui berbagai program penataan dan perbaikan lingkungan permukiman. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Rumah Tidak Layak Huni (BSPS/RTLH) di beberapa gampong yang merupakan kerja sama antara Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Kementerian Perumahan Rakyat. Selain itu, terdapat pula Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang



menjadi salah satu instrumen penting dalam penanganan dan pengurangan kawasan kumuh di Kota Lhokseumawe.

- 9) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Ber-HPL/HGB

Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 dan 2025 tercatat sebesar 24,36 hektare. Rasio RTH terhadap luas wilayah berstatus HPL pada tahun 2024 sebesar 0,24 dan menurun menjadi 0,16 pada tahun 2025 seiring meningkatnya luas wilayah HPL dari 101 hektare menjadi 152 hektare. Sementara itu, rasio RTH terhadap luas wilayah berstatus HGB tetap rendah, yaitu sebesar 0,15 pada tahun 2024 dan menurun menjadi 0,14 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan dan perlindungan ruang terbuka hijau untuk menjaga keseimbangan lingkungan di tengah meningkatnya pembangunan kawasan perkotaan.

- 10) Capaian Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum

Pada tahun 2025, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum di Kota Lhokseumawe telah mencapai 100 persen, baik pada indikator pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) maupun penyediaan layanan pengolahan air limbah domestik. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum kepada masyarakat telah terpenuhi secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan.

Sementara itu, pada tahun 2024, capaian indikator SPM di bidang Pekerjaan Umum masih belum mencapai 100 persen, baik dari pemenuhan rumah tangga yang memiliki akses air minum melalui SPAM maupun rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

- 11) Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Persentase rumah tangga pengguna listrik di Kota Lhokseumawe menurun dari 122,17 persen pada tahun 2024 menjadi 119,14 persen pada tahun 2025. Pada tahun 2024, jumlah rumah tangga pengguna listrik tercatat sebanyak 56.584 pelanggan dari 46.315 rumah tangga, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 56.732 pelanggan dari 46.778 rumah tangga. Meskipun persentasenya mengalami penurunan, capaian tersebut menunjukkan bahwa akses listrik telah menjangkau hampir seluruh masyarakat. Ke depan, kualitas dan keandalan pasokan listrik perlu terus ditingkatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

- 12) Perhubungan

Jumlah kendaraan angkutan umum yang melakukan uji KIR menurun dari 2.107 kendaraan pada tahun 2024 menjadi 1.634 kendaraan pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan, sosialisasi, dan kepatuhan terhadap kewajiban uji berkala kendaraan guna menjamin keselamatan, keamanan, dan kelayakan operasional angkutan umum.

2.3.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan keadaan atau kondisi yang harus mendapatkan perhatian atau prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah karena mempunyai dampak yang signifikan bagi daerah. Isu strategis memiliki karakteristik antara lain penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Isu strategis pembangunan Kota Lhokseumawe diidentifikasi berdasarkan pada isu strategis internasional, isu strategis nasional, isu strategis Aceh, dan kondisi Kota Lhokseumawe yang membutuhkan penanganan serius dengan harapan dapat mencapai tujuan pembangunan untuk masa yang akan datang.

2.3.2.1. Isu Strategis Kota Lhokseumawe

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Kota Lhokseumawe dan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan Aceh serta nasional, maka disusun isu strategis pembangunan Kota Lhokseumawe untuk dapat teratasi yaitu:

2.3.2.1.1. Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi, Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Pendapatan Perkapita

Pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang perlu ditangani secara komprehensif. Kondisi terkini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum stabil, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat, serta tekanan inflasi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai berikut :

- a. Pengembangan Sektor Unggulan Daerah
 - 1.) Mendorong pengembangan sektor pariwisata, perikanan, dan industri kreatif sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
 - 2.) Meningkatkan investasi pada sektor pendidikan dan pelatihan keterampilan guna meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja.
 - 3.) Membangun ekosistem ekonomi berbasis potensi lokal yang berdaya saing dan berorientasi ekspor.
- b. Pengendalian Ketimpangan Pendapatan
 - 1.) Penguatan ekonomi inklusif dengan mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis local dan mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan.
 - 2.) Peningkatan akses UMKM dan ekonomi rakyat melalui memperluas akses permodalan bagi UMKM dan usaha mikro serta meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan.
 - 3.) Penciptaan lapangan kerja berkualitas dengan mendorong investasi pada sektor padat karya dan mengembangkan program pelatihan vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja.
 - 4.) Penguatan Perlindungan Sosial melalui menyasar bantuan sosial yang lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan dan



- mengintegrasikan program pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan ekonomi.
- c. Penguatan UMKM dan Stabilitas Daerah
 - 1.) Memberikan dukungan kepada UMKM melalui akses permodalan, pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, serta inovasi produk.
 - 2.) Mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga keuangan dalam pengembangan UMKM.
 - 3.) Meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan dengan melibatkan unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat guna menjaga stabilitas ekonomi daerah.
 - d. Pengendalian Inflasi dan Peningkatan Daya Beli
 - 1.) Memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
 - 2.) Mendorong peningkatan produksi dan distribusi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
 - 3.) Melakukan intervensi pasar dan kebijakan subsidi tepat sasaran untuk menjaga daya beli masyarakat.
 - e. Peningkatan Pendapatan Perkapita dan Pemerataan Ekonomi
 - 1.) Mendorong penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi dan pengembangan sektor padat karya.
 - 2.) Mengembangkan program ekonomi inklusif untuk mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat.
 - 3.) Memperkuat program perlindungan sosial yang adaptif dan berkelanjutan.

2.3.2.1.2. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka

Upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka penanggulangan kemiskinan, sebagai berikut :

- a. Bantuan sosial yang bersifat produktif, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, perbaikan tata kelola, pembangunan infrastruktur yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.
- b. Pemberian pelatihan usaha dan bantuan modal usaha sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dan menjadi mandiri dari sisi ekonomi.
- c. Upaya yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam penanggulangan tingkat pengangguran adalah pembangunan infrastruktur, memberikan dukungan terhadap nelayan dengan menyediakan akses teknologi perikanan yang modern, pelatihan keterampilan dan akses terhadap pasar yang lebih luas, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan tenaga kerja siap pakai.
- d. Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- e. Mendukung pengembangan sektor perikanan sebagai salah satu sektor unggulan daerah melalui peningkatan produksi, pengolahan hasil perikanan, serta akses pemasaran guna menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran.



- f. Pemberdayaan sektor pertanian berbasis modernisasi melalui penerapan teknologi pertanian, peningkatan kapasitas petani, serta pengembangan agribisnis yang berkelanjutan guna meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja baru.

2.3.2.1.3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing dengan Pemerataan Pendidikan, Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, dan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

Kualitas sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini terlihat dari kondisi kesehatan ibu dan anak yang belum stabil, serta menurunnya partisipasi anak dalam pendidikan dasar. Masih perlu adanya peningkatan perlindungan perempuan dan anak serta pencegahan KDRT. Selain itu, kasus penyakit tertentu seperti HIV/AIDS juga menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun masih dalam tingkat yang relatif rendah.

Di bidang pendidikan, minat dan keterlibatan anak dalam mengikuti pendidikan dasar mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan pendidikan, kualitas pembelajaran, serta pemanfaatan layanan kesehatan dan pendidikan masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe, sebagai berikut :

- a. Memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk memberikan perhatian khusus kepada penyandang disabilitas untuk menikmati pendidikan yang inklusif dan berkualitas, serta menyediakan program beasiswa bagi siswa berprestasi sebagai bentuk dukungan peningkatan kualitas SDM
- b. Memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam pembangunan berkelanjutan.
- c. meningkatkan minat baca, dapat dilakukan dengan pengembangan program promosi literasi, peningkatan akses terhadap bahan bacaan terutama di perpustakaan daerah.
- d. Melakukan kolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Lhokseumawe dalam keterampilan literasi digital, pelatihan keterampilan literasi, membangun budaya baca yang kuat dan berkelanjutan dengan menyediakan pojok-pojok baca di setiap ruang publik.
- e. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan maternal dan anak, termasuk pemeriksaan kehamilan, persalinan oleh tenaga kesehatan, serta pemantauan tumbuh kembang anak.
- f. meningkatkan akses kesehatan masyarakat terutama ibu hamil, bayi dan anak-anak dengan makanan bergizi seimbang, membentuk Dapur Pangan Sehat di setiap gampong dalam rangka pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi balita terutama balita stunting.
- g. Pemberian makanan tambahan kepada bayi, balita, edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, penyediaan suplemen gizi bagi

- kelompok rentan, meningkatkan akses ibu hamil dan anak ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas termasuk pemeriksaan kehamilan rutin, pemantauan tumbuh kembang anak, imunisasi dan layanan reproduksi yang komprehensif.
- h. Peningkatan pencegahan dan penanganan penyakit menular dengan memperkuat edukasi, deteksi dini, serta layanan kesehatan terkait HIV/AIDS secara berkelanjutan.
 - i. Meningkatkan akses masyarakat ke sanitasi yang layak dan air bersih, serta penyediaan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga medis yang terlatih, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.
 - j. Meningkatkan edukasi dan sosialisasi pencegahan KDRT melalui sekolah, gampong, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat.
 - k. Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta masyarakat untuk pencegahan KDRT.
 - l. Penguatan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah dengan memastikan seluruh cabang olahraga yang terdaftar memperoleh pembinaan secara merata dan berkelanjutan.
 - m. Meningkatkan jumlah pelatih bersertifikat melalui pelatihan, sertifikasi, dan peningkatan kompetensi secara berkala.
 - n. Memperkuat pembinaan atlet usia dini dan pengembangan pusat-pusat latihan olahraga berbasis sekolah dan masyarakat.

2.3.2.1.4. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana

Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melakukan upaya untuk mendorong pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan melalui, sebagai berikut :

- a. program kampanye promosi kebersihan lingkungan dan bebas sampah, penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan kebersihan, pembentukan kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan.
- b. membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, lembaga riset perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan, mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan, meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan melalui penataan tempat pengolahan sampah, menyediakan armada pengangkut sampah.
- c. Mendorong pengelolaan sampah berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle), pengembangan bank sampah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumbernya.
- d. Melakukan penghijauan, rehabilitasi lahan kritis, perlindungan kawasan pesisir, serta pengendalian kerusakan lingkungan guna menjaga keseimbangan ekosistem.



- e. Melakukan pengawasan terhadap sumber pencemaran udara, mendorong pengurangan emisi dari sektor transportasi dan industri, serta penerapan kebijakan ramah lingkungan.
- f. Mengendalikan alih fungsi lahan melalui penegakan kebijakan tata ruang sesuai RTRW.
- g. Mengintegrasikan aspek pengurangan risiko bencana dan perlindungan lingkungan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan.
- h. Melakukan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan.
- i. penguatan ketahanan daerah dalam mengurangi risiko kebencanaan melalui penyusunan dan melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana yang komprehensif dan terpadu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko bencana.
- j. Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana, tindakan darurat, dan persiapan menghadapi bencana. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan lahan yang rawan bencana seperti pesisir, dan lereng-lereng bukit rawan longsor.
- k. Meningkatkan infrastruktur kedaruratan seperti pos evakuasi, pos-pos kesehatan, dan jalur evakuasi yang mampu bertahan dalam situasi bencana, meningkatkan pengelolaan air dan drainase untuk mengurangi risiko banjir terutama di waktu musim penghujan.
- l. meningkatkan institusi pemerintah dalam pengurangan risiko bencana, membangun kerjasama dan sinergi antar pemerintah daerah, lembaga swadaya, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana.
- m. Penyusunan dan Implementasi R3P Banjir (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir) dengan menyusun dan melaksanakan R3P Banjir secara terintegrasi sebagai upaya percepatan pemulihan pascabencana, meliputi rehabilitasi infrastruktur yang terdampak, pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat, serta rekonstruksi kawasan terdampak dengan pendekatan pembangunan yang lebih tangguh bencana (*build back better*). Selain itu, R3P diarahkan untuk memperkuat sistem pengendalian banjir melalui normalisasi dan peningkatan kapasitas drainase dan penataan kawasan rawan banjir secara berkelanjutan.
- n. Melakukan optimalisasi fungsi waduk dan reservoir sebagai infrastruktur pengendali banjir melalui peningkatan kapasitas tampung, normalisasi dan pengerukan sedimen, serta pemeliharaan rutin. Selain itu, dilakukan pengaturan sistem operasi waduk yang terintegrasi dengan jaringan drainase kota untuk menampung limpasan air hujan pada saat curah hujan tinggi sehingga mampu mengurangi genangan, mengendalikan debit air, serta meningkatkan ketahanan Kota Lhokseumawe terhadap risiko banjir secara berkelanjutan.

2.3.2.1.5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Berkualitas

Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memperluas akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak kepada seluruh masyarakat yang meliputi pembangunan sistem penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan sanitasi dasar untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- b. Akses Air minum Kota Lhokseumawe yang masih rendah karena tidak memiliki air baku sehingga perlu dilakukan langkah pengembangan dan penguatan infrastruktur air minum seperti pembangunan sumur bor, instalasi pengolahan air laut (desalinasi), serta sistem penampungan air hujan secara komunal dan individual. Selain itu, diperlukan pendekatan partisipasi masyarakat melalui program seperti PAMSIMAS, inovasi teknologi pengolahan air yang efisien, pengawasan kualitas air, kolaborasi dengan sektor swasta dan LSM, dan Program pengembangan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) yang terpadu dari hulu hingga ke konsumen. serta edukasi tentang pentingnya konservasi dan penghematan air. Untuk Kota Lhokseumawe telah menyusun Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) akan dibangun SPAM regional antara 2 kabupaten/kota yaitu Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara.
- c. Melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui penyediaan infrastruktur dasar dan lingkungan yang layak huni.
- d. Meningkatkan pembangunan dan pemerataan sarana serta prasarana pendidikan dan kesehatan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM.
- e. Melakukan peningkatan kualitas, pemeliharaan rutin, serta rehabilitasi jalan guna meningkatkan persentase jalan dalam kondisi mantap dan mendukung konektivitas wilayah.
- f. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi perkantoran gampong yang mengalami kerusakan.
- g. Meningkatkan kualitas dan kelengkapan sarana prasarana pendukung pelayanan pemerintahan gampong.
- h. Melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana dasar yang rusak akibat bencana secara terencana dengan pendekatan pembangunan yang lebih tangguh (*build back better*).

2.3.2.1.6. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Kemandirian Ruang Fiskal

Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengambil langkah-langkah untuk peningkatan tata kelola pemerintahan dengan cara sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Indeks Reformasi Hukum melalui penguatan sistem hukum, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, serta penegakan hukum yang adil dan transparan.
- b. Memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian Inspektorat dan Bappeda untuk memastikan penggunaan sumberdaya publik sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.



- c. Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah.
- d. Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika, integritas, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.
- e. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan, mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.
- f. Mengembangkan kerjasama dengan lembaga antikorupsi.
- g. Dalam meningkatkan ruang kemandirian fiskal, Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar dana transfer, memperkuat pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan melakukan reformasi perpajakan, peningkatan administrasi pajak, dan penegakan hukum terhadap pajak yang tidak dibayar.
- h. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi PAD, pengelolaan aset daerah yang produktif, penguatan tata kelola dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah, peningkatan investasi, pengembangan sektor unggulan ekonomi daerah, digitalisasi sistem pendapatan daerah, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
- i. Melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan meminimalkan pemborosan.
- j. Membangun kerjasama dan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat kemandirian fiskal secara bersama-sama.
- k. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang keuangan perpajakan, dan pengelolaan sumber daya.
- l. Pelatihan dan pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola fiskal daerah secara efektif.
- m. Optimalisasi riset dan inovasi daerah serta pemanfaatan teknologi digital, penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah melalui dukungan regulasi pengembangan riset dan inovasi, kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi dan pemerintah daerah lainnya, peningkatan kapasitas sumber daya riset dan inovasi melalui program pelatihan, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik, termasuk pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

2.3.2.1.7. Memperkuat Pelaksanaan Nilai-Nilai Dinul Islam dan Pembangunan Kebudayaan

Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat mengambil langkah-langkah untuk peningkatan implementasi nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan masyarakat dengan cara sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi Syariat Islam di Kota Lhokseumawe,



- diantaranya Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH).
- b. Melakukan peningkatan pemahaman dan kesadaran tentang ajaran Islam serta implementasi hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.
 - c. Menggalakkan sosialisasi dan kampanye program untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai-nilai Syariat Islam dan budaya Aceh.
 - d. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan sipil, dan institusi pendidikan Islam lainnya untuk mendukung implementasi nilai-nilai Dinul Islam.
 - e. Meningkatkan penghimpunan dan pengelolaan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) melalui penguatan kelembagaan, digitalisasi sistem pembayaran, serta peningkatan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.
 - f. Mengembangkan basis muzakki dari sektor swasta, UMKM, dan masyarakat umum secara lebih luas, sehingga tidak hanya bergantung pada kalangan ASN, guna mewujudkan peningkatan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) yang berkelanjutan.
 - g. Mengembangkan program pendidikan Al-Qur'an bagi seluruh kelompok usia melalui dayah, TPA/TPQ, serta kegiatan keagamaan berbasis masyarakat untuk meningkatkan angka melek Al-Qur'an
 - h. Melakukan promosi kekayaan budaya serta melakukan legalisasi situs/cagar budaya yang ada di Kota Lhokseumawe.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Perkembangan ekonomi global tahun 2025 tumbuh 3,4 persen dan diperkirakan melambat menjadi 3,1 persen pada 2026 (*Internasional Monetary Fund* (IMF), April 2026). Perlambatan tersebut dipengaruhi utamanya ketidakpastian kebijakan tarif dan eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketidakpastian tarif dan investigasi *Section 301* terhadap negara mitra oleh Amerika Serikat, termasuk Indonesia, berpotensi menekan kinerja perdagangan dan rantai pasok global.

Eskalasi konflik geopolitik tersebut memperbesar risiko kenaikan harga energi dan komoditas. Harga minyak mentah pada pertengahan April 2026 berada di kisaran US\$100 per barel atau meningkat 76,43 persen secara *year to date* (YtD), sehingga meningkatkan risiko *imported inflation*, menahan ruang pelonggaran moneter, dan mendorong perpindahan modal ke aset aman. Volatilitas juga terjadi pada batubara dan *crude palm oil* (CPO), dua komoditas ekspor utama Indonesia, yang masing-masing meningkat 23,95 persen dan 12,98 persen secara YtD. Namun, disisi lain aktivitas manufaktur global masih ekspansif, tecermin dari *Purchasing Managers' Index* (PMI) manufaktur Maret 2026 sebesar 51,30.

Pada tahun 2027, ekonomi global diproyeksikan tumbuh 3,2 persen, ditopang terutama oleh Tiongkok dan India, masing-masing 4,0 persen dan 6,5 persen (IMF, April 2026). Pertumbuhan tersebut didukung oleh investasi teknologi, termasuk *artificial intelligence* (AI), namun tetap dibayangi ketidakpastian perdagangan dan geopolitik. Di sisi lain, tekanan perubahan iklim mendorong investasi rendah emisi dan produksi hijau, termasuk penerapan *carbon border adjustment mechanism* (CBAM) yang mempengaruhi pola perdagangan dan struktur industri global.

Di sisi domestik, stabilitas makro tahun 2025 tetap terjaga, ditopang pertumbuhan ekonomi 5,1 persen, inflasi terkendali, cadangan devisa kuat, dan surplus neraca perdagangan. Pertumbuhan ekonomi terutama didukung konsumsi rumah tangga, ekspor, investasi, serta sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.

Pada triwulan I-2026, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,6 persen *year on year* (YoY) didorong oleh akselerasi konsumsi masyarakat pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN); implementasi program prioritas pembangunan; serta peningkatan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik yang meningkat. Kinerja ini menjadi sinyal positif dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4 persen dan menjadi fondasi yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun 2027.

Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan utama ekonomi tahun 2026 akan didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi,

dan ekspor. Sementara itu, sumber pertumbuhan dari sisi lapangan usaha akan didorong utamanya oleh sektor industri pengolahan yang didukung oleh hilirisasi sektor-sektor prioritas serta program di sektor pertanian.

Secara kewilayahan, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan terjaga melalui keseimbangan antara akselerasi hilirisasi di timur dan penguatan sektor manufaktur serta jasa di wilayah barat. Pertumbuhan Kawasan Timur Indonesia (KTI) diproyeksikan mencapai enam persen, dipicu oleh masifnya aktivitas hilirisasi nikel di Wilayah Maluku dan Sulawesi, pemulihan pariwisata di Bali-Nusa Tenggara serta sektor peningkatan sektor pertambangan dan berlanjutnya konstruksi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Sementara itu, Kawasan Barat Indonesia (KBI) diproyeksikan tumbuh sebesar 5,3 persen yang ditopang oleh kinerja wilayah Jawa melalui sektor industri dan jasa, serta wilayah Sumatera yang didorong oleh peningkatan permintaan komoditas unggulan dan pembangunan infrastruktur.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Tahun 2027 sebagai tahun ketiga RPJMN Tahun 2025–2029 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi menuju target delapan persen pada 2029, dengan sasaran 2027 sebesar 5,9–7,5 persen. Pertumbuhan ini diharapkan meningkatkan gross national income (GNI) per kapita ke US\$5.900–5.990, mempertahankan status negara berpendapatan menengah atas, serta mendukung agenda transisi hijau melalui penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan kualitas lingkungan.

Pembangunan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM melalui penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan serta peningkatan Indeks Modal Manusia. Selain itu, kesejahteraan petani dan penciptaan lapangan kerja formal menjadi indikator utama untuk memastikan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penguatan ekonomi domestik dilakukan untuk meningkatkan ketahanan terhadap guncangan dan mendorong pertumbuhan yang berkualitas melalui paket kebijakan terintegrasi, meliputi stabilitas makroekonomi, perlindungan daya beli, penguatan tabungan dan pembiayaan domestik, percepatan investasi dan belanja produktif, perbaikan iklim usaha, peningkatan produktivitas, serta penguatan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia. Melalui strategi tersebut, perekonomian domestik diharapkan tidak hanya lebih resilien terhadap tekanan eksternal, tetapi juga mampu membangun kapasitas pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, investasi diarahkan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dan industrialisasi bernilai tambah, dengan target realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp2.361,6-Rp2.451,0 triliun. Investasi difokuskan pada sektor sekunder (Rp1.114,8-Rp1.180,4 triliun), hilirisasi (Rp637,0-Rp654,1 triliun), serta kawasan pusat pertumbuhan (Rp525,2-Rp546,2 triliun), dengan peningkatan porsi

PMDN termasuk UMKM menjadi 48,9-49,0 persen. Selain itu, investasi berorientasi ekspor juga diperkuat melalui PMA dan PMDN, didukung kebijakan peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha, serta pengembangan infrastruktur konektivitas dan logistik sebagai fondasi pertumbuhan.

Hilirisasi diarahkan sebagai strategi utama untuk mendukung pencapaian sasaran sektor industri pengolahan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional, dengan target kontribusi sebesar 21,5 persen terhadap PDB pada tahun 2027 dengan pertumbuhan 6,1–7,5 persen. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, implementasi hilirisasi dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir disertai penguatan ekosistem hilirisasi, mencakup peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pasokan bahan baku, penguatan konektivitas dan logistik, serta pendalaman produk turunan melalui:

- 1) akselerasi hilirisasi komoditas berbasis sumber daya unggulan, seperti nikel, bauksit, garam, kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut, yang salah satunya akan diimplementasikan melalui berbagai PSN;
- 2) pengembangan industri bernilai tambah tinggi, yang mencakup industri kimia, industri alat angkutan (termasuk pengembangan industri mobil nasional dan industri dirgantara), dan industri elektronika, serta industri mesin dan perlengkapan;
- 3) peningkatan daya saing industri padat karya seperti industri tekstil salah satunya melalui pelaksanaan program Kredit Industri Padat Karya dan restrukturisasi mesin/peralatan;
- 4) percepatan transformasi industri hijau melalui implementasi peta jalan dekarbonisasi industri, penerapan ekonomi sirkular, serta pilot project pembiayaan industri hijau dengan skema *Green Industry Service Company* (GISCO);
- 5) perluasan dan pendalaman ekspor produk dan jasa industri, terutama melalui pemanfaatan beberapa perjanjian perdagangan yang telah diratifikasi;
- 6) peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui penguatan rantai pasok industri, keberlanjutan penerapan industri 4.0, penyiapan SDM industri terampil dan produktif, serta penerapan standardisasi, serta dukungan kebijakan fiskal dan insentif yang tepat sasaran.

Selanjutnya, sektor pertanian dan perikanan tahun 2027 ditargetkan tetap tumbuh di tengah tantangan perubahan iklim melalui (1) perbaikan pengelolaan air dan irigasi, lahan/kawasan konservasi dan rehabilitasi, serta Jalan Usaha Tani; (2) penyediaan benih dan bibit unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), sarana produksi perikanan, pupuk subsidi, cetak sawah, optimasi lahan, revitalisasi tambak dan kampung nelayan; (3) penyuluhan dan regenerasi petani, nelayan, dan pembudidaya ikan; (4) peningkatan produksi lada, jagung, dan komoditas strategis lainnya, termasuk komoditas pertanian dan perikanan; serta (5) hilirisasi pertanian dan perikanan. Sementara itu, sektor perdagangan dari sisi dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, transformasi digitalisasi perdagangan, dan peningkatan konektivitas ke pasar global.



Pada tahun 2027, peningkatan pertumbuhan dicapai melalui kontribusi pertumbuhan kapital sebesar 3,19–3,55 persen, kontribusi tenaga kerja sebesar 1,26–1,50 persen, dan kontribusi *Total Factor Productivity* (TFP) sebesar 1,85–2,45 persen. Pertumbuhan ekonomi ditingkatkan melalui: (1) peningkatan kapital dengan dampak pengganda perekonomian yang besar, (2) peningkatan jumlah tenaga kerja ahli berdasarkan sektor unggulan wilayah untuk meminimalisir tingkat *mismatch*, dan (3) penguasaan dan penerapan teknologi baru terutama pada sektor industri manufaktur dan pengembangan infrastruktur konektivitas seperti *transit-oriented development* (TOD).

Pencapaian visi Indonesia Emas 2025 memerlukan kesinambungan arah kebijakan perencanaan pembangunan yang dirancang secara bertahap dan terintegrasi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045 menjadi landasan strategis yang menetapkan arah transformasi bangsa selama 20 tahun ke depan. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional dijalankan secara terarah dengan berlandaskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta Pembukaan UUD 1945 yang memuat visi dan misi bernegara. Nilai-nilai fundamental tersebut menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan pembangunan, memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial, persatuan nasional, serta kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 lahir sebagai pelaksanaan tahap pertama RPJPN Tahun 2025–2045 sekaligus memuat delapan visi Presiden yang tertuang dalam Asta Cita. Selanjutnya, Asta Cita diterjemahkan ke dalam delapan Prioritas Nasional sebagai acuan utama pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Trisula Pembangunan, yaitu (1) pertumbuhan ekonomi berkualitas, (2) penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMN Tahun 2025–2029. Kedudukan RKP Tahun 2027 menjadi penting karena tidak hanya memastikan kesinambungan arah kebijakan yang telah dilaksanakan di dua tahun pertama, tetapi juga mengakselerasi ketercapaian sasaran jangka menengah di dua tahun berikutnya, atau di akhir periode pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029.

Tahun 2027 menjadi momentum strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global yang semakin dinamis. Tantangan ini memerlukan stabilitas dan perkuatan fondasi pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9–7,5 persen. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut memerlukan strategi peningkatan nilai tambah (*value added*) yang transformatif dan signifikan. Oleh karena itu, intervensi pemerintah difokuskan pada tiga faktor penggerak utama, yaitu produktivitas, investasi, dan industri.

Dari faktor produktivitas, peningkatan output dan nilai tambah diarahkan melalui penguatan lima pilar pembentuk Total Factor Productivity (TFP), yaitu (1) inovasi melalui peningkatan kapasitas riset dan kolaborasi serta percepatan adopsi teknologi dalam proses produksi; (2) pendidikan melalui peningkatan kualitas dan kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar; (3) infrastruktur fisik untuk menurunkan biaya logistik dan memperlancar konektivitas; (4) efisiensi melalui perbaikan iklim usaha dan pengurangan berbagai hambatan ekonomi; serta (5) institusi melalui penguatan kepastian hukum, efektivitas belanja pemerintah, dan kemudahan berusaha. Pertumbuhan ekonomi yang didorong produktivitas (TFP) menjadi basis akselerasi pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Kontribusi produktivitas (TFP) terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional masih terbatas 0,26 persen (periode 2015–2025), namun berpotensi meningkat signifikan hingga mencapai dua persen. Selanjutnya, peningkatan produktivitas menjadi krusial dalam merespons inefisiensi investasi agar menjadi lebih berkualitas tercermin dari *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) yang berpotensi turun hingga mencapai 4,5 (dari 6,4 pada tahun 2025).

Investasi sebagai faktor pengungkit utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tercatat sebagai komponen terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 28,8 persen terhadap PDB sisi pengeluaran pada tahun 2025, mencerminkan perannya yang signifikan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Lebih lanjut, investasi mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas produksi nasional melalui perluasan basis industri serta penguatan sisi penawaran (*supply-side*) perekonomian. Di tengah kebutuhan transformasi ekonomi, peningkatan investasi berkualitas melalui *Foreign Direct Investment* (FDI) menjadi semakin krusial untuk mendorong alih teknologi dan pengetahuan, terutama mengingat rasio FDI Indonesia yang masih terbatas pada kisaran 1,2 persen terhadap PDB, namun berpotensi meningkat signifikan seperti Vietnam yang mencapai 6,0 persen terhadap PDB. Selain itu, berbagai komitmen investasi dari kesepakatan kerja sama internasional dengan mitra strategis menjadi modal kuat untuk direalisasikan sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan.

Sementara itu, faktor industri merupakan salah satu penggerak utama transformasi ekonomi dan akselerasi pertumbuhan berkualitas dengan kontribusi PDB tertinggi. Selain itu industri pengolahan berperan menciptakan ekosistem keterkaitan antar sektor dengan *multiplier output* tinggi dan penyerapan tenaga kerja berkualitas. Oleh karena itu, kebijakan industri perlu diarahkan pada transformasi struktural menuju industri bernilai tambah tinggi, berdaya saing global, dan berorientasi ekspor. Arah kebijakan ini menekankan pada *industrial upgrading*, baik melalui pergeseran dari industri berbasis komoditas dan teknologi rendah menuju industri berteknologi menengah-tinggi (*intra-industry upgrade*) maupun melalui pendalaman struktur industri ke tahapan yang lebih maju dalam rantai nilainya (*inter-industrial upgrade*).

Faktor produktivitas, investasi, dan industri dipandang sebagai tiga pilar utama yang paling menentukan dalam mendorong akselerasi

pertumbuhan berkualitas. Dengan demikian, Pemerintah menetapkan Tema RKP Tahun 2027 yaitu: **“Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri”**. Tema ini mencerminkan upaya Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

RKP Tahun 2027 dilaksanakan melalui sebelas Fokus Pembangunan (FP) sebagai pendekatan strategis untuk meningkatkan ketajaman arah kebijakan dan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Kesebelas Fokus Pembangunan tersebut yaitu:

- (1) Kualitas SDM, Tenaga Kerja Produktif, dan Inovasi;
- (2) Stimulus untuk Produktivitas Daya Beli Masyarakat;
- (3) Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola;
- (4) Regulasi dan Kelembagaan;
- (5) Efisiensi dan Efektivitas Investasi;
- (6) Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi;
- (7) Inovasi Pembiayaan Pembangunan;
- (8) Investasi Berorientasi Industri dan Ekspor;
- (9) Industri Nasional;
- (10) Hilirisasi SDA Strategis; serta
- (11) Swasembada Pangan, Energi, dan Air, menjadi instrumen untuk menerjemahkan arah kebijakan makro ke dalam intervensi yang lebih konkret, terarah, dan terukur.

Dalam rangka memastikan sebelas FP dapat diterjemahkan ke dalam pelaksanaan yang lebih konkret, RKP Tahun 2027 menjabarkannya lebih lanjut ke dalam delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Penjabaran daftar program PKPN, keterpaduan program dengan PN, serta strategi pembiayaan program secara lebih detail dijabarkan dalam Buku I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari RKP Tahun 2027. Penajaman prioritas pembangunan melalui intervensi kebijakan strategis bertujuan untuk menjawab ketercapaian Trisula Pembangunan. Melalui klaster PKPN, intervensi pembangunan lintas sektor diarahkan agar lebih terintegrasi, terukur, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan tahunan. Dalam RKP Tahun 2027, PKPN terhimpun dalam delapan klaster, yaitu:

- (1) kedaulatan pangan;
- (2) kemandirian energi dan air;
- (3) pendidikan;
- (4) kesehatan;
- (5) penurunan kemiskinan;
- (6) hilirisasi dan industrialisasi;
- (7) infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; serta
- (8) ekonomi kerakyatan dan desa. Adapun delapan klaster tersebut didukung oleh penguatan aspek pertahanan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Pelaksanaan prioritas pembangunan RKP Tahun 2027 diharapkan mampu mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional yang berlandaskan pada Trisula Pembangunan, yaitu

pertumbuhan ekonomi berkualitas, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sasaran pembangunan tersebut disusun sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, sekaligus menjadi instrumen pengendalian agar arah kebijakan tetap selaras dengan target pembangunan jangka menengah.

Pada pilar pertumbuhan ekonomi berkualitas, sasaran pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, yang didukung oleh peningkatan produktivitas, penguatan investasi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional bruto per kapita, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, serta peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. Indikator-indikator tersebut mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Pada pilar penurunan kemiskinan dan ketimpangan, sasaran pembangunan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan, antara lain, meliputi (1) penguatan perlindungan sosial, (2) peningkatan kesempatan kerja, serta (3) stabilisasi harga kebutuhan pokok. Indikator yang digunakan meliputi tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan rasio gini, yang secara bersama-sama mencerminkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Upaya ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan serta meningkatkan daya beli masyarakat secara luas.

Selanjutnya, pada pilar peningkatan kualitas sumber daya manusia, sasaran pembangunan diarahkan pada penguatan kualitas tenaga kerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Hal ini dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Indikator yang digunakan antara lain tingkat pengangguran terbuka dan indeks modal manusia sebagai ukuran kualitas dan produktivitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Selain indikator utama tersebut, sasaran pembangunan juga diperkuat dengan indikator pendukung yang mencerminkan kinerja sektor-sektor strategis, antara lain indeks kesejahteraan petani dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal. Indikator tersebut penting untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi yang didorong melalui produktivitas, investasi, dan industrialisasi juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi di sektor riil serta penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

Secara keseluruhan, sasaran pembangunan RKP Tahun 2027 dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Trisula Pembangunan. Dengan keterkaitan yang kuat

antara sasaran, indikator, dan intervensi kebijakan, pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan secara efektif, terarah, dan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 3.1
Sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027



Sumber: RKP Tahun 2027, KemenPPN/Bappenas

3.1.3. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Aceh

Perekonomian Aceh yang dicerminkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Aceh mencapai 66,39 rupiah pada triwulan I 2026 atau naik sebesar 0,04 triliun dari triwulan IV 2025 yang sebesar 66,35 triliun rupiah atas dasar harga berlaku. Sedangkan perekonomian Aceh tanpa migas mengalami penurunan sebesar 0,58 triliun dari 64,74 triliun menjadi 64,15 triliun rupiah.

Naiknya nilai PDRB ADHB pada triwulan I 2026 disebabkan karena terjadinya kenaikan pada semua lapangan usaha, kecuali 3 (tiga) lapangan usaha yang mengalami penurunan yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan turun sebesar Rp.2.041,12 milyar, disusul Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial sebesar Rp.103,81 milyar, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar Rp.17,49 milyar.

Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan naik sebesar Rp.843,96 milyar, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor sebesar Rp.736,41 milyar, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp.147,63 milyar dan Konstruksi sebesar Rp.135,59. Transportasi dan Pergudangan naik sebesar Rp.101,95 milyar, Informasi dan Komunikasi sebesar Rp.74,14 milyar, Industri Pengolahan sebesar Rp.53,77 milyar, Jasa Keuangan sebesar Rp.74,14 milyar, dan Jasa Lainnya sebesar Rp.34,97 milyar. Sedangkan lima lapangan usaha lainnya naik di bawah Rp.13,05 milyar.

Sedangkan PDRB Aceh berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 (ADHK 2010), PDRB Aceh triwulan I 2026 dengan migas sebesar 39,39 triliun rupiah, turun 0,24 triliun rupiah dari triwulan sebelumnya yang sebesar 40,20 triliun rupiah. Nilai PDRB ADHK tanpa migas, pada triwulan I 2026 juga mengalami penurunan sebesar 0,47 triliun rupiah dari 39,05 triliun rupiah menjadi 38,58 triliun rupiah.

Pertumbuhan ekonomi Aceh yang digambarkan oleh perkembangan PDRB ADHK dengan migas pada triwulan I 2026 mengalami kontraksi sebesar 0,61 persen dibandingkan triwulan IV 2025 (*q-to-q*), pertumbuhan ekonomi tanpa migas juga mengalami penurunan, yaitu sebesar 1,20 persen. Sementara itu, jika dibandingkan dengan nilai PDRB triwulan I 2026 (*y-on-y*), perekonomian Aceh dengan migas tumbuh 4,09 persen, dan tanpa migas tumbuh sebesar 5,07 persen.

Pertumbuhan (*y-on-y*) terjadi pada semua kategori lapangan usaha, kecuali 2 (dua) kategori yang mengalami penurunan yaitu pertambangan dan penggalan sebesar 9,05 persen dan Pangadaan Air sebesar 1,97 persen. Kategori yang mengalami pertumbuhan signifikan yaitu Jasa Keuangan sebesar 17,96 persen, diikuti Konstruksi sebesar 15,95 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 13,54 persen, Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,88 persen. Sedangkan kategori Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,67 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,34 persen, Industri Pengolahan sebesar 6,03 persen, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,70 persen. Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 5,18 persen, Jasa Lainnya sebesar 4,24 persen, Real Estate sebesar 3,86 persen.

Sementara itu, lapangan usaha Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 2,24 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 2,21 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,91 persen, dan Pertanian, Kehutanan, Perikanan tumbuh sebesar 0,35 persen.

Perekonomian Aceh secara triwulanan (*q-to-q*) dibandingkan triwulan IV 2025 mengalami kontraksi sebesar 0,61 persen dengan migas, sedangkan PDRB non migas mengalami kontraksi sebesar 1,20 persen. Kontraksi pertumbuhan terjadi pada 5 (lima) kategori Lapangan Usaha (LU). LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami kontraksi sebesar 10,30 persen, diikuti Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,13 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,09 persen, Jasa Pendidikan sebesar 0,14 persen, dan Real Estate sebesar 0,01 persen. Kategori Lapangan Usaha yang tumbuh signifikan diantaranya Pertambangan dan Penggalan sebesar 16,64 persen, Penyediaan

Akomodasi dan Makan Minum sebesar 12,43 persen, dan Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 10,24 persen.

Sementara itu, LU Usaha Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 6,40 persen, Pengadaan Air sebesar 4,84 persen, serta Informasi dan Komunikasi sebesar 4,25 persen. Kategori Jasa Lainnya tumbuh sebesar 3,88 persen, Jasa Keuangan sebesar 2,71 persen, dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,22 persen. Sedangkan Industri Pengolahan tumbuh sebesar 0,74 persen, Jasa Perusahaan sebesar 0,70 persen, serta Konstruksi tumbuh sebesar 0,68 persen.

Struktur perekonomian Aceh menurut Lapangan Usaha masih didominasi oleh LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan baik dengan migas maupun tanpa migas. Pada triwulan I 2026 mendominasi perekonomian dengan peranan sebesar 31,70 persen, diikuti oleh Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan peranan sebesar 15,92 persen. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib menempati urutan ketiga dalam Perekonomian Aceh dengan peranan sebesar 8,99 persen, sedangkan Konstruksi menempati urutan keempat dengan peranan sebesar 8,72 persen. Transportasi dan Pergudangan; Pertambangan dan Penggalan, serta Industri Pengolahan masing-masing menduduki urutan kelima, keenam dan ketujuh.

Struktur PDRB tanpa migas juga menunjukkan bahwa dua sektor dengan dominasi terbesar tetap berada pada LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 32,81 persen, dan Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 16,47 persen. Pada urutan ketiga adalah LU Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,31 persen, diikuti Konstruksi sebesar 9,03 persen serta Transportasi dan Pergudangan dengan peranan sebesar 6,76 persen. Sedangkan kategori Industri Pengolahan, serta Pertambangan dan Penggalan masing-masing memberi kontribusi sebesar 4,26 persen dan 3,56 persen.

Dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor barang dan jasa merupakan yang paling tinggi nilainya mencapai 43,20 triliun rupiah (ADHB) dan berdasarkan ADHK diperoleh sebesar 21,52 triliun rupiah. Selanjutnya Konsumsi Rumah Tangga (ADHB) yang menduduki urutan kedua sebesar 36,61 triliun rupiah dan 21,94 triliun rupiah berdasarkan ADHK. Nilai PDRB terbesar ketiga adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mempunyai nilai ADHB sebesar 21,46 triliun rupiah dan 12,81 triliun rupiah. Komponen berikutnya adalah Konsumsi Pemerintah, dengan nilai PDRB ADHB sebesar 10,38 triliun rupiah dan 5,62 triliun rupiah berdasarkan ADHK.

Adapun komponen Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR) mempunyai nilai PDRB ADHB sebesar 1,59 triliun rupiah dan 0,99 triliun rupiah. Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai komponen pengurang terhadap nilai total PDRB mempunyai nilai sebesar 47,44 triliun rupiah berdasarkan ADHB dan 23,21 triliun rupiah berdasarkan ADHK.

Dari sisi kontribusi komponen PDRB pengeluaran, komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan komponen pengurang

terhadap PDRB total memberikan kontribusi sebesar 71,45 persen, selanjutnya di urutan kedua komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 65,07 persen, komponen Konsumsi Rumah Tangga menjadi komponen terbesar ketiga dengan peranan sebesar 55,14 persen. Selanjutnya komponen PMTB sebesar 32,33 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 15,63 persen dan Konsumsi LNPRT sebesar 2,40 persen.

Komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi disumbangkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yaitu sebesar 26,12 persen, selanjutnya Konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 14,81 persen, PMTB sebesar 10,76 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) tumbuh sebesar 2,47 persen dan komponen Impor tumbuh sebesar 0,68 persen. Sedangkan komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi 4,28 persen.

Secara *y-on-y* komponen PK-P mengalami peningkatan yang didorong oleh bertambahnya jumlah ASN, baik PNS maupun PPPK, yang pada triwulan ini meningkat sebanyak 15.281 pegawai atau meningkat sebesar 11,32 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Selain itu, kenaikan juga didukung oleh meningkatnya realisasi belanja pemerintah, terutama Belanja Pegawai APBD yang naik 14 persen. Belanja Pegawai APBN sebesar 18 persen, serta Belanja Barang dan Jasa APBN yang tumbuh signifikan hingga 60 persen. Dari sisi daerah, Belanja Modal APBD meningkat sangat tinggi hingga 200 persen, terutama untuk mendukung penanganan bencana di tingkat kabupaten/kota. Peningkatan konsumsi pemerintah juga diperkuat oleh adanya pembayaran Gaji dan Tunjangan Kinerja ke-14 (THR) kepada ASN pada periode tersebut.

Komponen PK-LNPRT juga mengalami peningkatan yang didorong oleh meningkatnya aktivitas lembaga keagamaan selama bulan puasa Ramadan dan perayaan Idulfitri. Selain itu, pada triwulan I 2026 bantuan dari berbagai lembaga non-profit untuk korban bencana banjir di Sumatera masih terus berlangsung, sehingga turut mendorong peningkatan aktivitas konsumsi LNPRT. Kondisi ini juga tercermin dari konsumsi listrik sektor sosial yang meningkat sebesar 0,36 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selanjutnya komponen PMTB mengalami peningkatan yang didorong oleh pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi korban bencana hidrometeorologi, serta adanya kemajuan signifikan dalam proses pemulihan dan pembangunan kembali infrastruktur di wilayah terdampak.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mengalami peningkatan seiring mulai membaiknya kondisi pascabencana banjir di Sumatera pada triwulan I 2026. Beberapa sektor produksi dan konsumsi menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan saat periode bencana, didorong oleh berkurangnya jumlah pengungsi, mulai pulihnya rumah tangga terdampak, serta membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, proses pemulihan yang belum sepenuhnya selesai menyebabkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan ini cenderung melambat secara tahunan.

Komponen Ekspor secara *y-on-y* mengalami kontraksi sebesar 4,28 persen pada triwulan I 2026. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya aktivitas pengiriman barang, yang tercermin dari muat barang di pelabuhan laut turun secara *year-on-year*.

Sementara itu dari sisi perkembangan harga, inflasi Aceh pada triwulan I 2026 masih tinggi namun membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Provinsi Aceh mencatatkan inflasi sebesar 5,31 persen (*y-on-y*). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan IV 2025 yang mencapai 6,71 persen, namun masih berada di atas tingkat inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,48 persen (*y-on-y*). Capaian ini menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi secara nasional, diikuti oleh Kalimantan Selatan (4,83 persen), Sulawesi Selatan (4,50 persen), dan Nusa Tenggara Barat (4,09 persen).

Masih tingginya tekanan inflasi pada triwulan I 2026 didorong oleh faktor musiman (*seasonal*) bulan Ramadan dan HBKN Idulfitri 1447 H yang memicu lonjakan permintaan masyarakat. Di saat yang bersamaan, *supply chain* dan kapasitas produksi pangan daerah belum pulih sepenuhnya pascabencana hidrometeorologi pada akhir tahun 2025. Hambatan distribusi logistik juga masih terjadi akibat ketergantungan pada jembatan *bailey* yang memiliki kapasitas angkut terbatas.

Proyeksi inflasi Provinsi Aceh untuk keseluruhan tahun 2026 diperkirakan akan terkendali dan berada di dalam rentang sasaran nasional, yakni $2,5 \pm 1$ persen (*y-on-y*). Terjaganya stabilitas harga tersebut ditopang oleh berlanjutnya proses rekonstruksi dan rehabilitasi jalur distribusi dan fasilitas produksi, serta normalisasi harga pascabencana. Namun demikian, risiko *upside risks* tetap perlu diwaspadai, terutama dari fluktuasi harga komoditas global akibat belum meredanya gejolak geopolitik yang berpotensi memberikan efek rambatan terhadap peningkatan harga domestik.

Untuk menjaga inflasi Aceh kembali berada dalam sasarnya, perlu adanya penguatan kolaborasi dan sinergi di dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Aceh menjadi krusial. Strategi pengendalian perlu difokuskan secara spesifik pada komoditas pangan, yang memiliki sensitivitas dan fluktuasi harga tertinggi. Upaya stabilisasi ini dapat diwujudkan melalui implementasi kerangka strategi 4K, yakni menjamin Keterjangkauan Harga, memastikan Ketersediaan Pasokan, menjaga Kelancaran Distribusi, serta membangun Komunikasi Efektif guna mengelola ekspektasi pasar. Seluruh langkah strategis tersebut dapat diintegrasikan dengan program Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) di Provinsi Aceh.

Seiring dengan arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan Aceh pada tahun 2027 berdasarkan Tahapan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Aceh sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025-2029 secara mendasar melanjutkan pembangunan pada Tahap I (2026) serta dengan mengacu pada arah

Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tahun 2026-2028, tema Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 yaitu ***“Percepatan Pemulihan Pascabencana Melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan”***.

Adapun arah kebijakan pembangunan Aceh sebagaimana yang tertuang dalam RPJMA, tahun 2027 difokuskan pada: (1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, sains dan teknologi yang dilakukan dengan strategi (a) beasiswa unggulan Aceh yang inklusif; (b) pembangunan sekolah-sekolah unggul; dan (c) peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan guru. (2) Tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah dilakukan dengan strategi (a) penciptaan birokrasi yang efektif, efisien, transparan, profesional, dan berintegritas; (b) peningkatan kapasitas badan pengelolaan keuangan Aceh; dan (c) mengoptimalkan pengelolaan aset daerah untuk mendukung kemandirian fiskal, dan peningkatan profesionalisme ASN.

Disamping itu juga pembangunan Aceh Tahun 2027 mengacu pada arah kebijakan R3P Tahun 2026-2028 melalui prinsip *“Build Back Better, Safer and Sustainable”* yang menekankan bahwa proses pemulihan tidak hanya bersifat rehabilitatif, tetapi juga harus mampu meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan pembangunan ke depan. Prinsip tersebut akan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan prioritas sebagai upaya pemulihan Aceh pascabencana.

Merujuk pada arah kebijakan perekonomian tahun 2027, hasil evaluasi capaian indikator makro Aceh tahun 2025, target indikator makro Aceh dalam RPJMA Tahun 2025-2029, maka target ekonomi makro Aceh tahun 2027 yaitu Pertumbuhan Ekonomi 5,90 persen; Tingkat Kemiskinan 9,00-10,60 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka 4,30-4,45 persen; dan Indeks Modal Manusia 0,59; dan Gini Rasio 0,284-0,289. Target-target tersebut mencerminkan arah kebijakan pembangunan Aceh yang berfokus pada penguatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing daerah.

Sejumlah upaya akan dilakukan untuk mencapai target-target tersebut melalui sejumlah program dan kegiatan spesifik yang terintegrasi. Dalam upaya penurunan kemiskinan, difokuskan pada program pengentasan kemiskinan berbasis data terpadu, bantuan sosial adaptif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Penurunan pengangguran dilakukan melalui pelatihan vokasi berbasis kebutuhan pasar kerja, fasilitasi penempatan tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan muda, serta perluasan program padat karya.

Sementara itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi diarahkan melalui percepatan investasi, pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, hilirisasi produk lokal, serta pembangunan infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas antarwilayah. Adapun peningkatan Indeks Modal Manusia antara lain ditempuh melalui program peningkatan kualitas pendidikan, penurunan stunting, penguatan layanan kesehatan dasar, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja.

3.1.4. Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe

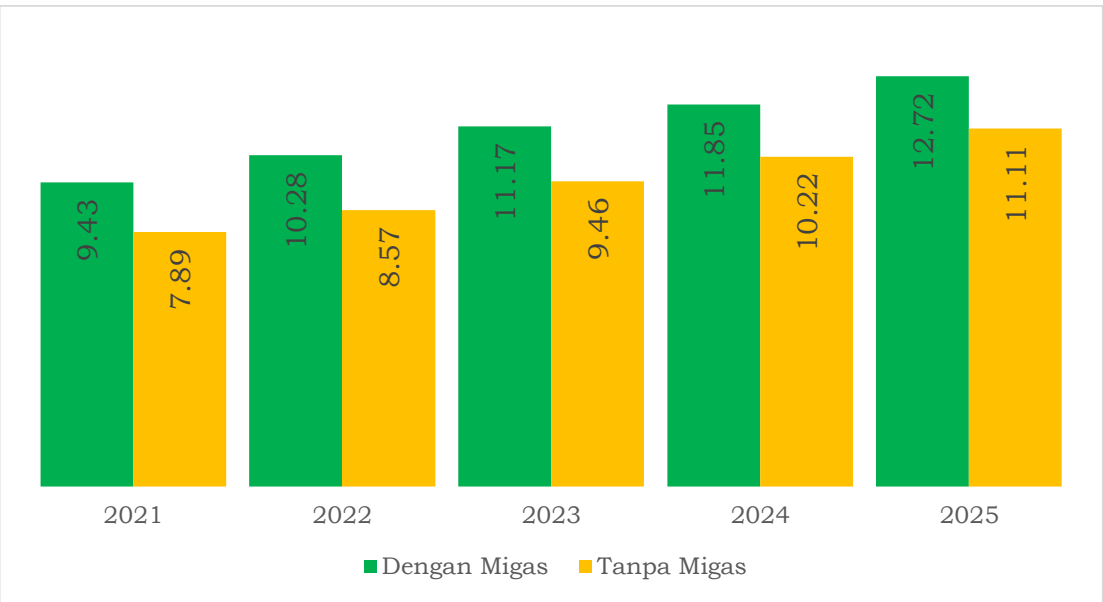
Perekonomian Kota Lhokseumawe hingga akhir tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Aceh. Pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe mencapai 3,39 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,46 persen. Meskipun dihadapkan pada ketidakpastian dan tren perlambatan ekonomi global serta tekanan inflasi yang masih terus berlanjut, pengendalian inflasi nasional menjadi agenda yang krusial.

Berdasarkan Lapangan Usaha struktur perekonomian Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 didominasi oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi sebesar 23,72 persen, kemudian lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 15,73 persen, lapangan usaha Konstruksi memberikan kontribusi sebesar 13,35 persen, dan lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan memberikan kontribusi sebesar 12,73 persen.

Dari sisi aktivitas perekonomian Kota Lhokseumawe yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Dari tahun 2021, PDRB meningkat sebesar 3,29 triliun rupiah dari 9,43 triliun menjadi 12,72 triliun rupiah pada tahun 2025.

Sejalan dengan PDRB memperhitungkan migas, PDRB ADHB tanpa memperhitungkan migas juga mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,74 triliun rupiah per tahun. PDRB ADHB tahun 2025 mencapai 11,11 triliun rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,89 triliun rupiah dari tahun 2024. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 PDRB ADHB mengalami peningkatan sebesar 3,22 triliun rupiah.

Gambar 3.2
PDRB ADHB Lhokseumawe Tahun 2021-2025
(triliun rupiah)



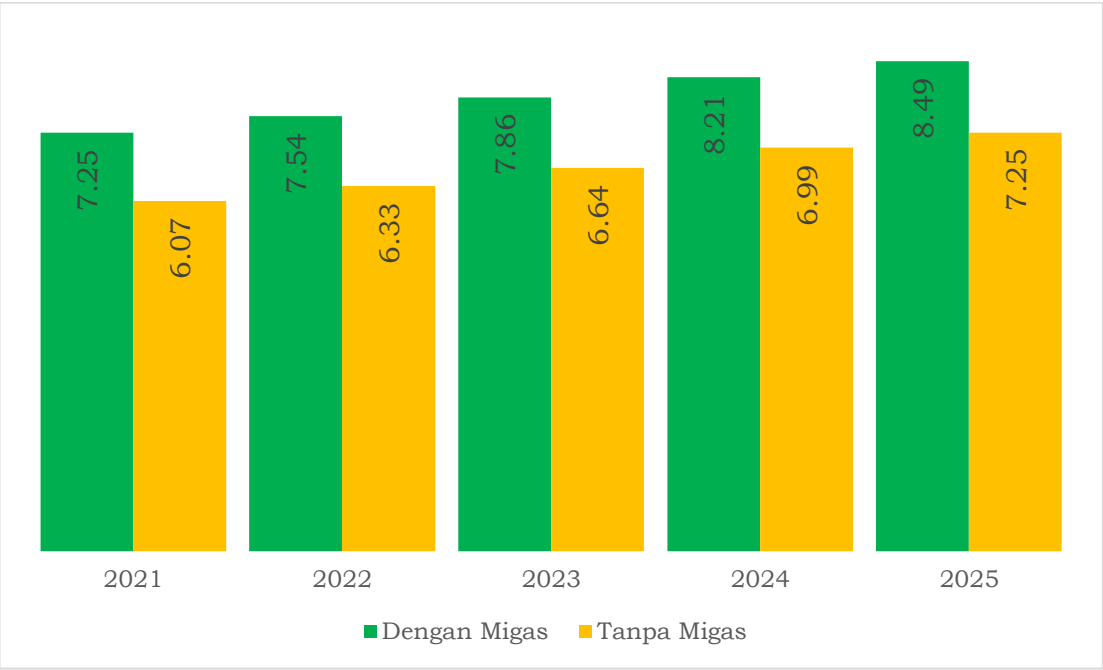
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2026

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga, sehingga untuk melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010.

Nilai PDRB ADHK Lhokseumawe tahun 2025 mencapai 8,40 triliun rupiah, mengalami peningkatan sebesar 1,24 triliun rupiah dari tahun 2021. PDRB ADHK tanpa migas pada tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan sebesar 1,18 triliun rupiah dari sebesar 6,07 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 7,25 triliun rupiah pada tahun 2025.

Selama lima tahun terakhir (2021-2025) terlihat bahwa perubahan PDRB ADHB cenderung lebih besar daripada perubahan kenaikan PDRB ADHK. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan karena faktor harga lebih dominan daripada kenaikan karena faktor produktivitas.

Gambar 3.3
PDRB ADHK Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025
(triliun rupiah)



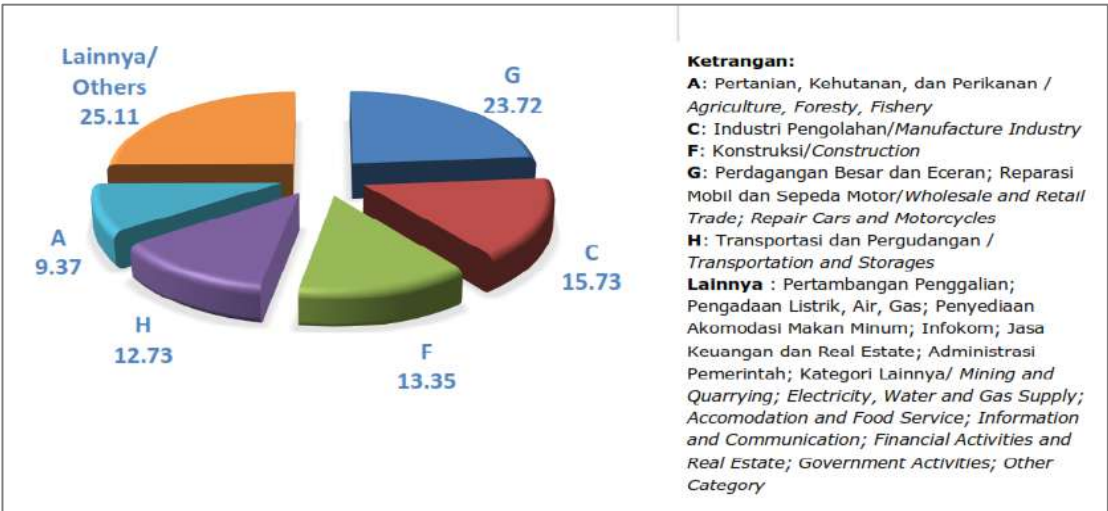
Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2026

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Sejak tahun 2021, struktur ekonomi Kota Lhokseumawe didominasi oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranan kategori ini pada tahun 2021 sebesar 21,35 persen menjadi 23,72 persen pada Tahun 2025, mengalami peningkatan nilai peranan sebesar 2,37 persen.

Kategori dengan peranan kedua terbesar hingga akhir tahun 2025 adalah industri pengolahan sebesar 15,73 persen. Kategori konstruksi menempati urutan ketiga pada Tahun 2025 dengan peranan sebesar 13,35 persen.

Kategori berikutnya yang cukup besar memberi kontribusi di tahun 2025 adalah kategori konstruksi; kategori transportasi dan pergudangan; serta kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dengan kontribusi kategori konstruksi sebesar 12,41 persen; kategori transportasi dan pergudangan sebesar 12,41 persen dan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan berada pada angka 9,30 persen.

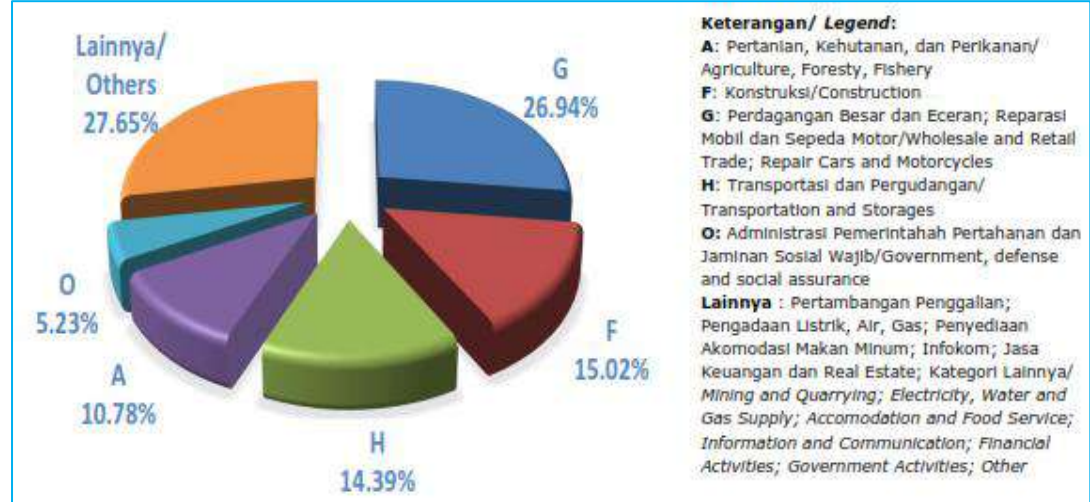
Gambar 3.4
Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe
dengan Migas Tahun 2025



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2026

Jika dipisahkan industri migas dari PDRB maka semakin terlihatlah bahwa kategori yang dominan di Lhokseumawe yaitu kategori perdagangan, disusul kategori konstruksi, serta transportasi dan pergudangan.

Gambar 3.5
Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe
Tanpa Migas Tahun 2025



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2026



Pada tahun 2025 dapat dilihat bahwa kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberi kontribusi mencapai 26,94 persen, lalu kategori konstruksi mencapai 15,02 persen, kategori transportasi dan pergudangan sebesar 14,39 persen. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 10,78 persen, dan kategori pemerintahan mencapai 5,23 persen.

Berdasarkan hasil penelitian Bank Indonesia Kpw Lhokseumawe, terdapat beberapa Komoditi/Produk/Jasa Unggulan (KPJU) yang berpotensi didorong untuk berkembang di Kota Lhokseumawe seperti toko sembako, jasa fotokopi, warung makan hingga wisata pantai dan kafe. Namun demikian masih terdapat tantangan dan isu yang perlu diatasi agar pengembangan KPJU tersebut dapat semakin terakselerasi. Disamping itu juga Kota Lhokseumawe memiliki potensi kuat dalam pengembangan sektor unggulan utama. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah yaitu penguatan investasi dan modal kerja untuk hilirisasi komoditas; penciptaan iklim investasi yang mencakup berbagai dukungan kebijakan; penguatan klaster agroindustri yang didukung dengan pengembangan jaringan infrastruktur; penyediaan dan peningkatan sarana prasarana produksi, penanganan pasca panen, pengolahan maupun sistem logistik; fasilitasi pendampingan usaha; mendorong digitalisasi bagi UMKM; penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani; pelaksanaan dan peningkatan layanan sertifikasi produk hasil usaha; dan percepatan diseminasi teknologi dan peningkatan kapasitas UMKM dalam adopsi teknologi.

Dari sisi pengeluaran perkembangan nilai PDRB ADHB dengan migas selama tahun 2021-2025 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, nilai PDRB sebesar 12,7 triliun rupiah mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan nilai PDRB sebesar 11,8 triliun rupiah. PDRB ADHB dari tahun 2021-2025 meningkat sebesar 3,29 triliun rupiah dengan rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 0,70 triliun rupiah.

Gambar 3.6
PDRB Lhokseumawe Menurut Pengeluaran Dengan Migas
Tahun 2021-2025 (triliun rupiah)

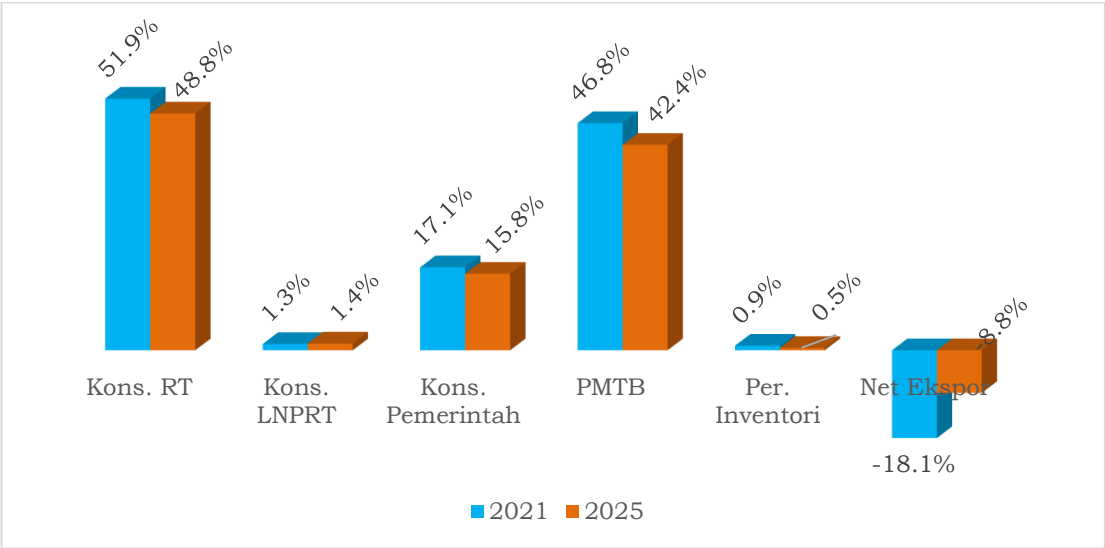


Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2026

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010) dengan migas juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama periode 2021-2025. Pada tahun 2025, nilai PDRB sebesar 8,5 triliun rupiah, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 dengan nilai PDRB sebesar 8,2 triliun rupiah, dan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 0,3 triliun rupiah. Nilai PDRB ADHK terendah terjadi pada tahun 2021 dengan nilai PDRB sebesar 7,3 triliun rupiah. Kecilnya PDRB pada tahun 2021 merupakan salah satu dampak pemulihan dari kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi hampir di seluruh negara pada tahun 2019 hingga awal 2020.

Jika ditinjau dari sisi pengeluaran, struktur ekonomi Kota Lhokseumawe tahun 2021 dan 2025 didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 51,90 persen dan 52,98 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok. Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan komponen dengan distribusi terbesar kedua yaitu sebesar 46,84 persen pada tahun 2021 dan 45,98 persen pada tahun 2025. Nilai PMTB menunjukkan penambahan barang modal di suatu wilayah dalam rangka peningkatan produktivitas.

Gambar 3.7
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Tahun 2021 dan Tahun 2025



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2026

Konsumsi rumah tangga merupakan komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB Lhokseumawe. Nilai PDRB ADHB komponen konsumsi rumah tangga tahun 2025 sebesar 6,21 triliun rupiah mengalami peningkatan dari tahun 2024 dengan nilai PDRB ADHB sebesar 5,74 triliun rupiah.

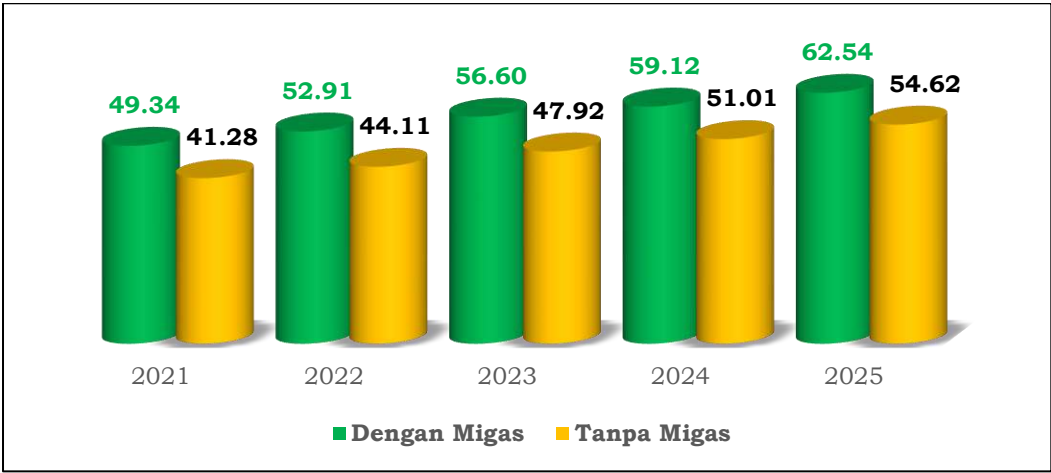
Selanjutnya nilai komponen PMTB ADHB tahun 2025 sebesar 5,38 triliun rupiah, mengalami peningkatan dibanding tahun 2024 dengan nilainya sebesar 5,27 triliun rupiah. Secara umum dalam kurun waktu lima tahun terakhir, PMTB merupakan komponen dengan kontribusi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga.

3.1.3.1. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di suatu daerah.

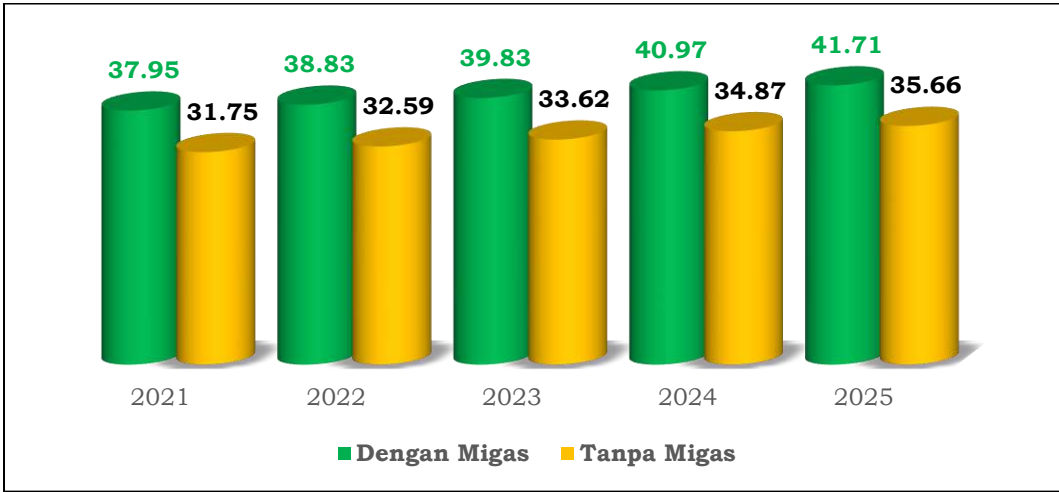
Selama lima tahun terakhir (2021-2025) PDRB per kapita Lhokseumawe ADHB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 PDRB per kapita Lhokseumawe sebesar 62,54 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 3,42 juta rupiah dari tahun 2024. Sedangkan PDRB per kapita Lhokseumawe tanpa migas tahun 2025 adalah sebesar 54,64 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 3,61 juta rupiah dari tahun 2024.

Gambar 3.8
PDRB Per Kapita Lhokseumawe ADHB Tahun 2021-2025
(juta rupiah)



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2026

Gambar 3.9
PDRB Per Kapita Lhokseumawe ADHK Tahun 2021-2025
(juta rupiah)

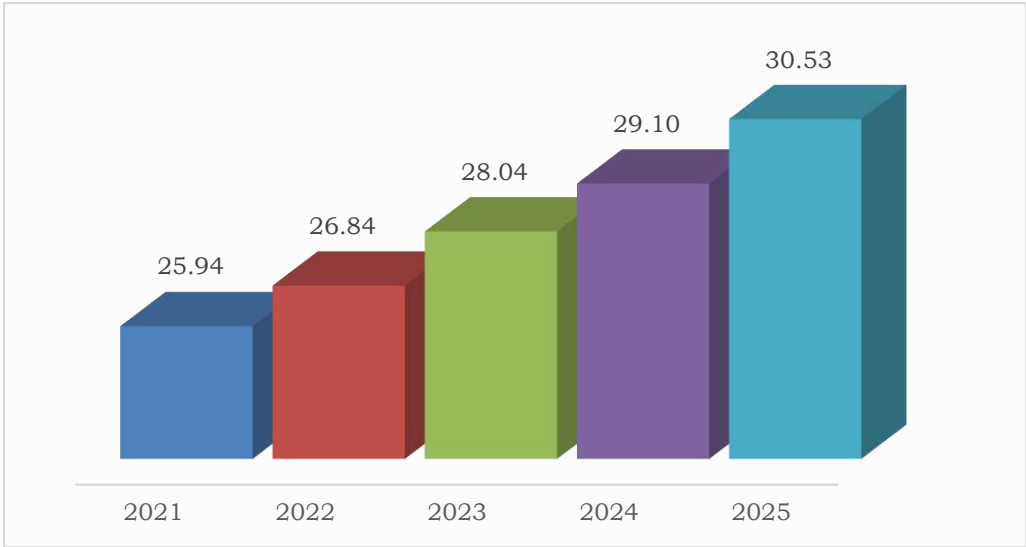


Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2026

Di sisi PDRB Atas Dasar Harga Konstan, PDRB per kapita Lhokseumawe juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2025 PDRB per kapita Lhokseumawe ADHK dengan migas adalah sebesar 41,74 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 0,77 juta rupiah dari tahun 2024. Sedangkan PDRB per kapita Lhokseumawe ADHK tanpa migas pada tahun 2025 adalah sebesar 35,66 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 0,79 juta rupiah dari tahun 2024.

Di sisi pengeluaran, nilai konsumsi rumah tangga per kapita maupun per-rumah tangga di Lhokseumawe selama kurun waktu 2021-2025 mengalami fluktuatif. Hal ini menunjukkan adanya perubahan daya beli penduduk yang juga indikasi adanya perubahan rata-rata pendapatan. Pada tahun 2025 terjadi peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2024. Nilai konsumsi rumah tangga per kapita meningkat sebesar 4,59 juta rupiah selama kurun waktu 5 tahun, dari 25,94 juta rupiah di tahun 2021 menjadi 30,53 juta rupiah di tahun 2025.

Gambar 3.10
Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ADHB
Tahun 2021-2025 (juta rupiah)



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2026

3.1.3.2. Pertumbuhan Ekonomi

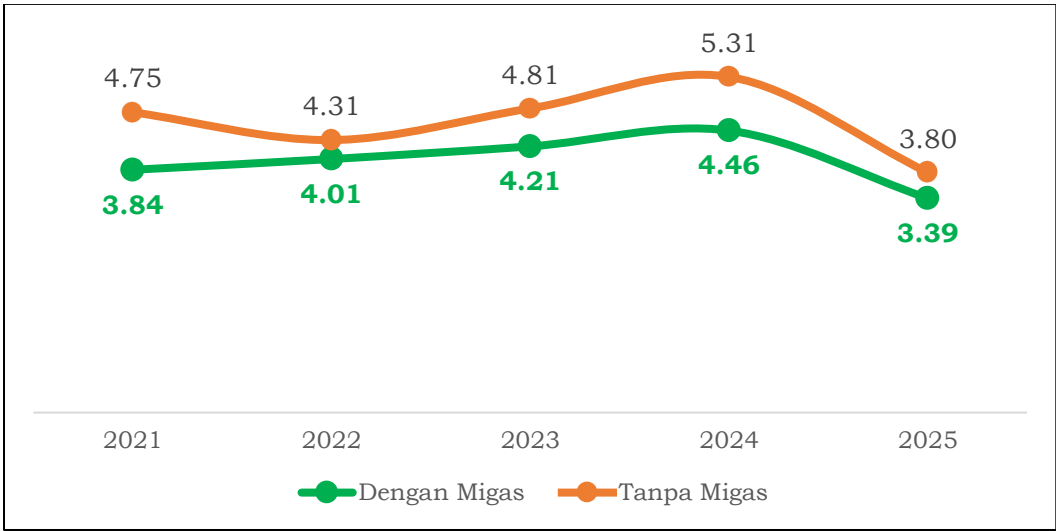
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe dalam kurun waktu 2021-2025 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi dengan migas tumbuh sebesar 3,84 persen mengalami peningkatan hingga tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 4,46 persen, kemudian mengalami



penurunan pada tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 3,39 persen sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas tahun 2025 tumbuh sebesar 3,80 persen.

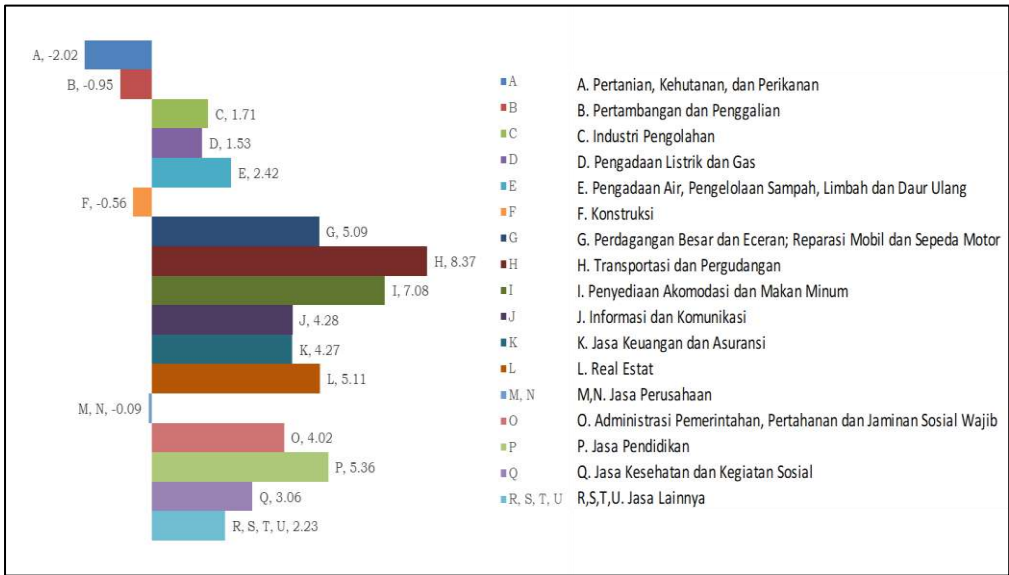
Gambar 3.11
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe
Tahun 2021-2025 (persen)



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2026

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe dengan migas selama lima tahun terakhir adalah sebesar 3,98 persen per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan tanpa migas 4,60 persen. Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe dengan migas sebesar 3,39 persen mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,46 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas pada tahun 2025 tumbuh sebesar 3,80 persen mengalami kontraksi dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,31 persen.

Gambar 3.12
Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2025 (persen)

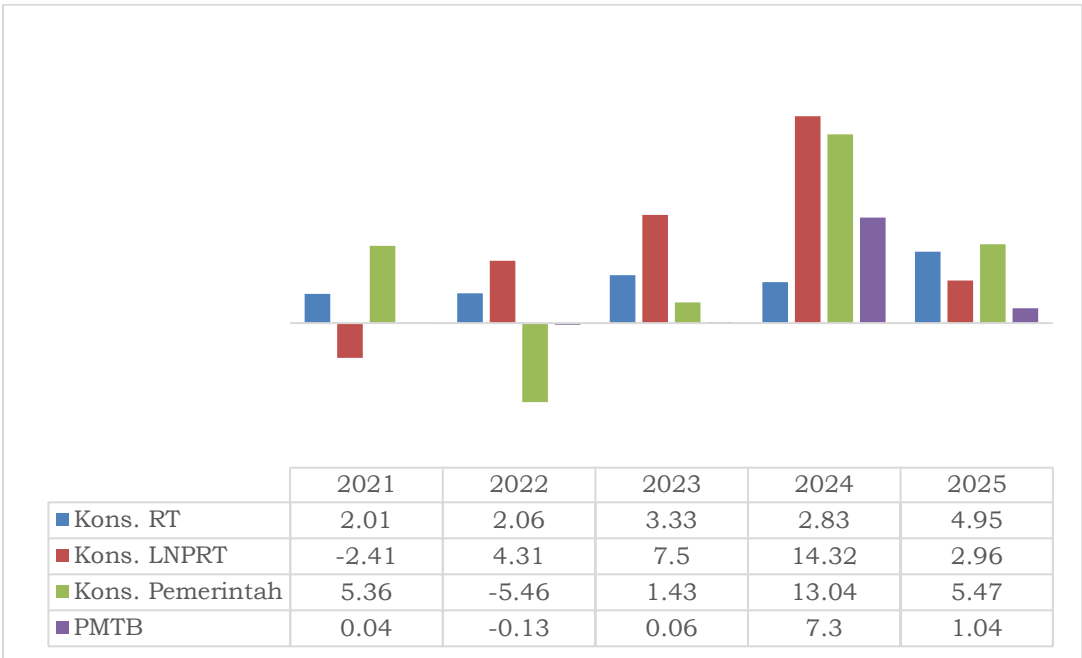


Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2025

Pada tahun 2025 kategori yang mengalami pertumbuhan terbesar adalah transportasi dan pergudangan (H) tumbuh sebesar 8,37 persen dan kategori yang mengalami pertumbuhan terkecil adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan (A) yang tumbuh sebesar -2,02 persen.

Dari sisi pengeluaran, laju pertumbuhan masing-masing komponen PDRB ADHK tumbuh berfluktuasi selama tahun 2021-2025, komponen Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2025 tumbuh sebesar 4,95 persen mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 2,12 persen. Komponen Konsumsi LNPRT pada tahun 2025 tumbuh sebesar 2,96 persen mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 14,32 persen. Komponen Konsumsi Pemerintah pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,47 persen juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 13,04 persen. Komponen PMTB pada tahun 2025 tumbuh sebesar 1,04 persen mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh 7,30 persen.

Gambar 3.13
Laju Pertumbuhan PDRB Lhokseumawe ADHK
Menurut Pengeluaran Tahun 2021-2025 (persen)



Sumber : BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan capaian pertumbuhan ekonomi Aceh dan Nasional, pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe masih berada dibawah Aceh dan Nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2024 sebesar 4,66 persen dan Nasional sebesar 5,02 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih diperlukan intervensi pada berbagai sektor atau lapangan usaha untuk percepatan pertumbuhan ekonomi serta mencari lapangan usaha alternatif sebagai unggulan untuk pengembangan, serta terus melakukan inovasi melalui diversifikasi produk, ekspansi usaha, meningkatkan daya saing dan keberlanjutan.

3.1.3.3. Laju Inflasi

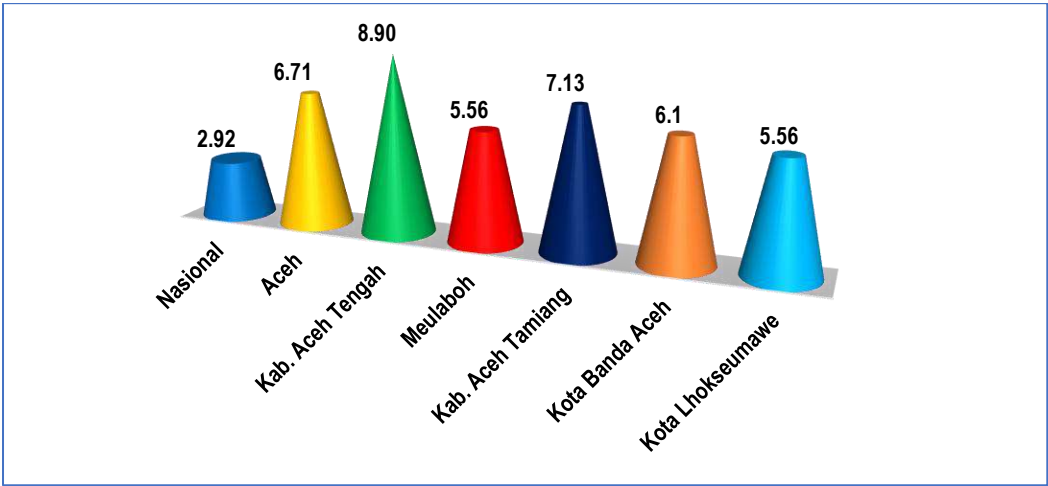
Laju inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan. Peningkatan inflasi akan berdampak pada penurunan perkembangan ekonomi, dan secara umum akan menurunkan daya saing ekonomi. Dampak lain dari peningkatan inflasi ialah bertambahnya jumlah pengangguran, menurunnya pendapatan riil masyarakat, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.

Pengendalian inflasi menjadi hal penting dalam upaya memberikan pondasi yang kuat pada perkembangan perekonomian. Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat guna menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Anggaran pemerintah terus berperan meredam sebagian dampak inflasi akibat gejolak harga global serta fluktuasi harga akibat gangguan suplai. Selain itu pengendalian inflasi secara konsisten terus dilakukan melalui penguatan sinergi dengan Bank Indonesia di tingkat pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Strategi-strategi terus ditempuh melalui kebijakan menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, menjadi dan mengawasi kelancaran distribusi, serta melakukan komunikasi efektif untuk menekan ekspektasi inflasi.

Hingga akhir Desember 2025 terjadi inflasi *year on year* (yoy) Kota Lhokseumawe sebesar 5,56%. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 10,19%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,1%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,84%; kelompok kesehatan sebesar 2,02%; kelompok transportasi sebesar 1,3%; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 5,04%; kelompok pendidikan sebesar 1,08%; kelompok penyediaan makan dan minuman/restoran sebesar 5,26%; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 11,99%. Sementara itu kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar (0,16%).

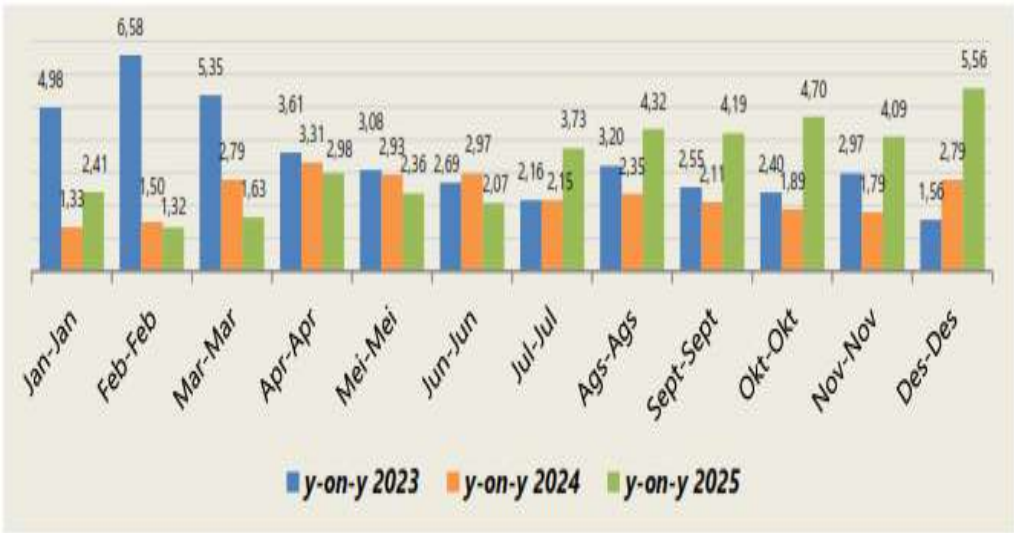
Jika ditinjau inflasi pada 5 kabupaten/kota di Aceh pada Desember 2025, seluruhnya mengalami inflasi *year to year*. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupten Aceh Tengah sebesar 8,90% dengan IHK sebesar 117,81 dan terendah terjadi di Meulaboh dan Kota Lhokseumawe sebesar 5,56% persen dengan IHK masing-masing sebesar 114,67 dan 112,20.

Gambar 3.14
Inflasi Nasional, Aceh, Lhokseumawe dan Kabupaten/Kota di Aceh Desember 2025 (persen)



Sumber: <https://bps.go.id/id>, 2026

Gambar 3.15
Tingkat Inflasi Year on Year Lhokseumawe Bulan Desember 2023-2025 (persen)



Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, 2026

Inflasi pada tahun 2026 diperkirakan akan terjaga stabil dan terkendali dalam rentang sasaran. Namun demikian, beberapa risiko yang dapat memberikan tekanan inflasi tetap perlu diwaspadai utamanya fluktuasi harga komoditas global maupun fenomena El Nino yang mendorong panen mundur. Beberapa strategi kebijakan dalam hal pengendalian inflasi yaitu kebijakan moneter *pro-stability* dan kebijakan lain yang *pro-growth*; serta optimalisasi anggaran baik APBN maupun APBD sebagai *shock absorber*. Selain itu juga hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam menjaga inflasi agar tetap terkendali yaitu:

- Keterjangkauan harga: peningkatan pelaksanaan operasi pasar murah dan program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP); dan Bantuan pangan dan BLT Mitigasi Risiko Pangan.

- Ketersediaan pasokan: penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); akses pembiayaan KUR dan kredit alsintan; serta penyediaan pupuk bersubsidi.
- Kelancaran distribusi: perluasan Kerjasama Antardaerah (KAD).
- Komunikasi efektif: pemantauan dan penyediaan data harga serta pasokan yang tepat waktu dan akuntabel; komunikasi upaya pengendalian inflasi termasuk pembinaan dari Kemendagri melalui Rakor Mingguan.

Selanjutnya langkah strategis untuk menjaga konsistensi inflasi dalam kisaran target nasional yaitu:

1. Melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang konsisten dengan upaya mendukung pengendalian inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
2. Mengendalikan inflasi kelompok *Volatile Food* agar dapat terkendali di bawah 5 persen, dengan fokus pada komoditas beras, aneka cabai, dan aneka bawang;
3. Menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan untuk memitigasi risiko jangka pendek, termasuk mengantisipasi pergeseran musim panen dan peningkatan permintaan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
4. Memperkuat ketahanan pangan melalui upaya peningkatan produktivitas dan hilirasasi pangan;
5. Memperkuat ketersediaan data pasokan pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi;
6. Memperkuat sinergi TPID-TPID antara lain melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP); serta
7. Memperkuat komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

3.1.3.4. Gini Ratio

Gini Ratio merupakan salah satu alat untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Perkembangan gini ratio Kota Lhokseumawe selama periode lima tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif. Angka gini ratio Kota Lhokseumawe tahun 2025 sebesar 0,344. Masih berada di atas angka gini ratio Aceh yang sebesar 0,274. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Lhokseumawe masih termasuk dalam “kategori rendah” karena berada pada $< 0,4$. Pada tahun 2022 gini ratio Kota Lhokseumawe sebesar 0,348, turun pada tahun 2023 menjadi 0,296.

3.1.3.5. Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan masih menjadi topik pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di seluruh wilayah di Aceh tak terkecuali di Lhokseumawe. Dalam *Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development*, mengakhiri kemiskinan juga menjadi tujuan pertama dari tujuh belas yang disepakati dalam SGD.

Untuk mengukur tingkat kemiskinan, diperlukan batas/garis kemiskinan. Garis kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang dibutuhkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan

makanan maupun kebutuhan non makanan. Garis kemiskinan di Aceh (Perkotaan+Perdesaan) untuk makanan dan bukan makanan pada Maret 2025 sebesar Rp.676.247,-, meningkat dari tahun sebelumnya (Maret 2024) sebesar Rp.661.227,-. Garis kemiskinan di Kota Lhokseumawe pada Maret 2025 sebesar Rp.529.671,- meningkat dari tahun sebelumnya (Maret 2024) sebesar Rp.522.671,-.

Selanjutnya jika ditinjau dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2025 (Maret) di Aceh berjumlah 704,69 ribu orang atau sebesar 12,33 persen. Angka ini turun dibanding Maret 2024 yang sebesar 804,53 ribu orang (14,23 persen). Selama periode Maret 2024-Maret 2025, penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 16,37 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan mengalami penurunan sebesar 83,47 ribu orang. Di Kota Lhokseumawe jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 berjumlah 19,9 ribu orang atau 9,01 persen. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan jumlah penduduk miskin pada September 2024 berjumlah 22,77 ribu orang atau mencapai 10,44 persen. Angka ini menjadikan Kota Lhokseumawe berada pada peringkat ketiga penduduk miskin terendah setelah Kota Langsa sebesar 8,59 persen dan Kota Banda Aceh sebesar 5,45 persen. Walaupun angka kemiskinan di Kota Lhokseumawe berada di bawah rata-rata kemiskinan Aceh (12,33 persen), namun angka kemiskinan di Kota Lhokseumawe masih berada di atas kemiskinan nasional yang hanya sebesar 8,25 persen.

Dari sisi kemiskinan ekstrem, berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Penyampaian Data Kemiskinan Ekstrem Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024-2025, persentase penduduk miskin ekstrem tahun 2025 di Kota Lhokseumawe sebesar 0,81 persen turun sebesar -0,29 persen jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,10 persen. Penurunan tersebut tidak terlepas dari upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menangani kemiskinan ekstrem melalui belanja APBK, intervensi langsung bersama pemangku kepentingan terkait dalam memverifikasi data miskin ekstrem tersebut. Selain itu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem diantaranya:

- a. Program Keluarga Harapan diprioritaskan di wilayah kantong kemiskinan;
- b. Mengupayakan pertumbuhan inklusif;
- c. Memfaatkan program kesehatan untuk memecahkan masalah lokal;
- d. Memanfaatkan program Pendidikan Aceh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- e. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
- f. Meningkatkan efektivitas dana desa;
- g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan kemiskinan ekstrem di daerah.

3.1.3.6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Agenda nasional transformasi ekonomi memberikan dampak positif pada pencapaian tingkat pengangguran terbuka. Pada Agustus 2025, tingkat pengangguran terbuka nasional mengalami penurunan



sebesar 0,06 persen dari 4,91 persen di tahun 2024 menjadi 4,85 persen. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2024 sebanyak 152,11 juta orang, naik 4,40 juta orang dibandingkan Agustus 2023. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 1,15 persen point dibanding Agustus 2023.

Di Aceh penduduk usia kerja menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2025 tercatat sekitar 4,16 juta orang. Bila dirinci menurut jenis kelamin, penduduk usia kerja perempuan tercatat sebanyak 2,08 juta orang atau 50,09 persen dari total penduduk usia kerja di Aceh. Jumlah tersebut lebih banyak bila dibandingkan dengan penduduk usia kerja laki-laki yang tercatat sebanyak 2,07 juta (49,91 persen). Hal ini berarti rasio jenis kelamin penduduk usia kerja sebesar 99,64 persen atau untuk setiap 100 penduduk usia kerja perempuan terdapat sekitar 99 penduduk usia kerja laki-laki.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Aceh pada Agustus 2025 tercatat sebesar 65,32 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja, sekitar 65 orang termasuk angkatan kerja, atau dapat diartikan dari 1.000 orang penduduk usia kerja sekitar 653 orang produktif secara ekonomi. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah/negara.

Jika dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka di Aceh pada Agustus 2025 tercatat sebesar 5,64 persen yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekitar 6 orang yang menganggur. Bila dilihat menurut jenis kelamin, TPT laki-laki lebih rendah dari pada TPT perempuan, tercatat masing-masing sebesar 4,48 persen dan 7,52 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Lhokseumawe sangat terlihat jika dibandingkan dengan data pengangguran di tingkat nasional maupun provinsi Aceh. Angka pengangguran Kota Lhokseumawe masih berada di atas dua digit tahun 2021 sebesar 11,16 persen. Pada tahun 2022 TPT di Kota Lhokseumawe turun menjadi 9,15 persen, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2025 menjadi 8,24 persen, akan tetapi penurunan tersebut masih menempatkan Kota Lhokseumawe pada posisi Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi di Aceh.

Untuk meningkatkan jumlah pekerja di bidang pekerjaan, pemerintah dapat berupaya untuk mendorong kewirausahaan dalam menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran; memberikan bantuan insentif untuk membuka dan melakukan formalisasi usaha; termasuk gerakan ekonomi kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan guna memperkuat produk-produk usaha mikro, kecil dan menengah. Mendorong pertumbuhan wirausaha yang inovatif, inklusif dan berkelanjutan dengan sinkronisasi program kewirausahaan.

Berdasarkan uraian kondisi dan arah kebijakan ekonomi baik Nasional, Aceh dan Kota Lhokseumawe secara umum dapat digambarkan capaian indikator makro selama lima tahun terakhir sebagai berikut.



Tabel 3.1
Capaian Indikator Makro Tahun 2021-2025

No	Indikator Makro	2021	2022	2023	2024	2025
1	Pertumbuhan Ekonomi					
	Lhokseumawe	3.84%	4.01%	4.21%	4.46%	3.39%
	Aceh	2.79%	4.21%	4.23%	4.66%	2.97%
	Nasional	3.70%	5.31%	5.04%	5.02%	5.11%
2	Indeks Pembangunan Manusia					
	Lhokseumawe	78.92	79.38	80.26	80.89	81.75
	Aceh	73.48	74.11	74.7	75.36	76.23
	Nasional	73.16	73.77	74.39	75.02	75.90
3	Tingkat Kemiskinan					
	Lhokseumawe	11.16%	10.84%	10.73%	10.44%	9.01%
	Aceh	15.53%	14.75%	14.45%	12.64%	12.33%
	Nasional	9.71%	9.57%	9.36%	8.57%	8.47%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka					
	Lhokseumawe	11.16%	9.15%	8.78%	8.47%	8.24%
	Aceh	15.53%	14.75%	14.45%	12.64%	5.64%
	Nasional	9.71%	9.57%	9.36%	8.57%	4.85%
5	Rasio Gini					
	Lhokseumawe	0.296	0.348	0.293	0.326	0.344
	Aceh	0.323	0.291	0.296	0.294	0.274
	Nasional	0.381	0.381	0.388	0.381	0.363

Sumber: Badan Pusat Statistik

3.1.3.7. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2027

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi Aceh, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe pada tahun 2027 yaitu “Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Fasilitas Publik Penciptaan Lingkungan yang Aman dan Berkualitas, Pengembangan Ruang Publik yang Bermanfaat.”

Melalui arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut telah ditetapkan indikator makro ekonomi baik secara nasional, Aceh, dan Kota Lhokseumawe sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2
Target Makro Ekonomi Tahun 2027

No	Indikator Makro	Capaian 2025	Target RPJMK 2025-2029	Target RKPK 2027
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.39	4.53-4.82	3.42-3.90
2	Indeks Pembangunan Manusia	81.75	82.10-82.50	82.10-82.50
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9.01	8.85-8.70	8.85-8.70
4	Pengangguran Terbuka (%)	8.24	7.65-7.80	8.00-7.80
5	Rasio Gini	0.344	0.293-0.320	0.293-0.320

Sumber : BPS, dan RPJMK Lhokseumawe 2025-2029.

Dalam rangka pencapaian target perekonomian tahun 2027, maka secara garis besar kerangka Kebijakan Ekonomi Kota Lhokseumawe yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal dengan mendorong pelaku usaha untuk menciptakan produk yang berdaya saing dan berstandarisasi, serta menyediakan lokasi bagi UMKM untuk memasarkan produk melalui *event Ahad Festival* setiap minggu;
2. Penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui penyaluran bantuan yang tepat sasaran serta memberikan pelatihan ketenagakerjaan kepada warga miskin;
3. Menjaga keseimbangan inflasi melalui pelaksanaan Pasar Murah dan Pasar Tani untuk penyediaan bahan-bahan kebutuhan pokok yang terjangkau oleh masyarakat;
4. Melakukan Kerjasama Antar Daerah dalam rangka pengendalian inflasi dan pengendalian ketersediaan bahan pangan untuk kebutuhan pokok masyarakat;
5. Menjaga ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

3.1.3.8. Tantangan dan Prospek Ekonomi

Kinerja perekonomian di Provinsi Aceh pada tahun 2026 secara keseluruhan diperkirakan tumbuh membaik pada kisaran 3,09-3,69 persen dibandingkan tahun 2025 yang tumbuh sebesar 2,79 persen. Membaiknya pertumbuhan ekonomi Aceh seiring dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi. Membaiknya pertumbuhan ekonomi Aceh terutama didorong oleh peningkatan kinerja sektor konstruksi, seiring dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terdampak bencana, serta peningkatan kinerja transportasi dan perdagangan seiring dengan pulihnya jalur distribusi daerah yang terdampak.

Di tengah kondisi global yang masih diselimuti ketidakpastian, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian dalam negeri mampu tumbuh positif pada tahun 2026 dan 2027. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, sinergi di antara pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam menjaga momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Disisi lain, Bank Indonesia juga memberikan bauran kebijakan yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, keuangan inklusif dan hijau. Kebangkitan ekonomi nasional memerlukan transformasi di sektor riil, seperti infrastruktur, konektivitas fisik dan digital, hilirisasi mineral batubara, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif dan digitalisasi. Selain itu, dibutuhkan pula perizinan yang ramah untuk iklim bisnis dan investasi.

Memperhatikan perkembangan perekonomian global yang diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa perlu mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian Kota Lhokseumawe. Di sektor domestik, perlu terus ditingkatkan industri kecil menengah yang kuat

dan berdaya saing, sementara di sektor eksternal perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang berdaya saing di pasar sekaligus mempunyai produktivitas tinggi.

Tantangan berikutnya yang dihadapi antara lain tingkat kemiskinan, inflasi, dan tingkat pengangguran di Kota Lhokseumawe yang berada di atas rata-rata Aceh, dan juga Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah. Pemerintah perlu mendorong kinerja perekonomian sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diantaranya dengan:

- a. Menyediakan regulasi kemudahan investasi dan pemberian insentif;
- b. Pemanfaatan data P3KE/DTSEN dalam pengentasan kemiskinan;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
- d. Meningkatkan penyaluran ZIS untuk pemberdayaan;
- e. Pendampingan dan pelatihan untuk UMKM dan IKM;
- f. Pelatihan berbasis kompetensi untuk tenaga kerja;
- g. Meningkatkan operasi pasar murah dan pasar tani;
- h. Mengembangkan objek-objek wisata yang ada;
- i. Menjaga dan meningkatkan keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Kota

Keuangan daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan semua hak dan kewajiban Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Pemerintah Kota Lhokseumawe sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Terkait dengan hal tersebut serta dalam rangka mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat maka perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Salah satu indikator kinerja penilaian capaian kinerja keuangan daerah antara lain adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan selama periode 2020 sampai dengan 2024, Pemerintah Kota Lhokseumawe dinyatakan telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga memperoleh opini WTP. Adapun opini laporan keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut.



Tabel 3.3
Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe
Tahun 2021-2025

Tahun	Capaian	Nomor Laporan	Tanggal Laporan
2021	WTP	352/X/XVIII.BAC/04/2022	20 April 2022
2022	WTP	390/S/XVIII.BAC/05/2023	12 Mei 2023
2023	WTP-PSH	253/S/XVIII.BAC/05/2024	20 Mei 2024
2024	WTP-PSH	4.A/LHP/XVIII.BAC/05/2025	21 Mei 2025
2025	WTP	6.A/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD/2026	01 Mei 2026

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe, 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe selama periode 2021-2025, Pemerintah Kota Lhokseumawe dinyatakan telah menyajikan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, hanya saja opini terhadap laporan keuangan tahun 2023 dan 2024 dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian dengan Penekanan Suatu Hal (WTP-PSH). Hal ini disebabkan karena BPK menemukan beberapa kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe, antara lain: a). penyusunan APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023 untuk menyelesaikan kewajiban Tahun Anggaran 2023 dan memulihkan kas yang dibatasi penggunaannya belum memadai; b). kekurangan volume atas 28 paket pekerjaan belanja modal jalan, jaraingan dan irigasi pada dua perangkat daerah; dan c). penyertaan modal Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak sepenuhnya memadai.

Secara umum, indeks kapasitas fiskal Kota Lhokseumawe berada pada kategori sangat rendah. Kondisi fiskal daerah memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja APBK dari tahun ke tahun, khususnya dalam proses penetapan APBK yang harus disepakati bersama dengan DPRK. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Informasi tentang penetapan APBK Lhokseumawe selama kurun waktu 2021-2025 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.4
Penetapan APBK Lhokseumawe Tahun 2021-2025

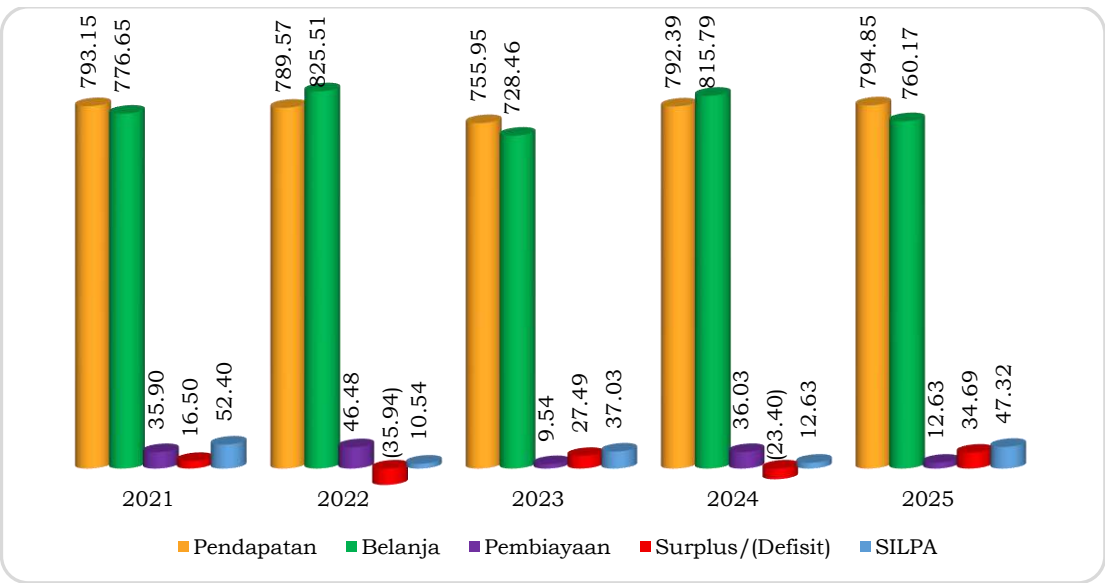
Tahun	Qanun Kota Lhokseumawe	Tanggal Pengesahan	Pagu (Rp.)
2021	Nomor 10 Tahun 2020	29 Desember 2020	833.757.195.523,-
2022	Nomor 7 Tahun 2021	31 Desember 2021	820.651.428.592,-
2023	Nomor 5 Tahun 2022	30 Desember 2022	779.444.500.000,-
2024	Nomor 2 Tahun 2023	29 Desember 2023	800.078.811.672,-
2025	Nomor 01 Tahun 2025	14 Januari 2025	833.801.374.315,-

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe, 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama kurun waktu tahun 2021-2024 APBK Lhokseumawe telah ditetapkan secara tepat waktu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, hanya saja pada tahun 2025 penetapannya pada tahun berjalan.

Kinerja pelaksanaan APBK Lhokseumawe dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kota Lhokseumawe selama kurun tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.16
Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 (Milyar Rp)



Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2021-2025 (*Audited*)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) *Audited* selama kurun waktu tahun 2021-2024 realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe cenderung berfluktuatif dan mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2021 realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe sebesar Rp.793,15 milyar, mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi Rp.792,44 milyar dengan pertumbuhan minus 1,06 persen pertahunnya. Sedangkan realisasi pendapatan tahun 2025 sebesar Rp.794,85 milyar. Berfluktuatifnya pendapatan Kota Lhokseumawe selama kurun waktu 2021-2025 disebabkan oleh penurunan penerimaan dana pemerintah pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Penurunan Transfer ke Daerah oleh Pemerintah Pusat akibat efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat



sangat berdampak secara signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah yang mengalami penurunan. Peningkatan pendapatan daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 karena meningkatnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terutama pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pendapatan daerah tertinggi tercatat pada tahun 2025, sedangkan realisasi pendapatan terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp.755,95 milyar.

Seiring dengan berfluktuasinya realisasi pendapatan daerah, belanja daerah juga mengalami fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan 0,16 persen pertahunnya. Realisasi belanja daerah pada tahun 2021 sebesar Rp.776,65 milyar, selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun 2022 menjadi Rp.825,51 milyar, akan tetapi pada tahun 2023 turun kembali menjadi Rp.728,46 milyar, dan tahun 2024 realisasi belanja daerah kembali mengalami kenaikan menjadi Rp.815,79 milyar, dan pada tahun 2025 realisasi belanja kembali mengalami penurunan menjadi Rp.760,17 milyar. Secara umum belanja daerah tertinggi selama lima tahun terakhir tercatat pada tahun 2022 yang mencapai sebesar Rp.825,50 milyar, dan realisasi belanja daerah terendah tercatat pada tahun 2023 yang sebesar Rp.728,46 milyar.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 *Audited*, selama kurun waktu lima tahun terakhir, realisasi APBK Lhokseumawe sangat berfluktuatif, dimana realisasi APBK terendah terjadi pada tahun 2021 yaitu 88,41 persen atau sebesar Rp.782.796.321.455,- dari anggaran sebesar Rp.885.454.861.282,- dengan SILPA mencapai Rp.52.399.883.518,-. Realisasi APBK tertinggi tercatat pada tahun 2024 yang mencapai 96,20 persen atau sebesar Rp.816.786.503.747,- dari anggaran sebesar Rp.849.032.964.142,- dengan SILPA sebesar Rp.12.634.946.009,-. Sedangkan untuk realiasi APBK Tahun 2025 mencapai 90,77 persen atau sebesar Rp.760.165.589.117,- dari anggaran sebesar Rp.837.447.857.637,-. Tren SILPA yang terjadi selama tahun 2021-2025 setiap tahunnya menunjukkan angka yang fluktuatif. Salah satu penyebab terjadinya SILPA tersebut disebabkan oleh tertundanya pekerjaan pembangunan akibat pembatasan sosial, adanya refocusing dan efesiensi anggaran. Lebih jelasnya untuk mengetahui target dan realisasi APBK Lhokseumawe Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi APBK Lhokseumawe
Tahun 2021-2025

Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi		SILPA
		Rp.	%	
2021	885,454,861,282	782,796,321,455	88.41	52,399,883,518
2022	876,851,664,000	827,509,672,418	94.37	10,541,034,674
2023	800,260,907,647	729,461,011,932	91.15	37,029,821,414
2024	849,032,964,142	816,786,503,747	96.20	12,634,946,009
2025	837,447,857,637	760,165,589,117	90.77	47,322,459,261

Sumber: LRA Kota Lhokseumawe 2021-2025 (*Audited*)

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe

Pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBK yang setiap tahun ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe. APBK merupakan suatu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBK maka analisis pada bab ini terkait pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi APBK Lhokseumawe dan laporan keuangan selama 5 (lima) tahun sebelumnya.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah juga dilakukan untuk mengevaluasi capaian kinerja keuangan daerah dan untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Gambaran capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud meliputi capaian kinerja pendapatan, tren realisasi belanja, dan capaian pembiayaan.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, karena APBK merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama yaitu: a) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya; b) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; c) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

Prediksi kemampuan keuangan merupakan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif, yaitu tidak statis dan disesuaikan dengan kondisi terkini pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya. Proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rencana kerja pemerintah.

Untuk mengetahui tentang gambaran realisasi pendapatan dan target/proyeksi pendapatan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.6
Realisasi dan Target/Proyeksi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2022-2027

NO.	URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025	APBK 2026	TARGET 2027	PROYEKSI 2028
1	PENDAPATAN DAERAH	750,219,232,672	792,494,351,407	794,853,102,370	692,756,169,636	682,134,795,603	791,016,858,681
1.1	Pendapatan Asli Daerah	67,901,946,334	64,625,324,669	79,923,174,663	85,778,987,685	79,855,590,652	87,852,498,040
1.1.1	Pajak Daerah	39,586,915,813	41,649,012,954	62,744,923,750	65,093,285,236	66,100,041,544	63,599,849,065
1.1.2	Retribusi Daerah	3,733,420,512	2,796,841,402	2,803,341,402	3,566,500,000	3,566,500,000	3,626,500,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3,236,124,545	9,296,221,048	4,928,391,225	10,346,145,125	4,387,537,255	10,858,647,667
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	21,345,485,464	10,883,249,265	9,446,518,286	6,773,057,325	5,801,511,853	9,767,501,308
1.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	625,176,024,568	649,664,202,559	635,638,922,698	565,559,789,000	560,918,117,000	656,391,373,000
1.2.1	Dana Otonomi Khusus Aceh dan Tambahan Infrastruktur	-	-	-	28,371,931,000	23,377,794,000	-
1.2.2	Insentif Fiskal Kinerja	-	5,485,809,000	7,385,226,000	-	-	7,385,226,000
1.2.3	Dana Bagi Hasil (DBH)	25,249,350,413	23,974,451,000	22,176,741,000	8,038,103,000	8,390,568,000	20,977,415,000
1.2.4	Dana Alokasi Umum (DAU)	436,369,459,000	461,173,597,656	453,532,225,134	379,925,153,000	379,925,153,000	463,323,358,000
1.2.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	22,632,985,556	20,389,645,000	6,821,282,450	-	-	6,934,508,000
1.2.6	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	79,522,976,344	76,238,534,903	93,272,370,696	96,361,110,000	96,361,110,000	96,956,727,000
1.2.8	Dana Desa (DD)	61,401,253,255	62,402,165,000	52,451,077,418	52,863,492,000	52,863,492,000	60,814,139,000
1.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56,919,261,770	68,446,173,561	28,333,259,165	27,403,444,216	27,347,137,216	30,298,976,958
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH)	34,250,277,597	35,910,026,739	25,958,051,440	24,403,444,216	24,403,444,216	30,298,976,958
1.3.2	Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA)	22,668,984,173	32,536,146,822	-	-	-	-
1.3.3	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	2,375,207,725	3,000,000,000	2,943,693,000	-
1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	222,000,000	9,758,650,618	50,957,745,844	14,013,948,735	14,013,950,735	16,474,010,683
1.4.1	Pendapatan Hibah	222,000,000	-	-	-	-	-
1.4.2	Dana Darurat	-	-	40,185,907,000	-	-	-
1.4.3.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	9,758,650,618	10,771,838,844	14,013,948,735	14,013,950,735	16,474,010,683
	JUMLAH PENDAPATAN	750,219,232,672	792,494,351,407	794,853,102,370	692,756,169,636	682,134,795,603	791,016,858,681

Sumber : LRAPBK Lhokseumawe Tahun 2023-2025 (Audited), APBK 2026, BPKD Kota Lhokseumawe, SIPD-RI Tahun 2026.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan pada Tahun 2023 sebesar Rp.755.949.798.672,-. Realisasi ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.67.901.946.334,- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.630.906.590.568,- dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.56.919.261.770,- serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.222.000.000,-. Realisasi Tahun 2023 ini lebih rendah jika dibandingkan dengan realiasi Tahun 2022 yang mencapai Rp.789.566.096.080,-.

Selanjutnya realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2024 sebesar Rp.792.391.628.342,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.64.522.601.604,-; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.649.664.202.559,-; dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.68.446.173.561,- serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.9.758.650.618,-. Besaran realisasi pendapatan tahun 2024 relatif lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Sedangkan Tahun 2025 jumlah pendapatan Kota Lhokseumawe terealisasi sebesar Rp.794.853.102.370,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.79.923.174.663,-; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.635.638.922.698,-; Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.28.833.259.165,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.50.957.746.844,-. Berdasarkan LRA hasil Audit BPK realiasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025 salah satunya terdapat realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sebesar Rp.34,384 Milyar.

Dalam APBK Lhokseumawe Tahun 2026 Pendapatan Kota Lhokseumawe ditargetkan sebesar Rp.692.756.169.636,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.85.778.987.685,- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.565.559.789.000,- Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.27.403.444.216,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.14.013.948.735,-. Pendapatan yang dianggarkan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dibandingkan dengan pendapatan tahun 2025, pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2026 terjadi penurunan sebesar 11,00 persen atau sebesar Rp.85.658.127.454,-.

Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya dan target pendapatan 2026, pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2027 direncanakan sebesar Rp.682.134.795.603,-. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.79.855.590.652,-; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.560.918.117.000,-; dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.27.347.137.216,- serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.14.013.950.735,-.

Jumlah pendapatan yang direncanakan pada tahun 2027 lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pendapatan tahun berjalan (2026). Perbedaan target pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.5.923.397.033,- dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berkurang sebesar Rp.4.641.672.000,-, dan

Pendapatan Transfer Antar Daerah (Transfer Provinsi) sebesar Rp.56.307.000,-. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe mengalami kontraksi sebesar 1,53 persen atau sebesar Rp.10.621.374.033,- pada tahun 2027 dibandingkan 2026. Salah satu penyebab Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2027 mengalami kontraksi, yaitu (1) Pemerintah Pusat melakukan efisiensi Transfer Ke Daerah (TKD), sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Efisiensi anggaran ini akan terus berlanjut pada tahun 2027 dan berdampak secara signifikan terhadap kemampuan fiskal daerah yang terus mengalami tren penurunan.

Di samping itu PAD Kota Lhokseumawe juga belum optimal pencapaiannya, sehingga Kota Lhokseumawe masih sangat tergantung pada Pendapatan Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Beberapa penyebab belum optimalnya pencapaian PAD Kota Lhoskeumawe diantaranya: hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum sesuai dengan perjanjian kerjasama yaitu berupa bagi hasil atas usaha Rumah Sakit Arun yang berada di bawah pengelolaan PT. Pembangunan Lhokseumawe (PTPL); belum optimalnya pengelolaan retribusi daerah, terutama retribusi pengelolaan persampahan/kebersihan, dan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pendapatan daerah yang telah ditargetkan harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerimaan daerah, maka perlu adanya usaha meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau laba atas penyertaan modal pada BUMD serta lain-lain PAD yang sah, serta penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah dalam rangka optimalisasi atas pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan sebagai berikut:

1. intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara sebagai berikut :
 - a. melakukan pendekatan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penyempurnaan landasan hukum serta melakukan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;

- c. melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
 - e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait; dan
 - f. Peningkatan kualitas aparat pengelola pajak daerah dan retribusi daerah melakukan pendekatan
2. ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan potensi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan menambah jumlah wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah. Secara umum proses ini dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. melakukan pemutakhiran basis data pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
 - c. melakukan pendataan ke seluruh objek pajak dan subjek pajak yang dapat dikenakan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. pengkajian terhadap potensi penerimaan pajak daerah;
 - e. pemungutan terhadap jenis retribusi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - f. meningkatkan peran seluruh stakeholder yang terkait dengan penerimaan pajak daerah terutama PBB dan BPHTB.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah, kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan asli daerah melalui:

- a. pemantauan pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak daerah berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *tapping box* dan sejenisnya dengan tujuan antara lain:
 - Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak daerah;
 - Mempermudah Wajib Pajak Daerah dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
 - Meningkatkan efesiensi dan pemungutan pajak daerah;
 - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak daerah;
 - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak daerah;
 - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak daerah.
- b. pemberian *Reward*, antara lain:
 - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum jatuh tempo melalui non tunai (Action Bank Aceh);
 - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan;

- Pemberian *doorprize*/souvenir bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada event-event yang digelar Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- c. implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah;
- d. melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
- e. meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.

Dalam rangka optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe, beberapa strategi yang dapat ditempuh untuk peningkatan Pajak Daerah yaitu:

- Peningkatan promosi pariwisata dan kerjasama dengan industri perhotelan;
- Mengidentifikasi lebih lanjut terkait rumah kos maupun jasa penginapan lainnya yang berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah;
- Pemantauan pemasangan *tapping box*.
- Pendataan yang tepat dan akurat terhadap wajib pajak daerah;
- Melakukan audit rutin penggunaan *tapping box* oleh pihak independen;
- Meningkatkan pengawasan dan dukungan acara hiburan lokal;
- Pemantauan berkelanjutan untuk mengidentifikasi perubahan titik, jumlah dan jenis reklame;
- Melakukan audit menyeluruh terhadap ruang reklame yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe;
- Memastikan bahwa semua iklan yang ada telah dikenai pajak dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Pembaharuan peraturan mengenai harga satuan listrik dan nilai jual tenaga listrik atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, dan menaikkan harga satuan listrik untuk klasifikasi industri;
- Menjalin dan menjaga komunikasi dengan baik dan keterbukaan informasi antara industri dan pemerintah;
- Melakukan pemeriksaan secara reguler terhadap perhitungan pajak konsumsi tenaga listrik dari sumber lain;
- Melakukan sosialisasi pajak, terutama pajak MBLB kepada objek pajak dan badan usaha untuk menyusun laporan keuangan yang memuat penjualan MBLB, sehingga pemerintah dapat memungut pajak MBLB berdasarkan penjualan riil;
- Memastikan kebenaran jumlah pembayaran pajak parkir yang dilaporkan oleh penyelenggara parkir;
- Melakukan pemasangan meteran air pada usaha-usaha menggunakan air tanah, sehingga dasar pajak pajak sesuai dengan nilai perolehan air tanah dan pembagian kelompok yang tertera di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 49 tahun 2017;
- Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya strategi yang dapat ditempuh untuk pencapaian potensi Retribusi Daerah, yaitu:

- Melakukan diversifikasi layanan;
- Peningkatan kualitas layanan;
- Promosi pelayanan untuk objek retribusi baru;
- Melakukan Kemitraan dengan Pihak Lain;
- Penetapan tarif yang kompetitif dan transparan;
- Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pelayanan kebersihan;
- Modernisasi dan integrasi pembayaran retribusi pelayanan kebersihan;
- Melakukan perluasan jangkauan layanan;
- Melakukan penertiban terhadap juru parkir liar dan titik parkir baru;
- Penataan tanda dan rambu parkir (*park signs*);
- Melakukan inovasi skema dan pembayaran parkir di tepi jalan umum;
- Meningkatkan penjualan di pasar melalui pendampingan, pemasaran dan penyediaan fasilitas penunjang yang memadai;
- Mempermudah proses pembayaran retribusi melalui pembayaran elektronik sekaligus mengurangi potensi praktik manipulasi;
- Melakukan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk sewa, Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Pendapatan Transfer baik itu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah diarahkan pada program-program pembangunan yang mendorong perkembangan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa strategi perlu ditempuh dalam hal dana perimbangan diantaranya :

- mengalokasikan dana berdasarkan prioritas pembangunan;
- meningkatkan kesadaran Perangkat Daerah untuk menyusun rencana anggaran yang efisien dan efektif.

Peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah dan menjaga kestabilan politik dan keamanan daerah.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe

Arah kebijakan belanja Kota Lhokseumawe diarahkan pada pelaksanaan program yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran; penurunan prevalensi stunting; pengendalian inflasi, pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, dan peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas

pendidikan dan mutu kesehatan. Selanjutnya alokasi anggaran belanja harus tetap mengedepankan azas efisiensi dan efektivitas dengan mengacu pada penyusunan anggaran berdasar *money follow program*.

Kebijakan pengelolaan belanja Kota Lhokseumawe dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang direncanakan;
2. prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangan daerah;
3. setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. besaran plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja;
5. penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan perangkat daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).

Dalam rangka mewujudkan sinergitas program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe, maka kebijakan belanja Kota Lhokseumawe diarahkan untuk :

- a. pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
- b. pemenuhan Dana Bagi Hasil Kepada Desa, serta pemenuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa;
- c. mengusahakan alokasi belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen dan fungsi kesehatan 10 persen;
- d. mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah;
- e. belanja sesuai dengan sumber dana yang diperuntukkan penggunaan, terutama yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat;
- f. untuk belanja yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) masih mengikuti pedoman dan pagu indikatif sebagaimana tahun 2026, dan akan disesuaikan kembali pada tahapan selanjutnya berdasarkan pendapatan DAK Tahun 2027 yang diterima;
- g. mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat; peningkatan pendapatan masyarakat; dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan;
- h. mendukung percepatan penurunan stunting antara lain: kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita; kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti

penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting; kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

- i. mendukung pengendalian inflasi, antara lain melalui: peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis; pengendalian laju alih fungsi lahan; pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran; penguatan tata kelola logistik daerah; pengawasan harga dan operasi pasar;
- j. mendukung peningkatan investasi antara lain melalui: kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem *Online Single Submission* (OSS); dan mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber daya manusia;

Sesuai dengan arah kebijakan belanja daerah tersebut serta dengan mempertimbangkan realisasi kemampuan keuangan tahun-tahun sebelumnya, maka secara garis besar gambaran belanja daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.7
Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2027

NO.	URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025	APBK 2026	TARGET 2027	PROYEKSI 2028
2	BELANJA DAERAH	728,461,011,932	815,786,503,746	760,165,589,117	718,486,619,382	682,134,795,603	791,016,858,681
2.1	Belanja Operasi	548,509,273,989	597,233,963,149	579,206,471,002	566,647,170,144	546,502,941,664	571,437,527,993
2.1.1	Belanja Pegawai	316,584,344,048	340,436,176,707	379,803,151,991	414,168,925,358	379,632,277,635	367,747,536,043
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	177,812,072,024	187,048,276,819	172,450,479,788	140,436,665,594	151,024,390,228	186,543,546,160
2.1.3	Belanja Subsidi	470,000,000	1,143,000,000	1,021,000,000	527,500,000	1,403,200,000	1,000,000,000
2.1.4	Belanja Hibah	22,501,686,262	39,556,499,966	12,236,172,770	10,524,646,692	10,147,270,468	5,567,210,095
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	31,141,171,655	29,050,009,657	13,695,666,453	989,432,500	4,295,803,333	10,579,235,695
2.2	Belanja Modal	60,336,467,761	102,279,876,677	74,558,049,324	50,565,867,938	46,428,552,418	105,593,289,944
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15,627,696,279	18,620,998,870	25,979,699,630	4,994,380,846	7,503,500,165	18,862,769,803
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21,923,145,455	27,920,996,675	19,538,032,588	8,483,337,641	6,055,550,506	28,282,388,789
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18,771,759,227	50,092,283,747	24,008,203,106	34,612,626,901	30,393,979,197	52,122,863,870
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,013,866,800	5,645,597,385	5,032,114,000	2,475,522,550	2,475,522,550	6,325,267,482
2.3	Belanja Tak Terduga	52,650,368	457,862	390,288,964	9,725,000,000	2,500,000,000	500,000,000
2.3.1	Belanja Tak Terduga	52,650,368	457,862	390,288,964	9,725,000,000	2,500,000,000	500,000,000
2.4	Belanja Transfer	119,562,619,814	116,272,206,058	106,010,779,827	91,548,581,300	86,703,301,521	113,486,040,744
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	3,183,566,844	3,847,744,558	4,629,066,309	-	-	3,870,877,229
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	116,379,052,970	112,424,461,500	101,381,713,518	91,548,581,300	86,703,301,521	109,615,163,515
	JUMLAH BELANJA	728,461,011,932	815,786,503,746	760,165,589,117	718,486,619,382	682,134,795,603	791,016,858,681

Sumber : LRA 2023-2025 (Audited), APBK 2026, BPKD Kota Lhokseumawe, SIPD-RI Tahun 2026.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa, realisasi belanja Kota Lhokseumawe pada Tahun 2023 sebesar Rp.728.461.011.932,-. Realisasi ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.548.509.273.989,- Belanja Modal sebesar Rp.60.336.467.761,- Belanja Tak Terduga sebesar Rp.52.650.368,- dan Belanja Transfer sebesar Rp.119.562.619.814,-. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2024 realisasi belanja sebesar Rp.815.786.503.746,-. Realisasi ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.597.233.963.149,- Belanja Modal sebesar Rp.102.279.876.677,- Belanja Tak Terduga sebesar Rp.457.862,- dan selanjutnya Belanja Transfer sebesar Rp.116.272.206.058,-. Realisasi belanja Tahun 2023 dan 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 yang mencapai Rp.825.509.672.418,-. Tinggi rendahnya realisasi belanja tentu saja tidak terlepas dari besaran pendapatan daerah yang dapat direalisasikan pada tahun berkenaan.

Untuk Tahun Anggaran 2025 total belanja Kota Lhokseumawe diperkirakan terealisasi sebesar Rp.760.165.589.117,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.579.206.471.002,-; Belanja Modal sebesar Rp.74.558.049.324,-; Belanja Tak Terduga sebesar Rp.390.288.964,-; dan Belanja Transfer sebesar Rp.106.010.779.827,-.

Selanjutnya sesuai dengan rencana pendapatan daerah tahun 2027, belanja Kota Lhokseumawe direncanakan sebesar Rp.682.134.950.735,- yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi sebesar Rp.546.502.941.664,-;

Pada belanja operasi, alokasi sebesar Rp.379.632.277.635,- untuk memenuhi belanja pegawai yang digunakan untuk gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan PPPK yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; selanjutnya Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp.151.024.390.228,-; Belanja Subsidi yang diperuntukan untuk pelaksanaan pasar murah dalam rangka penanggulangan inflasi dan menjamin keterjangkauan daya beli masyarakat sebesar Rp.1.403.200.000,-; Belanja Hibah sebesar Rp.10.147.270.468,-; dan alokasi Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp.4.295.803.333,-.

b. Belanja Modal sebesar Rp.46.728.552.418,- terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.7.503.500.165,-; belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.6.055.550.506,-; belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp.30.393.979.197,-; serta belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.2.475.522.550,-.

c. Belanja Tak Terduga Rp.2.500.000.000,- serta

d. Belanja Transfer sebesar Rp.86.703.301.521,- yang merupakan belanja bantuan keuangan.

Sesuai dengan arah kebijakan RKP 2027 *“Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat”*, belanja daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2027 diarahkan pada penguatan kualitas belanja dalam rangka mencapai pertumbuhan lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat melalui

Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Fasilitas Publik, Penciptaan Lingkungan yang Aman dan Berkualitas, serta Pengembangan Ruang Publik yang Bermanfaat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi antara lain: (1) melakukan efisiensi belanja non prioritas (program penunjang urusan pemerintahan daerah) terutama belanja barang dan jasa tanpa mengurangi tingkat pelayanan publik; (2) meningkatkan kualitas belanja modal untuk mendukung prioritas pembangunan yang selaras dengan visi dan misi daerah; (3) mendukung mitigasi dan penanggulangan bencana melalui percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi tahun 2025 sesuai dengan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tahun 2026-2026; (4) menerapkan prinsip *value for money*, dimana setiap penggunaan anggaran harus memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat; dan (5) penguatan sinergitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Dalam rangka harmonisasi kebijakan pusat, belanja daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2027 juga dialokasikan untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*). Prioritas kebijakan *mandatory* dimaksud menyangkut bidang pendidikan dan infrastruktur pelayanan publik.

Belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita selain melalui Pro-SN dan *outcome* prioritas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, diantaranya melalui kegiatan yang bersifat direktif pemerintah yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden dan/atau Instruksi Presiden sebagai program prioritas yang bersifat lintas sektor dan berdampak luas terhadap pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, serta keberlanjutan pembangunan.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Realisasi penerimaan pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2023 yang berasal dari sisa lebih belanja daerah sebesar Rp.10.541.034.674,-, dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.1.000.000.000,-. Pada tahun 2024 realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp.37.029.821.414, dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.1.000.000.000,-, serta pada tahun 2025 penerimaan pembiayaan Kota Lhokseumawe sebesar Rp.12.634.946.009,-.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe Tahun 2026 Penerimaan Pembiayaan yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya



ditargetkan sebesar Rp.25.730.449.746,- Untuk lebih jelasnya tentang gambaran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan
Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2027

NO.	URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2024	REALISASI 2025	APBK 2026	TARGET 2027
3	PEMBIAYAAN DAERAH	9,541,034,674	36,029,821,414	12,634,946,009	25,730,449,746	-
3.1	Penerimaan Pembiayaan	10,541,034,674	37,029,821,414	12,634,946,009	-	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	10,541,034,674	37,029,821,414	12,634,946,009	25,730,449,746	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	1,000,000,000	1,000,000,000	-	-	-
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	37,029,821,414	12,634,945,683	47,322,459,261	-	-

Sumber : LRA 2023-2025 (Audited), APBK 2026, BPKD Kota Lhokseumawe, Tahun 2026.

Berdasarkan uraian Arah Kebijakan Pendapatan, Arah Kebijakan Belanja, dan Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe, diperoleh gambaran struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2027 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe
Tahun 2027

NO.	URAIAN	TARGET 2027	KET
1	PENDAPATAN DAERAH	682,134,795,603	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	79,855,590,652	
1.1.1	Pajak Daerah	66,10,041,544	
1.1.2	Retribusi Daerah	3,566,500,000	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,387,537,235	
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5,801,511,853	
1.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	560,918,117,000	
1.2.1	Dana Otonomi Khusus Aceh dan Tambahan Infrastruktur	23,377,794,000	
1.2.3	Dana Bagi Hasil (DBH)	8,390,568,000	
1.2.4	Dana Alokasi Umum (DAU)	379,925,153,000	
1.2.6	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	96,361,110,000	
1.2.8	Dana Desa (DD)	52,863,492,000	
1.3	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27,347,137,216	
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH)	24,403,444,216	
1.3.3	Bantuan Keuangan Provinsi	2,943,693,000	



NO.	URAIAN	TARGET 2027	KET
1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	14,013,950,735	
1.4.3.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14,013,950,735	
	JUMLAH PENDAPATAN	682,134,795,603	
2	BELANJA DAERAH	682,134,795,603	
2.1	Belanja Operasi	546,502,941,664	
2.1.1	Belanja Pegawai	379,632,277,635	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	151,024,390,228	
2.1.3	Belanja Subsidi	1,403,200,000	
2.1.4	Belanja Hibah	10,147,270,468	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4,295,803,333	
2.2	Belanja Modal	46,426,552,418	
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,503,500,165	
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,055,550,506	
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	30,393,979,197	
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,475,522,550	
2.3	Belanja Tak Terduga	2,500,000,000	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	2,500,000,000	
2.4	Belanja Transfer	86,703,301,521	
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa	86,703,301,521	
	JUMLAH BELANJA	682,134,795,603	
	SURPLUS / (DEFISIT)	-	
3	PEMBIAYAAN DAERAH	-	
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	
3.2.1	Penyertaan Modal Daerah	-	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	

Sumber: BPKD Kota Lhokseumawe, dan SIPD-RI, 2026

3.3. Dukungan Pembiayaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) / Corporate Sosial Responsibility (CSR)

TJSLP atau CSR merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Organisasi atau perusahaan sebagai suatu sistem diharapkan dapat memiliki tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Semakin besar suatu organisasi atau perusahaan tersebut maka semakin banyak pula tuntutan masyarakat terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta

dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSL. TJSL ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan TJSL tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan. Dalam hal perseroan tidak melaksanakan TJSL maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 159 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa setiap pelaku usaha pertambangan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan di Aceh berkewajiban menyiapkan dana pengembangan masyarakat. Dana pengembangan masyarakat tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pelaku usaha yang besarnya paling sedikit 1 persen dari harga total produksi yang dijual setiap tahun. Rencana penggunaan dana pengembangan masyarakat guna membiayai program yang disusun bersama dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sekitar kegiatan usaha dan masyarakat di tempat lain serta mengikutsertakan pelaku usaha yang bersangkutan. Pembiayaan program pengembangan masyarakat dengan dana pengembangan masyarakat dikelola sendiri oleh pelaku usaha. Selanjutnya, pasal 9 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan TJSLP di Aceh, mengamanatkan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TJSLP, sementara itu perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya bukan di bidang dan/atau tidak berkaitan dengan sumber daya alam dapat melaksanakan TJSLP.

Pemerintah Kota Lhokseumawe telah menetapkan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 223 Tahun 2021 tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025, dan telah diperbaharui dengan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 100.3.3.3-34 Tahun 2026 tentang Penetapan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Lhokseumawe Periode 2025-2029. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Lhokseumawe tersebut, terdapat 40 perusahaan yang termasuk dalam Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan Laporan Renja dan Realisasi Program TJSLP/CSR Tahun 2025 yang disampaikan oleh perusahaan, diketahui bahwa realisasi Renja TJSLP/CSR tahun 2025 mencapai 66,87 persen atau Rp.6,045,472,431.- dari alokasi Renja sebesar Rp.9,040,728,104.-. Terdapat 7 perusahaan dengan realisasi mencapai 100%, 4 perusahaan dengan realisasi antara 80%-99%, 3 perusahaan dengan realisasi antara 50%-79%, dan 1 perusahaan dengan realisasi dibawah 50%.



Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi TJLSP/CSR Tahun 2025
Di Kota Lhokseumawe

No	Nama Perusahaan	Anggaran Renja (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	PT. Perta Arun Gas (PAG) Lhokseumawe	935,562,856	630,872,000	67.43%
2	PT Pertamina Hulu Energi (PHE) NSB- NSO Lhokseumawe	925,750,000	480,249,500	51.88%
3	PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Persero	4,162,000,000	2,043,009,468	49.09%
4	PT. PELINDO I Canbang Lhokseumawe	327,250,000	327,250,000	100.00%
5	PT. Pertamina Prata Niaga Integrated Terminal Lhokseumawe	350,000,000	314,741,215	89.93%
6	Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Lhokseumawe	293,000,000	248,000,000	84.64%
7	PT. PLN Nusantara Power (PLN NP) Lhokseumawe	411,020,500	411,020,500	100.00%
8	PT. PLN (Persero) Lhokseumawe	947,896,096	947,896,096	100.00%
9	PT. Suriatama Mahkota Kencana Lhokseumawe	6,670,000	6,670,000	100.00%
10	PT. Wings Food Lhokseumawe (Aceh Distribusindo Raya)	73,733,951	43,733,951	59.31%
11	PT. Rumah Sakit Umum Bunga Melati Kota Lhokseumawe	22,380,000	22,380,000	100.00%
12	PT. Rumah Sakit Umum Sakinah Kota Lhokseumawe	86,472,000	86,472,000	100.00%
13	PT. Rumah Sakit Umum Arun Kota Lhokseumawe	275,756,701	275,756,701	100.00%
14	PT. Rumah Sakit Umum Metro Medical Center Lhokseumawe	54,000,000	48,000,000	88.89%
15	PT. Rumah Sakit Ibu dan Anak Abby Lhokseumawe	169,236,000	159,421,000	94.20%
	TOTAL	9,040,728,104	6,045,472,431	66.87%

Sumber: Laporan Renja TJLSP/CSR (Smt.I-2025), 2026

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi program/kegiatan CSR Tahun 2025 sebagai berikut:

1. PT. Perta Arun Gas (PAG) Lhokseumawe tahun 2025 mencapai Rp.630.872.000,- yang terdiri dari 3 (tiga) program/kegiatan yang meliputi: Program Energi Bakti Charity sebesar Rp.471.372.000,-; Program Energi Hayati dan Penangkaran Rusa Totol sebesar Rp.39.500.000,-, dan Santunan Kepedulian Anak Yatim Lingkungan Desa Binaan sebesar Rp.120.000.000,-.

2. PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) NSB-NSO Lhokseumawe mencapai Rp.480.249.500,- yang terdiri atas 11 (sebelas) program/kegiatan yang meliputi: Program Beasiswa “NSO Scholarship” sebesar Rp.19.803.000; Kegiatan “Peulara” pada SMP Negeri 8 Lhokseumawe sebesar Rp.20.527.500,-; Peningkatan Kualitas Kesehatan Balita di Kecamatan Muara Satu sebesar Rp.59.409.000,-; Kegiatan Penyediaan MCK dan Sanitasi di Kecamatan Muara Satu sebagai program untuk dukungan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebesar Rp.33.005.000,-; Program Pendidikan “Youth Enterpreneur School” sebesar Rp.30.348.500,-; Program Pengembangan Budidaya Penggemukan Sapi sebesar Rp.24.633.000,-; Program Penghijauan Wilayah Operasional sebesar Rp.38.855.000,-; Program Bantuan Korban Bencana Alam sebesar Rp.30.348.500,-; Kegiatan Kebencanaan Inklusif (Sekolah Aman Bencana) sebesar Rp.30.626.000,-; Kajian Pemetaan Sosial, SROI, SE, IKM dan REA di Wilayah Operasi PHE NSO sebesar Rp.189.152.000,-; dan Kegiatan Penulisan Buku ISBN, Jurnal Nasional, dan Jurnal Internasional sebesar Rp.3.542.000,-.
3. PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Persero dengan realiasi mencapai Rp.2.043.009.468,- yang terdiri atas 20 (dua puluh) program / kegiatan meliputi: Program Tani Sejahtera sebesar Rp.61.730.000,- Bantuan Modal Usaha Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebesar Rp.44.800.000,-; Bantuan Pengobatan bagi Masyarakat Kurang Mampu sebesar Rp.5.000.000,-; Program Penanganan dan Pencegahan Stunting sebesar Rp.18.000.000,-; Program Sekolah Adiwiyata sebesar Rp.24.500.000,-; Program Beasiswa Anak Asuh sebesar Rp.46.880.000,-; Program Pelatihan dan Ketrampilan “Youth Enterpreneurship” sebesar Rp.107.950.000,-; Program Binaan UMK sebesar Rp.87.117.750.000,-; Program *Local Bussines Development* sebesar Rp.57.123.018,-; Program Rumah Sehat Sederhana sebesar Rp.240.000.000,-; Program Sarana dan Prasarana Umum sebesar Rp.154.655.080,-; Program Bantuan Subsidi Listrik sebesar Rp.365.420.000,-; Kegiatan Bakti Sosial untuk Masyarakat Lingkungan Binaan Perusahaan sebesar Rp.63.050.000,-; Program Hari Besar Keagamaan sebesar Rp.208.050.000,-; Program *Create Share Value* sebesar Rp.75.282.620,-; Program Masyarakat Tanggap Bencana sebesar Rp.3.362.000,-; Program Relawan Bakti BUMN sebesar Rp.352.089.000,-; Program Pelestarian Alam Rp.36.500.000,-; dan Program Pembinaan Usaha Menengah Kecil Rp.75.000.000,-.
4. PT. PELINDO – I Cabang Lhokseumawe dengan realiasi mencapai Rp.327.250.000,- yang terdiri atas 6 program/kegiatan CSR yaitu Pengadaan Kitab untuk Dayah sebesar Rp.200.000.000,-; Program Aksi Bersih Pantai dan Mewarnai sebesar Rp.20.000.000,-; Santunan Anak Yatim sebesar Rp.30.000.000,-; Kegiatan Pembagian Sembako untuk Masyarakat Kurang Mampu sebesar Rp.15.000.000,-; Kegiatan Berbagi Daging Qurban Rp.50.000.000,- dan Kegiatan Berbagi Takjil Bulan Ramadan Rp.12.250.000,-.
5. PT. Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Lhokseumawe melaksanakan 3 (tiga) program/kegiatan CSR yang meliputi

- Program Gampong Tangguh Mandiri sebesar Rp.59.900.000,-; Program Gampong Berdikari sebesar Rp.115.950.000,-; dan Program Eduecowisata sebesar Rp.138.891.215,-.
6. Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Lhokseumawe melaksanakan program/kegiatan CSR yang terdiri atas Santunan Anak Yatih sebesar Rp.200.000.000,-; Program Penyaluran Sembako sebesar Rp.32.000.000,-; dan Program Penyaluran Zakat Rp.16.000.000,-.
 7. PT. PLN Nusantara Power Lhokseumawe melaksanakan 19 (sembilan belas) program/kegiatan CSR dengan realisasi anggaran sebesar Rp.411.020.500,- yang terdiri atas Bantuan Pelaksanaan Turnamen Volly Bantuan turnamen Voly BPSI; CSR Pelaksanaan Natal Gabungan TNI/POLRI; Bantuan Acara Syukuran KPA Cot Kupula; Bantuan Operasional Balai Pengajian Dusun C Gp Meria Paloh; Bantuan Maulid Lembaga Al-Shaleha; Bantuan Pembangunan Kantor Aliansi Jurnalis Independen; Bantuan Baju Jersey Sepak Bola SSB Paloh Academy; Paket Sembako Murah Ramadan Berkah; Bantuan santunan anak yatim Gp. Meria Paloh; Bantuan santunan anak yatim Batuphat Timur; Bantuan Material Perbaikan Jalan Desa; Bantuan Perbaikan Jalan Desa; Bantuan Khatam Alquran dan Santunan Anak Yatim Desa Padang Sakti; Material Pembangunan Doormeers Pemuda Paloh Mandiri; Sponsor Tim Teknis Polres Lhokseumawe; Sponsor Badminton Kalpores Cup HUT Bhayangkara; Pengadaan Hewan Qurban; Sponsor Keikutsertaan Paloh Academi pada Ajang LSI; dan Bantuan Khatam Alquran dan Santunan Anak Yatim Desa Meuria Paloh.
 8. PT. PLN (Persero) Lhokseumawe melaksanakan program/kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp.947.896.096,- meliputi tiga program/kegiatan yaitu Pengelolaan dan Pengembangan Sampah sebesar Rp.353.644.080,-; Program UMKM Lhokseumawe sebesar Rp.569.612.016,-, dan Bantuan Listrik Gratis Rp.24.640.000,-.
 9. PT. Suriatama Mahkota Kencana Lhokseumawe melaksanakan satu program/kegiatan CSR berupa Bantuan Beasiswa sebesar Rp.6.670.000,-.
 10. PT. Wings Food Lhokseumawe (Aceh Distribusindo Raya) melaksanakan 6 program/kegiatan CSR dengan realisasi mencapai Rp.43.733.951,- yang meliputi: Program Pemberdayaan Ekonomi di Kecamatan Blang Mangat sebesar Rp.30.000.000,-; Bantuan Korban Banjir sebesar Rp.2.756.875,-; Program Pencegahan Stunting sebesar Rp.2.679.500,-; Program Hari Raya Idul Adha sebesar Rp.4.460.000,-; Bantuan Masjid Babul Jannah sebesar Rp.588.552,- dan Donor Darah Suzuya Bireuen dan Lhokseumawe sebesar Rp.3.249.024,-.
 11. PT. Rumah Sakit Umum Bunga Melati Lhokseumawe melaksanakan tiga program/kegiatan CSR dengan realisasi sebesar Rp.22.380.000,- yang meliputi Bantuan Keagamaan sebesar Rp.7.000.000,-; Pembayaran sebesar Rp.12.500.000,- dan Program Gerakan Orang Tua Asuh sebesar Rp.2.880.000,-.
 12. PT. Rumah Sakit Umum Sakinah Lhokseumawe melaksanakan dua program/kegiatan CSR dengan realisasi Rp.86.472.000,- yang



- terdiri atas Bantuan untuk Masjid sebesar Rp.72.000.000,- dan Bantuan untuk Meunasah sebesar Rp.14.472.000,-.
13. PT. Rumah Sakit Umum Arun Lhokseumawe melaksanakan program/kegiatan CSR dengan realisasi sebesar Rp.275.756.701,- yang terdiri atas 11 program/kegiatan meliputi; Pemeriksaan Kesehatan Gratis Ke Desa-desa; Pemeriksaan Kesehatan Gratis Dalam Rangka Pembagian sembako; Kegiatan Donor darah dalam rangka donor darah sedunia; Medical Check Up Mahasiswa; Kegiatan Paket Ramadan; Bantuan Korban Kebakaran; Bantuan Becak Gratis; Bantuan Ambulance Gratis; Bantuan Makanan Pendamping Pasien; Pelayanan Rawat Inap Gratis pada Pasien Kecelakaan, Korban Pengeroyokan, dll; dan Promosi Kesehatan Tentang Pencegahan Penyakit Ginjal Pada Remaja.
14. PT. Rumah Sakit Umum Metro Medical Center Lhokseumawe melaksanakan 6 program/kegiatan CSR dengan realisasi mencapai Rp.48.000.000,- yang meliputi program/kegiatan: Pembagian Susu Gratis; Partisipasi untuk Keude Cunda; Sumbangan Anak Yatim; Sumbangan Keagamaan; Bantuan Hewan Qurban, dan Sumbangan Keude Cunda.
15. PT. Rumah Sakit Ibu dan Anak Abby Lhokseumawe melaksanakan empat program/kegiatan dengan realisasi Rp.159.421.000,- meliputi program/kegiatan Penyediaan MCK di Kecamatan Muara Dua yang merupakan program untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dengan anggaran sebesar Rp.147.000.000,-; Kegiatan Sponsorship Runspeed sebesar Rp.1.000.000,-; Bantuan Token Listrik Meunasah Lancang Garam sebesar Rp.7.021.000,-; Bantuan Kegiatan Keagamaan sebesar Rp.4.400.000,-.

Selain pendanaan dari program CSR perusahaan, Pemerintah Kota Lhokseumawe juga mendapat dukungan pendanaan pembangunan rumah layak huni type 36 dari Islamic Relief dengan skema *cost sharing* dengan Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Adapun besaran *cost sharing* yaitu Rp.65.000.000,-/unit oleh Islamic Relief dan Rp.25.000.000,-/unit dari Baitul Mal Kota Lhokseumawe, sehingga anggaran untuk satu unit rumah sebesar Rp.90.000.000,-. Pada tahun 2025 Islamic Relief dan Baitul Mal Kota Lhokseumawe membangun rumah layak huni sebanyak 50 Unit yang tersebar di empat kecamatan Kota Lhokseumawe dengan total anggaran sharing dari Islamic Relief sebesar Rp.3.250.000.000,- dan Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebesar Rp.1.250.000.000,-. Adapun rincian penerima bantuan rumah layak huni tahun 2025 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.11
Pembangunan Rumah Layak Huni Islamic Relief dan Baitul Mal Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No.	No. Rmh	Nama RHs	Desa / Gampong	Kecamatan	Pendanaan Islamic Relief	Pendanaan Baitul Mal	Total Pendanaan
1	278	Abdullah Yahya / Syamsiah	Ujong Pacu	Muara Satu	65,000,000	25,000,000	90,000,000
2	279	Tarmizi / Nurazizah	Paloh Punti	Muara Satu	65,000,000	25,000,000	90,000,000
3	280	Saiful Ibrahim / Irmawati	Paloh Punti	Muara Satu	65,000,000	25,000,000	90,000,000
4	281	Suryani	Paloh Punti	Muara Satu	65,000,000	25,000,000	90,000,000



No.	No. Rmh	Nama RHs	Desa / Gampong	Kecamatan	Pendanaan Islamic Relief	Pendanaan Baitul Mal	Total Pendanaan
5	282	Safwan Abdullah / Lindawati	Paloh Punti	Muara Satu	65,000,000	25,000,000	90,000,000
6	283	Nurlaili	Paloh Punti	Muara Satu	65,000,000	25,000,000	90,000,000
7	284	Muhammaddi / Nurmasiyah	Cot Trieng	Muara Satu	65,000,000	25,000,000	90,000,000
8	285	Muhammad Subhan / Fifi Dian Mayasari	Panggoi	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
9	286	Mariana	Paya Punteuet	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
10	287	M Ali / Nurhadijah	Paya Bili	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
11	288	T Samsul Bahri / Suryanti	Paya Bili	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
12	289	Zul Fahmi / Juliana Yacob	Paya Bili	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
13	290	Mustafa / Intan Wahyuni	Meunasah Alue	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
14	291	Abdurrahman / Fitriani	Meunasah Alue	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
15	292	Rohani	Meuria Paloh	Muara Satu	65,000,000	25,000,000	90,000,000
16	293	Abubakar A Wahab / Syamsiah	Lhok Mon Puteh	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
17	294	Mahliadi / Putri Sakinah	Lhok Mon Puteh	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
18	295	Husaini Jalil / Rukayah	Cot Girek Kandang	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
19	296	Nurbaiti	Cot Girek Kandang	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
20	297	Summiati	Cot Girek Kandang	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
21	298	Lailawati	Cot Girek Kandang	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
22	299	Yusniar	Cot Girek Kandang	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
23	300	Abdurrahman Husen / Juariah Hanafiah	Blang Crum	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
24	301	Nasruddin / Nurhalimah	Blang Crum	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
25	302	Al Rizal / Evayani	Blang Crum	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
26	303	Fakhrurazi / Griayana M Gade	Meunasah Blang	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
27	304	Nuriyanti	Meunasah Blang	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
28	305	M Ali Usman / Mardiah	Alue Awe	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
29	306	Zakaria / Tilatifah	Cut Mamplam	Muara Dua	65,000,000	25,000,000	90,000,000
30	307	Suryadi / Riniati	Seuneubok	Blang Mangat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
31	308	M Yusuf / Ti Rahmah	Seuneubok	Blang Mangat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
32	309	Nafsiah	Seuneubok	Blang Mangat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
33	310	Safari / Yusra	Seuneubok	Blang Mangat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
34	311	Asnawi / Raliah Abdullah	Blang Weu Panjo	Blang Mangat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
35	312	Ibrahim Umar / Rohani	Blang Weu Panjo	Blang Mangat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
36	313	Fakhruddin / Sapijah	Blang Weu Baroh	Blang Mangat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
37	314	Kasrina Abdullah	Jeulikat	Blang Mangat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
38	315	Syaifullah / Nazarni	Jeulikat	Blang Mangat	65,000,000	25,000,000	90,000,000



No.	No. Rmh	Nama RHs	Desa / Gampong	Kecamatan	Pendanaan Islamic Relief	Pendanaan Baitul Mal	Total Pendanaan
39	316	Muliani	Jeulikat	Blang Mangat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
40	317	Mukri / Habibah	Jeulikat	Blang Mangat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
41	318	Mukhtaruddin Adam / Rahmani	Jeulikat	Blang Mangat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
42	319	Fakhrurrazi / Nuraina	Mesjid Punteueut	Blang Mangat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
43	320	Muhammad Nasir / Hayatun Nufus	Hagu Barat Laut	Banda Sakti	65,000,000	25,000,000	90,000,000
44	321	Asnawi Taher	Kuala	Blang Mangat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
45	322	Asnawi / Jumiaty Syafruddin	Uteun Bayi	Banda Sakti	65,000,000	25,000,000	90,000,000
46	323	M Jamil / Nurmasiyah	Uteun Bayi	Banda Sakti	65,000,000	25,000,000	90,000,000
47	324	Irwandi / Nurhayati Ismail	Ujong Blang	Banda Sakti	65,000,000	25,000,000	90,000,000
48	325	Sofyan Samsul Bahri / Nurhayani	Ujong Blang	Banda Sakti	65,000,000	25,000,000	90,000,000
49	326	Dedi / Lina Mariana	Blang Cut	Blang Mangat	65,000,000	25,000,000	90,000,000
50	327	Iskandar / Julidar	Hagu Teungoh	Banda Sakti	65,000,000	25,000,000	90,000,000
TOTAL					3,250,000,000	1,250,000,000	4,500,000,000

Sumber: Baitul Mal Kota Lhokseumawe, 2026

Gambar 3.17
Informasi Sebaran Pembangunan Rumah Layak Huni
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sebaran data/wilayah RHs						
No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah RHs			
1.	Banda Sakti	4	6			
2.	Muara Satu	4	8			
3.	Muara Dua	10	21			
4.	Blang Mangat	7	15			
Rencana / Tahapan Pembangunan				Status RHs - HORPF 3 Lhokseumawe		
No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah RHs	No.	Kecamatan	Jumlah
Tahap 1 : 30 RHs (September s/d November 2025)				1.	Keluarga Yatim	6
1.	Muara Satu	4	8	2.	Perempuan Kepala Keluarga (Janda Cerai)	6
2.	Muara Dua	10	21	3.	Kepala Keluarga (Duda Cerai)	1
3.	Cot Girek - Aceh Utara	1	1	4.	Keluarga Lengkap	36
				5.	Anggota Keluarga Disabilitas	1
No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah RHs			
Tahap 2: 21 (Desember 2025 s/d February 2026)						
1.	Banda Sakti	4	6			
2.	Blang Mangat	7	15			

Sumber: Baitul Mal Kota Lhokseumawe, 2026

Selanjutnya untuk tahun 2026 direncanakan akan dibangun kembali rumah layak huni di Kota Lhokseumawe sebanyak 20 unit yang tersebar di empat kecamatan Kota Lhokseumawe dengan skema *cost sharing* Islamic Relief sebesar Rp.1.300.000.000,- dan Baitul Mal Kota Lhokseumawe sebesar Rp.500.000.000,-. Adapun informasi pembangunan rumah layak huni tahun 2026 sebagai berikut.



Tabel 3.12
Pembangunan Rumah Layak Huni Islamic Relief dan Baitul Mal
Kota Lhokseumawe Tahun 2026

No. Urut	No. Rumah	Nama RHs	Desa / Gampong	Kecamatan
1	337	Ramli / Tinauyah	Alue Lim	Blang Mangat
2	338	Hanisah	Alue Lim	Blang Mangat
3	339	Muhammad Nasir / Nuriyah Hasbi	Alue Lim	Blang Mangat
4	340	Nurjannah	Alue Lim	Blang Mangat
5	341	Zalikha	Blang Buloh	Blang Mangat
6	342	Darkasyi / Marliah	Mane Kareung	Blang Mangat
7	343	Zulkifli / Ainul Mardhiah	Asan Kareung	Blang Mangat
8	344	Sarmilawati / Hendra Saputra	Asan Kareung	Blang Mangat
9	345	M Thaib Ali / Mulyani	Asan Kareung	Blang Mangat
10	346	Amri Hanafiah / Nurjannah Rasyid	Rayek Kareung	Blang Mangat
11	347	Saian / Juliani	Rayek Kareung	Blang Mangat
12	348	Samsul Bahri / Nurazizah	Blang Crum	Muara Dua
13	349	Eliassyak / Mutia	Blang Weu Panjo	Blang Mangat
14	350	M Iqbal /Rahmawati	Meuria Paloh	Muara Satu
15	351	Khairul Amri / Fitriani	Padang Sakti	Muara Satu
16	352	Sulaiman / Linawati	Cot Trieng	Muara Satu
17	353	Abdullah Ismail / Yusrawati	Cot Trieng	Muara Satu
18	354	Teuku Agus / Rohani	Ujung Pacu	Muara Satu
19	355	Nuriman Lamsyah / Nurmala	Ujung Pacu	Muara Satu
20	356	M. Isa / Nurlinawati	Ujung Pacu	Muara Satu

Sumber: Baitul Mal Kota Lhokseumawe, 2026

Gambar 3.18
Informasi Sebaran Pembangunan Rumah Layak Huni
Kota Lhokseumawe Tahun 2026

Sebaran data/wilayah RHs						
Rencana / Tahapan Pembangunan				Status RHs - HORPF 4 Lhokseumawe		
No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah RHs	No.	Kecamatan	Jumlah
20 RHs (Februari s/d Mei 2026)				1.	Keluarga Yatim	2
1.	Muara Satu	4	8	2.	Perempuan Kepala Keluarga (Janda Cerai)	1
2.	Muara Dua	1	1	3.	Kepala Keluarga (Duda Cerai)	0
3.	Blang Mangat	6	11	4.	Keluarga Lengkap	18
				5.	Anggota Keluarga Disabilitas	0

Sumber: Baitul Mal Kota Lhokseumawe, 2026

Gambar 3.19
Potret Kondisi Rumah Sebelum Pembangunan
Tahun 2025 dan 2026

327

Nama

Total jiwa

Alamat

: Iskandar (52 Thn) / Julidar (42 thn)

: 4 jiwa (2 perempuan, 2 laki-laki)

: Hagu Teungoh, Banda Sakti - Lhokseumawe



Kesesuaian Type Rumah:

36 M²



356

Nama

Total jiwa

Alamat

: M. Isa (32 thn) / Nurlinawati (26 thn)

: 6 Jiwa (1 perempuan, 5 laki-laki)

: Dusun B- Ujung Pacu – Muara Satu - Lhokseumawe



Kesesuaian Type Rumah:

36 M²



Sumber: Baitul Mal Kota Lhokseumawe, 2026

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA LHOKSEUMAWE

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi RKPK Tahun 2025 Triwulan IV sebagai pijakan kondisi yang ada untuk merumuskan target sasaran RKPK Tahun 2027. Prioritas Daerah yang tertuang dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 didasarkan pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
2. Prioritas RKPA Tahun 2026;
3. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029;
4. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2045; dan
5. Pokok-pokok pikiran DPRK.

Proses integrasi penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1
Komponen Penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2027



Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, hasil olahan, 2026

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Kota Lhokseumawe Tahun 2025-2029. Target tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) diupayakan



akan tercapai melalui Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) yang disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMK dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan berpedoman juga pada program kebijakan prioritas Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Aceh Tahun 2027.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMK merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah. Sehingga untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe maka penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 harus selaras dan sinergis dengan RPJMK Lhokseumawe 2025-2029.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 4 (empat) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, dan (4) pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up) dan pendekatan perencanaan dari atas (top down).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPK Lhokseumawe dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kota Lhokseumawe, sebagaimana RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029, (2) Permasalahan dan Isu Strategis Daerah, dan (3) Prioritas program-program Pembangunan baik di tingkat Pemerintah Aceh maupun Tingkat Nasional. Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 yaitu ***‘Terwujudnya Lhokseumawe sebagai Kota Cerdas dan Nyaman Huni’***. Perwujudan visi tersebut mengandung makna Kota Lhokseumawe sebagai kota dengan Sumber Daya Manusia yang unggul, berkualitas dan berdaya saing dengan didukung infrastruktur kota yang terintegrasi dan lingkungan berkelanjutan. Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan daerah yaitu:

Misi 1 Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe.

Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter.

Misi 3 Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang berkelanjutan.

Misi 4 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel.

Misi 5 Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya.

Gambar 4.2
Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029



Sumber: Hasil olah, 2026

Makna dari visi tersebut adalah Kota Lhokseumawe yang cerdas akan meningkatnya sumber daya manusia yang adaptif terhadap peluang di era digital dan ekonomi digital. Terbukti bahwa Kota Lhokseumawe ini telah dapat menyelesaikan isu-isu strategis kota pada lima tahun terakhir, antara lain meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa serta industri terhadap PDRB, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Gender, serta meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi. Tataran nyaman huni dapat dimaknai bahwa lima tahun ke depan akan siap menghadapi tantangan global, problematika perkotaan yang lebih heterogen, tuntutan layanan publik yang lebih tinggi serta tetap memperhatikan wawasan lingkungan.

Untuk mencapai Kota cerdas dan nyaman huni, Pemerintah Kota Lhokseumawe bersama masyarakat akan bekerja sama membangun kota dengan tidak mengesampingkan pelaksanaan syariat islam dan pelestarian budaya, sehingga menjadi daerah yang kondusif dan dapat mendukung pengembangan ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat yang akhirnya dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

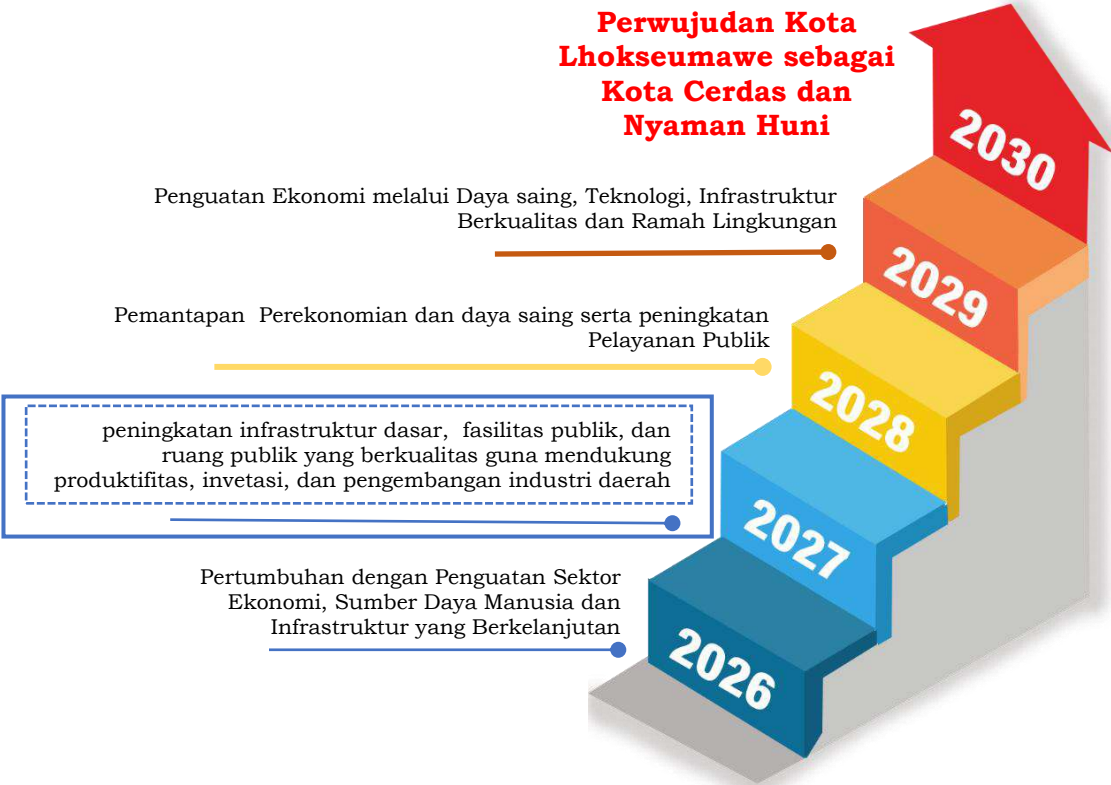
Dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, pembangunan kota ingin menguatkan berbagai keunggulan sebagai sebuah kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan berdaya saing kota, sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, infrastruktur yang berkualitas dan lingkungan berkelanjutan, serta pelayanan publik yang dinamis untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pelaksanaan syariat islam dan budaya.

Tema pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2027 bersumber dari arah kebijakan pembangunan pada RPJMK 2025-2029 yaitu



“Peningkatan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Publik, dan Ruang Publik yang berkualitas guna mendukung Produktivitas, Invetasi, dan Pengembangan Industri Daerah” sebagai pencapaian target-target RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029. Di tahun 2027 ini juga merupakan tahap pertama dari pelaksanaan RPJPK Lhokseumawe Tahun 2025-2045, sehingga di tahun 2027 juga merupakan tahun penguatan modal dasar transformasi menuju pelaksanaan trasformasi di tahun 2025-2045.

Gambar 4.3
Tema Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2026-2030



Dalam upaya pencapaian visi dan misi Pembangunan Kota Lhokseumawe sebagaimana tertuang dalam RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029, maka target indikator tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel 4.1. Target di tahun 2027 merupakan target di RPJMK Tahun 2025-2029.



Tabel 4.1
Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe
Tahun 2027

Misi/Tujuan		Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target		
					2025	RKPK 2026	P- RKPK 2026	2027
Misi 1 : Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe								
1	Meningkatkan Pertumbuhan dan pemerataan Ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.39	4.53-4.80	3.43-3.80	3,42-3,90
			Indeks Gini	Angka	0.344	0,295-0,322	0,295-0,322	0,293-0,320
1.1		Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah	Kontribusi PDRB Perdagangan	%	23.72	23.69	23.75	23.80
			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	15.73	16.75	16.75	16.80
			Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	9.37	9.54	9.54	9.66
		Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	%	68.46	85.32	85.32	86.35
1.2		Meningkatnya kemandirian daerah dan menurunnya pengangguran	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) PDRB)	%	38.91	40.95	40.95	41.70
			Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai	0.117	-	1.140	1.167
			PDRB per kapita	(Rp. juta)	62.54	65.48	65.48	68.21
			Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2.40	2.42	2.42	2.43
			Total Kredit/PDRB	%	48.26	48.12	48.50	48.91



Misi/Tujuan		Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target		
					2025	RKPK 2026	P-RKPK 2026	2027
			Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.24	7.75-7.85	7.75-7.85	7.65-7.80
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. juta	142.23	142.60	142.60	146.21
Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter								
2	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	81,75	81.95-82.30	81.95-82.30	82.10-82.50
2.1		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.56	16.00	16.00	16.10
			Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11.64	11.58	11.66	11.68
			Angka Literasi SD	%	53.39	61.72	55.50	57.90
			Angka Numerasi SD	%	44.77	55.24	47.57	49.27
			Angka Literasi SMP	%	68.95	70.54	69.35	69.96
			Angka Numerasi SMP	%	60.49	62.94	61.94	62.49
2.2		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75.29	75.12	75.35	75.40
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	-	18.00	17.50	16.30
2.3		Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	9,01	9.00-9.81	9.00-8.85	8.85-8.70
			Pengeluaran Perkapita	Rp.	13.071,	13.832,-	13.832,-	14.401,-
			Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial	%	33.46	48.65	48.65	49.55



Misi/Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target		
				2025	RKPK 2026	P-RKPK 2026	2027
		Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota					
2.4	Meningkatnya Kualitas keluarga, Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	Angka	72.50	68.00	73.00	73.50
		Indeks Desa	Angka	71.73	0.7910	77.72	78.32
		Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0.254	0.300	0.252	0.250
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	96.82	96.65	96.85	96.90
		Nilai Kota Layak Anak	Angka	-	730	740	750
		Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	44.52	45.19	47.37	51.08
Misi 3 : Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang berkelanjutan							
3	Meningkatkan Penataan Kota yang didukung infrastruktur yang terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88.19	89.03	89.03	89.92
3.1	Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Kota	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	58.00	74.30	60.87	62.86
		Tingkat Pelayanan Jalan	Level	C 0.57	C 0.50	C 0.58	C 0.59
3.2	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	80.16	82.96	84.80	86.31



Misi/Tujuan		Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target		
					2025	RKPK 2026	P-RKPK 2026	2027
3.3		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan menurunnya risiko bencana	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Angka	71.54	73.35-73.85	73.35-73.85	75.10-75.65
3.4			Indeks Risiko Bencana	Angka	168.97	132.86	132.99	130.99
Misi 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel								
4	Meningkatkan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe yang berkualitas dan didukung Inovasi Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori /Point	BB 72.17	BB 72.85	BB 72.85	BB 73.32
		Meningkatnya akuntabilitas, profesionalitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	Kategori /Point	B 61.76	BB 71.20	BB 71.20	BB 72.60
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
			Indeks Integritas/Survey Penilaian Integritas	Angka	74.31	72.50	75.00	75.50
			Indeks Maturitas SPIP	Angka	Level 3 3.037	Level 3 3.300	Level 3 3.300	Level 3 3.400
			Indeks Profesionalisme ASN	Angka	-	81.67	81.67	82.80
		Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan penerapan inovasi daerah	Indeks Pelayanan Publik	Angka	A- 4.31	A 4.28	A 4.33	A 4.35
			Indeks SPBE	Angka	2.80	3.10	3.10	3.15
			Indeks Inovasi Daerah (IID)	Angka	29.68	52.36	52.36	56.80



Misi/Tujuan		Sasaran	Indikator	Satuan	Capaian	Target		
					2025	RKPK 2026	P- RKPK 2026	2027
Misi 5 : Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya								
5	Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya		Indeks Pembangunan Syariat	Angka	80.11	84.91	84.91	85.25
		Meningkatnya pembangunan syariat	Indeks Pembangunan Syariat	Angka	80.11	84.91	84.91	85.25
		Meningkatnya Pelestarian dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	54	54.50	54.40	60.19

Sumber : Bappenas, BPS, Bappeda Aceh dan Bappeda Kota Lhokseumawe, 2026



Target Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2027 ada beberapa Indikator Kinerja yang mengalami perubahan target dari Dokumen RPJMK Lhokseumawe 2025-2029 dikarenakan capaian indikator kinerja utama tahun 2025 telah melampaui target RPJM untuk tahun 2027. Seperti contoh Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun target tahun 2027 pada RPJMK Lhokseumawe 2025-2029 sebesar 11.58 tahun namun capaian tahun 2025 sebesar 11.64.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Pembangunan Kota Lhokseumawe merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Aceh dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe dirumuskan secara bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Tabel 4.2
Tema Pembangunan Tahun 2027

Tema RKP Tahun 2027	Tema RKPA Tahun 2027	Tema RKPK Lhokseumawe Tahun 2027
Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	Percepatan Pemulihan Pascabencana Melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan	Peningkatan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Publik, dan Ruang Publik yang berkualitas guna mendukung Produktivitas, Invetasi, dan Pengembangan Industri Daerah

Sumber: Bappeda Kota Lhokseumawe, 2026

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 merupakan perencanaan tahunan yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2027, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan



Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi. Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, antara lain :

- a. melanjutkan pembangunan infrastruktur
 - b. mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya
 - c. penguatan koperasi
 - d. mengembangkan industri kreatif
 - e. pendalaman sektor keuangan
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas
 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan. Sedangkan Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 6 difokuskan pada :
 - a. membangun desa dan membangun dari desa
 - b. pemerataan ekonomi
 - c. Memberantas kemiskinan
 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Sedangkan Arah Kebijakan untuk Prioritas Nasional 8 difokuskan pada :
 - a. Masyarakat adil, makmur, dan harmonis
 - b. Melestarikan budaya
 - c. Penanganan bencana

4.2.2 Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2027

Pembangunan Aceh tahun 2027 diarahkan pada tema **“Percepatan Pemulihan Pascabencana Melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan”** yang dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2027 sebagai berikut :

1. Hilirisasi dan industri berbasis sumber daya dan maritim
2. Penciptaan lapangan kerja
3. Penguatan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh
4. Penguatan pelaksanaan syariat Islam (Akidah, Syariah, Akhlak dan Muamalah)
5. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas



- 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- 7. Peningkatan sumber daya manusia, sains dan teknologi
- 8. Penurunan angka kemiskinan
- 9. Tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah
- 10. Transformasi digital yang terintegrasi

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2027

Prioritas pembangunan pada RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 merupakan implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK) Lhokseumawe periode Tahun 2025-2029 yang disusun dengan pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memerhatikan capaian kinerja sampai dengan tahun 2024, perkiraan capaian di tahun 2025 serta isu-isu strategis di tahun 2027.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPD) Lhokseumawe Tahun 2027 adalah **“Peningkatan Insfrastruktur Dasar dan Fasilitas Publik, Penciptaan Lingkungan yang Aman dan Berkualitas, Pengembangan Ruang Publik yang Bermanfaat”**, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- 2. Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulan Risiko Bencana.
- 3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan.
- 5. Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya.

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027 tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2027, terutama pencapaian indikator makro berdasarkan target pada RPJMK. Persandingan target capaian indikator makro dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kota Lhokseumawe terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Persandingan Target Indikator Makro Nasional, Aceh dan Kota Lhokseumawe Tahun 2027

No	Indikator Makro	Nasional	Aceh	Kota Lhokseumawe
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,3-7,5	3,8-4,1	3,42-3,90
2	Rasio Gini	0,375-0,378	0,284 - 0,289	0,293-0,320



No	Indikator Makro	Nasional	Aceh	Kota Lhokseumawe
3	Indeks Pembangunan Manusia/Indeks Modal Manusia	0,58	0,59	82.10-82.50
4	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0,-6,5	12,22-13,60	8.85-8.70
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,30-4,87	4,45-5,50	7.65-7.80

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2026

Perumusan prioritas RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 dengan mempertimbangkan prioritas nasional, prioritas Aceh serta permasalahan pembangunan/isu strategis Kota Lhokseumawe. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 4.4
Keselarasan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe dengan Prioritas Pembangunan Aceh dan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027

PRIORITAS NASIONAL 2027	PRIORITAS ACEH 2027	PRIORITAS RKPK LHOKSEUMAWE 2027
Prioritas Nasional 2 Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru Prioritas Nasional 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Prioritas Nasional 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemertaan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	Prioritas Aceh 1 Hilirisasi dan industri berbasis sumber daya dan maritim Prioritas Aceh 8 Penurunan angka kemiskinan	Prioritas Lhokseumawe 1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Prioritas Aceh 5 Peningkatan infrastruktur yang berkualitas Prioritas Aceh 2 Penciptaan lapangan kerja	Prioritas Lhokseumawe 2 Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana
Prioritas Nasional 4 Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi,	Prioritas Aceh 7 Peningkatan sumber daya manusia, sains dan teknologi	Prioritas Lhokseumawe 3 Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing



PRIORITAS NASIONAL 2027	PRIORITAS ACEH 2027	PRIORITAS RKPK LHOKSEUMAWE 2027
Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas		
Prioritas Nasional 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan Prioritas Nasional 1 Memperkokoh ideology Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Prioritas Aceh 9 Tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah Prioritas Aceh 10 Transformasi digital yang terintegrasi Prioritas Aceh 3 Penguatan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh Prioritas Aceh 4 Penguatan pelaksanaan syariat Islam (Akidah, Syariah, Akhlak dan Muamalah)	Prioritas Lhokseumawe 4 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan Prioritas Lhokseumawe 5 Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya
Prioritas Nasional 8 Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	Prioritas Aceh 6 Peningkatan kualitas lingkungan hidup Prioritas Aceh 4 Penguatan pelaksanaan syariat Islam (Akidah, Syariah, Akhlak dan Muamalah)	Prioritas Lhokseumawe 5 Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya Prioritas Lhokseumawe 2 Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana

Sumber : Bappenas, Bappeda Aceh dan Bappeda Kota Lhokseumawe, 2026



Berdasarkan tabel 4.4 tersebut, terlihat bahwa prioritas pembangunan daerah Kota Lhokseumawe tahun 2027 yang berjumlah 5 prioritas selaras dengan 8 prioritas nasional dan 9 prioritas Aceh. Tingkat keselarasan prioritas pembangunan daerah Kota Lhokseumawe dengan prioritas nasional RKP tahun 2027 dapat dinilai 100% (karena keseluruhan prioritas pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional).

Permasalahan pembangunan Kota Lhokseumawe telah diidentifikasi berdasarkan kaitan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan isu strategis Kota Lhokseumawe memperhatikan gambaran kondisi daerah dan permasalahan, capaian indikator kinerja serta arah kebijakan. Penyusunan prioritas pembangunan daerah Kota Lhokseumawe berdasarkan isu strategis yang ada. Adapun permasalahan pengembangan/isu strategis telah tertuang pada bab II, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.5.



Tabel 4.5
Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Daerah dengan Prioritas Pembangunan Aceh dan
Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027

Isu Strategis	Prioritas Nasional		Prioritas Aceh		Prioritas Kota Lhokseumawe	
- Memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kemandirian ruang fiskal	PN.1	Memperkokoh ideology Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PA.3 PA.4	Penguatan implementasi kekhususan dan keistimewaan Aceh Penguatan pelaksanaan syariat Islam (Akidah, Syariah, Akhlak dan Muamalah)	PD.4 PD.5	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya
- Memaksimalkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan peningkatan pendapatan perkapita - Penanggulan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	PN.2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	PA.1	Hilirisasi dan industri berbasis sumber daya dan maritim	PD.1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas - Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pengurangan risiko bencana	PN.3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PA.2 PA.5	Penciptaan lapangan kerja Peningkatan infrastruktur yang berkualitas	PD.2	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulan Risiko Bencana
- Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan pemerataan pendidikan,	PN.4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga,	PA.7	Peningkatan sumber daya manusia, sains dan teknologi	PD.3	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing



Isu Strategis	Prioritas Nasional		Prioritas Aceh		Prioritas Kota Lhokseumawe	
meningkatkan minat baca masyarakat dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat - Penanggulan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka		Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas				
- Memaksimalkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan peningkatan pendapatan perkapita - Penanggulan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	PN.5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	PA.1	Hilirisasi dan industri berbasis sumber daya dan maritim	PD.1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Memaksimalkan dan menstabilkan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi dan peningkatan pendapatan perkapita - Penanggulan Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka	PN.6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemertaan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan	PA.8	Penurunan angka kemiskinan	PD.1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- Memperkuat tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan kemandirian ruang fiskal	PN.7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	PA.9 PA.10	Tata kelola birokrasi dan kemandirian fiskal daerah Transformasi digital yang terintegrasi	PD.4	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan



Isu Strategis	Prioritas Nasional		Prioritas Aceh		Prioritas Kota Lhokseumawe	
- Memperkuat Pelaksanaan nilai-nilai dinul islam dan pembangunan kebudayaan	PN.8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	PA.4 PA.6	Penguatan pelaksanaan syariat Islam (Akidah, Syariah, Akhlak dan Muamalah Peningkatan kualitas lingkungan hidup	PD.5 PD.2	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana

Sumber : Bappenas, Bappeda Aceh dan Bappeda Kota Lhokseumawe, 2026



Berikut disajikan sandingan Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2027 beserta indikator sasaran dan target dengan Prioritas RKPK Lhokseumawe, Prioritas Nasional dan Prioritas Aceh Tahun 2027.



Tabel 4.6
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2027

Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2027					Prioritas RKPK Tahun 2027	Prioritas Nasional dan Aceh yang Terkait
No	Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target 2027		
1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing daerah	Kontribusi PDRB Perdagangan	23.72	23.80	Prioritas Lhokseumawe 1 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Prioritas Nasional 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui wasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Prioritas Aceh 2 Mewujudkan kemandirian rakyat melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Prioritas Nasional 5 Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Prioritas Nasional 6 Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemertaan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan Prioritas Aceh 3 Mewujudkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah Sumber Daya Alam dan Maritim Aceh
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	15.73	16.80		
		Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9.37	9.66		
2	Meningkatnya Ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan	68.46	86.35		
3	Meningkatnya nilai investasi, daya saing dan Lapangan Kerja	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) PDRB)	38.91	41.70		
		Indeks Kemandirian Fiskal	0.117	1.164		
		PDRB per kapita	62.54	68.21		
		Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	2.40	2.43		
		Total Kredit/PDRB	48.26	48.91		
		Tingkat Pengangguran Terbuka	8.24	7.65-7.80		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	142.23	146.21		



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027

Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2027					Prioritas RKPK Tahun 2027	Prioritas Nasional dan Aceh yang Terkait
No	Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target 2027		
4	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah	15.56	16.10	Prioritas Lhokseumawe 2 Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas	Prioritas Nasional 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas Prioritas Aceh 6 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan Penguatan kesetaraan gender, hak Perempuan dan anak, serta penyandang disabilitas
		Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	11.64	11.68		
		Angka Literasi SD	53.39	57.90		
		Angka Numerasi SD	44.77	49.27		
		Angka Literasi SMP	68.95	69.96		
		Angka numerasi SMP	60.49	62.49		
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	75.29	75.40		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	-	16.30		
6	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	Tingkat Kemiskinan	9.01	8.85-8.70		
		Pengeluaran Riil Perkapita	13.071	14.401		
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	33.46	49.55		
7	Meningkatnya Kualitas keluarga, Pemberdayaan masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak serta pembangunan Pemuda	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	72.5	73.50		
		Indeks Desa	71.73	78.32		
		Indeks Ketimpangan Gender	0.254	0.250		



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027

Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2027					Prioritas RKPK Tahun 2027	Prioritas Nasional dan Aceh yang Terkait
No	Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target 2027		
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96.59	96.90		
		Nilai Kota Layak Anak	-	750		
		Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	44.52	51.08		
8	Meningkatnya pelayanan Infrastruktur kota	Indeks Pembangunan Infrastruktur	58.00	62.86	Prioritas Lhokseumawe 3 Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Prioritas Nasional 3 Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi Prioritas 8 Nasional Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur Prioritas 4 Aceh Mewujudkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, industri pariwisata dan industri halal, serta industri kreatif dan prestasi olahraga Prioritas Aceh 7
		Tingkat Pelayanan	C 0.57	C 0.59		
9	Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	80.16	86.31		
10	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	71.54	75.10- 75.65		
11	Menurunnya Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	168.97	130.99		



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027

Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2027					Prioritas RKPK Tahun 2027	Prioritas Nasional dan Aceh yang Terkait
No	Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target 2027		
						Menggerakkan transformasi digitalisasi dan teknologi modern untuk semua sektor Prioritas Aceh 9 Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan untuk Kesejahteraan rakyat Aceh
12	Meningkatnya akuntabilitas, profesionalitas dan integritas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai SAKIP	B 61.76	BB 72.60	Prioritas Lhokseumawe 4 Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	Prioritas Nasional 1 Memperkokoh ideology Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
		Opni BPK	WTP	WTP		
		Indeks Profesionalisme ASN	-	82.80		Prioritas Nasional 7 Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
		Indeks Integritas/Survey Penilaian Integritas	74.31	75.50		Prioritas Aceh 1 Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian melalui Kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA
		Indeks Maturitas SPIP	Level 3 3.037	Level 3 3.400		Prioritas Aceh 8 Mewujudkan reformasi Politik, Hukum dan tata Kelola birokrasi, dan memperkuat pencegahan korupsi, serta berpartisipasi dalam pemberantasan narkoba



Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2027					Prioritas RKPK Tahun 2027	Prioritas Nasional dan Aceh yang Terkait
No	Sasaran	Indikator	Capaian 2025	Target 2027		
13	Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan penerapan inovasi daerah	Indeks Pelayanan Publik	A-4.31	A4.35		
		Indeks SPBE	2.80	3.15		
		Indeks Inovasi Daerah (IID)	29.68	56.80		
14	Meningkatnya pembangunan syariat	Indeks Pembangunan Syariat	80.11	85.25	Prioritas Lhokseumawe 5 Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	Prioritas Nasional 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
15	Meningkatnya Pelestarian dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	54.00	60.19		Prioritas Aceh 1 Mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam dan perdamaian melalui Kekhususan dan keistimewaan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UUPA

Sumber : Bappenas, Bappeda Aceh dan Bappeda Kota Lhokseumawe, 2026



Selanjutnya berikut disajikan Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2027 dengan Program Unggulan pada Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029.



Tabel 4.7
Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Tahun 2027 dengan Program Unggulan pada
Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029

No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1	Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, koperasi dan industri kecil menengah	1	Peningkatan kualitas produk, akses permodalan dan fasilitas pemasaran produk berbasis digital menuju standar ekspor	- Pembinaan dan Fasilitas Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM - Pameran Dagang Nasional - Pameran Dagang Lokal - Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	
				2	Pengembangan kewirausahaan baru		
				3	Peningkatan peran dan fungsi koperasi	- Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan	



No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
						Kompetensi SDM Koperasi	
		2	Peningkatan nilai investasi	4	Pelaksanaan promosi investasi	- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
				5	Pemberian insentif dan kemudahan perizinan		
		3	Peningkatan sektor pariwisata	6	Pengembangan destinasi, pemasaran dan pelaku wisata yang berdaya saing		
		4	Peningkatan nilai tambah sektor perdagangan dan jasa melalui penguatan rantai nilai dan rantai produksi	7	Optimalisasi sarpras perdagangan dan jasa	- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
				8	Pembangunan tempat berusaha bagi pelaku ekonomi		
				9	Peningkatan penyelenggaraan event pengembangan ekonomi	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	



No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
				10	Peningkatan nilai dan produk		
				11	Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian dan perikanan berbasis perkotaan	- Pengembangan kapasitas nelayan kecil - Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil	Pemberdayaan Sektor Perikanan
						- Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman - Pembinaan dan pengawasan penerapan standar dan izin usaha pertanian	Pemberdayaan Sektor Pertanian yang Modern
		5	Penguatan ketahanan pangan	12	Kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan		
			Pengembangan kesatuan sistem demand and	13	Peningkatan SDM, kompetensi dan daya saing tenaga kerja		



No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Upaya	Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
		supply set tenaga kerja			
			14 Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	- Pelatihan Barista - Pelatihan Content Creator - Pelatihan Barber - Pelatihan K3 Migas	
			15 Peningkatan upaya antisipasi dampak disrupsi teknologi terhadap pasar kerja		
			16 Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja		
		6 Peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berkelanjutan	17 Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah		
			18 Pengembangan alternatif pembiayaan		
			19 Optimalisasi BUMD		
2	Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kesiapsiagaan	7 Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan	20 Pengembangan kawasan strategis dan cagar budaya		
			21 Peningkatan infrastruktur penunjang pelayanan publik		



No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
	penanggulan risiko bencana						
		8	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan	22	Peningkatan jalan, jembatan, pedestrian, penataan kota	- Peningkatan Jalan Puskesmas - Jambo Mesjid - pembangunan Jalan Lingkar / Ringroad Ujung Blang - Peningkatan Jalan Blang Pulo - Padang Sakti Kec. Muara Satu - Pembangunan Jalan Paloh Punti Kec. Muara Satu - Peningkatan Jalan Bukit Rata Kec. Muara Dua - Penataan Pedestrian Jl. Merdeka Kota Lhokseumawe Section 2	
				23	Pengembangan kualitas layanan transportasi baik angkutan umum dan angkutan barang	- Pelaksanaan inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum	
		9	Peningkatan kualitas	24	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	- Perbaikan rumah tidak layak huni	



No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Upaya	Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
		lingkungan perumahan			
			25 Penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh	- Pelaksanaan peremajaan kawasan pemukiman kumuh - Pembangunan rumah baru layak huni dalam rangka pencegahan terhadap kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru	Penataan Lingkungan Pesisir, Khususnya Desa Pusong
			26 Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak	- Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan - Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Pemerataan Jaringan Air Bersih
		10 Peningkatan infrastruktur perkotaan yang hijau dan tangguh	27 Penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang publik		Pembangunan Ruang Terbuka Hijau/ Taman Kota
			28 Pemanfaatan berkelanjutan pengendalian perencanaan lingkungan SDA dan	- Peningkatan jaringan irigasi permukaan - Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	Penanganan Banjir



No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
						- Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Pengelolaan Sampah (Broh Jeut Keu Peng)
				29	Peningkatan ketangguhan kota terhadap perubahan iklim dan risiko bencana	- Pelatihan dan Pembentukan Satgas Siaga Bencana Gampong	
		11	Penguatan ketahanan bencana	30	Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat	- Pelatihan dan Pembentukan Keluarga Tanggap Bencana Alam - Pelatihan dan pembentukan TRC PB Tingkat Kota	
				31	Peningkatan kapasitas mitigasi bencana	- Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana Kab/Kota - Penyusunan Rencana Kontijensi Kab/Kota	
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas	12	Peningkatan kualitas dan tata kelola layanan pendidikan	32	Peningkatan efektifitas anggaran urusan pendidikan	- Penyediaan infrastruktur TIK	



No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Upaya	Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
		berbasis teknologi dan informasi			
			33 Peningkatan SDM serta sarana dan prasarana pendidikan yang berbasis teknologi dan informasi	- Pembinaan penggunaan Teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan	
			34 Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana PAUD, TK, SD dan SMP	- Lanjutan Pembangunan ruang Laboratorium Komputer SMPN 1 Lhokseumawe (Lantai 2)	
			35 Peningkatan upaya pencegahan anak putus sekolah		Beasiswa untuk Pelajar Berprestasi
			36 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dayah, pemberdayaan dan pendidikan santri, fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dayah	- Pelatiha tutor pendidikan Al-Quran di Masjid Agung Daerah - Peningkatan mutu pendidik dan tenaga Kependidikan Dayah	Peningkatan Kualitas SDM Dayah
			36 Peningkatan pendidikan keagamaan secara optimal		
		13 Penyediaan pelayanan kesehatan menyeluruh yang	37 Penanggulangan gizi buruk dan percepatan penurunan stunting secara terintegrasi		



No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Upaya	Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
		berkualitas dan mudah diakses			
			38 Pemenuhan kebutuhan layanan jaminan kesehatan		
			39 Peningkatan layanan kesehatan rujukan		
			40 Peningkatan layanan kesehatan tingkat pertama		
			41 Peningkatan upaya pola hidup sehat di masyarakat		
	14	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga miskin	42 Peningkatan kualitas DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)		
			43 Pelayanan jaminan sosial bagi warga miskin	- Penyediaan Alat Bantu untuk PPKS (Disabilitas dan Lansia)	Bantuan Sosial Untuk Lansia Miskin
			44 Penguatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan		
	15	Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	45 Peningkatan kesempatan berusaha bagi warga miskin		
			46 Peningkatan pendapatan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		



No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya		Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
		16	Peningkatan upaya perlindungan sosial	47	Peningkatan bantuan untuk PPKS		
		17	Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak	48	Peningkatan upaya pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak		
				49	Peningkatan peran lembaga kemasyarakatan perempuan		
				50	Peningkatan kualitas program dan kegiatan yang responsif gender secara berkelanjutan, ramah anak, disabilitas dan lansia		
		18	Peningkatan upaya pengendalian penduduk	51	Peningkatan kualitas layanan KB		
				52	Peningkatan upaya pembangunan keluarga yang berkualitas		
		19	Peningkatan kualitas peran serta masyarakat dalam pembangunan	53	Peningkatan kualitas kegiatan kepemudaan		



No	Prioritas Pembangunan		Fokus		Upaya	Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
				54	Peningkatan prestasi olahraga		
				55	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat		
4	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan	20	Peningkatan kualitas perencanaan daerah	56	Peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah		
		21	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah	57	Peningkatan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah		
				58	Optimalisasi barang milik daerah		
		22	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan	59	Optimalisasi teknologi informasi dalam pelayanan publik		
				60	Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		



No	Prioritas Pembangunan		Fokus	Upaya	Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
				61 Penguatan basis data pemerintahan yang mendukung decision making system		
				62 Penguatan layanan dan kecepatan respon pengaduan		
		23	Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	63 Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		
				64 Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan		
				65 Penguatan Manajemen Risiko		
		25	Penguatan sistem inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	66 Pengembangan budaya inovasi di OPD		
5	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	26	Peningkatan pelaksanaan syariat islam	67 Memaksimalkan peningkatan dimensi indeks pembangunan syariah terutama dimensi aqidah, meleak Al Quran,		



No	Prioritas Pembangunan	Fokus		Upaya	Highlight Intervensi	Program Unggulan pada Visi Misi KDH
				Akhlak dan hukum jinayat		
				68 pembangunan jati diri masyarakat untuk mewujudkan karakter religius		
		27	Peningkatan pelestarian Budaya	69 Melakukan legalitas cagar budaya		
				70 Memajukan kebudayaan lokal		



Perumusan prioritas pembangunan daerah Kota Lhokseumawe yang akan dilaksanakan Tahun 2027, mempertimbangkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPK Tahun 2025, Target RPJMK Lhokseumawe Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2027, Prioritas Nasional Tahun 2027 dan Prioritas Aceh Tahun 2027. Prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2027 yang telah ditetapkan tersebut, dicapai melalui pelaksanaan program-program prioritas. Program prioritas merupakan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang *outcome* nya ditujukan untuk mewujudkan sasaran daerah.

Anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang sifatnya mendukung (*supporting*). Berikut ini adalah Prioritas Pembangunan, dan Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:



Tabel 4.8
Matriks Prioritas dan Program Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2027

Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
1	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	%	27.1	10.000.000	Disperindagkop
		2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	8.80	42.000.000	Disperindagkop
		2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	41.49	22.000.000	Disperindagkop
		2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	10.56	45.000.000	Disperindagkop
		2.17.06	Program Pemberdayaan dan	Persentase Meningkatnya	%	8.45	55.000.000	Disperindagkop



Prioritas RKPK 2027	Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
	Perlindungan Koperasi	Koperasi yang berkualitas				
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Kecil yang bertransformasi dari informal ke formal	%	0.79	210.000.000	Disperindagkop
		Pertumbuhan Wirausaha	%	11.43	-	Disperindagkop
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Proporsi UKM Menjalinkan Kemitraan dan Ekspor	%	2.26	1.110.500.000	Disperindagkop
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	8.00	218.150.000	Disperindagkop
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	%	60.10	1.480.250.000	Disperindagkop
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Barang	RP. juta	40.21	386.100.000	Disperindagkop
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	%	74.07	20.000.000	Disperindagkop



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		3.30.07	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	%	50.00	50.000.000	Disperindagkop
		3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Realisasi Investasi sektor industri dan kawasan industri	%	5.77	399.760.000	Disperindagkop
		3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri yang diterbitkan	%	5.33	40.000.000	Disperindagkop
		3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	%	92.00	23.127.345	Disperindagkop
		2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	78.40	49.000.000	DKPPP
		2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	17.64	12.000.000	DKPPP
		2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	90.00	10.000.000	DKPPP



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027

Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	15138.25	61.000.000	DKPPP
		3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2036.90	55.000.000	DKPPP
		3.25.05	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Luasan Kawasan Konservasi	Ha	1	9.000.000	DKPPP
		3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi ikan	Kg/kapita/ tahun	72.50	30.000.000	DKPPP
		3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi tanaman pangan	%	5.74	60.000.000	DKPPP
				Peningkatan Produksi Hortikultura	%	4.52	-	DKPPP
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	2.14	-	DKPPP
		3.27.03	Program Penyediaan dan	Cakupan luas lahan pertanian	Ha	179.85	607.974.399	DKPPP



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
			Pengembangan Prasarana Pertanian	yang ditetapkan menjadi LP2B				
		3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	100.00	33.213.600	DKPPP
				Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	62.50	-	DKPPP
		3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	30.00	13.000.000	DKPPP
				Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian	%	85.00	-	DKPPP
		3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	%	34.72	15.000.000	DKPPP



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
				Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang dibentuk dan Beroperasi	%	35.29	-	DKPPP
		2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	87.50	741.201.011	DPMPTSP
		2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	11.11	10.000.000	DPMPTSP
		2.07.05	Program Hubungan Industrial	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan Perlindungan Hak-hak Pekerja dan Dialog Sosial	Orang	300	25.000.000	DPMPTSP
		2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	%	99.06	7.000.000	DPMPTSP
		2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang berinvestasi	%	4.80	30.199.7000	DPMPTSP



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku Usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	95.79	65.000.000	DPMPTSP
		2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	97.73	34.800.300	DPMPTSP
		2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	40.60	5.000.000	DPMPTSP
		3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	66.67	40.000.000	Disporapar
		3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	%	28.00	30.000.000	Disporapar
2	Percepatan pemerataan Pembangunan Infrastruktur	1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan	%	16.53	400.000.000	PUPR



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
	dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kesiapsiagaan penanggulan risiko bencana			Permukiman Rawan Banjir				
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	%	35	-	PUPR
		1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/ kota	%	4.90	1.330.339.043	PUPR
		1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase peningkatan rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah	%	0.77	599.000.000	PUPR



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
				domestik layak dan aman)				
		1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase cakupan drainase dalam kondisi baik	%	76.63	2.197.268.101	PUPR
		1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung dalam kondisi baik	%	71.67	5.004.000.000	PUPR
		1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat kemantapan jalan	%	64.54	14.562.894.796	PUPR
		1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah	%	65.66	150.000.000	PUPR
		1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	1. Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	0.50	350.000.000	PUPR
				2. Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas	%	25.00	-	PUPR



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
				Penyediaan Rumah yang Layak Huni				
		1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	18.29	604.122.800	PUPR
		1.04.04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap perumahan layak, pengurangan luasan kawasan kumuh, serta peningkatan kualitas infrastruktur, sarana, dan utilitas umum (PSU) di organisasi.	%	0.331	1.535.000.000	PUPR
		1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	66.41	16.950.000.000	PUPR
		2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	Konektivitas Darat	%	0.50	177.800.000	Dishub



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
			Angkutan Jalan (LLAJ)					
				Persentase Kelengkapan Jalan yang terpasang terhadap kondisi ideal	%	62.50	-	Dishub
		2.10.12	Program Pengurusan Hak - Hak Atas Tanah	Ditetapkannya Hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	4.08	70.003.000	Dinas Pertanahan
		2.10.15	Program Pengaturan Pertanahan di wilayah pesisir, Laut dan Pulau	Persentase pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau yang tertata	%	61.74	20.000.000	Dinas Pertanahan
		2.10.16	Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	Persentase informasi pertanahan yang dimanfaatkan	%	0	15.860.000	Dinas Pertanahan
		2.10.17	Program Penanganan Konflik, sengketa dan perkara pertanahan	Persentase penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan	%	60.00	40.000.000	Dinas Pertanahan
		2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran	Indeks Kualitas Air	Nilai	71.45	168.220.004	DLH



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027

Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
			Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup					
				Indeks Kualitas Udara	Nilai	92.95	-	DLH
		2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	%	26.00	3.053.832.400	DLH
		2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU Lh	%	48.00	60.000.000	
		2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengolahan Sampah	Angka	53.00	1.033.122.516	DLH
		1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	%	100	125.944.000	BPBD
				Persentase Penanganan	%	100	-	BPBD



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
				Tanggap Darurat Bencana				
				Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	-	BPBD
		1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	100	14.136.750	BPBD
				Cakupan Layanan Penyelamatan dan Edukasi Korban Kebakaran	%	100	-	BPBD
3	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing	1.01.02	Program Pegelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6	%	98.28	31.041.922.415	Dinas PK
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15	%	99.10	-	Dinas PK
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	%	64.06	-	Dinas PK



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027

Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	40.00	11.810.900	Dinas PK
		2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1. Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	29.44	50.000.000	Dinas PK
				2. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	60.20	-	Dinas PK
		2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	%	13.77	500.000.000	Dinas PK
		1.01.07	Program Pendidikan Dayah	Persentase Dayah dengan type A	%	10.61	2.740.000.000	DSI-PD
		2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	70.11	478.261.600	Dispursip
		2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang di miliki	%	100	20.000.000	Dispursip
		2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	53.68	30.000.000	Dispursip



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka	97.00	23.183.0.37.143	Dinkes
				Prevelensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek pada Balita)	%	16.30	-	Dinkes
		1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia Kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	%	78.89	549.165.000	Dinkes
				Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP	%	81.77	-	Dinkes
				Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu	%	100	-	Dinkes
				Persentase nakes (dokter, drg, bidan, perawat) di fasyankes yang dilakukan kredensialing	%	54.91	-	Dinkes



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan Minuman	%	100	550.409.000	Dinkes
		1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase masyarakat bidang kesehatan yang diberdayakan	%	83.50	226.603.000	Dinkes
		1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi	%	79.66	90.000.000	Dinsos
				Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan	%	79.66	-	Dinsos



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
				Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA				
				Presentase pekerja sosial/Tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	%	80.00	-	Dinsos
				Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	%	59.32	-	Dinsos
		1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi	%	80.00	680.000.000	Dinsos



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
				Kebutuhan Dasarnya				
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	80.00	-	Dinsos
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	80.00	-	Dinsos
				Presentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	%	60.00	-	Dinsos
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	80.00	-	Dinsos



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	50.00	90.000.000	Dinsos
				Persentase Penerima Manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	50.00	-	Dinsos
				Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data	%	79.41	-	Dinsos
				Persentase Keluarga Miskin dan rentan Penerima Perlindungan sosial yang tergradusi dari kemiskinan	%	3.18	-	Dinsos
		1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan	%	100	20.000.000	Dinsos



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
				setelah tanggap darurat bencana				
				Persentase korban Bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	100	-	Dinsos
		1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	100	20.000.000	Dinsos
		2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	22.06	1.000.000	DPMG
		2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama	%	22.06	2.000.000	DPMG
		2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnyaa Desa	%	19.96	225.700.000	DPMG
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	%	99.60	-	DPMG
		2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan	%	78.92	194.000.000	DPMG



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
			Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)				
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum adat	%	100	-	DPMG
		2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	3.60	7.494.400	DP3AP2KB
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	50.32	-	DP3AP2KB
		2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	150.285.100.	DP3AP2KB
		2.08.04	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif	%	65.79	35.025.000	DP3AP2KB



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
				gender dan hak anak sesuai standar				
		2.08.05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam perencanaan, evaluasi dan/atau penyusunan kebijakan	%	52.94	4.500.000	DP3AP2KB
		2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Nilai	66.20	99.974.000	DP3AP2KB
		2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	73.33	192.720.900	DP3AP2KB
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Nilai	78.00	-	DP3AP2KB
		2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>)	Nilai	2.27	129.300.000	DP3AP2KB



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
				Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun	Nilai	6.4	-	DP3AP2KB
		2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevelensi Kontrasepsi Modern	Nilai	57.20	255.637.000	DP3AP2KB
				Persentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi	%	8.30	-	DP3AP2KB
		2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	89.47	462.100.000	DP3AP2KB
		2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	rasio	10.00	50.000.000	DISPORAPAR
		2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang berasal dari kab/Kota yang masuk Pelatda Propinsi	%	1.00	900.000.000	DISPORAPAR
4	Penguatan Tata Kelola Pemerintahan	4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	B 65.00	26.028.211.840	Setdako



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan			Daerah Kabupaten/Kota					
				Indeks Kematangan Organisasi	Nilai	30.00	-	Setdako
		4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Efektifitas Kerja Sama Daerah	%	100.00	720.000.000	Setdako
				Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100.00	-	Setdako
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	%	100.00	-	Setdako
				Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan	%	100.00	-	Setdako
		4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	100.00	485.0000.000	Setdako
				Efektivitas Kebijakan	%	100.00	-	Setdako



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
				Administrasi Pembangunan				
				Tingkat Kematangan UKPBJ	Nilai	9.3	-	Setdako
		5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dan RKPD	%	100	407.171.600	Bappeda
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan RENSTRA-PD	%	100	-	Bappeda
		5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja-PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	415.090.000	Bappeda
				Persentase Keselarasan RKPD dengan renja-PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	-	Bappeda



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
				Persentase Keselarasan RKPD dengan renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	-	Bappeda
		5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	%	75.00	40.610.000	Bappeda
		5.05.03	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	%	78.57	30.000.000	Bappeda
		6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	83.07	1.420.546.764	Inspektorat
		6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3 3.4	271.860.447	Inspektorat



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027

Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
				Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3 3,2	-	Inspektorat
		5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD	%	41.49	90.257.301.521.	BPKD
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	20.30	-	BPKD
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	95.35	-	BPKD
				Persentase Penurunan SILPA	%	-20.00	-	BPKD
				Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100.00	-	BPKD
		5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan nilai Aset Tetap	%	2.37	430.364.000	BPKD
		5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	10.63	560.000.000	BPKD



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	%	75.00	-	BPKD
				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	90.03	-	BPKD
		5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	%	81.88	613.000.000	BKPSDM
				Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya	%	15.49	-	BKPSDM
				Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	%	30.00	-	BKPSDM
				Persentase Pegawai dengan SKP bernilai Baik	%	69.25	-	BKPSDM
		5.04.02	Program Pengembangan	Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan	%	4.61	570.000.000	BKPSDM



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
			Sumber Daya Manusia	Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional				
				Persentase ASN yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	%	1.73	-	BKPSDM
		4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRK	Ketetapan Penetapan Perda Tahun N	%	100	1.516.400.000	Sekretariat DPRK
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	-	Sekretariat DPRK
				Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	100	-	Sekretariat DPRK
		2.16.02	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survey)	%	84.81	1.816.000.000	Diskominfo
		2.16.03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	Nilai	3.15	1.017.975.000	Diskominfo



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	%	1.05	34.000.000	Diskominfo
		8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaann	%	26.47	20.000.000	Kesbangpol
		8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	38.00	1.073.852.187	Kesbangpol
		8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas	%	82.35	10.000.000	Kesbangpol



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
				Kerukunan Umat Beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan				
		8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan fasilitas penanganan konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	%	100	155.666.453	Kesbangpol
		2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	25.00	80.000.000	Disdukcapil
				Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	51.00	-	Disdukcapil
		2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melapor	%	100	110.000.000	Disdukcapil
				Persentase Akta Kelahiran yang	%	100	-	Disdukcapil



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
				diterbitkan bagi yang melapor				
				Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melapor	%	100	-	Disdukcapil
				Persentase Akta Perceraian yang diterbitkan bagi yang melapor	%	100	-	Disdukcapil
		2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administarsi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	%	100	340.000.000	Disdukcapil
		2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	10.000.000	Disdukcapil
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	66.00	34.000.000	Kecamatan Banda Sakti
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	%	100	8.000.000	Kecamatan Banda Sakti



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	%	100	15.000.000	Kecamatan Banda Sakti
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	13.000.000	Kecamatan Banda Sakti
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	66.00	30.000.000	Kecamatan Blang Mangat
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat.	%	100	10.000.000	Kecamatan Blang Mangat
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	%	100	15.000.000	Kecamatan Blang Mangat
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	18.000.000	Kecamatan Blang Mangat



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	44.850.000	Kecamatan Muara Satu
		7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase kebijakan urusan pemerintahan	%	100	20.150.000	Kecamatan Muara Satu
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	5.000.000	Kecamatan Muara Satu
		7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan	%	100	35.000.000	Kecamatan Muara Dua
		7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelaksanaan pemantauan keamanan dan ketertiban yang dilakukan	%	100	5.000.000	Kecamatan Muara Dua
		7.01.05	Program Penyelenggaraan	Persentase kebijakan urusan	%	100	18.000.000	Kecamatan Muara Dua



Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
			Urusan Pemerintahan Umum	pemerintahan				
		7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	12.000.000	Kecamatan Muara Dua
		1.05.02	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	98.59	955.787.292	Satpol PP dan WH
				Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	-	Satpol PP dan WH
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	%	17.30	-	Satpol PP dan WH
				Persentase PPNS yang ditingkatkan Kompetensinya	%	55.56	-	Satpol PP dan WH
5	Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya	9.01.02	Program Syariat Islam	Angka Melek Al-Qur'an	Angka	86.26	2.083.500.000	DSI-PD
		9.01.03	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	Persentase Fatwa yang disosialisasikan	%	90.00	30.000.000	Sekretariat MPU



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027

Prioritas RKPK 2027		Program Pembangunan		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Pagu	Perangkat Daerah
		9.01.04	Program Baitul Mal	Persentase Peningkatan ZISWAF	%	12.51	4.600.000.000	Sekretariat Baitul Mal
		2.22.07	Program Majelis Adat Aceh (MAA)	Indeks Adat Istiadat Aceh (Nilai)	%	97.60	70.000.000	MAA

Sumber : Bappeda Kota Lhokseumawe, 2026



4.3 Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) Provinsi Aceh dengan Kota Lhokseumawe untuk Tahun 2025

Pembangunan di daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari keberhasilan pembangunan di daerah.

Untuk mewujudkan pencapaian target pembangunan nasional diperlukan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah secara efektif. Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang) dilaksanakan dalam rangka menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan guna mencapai target pembangunan nasional. Hal ini berupa dukungan RKPD terhadap indikator kinerja urusan, penyepakatan target indikator makro pembangunan, serta strategi dan aksi pusat dan daerah dalam pencapaiannya.

Berikut merupakan penyepakatan bersama target indikator makro pembangunan dan Indikator Kinerja Urusan hasil Rakortekbang Provinsi Aceh dengan Kota Lhokseumawe untuk tahun 2025.



Tabel 4.9

Indikator Kinerja Urusan Hasil Rakortkbang Provinsi Aceh dengan Kota Lhokseumawe

NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	KESEPAKATAN RAKORTEK	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL \n 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA \n 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN \n 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA \n 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN \n 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN \n 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN \n 5.01 PERENCANAAN	Tingkat Kemiskinan	7	8,70	8,70	(%)
2	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Angka Kematian Ibu (AKI)	97	97	97	(per 100.000 kelahiran hidup)
3	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN \n 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN \n 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	16	16,30	16.3	(%)



NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	KESEPAKATAN RAKORTEK	SATUAN
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG \n 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL \n 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN \n 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA \n 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA \n 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA \n 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL \n 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN \n 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN \n 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN \n 4.01 SEKRETARIAT DAERAH \n 5.01 PERENCANAAN \n 5.02 KEUANGAN \n 7.01 KECAMATAN					



NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	KESEPAKATAN RAKORTEK	SATUAN
4	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	98.80	93,80	93,80	(%)
5	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0	0,291	0,291	Indeks
6	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	1.15	0,4	0.4	%
7	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	20	-	-	%
8	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	70	81,83	81.83	%
9	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Desa Mandiri	24.55	52.94	52.94	%
10	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Indeks Demokrasi Indonesia	79.95	-	-	indeks
11	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	21	9,47	9.47	(%)



NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	KESEPAKATAN RAKORTEK	SATUAN
12	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penurunan Emisi GRK	28	-	-	Persentase
13	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.	100	100	101	(%)
14	3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Rasio Elektrifikasi	100	-	-	%
15		Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim	100	-	-	Persentase
16	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi	45	48	40	%
17	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Indeks pembangunan literasi masyarakat	73	69,36	17.77	Indeks
18	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun	100	98,28	91.04	%



NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	KESEPAKATAN RAKORTEK	SATUAN
		yang berpartisipasi dalam PAUD				
19	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	99,85	99.85	%
20	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100	99,10	96.65	%
21	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	1,500,000	347	347	Keluarga
22	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Garam	2,750,000	-	-	Ton
23	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Perikanan Tangkap	6,840,000	15.138,25	-	Ton
24	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produksi Perikanan Budidaya	20,410,000	2.036,90	2.036	Ton
25	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Penemuan Kasus TBC	90	100	100	%



NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	KESEPAKATAN RAKORTEK	SATUAN
26	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	75	5	5	%
27	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	3	1	1	%
28	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase timbunan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	31	10	10	%
29	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	50	1,02	-	%
30	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	67.50	73,00	73.00	Indeks
31	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	5,748,850	690	690	Orang



NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	KESEPAKATAN RAKORTEK	SATUAN
32	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Indeks Kewaspadaan Nasional	77	-	-	Nilai
33	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Persentase kondisi mantap jalan	73	64,54	64.54	%
34	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Rasio PDB Pariwisata	4.8	2,45	2.45	%
35	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya Daerah	701	-	-	Nilai
36	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	60	90	-	Persentase
37	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	73	73,60	-	Indeks
38	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	85	100	100	%
39	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Jumlah Produksi Padi	55,273,025	11.578,00	-	Ton



NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	KESEPAKATAN RAKORTEK	SATUAN
40	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85	100	100	%
41	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	38	67,57	67,57	%
42	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	84	40	60	%
43	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76.84	75,65	74.02	poin
44	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	71	70,29	65	Nilai
45	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	64	53	-	poin
46	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	3	1,85	1,85	Poin
47	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Nilai Realisasi Penanaman Modal	2.567	1.307	1.307	triliun rupiah
48	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	86	57,20	57,21	%



NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	KESEPAKATAN RAKORTEK	SATUAN
49	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	50	5	5	Kasus
50	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	209,537	-	-	Bidang Tanah
51	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	312,600	353	353	Kepala Keluarga
52	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73	-	-	Nilai
53	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Jumlah Warga Negara Usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	100	-	-	%
54	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah	100	-	-	%
55	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	100	Persentase



NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	KESEPAKATAN RAKORTEK	SATUAN
56	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	80	100	Persentase
57	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	80	100	Persentase
58	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	60	100	Persentase
59	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	101	Persentase
60	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Rasio Kewirausahaan	3.30	8,56	8.56	Persentase
61	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	70	21,90	21.9	Nilai
62	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim Keamanan SMP	72	75,56	74	Nilai
63	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim Kebhinekaan SD	68	74,47	67.95	Nilai
64	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim Kebinekaan SMP	68	72,77	68.5	Nilai



NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	KESEPAKATAN RAKORTEK	SATUAN
65	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim Inklusivitas SD	61	65,57	59.83	Nilai
66	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim Inklusivitas SMP	62	63,75	61.51	Nilai
67	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Iklim Keamanan SD	75	77,30	75.44	Nilai
68	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	61	64,22	57.90	Nilai
69	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	53	58,14	49.27	Nilai
70	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	72	71,64	69.96	Nilai
71	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	65	64,44	62.49	Nilai
72	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	67	68,96	69.00	%
73	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal	84	90,59	86.75	%



NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	KESEPAKATAN RAKORTEK	SATUAN
		dengan kualifikasi S1 / D IV				
74	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Penetapan RDTR	1,059	1	1	Perda/Perkada
75	3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	83	-	-	Persentase
76	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Indeks Pembangunan Pemuda	69	-	-	Nilai
77	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/Internasional	80	-	-	Persentase
78	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	16	16.30	16.31	%
79	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	60	-	-	Persentase



NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	KESEPAKATAN RAKORTEK	SATUAN
80	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	55	36,0	36,1	Persentase
81	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	5,981,316	1.102,00	-	Ha
82	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	80	-	70	Nilai
83	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	80	88.62	-	Nilai
84	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	80	-	70	Nilai
85	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	77.5	86,35	70.5	Indeks
86	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	7.00	4,81	-	Persentase
87	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	Indeks Zakat Nasional (IZN)	1	0.74	0.75	Poin



NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	KESEPAKATAN RAKORTEK	SATUAN
88	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik	73	-	-	Nilai
89	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	2	-	-	Nilai
90	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Jumlah lulusan pelatihan vokasi di lembaga pelatihan kerja swasta dan /atau OPD	10,288	35	35	orang
91	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Peningkatan jumlah pekerja yang terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja	2,452,337	33.340	33.340	orang
92	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan Kategori Baik	8.50	44,12	-	%
93	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Indeks kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil berkategori "Sangat Baik"	365	1	1	Daerah
94	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Sektor Perikanan	657,020	513,625	513,625	Miliar Rupiah



NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	KESEPAKATAN RAKORTEK	SATUAN
95	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Presentase Peningkatan Pengawasan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berkinerja baik	64	37,69	37,69	%
96	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Operasionalisasi BPP	5,829	3	-	Unit
97	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Luas Hasil Cetak Sawah yang ditingkatkan IP nya	225,000	-	-	Hektare
98	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jumlah Luas Kawasan yang terlindungi oleh risiko daya rusak air (Ha)	13,440	16,53	-	Ha
99	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan ketentuan yang berlaku	50.0	15,9	15.9	%
100		Tingkat kesiapan teknis dan operasi pemeliharaan irigasi untuk mendukung swasembada pangan (%)	60	-	-	%
101	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Tingkat Keselamatan Transportasi di Daerah	99.99	90,16	90,16	%
102	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi di Daerah	0.723	0,52	0,52	Rasio



NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	KESEPAKATAN RAKORTEK	SATUAN
103		Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang diakui	2	-	-	%
104	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	LAPORAN PEMANTAUAN STOK/PASOKAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI PROVINSI	1	12	-	Bulan
105	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	LAPORAN PEMANTAUAN STOK/PASOKAN BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI KAB/KOTA	1	12	-	Laporan
106	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Rasio Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	19.15	16,8	16,8	%
107	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PERTUMBUHAN PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN (PBE) DI KAB/KOTA ATAS DASAR HARGA BERLAKU	15.50	0,5	0,5	triliun rupiah
108	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	PRESENTASE PELAKU USAHA YANG MENJADI EKSPORTIR BARU	3.10	0,04	0,04	%
109	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan Nonmigas	7.95	2,1	2,1	%



NO	BIDANG URUSAN	INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	TARGET NASIONAL	TARGET DAERAH	KESEPAKATAN RAKORTEK	SATUAN
110	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Proporsi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang Menjalankan RAT	80.00	4,41	-	%

Sumber : Bappenas, Bappeda Aceh dan Bappeda Kota Lhokseumawe, 2026

4.4 Pokok-Pokok Pikiran DPRK

Pokok-pokok pikiran DPRK dalam kerangka penyusunan RKPK Tahun 2027 berisi saran dan pendapat DPRK yang merupakan hasil reses/ penjangkaran aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMK Lhokseumawe 2025-2029. Adapun untuk tahun 2027 berdasarkan Surat Ketua DPRK Lhokseumawe Nomor : 170/172 tanggal 08 Februari 2026 perihal penyampaian Rekapitulasi Kamus Usulan Reses dan Pokir Anggota DPRK Lhokseumawe Tahun 2027 Dewan terdapat 375 usulan permasalahan yang disampaikan dari 25 anggota DPRK (legislatif) kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe (eksekutif). Selanjutnya melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah-Republik Indonesia (SIPD-RI) terdapat 409 usulan permasalahan yang dilakukan penginputan oleh Operator Dewan masing-masing.

Usulan permasalahan dalam aplikasi SIPD-RI tersebut terbagi menjadi beberapa OPD tujuan yaitu:

1. Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan : 19 usulan permasalahan.
2. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata : 13 usulan permasalahan.
3. Dinas Kesehatan : 3 usulan permasalahan.
4. Dinas Lingkungan Hidup : 1 usulan permasalahan.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat : 253 usulan permasalahan.
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja : 6 usulan permasalahan.
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : 18 usulan permasalahan.
8. Dinas Perhubungan : 18 usulan permasalahan.
9. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah : 42 usulan permasalahan.
10. Dinas Sosial : 1 usulan permasalahan.
11. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah : 35 usulan permasalahan.

Kemudian untuk sinkronisasi dengan program prioritas daerah yakni:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan UMKM, Industri dan Peningkatan Investasi serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
2. Percepatan pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Integrasi jalur Distribusi barang dan jasa yang Ekonomis serta Pengelolaan Lingkungan Hidup dan kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana

- merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Lingkungan Hidup .
3. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berkualitas dan Berdaya Saing merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Sosial dan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
 4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka dan Berorientasi Pelayanan, tidak memiliki usulan permasalahan di OPD.
 5. Penerapan Syariat Islam dan Pelestarian Budaya merupakan usulan permasalahan di OPD Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah.

4.4.1 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRK dimaksudkan sebagai upaya DPRK Lhokseumawe dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan Kota Lhokseumawe, dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan di Kota Lhokseumawe. Adapun tujuan disusunnya Pokok Pokok Pikiran DPRK Lhokseumawe Tahun 2027 yaitu:

- a. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe, dalam menyusun dokumen awal Rancangan RKPK Tahun Anggaran 2027.
- b. Memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPK, KUA, PPAS, RKA SKPK, dan RAPBK Tahun Anggaran 2027.
- c. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian pembangunan Kota Lhokseumawe melalui perencanaan dan penganggaran APBK Tahun Anggaran 2027.
- d. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPK dan RPJMK.
- e. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRK Lhokseumawe.
- f. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat kota Lhokseumawe yang lebih baik.



BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA LHOKSEUMAWE

Rencana kerja dan pendanaan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun 2027 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Kerja dan Pendanaan dalam RKPK ini merupakan usulan program/ kegiatan urusan yang sumber dananya berasal dari APBD. Usulan dengan sumber dana Otonomi Khusus Aceh dan TDBH Migas, dilakukan secara terpusat melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan dan aplikasi perencanaan KRISNA-DAK untuk usulan program/kegiatan prasarana fisik dengan sumber pembiayaan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non fisik.

Program Kegiatan pada RKPK Lhokseumawe tahun 2027 ini, merupakan hasil dari rekapitulasi Rancangan Renja Perangkat Daerah tahun 2027. Secara lebih rinci, usulan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Rekapitulasi Pagu Indikatif dan Jumlah Program Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Pagu Indikatif
1	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	2	959,333,000
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10	168,375,255,935
3	Dinas Kesehatan	5	89,983,603,556
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	12	55,347,753,940
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	3,756,794,200
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	2	8,108,720,997
7	Dinas Sosial	6	3,517,461,880
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian	10	4,585,466,036
9	Dinas Pertanahan	5	2,845,329,280



No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Pagu Indikatif
10	Dinas Lingkungan Hidup	4	42,087,147,162
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	3,025,301,200
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	5	2,847,676,080
13	Dinas Perhubungan	2	3,438,917,880
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	3	4,928,674,917
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	9	6,432,064,931
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	5	3,704,408,240
17	Sekretariat Majelis Adat Aceh	2	1,370,148,920
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4	2,947,388,197
19	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	12	6,966,080,999
20	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	16	8,132,764,000
21	Sekretariat Daerah	3	27,233,211,840
22	Sekretariat DPRK	2	21,195,215,563
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5	5,788,997,160
24	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	4	115,005,783,241
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	59,725,170,918
26	Inspektorat	3	8,055,865,211
27	Kecamatan Banda Sakti	5	2,351,229,720
28	Kecamatan Blang Mangat	5	1,963,761,904
29	Kecamatan Muara Satu	4	1,652,868,800
30	Kecamatan Muara Dua	5	1,837,215,800
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	3,543,434,640
32	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	2	2,822,242,480
33	Sekretariat Baitul Mal	2	5,890,830,456
34	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	3	8,405,799,520
	Jumlah Total	172	688,831,918,603

Sumber: SIPD-RI, diolah 2026

Dukungan pendanaan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 merupakan bagian penting dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat secara merata dan berkeadilan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin kebutuhan esensial warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dukungan



pendanaan SPM diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas pada sektor-sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sosial.

Melalui pengalokasian anggaran yang memadai dalam RKPK Tahun 2027, Pemerintah Kota Lhokseumawe berupaya memastikan keberlangsungan layanan publik dasar yang berkualitas, terjangkau, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi wujud tanggung jawab pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan standar pelayanan minimal yang konsisten, terukur, dan berkesinambungan. Alokasi dukungan anggaran SPM dirincikan dalam tabel sebagai berikut.



Tabel 5.2
Rekapitulasi Pagu Indikatif Dukungan SPM dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2027

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
1	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	48,560,000
2	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17,905,840,000
3	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	20,000,000
4	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	200,000,000
5	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	30,000,000
6	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	100,000,000
7	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	150,000,000
8	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	94,408,725
9	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal /Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	20,000,000



Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
10	SPM Bidang Pendidikan	Pendidikan Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	516,020,000
11	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	1,259,386,411
12	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	70,952,632
13	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	599,000,000
14	SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi orban encana Kabupaten/kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	350,000,000



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
15	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	296,087,500
16	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	15,000,000
17	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	286,790,000
18	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan balita	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	80,000,000
19	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	164,400,000
20	SPM Bidang Kesehatan	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	20,000,000



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
21	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15,000,000
22	SPM Bidang Kesehatan	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Penderita Hipertensi	35,000,000
23	SPM Bidang Kesehatan	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Penderita Diabetes Melitus	15,000,000
24	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	102,600,000
25	SPM Bidang Kesehatan	Jumlah orang terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Orang Terduga Tuberkulosis	840,372,500
26	SPM Bidang Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human	DINAS KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	10,000,000



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
		Immunodeficiency Virus)				
27	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	20,000,000
28	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Sandang	20,000,000
29	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Alat Bantu	520,000,000
30	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	20,000,000



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
				Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		
31	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	20,000,000
32	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	10,000,000
33	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	20,000,000
34	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	20,000,000



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
35	SPM Bidang Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	DINAS SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	15,000,000
36	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	2,000,000
37	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	2,000,000
38	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	2,000,000



NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
39	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	31,911,200
40	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	2,000,000
41	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	2,000,000
42	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	2,000,000
43	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	2,000,000



**Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
Lhokseumawe Tahun 2027**

NO	SPM	NAMA LAYANAN SPM	NAMA OPD	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU
1	2	3	4	5	6	7
44	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2,000,000
45	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	2,000,000
TOTAL ANGGARAN SPM						3,959,328,968

Sumber : Aplikasi SIPD-RI 2027



Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2027 juga memuat dukungan terhadap Program Strategis Nasional (Pro SN) baik program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:



**Tabel 5.3
Dukungan ProSN Tahun 2027 Kota Lhokseumawe**

No	Nama Program Strategis Nasional (ProSN)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 2027	Dukungan Pagu 2027	Dinas Pelaksana
					(Indikator Kinerja)		
1	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10 Orang	10,000,000	DINSOS
2	Sekolah Rakyat	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1000 Usulan	60.000.000	DINSOS
		Program pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	1 Dokumen	60,000,000	DLH
3	Pembangunan Tiga Juta Rumah	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit	350,000,000	PUPR
Ketahanan Pangan							
1	Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan						



No	Nama Program Strategis Nasional (ProSN)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 2027	Dukungan Pagu 2027	Dinas Pelaksana
					(Indikator Kinerja)		
2	Pendayagunaan Penyuluh Pertanian						
3	Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)						
4	Pangan Akuatik						
5	Kampung Nelayan						
Kesehatan untuk Semua							
1	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	185,495,000	DINKES
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen	1,459,034,000	DINKES



No	Nama Program Strategis Nasional (ProSN)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 2027	Dukungan Pagu 2027	Dinas Pelaksana
					(Indikator Kinerja)		
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	20 Keluarga	20,000,000	DP3AP2KB
2	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7 Dokumen	4,548,935,799	DINKES
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	5 Laporan	191,117,204	DINKES
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	5 Laporan	360,017,204	DINKES



No	Nama Program Strategis Nasional (ProSN)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 2027 (Indikator Kinerja)	Dukungan Pagu 2027	Dinas Pelaksana
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	10,000,000	DISDUKCAPIL
3	Jaminan Kesehatan Nasional	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7 Dokumen	4,548,935,799	DINKES
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	10,000,000	DISDUKCAPIL
4	Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	10 Orang	10,000,000	DINSOS
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	10,000,000	DISDUKCAPIL
5	Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota						



No	Nama Program Strategis Nasional (ProSN)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 2027 (Indikator Kinerja)	Dukungan Pagu 2027	Dinas Pelaksana
6	Makan Bergizi Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen	1,459,034,000	DINKES
1	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Sekolah Unggulan Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran						
Perluasan Akses Pendidikan							
1	Pengendalian Inflasi	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	56 Laporan	30,250,000	DISKOP



No	Nama Program Strategis Nasional (ProSN)	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 2027	Dukungan Pagu 2027	Dinas Pelaksana
					(Indikator Kinerja)		
2	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	20 unit usaha	42,000,000	DISKOP
3	Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah						

Sumber: Aplikasi SIPD-RI



Program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2027 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang disusun menggunakan matrik program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang diperoleh dari sistem perencanaan terpadu berbasis elektornik dalam Aplikasi SIPD, memuat informasi mengenai:

1. Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan.
2. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
3. Nama Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
4. Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
5. Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
6. Lokasi Kegiatan;
7. Besaran dana yang dibutuhkan;
8. Sumber dana;
9. Sinergitas terhadap Prioritas Nasional dan Daerah;
10. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027;
11. Perangkat Daerah Penanggung Jawab.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaaan Kota Lhokseumawe dituangkan dalam bentuk Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2027 yang disajikan dalam tabel 5.4 berikut ini:

TABEL 5.4
RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA (RKPK) LHOXSEUMAWO
TAHUN 2027

NO		KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027		PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF					
																NASIONAL	DAERAH							
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
						Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah					959,333,000						1,479,603,824	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah						
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					959,333,000						1,479,603,824	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah						
		1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					959,333,000						1,479,603,824	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah						
1.	1	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					894,333,000						1,329,603,824	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah						
						Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah					892,333,000						1,323,603,824	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah						
							999.Nilai SAKIP OPD	64.00 Angka		62.90 Angka	63.10 Angka						63.40 Angka	1,323,603,824	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah					
		1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											10,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah						
						Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah											10,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah						
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen			10 Dokumen							10,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah						
		1	01	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											10,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah						
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen				Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penvandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	10 Dokumen	10,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah				
		1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											873,003,824	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah						
						Tertaksananya Administrasi keuangan Pada Sekretariat MPD											873,003,824	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah						
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang/bulan			224 Orang/bulan							224 Orang/bulan	873,003,824	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah					
		1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											873,003,824	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah					
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	224 Orang/bulan		224 Orang/bulan	252 Orang/bulan			Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penvandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	224 Orang/bulan	873,003,824	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah				
		1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah											MPD Kota Lhokseumawe		59,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah				
						Tertaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah											MPD Kota Lhokseumawe		59,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah				
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Laporan			37 Laporan							37 Laporan	40,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah					
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	230 Paket			230 Paket								230 Paket	6,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah				
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket			3 Paket								3 Paket	5,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah				
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket			40 Paket								40 Paket	8,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah				
		1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor												8,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah				
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket				Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penvandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	40 Paket	8,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah				
		1	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												6,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah				
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	230 Paket		230 Paket	80 Paket			Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penvandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	230 Paket	6,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah				
		1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												5,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah				
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket			Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penvandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	3 Paket	5,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah				
		1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												40,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah				
						Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	37 Laporan		37 Laporan	5 Laporan			Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penvandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	37 Laporan	40,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah				
		1	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												MPD Kota Lhokseumawe		30,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah			
						Tersedianya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												MPD Kota Lhokseumawe		30,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah			
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit			5 Unit	5 Unit							5 Unit	30,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah				



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
															NASIONAL		DAERAH			
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	2 Unit	14,505,900	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		5 Unit	30,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						14,505,900						30,000,000		Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						87,900,000					MPD Kota Lhokseumawe		293,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						87,900,000					MPD Kota Lhokseumawe		293,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	372 Laporan		372 Laporan	372 Laporan	87,400,000						372 Laporan	292,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	500,000						2 Laporan	1,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500,000							1,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
						Terdaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		2 Laporan	1,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						87,400,000							292,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	372 Laporan		372 Laporan	3 Laporan	87,400,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		372 Laporan	292,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						32,800,000					MPD Kota Lhokseumawe		64,600,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						32,800,000					MPD Kota Lhokseumawe		64,600,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13,500,000						1 Unit	25,500,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17,300,000						1 Unit	33,100,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit		16 Unit	16 Unit	2,000,000						16 Unit	6,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						17,300,000							33,100,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Pajak Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17,300,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Unit	33,100,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	1	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						13,500,000							25,500,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Unit	25,500,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	1	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2,000,000							6,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
						Terdaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit		16 Unit	8 Unit	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		16 Unit	6,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
2.	1	01	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH						65,000,000							150,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
						Meningkatnya mutu pendidikan dengan kebijakan/rekomendasi yang dihasilkan terkait Penyelenggaraan Pendidikan Aceh						45,000,000							75,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
							999.Persentase rekomendasi yang dihasilkan terkait Penyelenggaraan Pendidikan Aceh	100 %		100 %	100 %	45,000,000						100 %	75,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	1	01	08	7.01		Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh						20,000,000					Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe		40,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
						Meningkatnya Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan						20,000,000					Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe		40,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
							Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	2 Satuan Pendidikan		3 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	20,000,000						2 Satuan Pendidikan	40,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	1	01	08	7.01	0002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh						20,000,000							40,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
						Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	2 Satuan Pendidikan		3 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	20,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z, dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		2 Satuan Pendidikan	40,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
	1	01	08	7.03		Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh						10,000,000					Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe		35,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
						Terdaksananya Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh						10,000,000					Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe		35,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH			(15)		(16)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000					1 Dokumen	35,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah		
	1	01	08	7.03	0002	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah						10,000,000						35,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah		
						Tertelaksananya Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Dokumen	35,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	
	1	01	08	7.05		Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh						35,000,000					Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe	75,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah		
						Terselenggaranya Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh						35,000,000					Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe	75,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah		
							Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	40 Satuan Pendidikan		40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	20,000,000						40 Satuan Pendidikan	40,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	
							Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	36 Satuan Pendidikan		34 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	15,000,000						36 Satuan Pendidikan	35,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	
	1	01	08	7.05	0002	Supervisi dan Fasilitas Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh						20,000,000						40,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah		
						Tertelaksananya Supervisi dan Fasilitas Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	40 Satuan Pendidikan		40 Satuan Pendidikan	40 Satuan Pendidikan	20,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		40 Satuan Pendidikan	40,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	
	1	01	08	7.05	0003	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh						15,000,000						35,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah		
						Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	36 Satuan Pendidikan		34 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	15,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		36 Satuan Pendidikan	35,000,000	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	
						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						168,346,088,935						192,119,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						167,784,278,035						190,376,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						167,784,278,035						190,376,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
3.	1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						136,742,355,620						134,091,500,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
						Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Perangkat Daerah						136,727,355,620						133,513,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
						999.Nilai SAKIP OPD		66.43 Angka		66.32 Angka	66.35 Angka	136,727,355,620					66.37 Angka	133,513,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29,071,678					ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe	77,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
						Tersediannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29,071,678					ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe	77,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	29,071,678						10 Dokumen	35,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						29,071,678						35,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	29,071,678	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		10 Dokumen	35,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						133,349,173,062					ASN Dinas P dan K Kota Lhokseumawe	123,982,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
						Tertelaksananya Administrasi Keuangan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe						133,349,173,062					ASN Dinas P dan K Kota Lhokseumawe	123,982,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1600 Orang/bulan		1300 Orang/bulan	1400 Orang/bulan	949,664,918						1500 Orang/bulan	123,950,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	-		-	12 Orang/bulan	132,399,508,144						-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						949,664,918						123,950,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
						Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1600 Orang/bulan		1300 Orang/bulan	1500 Orang/bulan	949,664,918	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TPG PNSD Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1500 Orang/bulan	123,950,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.02	0009	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan						132,399,508,144						-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Tersediannya Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	-		-	12 Orang/bulan	132,399,508,144	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						74,000,000					ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe	184,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
						Tertelaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						74,000,000					ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe	184,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan		80 Laporan	80 Laporan	64,000,000						80 Laporan	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5,000,000						4 Paket	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5,000,000						4 Paket	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5,000,000						50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		4 Paket	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						5,000,000							20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		4 Paket	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						64,000,000							100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan		80 Laporan	80 Laporan	64,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		80 Laporan	100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3,257,610,880					ASN Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		8,475,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						3,257,610,880					ASN Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		8,475,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan			3 Laporan	3 Laporan	127,000,000						3 Laporan	260,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			5 Laporan	5 Laporan	3,129,110,880						5 Laporan	8,160,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			4 Laporan	4 Laporan	1,500,000						4 Laporan	5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1,500,000							5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	5 Laporan	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		4 Laporan	5,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						127,000,000							260,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	127,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		3 Laporan	260,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3,129,110,880							8,160,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	3,129,110,880	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		5 Laporan	8,160,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						32,500,000					ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		155,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						32,500,000					ADM Dinas P dan K Kota Lhokseumawe		155,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit			3 Unit	3 Unit	5,000,000						3 Unit	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit			2 Unit	2 Unit	22,500,000						2 Unit	25,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit			50 Unit	50 Unit	5,000,000						50 Unit	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						22,500,000							25,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	1 Unit	22,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		2 Unit	25,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5,000,000							50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		3 Unit	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5,000,000							50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit		50 Unit	50 Unit	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		50 Unit	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						31,041,922,415							55,520,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Meningkatnya Partisipasi Anak Usia Sekolah						30,821,922,415							34,030,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						999 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 Tahun		100 Persentase		95.73 Persentase	98.28 Persentase	30,821,922,415						100 Persentase	34,030,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							999.Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 Tahun	99.25 Persentase		99.05 Persentase	99.10 Persentase	30,821,922,415						99.15 Persentase	34,030,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							999.Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Tahun	72.08 Persentase		57.57 Persentase	64.06 Persentase	30,821,922,415						70.55 Persentase	34,030,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar							18,174,400,000					Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		25,850,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Terkelolanya Satuan Pendidikan Sekolah Dasar							18,174,400,000					Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe		25,850,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	110 Satuan Pendidikan			110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	20,000,000						110 Satuan Pendidikan	40,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	110 Satuan Pendidikan			110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	48,560,000						110 Satuan Pendidikan	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	110 Satuan Pendidikan			110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	17,905,840,000						110 Satuan Pendidikan	17,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik			100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	200,000,000						100 Peserta Didik	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.01	0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							200,000,000						500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
					Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik			100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	200,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		100 Peserta Didik	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.01	0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							48,560,000						150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
					Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	110 Satuan Pendidikan			110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	48,560,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		110 Satuan Pendidikan	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.01	0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar							17,905,840,000						17,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
					Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	110 Satuan Pendidikan			110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	17,905,840,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		110 Satuan Pendidikan	17,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.01	0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik							20,000,000						40,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
					Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	110 Satuan Pendidikan			110 Satuan Pendidikan	110 Satuan Pendidikan	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		110 Satuan Pendidikan	40,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							9,632,183,690						Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe	20,865,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Terkelolanya Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama							9,632,183,690						Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe	20,865,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang			2 Ruang	2 Ruang	327,133,690						2 Ruang	750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	25 Satuan Pendidikan			25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	30,000,000						25 Satuan Pendidikan	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	25 Satuan Pendidikan			25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	9,075,050,000						25 Satuan Pendidikan	9,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik			100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	200,000,000						100 Peserta Didik	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	1	01	02	2.02	0006 Pembangunan Laboratorium							327,133,690						750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
					Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang			2 Ruang	2 Ruang	327,133,690	Kota Lhokseumawe	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		2 Ruang	750,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.02	0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa							200,000,000						500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
					Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik			100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	200,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		100 Peserta Didik	500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.02	0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah							30,000,000						80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
					Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	25 Satuan Pendidikan			25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	30,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		25 Satuan Pendidikan	80,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.02	0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama							9,075,050,000						9,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
					Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	25 Satuan Pendidikan			25 Satuan Pendidikan	36 Satuan Pendidikan	9,075,050,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-BOS Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		25 Satuan Pendidikan	9,000,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							2,699,318,725						Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe	6,660,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
					Terkelolanya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)							2,699,318,725						Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe	6,660,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	76 Satuan Pendidikan			76 Satuan Pendidikan	76 Satuan Pendidikan	94,408,725						76 Satuan Pendidikan	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
															NASIONAL		DAERAH			
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	150 Satuan Pendidikan		150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	2,354,910,000						150 Satuan Pendidikan	1,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	150,000,000						100 Orang	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100,000,000						2 Unit	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						100,000,000							400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		2 Unit	400,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						150,000,000							200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	150,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		100 Orang	200,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						94,408,725							20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Tertindakannya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	76 Satuan Pendidikan		76 Satuan Pendidikan	76 Satuan Pendidikan	94,408,725	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		76 Satuan Pendidikan	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						2,354,910,000							1,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Tertindakannya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	150 Satuan Pendidikan		150 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	2,354,910,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		150 Satuan Pendidikan	1,500,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						536,020,000					Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe	2,145,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Terkelolanya Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						536,020,000					Peserta Didik dan Tendik/Guru Kota Lhokseumawe	2,145,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan		5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	20,000,000						5 Satuan Pendidikan	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	2 Satuan Pendidikan		2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	516,020,000						2 Satuan Pendidikan	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						20,000,000							15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Tertindakannya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	5 Satuan Pendidikan		5 Satuan Pendidikan	5 Satuan Pendidikan	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		5 Satuan Pendidikan	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						516,020,000							20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Tertindakannya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	2 Satuan Pendidikan		2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	516,020,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		2 Satuan Pendidikan	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						561,810,900							1,743,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						561,810,900							1,743,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.	2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						11,810,900							85,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional						11,810,900							85,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							999.Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	66.67 %		40.00 %	40.00 %	11,810,900						60.00 %	85,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						11,810,900					Masyarakat Kota Lhokseumawe	85,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Terdapatnya Objek kesenian tradisional yang dilestarikan						11,810,900					Masyarakat Kota Lhokseumawe	85,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang		50 Orang	50 Orang	11,810,900						50 Orang	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						11,810,900							50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Tertindakannya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang		50 Orang	50 Orang	11,810,900	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		50 Orang	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						50,000,000							803,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan						25,000,000							653,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							999.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan	100.00 %		40.70 %	60.20 %	25,000,000						77.80 %	653,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							999.Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	55.15 %		24.52 %	29.44 %	25,000,000						36.37 %	653,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
	2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						25,000,000				Masyarakat Kota Lhokseumawe		123,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Tersedianya Cagar Budaya						25,000,000				Masyarakat Kota Lhokseumawe		123,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
							Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	1 Objek		0 Objek	1 Objek	25,000,000					1 Objek	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	22	05	2.01	0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda						25,000,000						20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
						Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	1 Objek		0 Objek	1 Objek	25,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		1 Objek	20,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						25,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Tersedianya Cagar Budaya yang dikelola						25,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		600,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5 Objek		5 Objek	5 Objek	25,000,000						5 Objek	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya						25,000,000							50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	5 Objek		5 Objek	17 Objek	25,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		5 Objek	50,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12.	2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						500,000,000							145,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Meningkatnya tata kelola museum						500,000,000							75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							999.Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	13.84 %		13.76 %	13.77 %	500,000,000						13.77 %	75,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						500,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		145,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum						500,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		145,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemandataan Koleksi Secara Terpadu	20 Unit		20 Unit	20 Unit	500,000,000						20 Unit	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu						500,000,000							15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemandataan Koleksi Secara Terpadu	20 Unit		20 Unit	178 Unit	500,000,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		20 Unit	15,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1					Dinas Kesehatan						89,983,603,556							-	Dinas Kesehatan
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						89,983,603,556							-	Dinas Kesehatan
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						89,983,603,556							-	Dinas Kesehatan
13.	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						65,474,389,413							-	Dinas Kesehatan
						Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Perangkat Daerah						65,464,389,413							-	Dinas Kesehatan
							999.Nilai SAKIP OPD	68.98 Angka		68.94 Angka	68.95 Angka	65,464,389,413						68.96 Angka	-	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,500,000					OPD		-	Dinas Kesehatan
						Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,500,000					OPD		-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	2,500,000						10 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2,500,000							-	Dinas Kesehatan
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	2,500,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		10 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						63,918,260,053					OPD		-	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah						63,918,260,053					OPD		-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11396 Orang/bulan		11396 Orang/bulan	11396 Orang/bulan	63,918,260,053						11396 Orang/bulan	-	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						63,918,260,053							-	Dinas Kesehatan
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11396 Orang/bulan		11396 Orang/bulan	11396 Orang/bulan	63,918,260,053	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		11396 Orang/bulan	-	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						80,000,000					OPD		-	Dinas Kesehatan
						Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						80,000,000					OPD		-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	50,000,000						40 Laporan	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5,000,000						1 Paket	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15,000,000						2 Paket	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	10,000,000						8 Paket	-	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10,000,000							-	Dinas Kesehatan
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	10,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		8 Paket	-	Dinas Kesehatan



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
															NASIONAL		DAERAH			
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Paket	-	Dinas Kesehatan
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor						5,000,000								Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		2 Paket	-	Dinas Kesehatan
						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan						15,000,000								Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50,000,000								Dinas Kesehatan
						Tertelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	50,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		40 Laporan	-	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30,000,000					OPD			Dinas Kesehatan
						Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						30,000,000					OPD			Dinas Kesehatan
							Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	30,000,000							3 Unit	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	2 Unit	30,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		3 Unit	-	Dinas Kesehatan
						Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya						30,000,000								Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						966,729,360					OPD			Dinas Kesehatan
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						966,729,360					OPD			Dinas Kesehatan
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	725,560,000							250 Laporan	Dinas Kesehatan
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10000 Laporan		10000 Laporan	10000 Laporan	240,419,360							10000 Laporan	Dinas Kesehatan
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80 Laporan		80 Laporan	80 Laporan	750,000							80 Laporan	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	80 Laporan		80 Laporan	80 Laporan	750,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		80 Laporan	-	Dinas Kesehatan
						Tertelaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750,000								Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	725,560,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		250 Laporan	-	Dinas Kesehatan
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						725,560,000								Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	10000 Laporan		10000 Laporan	10000 Laporan	240,419,360	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		10000 Laporan	-	Dinas Kesehatan
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor						240,419,360								Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						476,900,000					OPD			Dinas Kesehatan
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						476,900,000					OPD			Dinas Kesehatan
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	5,000,000							4 Unit	Dinas Kesehatan
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit		35 Unit	35 Unit	449,700,000							35 Unit	Dinas Kesehatan
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17,200,000							1 Unit	Dinas Kesehatan
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit		30 Unit	30 Unit	5,000,000							30 Unit	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						17,200,000								Dinas Kesehatan
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17,200,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Unit	-	Dinas Kesehatan
	1	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						449,700,000								Dinas Kesehatan



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit		35 Unit	35 Unit	449,700,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		35 Unit	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					5,000,000							-	Dinas Kesehatan	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	5,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		4 Unit	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5,000,000							-	Dinas Kesehatan	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit		30 Unit	30 Unit	5,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		30 Unit	-	Dinas Kesehatan	
14.	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					23,183,037,143							-	Dinas Kesehatan	
						Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat					23,078,037,143							-	Dinas Kesehatan	
							999.Angka Kematian Ibu (AKI)	77.00 Angka	109.00 Angka	97.00 Angka	23,078,037,143						86.00 Angka	-	Dinas Kesehatan	
							999.Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	13.34 Angka	17.50 Angka	16.30 Angka	23,078,037,143						15.20 Angka	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					2,638,520,000					Masyarakat		-	Dinas Kesehatan	
						Terpenuhi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan					2,638,520,000					Masyarakat		-	Dinas Kesehatan	
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Unit		100 Unit	100 Unit	105,854,000						100 Unit	-	Dinas Kesehatan	
						Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15,000,000						1 Unit	-	Dinas Kesehatan	
						Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	132,278,000						7 Paket	-	Dinas Kesehatan	
						Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	2,314,388,000						7 Paket	-	Dinas Kesehatan	
						Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20,000,000						1 Unit	-	Dinas Kesehatan	
						Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	50,000,000						20 Unit	-	Dinas Kesehatan	
						Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 Unit		7 Unit	7 Unit	1,000,000						7 Unit	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas					20,000,000							-	Dinas Kesehatan	
						Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	1 Unit	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Unit	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas					1,000,000							-	Dinas Kesehatan	
						Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	7 Unit	7 Unit	7 Unit	1,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		7 Unit		-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					50,000,000							-	Dinas Kesehatan	
						Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	20 Unit	20 Unit	20 Unit	50,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		20 Unit	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					15,000,000							-	Dinas Kesehatan	
						Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	15,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Unit	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan					105,854,000							-	Dinas Kesehatan	
						Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	100 Unit	100 Unit	100 Unit	105,854,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		100 Unit	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan					2,314,388,000							-	Dinas Kesehatan	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	2,314,388,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		7 Paket	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						132,278,000							-	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	132,278,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		7 Paket	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rukukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						20,422,317,143					Masyarakat		-	Dinas Kesehatan
						Terperluhinya Layanan Kesehatan untuk Perorangan dan Masyarakat						20,422,317,143					Masyarakat		-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33619 Orang		29041 Orang	30493 Orang	164,400,000						32018 Orang	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19878 Orang		17171 Orang	18030 Orang	80,000,000						18931 Orang	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4627 Orang		3997 Orang	4197 Orang	286,790,000						4407 Orang	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	4,548,935,799						7 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	251,600,000						0 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	2,000,000						3 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	10,000,000						100 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1,459,034,000						10 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lungkungan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	710,230,000						10 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	102,660,000						10 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	123,700,000						10 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	185,495,000						0 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	432,600,000						2 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	10,059,512,936						7 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4860 Orang		4198 Orang	4408 Orang	15,000,000						4628 Orang	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5090 Orang		4397 Orang	4617 Orang	296,087,500						4848 Orang	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4920 Orang		8183 Orang	5620 Orang	10,000,000						5420 Orang	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1746 Orang		3972 Orang	2235 Orang	840,372,500						2026 Orang	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	596 Orang		523 Orang	448 Orang	102,600,000						493 Orang	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6076 Orang		5298 Orang	4566 Orang	15,000,000						5022 Orang	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55805 Orang		48561 Orang	41837 Orang	35,000,000						46120 Orang	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19387 Orang		16747 Orang	17584 Orang	15,000,000						18464 Orang	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	159858 Orang		138091 Orang	144996 Orang	20,000,000						152245 Orang	-	Dinas Kesehatan
							Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	80 Orang		50 Orang	60 Orang	20,000,000						66 Orang	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						296,087,500							-	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5090 Orang		4397 Orang	4033 Orang	296,087,500	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		4848 Orang	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						15,000,000							-	Dinas Kesehatan
						Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4860 Orang		4198 Orang	3983 Orang	15,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		4628 Orang	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0003	Pencelaaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						286,790,000							-	Dinas Kesehatan



(1)	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN		PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL						DAERAH
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
					Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	4627 Orang		3997 Orang	3750 Orang	286,790,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		4407 Orang	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita					80,000,000							-	Dinas Kesehatan	
					Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19878 Orang		17171 Orang	17947 Orang	80,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		18931 Orang	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					164,400,000							-	Dinas Kesehatan	
					Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33619 Orang		29041 Orang	31049 Orang	164,400,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		32018 Orang	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					20,000,000							-	Dinas Kesehatan	
					Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	159858 Orang		138091 Orang	143119 Orang	20,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		152245 Orang	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					15,000,000							-	Dinas Kesehatan	
					Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19387 Orang		16747 Orang	21021 Orang	15,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		18464 Orang	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					35,000,000							-	Dinas Kesehatan	
					Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	55805 Orang		48561 Orang	48561 Orang	35,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		46120 Orang	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus					15,000,000							-	Dinas Kesehatan	
					Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6076 Orang		5298 Orang	5298 Orang	15,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		5022 Orang	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat					102,600,000							-	Dinas Kesehatan	
					Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	596 Orang		523 Orang	523 Orang	102,600,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		493 Orang	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					840,372,500							-	Dinas Kesehatan	
					Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1746 Orang		3972 Orang	3972 Orang	840,372,500	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		2026 Orang	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					10,000,000							-	Dinas Kesehatan	
					Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4920 Orang		8183 Orang	8183 Orang	10,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		5420 Orang	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)					2,000,000							-	Dinas Kesehatan	
					Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	2,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		3 Dokumen	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana					10,000,000							-	Dinas Kesehatan	
					Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	10,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		100 Dokumen	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1,459,034,000							-	Dinas Kesehatan	
					Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1,459,034,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		10 Dokumen	-	Dinas Kesehatan	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	710,230,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		10 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	102,660,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		10 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	123,700,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		10 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	80 Orang		50 Orang	50 Orang	20,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		66 Orang	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	4,548,935,799	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		7 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	10,059,512,936	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		7 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	432,600,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		2 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	185,495,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		0 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	251,600,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		0 Dokumen	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		150 Paket		44,045,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0054	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	10 Laporan	5,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	100 Orang	36,120,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	5 Laporan	191,117,204	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Puskesmas DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.02	0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						360,017,204							-	Dinas Kesehatan



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	-	-	5 Laporan	360,017,204	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	-	-	Dinas Kesehatan		
	1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						112,200,000					Puskesmas dan Jaringannya		-	Dinas Kesehatan	
						Tersedianya Faskes yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						112,200,000					Puskesmas dan Jaringannya		-	Dinas Kesehatan	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	112,200,000						7 Dokumen		-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						112,200,000							-	Dinas Kesehatan	
						Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	112,200,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	7 Dokumen		-	Dinas Kesehatan	
	1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10,000,000					Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan		-	Dinas Kesehatan	
						Terbitnya Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang sesuai standar						10,000,000					Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan		-	Dinas Kesehatan	
							Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10,000,000						10 Unit		-	Dinas Kesehatan
	1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya						10,000,000							-	Dinas Kesehatan	
						Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	10 Unit		-	Dinas Kesehatan	
						Terpenuhinya Layanan Kesehatan untuk Perorangan dan Masyarakat						20,422,317,143					Masyarakat		-	Dinas Kesehatan	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	-	-	-	191,117,204						-	-	Dinas Kesehatan	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	-	-	-	360,017,204						-	-	Dinas Kesehatan	
							Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	36,120,000						-	-	Dinas Kesehatan	
							Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-	-	-	-	44,045,000						-	-	Dinas Kesehatan	
							Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-	-	-	-	5,000,000						-	-	Dinas Kesehatan	
15.	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						549,165,000							-	Dinas Kesehatan	
						Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan						549,165,000							-	Dinas Kesehatan	
							999.Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang memiliki SIP	98.44 %		78.46 %	81.77 %	549,165,000						85.58 %		-	Dinas Kesehatan
							999.Persentase nakes di fasyankes pemerintah yang mengajukan DUPAK tepat waktu	100 %		100 %	100 %	549,165,000						100 %		-	Dinas Kesehatan
							999.Persentase nakes (dokter, drg, bidan, perawat) di fasyankes yang dilakukan kredensialing	63.14 %		52.68 %	54.91 %	549,165,000						57.47 %		-	Dinas Kesehatan
							999.Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	87.19 %		77.05 %	78.89 %	549,165,000						81.02 %		-	Dinas Kesehatan
	1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota						5,000,000					Tenaga Kesehatan		-	Dinas Kesehatan	
						Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehan di Fasilitas Kesehatan						5,000,000					Tenaga Kesehatan		-	Dinas Kesehatan	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000						1 Dokumen		-	Dinas Kesehatan
	1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan						5,000,000							-	Dinas Kesehatan	
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	1 Dokumen		-	Dinas Kesehatan	
	1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota						138,437,000					Puskesmas dan Jaringannya		-	Dinas Kesehatan	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota						138,437,000					Puskesmas dan Jaringannya		-	Dinas Kesehatan	
							Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	138,437,000						1 Dokumen		-	Dinas Kesehatan
	1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						138,437,000							-	Dinas Kesehatan	
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	138,437,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	1 Dokumen		-	Dinas Kesehatan	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
	1	02	03	2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						405,728,000			Tenaga Kesehatan		-	Dinas Kesehatan		
					Terlaksananya Peserta Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						405,728,000			Tenaga Kesehatan		-	Dinas Kesehatan		
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	40 Orang		40 Orang	40 Orang	405,728,000				40 Orang	-	Dinas Kesehatan		
	1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					405,728,000					-	Dinas Kesehatan		
					Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	40 Orang		40 Orang	40 Orang	405,728,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	40 Orang	-	Dinas Kesehatan	
16.	1	02	04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						550,409,000					-	Dinas Kesehatan		
					Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman						550,409,000					-	Dinas Kesehatan		
						999.Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 %		100 %	100 %	550,409,000				100 %	-	Dinas Kesehatan		
	1	02	04	2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						71,079,000			Pemilik Usaha		-	Dinas Kesehatan		
					Terbitnya Izin Apotek dan Toko Obat Sesuai Standar						71,079,000			Pemilik Usaha		-	Dinas Kesehatan		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	71,079,000				1 Dokumen	-	Dinas Kesehatan		
	1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					71,079,000					-	Dinas Kesehatan		
					Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	71,079,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	1 Dokumen	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	04	2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						174,166,000			Pengusaha Makanan Jajanan		-	Dinas Kesehatan		
					Terbitnya Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						174,166,000			Pengusaha Makanan Jajanan		-	Dinas Kesehatan		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	174,166,000				1 Dokumen	-	Dinas Kesehatan		
	1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					174,166,000					-	Dinas Kesehatan		
					Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	174,166,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	1 Dokumen	-	Dinas Kesehatan	
	1	02	04	2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						169,956,000			Pelaku Usaha		-	Dinas Kesehatan		
					Terbitnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						169,956,000			Pelaku Usaha		-	Dinas Kesehatan		
						Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	169,956,000				1 Dokumen	-	Dinas Kesehatan		
	1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)					169,956,000					-	Dinas Kesehatan		
					Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	169,956,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	1 Dokumen	-	Dinas Kesehatan	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
	1	02	04	2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						135,208,000				Sarana Produksi Industri Rumah tangga		-	Dinas Kesehatan		
					Terperuhnya Hasil Pemeriksaan Post Market yang Sesuai Standar						135,208,000				Sarana Produksi Industri Rumah tangga		-	Dinas Kesehatan		
					Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	10 Unit			10 Unit	10 Unit	135,208,000					10 Unit		-	Dinas Kesehatan	
	1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan					135,208,000							-	Dinas Kesehatan	
					Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	135,208,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan nenvandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		10 Unit		-	Dinas Kesehatan
17.	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						226,603,000							-	Dinas Kesehatan	
					Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						221,603,000							-	Dinas Kesehatan	
					1.Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	100 %			78.10 %	83.50 %	221,603,000						87.10 %		-	Dinas Kesehatan
	1	02	05	2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						49,095,000					Masyarakat			-	Dinas Kesehatan
					Terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						49,095,000					Masyarakat			-	Dinas Kesehatan
					Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	49,095,000						1 Dokumen		-	Dinas Kesehatan
	1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat					49,095,000								-	Dinas Kesehatan
					Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49,095,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan nenvandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Dokumen		-	Dinas Kesehatan
	1	02	05	2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe			-	Dinas Kesehatan
					Tercapainya Keluarga yang berperilaku Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						10,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe			-	Dinas Kesehatan
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000						1 Dokumen		-	Dinas Kesehatan
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Keluarga			1 Keluarga	1 Keluarga	5,000,000						1 Keluarga		-	Dinas Kesehatan
	1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					5,000,000								-	Dinas Kesehatan
					Terlaksananya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan nenvandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Dokumen		-	Dinas Kesehatan
	1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					5,000,000								-	Dinas Kesehatan
					Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Keluarga		1 Keluarga	1 Keluarga	5,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan nenvandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Keluarga		-	Dinas Kesehatan
	1	02	05	2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						167,508,000					Masyarakat			-	Dinas Kesehatan
					Tersusunnya Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						167,508,000					Masyarakat			-	Dinas Kesehatan
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	167,508,000						1 Dokumen		-	Dinas Kesehatan
	1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					167,508,000								-	Dinas Kesehatan
					Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	167,508,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan nenvandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Dokumen		-	Dinas Kesehatan
					Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						48,811,852,640							30,603,970,923		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						48,811,852,640							30,603,970,923		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						29,372,729,840							24,394,871,705		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
18.	1	03	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,129,227,900							8,208,299,217		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						5,119,227,900							8,185,146,717		Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							999.Nilai SAKIP OPD	70.55 Angka		67.20 Angka	68.10 Angka	5,119,227,900						68.90 Angka	8,185,146,717	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30,898,800					Aparatur		122,597,273	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah						30,898,800					Aparatur		122,597,273	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen		30,898,800						2 Dokumen	122,597,273	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30,898,800							122,597,273	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		30,898,800	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2 Dokumen	122,597,273	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,372,631,000					Aparatur		6,490,090,790	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Terpenuhinya Administrasi Keuangan Dinas PUPR						4,372,631,000					Aparatur		6,490,090,790	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1400 Orang/bulan		1400 Orang/bulan	1400 Orang/bulan	1400	4,372,631,000						1400 Orang/bulan	6,490,090,790	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4,372,631,000							6,490,090,790	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1400 Orang/bulan	1400 Orang/bulan	1400 Orang/bulan	1400	4,372,631,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1400 Orang/bulan	6,490,090,790	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						118,000,000					Aparatur		231,525,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						118,000,000					Aparatur		231,525,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan		56 Laporan	56 Laporan	56	100,000,000						56 Laporan	150,491,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	800 Paket		800 Paket	800 Paket	800	5,000,000						800 Paket	23,152,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	5	3,000,000						5 Paket	17,364,375	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1	10,000,000						1 Paket	40,516,875	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10,000,000							40,516,875	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Paket	40,516,875	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5,000,000							23,152,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	800 Paket	800 Paket	800 Paket	800	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		800 Paket	23,152,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						3,000,000							17,364,375	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5	3,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		5 Paket	17,364,375	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100,000,000							150,491,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	56 Laporan	56 Laporan	56	100,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		56 Laporan	150,491,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah						502,215,600					Aparatur		874,680,891	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Terpenuhinya Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah						502,215,600					Aparatur		874,680,891	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan		96 Laporan	96 Laporan	96	288,720,000						96 Laporan	416,745,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	9	212,495,600						9 Laporan	455,620,641	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	100	1,000,000						100 Laporan	2,315,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1,000,000							2,315,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan	100 Laporan	100	1,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		100 Laporan	2,315,250	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						288,720,000							416,745,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	96 Laporan		96 Laporan	96 Laporan	288,720,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		96 Laporan	416,745,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					212,495,600							455,620,641	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	212,495,600	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		9 Laporan	455,620,641	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					105,482,500					Aparatur		489,405,263	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
					Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						105,482,500					Aparatur		489,405,263	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	5,000,000							2 Unit	308,700,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	76,800,000							5 Unit	119,003,850	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	18,682,500							1 Unit	38,548,913	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	9 Unit	5,000,000							9 Unit	23,152,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					18,682,500								38,548,913	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	18,682,500	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Unit	38,548,913	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					76,800,000								119,003,850	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	76,800,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		5 Unit	119,003,850	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					5,000,000								308,700,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	5,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2 Unit	308,700,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5,000,000								23,152,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit		9 Unit	9 Unit	5,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		9 Unit	23,152,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
19.	1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					400,000,000							400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi					200,000,000							200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomeditas	50.00 %		30.00 %	35.00 %	200,000,000							40.00 %	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						999.Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	31.53 %		11.53 %	16.53 %	200,000,000							21.53 %	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					400,000,000					Masyarakat		400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi					400,000,000					Masyarakat		400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.3 KM		0 KM	0.3 KM	200,000,000							0.3 KM	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.3 KM		0 KM	0.3 KM	200,000,000							0.3 KM	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan					200,000,000								200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	0.3 KM		0 KM	0.3 KM	200,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		0.3 KM	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan					200,000,000								200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Terelaksasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	0.3 KM		0 KM	0.3 KM	200,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		0.3 KM	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
20.	1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1,330,339,043							3,020,010,321	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum						1,330,339,043							3,020,010,321	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						999.Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas Kabupaten/ Kota	4.97 %		4.83 %	4.90 %	1,330,339,043						4.92 %	3,020,010,321	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	03	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota						1,330,339,043					Masyarakat		3,020,010,321	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Terkelola dan Berkembang nya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						1,330,339,043					Masyarakat		3,020,010,321	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	24 Unit		16 Unit	18 Unit	1,259,386,411						18 Unit	1,322,355,733	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	51.66 Liter/Dirik		4250 Liter/Dirik	44.63 Liter/Dirik	70,952,632						46.86 Liter/Dirik	1,697,654,588	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan					1,259,386,411							1,322,355,733	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	24 Unit		16 Unit	18 Unit	1,259,386,411	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		18 Unit	1,322,355,733	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan					70,952,632							1,697,654,588	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	51.66 Liter/Dirik		4250 Liter/Dirik	44.63 Liter/Dirik	70,952,632	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		46.86 Liter/Dirik	1,697,654,588	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
21.	1	03	05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						599,000,000							370,440,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah						599,000,000							370,440,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						999.Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menemati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	1.26 %		0.20 %	0.77 %	599,000,000						1.01 %	370,440,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	05	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota						599,000,000					Masyarakat		370,440,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Terkelola dan Berkembangnya Sistem Air Limbah Domestik						599,000,000					Masyarakat		370,440,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	-	599,000,000						-	370,440,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)					599,000,000							370,440,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-		-	1 Unit	599,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		-	370,440,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
22.	1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						2,197,268,101							696,011,835	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan						2,197,268,101							696,011,835	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						999.Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	78.69 %		76.02 %	76.63 %	2,197,268,101						77.28 %	696,011,835	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	06	2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota						2,197,268,101					Masyarakat		696,011,835	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Terkelola dan Berkembangnya Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai						2,197,268,101					Masyarakat		696,011,835	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan		8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	1,197,268,101						2 Sistem Drainase Perkotaan	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3 Sistem Drainase Perkotaan		2 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	1,000,000,000						2 Sistem Drainase Perkotaan	396,011,835	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan					1,000,000,000							396,011,835	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Tersejahteranya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	3 Sistem Drainase Perkotaan		2 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	1,000,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2 Sistem Drainase Perkotaan	396,011,835	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan					1,197,268,101							300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	5 Sistem Drainase Perkotaan		8 Sistem Drainase Perkotaan	8 Sistem Drainase Perkotaan	1,197,268,101	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2 Sistem Drainase Perkotaan	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
23.	1	03	08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						5,004,000,000							2,034,229,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Meningkatnya kualitas bangunan gedung						5,004,000,000							2,034,229,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						999.Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	86.67 %		66.67 %	71.67 %	5,004,000,000						76.67 %	2,034,229,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	03	08	2.01	Penyeleksiannya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						5,004,000,000					Masyarakat		2,034,229,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Terseleksiannya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung						5,004,000,000					Masyarakat		2,034,229,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	5 Bangunan Gedung		5 Bangunan Gedung	5 Bangunan Gedung	5,004,000,000						5 Bangunan Gedung	2,034,229,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						5,004,000,000							2,034,229,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	5 Bangunan Gedung		5 Bangunan Gedung	2 Bangunan Gedung	5,004,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		5 Bangunan Gedung	2,034,229,600	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
24.	1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						14,562,894,796							9,315,880,732	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman						14,562,894,796							9,315,880,732	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
							999.Tingkat Kemantapanan Jalan	71.54 %		61.54 %	64.54 %	14,562,894,796						66.54 %	9,315,880,732	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota						14,562,894,796				Masyarakat		9,315,880,732	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
						Terseleenggaranya Pelayanan Jalan						14,562,894,796				Masyarakat		9,315,880,732	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		
							Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	632,122,295						1 Dokumen	276,728,798	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	312.61 KM			342.61 KM	342.61 KM	250,000,000						342.61 KM	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	4493 KM			3696 KM	3881 KM	3,355,000,000						4075 KM	1,956,099,670	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.03 KM			2.83 KM	2.87 KM	1,000,000,000						1 KM	1,015,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2.3 KM			2.3 KM	2.3 KM	9,025,772,501						2.3 KM	4,954,913,541	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	1 Meter			1 Meter	1 Meter	300,000,000						1 Meter	513,138,723	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						632,122,295							276,728,798	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	632,122,295	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	276,728,798	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						250,000,000							600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	312.61 KM		342.61 KM	342.610 KM	250,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		342.61 KM	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan						3,355,000,000							1,956,099,670	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	4493 KM		3696 KM	3.881 KM	3,355,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		4075 KM	1,956,099,670	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan						1,000,000,000							1,015,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.03 KM		2.83 KM	2.87 KM	1,000,000,000	Kota Lhokseumawe	DBH Sawit	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 KM	1,015,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	10	2.01	0057	Penggantian Jembatan						300,000,000							513,138,723	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	1 Meter		1 Meter	3 Meter	300,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Meter	513,138,723	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	10	2.01	0059	Bekonstruksi Jalan						9,025,772,501							4,954,913,541	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	2.3 KM		2.3 KM	2.3 KM	9,025,772,501	Kota Lhokseumawe	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2.3 KM	4,954,913,541	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
25.	1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						150,000,000							350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang						150,000,000							350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
							999.Persentase Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan KKPR	73.24 Persentase		62.08 Persentase	65.66 Persentase	150,000,000						68.62 Persentase	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						150,000,000				Masyarakat			350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang						150,000,000				Masyarakat			350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
						Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000						1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
	1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang						150,000,000							350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Tertindakannya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						19,439,122,800							6,209,099,218	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
26.	1	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						350,000,000							20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Meningkatnya Persentase Warga Negara yang Memperoleh Rumah Layak Huni						350,000,000							20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						999.Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	1.25 %		0.25 %	0.50 %	350,000,000						0.75 %	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						999.Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100 %		25.00 %	25.00 %	350,000,000						50.00 %	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	04	02	2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota						350,000,000					Masyarakat		20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Jumlah Dokumen Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi						350,000,000					Masyarakat		20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1 Unit Rumah		1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	350,000,000						1 Unit Rumah	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	04	02	2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						350,000,000							20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	1 Unit Rumah		1 Unit Rumah	1 Unit Rumah	350,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Unit Rumah	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
27.	1	04	03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						604,122,800							2,524,991,227	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Meningkatnya kualitas kawasan permukiman						604,122,800							2,524,991,227	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						999.Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	18.37 %		18.27 %	18.29 %	604,122,800						18.32 %	2,524,991,227	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	04	03	2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						604,122,800					Masyarakat		2,524,991,227	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha						604,122,800					Masyarakat		2,524,991,227	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	25 Unit Rumah		2 Unit Rumah	25 Unit Rumah	204,122,800						25 Unit Rumah	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1.5 Ha		1.5 Ha	1.5 Ha	400,000,000						1.5 Ha	1,524,991,227	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	04	03	2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						204,122,800							1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Tertindakannya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Diperbaiki	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	25 Unit Rumah		2 Unit Rumah	5 Unit Rumah	204,122,800	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		25 Unit Rumah	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	04	03	2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh						400,000,000							1,524,991,227	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Tertindakannya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	1.5 Ha		1.5 Ha	1.5 Ha	400,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1.5 Ha	1,524,991,227	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
28.	1	04	04		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						1,535,000,000							1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan						1,535,000,000							1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						999.Persentase Peningkatan Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh	0.341 %		0.328 %	0.331 %	1,535,000,000						0.334 %	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	04	04	2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota						1,535,000,000					Masyarakat		1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Tertindakannya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh						1,535,000,000					Masyarakat		1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	6 Unit		10 Unit	10 Unit	1,535,000,000						10 Unit	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	04	04	2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						1,535,000,000							1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	6 Unit		10 Unit	15 Unit	1,535,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		10 Unit	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
29.	1	04	05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						16,950,000,000							2,664,107,991	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Meningkatnya pengediaan PSU permukiman						16,950,000,000							2,664,107,991	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						999.Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum)	68.48 %		65.73 %	66.41 %	16,950,000,000						67.09 %	2,664,107,991	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	04	05	2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						16,950,000,000					Masyarakat		2,664,107,991	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Terselenggara nya PSU Perumahan						16,950,000,000					Masyarakat		2,664,107,991	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
						Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	4 Lokasi		4 Lokasi	4 Lokasi	16,950,000,000						4 Lokasi	2,664,107,991	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	1	04	05	2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						16,950,000,000							2,664,107,991	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
					Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	4 Lokasi		4 Lokasi	4 Lokasi	16,950,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Otonomi Khusus-Ach-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agoramitim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		4 Lokasi	2,664,107,991	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
					Badan Penanggulangan Bencana Daerah						3,651,879,500							12,130,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,651,879,500							12,130,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						3,651,879,500							12,130,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30.	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,511,798,750							9,615,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						3,501,798,750							9,290,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						999 Nilai SAKIP OPD	63.80 Angka		62.50 Angka	62.80 Angka	3,501,798,750						63.10 Angka	9,290,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10,000,000						BPBD Kota Lhokseumawe	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10,000,000						BPBD Kota Lhokseumawe	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	10,000,000							20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					10,000,000							20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antartumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		5 Dokumen	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,590,857,000						BPBD Kota Lhokseumawe	7,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Tertaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,590,857,000						BPBD Kota Lhokseumawe	7,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490 Orang/bulan		490 Orang/bulan	490 Orang/bulan	490 Orang/bulan	2,590,857,000							7,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2,590,857,000							7,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	490 Orang/bulan		490 Orang/bulan	250 Orang/bulan	2,590,857,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antartumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		490 Orang/bulan	7,000,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						331,000						BPBD Kota Lhokseumawe	7,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Tertaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah						331,000						BPBD Kota Lhokseumawe	7,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	331,000							7,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					331,000							7,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	331,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antartumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	7,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5,750,000						BPBD Kota Lhokseumawe	120,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Tertaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5,750,000						BPBD Kota Lhokseumawe	120,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		1 Paket	3 Paket	3 Paket	750,000							100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		1 Orang	4 Orang	4 Orang	5,000,000							20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					750,000							100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket		1 Paket	1 Paket	750,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antartumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		3 Paket	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					5,000,000							20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		1 Orang	2 Orang	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antartumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		4 Orang	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						257,559,750						BPBD Kota Lhokseumawe	625,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Tertaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						257,559,750						BPBD Kota Lhokseumawe	625,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000							150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3 Paket	181,000,000							400,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengendalian yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2 Paket	5,000,000							20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		0 Paket	3 Paket	3 Paket	2,291,000							15,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	3 Paket	15,200,000							20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		1 Paket	3 Paket	3 Paket	4,068,750							20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					2,291,000							15,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		0 Paket	1 Paket	2,291,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyeselaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		3 Paket	15,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15,200,000							20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	15,200,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyeselaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		3 Paket	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4,068,750							20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket		1 Paket	1 Paket	4,068,750	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyeselaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		3 Paket	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						181,000,000							400,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	181,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyeselaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		3 Paket	400,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5,000,000							20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyeselaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2 Paket	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50,000,000							150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tertelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	20 Laporan	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyeselaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Laporan	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						14,630,000					BPBD Kota Lhokseumawe		270,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						14,630,000					BPBD Kota Lhokseumawe		270,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		2 Unit		0 Unit	2 Unit	5,000,000						2 Unit	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit		2 Unit	5 Unit	3,745,000						5 Unit	85,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		10 Unit		3 Unit	10 Unit	5,885,000						10 Unit	85,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						5,000,000							100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	1 Unit	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyeselaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2 Unit	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3,745,000							85,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		2 Unit	1 Unit	3,745,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyeselaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		5 Unit	85,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5,885,000							85,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		3 Unit	10 Unit	5,885,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyeselaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		10 Unit	85,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						297,321,000					BPBD Kota Lhokseumawe		942,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						297,321,000					BPBD Kota Lhokseumawe		942,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	130,000,000						2 Laporan	140,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	166,656,000						4 Laporan	800,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	665,000						1 Laporan	2,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						665,000							2,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tertelaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	665,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyeselaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Laporan	2,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						130,000,000							140,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	130,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyeselaraan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2 Laporan	140,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						166,656,000							800,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	166,656,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyiilarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		4 Laporan	800,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						335,350,000				BPBD Kota Lhokseumawe		630,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						335,350,000				BPBD Kota Lhokseumawe		630,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	32,000,000						3 Unit	80,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	263,670,000						15 Unit	450,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	33,680,000						1 Unit	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	5,310,000						3 Unit	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit		0 Unit	25 Unit	690,000						25 Unit	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					33,680,000							40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	33,680,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyiilarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Unit	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					263,670,000							450,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	10 Unit	263,670,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyiilarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		15 Unit	450,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					32,000,000							80,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	32,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyiilarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		3 Unit	80,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					5,310,000							40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	5 Unit	5,310,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyiilarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		3 Unit	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					690,000							20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit		0 Unit	10 Unit	690,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyiilarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		25 Unit	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31.	1	05	03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						125,944,000							1,795,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan						99,944,000							1,095,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						999.Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100 %		100 %	100 %	99,944,000						100 %	1,095,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						999.Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 %		100 %	100 %	99,944,000						100 %	1,095,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						999.Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %		100 %	100 %	99,944,000						100 %	1,095,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						2,000,000				Masyarakat Kota Lhokseumawe			100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Terlaksananya Layanan Informasi Rawan Bencana Kota						2,000,000				Masyarakat Kota Lhokseumawe			100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1000 Orang		65 Orang	1000 Orang	2,000,000						1000 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)					2,000,000							100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	1000 Orang		65 Orang	50 Orang	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyiilarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1000 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						107,944,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		1,190,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Terlaksananya Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						107,944,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		1,190,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000						1 Dokumen	500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan		1 Kawasan	4 Kawasan	700,000						4 Kawasan	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga		10 Keluarga	50 Keluarga	31,911,200						50 Keluarga	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan		1 laporan	1 laporan	2,000,000						1 laporan	60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	10 Unit		20 Unit	10 Unit	2,000,000						10 Unit	80,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Jumlah personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50 Orang		15 Orang	50 Orang	65,332,800						50 Orang	60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	200 Orang		0 Orang	200 Orang	2,000,000						200 Orang	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	-	2,000,000						-	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	0015		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	10 Unit		20 Unit	10 Unit	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		10 Unit	80,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	0018		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	200 Orang		0 Orang	100 Orang	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		200 Orang	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	0019		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga		10 Keluarga	20 Keluarga	31,911,200	Kota Lhokseumawe	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		50 Keluarga	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	0020		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan		1 Kawasan	1 Kawasan	700,000	Kota Lhokseumawe	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		4 Kawasan	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	0021		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personel Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	50 Orang		15 Orang	25 Orang	65,332,800	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		50 Orang	60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	0022		Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	500,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	0026		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	1 laporan		1 laporan	1 laporan	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 laporan	60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	0030		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	-	2,000,000						-	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-	-	-	25 Orang	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan	-	-	40,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						6,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Terlaksananya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						6,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	40 Orang		0 Orang	100 Orang	2,000,000							25 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang		100 Orang	500 Orang	2,000,000							325 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang		15 Orang	100 Orang	2,000,000							100 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					2,000,000							100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	100 Orang		15 Orang	50 Orang	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		100 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota					2,000,000							100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	40 Orang		0 Orang	10 Orang	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		25 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					2,000,000							100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500 Orang		100 Orang	70 Orang	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		325 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						10,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		205,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Tertatanya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						10,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		205,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JTUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50 Orang		20 Orang	50 Orang	2,000,000						25 Orang	80,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000							1 Dokumen	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000							1 Dokumen	15,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000							1 Dokumen	60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,000,000							1 Kegiatan	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					2,000,000							15,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	15,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan					2,000,000							50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota					2,000,000							80,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
					Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JTUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JTUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	50 Orang		20 Orang	30 Orang	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		25 Orang	80,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota					2,000,000							-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengkajian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Kegiatan	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						2,000,000							60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	60,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
32.	1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						14,136,750							720,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran						4,136,750							570,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							999 Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %		100 %	100 %	4,136,750						100 %	570,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							999 Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100 %		100 %	100 %	4,136,750						100 %	570,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						8,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kabupaten/kota						8,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		300,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1 Orang		1 Orang	1 Orang	2,000,000						1 Orang	125,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	25 Keluarga		0 Keluarga	50 Keluarga	2,000,000						50 Keluarga	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2,000,000						1 Laporan	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2,000,000						2 Unit	120,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						2,000,000							25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Laporan	25,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						2,000,000							125,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	1 Orang		1 Orang	8 Orang	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Orang	125,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						2,000,000							120,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2 Unit	120,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga						2,000,000							30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	25 Keluarga		0 Keluarga	20 Keluarga	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		50 Keluarga	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						2,000,000					Kota Lhokseumawe		20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran di instansi pemerintahan dan Non Pemerintahan						2,000,000					Kota Lhokseumawe		20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaitan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000							1 Dokumen	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						2,000,000							20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaitan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	20,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
	1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						2,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
						Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran						2,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
							Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	2 Desa/Kelurahan		0 Desa/Kelurahan	5 Desa/Kelurahan	2,000,000							5 Desa/Kelurahan	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
															NASIONAL	DAERAH																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran						2,000,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	05	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						5,000,000							5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						548,375,000							848,375,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	350 Paket		350 Paket	350 Paket	548,375,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		350 Paket	848,375,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						5,000,000							10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Tertaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Dokumen	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						5,000,000							5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Tertaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Dokumen	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						5,000,000							27,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang		17 Orang	17 Orang	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		17 Orang	27,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						20,000,000							23,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Tertaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	55 Orang		55 Orang	55 Orang	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		55 Orang	23,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						105,640,000					Aparatur dan personel Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe		197,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Tertaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						105,640,000					Aparatur dan personel Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe		197,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen			12 Dokumen	12 Dokumen	1,140,000						12 Dokumen	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan			30 Laporan	30 Laporan	50,000,000						30 Laporan	120,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket			500 Paket	500 Paket	9,500,000						500 Paket	9,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	2 Paket	10,000,000						2 Paket	28,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket			0 Paket	1 Paket	5,000,000						1 Paket	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket			50 Paket	50 Paket	30,000,000						50 Paket	33,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						5,000,000							5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Paket	5,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30,000,000							33,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	30,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		50 Paket	33,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9,500,000							9,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	500 Paket		500 Paket	500 Paket	9,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		500 Paket	9,500,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10,000,000							28,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Paket	28,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,140,000							2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1,140,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Dokumen	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50,000,000							120,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Laporan	120,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						408,685,933					Aparatur dan personel Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe		437,685,933	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Tertaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						408,685,933					Aparatur dan personel Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe		437,685,933	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	1 Unit	216,685,933						1 Unit	216,685,933	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit			1 Unit	1 Unit	51,000,000						1 Unit	51,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	141,000,000						3 Unit	170,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	51,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	51,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	216,685,933	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	216,685,933	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	141,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Unit	170,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						818,017,600					Aparatur dan personel Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe		1,117,579,778	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						818,017,600					Aparatur dan personel Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe		1,117,579,778	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	122,500,000							12 Laporan	135,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	692,517,600							12 Laporan	979,579,778	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3,000,000							12 Laporan	3,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	3,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	122,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	135,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	692,517,600	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	979,579,778	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						313,200,000					Aparatur dan personel Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe		336,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						313,200,000					Aparatur dan personel Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe		336,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	35,000,000							5 Unit	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	154,200,000							5 Unit	170,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	33,000,000							1 Unit	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	91,000,000							2 Unit	91,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	33,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	40,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	154,200,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Unit	170,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	2 Unit	35,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Unit	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	16 Unit	91,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Unit	91,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
34.	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						955,787,292							665,017,921	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada						842,787,292							1,263,911,083	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						999.Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	17.35 %		17.28 %	17.30 %	842,787,292							17.33 %	1,263,911,083	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						999.Persentase Penyeleenggaraan Tahunanmas	100 %		90.00 %	100 %	842,787,292							100 %	1,263,911,083	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							999.Persentase Perda dan Perkada yang Ditingkatkan	97.30 %		95.77 %	98.59 %	842,787,292						97.22 %	1,263,911,083	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
							999.Persentase PPNs yang Ditingkatkan Kompetensinya	100.00 %		50.00 %	55.56 %	842,787,292						67.00 %	1,263,911,083	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	02	2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							594,342,000					Masyarakat Dalam Kota Lhokseumawe		1,000,893,162	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
					Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							594,342,000					Masyarakat Dalam Kota Lhokseumawe		1,000,893,162	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	54 Orang		54 Orang	54 Orang		5,000,000						54 Orang	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapabilitas	15 Orang		15 Orang	15 Orang		5,000,000						15 Orang	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	30 Dokumen		0 Dokumen	30 Dokumen		5,000,000						30 Dokumen	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		30,000,000						1 Dokumen	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		5,000,000						1 Dokumen	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	8 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen		5,000,000						8 Dokumen	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen		5,000,000						12 Dokumen	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		5,000,000						1 Laporan	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan		12 laporan	12 laporan		499,342,000						12 laporan	350,893,162	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Pengakuan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Pengakuan Perda dan Perkada yang Terlayani	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan		5,000,000						30 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	7 Orang		0 Orang	7 Orang		5,000,000						7 Orang	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	30 Unit		30 Unit	30 Unit		5,000,000						30 Unit	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	534 Orang		0 Orang	534 Orang		5,000,000						534 Orang	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen		5,000,000						1 Dokumen	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
						Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	-		-	-		5,000,000						-	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	02	2.01	0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota							30,000,000							20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
					Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiran, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiran, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		30,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	02	2.01	0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiran dan Ketertiban Umum							5,000,000							150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
					Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiran dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertiran dan Ketertiban Umum	12 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen		5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Dokumen	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	02	2.01	0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitiran dalam Teknik Pencegahan dan Penanganagan Gangguan Ketertiran dan Ketertiban Umum							5,000,000							50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
					Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitiran dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitiranandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	30 Dokumen		0 Dokumen	30 Dokumen		5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Dokumen	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	02	2.01	0008 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat							5,000,000							10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
					Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	8 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen		5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		8 Dokumen	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
	1	05	02	2.01	0011 Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP							5,000,000							15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Melakukan Penilaian terhadap kinerja Pejabat Fungsional	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	1	05	02	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan						5,000,000							30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
						meningkatkan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	7 Orang		0 Orang	7 Orang	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		7 Orang	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	1	05	02	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat						5,000,000							150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
						Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	534 Orang		0 Orang	534 Orang	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		534 Orang	150,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas						5,000,000							30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
						Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	54 Orang		54 Orang	54 Orang	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		54 Orang	30,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan						499,342,000							350,893,162	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
						Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	499,342,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 laporan	350,893,162	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						5,000,000							20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
						Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah						5,000,000							50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
						Tersedia Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Tersedia	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Keterlibatan Umum						5,000,000							50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
						Tersedia Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang Tersedia	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Keterlibatan Umum yang Tersedia	30 Unit		30 Unit	30 Unit	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Unit	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	1	05	02	2.01	0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota						5,000,000							50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
						Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	1	05	02	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja						5,000,000							15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
						Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	15 Orang		15 Orang	15 Orang	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		15 Orang	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	1	05	02	2.01	0026	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional						5,000,000							10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
						Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	-		50 Orang		5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		-	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						54,000,000					Masyarakat Dalam Kota Lhokseumawe		183,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
						Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						54,000,000					Masyarakat Dalam Kota Lhokseumawe		183,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
							Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	50 Dokumen		0 Dokumen	50 Dokumen	2,000,000							50 Dokumen	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	15,000,000							2 Laporan	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan		0 Laporan	6 Laporan	5,000,000							6 Laporan	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan		0 laporan	1 laporan	5,000,000							1 laporan	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGRET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50 Laporan		0 Laporan	50 Laporan	5,000,000						50 Laporan	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	10,000,000						6 Laporan	28,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	5 laporan		0 laporan	5 laporan	2,000,000						5 laporan	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Jumlah Sarana dan Prasarna Penegakan Peraturan Daerah	3 unit		0 unit	3 unit	5,000,000						3 unit	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	5,000,000						-	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					5,000,000							20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1 laporan		0 laporan	1 laporan	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 laporan	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarna Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)					5,000,000							35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Tersedianya Sarana dan Prasarna Penegakan Peraturan Daerah	3 unit		0 unit	3 unit	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 unit	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	02	2.02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					5,000,000							20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	50 Laporan		0 Laporan	50 Laporan	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		50 Laporan	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	02	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah					2,000,000							20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	5 laporan	0 laporan	5 laporan	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 laporan	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	02	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah					2,000,000							20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	50 Dokumen	0 Dokumen	50 Dokumen	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		50 Dokumen	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					5,000,000							15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	6 Laporan	0 Laporan	6 Laporan	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		6 Laporan	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					10,000,000							28,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	6 Laporan	6 Laporan	60 Laporan	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		6 Laporan	28,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					15,000,000							15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	15,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Laporan	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	02	2.02	0014	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					5,000,000							10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	1 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		-	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
	1	05	02	2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						59,400,000					Masyarakat Dalam Kota Lhokseumawe		218,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					59,400,000					Masyarakat Dalam Kota Lhokseumawe		218,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	55,000,000						5 Laporan	175,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2,000,000						6 Dokumen	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab
						Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	2,400,000						5 Laporan	23,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahut Hishab



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF			
															NASIONAL					DAERAH	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	05	02	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		6 Dokumen	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	
						Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah															
	1	05	02	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	55,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel			175,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	
						Tersedianya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah															
	1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						2,400,000							23,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	
						Terkelaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	2,400,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Laporan	23,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	
	1	05	02	7.04		Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Aceh						248,045,292					Masyarakat Dalam Kota Lhokseumawe		665,017,921	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	
						Terkelaksananya Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah Aceh						248,045,292					Masyarakat Dalam Kota Lhokseumawe		665,017,921	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	30 Doumen		30 Doumen	30 Doumen	5,000,000							30 Doumen	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
							Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun dan Ditetapkan	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	2,000,000							6 Dokumen	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayahatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	3,500,000							12 Laporan	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75,000,000							1 Laporan	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayahatul Hisbah Kabupaten/Kota	30 Laporan		0 Laporan	30 Laporan	5,000,000							30 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam, yang Telah Dilakukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5,000,000							1 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	121,545,292							1 Laporan	252,017,921	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	2,000,000							12 Laporan	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampeng dan Mukim	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	5,000,000							30 Laporan	65,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Menanti Qanun Syariat Islam	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20,000,000							1 Laporan	28,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	4,000,000							30 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah
	1	05	02	7.04	0001	Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam						2,000,000							20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	
						Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun dan Ditetapkan	6 Dokumen		0 Dokumen	6 Dokumen	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		6 Dokumen	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	
	1	05	02	7.04	0002	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan						121,545,292							252,017,921	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	
						Terkelaksananya Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	121,545,292	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	252,017,921	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	
	1	05	02	7.04	0003	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Menanti Qanun Syariat Islam						20,000,000							28,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	
						Terkelaksananya Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Menanti Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Menanti Qanun Syariat Islam	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	28,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	
	1	05	02	7.04	0004	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam						4,000,000							50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahatul Hisbah	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Tertelaksananya Penyuhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	4,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	1	05	02	7.04	0005	Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota					5,000,000							50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
					Tertelaksananya Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten/Kota	30 Laporan	0 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	1	05	02	7.04	0006	Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayahul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota					3,500,000							35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
					Tertelaksananya Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayahul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayahul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	3,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	1	05	02	7.04	0007	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku					75,000,000							35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
					Tertelaksananya Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	75,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	1	05	02	7.04	0008	Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam					2,000,000							20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
					Tertelaksananya Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	12 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	20,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	1	05	02	7.04	0009	Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim					5,000,000							65,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
					Tertelaksananya Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Laporan	65,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	1	05	02	7.04	0010	Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi					5,000,000							60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
					Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	30 Doumen	30 Doumen	30 Doumen	30 Doumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Doumen	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
	1	05	02	7.04	0011	Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam					5,000,000							50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
					Tertelaksananya Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam, yang Telah Dilakukan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	50,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	
					Dinas Sosial						3,517,461,880							4,314,000,000	Dinas Sosial	
	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,517,461,880							4,314,000,000	Dinas Sosial	
	1	06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						3,517,461,880							4,314,000,000	Dinas Sosial	
36.	1	06	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,617,461,880							3,784,000,000	Dinas Sosial	
					Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						2,497,461,880							3,669,000,000	Dinas Sosial	
					999 Nilai SAKIP OPD		66.70 Angka		66.45 Angka	66.60 Angka	2,497,461,880							66.65 Angka	3,669,000,000	Dinas Sosial
	1	06	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15,000,000					Dinas Sosial		20,000,000	Dinas Sosial	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah						15,000,000					Dinas Sosial		20,000,000	Dinas Sosial	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen			7 Dokumen	7 Dokumen	15,000,000							7 Dokumen	20,000,000	Dinas Sosial
	1	06	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					15,000,000							20,000,000	Dinas Sosial	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	15,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		7 Dokumen	20,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,116,161,880					Dinas Sosial		3,100,000,000	Dinas Sosial	
					Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai Tepat Waktu						2,116,161,880					Dinas Sosial		3,100,000,000	Dinas Sosial	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan			300 Orang/bulan	300 Orang/bulan	2,116,161,880							300 Orang/bulan	3,100,000,000	Dinas Sosial
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2,116,161,880							3,100,000,000	Dinas Sosial	
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300 Orang/bulan		300 Orang/bulan	50 Orang/bulan	2,116,161,880	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		300 Orang/bulan	3,100,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						93,500,000					Dinas Sosial		135,000,000	Dinas Sosial	
					Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang sesuai Tepat Waktu						93,500,000					Dinas Sosial		135,000,000	Dinas Sosial	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
											NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen		365 Dokumen	365 Dokumen	1,500,000						365 Dokumen	2,000,000	Dinas Sosial	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	50,000,000						30 Laporan	75,000,000	Dinas Sosial	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket		200 Paket	200 Paket	10,000,000						200 Paket	15,000,000	Dinas Sosial	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	35 Paket	10,000,000						35 Paket	15,000,000	Dinas Sosial	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	2,000,000						20 Paket	3,000,000	Dinas Sosial	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket		40 Paket	40 Paket	20,000,000						40 Paket	25,000,000	Dinas Sosial	
1	06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2,000,000							3,000,000	Dinas Sosial	
			Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	5 Paket	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		20 Paket	3,000,000	Dinas Sosial	
1	06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			20,000,000							25,000,000	Dinas Sosial	
			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	40 Paket	15 Paket	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		40 Paket	25,000,000	Dinas Sosial	
1	06	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			10,000,000							15,000,000	Dinas Sosial	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	200 Paket	50 Paket	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		200 Paket	15,000,000	Dinas Sosial	
1	06	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			10,000,000							15,000,000	Dinas Sosial	
			Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	15 Paket	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		35 Paket	15,000,000	Dinas Sosial	
1	06	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			1,500,000							2,000,000	Dinas Sosial	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen	365 Dokumen	360 Dokumen	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		365 Dokumen	2,000,000	Dinas Sosial	
1	06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			50,000,000							75,000,000	Dinas Sosial	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	20 Laporan	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		30 Laporan	75,000,000	Dinas Sosial	
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			70,000,000					Dinas Sosial		110,000,000	Dinas Sosial	
			Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai Tepat Waktu					70,000,000					Dinas Sosial		110,000,000	Dinas Sosial	
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	50,000,000						6 Unit	75,000,000	Dinas Sosial	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	20,000,000						2 Unit	35,000,000	Dinas Sosial	
1	06	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			50,000,000							75,000,000	Dinas Sosial	
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	6 Unit	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		6 Unit	75,000,000	Dinas Sosial	
1	06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			20,000,000							35,000,000	Dinas Sosial	
			Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	5 Unit	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		2 Unit	35,000,000	Dinas Sosial	
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			223,000,000					Dinas Sosial		298,500,000	Dinas Sosial	
			Terselenggaranya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai Tepat Waktu					223,000,000					Dinas Sosial		298,500,000	Dinas Sosial	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	60,000,000						30 Laporan	65,000,000	Dinas Sosial	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	230 Laporan	230 Laporan	230 Laporan	160,000,000						230 Laporan	230,000,000	Dinas Sosial	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	3,000,000						30 Laporan	3,500,000	Dinas Sosial	
1	06	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3,000,000							3,500,000	Dinas Sosial	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan		30 Laporan	20 Laporan	3,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		30 Laporan	3,500,000	Dinas Sosial	
	1	06	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						60,000,000							65,000,000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	30 Laporan		30 Laporan	12 Laporan	60,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		30 Laporan	65,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						160,000,000							230,000,000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	230 Laporan		230 Laporan	24 Laporan	160,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		230 Laporan	230,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						99,800,000					Dinas Sosial		120,500,000	Dinas Sosial	
						Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang selesai Tepat Waktu						99,800,000					Dinas Sosial		120,500,000	Dinas Sosial	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	20,000,000							5 Unit	30,000,000	Dinas Sosial
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	25,200,000							3 Unit	27,500,000	Dinas Sosial
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	34,600,000							1 Unit	38,000,000	Dinas Sosial
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	20,000,000							20 Unit	25,000,000	Dinas Sosial
	1	06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						34,600,000							38,000,000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	34,600,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Unit	38,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25,200,000							27,500,000	Dinas Sosial	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	25,200,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		3 Unit	27,500,000	Dinas Sosial	
	1	06	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20,000,000							25,000,000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	7 Unit	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		20 Unit	25,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						20,000,000							30,000,000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	2 Unit	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		5 Unit	30,000,000	Dinas Sosial	
37.	1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						90,000,000							125,000,000	Dinas Sosial	
						Meningkatnya pemberdayaan sosial						80,000,000							105,000,000	Dinas Sosial	
							999.Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar	80 %		80 %	80 %	80,000,000						80 %	105,000,000	Dinas Sosial	
							999.Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	79.66 %		79.66 %	79.66 %	80,000,000							79.66 %	105,000,000	Dinas Sosial
							999.Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/ AIDS dan NAPZA	79.66 %		79.66 %	79.66 %	80,000,000							79.66 %	105,000,000	Dinas Sosial
							999.Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	59.32 %		59.32 %	59.32 %	80,000,000							59.32 %	105,000,000	Dinas Sosial
	1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						90,000,000					Masyarakat		125,000,000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Dukungan Terhadap Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Penanganan Kemiskinan						90,000,000					Masyarakat		125,000,000	Dinas Sosial	
							Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga		50 Keluarga	50 Keluarga	20,000,000							50 Keluarga	40,000,000	Dinas Sosial



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
											NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga		5 Lembaga	5 Lembaga	35,000,000						5 Lembaga	20,000,000	Dinas Sosial	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	15,000,000						50 Orang	30,000,000	Dinas Sosial	
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	30 Orang		30 Orang	30 Orang	10,000,000						30 Orang	15,000,000	Dinas Sosial	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	10,000,000						10 Orang	20,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		20,000,000							40,000,000	Dinas Sosial	
			Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Keluarga		50 Keluarga	10 Keluarga	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	50 Keluarga	40,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		35,000,000							20,000,000	Dinas Sosial	
			Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Lembaga		5 Lembaga	1 Lembaga	35,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	5 Lembaga	20,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	02	2.03	0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)		10,000,000							20,000,000	Dinas Sosial	
			Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	10 Orang	20,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota		15,000,000							30,000,000	Dinas Sosial	
			Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang		50 Orang	10 Orang	15,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	50 Orang	30,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	02	2.03	0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi		10,000,000							15,000,000	Dinas Sosial	
			Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	30 Orang		30 Orang	10 Orang	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	30 Orang	15,000,000	Dinas Sosial	
38.	1	06	04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			680,000,000							285,000,000	Dinas Sosial	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial					565,000,000							75,000,000	Dinas Sosial	
					999.Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	80 %		80 %	80 %		565,000,000				80 %	75,000,000	Dinas Sosial
					999.Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	60 %		60 %	60 %		565,000,000				60 %	75,000,000	Dinas Sosial
					999.Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	80 %		80 %	80 %		565,000,000				80 %	75,000,000	Dinas Sosial
					999.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	80 %		80 %	80 %		565,000,000				80 %	75,000,000	Dinas Sosial
					999.Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	80 %		80 %	80 %		565,000,000				80 %	75,000,000	Dinas Sosial
	1	06	04	2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			665,000,000					Masyarakat		260,000,000	Dinas Sosial	
					Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			665,000,000					Masyarakat		260,000,000	Dinas Sosial	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang		20,000,000				10 Orang	30,000,000	Dinas Sosial
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang		20 Orang	20 Orang		520,000,000				20 Orang	30,000,000	Dinas Sosial
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang		10,000,000				10 Orang	20,000,000	Dinas Sosial
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pemeliharaan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		15 Orang	15 Orang		20,000,000				15 Orang	30,000,000	Dinas Sosial
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang		20,000,000				100 Orang	30,000,000	Dinas Sosial



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	20,000,000						100 Orang	30,000,000	Dinas Sosial	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	15,000,000						10 Orang	30,000,000	Dinas Sosial	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	20,000,000						50 Orang	30,000,000	Dinas Sosial	
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang	50 Orang	20,000,000						50 Orang	30,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Makanan		20,000,000							30,000,000	Dinas Sosial	
			Terpenuhinya Kebutuhan Makanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penuhian Kebutuhan Makanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	20 Orang	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		100 Orang	30,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang		20,000,000							30,000,000	Dinas Sosial	
			Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	20 Orang	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		100 Orang	30,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu		520,000,000							30,000,000	Dinas Sosial	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	20 Orang	100 Orang	520,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		20 Orang	30,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial		20,000,000							30,000,000	Dinas Sosial	
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	40 Orang	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		50 Orang	30,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat		20,000,000							30,000,000	Dinas Sosial	
			Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	50 Orang	40 Orang	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		50 Orang	30,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan		10,000,000							20,000,000	Dinas Sosial	
			Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		10 Orang	20,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Pencelusuran Keluarga		20,000,000							30,000,000	Dinas Sosial	
			Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pencelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Pencelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	15 Orang	10 Orang	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		15 Orang	30,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan		20,000,000							30,000,000	Dinas Sosial	
			Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		10 Orang	30,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	04	2.01	0014	Facilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota		15,000,000							30,000,000	Dinas Sosial	
			Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10 Orang	10 Orang	15,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		10 Orang	30,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	04	2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		15,000,000							Masyarakat	25,000,000	Dinas Sosial	
			Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Kepada PMKS lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				15,000,000							Masyarakat	25,000,000	Dinas Sosial	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
															NASIONAL		DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang		50 Orang	15,000,000					50 Orang	25,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA							15,000,000						25,000,000	Dinas Sosial	
							Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang		50 Orang		40 Orang	15,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	50 Orang	25,000,000	Dinas Sosial	
39.	1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							90,000,000						60,000,000	Dinas Sosial	
						Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial							90,000,000						30,000,000	Dinas Sosial	
							999.Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	79.41 %		79.41 %		79.41 %	90,000,000					79.41 %	30,000,000	Dinas Sosial	
							999.Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Terpadu dari Kemiskinan	3.18 %		3.18 %		3.18 %	90,000,000					3.18 %	30,000,000	Dinas Sosial	
							999.Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi	50 %		50 %		50 %	90,000,000					50 %	30,000,000	Dinas Sosial	
							999.Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	50 %		50 %		50 %	90,000,000					50 %	30,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							90,000,000				Masyarakat		60,000,000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Pendataan dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							90,000,000				Masyarakat		60,000,000	Dinas Sosial	
							Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	93996 Orang		93996 Orang		93996 Orang	20,000,000					93996 Orang	30,000,000	Dinas Sosial	
							Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		30 Orang		30 Orang	10,000,000					30 Orang	-	Dinas Sosial	
							Jumlah Usulan Penindakalayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	28439 Usulan		28439 Usulan		28439 Usulan	60,000,000					28439 Usulan	30,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							20,000,000						30,000,000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	93996 Orang		93996 Orang		10919 Orang	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	93996 Orang	30,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	05	2.02	0006	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga							10,000,000						-	Dinas Sosial	
						Terpernuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		30 Orang		10 Orang	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	30 Orang	-	Dinas Sosial	
	1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							60,000,000						30,000,000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindakalayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	28439 Usulan		28439 Usulan		1000 Usulan	60,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	28439 Usulan	30,000,000	Dinas Sosial	
40.	1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA							20,000,000						30,000,000	Dinas Sosial	
						Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana							20,000,000						30,000,000	Dinas Sosial	
							999.Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %		100 %		100 %	20,000,000						100 %	30,000,000	Dinas Sosial
							999.Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100 %		100 %		100 %	20,000,000						100 %	30,000,000	Dinas Sosial
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota							20,000,000				Masyarakat		30,000,000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pemberdayaan Organisasi dalam Kesiapsiagaan Bencana							20,000,000				Masyarakat		30,000,000	Dinas Sosial	
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		15 Orang		15 Orang	20,000,000						15 Orang	30,000,000	Dinas Sosial
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana							20,000,000						30,000,000	Dinas Sosial	
						Terpernuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		15 Orang		15 Orang	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	15 Orang	30,000,000	Dinas Sosial	
41.	1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN							20,000,000						30,000,000	Dinas Sosial	
						Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan							20,000,000						30,000,000	Dinas Sosial	
							999.Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang dikelola dengan baik	100 %		100 %		100 %	20,000,000						100 %	30,000,000	Dinas Sosial
	1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota							20,000,000				Masyarakat		30,000,000	Dinas Sosial	
						Terlaksananya Pengelolaan dan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan							20,000,000				Masyarakat		30,000,000	Dinas Sosial	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam		1 Makam	1 Makam	20,000,000						1 Makam	30,000,000	Dinas Sosial	
	1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						20,000,000							30,000,000	Dinas Sosial	
						Tertaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam		1 Makam	1 Makam	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Makam	30,000,000	Dinas Sosial	
						Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						4,585,466,036							5,731,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,585,466,036							5,731,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						3,738,429,036							4,842,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
42.	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,248,429,036							4,226,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						3,217,429,036							4,151,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							999.Nilai SAKIP OPD	68.54 Angka		68.50 Angka	68.51 Angka	3,217,429,036							68.52 Angka	4,151,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5,000,000					DP3AP2KB		7,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5,000,000					DP3AP2KB		7,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	5,000,000						7 Dokumen	7,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	08	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5,000,000							7,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		7 Dokumen	7,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,953,003,000					Aparatur DP3AP2KB		3,800,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Tertaksananya Administrasi keuangan						2,953,003,000					Aparatur DP3AP2KB		3,800,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	625 Orang/bulan		610 Orang/bulan	615 Orang/bulan	2,953,003,000							620 Orang/bulan	3,800,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2,953,003,000							3,800,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	625 Orang/bulan		610 Orang/bulan	45 Orang/bulan	2,953,003,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Lancang Garam 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		620 Orang/bulan	3,800,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5,000,000					DP3AP2KB		10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Tertaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5,000,000					DP3AP2KB		10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		7 Orang	9 Orang	5,000,000						12 Orang	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						5,000,000							10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		7 Orang	3 Orang	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		12 Orang	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						51,000,000					DP3AP2KB		138,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						51,000,000					DP3AP2KB		138,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000						2 Dokumen	2,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		30 Laporan	33 Laporan	35,000,000						35 Laporan	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5,000,000						2 Paket	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5,000,000						2 Paket	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	5,000,000						3 Paket	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5,000,000							10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	5,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Lancang Garam 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		3 Paket	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5,000,000							10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Lancang Garam 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		2 Paket	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5,000,000							10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Lancang Garam 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		2 Paket	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,000,000							2,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Lancang Garam 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		2 Dokumen	2,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						35,000,000							100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		30 Laporan	20 Laporan	35,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Lancang Garam 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		35 Laporan	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						18,766,036					DP3AP2KB		25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						18,766,036					DP3AP2KB		25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		7 Unit	7 Unit	18,766,036						8 Unit	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	01	2.07	0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						18,766,036							25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		7 Unit	1 Unit	18,766,036	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Lancang Garam 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		8 Unit	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						125,660,000					DP3AP2KB		121,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						125,660,000					DP3AP2KB		121,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	56,000,000						2 Laporan	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	68,660,000						2 Laporan	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	1,000,000						3 Laporan	1,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	01	2.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1,000,000							1,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	1,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Lancang Garam 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		3 Laporan	1,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	01	2.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						56,000,000							50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	56,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Lancang Garam 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		2 Laporan	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	01	2.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						68,660,000							70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	68,660,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Lancang Garam 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		2 Laporan	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90,000,000					DP3AP2KB		125,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						90,000,000					DP3AP2KB		125,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	1 Unit	10,000,000						1 Unit	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit			4 Unit	4 Unit	50,000,000						4 Unit	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	1 Unit	20,000,000						1 Unit	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit			10 Unit	10 Unit	10,000,000						12 Unit	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20,000,000							25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Lancang Garam 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Unit	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50,000,000							60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	3 Unit	50,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Lancang Garam 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		4 Unit	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						10,000,000							20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Lancang Garam 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Unit	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	08	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10,000,000							20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		10 Unit	5 Unit	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Lancang Garam 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		12 Unit	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
43.	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						7,494,400							16,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan						7,494,400							16,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						999.Persentase Anggaran Responsif Gender(ARG)		3.90 %		3.50 %	3.60 %	7,494,400							3.70 %	16,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						999.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		50.42 %		50.30 %	50.32 %	7,494,400							50.38 %	16,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota						5,000,000					OPD Terkait		6,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Mengintegrasikan PUG dalam kebijakan dan program pemerintah kabupaten/kota.						5,000,000					OPD Terkait		6,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-			-	-	5,000,000						-	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	



(1)	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
	(2)										(8)	(9)	(10)	(11)	PRIORITAS			(14)	(15)		(16)		
															(12)							(13)	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	(10)	SUMBER DANA	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
	2	08	02	2.01	0016	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Kab/Kota						5,000,000								6,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
						Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	-	-	10 Orang	5,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-		6,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota						2,494,400						Lembaga Perempuan			10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Meningkatkan akses perempuan ke sumber daya ekonomi, sosial, dan politik						2,494,400						Lembaga Perempuan			10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-	-	-		2,494,400								-		10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	02	2.02	0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						2,494,400									10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-	-	-	15 Lembaga	2,494,400	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-		10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
44.	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						150,285,100									229,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Menurunkan kekerasan terhadap perempuan						150,285,100									229,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							999.Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %		100 %	100 %	150,285,100								100 %	229,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						19,581,600						Perempuan Korban Kekerasan			55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Meningkatkan perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan.						19,581,600						Perempuan Korban Kekerasan			55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KIP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-	-	-		19,581,600							-		55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	08	03	2.01	0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KIP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						19,581,600									55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KIP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KIP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-	-	-	3 Kegiatan	19,581,600	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter				55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota						105,703,500						Perempuan Korban Kekerasan			141,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Meningkatkan kualitas layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan						105,703,500						Perempuan Korban Kekerasan			141,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota	-	-	-		6,025,000							-		5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesmas, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-	-	-		6,000,000							-		20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
															NASIONAL		DAERAH			
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-	-	-	-	1,800,000						-	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	-	44,928,500						-	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-	-	-	-	22,830,000						-	36,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-	-	-	-	17,950,000						-	28,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-	-	-	-	6,170,000						-	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	03	2.02	0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						44,928,500						-	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	-	25 Orang	44,928,500	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan perempuan disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	03	2.02	0011	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						6,000,000						-	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Kab/Kota	-	-	-	4 Orang	6,000,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan perempuan disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	03	2.02	0012	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						22,830,000						-	36,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-	-	-	20 Orang	22,830,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan perempuan disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	36,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	03	2.02	0013	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						6,025,000						-	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Kab/Kota	-	-	-	3 Orang	6,025,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan perempuan disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	03	2.02	0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						17,950,000						-	28,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-	-	-	40 Orang	17,950,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan perempuan disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	28,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	03	2.02	0016	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						1,800,000						-	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Kab/Kota	-	-	-	6 Orang	1,800,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan perempuan disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	2,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	03	2.02	0017	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						6,170,000						-	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	-	-	-	9 Orang	6,170,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan perempuan disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						25,000,000					Perempuan Korban Kekerasan		33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Meningkatkan kinerja lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan						25,000,000					Perempuan Korban Kekerasan		33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-		25,000,000					-		33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	08	03	2.03	0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						25,000,000							33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Tertelaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	35 Orang	25,000,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
45.	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						35,025,000							6,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak						35,025,000							6,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							999.Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	72.22 %		65.63 %	65.79 %	35,025,000							66.67 %	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						35,025,000					Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga		6,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak						35,025,000					Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga		6,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5 Lembaga		5 Lembaga	5 Lembaga	35,025,000						5 Lembaga	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	08	04	2.02	0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						35,025,000							6,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Tertelaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	5 Lembaga		5 Lembaga	15 Lembaga	35,025,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		5 Lembaga	6,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
46.	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						4,500,000							10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak						4,500,000							10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							999.Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	64.71 %		44.12 %	52.94 %	4,500,000							58.82 %	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						4,500,000					OPD Terkait		10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Menyajikan data gender dan anak yang informatif dan mudah dipahami						4,500,000					OPD Terkait		10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	-	4,500,000					-		10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	08	05	2.01	0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota						4,500,000							10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-	-	-	1 Dokumen	4,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
47.	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						99,974,600							39,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif						89,974,600							32,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							999 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	66.90 Angka		65.95 Angka	66.20 Angka	89,974,600						66.35 Angka	32,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota						79,974,600					Anak Kota Lhokseumawe		14,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha dalam melaksanakan PHA						79,974,600					Anak Kota Lhokseumawe		14,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-	-	-	-	49,974,600						-	7,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	-	-	-	30,000,000						-	7,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	06	2.01	0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						49,974,600							7,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tetelaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-	-	-	40 Lembaga	49,974,600	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	7,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	06	2.01	0009	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota						30,000,000							7,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tetelaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-	-	-	35 Orang	30,000,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	7,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						20,000,000					Anak Kota Lhokseumawe		25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Meningkatkan kualitas layanan peningkatan kualitas hidup anak						20,000,000					Anak Kota Lhokseumawe		25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-	-	-	-	10,000,000						-	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-	-	-	-	10,000,000						-	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	06	2.02	0010	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						10,000,000							10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tetelaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	-	-	-	1 Laporan	10,000,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



No	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF			
															NASIONAL	DAERAH						
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	2	08	06	2.02	0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						10,000,000								15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Tertelaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	1 Lembaga	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
48.	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						192,720,900								315,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak&						192,720,900								291,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							999.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	78.25 Angka		77.90 Angka	78.00 Angka	192,720,900							78.10 Angka	291,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							999.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	80.00 %		71.43 %	73.33 %	192,720,900							79.07 %	291,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota						27,367,400					Anak Korban Kekerasan			79,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak						27,367,400					Anak Korban Kekerasan			79,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	-	27,367,400							-	79,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	08	07	2.01	0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						27,367,400								79,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Tertelaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	3 Kegiatan	27,367,400	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	79,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						108,703,500					Anak Korban Kekerasan			176,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Meningkatkan kualitas layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus						108,703,500					Anak Korban Kekerasan			176,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesmas, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	6,000,000							-	18,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	6,025,000								-	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	3,000,000								-	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	33,928,500								-	37,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	17,950,000								-	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	6,170,000								-	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	11,000,000								-	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-				24,630,000						-	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	07	2.02	0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						33,928,500							37,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-			40 Orang	33,928,500	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	37,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	07	2.02	0017	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						17,950,000							25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-			40 Orang	17,950,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	07	2.02	0018	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						6,000,000							18,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya Tingkat Daerah Kab/Kota	-			4 Orang	6,000,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	18,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	07	2.02	0019	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						3,000,000							5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Kab/Kota	-			10 Orang	3,000,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	5,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	07	2.02	0020	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						6,025,000							12,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	-			7 Orang	6,025,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	07	2.02	0021	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						24,630,000							55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Kab/Kota	-			31 Orang	24,630,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	07	2.02	0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						6,170,000							12,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	-			11 Orang	6,170,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	07	2.02	0023	Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						11,000,000							12,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tersedianya Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Kab/Kota	-			20 Orang	11,000,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						56,650,000					Anak Korban Kekerasan		60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Meningkatkan kualitas layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus						56,650,000					Anak Korban Kekerasan		60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-	-	-	-		56,650,000						-	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	08	07	2.03	0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						56,650,000							60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-	-	25 Lembaga		56,650,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						847,037,000							889,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
49.	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						129,300,000							136,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk						129,300,000							136,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						999.Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15- 19)	5 Angka		7 Angka	6.4 Angka		129,300,000						5.9 Angka	136,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						999.Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	2.25 Angka		2.27 Angka	2.27 Angka		129,300,000						2.26 Angka	136,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						76,800,000					Keluarga Berisiko Stunting		81,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Meningkatkan efektivitas program pengendalian penduduk						76,800,000					Keluarga Berisiko Stunting		81,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		36,000,000						1 Dokumen	38,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB						36,000,000							38,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36,000,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Dokumen	38,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						52,500,000					Keluarga Berisiko Stunting		55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kualitas penduduk yang efektif.						52,500,000					Keluarga Berisiko Stunting		55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-	-	-	-		52,500,000						-	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	02	2.01	0042	Facilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas						52,500,000							55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Terlaksananya Facilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-	-	7 Kelompok		52,500,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Meningkatkan efektivitas program pengendalian penduduk						76,800,000					Keluarga Berisiko Stunting		81,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	-	-	-		40,800,000					-	-	43,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	02	2.02	0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						40,800,000							43,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-	-	-	1 Laporan	40,800,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	43,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
80.	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						255,637,000							293,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)						255,637,000							293,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						999.Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR)	58.20 %		57.10 %	57.20 %		255,637,000						57.50 %	293,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						999.Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Needs)	8.11 %		8.41 %	8.30 %		255,637,000						8.26 %	293,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						100,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		110,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang metode KB yang efektif dan sesuai dengan kearifan budaya lokal.						100,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		110,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		60,000,000						1 Laporan	65,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	25 Organisasi		24 Organisasi	25 Organisasi		40,000,000						25 Organisasi	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana						60,000,000							65,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Laporan	65,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja						40,000,000							45,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	25 Organisasi		24 Organisasi	30 Organisasi	40,000,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		25 Organisasi	45,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						51,000,000					Kader / PLKB		53,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Meningkatkan kualitas layanan KB yang diberikan kepada masyarakat						51,000,000					Kader / PLKB		53,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Kader yang Mengikuti Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	238 Orang		238 Orang	238 Orang		51,000,000						238 Orang	53,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	14	03	2.02	0004	Pengerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						51,000,000								53,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Terlaksananya Pengerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Pengerakkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	238 Orang		238 Orang	50 Orang	51,000,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		238 Orang	53,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						104,637,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		130,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
						Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program KB dan meningkatkan penggunaan metode KB						104,637,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		130,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
							Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3000 Orang		2500 Orang	2700 Orang	67,637,000							3000 Orang	85,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	10,000,000							-	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	27,000,000							-	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						67,637,000								85,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	3000 Orang		2500 Orang	100 Orang	67,637,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		3000 Orang	85,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	14	03	2.03	0029	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						27,000,000								30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tertaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	1 Laporan	27,000,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	2	14	03	2.03	0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						10,000,000								15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tertaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	1 Laporan	10,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
51.	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						462,100,000								460,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)						462,100,000								460,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							999.Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	91.89 %		86.08 %	89.47 %	462,100,000							91.89 %	460,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						13,300,000						-		20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga						13,300,000						-		20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagraha)	-		-	-	13,300,000						-		20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	14	04	2.01	0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagra)						13,300,000							20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tertaksananya Pengelolaan ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagra)	-		-	1 Laporan / Dokumen	13,300,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-BOKB-KB	-	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		-	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						448,800,000					Keluarga Berisiko Stunting		440,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga						448,800,000					Keluarga Berisiko Stunting		440,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	-	244,800,000						-	230,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	4 laporan		4 laporan	4 laporan	204,000,000						4 laporan	210,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	04	2.02	0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						244,800,000							230,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tertaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	482 Keluarga	244,800,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan nenvandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	230,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						204,000,000							210,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Tertaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	4 laporan		4 laporan	1 laporan	204,000,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan nenvandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		4 laporan	210,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2					Dinas Pertanian						2,845,329,280							4,792,356,218	Dinas Pertanian
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,845,329,280							4,792,356,218	Dinas Pertanian
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						2,845,329,280							4,792,356,218	Dinas Pertanian
52.	2	10	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,699,466,280							4,422,356,218	Dinas Pertanian
						Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						2,691,466,280							4,372,743,718	Dinas Pertanian
							999.Nilai SAKIP OPD	63.11 Angka		61.86 Angka	62.17 Angka	2,691,466,280						62.48 Angka	4,372,743,718	Dinas Pertanian
	2	10	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,500,000					Sekretariat dan Bidang di Dinas Pertanian		31,000,000	Dinas Pertanian
						Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah						1,500,000					Sekretariat dan Bidang di Dinas Pertanian		31,000,000	Dinas Pertanian
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1,500,000						2 Dokumen	31,000,000	Dinas Pertanian
	2	10	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1,500,000							31,000,000	Dinas Pertanian
						Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2 Dokumen	31,000,000	Dinas Pertanian
	2	10	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,519,596,000					ASN di Dinas Pertanian		3,766,655,368	Dinas Pertanian
						Tertaksananya Administrasi Keuangan Pada Dinas Pertanian						2,519,596,000					ASN di Dinas Pertanian		3,766,655,368	Dinas Pertanian
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan		420 Orang/bulan	420 Orang/bulan	2,519,596,000						420 Orang/bulan	3,766,655,368	Dinas Pertanian
	2	10	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2,519,596,000							3,766,655,368	Dinas Pertanian
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan		420 Orang/bulan	490 Orang/bulan	2,519,596,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		420 Orang/bulan	3,766,655,368	Dinas Pertanian
	2	10	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						43,640,000					ASN di Dinas Pertanian		183,169,350	Dinas Pertanian
						Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						43,640,000					ASN di Dinas Pertanian		183,169,350	Dinas Pertanian
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen		365 Dokumen	365 Dokumen	1,140,000						365 Dokumen	1,256,850	Dinas Pertanian
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan		32 Laporan	32 Laporan	35,000,000						32 Laporan	110,250,000	Dinas Pertanian
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	665 Paket		665 Paket	665 Paket	2,500,000						665 Paket	22,050,000	Dinas Pertanian
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengendalian yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	2,500,000						9 Paket	22,050,000	Dinas Pertanian
							Jumlah Paket Penilaian dan Perengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	2,500,000						30 Paket	27,562,500	Dinas Pertanian



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH			(15)		(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
	2	10	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket				2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan			27,562,500	Dinas Pertanian	
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30 Paket	10 Paket	2,500,000	30 Paket					27,562,500	Dinas Pertanian			
	2	10	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	665 Paket				2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan			22,050,000	Dinas Pertanian	
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor				665 Paket	100 Paket	2,500,000	665 Paket					22,050,000	Dinas Pertanian			
	2	10	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket				2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan			22,050,000	Dinas Pertanian	
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				9 Paket	10 Paket	2,500,000	9 Paket					22,050,000	Dinas Pertanian			
	2	10	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen				1,140,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan			1,256,850	Dinas Pertanian	
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				365 Dokumen	365 Dokumen	1,140,000	365 Dokumen					1,256,850	Dinas Pertanian			
	2	10	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32 Laporan				35,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan			110,250,000	Dinas Pertanian	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				32 Laporan	10 Laporan	35,000,000	32 Laporan					110,250,000	Dinas Pertanian			
	2	10	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,500,000					ASN di Dinas Pertanian		77,175,000	Dinas Pertanian	
					Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1,500,000							77,175,000	Dinas Pertanian		
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	5 Unit	1,500,000						5 Unit	77,175,000	Dinas Pertanian		
	2	10	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit				1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan			77,175,000	Dinas Pertanian	
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5 Unit	1 Unit	1,500,000	5 Unit					77,175,000	Dinas Pertanian			
	2	10	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						106,230,280					ASN di Dinas Pertanian		195,563,750	Dinas Pertanian	
						Tersedianya Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						106,230,280					ASN di Dinas Pertanian		195,563,750	Dinas Pertanian	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	48,400,000						24 Laporan	75,213,750	Dinas Pertanian		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	57,330,280						2 Laporan	118,045,000	Dinas Pertanian		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	500,000						100 Laporan	2,305,000	Dinas Pertanian		
	2	10	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan			2,305,000	Dinas Pertanian	
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan	100 Laporan	35 Laporan	500,000	100 Laporan	2,305,000					Dinas Pertanian				
	2	10	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						48,400,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan			75,213,750	Dinas Pertanian	
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	48,400,000	24 Laporan	75,213,750					Dinas Pertanian				
	2	10	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						57,330,280	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan			118,045,000	Dinas Pertanian	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	57,330,280	2 Laporan	118,045,000					Dinas Pertanian				
	2	10	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27,000,000					ASN di Dinas		168,792,750	Dinas Pertanian	
					Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						27,000,000						ASN di Dinas		168,792,750	Dinas Pertanian	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5,000,000							1 Unit	55,125,000	Dinas Pertanian	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibavarkan Pajak dan Perizinasnya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1,500,000							2 Unit	49,392,000	Dinas Pertanian	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibavarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17,500,000							1 Unit	36,713,250	Dinas Pertanian	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL				DAERAH	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	3,000,000					8 Unit	27,562,500	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						17,500,000						36,713,250	Dinas Pertanahan	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan	1 Unit	36,713,250	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1,500,000						49,392,000	Dinas Pertanahan	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan	2 Unit	49,392,000	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5,000,000						55,125,000	Dinas Pertanahan	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan	1 Unit	55,125,000	Dinas Pertanahan	
	2	10	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3,000,000						27,562,500	Dinas Pertanahan	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	10 Unit	3,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan	8 Unit	27,562,500	Dinas Pertanahan	
53.	2	10	12			PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH						70,003,000						90,000,000	Dinas Pertanahan	
						Meningkatnya kejelasan hak- hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat miskin						70,003,000						90,000,000	Dinas Pertanahan	
							999.Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Pengusaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	4.73 Angka		3.89 Angka	4.08 Angka	70,003,000					4.29 Angka	90,000,000	Dinas Pertanahan	
	2	10	12	7.01		Facilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah						70,003,000				Dinas Terkait di Pemerintah Kota Lhokseumawe		90,000,000	Dinas Pertanahan	
						Tersedianya Data Aset Tanah Pemerintah						70,003,000				Dinas Terkait di Pemerintah Kota Lhokseumawe		90,000,000	Dinas Pertanahan	
							Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70,003,000					1 Laporan	90,000,000	Dinas Pertanahan	
	2	10	12	7.01	0001	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah						70,003,000						90,000,000	Dinas Pertanahan	
						Terinventarisasinya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70,003,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan	1 Laporan	90,000,000	Dinas Pertanahan	
54.	2	10	15			PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU						20,000,000						60,000,000	Dinas Pertanahan	
						Meningkatnya tata kelola pertanahan di wilayah pesisir, laut dan pulau						20,000,000						60,000,000	Dinas Pertanahan	
							999.Persentase Pertanahan di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau yang Tertata	63.81 %		61.25 %	61.74 %	20,000,000					62.33 %	60,000,000	Dinas Pertanahan	
	2	10	15	7.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil						20,000,000				Masyarakat		60,000,000	Dinas Pertanahan	
						Terlaksananya Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil						20,000,000				Masyarakat		60,000,000	Dinas Pertanahan	
							Jumlah Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di Wilayah Pesisir	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000						60,000,000	Dinas Pertanahan	
	2	10	15	7.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir						20,000,000						60,000,000	Dinas Pertanahan	
						Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir	Jumlah Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di Wilayah Pesisir	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan	1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pertanahan	
55.	2	10	16			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN						15,860,000						60,000,000	Dinas Pertanahan	
						Meningkatnya tata kelola sistem informasi manajemen pertanahan						15,860,000						60,000,000	Dinas Pertanahan	
							999.Persentase Informasi Pertanahan yang Dimanfaatkan	0 %		0 %	0 %	15,860,000						0 %	60,000,000	Dinas Pertanahan
	2	10	16	7.01		Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)						15,860,000				Masyarakat		60,000,000	Dinas Pertanahan	
						Tersedianya data Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)						15,860,000				Masyarakat		60,000,000	Dinas Pertanahan	
							Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15,860,000						60,000,000	Dinas Pertanahan	
	2	10	16	7.01	0001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)						15,860,000						60,000,000	Dinas Pertanahan	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Tertelaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15,860,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	60,000,000	Dinas Pertanahan
56.	2	10	17		PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN						40,000,000							160,000,000	Dinas Pertanahan
					Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa, dan perkara pertanahan						20,000,000							160,000,000	Dinas Pertanahan
						999.Persentase Penyelesaian Konflik, Sengketa, dan Perkara Peranahan	66.67 %		60 %	60 %	20,000,000						60 %	160,000,000	Dinas Pertanahan
	2	10	17	7.01	Facilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan						40,000,000					Masyarakat		160,000,000	Dinas Pertanahan
					Tertelaksananya Facilitasi Penyelesaian Konflik - konflik Pertanahan						40,000,000					Masyarakat		160,000,000	Dinas Pertanahan
						Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara		5 Berita Acara	5 Berita Acara	20,000,000						5 Berita Acara	60,000,000	Dinas Pertanahan
						Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000						1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pertanahan
	2	10	17	7.01	0001 Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						20,000,000							100,000,000	Dinas Pertanahan
					Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pertanahan
	2	10	17	7.01	0004 Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota						20,000,000							60,000,000	Dinas Pertanahan
					Tertelaksananya Penyelesaian Sengketa dan Konflik, Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Berita Acam Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Berita Acara		5 Berita Acara	1 Berita Acara	20,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		5 Berita Acam	60,000,000	Dinas Pertanahan
					Dinas Lingkungan Hidup						42,087,147,162							29,084,208,467	Dinas Lingkungan Hidup
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERTAKUT DENGAN PELAYANAN DASAR						42,087,147,162							29,084,208,467	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						42,087,147,162							29,084,208,467	Dinas Lingkungan Hidup
57.	2	11	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						37,771,972,242							27,244,208,467	Dinas Lingkungan Hidup
					Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						37,771,972,242							27,169,208,467	Dinas Lingkungan Hidup
						999.Nilai SAKIP OPD	63.80 Angka		63.10 Angka	63.30 Angka	37,771,972,242						63.40 Angka	27,169,208,467	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Ewaliasi Kinerja Perangkat Daerah						3,018,000					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3,018,000					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	3,018,000						15 Dokumen	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						3,018,000							70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	6 Dokumen	3,018,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		15 Dokumen	70,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,925,748,000					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Tersedianya Gaji dan Tunjanga ASN dan PPPK						2,925,748,000					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		4,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/bulan		450 Orang/bulan	450 Orang/bulan	2,925,748,000						450 Orang/bulan	4,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2,925,748,000							4,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	450 Orang/bulan		450 Orang/bulan	910 Orang/bulan	2,925,748,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		450 Orang/bulan	4,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,311,614,530					Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat		2,938,900,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1,311,614,530					Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat		2,938,900,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	104,000,000						100 Laporan	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	1,160,000,000						100 Paket	1,244,450,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	11,411,000						100 Paket	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		80 Paket	100 Paket	36,203,530						100 Paket	1,504,450,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						36,203,530							1,504,450,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Paket		80 Paket	20 Paket	36,203,530	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		100 Paket	1,504,450,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1,160,000,000							1,244,450,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	3850 Paket	1,160,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		100 Paket	1,244,450,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan						11,411,000							40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	200 Paket	11,411,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyiilarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		100 Paket	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					104,000,000							150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	10 Laporan	104,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyiilarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		100 Laporan	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					573,463,200					-		100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Jumlah terpeliharanya kendaraan Dinas Operasional						573,463,200							100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	573,463,200						4 Unit	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel					573,463,200							100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	30 Unit	573,463,200	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Tumpok Teungoh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		4 Unit	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					28,118,122,512					Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17,525,308,467	Dinas Lingkungan Hidup	
					Tersedianya Pembayaran Tagihan Listrik						28,118,122,512					Jumlah Dokumen Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17,525,308,467	Dinas Lingkungan Hidup	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	19,055,520,012					100 Laporan	16,769,308,467	Dinas Lingkungan Hidup	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	9,058,599,200					100 Laporan	750,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	4,003,300					100 Laporan	6,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
	2	11	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4,003,300					6,000,000		Dinas Lingkungan Hidup	
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100 Laporan		100 Laporan	150 Laporan	4,003,300	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyiilarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		100 Laporan	6,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					19,055,520,012						16,769,308,467	Dinas Lingkungan Hidup	
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	19,055,520,012	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyiilarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		100 Laporan	16,769,308,467	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					9,058,599,200						750,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100 Laporan		100 Laporan	12 Laporan	9,058,599,200	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyiilarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		100 Laporan	750,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					4,840,006,000					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2,610,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
					terpeliharanya kendaraan dinas Jabatan dan terpeliharanya kendaraan operasional lapangan						4,840,006,000					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2,610,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		100 Unit	100 Unit	30,350,000						100 Unit	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	3,397,856,000						40 Unit	2,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	32,100,000						1 Unit	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	1,379,700,000						6 Unit	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					32,100,000						40,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	32,100,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyiilarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Unit	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					3,397,856,000						2,500,000,000		Dinas Lingkungan Hidup
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	35 Unit	3,397,856,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyiilarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		40 Unit	2,500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					30,350,000							35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit		100 Unit	2 Unit	30,350,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyiilarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		100 Unit	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1,379,700,000							35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Terselenggaranya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	1 Unit	1,379,700,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		6 Unit	35,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
58.	2	11	03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						168,220,004							80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Menurunkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						168,220,004							60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						999 Indeks Kualitas Udara	93.00 Indeks		92.93 Indeks	92.95 Indeks	168,220,004						92.97 Indeks	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						999 Indeks Kualitas Air	72.00 Indeks		71.20 Indeks	71.45 Indeks	168,220,004						71.60 Indeks	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						131,594,404					Jumlah dokumen Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan		50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Jumlah Dokumentasi Lingkungan Hidup						131,594,404					Jumlah dokumen Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan		50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000						1 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen	31,594,404						3 Dokumen	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	2.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						31,594,404							20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3 Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen	31,594,404	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		3 Dokumen	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	2.01	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						100,000,000							30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						36,625,600					Jumlah dokumen Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan		30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi lingkungan hidup						36,625,600					Jumlah dokumen Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan		30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terbentunya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	10,475,600						2 Dokumen	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	2 Kegiatan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	11,150,000						2 Kegiatan	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	15,000,000						2 Kegiatan	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran						10,475,600							10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	10,475,600	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2 Dokumen	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota						11,150,000							10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	11,150,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2 Kegiatan	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	03	2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi						15,000,000							10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Kegiatan			2 Kegiatan	2 Kegiatan	15,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2 Kegiatan	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
59.	2	11	04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						3,053,832,400							160,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati						3,053,832,400							80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						999.Persentase RTH	27.10 %		24.46 %	26.00 %	3,053,832,400						25.99 %	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	04	2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota						3,053,832,400					Jumlah dokumen pengelolaan keanekaragaman hayati		160,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Tersedianya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						3,053,832,400					Jumlah dokumen pengelolaan keanekaragaman hayati		160,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Ha			2 Ha	2 Ha	1,793,897,800						2 Ha	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit			1 Unit	1 Unit	1,259,934,600						Unit	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	04	2.01	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						1,793,897,800							80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Ha		2 Ha	2 Ha	1,793,897,800	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2 Ha	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	04	2.01	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya						1,259,934,600							80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1,259,934,600	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		Unit	80,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
60.	2	11	06		PROGRAM PEMINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						60,000,000						20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
					Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan lingkungan yang diterbitkan						60,000,000						20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
						999.Ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	60.00 %		43.00 %	48.00 %	60,000,000						53.00 %	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	06	2.01	Peminaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						60,000,000							20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Tersedianya Dokumen Rekomendasi						60,000,000							20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Rekomendasi dan /atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	60,000,000						Dokumen	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	06	2.01	0001 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						60,000,000							20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		Dokumen	20,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
61.	2	11	11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						1,033,122,516							1,580,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Meningkatnya tata kelola persampahan						1,033,122,516							1,460,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						999.Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	58 Angka		51 Angka	53 Angka	1,033,122,516						56 Angka	1,460,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.01	Pengelolaan Sampah						954,250,316					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kab/kota yang disusun dan ditetapkan		1,540,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Tertangani Pengolahan Timbunan Sampah						954,250,316					Jumlah dokumen kebijakan dan strategi pengelolaan sampah kab/kota yang disusun dan ditetapkan		1,540,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	22,252,400						2 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	68 Kelompok		68 Kelompok	68 Kelompok	9,843,700						68 Kelompok	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2000 Ton		Ton	2000 Ton	13,600,000						2000 Ton	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	653,005,000						10 Unit	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit		5 Unit	5 Unit	255,549,216						5 Unit	770,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.01	0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						9,843,700							120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	68 Kelompok		68 Kelompok	20 Kelompok	9,843,700	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		68 Kelompok	120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.01	0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan						22,252,400							30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	22,252,400	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2 Dokumen	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.01	0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						255,549,216							770,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	5 Unit		5 Unit	1 Unit	255,549,216	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		5 Unit	770,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.01	0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional						13,600,000							120,000,000	Dinas Lingkungan Hidup



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2000 Ton		Ton	2 Ton	13.600,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2000 Ton	120.000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.01	0028	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah					653,005,000							500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	10 Unit		10 Unit	1 Unit	653,005,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		10 Unit	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta					78,872,200							40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan oleh Pihak Swasta						78,872,200					Jumlah laporan fasilitasi pemenuhan ketentuan terkait izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah		40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	78,872,200						1 Laporan	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
	2	11	11	2.03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah					78,872,200							40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	78,872,200	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Laporan	40,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						3,025,301,200							5,852,630,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,025,301,200							5,852,630,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						3,025,301,200							5,852,630,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
62.	2	12	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,485,301,200							4,957,900,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						2,468,801,200							4,797,900,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						999.Nilai SAKIP OPD	65.60 Angka		64.00 Angka	64.40 Angka	2,468,801,200						64.80 Angka	4,797,900,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1,500,000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe		25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1,500,000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe		25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	1,500,000						7 Dokumen	25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1,500,000							25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	1,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		7 Dokumen	25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,104,702,000					Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe		3,559,400,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Tersedianya Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,104,702,000					Aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe		3,559,400,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/bulan		1260 Orang/bulan	1260 Orang/bulan	2,104,702,000						1260 Orang/bulan	3,559,400,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					2,104,702,000							3,559,400,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/bulan		1260 Orang/bulan	1260 Orang/bulan	2,104,702,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1260 Orang/bulan	3,559,400,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					2,500,000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe		30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2,500,000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe		30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	2,500,000						10 Orang	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					2,500,000							30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	2,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Orang	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					32,500,000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe		378,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						32,500,000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe		378,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		720 Dokumen	720 Dokumen	1,000,000						720 Dokumen	3,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1,500,000						5 Dokumen	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	20,000,000						60 Laporan	180,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	2,500,000						1000 Paket	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengendalian yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	5,000,000						30 Paket	35,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	80 Paket	2,500,000						80 Paket	90,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF				
															NASIONAL	DAERAH							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)							
	2	12	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	80 Paket	2,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		80 Paket	90,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	2	12	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1000 Paket		1000 Paket	1000 Paket	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1000 Paket	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	2	12	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	5,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Paket	35,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	2	12	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		720 Dokumen	720 Dokumen	1,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		720 Dokumen	3,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	2	12	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	20,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		60 Laporan	180,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	2	12	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																	
						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Dokumen	30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe		200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	15 Unit	10,000,000						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe		200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
	2	12	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit		15 Unit	15 Unit	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		15 Unit	200,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
						Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe		505,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	125,600,000						Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe		505,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	148,399,200								10 Laporan	168,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	500,000								6 Laporan	330,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
																				30 Laporan	7,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															7,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Laporan	7,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	2	12	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	125,600,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Laporan	168,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	2	12	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	148,399,200	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		6 Laporan	330,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe		260,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
															NASIONAL		DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	59,600,000					Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe	1 Unit	260,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	32,100,000						4 Unit	70,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17,500,000						1 Unit	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	5,000,000						7 Unit	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						17,500,000							40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	40,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						32,100,000							70,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	3 Unit	32,100,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Unit	70,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5,000,000							90,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	90,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5,000,000							60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	5,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		7 Unit	60,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
63.	2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						80,000,000							296,450,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk						60,000,000							243,210,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
							999.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	60.00 %		47.00 %	51.00 %	60,000,000							55.00 %	243,210,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							999.Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	40.00 %		20.00 %	25.00 %	60,000,000							32.00 %	243,210,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk						20,000,000					Penduduk Permanen, Rentan dan Masyarakat di Wilayah Kota Lhokseumawe yang Memerlukan Layanan Adminduk		93,170,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Tersediannya Dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk						20,000,000					Penduduk Permanen, Rentan dan Masyarakat di Wilayah Kota Lhokseumawe yang Memerlukan Layanan Adminduk		93,170,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3 Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000						3 Dokumen	39,930,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	10,000,000						1 Laporan	53,240,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000		Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Dokumen	39,930,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						10,000,000							53,240,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	53,240,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk						35,000,000						Anak-Anak, Siswa dibawah umur 17 Tahun Kurang 1 Hari	119,790,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Tersediannya Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk						35,000,000						Anak-Anak, Siswa dibawah umur 17 Tahun Kurang 1 Hari	119,790,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000						1 Dokumen	119,790,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan						35,000,000							119,790,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	119,790,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	02	2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						25,000,000					Masyarakat dalam Wilayah Kota Lhokseumawe		83,490,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						25,000,000					Masyarakat dalam Wilayah Kota Lhokseumawe		83,490,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15,000,000						1 Laporan	30,250,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10,000,000						2 Laporan	53,240,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	02	2.03	0001 Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						10,000,000							53,240,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	2 Laporan	53,240,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	02	2.03	0003 Fasilitas Pendaftaran Penduduk						15,000,000							30,250,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	1 Laporan	30,250,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
64.	2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL						110,000,000							153,065,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil						65,000,000							119,790,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						999.Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %		99.80 %	100 %	65,000,000						100 %	119,790,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						999.Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %		100 %	100 %	65,000,000						100 %	119,790,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						999.Persentase Akta Percaian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %		100 %	100 %	65,000,000						100 %	119,790,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						999.Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 %		100 %	100 %	65,000,000						100 %	119,790,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	03	2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						45,000,000					Masyarakat di Wilayah Kota Lhokseumawe yang Memerlukan Layanan Pencapil		86,515,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Tersedianya Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil						45,000,000					Masyarakat di Wilayah Kota Lhokseumawe yang Memerlukan Layanan Pencapil		86,515,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10,000,000						5 Dokumen	46,585,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan		5 Layanan	5 Layanan	35,000,000						5 Layanan	39,930,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	03	2.01	0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						35,000,000							39,930,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan		5 Layanan	5 Layanan	35,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	5 Layanan	39,930,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	03	2.01	0003 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil						10,000,000							46,585,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	5 Dokumen	46,585,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	03	2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						65,000,000					Masyarakat di Wilayah Kota Lhokseumawe		66,550,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Terlaksananya Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						65,000,000					Masyarakat di Wilayah Kota Lhokseumawe		66,550,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10,000,000						1 Laporan	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20,000,000						1 Laporan	33,275,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35,000,000						1 Laporan	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	03	2.02	0002 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota						35,000,000							-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
					Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil					20,000,000							33,275,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	33,275,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	03	2.02	0006	Facilitasi Terkait Pencatatan Sipil					10,000,000							-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
65.	2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					340,000,000							431,905,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan						310,000,000							431,905,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					999.Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan		100 %		100 %	100 %	310,000,000							100 %	431,905,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	04	2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						20,000,000						Penduduk Wajib KTP dan Instansi Pengguna Data Adminduk		30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Tersedianya Laporan Data Kependudukan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan						20,000,000						Penduduk Wajib KTP dan Instansi Pengguna Data Adminduk		30,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000							2 Dokumen	18,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	10,000,000							2 Laporan	12,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan					10,000,000								18,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Dokumen	18,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah					10,000,000								12,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Laporan	12,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	04	2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						310,000,000						Masyarakat dan Instansi Pengguna Data Adminduk		375,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Tersedianya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						310,000,000						Masyarakat dan Instansi Pengguna Data Adminduk		375,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000							2 Dokumen	25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan			5 Laporan	5 Laporan	300,000,000							5 Laporan	350,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	04	2.03	0003	Facilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					300,000,000								350,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	300,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Laporan	350,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan					10,000,000								25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Dokumen	25,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	04	2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						10,000,000						Penduduk dan Instansi Pengguna Data Adminduk		26,905,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						10,000,000						Penduduk dan Instansi Pengguna Data Adminduk		26,905,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	10,000,000							1 Laporan	26,905,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					10,000,000								26,905,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	26,905,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
66.	2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					10,000,000								13,310,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Meningkatnya kualitas profil kependudukan						10,000,000								13,310,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	999.Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 %		100 %	100 %	10,000,000					Penduduk dan Instansi Pengguna Data Profil Kependudukan		13,310,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Tersediannya Profil Kependudukan						10,000,000					Penduduk dan Instansi Pengguna Data Profil Kependudukan		13,310,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000						1 Dokumen	13,310,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	13,310,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
						Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong						2,847,676,080							5,919,576,011	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,847,676,080							5,919,576,011	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						2,847,676,080							5,919,576,011	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
67.	2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,424,976,080							4,351,282,011	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						2,419,976,080							4,206,282,011	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						999.Nilai SAKIP OPD	63.45 Angka			62.80 Angka	62.90 Angka	2,419,976,080						63.15 Angka	4,206,282,011	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,500,000					Pemerintah Kota		15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,500,000					Pemerintah Kota		15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen			15 Dokumen	15 Dokumen	1,500,000						15 Dokumen	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1,500,000							15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		15 Dokumen	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,135,270,000					Pemerintah Kota		3,728,367,931	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Terlaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Serta Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah						2,135,270,000					Pemerintah Kota		3,728,367,931	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	756 Orang/bulan			778 Orang/bulan	760 Orang/bulan	2,135,270,000						756 Orang/bulan	3,728,367,931	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2,135,270,000							3,728,367,931	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	756 Orang/bulan		778 Orang/bulan	854 Orang/bulan	2,135,270,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		756 Orang/bulan	3,728,367,931	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						32,500,000					Pemerintah Kota		145,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Tersediannya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						32,500,000					Pemerintah Kota		145,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan			25 Laporan	25 Laporan	25,000,000						25 Laporan	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	12 Paket	2,500,000							15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	12 Paket	2,500,000							15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			12 Paket	12 Paket	2,500,000							15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2,500,000							15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Paket	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2,500,000							15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Paket	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						2,500,000							15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Paket	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25,000,000							100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	25,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		25 Laporan	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4,400,000					Pemerintah Kota		100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						4,400,000					Pemerintah Kota		100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			3 Unit	3 Unit	4,400,000						3 Unit	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						4,400,000							100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	1 Unit	4,400,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Unit	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						209,566,080					Pemerintah Kota		286,234,080	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						209,566,080					Pemerintah Kota		286,234,080	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	96,000,000						12 Laporan	108,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	113,066,080						12 Laporan	176,034,080	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	500,000						12 Laporan	2,200,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500,000							2,200,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	2,200,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						96,000,000							108,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	96,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	108,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						113,066,080							176,034,080	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	113,066,080	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	176,034,080	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41,740,000					Pemerintah Kota		76,680,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41,740,000					Pemerintah Kota		76,680,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			1 Unit	1 Unit	14,775,000						1 Unit	28,050,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	1 Unit	21,465,000						1 Unit	36,630,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit			10 Unit	22 Unit	5,500,000						22 Unit	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						21,465,000							36,630,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	21,465,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	36,630,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						14,775,000							28,050,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	14,775,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	28,050,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5,500,000							12,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit		10 Unit	22 Unit	5,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		22 Unit	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
68.	2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA						1,000,000							78,650,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Meningkatnya kualitas penataan desa						1,000,000							78,650,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						999.Persentase Fasilitas Penataan Desa	38.24 %			14.71 %	22.06 %	1,000,000						29.41 %	78,650,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa						1,000,000					Pemerintah Desa		78,650,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Terseleenggaranya Penataan Desa						1,000,000					Pemerintah Desa		78,650,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	26 Unit			10 Unit	15 Unit	1,000,000						20 Unit	78,650,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	02	2.01	0006	Fasilitas Sarana dan Prasarana Desa						1,000,000							78,650,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	26 Unit		10 Unit	11 Unit	1,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		20 Unit	78,650,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
69.	2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA						2,000,000							157,860,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Meningkatnya efektivitas kerja sama desa						1,000,000							157,860,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						999.Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	36.76 %			17.65 %	22.06 %	1,000,000						26.47 %	157,860,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	03	2.01		Fasilitas Kerja Sama antar Desa						2,000,000					Pemerintah Desa		157,860,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Terlaksananya Kerjasama Desa						2,000,000					Pemerintah Desa		157,860,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25 Dokumen			12 Dokumen	18 Dokumen	1,000,000						18 Dokumen	114,930,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
						Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	8 Dokumen			0 Dokumen	4 Dokumen	1,000,000						6 Dokumen	42,930,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	03	2.01	0001	Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						1,000,000							114,930,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF				
											NASIONAL	DAERAH							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
			Terlaksananya Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25 Dokumen		5 Dokumen	1,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		18 Dokumen	114,930,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
	2	13	03	2.01	0002	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota		1,000,000							42,930,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
			Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	8 Dokumen	0 Dokumen	10 Dokumen	1,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		6 Dokumen	42,930,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
70.	2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		225,700,000							587,260,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		160,700,000							471,760,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						999.Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya								20.97 %	471,760,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						999.Persentase Fasilitas Tata Kelola Desa	99.75 %		99.55 %	99.60 %				99.65 %	471,760,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
	2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		225,700,000					Pemerintah Desa dan BPD		587,260,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		225,700,000					Pemerintah Desa dan BPD		587,260,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	68 Orang		68 Orang	68 Orang		10,000,000		68 Orang	63,760,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	68 Orang		68 Orang	68 Orang		40,000,000		68 Orang	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 Desa		5 Desa	5 Desa		10,000,000		5 Desa	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		15,000,000		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen		10,000,000		1 Dokumen	16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		10,000,000		1 Dokumen	16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen		75,000,000		5 Dokumen	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen		10,000,000		3 Dokumen	28,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen		5,000,000		1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		10,000,000		1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen		5,000,000		1 Dokumen	16,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		8,000,000		1 Laporan	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan		5,000,000		1 Laporan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan		5,000,000		1 Laporan	16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan		7,700,000		1 Laporan	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
	2	13	04	2.01	0002	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa		5,000,000							15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen		5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	1 Dokumen	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	04	2.01	0003	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		10,000,000							28,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	3 Dokumen	28,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	04	2.01	0004	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa		75,000,000							110,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	75,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	5 Dokumen	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		40,000,000							100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	68 Orang		68 Orang	136 Orang	40,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	68 Orang	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	04	2.01	0006	Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa		5,000,000							10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	1 Laporan	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa		10,000,000							55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	1 Dokumen	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa		7,700,000							27,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Terseleenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7,700,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	1 Laporan	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	04	2.01	0010	Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		8,000,000							27,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			
						Terlaksananya Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	1 Laporan	27,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	04	2.01	0011	Fasilitas Penyusunan Profil Desa		5,000,000							16,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong			



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	16,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13	04	2.01	0012	Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa						10,000,000							16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Terlaksananya Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13	04	2.01	0013	Fasilitas Pengelolaan Aset Desa						10,000,000							16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						10,000,000							63,760,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	68 Orang		68 Orang	68 Orang	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		68 Orang	63,760,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13	04	2.01	0015	Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa						10,000,000							55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Terlaksananya Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	5 Desa		5 Desa	5 Desa	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Desa	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13	04	2.01	0016	Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa						5,000,000							16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Terlaksananya Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13	04	2.01	0018	Fasilitas Binauasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						15,000,000							30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Terlaksananya Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
71.	2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						194,000,000							744,524,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan						169,000,000							695,024,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
							999.Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	100 %		100 %	100 %	169,000,000							100 %	695,024,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
							999.Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	86.27 %		76.47 %	78.92 %	169,000,000							81.37 %	695,024,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						194,000,000					Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa		744,524,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan						194,000,000					Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa		744,524,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000							1 Dokumen	22,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000							1 Dokumen	16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000							1 Dokumen	403,524,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
							Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000							1 Dokumen	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	10,000,000							1 Laporan	16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
							Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemandaitan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	33,000,000							1 Laporan	165,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	20,000,000							1 Lembaga	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
							Jumlah Sarana dan Prasana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit		0 Unit	3 Unit	1,000,000							5 Unit	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong
	2	13	05	2.01	0002	Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						20,000,000								33,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
	2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						20,000,000							33,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	1 Lembaga	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
	2	13	05	2.01	0004	Facilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						1,000,000							55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Terlaksananya Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5 Unit		0 Unit	1 Unit	1,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	5 Unit	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
	2	13	05	2.01	0005	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						5,000,000							22,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	1 Dokumen	22,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
	2	13	05	2.01	0006	Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						33,000,000							165,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	33,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	1 Laporan	165,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
	2	13	05	2.01	0007	Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat						10,000,000							16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	1 Laporan	16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
	2	13	05	2.01	0008	Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Keterserahan dan Perlindungan Masyarakat Desa						5,000,000							16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Terlaksananya Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Keterserahan dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Keterserahan dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	1 Dokumen	16,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
	2	13	05	2.01	0009	Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						100,000,000							403,524,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	
						Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	1 Dokumen	403,524,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong		
	2					Dinas Perhubungan						3,438,917,880							5,735,490,700	Dinas Perhubungan	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,438,917,880							5,735,490,700	Dinas Perhubungan	
	2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						3,438,917,880							5,735,490,700	Dinas Perhubungan	
72.	2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,261,117,880							5,480,490,700	Dinas Perhubungan	
						Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						3,233,117,880							5,470,490,700	Dinas Perhubungan	
							999.Nilai SAKIP OPD	64.11 Angka		62.80 Angka	63.20 Angka	3,233,117,880							63.50 Angka	5,470,490,700	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8,000,000					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		10,000,000	Dinas Perhubungan	
						Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah						8,000,000					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		10,000,000	Dinas Perhubungan	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	8,000,000							10,000,000	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8,000,000							10,000,000	Dinas Perhubungan	
						Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		3 Dokumen	10,000,000	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,422,740,000					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		4,214,890,700	Dinas Perhubungan	
						Tersedianya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,422,740,000					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		4,214,890,700	Dinas Perhubungan	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang/bulan		288 Orang/bulan	288 Orang/bulan	2,422,740,000							288 Orang/bulan	4,214,890,700	Dinas Perhubungan
	2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2,422,740,000							4,214,890,700	Dinas Perhubungan	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang/bulan		288 Orang/bulan	96 Orang/bulan	2,422,740,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		288 Orang/bulan	4,214,890,700	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						90,000,000					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		175,000,000	Dinas Perhubungan	
						Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						90,000,000					Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		175,000,000	Dinas Perhubungan	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	60,000,000							50 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10,000,000							2 Paket	15,000,000	Dinas Perhubungan
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10,000,000							2 Paket	35,000,000	Dinas Perhubungan
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10,000,000							2 Paket	25,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10,000,000								25,000,000	Dinas Perhubungan
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2 Paket	25,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10,000,000								15,000,000	Dinas Perhubungan
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2 Paket	15,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10,000,000								35,000,000	Dinas Perhubungan
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		2 Paket	35,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60,000,000								100,000,000	Dinas Perhubungan
					Tetelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	30 Laporan	60,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		50 Laporan	100,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						342,716,080						Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		437,300,000	Dinas Perhubungan
					Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						342,716,080						Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		437,300,000	Dinas Perhubungan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	107,060,000							12 Laporan	125,000,000	Dinas Perhubungan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	233,656,080							12 Laporan	309,300,000	Dinas Perhubungan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan			Laporan	1 Laporan	2,000,000							1 Laporan	3,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2,000,000								3,000,000	Dinas Perhubungan
					Tetelaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Sumat Menyurat	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Laporan	3,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						107,060,000								125,000,000	Dinas Perhubungan
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	107,060,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		12 Laporan	125,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						233,656,080								309,300,000	Dinas Perhubungan
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	233,656,080	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		12 Laporan	309,300,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						397,661,800						Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		643,300,000	Dinas Perhubungan
					Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah						397,661,800						Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		643,300,000	Dinas Perhubungan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit			15 Unit	15 Unit	356,361,800							15 Unit	600,000,000	Dinas Perhubungan
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	1 Unit	33,300,000							1 Unit	33,300,000	Dinas Perhubungan
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit			10 Unit	40 Unit	8,000,000							40 Unit	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						33,300,000								33,300,000	Dinas Perhubungan
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	33,300,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Unit	33,300,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						356,361,800								600,000,000	Dinas Perhubungan



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH			(15)		(16)
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	356,361,800	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		15 Unit	600,000,000	Dinas Perhubungan	
	2	15	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					8,000,000							10,000,000	Dinas Perhubungan	
					Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		10 Unit	15 Unit	8,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		40 Unit	10,000,000	Dinas Perhubungan	
73.	2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					177,800,000							255,000,000	Dinas Perhubungan	
					Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat						177,800,000							255,000,000	Dinas Perhubungan	
						999.Konektivitas Darat	1.0 Indeks		0.5 Indeks	0.5 Indeks	177,800,000						0.5 Indeks	255,000,000	Dinas Perhubungan	
						999.Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	87.50 %		62.50 %	62.50 %	177,800,000						87.50 %	255,000,000	Dinas Perhubungan	
	2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota					30,000,000					Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Kota Lhokseumawe		30,000,000	Dinas Perhubungan	
					Tersedianya Perlengkapan Jalan Yang Tersedia						30,000,000					Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Kota Lhokseumawe		30,000,000	Dinas Perhubungan	
						Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	30,000,000						1 Unit	30,000,000	Dinas Perhubungan	
	2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan					30,000,000							30,000,000	Dinas Perhubungan	
					Tertaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1 Unit		1 Unit	15 Unit	30,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Unit	30,000,000	Dinas Perhubungan	
	2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan					147,800,000					Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Kota Lhokseumawe		225,000,000	Dinas Perhubungan	
					Tertaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						147,800,000					Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur Kota Lhokseumawe		225,000,000	Dinas Perhubungan	
						Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	147,800,000						1 Laporan	225,000,000	Dinas Perhubungan	
	2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum					147,800,000							225,000,000	Dinas Perhubungan	
					Tertaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	147,800,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agomartim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Memantapkan Penataan Kota yang Terintegrasi melalui Infrastruktur dan Lingkungan yang Berkelanjutan		1 Laporan	225,000,000	Dinas Perhubungan	
					Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian						4,928,674,917							4,372,767,908	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4,928,674,917							4,372,767,908	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						4,894,674,917							4,327,767,908	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
74.	2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,060,699,917							3,117,657,908	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
					Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						2,050,699,917							3,067,657,908	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						999.Nilai SAKIP OPD	63.40 Angka		62.60 Angka	62.80 Angka	2,050,699,917						63.00 Angka	3,067,657,908	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					14,000,000					Perangkat Daerah Diskominfo Kota Lhokseumawe		55,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14,000,000					Perangkat Daerah Diskominfo Kota Lhokseumawe		55,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000						1 Dokumen	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	4,000,000							7 Dokumen	5,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4,000,000							5,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	4,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		7 Dokumen	5,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah					10,000,000							50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
					Tersedianya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,683,113,000					ASN Diskominfo Kota Lhokseumawe		2,585,844,800	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
					Tertaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,683,113,000					ASN Diskominfo Kota Lhokseumawe		2,585,844,800	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan		420 Orang/bulan	420 Orang/bulan	1,683,113,000						420 Orang/bulan	2,585,844,800	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1,683,113,000							2,585,844,800	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan		420 Orang/bulan	420 Orang/bulan	1,683,113,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		420 Orang/bulan	2,585,844,800	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					10,000,000					ASN DISKOMINFO		30,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
					Tertaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						10,000,000					ASN DISKOMINFO		30,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH			(14)		(15)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	10,000,000						5 Orang	30,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10,000,000							30,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Orang	30,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						61,045,437					Perangkat Daerah Diskominfo Kota Lhokseumawe		73,149,980	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah						61,045,437					Perangkat Daerah Diskominfo Kota Lhokseumawe		73,149,980	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	40,000,000						20 Laporan	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9,800,000							1 Paket	10,780,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4,245,437							1 Paket	4,669,980	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7,000,000							2 Paket	7,700,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	2	16	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7,000,000								7,700,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	7,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Paket	7,700,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9,800,000								10,780,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9,800,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Paket	10,780,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4,245,437								4,669,980	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4,245,437	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Paket	4,669,980	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40,000,000								50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	40,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		20 Laporan	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50,000,000					Perangkat Daerah DISKOMINFO		75,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50,000,000					Perangkat Daerah DISKOMINFO		75,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
							Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50,000,000							1 Unit	75,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	2	16	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						50,000,000								75,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
						Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	10 Unit	50,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	75,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						190,241,480					Perangkat Daerah Diskominfo Kota Lhokseumawe		239,508,128	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						190,241,480					Perangkat Daerah Diskominfo Kota Lhokseumawe		239,508,128	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	108,000,000							12 Laporan	120,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	80,041,480							12 Laporan	116,508,128	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2,200,000							1 Laporan	3,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2,200,000								3,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2,200,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	3,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						108,000,000								120,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	108,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	120,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						80,041,480								116,508,128	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	80,041,480	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	116,508,128	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						52,300,000					Perangkat Daerah Diskominfo Kota Lhokseumawe		59,155,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						52,300,000					Perangkat Daerah Diskominfo Kota Lhokseumawe		59,155,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
											NASIONAL	DAERAH			(15)		(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13,750,000						1 Unit	15,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17,800,000						1 Unit	19,580,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		4 Unit	4 Unit	13,250,000						1 Unit	14,575,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		30 Unit	6 Unit	7,500,000						6 Unit	10,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		17,800,000							19,580,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17,800,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	19,580,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		13,750,000							15,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13,750,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	15,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		13,250,000							14,575,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit		4 Unit	2 Unit	13,250,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	14,575,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		7,500,000							10,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6 Unit		30 Unit	1 Unit	7,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		6 Unit	10,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
75.	2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		1,816,000,000							70,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah					1,816,000,000							70,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			999.Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	85.08 %		84.72 %	84.81 %	1,816,000,000						84.90 %	70,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1,816,000,000						Perangkat Daerah dan Masyarakat	70,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			-					1,816,000,000						Perangkat Daerah dan Masyarakat	70,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			Jumlah khlayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	1,800,000,000						-	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	16,000,000						-	20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	02	2.01	0025	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik		16,000,000							20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	-		-	75 %	16,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		-	20,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	02	2.01	0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik		1,800,000,000							50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	-		-	100.000 Orang	1,800,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		-	50,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
76.	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		1,017,975,000							1,140,110,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika					1,017,975,000							1,140,110,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			999.Indeks SPBE	3.30 Indeks		3.10 Indeks	3.15 Indeks	1,017,975,000						3.20 Indeks	1,140,110,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		10,000,000						Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe	15,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			-					10,000,000						Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe	15,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000						2 Dokumen	15,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa		10,000,000							15,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Dokumen	15,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1,007,975,000						Perangkat Daerah dan Masyarakat	1,125,110,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
			-					1,007,975,000						Perangkat Daerah dan Masyarakat	1,125,110,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	7,875,000						1 Dokumen	25,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
							Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	1,000,100,000						-	1,100,110,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas						7,875,000							25,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	7,875,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	25,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	16	03	2.02	0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						1,000,100,000							1,100,110,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	34 Titik	1,000,100,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		-	1,100,110,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
	2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						34,000,000							45,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
77.	2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						34,000,000							45,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah						34,000,000							45,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						999.Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	999.Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1.10 %		1.01 %	1.05 %	34,000,000						1.08 %	45,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						34,000,000					Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		45,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						34,000,000					Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		45,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	-	34,000,000							-	45,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
	2	21	02	2.01	0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						34,000,000							45,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	1 Dokumen	34,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		-	45,000,000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	
						Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja						6,476,174,931							6,604,610,230	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6,476,174,931							6,604,610,230	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						6,394,174,931							5,696,610,230	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
78.	2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5,557,973,920							5,382,610,230	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						5,502,973,920							5,382,610,230	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						999.Nilai SAKIP OPD	999.Nilai SAKIP OPD	69.25 Angka		68.95 Angka	69.05 Angka	5,502,973,920						69.15 Angka	5,382,610,230	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5,000,000					DPMPTSP DAN NAKER		20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan						5,000,000					DPMPTSP DAN NAKER		20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000							5 Dokumen	20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5,000,000							20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.		Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		5 Dokumen	20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,070,508,000					DPMPTSP DAN NAKER		4,472,178,090	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah						5,070,508,000					DPMPTSP DAN NAKER		4,472,178,090	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	696 Orang/bulan		696 Orang/bulan	696 Orang/bulan	5,070,508,000							696 Orang/bulan	4,472,178,090	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5,070,508,000							4,472,178,090	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	696 Orang/bulan		696 Orang/bulan	696 Orang/bulan	5,070,508,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		696 Orang/bulan	4,472,178,090	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						13,000,000					DPMPPTSP DAN NAKER		17,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah						13,000,000					DPMPPTSP DAN NAKER		17,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket		0 Paket	85 Paket		9,000,000						85 Paket	1,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang		5 Orang	6 Orang		4,000,000						7 Orang	16,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					9,000,000							1,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	85 Paket		0 Paket	85 Paket	9,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		85 Paket	1,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					4,000,000							16,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang		5 Orang	6 Orang	4,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		7 Orang	16,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						88,640,000					DPMPPTSP DAN NAKER		216,140,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Meningkatnya efektivitas dan efisiensi Administrasi Umum Perangkat Daerah						88,640,000					DPMPPTSP DAN NAKER		216,140,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		1,140,000						1 Dokumen	1,140,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan		50,000,000						120 Laporan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket		2,500,000						2 Paket	13,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket		10,000,000						5 Paket	35,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket		25,000,000						3 Paket	67,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					25,000,000							67,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	25,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		3 Paket	67,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2,500,000							13,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		2 Paket	13,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					10,000,000							35,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		5 Paket	35,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1,140,000							1,140,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1,140,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Dokumen	1,140,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50,000,000							100,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan		120 Laporan	120 Laporan	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		120 Laporan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20,000,000					DPMPPTSP DAN NAKER		53,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Meningkatnya penggunaan BMD secara efektif dan efisien dalam mendukung urusan pemerintahan						20,000,000					DPMPPTSP DAN NAKER		53,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		0 Unit	10 Unit		20,000,000						10 Unit	53,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					20,000,000							53,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		0 Unit	10 Unit	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		10 Unit	53,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	07	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						258,325,920					DPMPPTSP DAN NAKER		453,992,140	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
					Meningkatnya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						258,325,920					DPMPPTSP DAN NAKER		453,992,140	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
											NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	90,000,000						12 Laporan	211,426,220	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	167,825,920						12 Laporan	241,065,920	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500,000						1 Laporan	1,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		500,000							1,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
			Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Laporan	1,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		90,000,000							211,426,220	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	90,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		12 Laporan	211,426,220	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		167,825,920							241,065,920	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	167,825,920	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		12 Laporan	241,065,920	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		102,500,000					DPMPTSP dan NAKER		150,300,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
			Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					102,500,000					DPMPTSP dan NAKER		150,300,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50,000,000						2 Unit	55,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	30,000,000						2 Unit	51,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17,500,000						1 Unit	34,300,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	5,000,000						20 Unit	10,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		17,500,000							34,300,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	17,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Unit	34,300,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		30,000,000							51,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	30,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		2 Unit	51,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		5,000,000							10,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
			Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20 Unit	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		20 Unit	10,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		50,000,000							55,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		2 Unit	55,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
79.	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		741,201,011							185,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya produktivitas tenaga kerja		741,201,011							185,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						999 Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkatkan Produktivitasnya	88.10 %		86.49 %	87.50 %		741,201,011		87.50 %	185,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		2,153,011					Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya kualitas lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina		2,153,011					Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga		15 Lembaga	18 Lembaga		2,153,011		20 Lembaga	20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		2,153,011							20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	20 Lembaga	15 Lembaga	18 Lembaga		2,153,011	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil	20 Lembaga	20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		739,048,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		165,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya kualitas tenaga kerja berdasarkan kompetensi		739,048,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		165,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	-		739,048,000		-	165,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	2	07	03	2.01	0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						739,048,000							165,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	50 Orang	739,048,000	Kota Lhokseumawe	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Dana Otonomi Khusus- Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe			165,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
80.	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						10,000,000							31,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya penempatan tenaga kerja						5,000,000							31,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
							999.Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	13.36 %		10.03 %	11.11 %	5,000,000						12.74 %	31,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		17,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya penerbitan Izin LPTKS						5,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		17,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
							Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1 Lembaga		5 Lembaga	1 Lembaga	5,000,000						1 Lembaga	17,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS						5,000,000							17,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	1 Lembaga		5 Lembaga	1 Lembaga	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Lembaga	17,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						5,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		14,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						5,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		14,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	500 Orang		425 Orang	450 Orang	5,000,000						475 Orang	14,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						5,000,000							14,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Terseleenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	500 Orang		425 Orang	450 Orang	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		475 Orang	14,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
81.	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						25,000,000							98,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya pekerja yang terlindungi						20,000,000							98,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
							999.Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	450 Orang		200 Orang	300 Orang	20,000,000						400 Orang	98,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		55,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya penerapan PP dan PKB oleh perusahaan						5,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		55,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
							Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5,000,000						1 Laporan	55,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan						5,000,000							55,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Terseleenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Laporan	55,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota						20,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		43,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya pencegahan kasus perselisihan hubungan Industrial						20,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		43,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
							Jumlah Perkara Perselisihan yang diselesaikan	10 Perkara		15 Perkara	15 Perkara	5,000,000							15 Perkara	35,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
							Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara		0 Perkara	4 Perkara	13,000,000							4 Perkara	5,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
							Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	4 Orang		0 Orang	4 Orang	2,000,000							4 Orang	3,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Bertampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						13,000,000							5,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara		0 Perkara	4 Perkara	13,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		4 Perkara	5,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5,000,000							35,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Terselesainya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara		15 Perkara	15 Perkara	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		15 Perkara	35,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						2,000,000							3,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	4 Orang		0 Orang	4 Orang	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		4 Orang	3,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						142,000,000							908,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
82.	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						7,000,000							63,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya kemudahan berinvestasi						7,000,000							63,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
							999.Realisasi Total terhadap Target Investasi	99.17 %		98.08 %	99.06 %	7,000,000							99.09 %	63,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						7,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		63,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya Jumlah Penetapan Kerjasama Kemitraan Dibidang Penanaman Modal						7,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		63,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
							Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	7,000,000							5 Dokumen	63,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						7,000,000							63,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	7,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		5 Dokumen	63,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
83.	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						30,199,700							20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal						30,199,700							10,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
							999.Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	4.20 %		5.00 %	4.80 %	30,199,700							4.50 %	10,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						30,199,700					Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya Jumlah Promosi Penanaman Modal						30,199,700					Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000							6 Dokumen	10,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25,199,700							1 Dokumen	10,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						5,000,000							10,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		6 Dokumen	10,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						25,199,700							10,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Terusunya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25,199,700	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Dokumen	10,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
84.	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						65,000,000							300,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko						25,000,000							225,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
							999.Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	96.76 %		95.32 %	95.79 %	25,000,000							96.17 %	225,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota						65,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		300,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya jumlah pelayanan perizinan kepada pelaku usaha penanaman modal						65,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		300,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	5,000,000							6 Dokumen	75,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH			(12)		(13)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	230 Pelaku Usaha		200 Pelaku Usaha	210 Pelaku Usaha	20,000,000						220 Pelaku Usaha	90,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600 Pelaku Usaha		450 Pelaku Usaha	450 Pelaku Usaha	20,000,000						500 Pelaku Usaha	60,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
							Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	-	20,000,000						-	75,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						5,000,000							75,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		6 Dokumen	75,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						20,000,000							60,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	600 Pelaku Usaha		450 Pelaku Usaha	450 Pelaku Usaha	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		500 Pelaku Usaha	60,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						20,000,000							90,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	230 Pelaku Usaha		200 Pelaku Usaha	210 Pelaku Usaha	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		220 Pelaku Usaha	90,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	18	04	2.01	0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						20,000,000							75,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	-		-	350 Kegiatan Usaha	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		-	75,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
85.	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						34,800,300							500,000,000	Dinas Penanamam Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Terkendalanya pelaksanaan penanaman modal						24,800,300							500,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
							999.Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	91.15 %		92.62 %	92.73 %	24,800,300							90.83 %	500,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						34,800,300					Masyarakat Kota Lhokseumawe		500,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						34,800,300					Masyarakat Kota Lhokseumawe		500,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
							Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	240 Kegiatan Usaha		220 Kegiatan Usaha	240 Kegiatan Usaha	14,800,300							240 Kegiatan Usaha	127,150,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	180 Pelaku Usaha		225 Pelaku Usaha	230 Pelaku Usaha	10,000,000							180 Pelaku Usaha	305,350,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-		-	-	10,000,000							-	67,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						10,000,000							305,350,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	180 Pelaku Usaha		225 Pelaku Usaha	230 Pelaku Usaha	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		180 Pelaku Usaha	305,350,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal						14,800,300								127,150,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
						Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	240 Kegiatan Usaha		220 Kegiatan Usaha	240 Kegiatan Usaha	14,800,300	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		240 Kegiatan Usaha	127,150,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF				
															NASIONAL	DAERAH							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)							
	2	18	05	2.01	0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya						10,000,000									67,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	-	-	60 Kegiatan Usaha		10,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe					67,500,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
86.	2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						5,000,000									25,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal						5,000,000									25,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
							999.Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	40.53 %		40.62 %		5,000,000								40.58 %	25,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota						5,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe				25,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Meningkatnya kemudahan mengakses data dan informasi penanaman modal oleh masyarakat						5,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe				25,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
							Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dokumen		6 Dokumen		5,000,000								6 Dokumen	25,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
	2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						5,000,000									25,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dokumen		6 Dokumen		5,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Bagi Hasil	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe				6 Dokumen	25,000,000	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	
						Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata						3,704,408,240									6,220,827,864	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3,634,408,240									6,000,827,864	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						3,634,408,240									6,000,827,864	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
87.	2	19	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,684,408,240									4,030,827,864	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						2,674,408,240									4,025,327,864	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
							999.Nilai SAKIP OPD	67.2 Angka		65.75 Angka		65.81 Angka	2,674,408,240								66.16 Angka	4,025,327,864	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2	19	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,000,000						Disorapar			50,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2,000,000						Disorapar			50,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		13 Dokumen		2,000,000								10 Dokumen	50,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	2	19	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2,000,000									50,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		13 Dokumen		2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel				10 Dokumen	50,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	2	19	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,441,922,000						Disorapar			3,500,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Disorapar						2,441,922,000						Disorapar			3,500,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan		350 Orang/bulan		350 Orang/bulan	2,441,922,000								350 Orang/bulan	3,500,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2	19	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2,441,922,000									3,500,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan		350 Orang/bulan		47 Orang/bulan	2,441,922,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel				350 Orang/bulan	3,500,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2	19	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						37,500,000						Disorapar			115,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						37,500,000						Disorapar			115,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		15 Laporan		50 Laporan	30,000,000								50 Laporan	66,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket		20 Paket	2,500,000								20 Paket	5,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket		10 Paket	2,500,000								10 Paket	5,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket		25 Paket		25 Paket	2,500,000								35 Paket	38,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2	19	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2,500,000									38,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket		25 Paket		25 Paket	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel				35 Paket	38,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2	19	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2,500,000									5,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket		20 Paket	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel				20 Paket	5,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2	19	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2,500,000									5,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket		10 Paket	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel				10 Paket	5,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
															NASIONAL		DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	2	19	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30,000,000							66,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	30,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		50 Laporan	66,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	2	19	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						161,986,240					Disorapar		264,147,864	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						161,986,240					Disorapar		264,147,864	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63,520,000						12 Laporan	87,340,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	97,966,240						12 Laporan	175,157,864	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan		1 Laporan	15 Laporan	500,000						15 Laporan	1,650,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	2	19	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500,000							1,650,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Tertindakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		15 Laporan	1,650,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	2	19	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						63,520,000							87,340,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63,520,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	87,340,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	2	19	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						97,966,240							175,157,864	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	97,966,240	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	175,157,864	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	2	19	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41,000,000					Disorapar		101,180,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						41,000,000					Disorapar		101,180,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5,000,000						1 Unit	20,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13,500,000						1 Unit	28,050,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17,500,000						1 Unit	36,630,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5,000,000						1 Unit	16,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	2	19	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						17,500,000							36,630,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	36,630,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	2	19	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						13,500,000							28,050,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	28,050,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	2	19	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5,000,000							20,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	20,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	2	19	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5,000,000							16,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	16,500,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
88.	2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						50,000,000							70,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Meningkatnya daya saing kepemudaan						50,000,000							70,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
							999.Rasio Wirusaha Pemuda	11.78 %		11.92 %	11.88 %	50,000,000							11.83 %	70,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirusaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						50,000,000					Pemuda		70,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Tertindakannya Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda Pelopor, Wirusaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kota Lhokseumawe						50,000,000					Pemuda		70,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
							Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-	-	-	-	50,000,000							-	70,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	2	19	02	2.01	0018	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda						50,000,000							70,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Tertindakannya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-	-	-	15 Orang	50,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penguatan disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		-	70,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
89.	2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						900,000,000				1,900,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata			
						Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga						900,000,000				1,900,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata			
						999.Persentase Atlet yang Masuk Pelatid Provinsi	1.00 %		1.00 %	1.00 %		900,000,000				1.00 %	1,900,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
	2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						500,000,000			Atlet/Pelatih/Official		1,300,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
						Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						500,000,000			Atlet/Pelatih/Official		1,300,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
						Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-	-	-	-		500,000,000				-	1,300,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
	2	19	03	2.02	0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga						500,000,000					1,300,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
						Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-	-	200 Orang		500,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penvandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	-	1,300,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						400,000,000				Atlet/Pelatih/Official		600,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						400,000,000				Atlet/Pelatih/Official		600,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-	-	-	-		400,000,000				-	600,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
	2	19	03	2.04	0007	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait						400,000,000					600,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
						Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan lembaga terkait yang terlaksana, termasuk olahraga disabilitas	-	-	1 Kerja Sama		400,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penvandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter	-	600,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						70,000,000					220,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						70,000,000					220,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
90.	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						40,000,000					170,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
						Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata						30,000,000					150,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
						999.Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	94.12 %		50.00 %	66.67 %		30,000,000				80.00 %	150,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
	3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						40,000,000				Pelaku Wisata		170,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota						40,000,000				Pelaku Wisata		170,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen		20,000,000				1 Dokumen	130,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
						Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi		4 Promosi	3 Promosi		10,000,000				3 Promosi	20,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
						Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan		10,000,000				1 Kegiatan	20,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
	3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						20,000,000					130,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
						Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Menantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe	1 Dokumen	130,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						10,000,000					20,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
						Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe	1 Kegiatan	20,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
	3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						10,000,000					20,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
						Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3 Promosi		4 Promosi	1 Promosi	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe	3 Promosi	20,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
91.	3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						30,000,000					50,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
						Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif						30,000,000					50,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
						999.Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	35.71 %		25.00 %	28.00 %		30,000,000				31.25 %	50,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		
	3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						30,000,000				Pelaku Wisata		50,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						30,000,000				Pelaku Wisata		50,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang		20 Orang	30 Orang		30,000,000					30 Orang	50,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				
															NASIONAL		DAERAH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
	3	26	05	2.01	0006	Facilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						30,000,000					50,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
						Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	30 Orang		20 Orang	20 Orang	30,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe	30 Orang	50,000,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
												1,370,148,920					1,534,338,867	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1,370,148,920					1,534,338,867	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1,370,148,920					1,534,338,867	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
92.	2	22	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,300,148,920					1,472,338,867	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
						Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						1,280,148,920					1,437,338,867	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
							999.Nilai SAKIP OPD	64.00 Angka		62.15 Angka	62.75 Angka	1,280,148,920					63.10 Angka	1,437,338,867	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	2	22	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,500,000					Satuan Kerja Perangkat Daerah	7,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,500,000					Satuan Kerja Perangkat Daerah	7,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1,500,000					10 Dokumen	7,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	2	22	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1,500,000						7,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	10 Dokumen	7,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	2	22	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						871,799,000					Satuan Kerja Perangkat Daerah	877,289,107	Sekretariat Majelis Adat Aceh
						Tertelaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						871,799,000					Satuan Kerja Perangkat Daerah	877,289,107	Sekretariat Majelis Adat Aceh
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan		112 Orang/bulan	112 Orang/bulan	871,799,000					112 Orang/bulan	877,289,107	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	2	22	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						871,799,000						877,289,107	Sekretariat Majelis Adat Aceh
						Tersediaya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	112 Orang/bulan		112 Orang/bulan	112 Orang/bulan	871,799,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	112 Orang/bulan	877,289,107	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	2	22	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						30,849,920					Satuan Kerja Perangkat Daerah	60,500,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
						Tersediaya Dokumen administrasi umum perangkat daerah						30,849,920					Satuan Kerja Perangkat Daerah	60,500,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	20,000,000					10 Laporan	40,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	4,000,000					5 Paket	4,500,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	1,519,920					5 Paket	6,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	5,330,000					4 Paket	10,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	2	22	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5,330,000						10,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
						Tersediaya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	5,330,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	4 Paket	10,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	2	22	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4,000,000						4,500,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
						Tersediaya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	4,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	5 Paket	4,500,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	2	22	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						1,519,920						6,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
						Tersediaya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	1 Paket	1,519,920	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	5 Paket	6,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	2	22	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20,000,000						40,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
						Tertelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		10 Laporan	5 Laporan	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	10 Laporan	40,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	2	22	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20,000,000					Satuan Kerja Perangkat Daerah	10,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
						Tersediaya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah						20,000,000					Satuan Kerja Perangkat Daerah	10,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	20,000,000					1 Unit	10,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	2	22	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20,000,000						10,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
						Tersediaya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	20,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	1 Unit	10,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	2	22	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						340,800,000					Satuan Kerja Perangkat Daerah	467,549,760	Sekretariat Majelis Adat Aceh
						Tersediaya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						340,800,000					Satuan Kerja Perangkat Daerah	467,549,760	Sekretariat Majelis Adat Aceh
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	132 Laporan		132 Laporan	132 Laporan	340,800,000					132 Laporan	467,549,760	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	2	22	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						340,800,000						467,549,760	Sekretariat Majelis Adat Aceh



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	132 Laporan		132 Laporan	12 Laporan	340,800,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmuat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		132 Laporan	467,549,760	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
	2	22	01		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35,200,000					Satuan Kerja Perangkat Daerah		50,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						35,200,000					Satuan Kerja Perangkat Daerah		50,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2,500,000						1 Unit	5,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13,600,000						1 Unit	20,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15,600,000						1 Unit	20,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
							Jumlah Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	1 Unit	3,500,000						7 Unit	5,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
	2	22	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						15,600,000							20,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15,600,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmuat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	1 Unit	20,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
	2	22	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						13,600,000							20,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13,600,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmuat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	1 Unit	20,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
	2	22	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						2,500,000							5,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmuat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	1 Unit	5,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
	2	22	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						3,500,000							5,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarna Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	3 Unit	3,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmuat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	7 Unit	5,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
93.	2	22	07			PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)						70,000,000							62,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
						Meningkatnya pembinaan adat istiadat						35,000,000							62,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
							999.Indeks Adat Istiadat Aceh	99.00 Nilai		97.44 Nilai	97.60 Nilai	35,000,000						97.64 Nilai	62,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
	2	22	07	7.01		Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat						35,000,000					Mukim, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat		45,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
						Terlaksananya Pembinaan Adat Istiadat yang dilestarikan						35,000,000					Mukim, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat		45,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
							Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000						2 Dokumen	20,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
							Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat	25 Orang		50 Orang	50 Orang	20,000,000						25 Orang	25,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
	2	22	07	7.01	0003	Sosialisasi Adat Istiadat						20,000,000							25,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
						Terlaksinatanya Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat	25 Orang		50 Orang	30 Orang	20,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmuat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	25 Orang	25,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
	2	22	07	7.01	0006	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang						15,000,000							20,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
						Terlaksananya Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmuat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	2 Dokumen	20,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
	2	22	07	7.02		Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat						15,000,000					Mukim, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat		17,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
						Terlaksananya Pembinaan Pengembangan hukum adat yang dibina						15,000,000					Mukim, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat		17,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
							Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	50 Orang		50 Orang	50 Orang	15,000,000						50 Orang	17,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
	2	22	07	7.02	0004	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat						15,000,000							17,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
						Terlaksananya Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	50 Orang		50 Orang	30 Orang	15,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmuat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	50 Orang	17,000,000	Sekretariat Majelis Adat Aceh		
	2	22	07	7.03		Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat						20,000,000					Mukim, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat	-	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
						Terlaksananya Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat						20,000,000					Mukim, Tokoh Adat, Tokoh masyarakat	-	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
							Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20,000,000						4 Dokumen	-	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh
	2	22	07	7.03	0003	Rapat Kerja MAA						20,000,000							-	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh
						Terlaksananya Rapat Kerja MAA	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.Memperkuat penylarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarmuat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	4 Dokumen		-	-	Sekretariat Majelis Adat Aceh
						Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						2,947,388,197							4,295,942,943	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2,947,388,197								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						2,917,388,197								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
94.	2	23	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,419,126,597								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
					Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						2,411,626,597								Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						999.Nilai SAKIP OPD	63.90 Angka		61.95 Angka	62.10 Angka	2,411,626,597						62.80 Angka	3,935,942,943	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,500,000						OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe		7,650,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,500,000						OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe		7,650,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	1,500,000						2 Dokumen	7,650,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1,500,000							7,650,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		2 Dokumen	7,650,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,074,388,400						Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		3,432,992,943	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,074,388,400						Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe		3,432,992,943	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan			336 Orang/bulan	336 Orang/bulan	2,074,388,400							336 Orang/bulan	3,432,992,943	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2,074,388,400								3,432,992,943	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	336 Orang/bulan		336 Orang/bulan	336 Orang/bulan	2,074,388,400	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		336 Orang/bulan	3,432,992,943	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						27,500,000						OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe		152,300,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						27,500,000						OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe		152,300,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan			15 Laporan	15 Laporan	20,000,000							15 Laporan	105,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	1 Paket	2,500,000							1 Paket	10,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	1 Paket	2,500,000							1 Paket	13,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket			1 Paket	1 Paket	2,500,000							1 Paket	22,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2,500,000								22,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Dokumen Paket	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Paket	22,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2,500,000								10,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		1 Paket	1 Paket	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Paket	10,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						2,500,000								13,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Paket	13,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20,000,000								105,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Terselaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan		15 Laporan	1 Laporan	20,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		15 Laporan	105,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						250,765,840						OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe		269,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						250,765,840						OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe		269,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	171,000,000							12 Laporan	125,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	76,765,840							2 Laporan	125,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	2,500,000							1 Laporan	15,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	500,000							1 Laporan	3,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500,000								3,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Terselaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Laporan	3,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						171,000,000								125,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	171,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		12 Laporan	125,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2,500,000								15,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH			(14)		(15)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Laporan	15,500,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						76,765,840							125,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	76,765,840	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		2 Laporan	125,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						64,972,357					OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe		134,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						Tersusunnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						64,972,357					OPD, Bagian Setdako dan Lembaga Kearsipan Kota Lhokseumawe		134,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		3 Unit	3 Unit	40,900,000							3 Unit	78,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1 Unit	1 Unit	17,700,000							1 Unit	35,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		10 Unit	10 Unit	6,372,357							10 Unit	21,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						17,700,000							35,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		1 Unit	1 Unit	17,700,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Unit	35,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						40,900,000							78,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		3 Unit	3 Unit	40,900,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		3 Unit	78,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6,372,357							21,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		10 Unit	15 Unit	6,372,357	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		10 Unit	21,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
95.	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						478,261,600							174,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan						478,261,600							35,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
							999.Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	71.15 Angka		69.25 Angka	70.11 Angka	478,261,600							70.29 Angka	35,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						165,199,920					Mayarakat Kota Lhokseumawe		115,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						Tertaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						165,199,920					Mayarakat Kota Lhokseumawe		115,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
							Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Eksemplar		0.13134 Eksemplar	0.1642 Eksemplar	120,000,000							0.3283 Eksemplar	16,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	98.1 Perpustakaan		17.2 Perpustakaan	18.4 Perpustakaan	45,199,920							20.1 Perpustakaan	16,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						45,199,920							16,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						Tertaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	98.1 Perpustakaan		17.2 Perpustakaan	1 Perpustakaan	45,199,920	Kota Lhokseumawe	Sisa DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		20.1 Perpustakaan	16,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota						120,000,000							16,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
							Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 Eksemplar		0.13134 Eksemplar	10 Eksemplar	120,000,000	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		0.3283 Eksemplar	16,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						313,061,680					Mayarakat Kota Lhokseumawe		59,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
						Terciptanya Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						313,061,680					Mayarakat Kota Lhokseumawe		59,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
							Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	62.766 Lokus		60201 Lokus	60265 Lokus	142,000,080							60390 Lokus	16,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3166 Orang		2500 Orang	2567 Orang	171,061,600							2800 Orang	11,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						171,061,600							11,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3166 Orang		2500 Orang	6 Orang	171,061,600	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		2800 Orang	11,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat						142,000,080							16,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	62.766 Lokus		60201 Lokus	80 Lokus	142,000,080	Kota Lhokseumawe	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		60390 Lokus	16,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
96.	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						20,000,000							3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Meningkatnya Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki						20,000,000							3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						999.Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang di miliki	100 %			100 %	100 %	20,000,000						100 %	3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota						20,000,000							3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Tersedianya Naskah Kuno Milik Daerah						20,000,000							3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar			1 Eksemplar	Eksemplar	20,000,000						Eksemplar	3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						20,000,000							3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar		1 Eksemplar	3 Eksemplar	20,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		Eksemplar	3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						30,000,000							58,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
97.	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						30,000,000							42,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis						30,000,000							26,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						999.Tingkat Ketersediaan Arsip	64.71 %			52.21 %	53.68 %	30,000,000						55.88 %	26,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota						30,000,000							26,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Terlaksananya pengelola arsip dinamis						30,000,000							26,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	20,000,000						1 Laporan	16,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	5 Berkas			1 Berkas	1 Berkas	10,000,000						1 Berkas	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis						10,000,000							10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis dan Digunakan	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	5 Berkas		1 Berkas	1 Berkas	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berkarakter		1 Berkas	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						20,000,000							16,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	16,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan						6,966,080,999							11,285,000,455	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6,081,893,000							8,721,719,481	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						6,081,893,000							8,721,719,481	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
99.	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6,010,893,000							8,570,007,735	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						5,993,393,000							8,398,100,835	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						999.Nilai SAKIP OPD	66.65 Angka			64.50 Angka	65.00 Angka	5,993,393,000						65.50 Angka	8,398,100,835	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20,000,000	Kota Lhokseumawe						34,381,380	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20,000,000	Kota Lhokseumawe						34,381,380	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen			15 Dokumen	15 Dokumen	20,000,000						15 Dokumen	34,381,380	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20,000,000							34,381,380	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		15 Dokumen	34,381,380	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,419,693,000							7,687,781,523	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,419,693,000							7,687,781,523	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1656 Orang/bulan			1656 Orang/bulan	1656 Orang/bulan	5,419,693,000						1656 Orang/bulan	7,687,781,523	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5,419,693,000							7,687,781,523	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1656 Orang/bulan		1656 Orang/bulan	1656 Orang/bulan	5,419,693,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1656 Orang/bulan	7,687,781,523	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan



(1)	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
	2	09	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						38,000,000				Kota Lhokseumawe		131,795,290	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
					Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						38,000,000				Kota Lhokseumawe		131,795,290	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan			60 Laporan	30,000,000						60 Laporan	57,302,300	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1150 Paket			1150 Paket	2,500,000						1150 Paket	22,920,920	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	30 Paket			30 Paket	2,500,000						30 Paket	22,920,920	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket			80 Paket	3,000,000						80 Paket	28,651,150	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
	2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3,000,000						28,651,150	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket			80 Paket	5 Paket	3,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		80 Paket	28,651,150	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2,500,000							22,920,920	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1150 Paket			1150 Paket	45 Paket	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1150 Paket	22,920,920	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan					2,500,000							22,920,920	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	30 Paket			30 Paket	10 Paket	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		30 Paket	22,920,920	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					30,000,000							57,302,300	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan			60 Laporan	20 Laporan	30,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		60 Laporan	57,302,300	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15,000,000						Kota Lhokseumawe		40,111,610	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15,000,000						Kota Lhokseumawe		40,111,610	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			3 Unit	3 Unit	15,000,000						3 Unit	40,111,610	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					15,000,000								40,111,610	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit			3 Unit	2 Unit	15,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		3 Unit	40,111,610	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						389,600,000						Kota Lhokseumawe		460,137,469	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						389,600,000						Kota Lhokseumawe		460,137,469	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			84 Laporan	84 Laporan	166,000,000						84 Laporan	114,604,600	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	708 Laporan			708 Laporan	708 Laporan	223,100,000						708 Laporan	343,813,800	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan			30 Laporan	30 Laporan	500,000						30 Laporan	1,719,069	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					500,000								1,719,069	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan			30 Laporan	10 Laporan	500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		30 Laporan	1,719,069	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					166,000,000								114,604,600	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan			84 Laporan	84 Laporan	166,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		84 Laporan	114,604,600	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					223,100,000								343,813,800	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	708 Laporan			708 Laporan	249 Laporan	223,100,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		708 Laporan	343,813,800	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						128,600,000						Kota Lhokseumawe		215,800,463	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						128,600,000						Kota Lhokseumawe		215,800,463	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit			1 Unit	1 Unit	10,000,000						1 Unit	34,381,380	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit			24 Unit	24 Unit	86,000,000						24 Unit	114,604,600	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit			12 Unit	12 Unit	17,600,000						12 Unit	38,163,332	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF			
											NASIONAL	DAERAH						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	15,000,000						8 Unit	28,651,151	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
	2	09	01	2.09	0001			17,600,000							38,163,332	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	12 Unit	8 Unit	17,600,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		12 Unit	38,163,332	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
	2	09	01	2.09	0002			86,000,000							114,604,600	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	24 Unit	20 Unit	86,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		24 Unit	114,604,600	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
	2	09	01	2.09	0009			10,000,000							34,381,380	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Unit	34,381,380	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
	2	09	01	2.09	0011			15,000,000							28,651,151	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	5 Unit	15,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		8 Unit	28,651,151	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
100.	2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		49,000,000							83,540,202	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
						Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		41,000,000							68,497,116	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
						999.Skor Pola Pangan Harapan	79.25 Angka		78.00 Angka	78.40 Angka	41,000,000				78.95 Angka	68,497,116	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
	2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		38,000,000					Masyarakat Lhokseumawe		58,468,842	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
						Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		38,000,000					Masyarakat Lhokseumawe		58,468,842	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	6 Keluarga		6 Keluarga	6 Keluarga	20,000,000				6 Keluarga	30,086,171	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	8,000,000				3 Laporan	13,339,585	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10,000,000				2 Laporan	15,043,086	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
	2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya		10,000,000							15,043,086	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
						Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	2 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	10,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe	2 Laporan	15,043,086	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		20,000,000							30,086,171	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
						Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	6 Keluarga	6 Keluarga	20 Keluarga	20,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe	6 Keluarga	30,086,171	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis		8,000,000							13,339,585	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
						Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	8,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe	3 Laporan	13,339,585	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
	2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		8,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		15,043,086	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
						Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		8,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		15,043,086	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
						Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	3 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	8,000,000				3 Dokumen	15,043,086	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
	2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal		8,000,000							15,043,086	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
						Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	3 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	8,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe	3 Dokumen	15,043,086	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		3,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		10,028,274	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
						Terlaksananya Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		3,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		10,028,274	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		
						Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000				1 Dokumen	10,028,274	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
	2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun		3,000,000							10,028,274	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan		



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Dokumen	10,028,274	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
101.	2	09	04		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						12,000,000							50,120,472	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Meningkatnya penanganan kerawanan pangan						12,000,000							50,120,472	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						999.Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	10.29 %		20.58 %	17.64 %	12,000,000						16.17 %	50,120,472	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	04	2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						8,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,034,301	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Terlaksananya Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan						8,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,034,301	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000						1 Dokumen	20,034,301	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan					8,000,000							20,034,301	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Dokumen	20,034,301	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	04	2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota						4,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,086,171	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Terlaksananya Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota						4,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,086,171	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4,000,000						1 Laporan	30,086,171	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota					4,000,000							30,086,171	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Memantapkan sistem pertabanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Laporan	30,086,171	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
102.	2	09	05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						10,000,000							18,051,072	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan						10,000,000							18,051,072	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						999.Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	100 %		86.00 %	90.00 %	10,000,000						93.33 %	18,051,072	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	05	2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota						10,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		18,051,072	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar						10,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		18,051,072	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000						1 Dokumen	18,051,072	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota					10,000,000							18,051,072	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Dokumen	18,051,072	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						884,187,999							2,563,280,974	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						155,000,000							1,364,006,975	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
103.	3	25	03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						61,000,000							902,585,145	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Meningkatnya produksi perikanan tangkap						61,000,000							902,585,145	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						999.Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	15906.44 Ton		14809.50 Ton	15138.25 Ton	61,000,000						15357.67 Ton	902,585,145	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	25	03	2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						10,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		5,014,362	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Terlaksananya pengelolaan Penangkapan ikan di Wilayah Sungai,Danau,Waduk dan Genangan Air lainnya yang dapat di Usahkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota						10,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		5,014,362	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000						12 Dokumen	5,014,362	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan					10,000,000							5,014,362	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		12 Dokumen	5,014,362	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	25	03	2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota						42,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		872,498,973	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
					Terlaksananya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota						42,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		872,498,973	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Dilasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	8 Kelompok		8 Kelompok	8 Kelompok	17,000,000						8 Kelompok	20,057,448	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	200 Orang		200 Orang	200 Orang	25,000,000						200 Orang	852,441,525	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil					25,000,000							852,441,525	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang		200 Orang	200 Orang	25,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		200 Orang	852,441,525	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
		3	25	03	2.02 0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelmbagaan Nelayan Kecil						17,000,000							20,057,448	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelmbagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Didasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelmbagaannya	8 Kelompok		8 Kelompok	5 Kelompok	17,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		8 Kelompok	20,057,448	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
		3	25	03	2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						9,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		25,071,810	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Terlaksananya Penerbitan Tanda daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau/Waduk, rawa dan Genangan Air Lainnya Yang dapat di Usahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota						9,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		25,071,810	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
							Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	200 Rekomendasi		200 Rekomendasi	200 Rekomendasi	9,000,000							200 Rekomendasi	25,071,810	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
		3	25	03	2.04 0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran samoi dengan 10 GT						9,000,000							25,071,810	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	200 Rekomendasi		200 Rekomendasi	300 Rekomendasi	9,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		200 Rekomendasi	25,071,810	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
104.	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						55,000,000							376,278,210	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Meningkatnya produksi perikanan budidaya						30,000,000							376,278,210	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
							999.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	2067.61 Ton		2026.77 Ton	2036.90 Ton	30,000,000							2047.09 Ton	376,278,210	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
		3	25	04	2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		15,043,086	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						5,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		15,043,086	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
							Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	8 Rekomendasi		6 Rekomendasi	8 Rekomendasi	5,000,000							8 Rekomendasi	15,043,086	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
		3	25	04	2.01 0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing						5,000,000							15,043,086	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	8 Rekomendasi		6 Rekomendasi	2 Rekomendasi	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		8 Rekomendasi	15,043,086	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
		3	25	04	2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						15,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,143,619	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Terlaksananya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil						15,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,143,619	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
							Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	12 Kelompok		12 Kelompok	12 Kelompok	15,000,000							12 Kelompok	50,143,619	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
		3	25	04	2.02 0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil						15,000,000							50,143,619	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	12 Kelompok		12 Kelompok	10 Kelompok	15,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		12 Kelompok	50,143,619	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
		3	25	04	2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						35,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		311,091,505	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Terlaksananya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						35,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		311,091,505	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
							Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000							2 Dokumen	281,005,333	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
							Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	10,000,000							10 Dokumen	10,028,724	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
							Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	117 Unit		117 Unit	117 Unit	10,000,000							117 Unit	20,057,448	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
		3	25	04	2.04 0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						10,000,000							10,028,724	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH			(15)		(16)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	10,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		10 Dokumen	10,028,724	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
	3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						10,000,000							20,057,448	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	117 Unit		117 Unit	10 Unit	10,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		117 Unit	20,057,448	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
	3	25	04	2.04	0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat						15,000,000							281,005,333	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		2 Dokumen	281,005,333	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
105.	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						9,000,000							35,000,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						<i>Meningkatnya kelestarianlaut dan keanekaragaman hayati</i>						9,000,000							35,000,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
							999.Luasan Kawasan Konservasi	1.00 Ha		0.00 Ha	1.00 Ha	9,000,000						1.00 Ha	35,000,000	35,000,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						9,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		35,000,000	35,000,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						9,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		35,000,000	35,000,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
							Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	32 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha	32 Pelaku Usaha	9,000,000							32 Pelaku Usaha	35,000,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota						9,000,000							35,000,000	35,000,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	32 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha	32 Pelaku Usaha	9,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		32 Pelaku Usaha	35,000,000	35,000,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
106.	3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						30,000,000							50,143,620	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						<i>Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat</i>						15,000,000							25,071,810	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
							999.Angka Konsumsi Ikan	72.78 Kg/KAP/TH		72.35 Kg/KAP/TH	72.50 Kg/KAP/TH	15,000,000						72.63 Kg/KAP/TH	25,071,810	25,071,810	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						15,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		25,071,810	25,071,810	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil						15,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		25,071,810	25,071,810	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
							Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000							12 Dokumen	25,071,810	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko						15,000,000							25,071,810	25,071,810	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	15,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		12 Dokumen	25,071,810	25,071,810	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						15,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		25,071,810	25,071,810	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Terlaksananya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota						15,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		25,071,810	25,071,810	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
							Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	32 Pelaku Usaha		30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	15,000,000							30 Pelaku Usaha	25,071,810	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						15,000,000							25,071,810	25,071,810	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	32 Pelaku Usaha		30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	15,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		30 Pelaku Usaha	25,071,810	25,071,810	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						729,187,999							1,199,273,999	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
107.	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						60,000,000							631,803,593	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						<i>Meningkatnya distribut dan kualitas sarana pertanian</i>						60,000,000							631,803,593	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
							999.Peningkatan Produksi Hortikultura	4.58 %		4.5 %	4.52 %	60,000,000						4.54 %	631,803,593	631,803,593	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
							999.Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	3.00 %		1.58 %	2.14 %	60,000,000						2.49 %	631,803,593	631,803,593	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
							999.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	5.83 %		5.71 %	5.74 %	60,000,000						5.77 %	631,803,593	631,803,593	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						40,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		601,723,429	601,723,429	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
															NASIONAL		DAERAH			
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)
						Tertindakannya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian						40,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		601,723,429	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	40,000,000						2 Laporan	601,723,429	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						40,000,000							601,723,429	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Tertindakannya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	40,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		2 Laporan	601,723,429	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						20,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,080,164	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Tertindakannya Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						20,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,080,164	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen			5 Dokumen	5 Dokumen	20,000,000						5 Dokumen	30,080,164	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						20,000,000							30,080,164	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Otonomi Khusus 1% Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		5 Dokumen	30,080,164	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
108.	3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						607,974,399							390,123,032	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian						607,974,399							390,123,032	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						999.Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditekan Menjadi LPTB	179.85 Ha			179.85 Ha	179.85 Ha	607,974,399						179.85 Ha	390,123,032	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian						592,974,399					Masyarakat Kota Lhokseumawe		226,500,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Tertindakannya Pembangunan Prasarana Pertanian						592,974,399					Masyarakat Kota Lhokseumawe		226,500,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit			1 Unit	1 Unit	592,974,399						1 Unit	226,500,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						592,974,399							226,500,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	592,974,399	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Unit	226,500,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota						15,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		163,623,032	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Tertindakannya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota						15,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		163,623,032	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	5 Laporan			5 Laporan	5 Laporan	15,000,000						5 Laporan	163,623,032	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemandatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak						15,000,000							163,623,032	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Tertindakannya Pelestarian dan Pemandatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	5 Laporan		5 Laporan	3 Laporan	15,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		5 Laporan	163,623,032	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
109.	3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						33,213,600							100,267,210	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner						33,213,600							100,267,210	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						999.Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	93.75 %			43.75 %	62.50 %	33,213,600						68.75 %	100,267,210	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						999.Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100 %			100 %	100 %	33,213,600						100 %	100,267,210	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota						13,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,133,604	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Tertindakannya Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/ Kota						13,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		50,133,604	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	100 Laporan			0 Laporan	100 Laporan	13,000,000						100 Laporan	50,133,604	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	27	04	2.01	0003	Pengulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular						13,000,000							50,133,604	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	100 Laporan		0 Laporan	25 Laporan	13,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		100 Laporan	50,133,604	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota						10,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,053,442	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Tertindakannya Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota						10,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,053,442	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5 Laporan			5 Laporan	5 Laporan	10,000,000						5 Laporan	20,053,442	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner						10,000,000							20,053,442	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
						Tersediannya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	10,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		5 Laporan	20,053,442	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan
	3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						10,213,600					Petugas Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		30,080,164	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF			
															NASIONAL					DAERAH	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	12 Orang		0 Orang	10 Orang	10,213,600					Petugas Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	11 Orang	30,080,164	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
	3	27	04	2.04	0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	12 Orang	0 Orang	10 Orang	10,213,600	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		11 Orang	30,080,164	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
110.	3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						13,000,000							30,080,164	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian						13,000,000							30,080,164	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
							999.Persentase Penanganan Bencana Pertanian	60.00 %		20.00 %	30.00 %	13,000,000						40.00 %	30,080,164	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
							999.Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian	70.00 Persentase		90.00 Persentase	85.00 Persentase	13,000,000						80.00 Persentase	30,080,164	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
	3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						13,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,080,164	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota						13,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		30,080,164	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
							Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	4 laporan		4 laporan	4 laporan	13,000,000						4 laporan	30,080,164	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
	3	27	05	2.01	0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis						13,000,000							30,080,164	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Tertanggulangnya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	4 laporan		4 laporan	4 laporan	13,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		4 laporan	30,080,164	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
111.	3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						15,000,000							47,000,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian						15,000,000							47,000,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
							999.Persentase Izin Usaha Pertanian yang Diterbitkan	93.02 %		0 %	34.72 %	15,000,000						48.61 %	47,000,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
	3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						15,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		47,000,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						15,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		47,000,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
							Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	20 Laporan		0 Laporan	10 Laporan	15,000,000						15 Laporan	47,000,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
	3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						15,000,000							47,000,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	20 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	15,000,000	Kota Lhokseumawe	DBH Sawit	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		15 Laporan	47,000,000	Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan	
						Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah						8,024,442,400							8,367,825,221	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5,407,055,055							6,612,375,221	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						5,407,055,055							6,612,375,221	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
112.	2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,912,555,055							6,085,475,221	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						3,851,555,055							6,073,375,221	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							999.Nilai SAKIP OPD	68.20 Angka		66.95 Angka	67.20 Angka	3,851,555,055							67.80 Angka	6,073,375,221	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29,168,400					Sarana Prasarana Operasional Disperindagkop		145,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Dokumen Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah						29,168,400					Sarana Prasarana Operasional Disperindagkop		145,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	29,168,400						8 Dokumen	145,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						29,168,400							145,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	29,168,400	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		8 Dokumen	145,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,034,072,287					ASN Disperindagkop		4,361,949,024	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN						3,034,072,287					ASN Disperindagkop		4,361,949,024	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	3,034,072,287						63 Orang/bulan	4,361,949,024	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3,034,072,287							4,361,949,024	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	63 Orang/bulan		63 Orang/bulan	63 Orang/bulan	3,034,072,287	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	S.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		63 Orang/bulan	4,361,949,024	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		2	17	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50,000,000					Sarana Prasarana Operasional Disperindagkop		55,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						50,000,000					Sarana Prasarana Operasional Disperindagkop		55,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50,000,000						1 Laporan	55,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		2	17	01	2.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						50,000,000							55,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	S.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Laporan	55,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		2	17	01	2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						11,000,000					Retribusi Daerah		12,100,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pendapatan Daerah						11,000,000					Retribusi Daerah		12,100,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
							Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000						1 Dokumen	12,100,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		2	17	01	2.04	0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						11,000,000							12,100,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	S.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Dokumen	12,100,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		2	17	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						18,150,000					PNS Disperindagkop		19,965,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						18,150,000					PNS Disperindagkop		19,965,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	47 Orang		35 Orang	35 Orang	18,150,000						39 Orang	19,965,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		2	17	01	2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						18,150,000							19,965,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	47 Orang		35 Orang	35 Orang	18,150,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	S.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		39 Orang	19,965,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		2	17	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						84,854,000					Sarana Prasarana Operasional Disperindagkop		132,839,400	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah						84,854,000					Sarana Prasarana Operasional Disperindagkop		132,839,400	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1,254,000						1 Dokumen	1,379,400	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
							Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000						1 Dokumen	5,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50,000,000						1 Laporan	94,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5,500,000						1 Paket	6,050,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6,600,000						1 Paket	7,260,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		8 Paket	8 Paket	16,500,000						8 Paket	18,150,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		2	17	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						16,500,000							18,150,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket		8 Paket	8 Paket	16,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	S.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		8 Paket	18,150,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		2	17	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5,500,000							6,050,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	S.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Paket	6,050,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		2	17	01	2.06	0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6,600,000							7,260,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6,600,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	S.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Paket	7,260,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		2	17	01	2.06	0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,254,000							1,379,400	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Penaturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Penaturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1,254,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Dokumen	1,379,400	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50,000,000							94,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Laporan	94,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						5,000,000							5,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Dokumen	5,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						45,733,875					Sarana Prasarana Operasional Disperindagkop		100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Pengdaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan						45,733,875					Sarana Prasarana Operasional Disperindagkop		100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	4 Unit	45,733,875							100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						45,733,875							100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	4 Unit	45,733,875	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		4 Unit	100,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						460,247,088					Sarana Prasarana Operasional Disperindagkop		506,271,797	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						460,247,088					Sarana Prasarana Operasional Disperindagkop		506,271,797	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	197,120,000							84 Laporan	216,832,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	708 Laporan		708 Laporan	708 Laporan	261,477,088							708 Laporan	287,624,797	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	1,650,000							15 Laporan	1,815,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1,650,000							1,815,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	1,650,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		15 Laporan	1,815,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						197,120,000							216,832,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	197,120,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		84 Laporan	216,832,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						261,477,088							287,624,797	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	708 Laporan		708 Laporan	708 Laporan	261,477,088	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		708 Laporan	287,624,797	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						179,329,405					Sarana Prasarana Operasional Disperindagkop		752,350,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						179,329,405					Sarana Prasarana Operasional Disperindagkop		752,350,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40,829,405							1 Unit	600,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	90,900,000							24 Unit	99,990,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	36,600,000							14 Unit	40,260,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	11,000,000							1 Unit	12,100,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						36,600,000							40,260,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit		14 Unit	14 Unit	36,600,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		14 Unit	40,260,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						90,900,000							99,990,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinasnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinasnya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	90,900,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		24 Unit	99,990,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						40,829,405							600,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	40,829,405	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Unit	600,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						11,000,000							12,100,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	11,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Unit	12,100,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
113.	2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						10,000,000							10,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam						10,000,000							10,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							999.Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	27.80 %		26.90 %	27.10 %	10,000,000						27.30 %	10,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						10,000,000					Anggota Koperasi		10,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						10,000,000					Anggota Koperasi		10,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit Usaha		2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	10,000,000						2 Unit Usaha	10,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	02	2.01	0001	Facilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						10,000,000							10,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit Usaha		2 Unit Usaha	2 Unit Usaha	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		2 Unit Usaha	10,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
114.	2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						42,000,000							24,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi						42,000,000							24,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							999.Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	10.56 %		7.04 %	8.80 %	42,000,000						8.80 %	24,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota						42,000,000					Anggota Koperasi		24,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi						42,000,000					Anggota Koperasi		24,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	20 Unit Usaha		20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	42,000,000						20 Unit Usaha	24,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						42,000,000							24,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	20 Unit Usaha		20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	42,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		20 Unit Usaha	24,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
115.	2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						22,000,000							24,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi						22,000,000							24,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							999.Persentase Koperasi Aktif	44.18 %		40.29 %	41.49 %	22,000,000						42.08 %	24,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						22,000,000					Anggota Koperasi		24,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi						22,000,000					Anggota Koperasi		24,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha		20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	22,000,000						20 Unit Usaha	24,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota						22,000,000							24,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	20 Unit Usaha		20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	22,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		20 Unit Usaha	24,200,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
116.	2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						45,000,000							50,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian						45,000,000							50,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						999.Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	17.61 %			10.56 %	10.56 %	45,000,000						14.08 %	50,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						45,000,000					Anggota Koperasi		50,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian						45,000,000					Anggota Koperasi		50,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	25 Orang			25 Orang	25 Orang	45,000,000						25 Orang	50,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						45,000,000							50,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	25 Orang		25 Orang	25 Orang	45,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		25 Orang	50,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
117.	2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						55,000,000							60,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Meningkatnya produktivitas koperasi						55,000,000							60,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						999.Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	10.56 %			7.75 %	8.45 %	55,000,000						9.15 %	60,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota						55,000,000					Anggota Koperasi		60,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Terlaksananya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi						55,000,000					Anggota Koperasi		60,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit Usaha			4 Unit Usaha	12 Unit Usaha	55,000,000						12 Unit Usaha	60,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						55,000,000							60,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit Usaha		4 Unit Usaha	4 Unit Usaha	55,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		12 Unit Usaha	60,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
118.	2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						210,000,000							236,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri						105,000,000							175,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						999.Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	0.90 %			0.76 %	0.79 %	105,000,000						0.83 %	175,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						999.Pertumbuhan Wirausaha	13.42 %			10.53 %	11.43 %	105,000,000						12.82 %	175,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan						210,000,000					Pelaku UMKM		236,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Terlaksananya Pemberdayaan UMKM						210,000,000					Pelaku UMKM		236,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitas Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-			-	-	55,000,000						-	60,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-			-	-	50,000,000						-	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa	-			-	-	55,000,000						-	60,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	-			-	-	50,000,000						-	55,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	07	2.01	0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						50,000,000							60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	20 Orang	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		-	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	07	2.01	0019	Pembinaan dan Fasilitas Pemulihan Usaha						50,000,000							55,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Terfasilitasinya perlindungan UMKM melalui Pemulihan Usaha dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	-		-	25 Unit Usaha	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		-	55,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	07	2.01	0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						55,000,000							60,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
						Terlaksananya Fasilitas Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitas Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	20 Kegiatan	55,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		-	60,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	07	2.01	0026	Pembinaan dan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa bagi pelaku UMKM						55,000,000							60,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Terlaksananya Pembinaan dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa bagi UMKM	Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Barang/Jasa	-	-	-	25 Unit Usaha	55,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		-	60,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
119.	2	17	08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						1,110,500,000							121,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					Meningkatnya daya saing UMKM						1,110,500,000							121,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					999 Proporsi UKM Menjalni Kemitraan dan Ekspor		2.36 %		2.24 %	2.26 %	1,110,500,000						2.30 %	121,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	08	2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil						1,110,500,000					Pelaku UMKM		121,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					Terlaksananya Fasilitas UMKM						1,110,500,000					Pelaku UMKM		121,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik		-	-	-	-	1,060,500,000						-	66,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitas Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi		-	-	-	-	50,000,000						-	55,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	08	2.01	0019 Pembinaan dan Fasilitas Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM						50,000,000							55,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitas Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada unit usaha UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitas Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-	-	-	25 Unit Usaha	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		-	55,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	2	17	08	2.01	0021 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM						1,060,500,000							66,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					Tersedianya Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-	-	-	100 Unit Usaha	1,060,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		-	66,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2,617,387,345							1,755,450,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						2,154,500,000							1,269,450,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
120.	3	30	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						218,150,000							229,965,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi						218,150,000							229,965,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					999.Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya		16.00 %		8.00 %	8.00 %	218,150,000						12.00 %	229,965,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	3	30	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						200,000,000					Pasar kota Lhokseumawe		210,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					Tersedianya sarana distribusi perdagangan yang dibangun						200,000,000					Pasar kota Lhokseumawe		210,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1 Unit	200,000,000						1 Unit	210,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	3	30	03	2.01	0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						200,000,000							210,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	2 Unit	200,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Unit	210,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	3	30	03	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						18,150,000					Pedagang Pasar		19,965,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					Terlaksananya Pembinaan terhadap Penagih Retribusi Pasar						18,150,000					Pedagang Pasar		19,965,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18,150,000						1 Dokumen	19,965,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	3	30	03	2.02	0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						18,150,000							19,965,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	18,150,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Dokumen	19,965,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
121.	3	30	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						1,480,250,000							533,275,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting						1,480,250,000							533,275,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					999.Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		60.55 %		60.01 %	60.10 %	1,480,250,000						60.35 %	533,275,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	3	30	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						1,480,250,000					Pedagang Pasar/Masyarakat Kota Lhokseumawe		533,275,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
					Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						1,480,250,000					Pedagang Pasar/Masyarakat Kota Lhokseumawe		533,275,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1,450,000,000						2 Laporan	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					1,450,000,000							500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan		2 Laporan	20 Laporan	1,450,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		2 Laporan	500,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						1,480,250,000					Pedagang Pasar/Masyarakat Kota Lhokseumawe		533,275,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	-	30,250,000						-	33,275,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						30,250,000							33,275,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	-		-	56 Laporan	30,250,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		-	33,275,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
122.	3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						386,100,000							424,710,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor						204,600,000							225,060,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							999.Nilai Ekspor Barang	46.32 Rp. Juta Per Tahun		38.92 Rp. Juta Per Tahun	40.21 Rp. Juta Per Tahun	204,600,000							42.25 Rp. Juta Per Tahun	225,060,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						386,100,000					Pelaku UKM		424,710,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Event Pameran dagang dan Promosi Dagang yang diikuti						386,100,000					Pelaku UKM		424,710,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	23,100,000							2 Pelaku Usaha	25,410,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha		3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	181,500,000							3 Pelaku Usaha	199,650,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
							Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	181,500,000							2 Pelaku Usaha	199,650,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional						181,500,000							199,650,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha		3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	181,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		3 Pelaku Usaha	199,650,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal						181,500,000							199,650,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	2 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	181,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		2 Pelaku Usaha	199,650,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						23,100,000							25,410,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	2 Pelaku Usaha		2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	23,100,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		2 Pelaku Usaha	25,410,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
123.	3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						20,000,000							21,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk						20,000,000							21,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							999.Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	77.71 %		71.35 %	74.07 %	20,000,000							75.00 %	21,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan						20,000,000					Pedagang Pasar		21,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya Sarana Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan						20,000,000					Pedagang Pasar		21,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4 Unit		4 Unit	4 Unit	20,000,000							4 Unit	21,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						20,000,000							21,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	4 Unit		4 Unit	30 Unit	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		4 Unit	21,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
124.	3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI						50,000,000							60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri						50,000,000							60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	



(1)	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
							999.Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	60.00 %		50.00 %	50.00 %	50,000,000						55.00 %	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri						50,000,000					Pelaku UKM		60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya promosi, pemaaran dan peningkatan produk dalam negeri						50,000,000					Pelaku UKM		60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 UMKM			50 UMKM	50 UMKM	50,000,000							50 UMKM	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
	3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota						50,000,000							60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50 UMKM		50 UMKM	50 UMKM	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		50 UMKM	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						462,887,345							486,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
125.	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						399,760,000							440,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Meningkatnya realisasi pembangunan industri						399,760,000							380,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						999.Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	6.27 %		5.27 %	5.77 %		399,760,000						6.00 %	380,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						399,760,000					Pelaku IKM		440,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan dan Promosi Industri Kecil Menengah						399,760,000					Pelaku IKM		440,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		200,000,000						1 Dokumen	210,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		49,760,000						1 Dokumen	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		100,000,000						1 Dokumen	110,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		50,000,000						1 Dokumen	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						49,760,000							60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terseleenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49,760,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Dokumen	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						200,000,000							210,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terseleenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Dokumen	210,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						100,000,000							110,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terseleenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Dokumen	110,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	3	31	02	2.01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota						50,000,000							60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe		1 Dokumen	60,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
126.	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI						40,000,000							21,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri						40,000,000							21,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						999.Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	5.65 %		5.00 %	5.33 %		40,000,000						5.45 %	21,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan Kabupaten/Kota						40,000,000					Pelaku IKM		21,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya dokumen penerbitan izin usaha						40,000,000					Pelaku IKM		21,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	



(1)	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF			
															NASIONAL	DAERAH						
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)							
							Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000							1 Dokumen	21,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota						40,000,000								21,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe			1 Dokumen	21,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
127.	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						23,127,345								25,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Meningkatnya pemanfaatan informasi industri						23,127,345								25,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							999.Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	98.00 Persentase		91.00 Persentase	92.00 Persentase	23,127,345							94.00 Persentase	25,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUi, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota						23,127,345						Pelaku IKM		25,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Tersedianya dokumen informasi industri untuk IUI, IPUi, IUKI dan IPKI kewenangan Kabupaten/kota						23,127,345						Pelaku IKM		25,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
							Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23,127,345							1 Dokumen	25,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						23,127,345								25,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
						Terselenggaranya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23,127,345	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Memperkuat Ekonomi dan Daya Saing Kota Lhokseumawe			1 Dokumen	25,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	
	4					Sekretariat Daerah						27,233,211,840								37,050,811,065	Sekretariat Daerah	
	4	01				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						27,233,211,840								37,050,811,065	Sekretariat Daerah	
	4	01				SEKRETARIAT DAERAH						27,233,211,840								37,050,811,065	Sekretariat Daerah	
128.	4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						26,028,211,840								33,942,426,198	Sekretariat Daerah	
						Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						25,168,211,840								32,822,426,198	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	999.Nilai SAKIP OPD	66.50 Angka		64.50 Angka	65.00 Angka	25,168,211,840							Pemerintah Kota Lhokseumawe	65.50 Angka	32,822,426,198	Sekretariat Daerah
						Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,500,000							Pemerintah Kota Lhokseumawe		22,500,000	Sekretariat Daerah
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1,500,000								6 Dokumen	22,500,000	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1,500,000									22,500,000	Sekretariat Daerah
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	5 Dokumen	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel			6 Dokumen	22,500,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12,280,337,000							Pemerintah Kota Lhokseumawe		14,600,000,000	Sekretariat Daerah
						Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12,280,337,000							Pemerintah Kota Lhokseumawe		14,600,000,000	Sekretariat Daerah
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2408 Orang/bulan		2408 Orang/bulan	2408 Orang/bulan	12,280,337,000								2408 Orang/bulan	14,600,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12,280,337,000									14,600,000,000	Sekretariat Daerah
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2408 Orang/bulan		2408 Orang/bulan	2408 Orang/bulan	12,280,337,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel			2408 Orang/bulan	14,600,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						125,000,000							Pemerintah Kota Lhokseumawe		132,000,000	Sekretariat Daerah
						Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						125,000,000							Pemerintah Kota Lhokseumawe		132,000,000	Sekretariat Daerah
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100,000,000								1 Paket	100,000,000	Sekretariat Daerah
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang		8 Orang	8 Orang	25,000,000								8 Orang	32,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						100,000,000									100,000,000	Sekretariat Daerah
						Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel			1 Paket	100,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						25,000,000									32,000,000	Sekretariat Daerah



(1)	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH					
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
					Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pelatihan	8 Orang		8 Orang	8 Orang	25,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		8 Orang	32,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						5,868,221,500					Pemerintah Kota Lhokseumawe		5,935,800,538	Sekretariat Daerah	
					Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						5,868,221,500					Pemerintah Kota Lhokseumawe		5,935,800,538	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	320,000,000							5 Laporan	410,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2,426,221,500							12 Laporan	3,100,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2,672,000,000							2 Paket	1,376,750,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80,000,000							1 Paket	200,059,638	Sekretariat Daerah
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	170,000,000							3 Paket	373,490,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	200,000,000							2 Paket	475,500,900	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					170,000,000								373,490,000	Sekretariat Daerah
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	170,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Paket	373,490,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					200,000,000								475,500,900	Sekretariat Daerah
					Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	200,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Paket	475,500,900	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					2,672,000,000								1,376,750,000	Sekretariat Daerah
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2,672,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Paket	1,376,750,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					80,000,000								200,059,638	Sekretariat Daerah
					Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Paket	200,059,638	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu					320,000,000								410,000,000	Sekretariat Daerah
					Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	320,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Laporan	410,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					2,426,221,500								3,100,000,000	Sekretariat Daerah
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2,426,221,500	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	3,100,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,423,778,500						Pemerintah Kota Lhokseumawe		2,882,499,560	Sekretariat Daerah
					Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,423,778,500						Pemerintah Kota Lhokseumawe		2,882,499,560	Sekretariat Daerah
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	856,354,700							3 Unit	1,500,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50,000,000							1 Unit	200,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		6 Unit	4 Unit	517,423,800							4 Unit	632,499,560	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					856,354,700								1,500,000,000	Sekretariat Daerah
					Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	2 Unit	856,354,700	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Unit	1,500,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50,000,000								200,000,000	Sekretariat Daerah
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	200,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					517,423,800								632,499,560	Sekretariat Daerah
					Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		6 Unit	4 Unit	517,423,800	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Unit	632,499,560	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,653,046,400						Pemerintah Kota Lhokseumawe		2,894,400,000	Sekretariat Daerah
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,653,046,400						Pemerintah Kota Lhokseumawe		2,894,400,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	700,000,000							12 Laporan	1,000,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1,893,046,400							12 Laporan	1,515,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	50,000,000							4 Laporan	364,400,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10,000,000							1 Laporan	15,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					10,000,000								15,000,000	Sekretariat Daerah



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	15,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					700,000,000							1,000,000,000	Sekretariat Daerah	
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	700,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	1,000,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					50,000,000							364,400,000	Sekretariat Daerah	
					Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Laporan	364,400,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					1,893,046,400							1,515,000,000	Sekretariat Daerah	
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1,893,046,400	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	1,515,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.09	0001	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,137,223,440					Pemerintah Kota Lhokseumawe		3,925,121,100	Sekretariat Daerah	
					Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2,137,223,440					Pemerintah Kota Lhokseumawe		3,925,121,100	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		2 Unit	2 Unit	400,000,000						5 Unit	664,500,000	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		8 Unit	7 Unit	376,000,000						6 Unit	570,000,000	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	663,149,684						18 Unit	1,130,181,100	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		4 Unit	4 Unit	378,000,000						7 Unit	714,240,000	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		4 Unit	6 Unit	320,073,756						6 Unit	846,200,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					663,149,684							1,130,181,100	Sekretariat Daerah	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	663,149,684	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		18 Unit	1,130,181,100	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					376,000,000							570,000,000	Sekretariat Daerah	
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		8 Unit	6 Unit	376,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		6 Unit	570,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					400,000,000							664,500,000	Sekretariat Daerah	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		2 Unit	2 Unit	400,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Unit	664,500,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					378,000,000							714,240,000	Sekretariat Daerah	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		4 Unit	4 Unit	378,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		7 Unit	714,240,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					320,073,756							846,200,000	Sekretariat Daerah	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		4 Unit	6 Unit	320,073,756	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		6 Unit	846,200,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.11	0001	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					649,105,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		699,105,000	Sekretariat Daerah	
					Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						649,105,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		699,105,000	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan		24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	400,000,000						24 Orang/Bulan	400,000,000	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan		28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	179,105,000						28 Orang/Bulan	199,105,000	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		2 Orang	2 Orang	70,000,000						2 Orang	100,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					179,105,000							199,105,000	Sekretariat Daerah	
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan		28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	179,105,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		28 Orang/Bulan	199,105,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					70,000,000							100,000,000	Sekretariat Daerah	
					Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		2 Orang	2 Orang	70,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Orang	100,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					400,000,000							400,000,000	Sekretariat Daerah	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS							
														NASIONAL		DAERAH					
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
					Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan		24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	400,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		24 Orang/Bulan	400,000,000	Sekretariat Daerah		
	4	01	01	2.12	Facilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						300,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		331,000,000	Sekretariat Daerah		
					Tertindakannya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						300,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		331,000,000	Sekretariat Daerah		
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	130,000,000						1 Paket	134,000,000	Sekretariat Daerah		
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	70,000,000						1 Paket	70,000,000	Sekretariat Daerah		
						Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100,000,000						1 Paket	127,000,000	Sekretariat Daerah		
	4	01	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah					130,000,000							134,000,000	Sekretariat Daerah		
					Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	130,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Paket	134,000,000	Sekretariat Daerah		
	4	01	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah					100,000,000							127,000,000	Sekretariat Daerah		
					Tertindakannya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Paket	127,000,000	Sekretariat Daerah		
	4	01	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah					70,000,000							70,000,000	Sekretariat Daerah		
					Tertindakannya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	70,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Paket	70,000,000	Sekretariat Daerah		
	4	01	01	2.14	0001	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					350,000,000							1,900,000,000	Sekretariat Daerah		
					Tertindakannya Protokol dan Komunikasi Pimpinan						350,000,000						Pemerintah Kota Lhokseumawe		1,900,000,000	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	116,700,000							1 Laporan	600,000,000	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	165,700,000							1 Laporan	900,000,000	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	67,600,000							1 Laporan	400,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.14	0001	Facilitasi Keprotokolan					116,700,000							600,000,000	Sekretariat Daerah		
					Tertindakannya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	116,700,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	600,000,000	Sekretariat Daerah		
	4	01	01	2.14	0002	Facilitasi Komunikasi Pimpinan					165,700,000							900,000,000	Sekretariat Daerah		
					Tertindakannya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	165,700,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	900,000,000	Sekretariat Daerah		
	4	01	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan					67,600,000							400,000,000	Sekretariat Daerah		
					Tertindakannya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	67,600,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	400,000,000	Sekretariat Daerah		
					Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah						175,000,000							620,000,000	Sekretariat Daerah		
						999.Indeks Kematangan Organisasi (KOD)	35.00 Angka		30.00 Angka	30.00 Angka	175,000,000							32.00 Angka	620,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.15	0001	Penataan Organisasi					240,000,000							Pemerintah Kota Lhokseumawe		620,000,000	Sekretariat Daerah
					Tertindakannya Penataan Organisasi						240,000,000							Pemerintah Kota Lhokseumawe		620,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8 Dokumen		6 Dokumen	7 Dokumen	65,000,000							8 Dokumen	180,000,000	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	110,000,000							2 Dokumen	210,000,000	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9 Laporan		7 Laporan	8 Laporan	65,000,000							8 Laporan	230,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan					65,000,000							180,000,000	Sekretariat Daerah		
					Tertindakannya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	8 Dokumen		6 Dokumen	7 Dokumen	65,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		8 Dokumen	180,000,000	Sekretariat Daerah		
	4	01	01	2.13	0002	Facilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana					65,000,000							230,000,000	Sekretariat Daerah		
					Tertindakannya Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	65,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		8 Laporan	230,000,000	Sekretariat Daerah		
	4	01	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi					110,000,000							210,000,000	Sekretariat Daerah		
					Tertindakannya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	110,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Dokumen	210,000,000	Sekretariat Daerah		
129.	4	01	02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						720,000,000							2,017,130,157	Sekretariat Daerah		
					Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah						300,000,000							480,000,000	Sekretariat Daerah		
						999.Efektivitas Kerja Sama Daerah	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	300,000,000							100 Persentase	480,000,000	Sekretariat Daerah	
						999.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %		100 %	100 %	300,000,000							100 %	480,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	02	2.01	0001	Administrasi Tata Pemerintahan					300,000,000							Pemerintah Kota Lhokseumawe		710,000,000	Sekretariat Daerah
					Tertindakannya Administrasi Tata Pemerintahan						300,000,000							Pemerintah Kota Lhokseumawe		710,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen	67,450,000							4 Dokumen	230,000,000	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen	147,400,000							4 Dokumen	250,000,000	Sekretariat Daerah	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	85,150,000							4 Dokumen	230,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan					147,400,000								250,000,000	Sekretariat Daerah	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	4 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen	147,400,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Dokumen	250,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						85,150,000							230,000,000	Sekretariat Daerah
						Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	85,150,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Dokumen	230,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						67,450,000							230,000,000	Sekretariat Daerah
						Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen	67,450,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Dokumen	230,000,000	Sekretariat Daerah
						Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat						190,000,000							612,130,157	Sekretariat Daerah
						999 Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100 %		100 %	100 %	190,000,000						100 %	612,130,157	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						190,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		612,130,157	Sekretariat Daerah
						Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						190,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		612,130,157	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000						1 Dokumen	231,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Olahrag, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Translitum Linmas		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000						1 Dokumen	160,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB		1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000						1 Dokumen	221,130,157	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						60,000,000							231,000,000	Sekretariat Daerah
						Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	231,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						100,000,000							221,130,157	Sekretariat Daerah
						Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	221,130,157	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						30,000,000							160,000,000	Sekretariat Daerah
						Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahrag, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Translitum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kemudahan dan Olahrag, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Translitum Linmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	160,000,000	Sekretariat Daerah
						Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang dihasilkan						230,000,000							695,000,000	Sekretariat Daerah
						999 Persentase Produk Hukum yang Dhasilkan		100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	230,000,000						100 Persentase	695,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						230,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		695,000,000	Sekretariat Daerah
						Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum						230,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		695,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		16 Kasus		6 Kasus	9 Kasus	100,206,500						16 Kasus	300,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		12 Dokumen		6 Dokumen	8 Dokumen	77,137,500						10 Dokumen	270,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		30 Dokumen		16 Dokumen	25 Dokumen	52,656,000						28 Dokumen	125,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						77,137,500							270,000,000	Sekretariat Daerah
						Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	12 Dokumen		6 Dokumen	8 Dokumen	77,137,500	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Dokumen	270,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						100,206,500							300,000,000	Sekretariat Daerah
						Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	16 Kasus		6 Kasus	9 Kasus	100,206,500	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		16 Kasus	300,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						52,656,000							125,000,000	Sekretariat Daerah
						Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	30 Dokumen		16 Dokumen	25 Dokumen	52,656,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		28 Dokumen	125,000,000	Sekretariat Daerah
130.	4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						485,000,000							1,091,254,710	Sekretariat Daerah
						Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan						195,000,000							476,254,710	Sekretariat Daerah
						999.Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan		100 %		100 %	100 %	195,000,000						100 %	476,254,710	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian						195,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		476,254,710	Sekretariat Daerah
						Terlaksananya Kebijakan Perekonomian						195,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		476,254,710	Sekretariat Daerah



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	65,000,000						4 Dokumen	205,000,000	Sekretariat Daerah
							Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000						2 Dokumen	71,254,710	Sekretariat Daernh
							Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan		5 Laporan	4 Laporan	80,000,000						4 Laporan	200,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						65,000,000							205,000,000	Sekretariat Daernh
						Tertindakannya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	65,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Dokumen	205,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						80,000,000							200,000,000	Sekretariat Daernh
						Tertindakannya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	80,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Laporan	200,000,000	Sekretariat Daerah	
	4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						50,000,000							71,254,710	Sekretariat Daernh
						Tertindakannya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Dokumen	71,254,710	Sekretariat Daerah	
						Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan						140,000,000							125,000,000	Sekretariat Daerah
						999.Efektifitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	100 %		100 %	100 %	140,000,000							100 %	125,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan						140,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		210,000,000	Sekretariat Daerah
						Tertindakannya Administrasi Pembangunan						140,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		210,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	27,500,000						3 Dokumen	40,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	52,500,000						4 Laporan	85,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	60,000,000						36 Laporan	85,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.02	0001	Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan						27,500,000							40,000,000	Sekretariat Daerah
						Tertindakannya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	27,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Dokumen	40,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						60,000,000							85,000,000	Sekretariat Daerah
						Tertindakannya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	36 Laporan		36 Laporan	4 Laporan	60,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		36 Laporan	85,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						52,500,000							85,000,000	Sekretariat Daerah
						Tertindakannya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4 Laporan		4 Laporan	36 Laporan	52,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Laporan	85,000,000	Sekretariat Daerah
						Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa						150,000,000							405,000,000	Sekretariat Daerah
						999.Tingkat Kematangan UKPBJ	9.75 Nilai		9.15 Nilai	9.30 Nilai	150,000,000							9.45 Nilai	405,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						150,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		405,000,000	Sekretariat Daerah
						Tertindakannya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						150,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		405,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	40,000,000						4 Dokumen	70,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	75,000,000						4 Dokumen	220,000,000	Sekretariat Daerah
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	8 Orang		5 Orang	8 Orang	8 Orang	35,000,000						8 Orang	115,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						75,000,000							220,000,000	Sekretariat Daerah
						Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	75,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Dokumen	220,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						40,000,000							70,000,000	Sekretariat Daerah
						Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	40,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Dokumen	70,000,000	Sekretariat Daerah
	4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						35,000,000							115,000,000	Sekretariat Daerah
						Tertindakannya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	8 Orang		5 Orang	3 Orang	35,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		8 Orang	115,000,000	Sekretariat Daerah
	4					Sekretariat DPRK						21,195,215,563							32,419,719,109	Sekretariat DPRK
	4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						21,195,215,563							32,419,719,109	Sekretariat DPRK
	4	02				SEKRETARIAT DPRD						21,195,215,563							32,419,719,109	Sekretariat DPRK
131.	4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						19,678,815,563							26,417,878,289	Sekretariat DPRK
						Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						19,674,315,563							26,396,836,268	Sekretariat DPRK
						999.Nilai SAKIP OPD	75.00 Angka		65.50 Angka	67.00 Angka	19,674,315,563							68.30 Angka	26,396,836,268	Sekretariat DPRK
	4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,000,000					Sekretariat DPRK		11,500,000	Sekretariat DPRK
						Tertindakannya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,000,000					Sekretariat DPRK		11,500,000	Sekretariat DPRK
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000							11,500,000	Sekretariat DPRK
	4	02	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1,000,000							11,500,000	Sekretariat DPRK



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	8 Dokumen	1,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Dokumen	11,500,000	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,117,935,000					ASN Sekretariat DPRK		7,898.911,225	Sekretariat DPRK	
					Tertaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,117,935,000					ASN Sekretariat DPRK		7,898.911,225	Sekretariat DPRK	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2339 Orang/bulan		2327 Orang/bulan	2330 Orang/bulan	5,117,935,000						2333 Orang/bulan	7,898.911,225	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5,117,935,000							7,898.911,225	Sekretariat DPRK	
					Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2339 Orang/bulan		2327 Orang/bulan	2.336 Orang/bulan	5,117,935,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2333 Orang/bulan	7,898.911,225	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,052,500,000							618.678,614	Sekretariat DPRK	
					Tertaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						1,052,500,000							618.678,614	Sekretariat DPRK	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1044 Dokumen		1044 Dokumen	1044 Dokumen	1,000,000							1044 Dokumen	86,640,000	Sekretariat DPRK
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	685,000,000							40 Laporan	95,230,115	Sekretariat DPRK
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4500 Paket		4500 Paket	4500 Paket	257,500,000							4500 Paket	240,270,211	Sekretariat DPRK
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20,000,000							2 Paket	68,180,109	Sekretariat DPRK
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	1,000,000							25 Paket	18,036,018	Sekretariat DPRK
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75 Paket		75 Paket	75 Paket	66,500,000							75 Paket	100,300,150	Sekretariat DPRK
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	21,500,000							2 Paket	10,022,011	Sekretariat DPRK
	4	02	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1,000,000								18,036,018	Sekretariat DPRK
					Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	1,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		25 Paket	18,036,018	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					66,500,000								100,300,150	Sekretariat DPRK
					Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	75 Paket		75 Paket	75 Paket	66,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		75 Paket	100,300,150	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					21,500,000								10,022,011	Sekretariat DPRK
					Tersediannya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	21,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Paket	10,022,011	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					257,500,000								240,270,211	Sekretariat DPRK
					Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4500 Paket		4500 Paket	4500 Paket	257,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4500 Paket	240,270,211	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					20,000,000								68,180,109	Sekretariat DPRK
					Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Paket	68,180,109	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					1,000,000								86,640,000	Sekretariat DPRK
					Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1044 Dokumen		1044 Dokumen	1044 Dokumen	1,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1044 Dokumen	86,640,000	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					685,000,000								95,230,115	Sekretariat DPRK
					Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	685,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		40 Laporan	95,230,115	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200,000,000					Sekretariat DPRK		100,600,550	Sekretariat DPRK	
					Tersediannya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						200,000,000					Sekretariat DPRK		100,600,550	Sekretariat DPRK	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	200,000,000						10 Unit	100,600,550	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					200,000,000							100,600,550	Sekretariat DPRK	
					Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	200,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Unit	100,600,550	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,151,709,563						Sekretariat DPRK		2,680,043,551	Sekretariat DPRK
					Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,151,709,563						Sekretariat DPRK		2,680,043,551	Sekretariat DPRK
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	221,847,243							3 Laporan	393,774,569	Sekretariat DPRK
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	864 Laporan		864 Laporan	864 Laporan	928,362,320							864 Laporan	2,266,137,708	Sekretariat DPRK
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	1,000,000							7 Laporan	15,116,259	Sekretariat DPRK
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan		500 Laporan	500 Laporan	500,000							500 Laporan	5,015,015	Sekretariat DPRK
	4	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					500,000								5,015,015	Sekretariat DPRK



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
											NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan		500 Laporan	12 Laporan	500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		500 Laporan	5,015,015	Sekretariat DPRK	
	4 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						221,847,243							393,774,569	Sekretariat DPRK	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	221,847,243	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Laporan	393,774,569	Sekretariat DPRK	
	4 02 01 2.08 0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1,000,000							15,116,259	Sekretariat DPRK	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	1,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		7 Laporan	15,116,259	Sekretariat DPRK	
	4 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						928,362,320							2,266,137,708	Sekretariat DPRK	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	864 Laporan		864 Laporan	864 Laporan	928,362,320	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		864 Laporan	2,266,137,708	Sekretariat DPRK	
	4 02 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,042,480,000						Sekretariat DPRK dan Anggota DPRK	341,931,065	Sekretariat DPRK	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1,042,480,000						Sekretariat DPRK dan Anggota DPRK	341,931,065	Sekretariat DPRK	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	152,000,000							18 Unit	210,928,434	Sekretariat DPRK
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	818,480,000							7 Unit	80,661,081	Sekretariat DPRK
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	51,000,000							1 Unit	20,140,220	Sekretariat DPRK
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	21,000,000							5 Unit	30,201,330	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						818,480,000								80,661,081	Sekretariat DPRK
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	5 Unit	818,480,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		7 Unit	80,661,081	Sekretariat DPRK	
	4 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						152,000,000								210,928,434	Sekretariat DPRK
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	152,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		18 Unit	210,928,434	Sekretariat DPRK	
	4 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						51,000,000								20,140,220	Sekretariat DPRK
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	51,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	20,140,220	Sekretariat DPRK	
	4 02 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						21,000,000								30,201,330	Sekretariat DPRK
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	1 Unit	21,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Unit	30,201,330	Sekretariat DPRK	
	4 02 01 2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						1,500,000						Anggota DPRK Lhokseumawe	273,546,273	Sekretariat DPRK	
		Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan						1,500,000						Anggota DPRK Lhokseumawe	273,546,273	Sekretariat DPRK	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	500,000							30 Laporan	21,042,021	Sekretariat DPRK
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	500,000							3 Laporan	231,462,231	Sekretariat DPRK
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	500,000							3 Laporan	21,042,021	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.14 0001	Fasilitas Keprotokolan						500,000								21,042,021	Sekretariat DPRK
		Terlaksananya Fasilitas Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan	30 Laporan		30 Laporan	3 Laporan	500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Laporan	21,042,021	Sekretariat DPRK	
	4 02 01 2.14 0002	Fasilitas Komunikasi Pimpinan						500,000								231,462,231	Sekretariat DPRK
		Terlaksananya Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Laporan	231,462,231	Sekretariat DPRK	
	4 02 01 2.14 0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						500,000								21,042,021	Sekretariat DPRK
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Laporan	21,042,021	Sekretariat DPRK	
	4 02 01 2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						10,583,923,000						Anggota DPRK Lhokseumawe	11,559,716,560	Sekretariat DPRK	
		Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan						10,583,923,000						Anggota DPRK Lhokseumawe	11,559,716,560	Sekretariat DPRK	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	350 Orang/Bulan		350 Orang/Bulan	350 Orang/Bulan	10,192,673,000							350 Orang/Bulan	10,939,896,922	Sekretariat DPRK
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang		25 Orang	25 Orang	125,000,000							25 Orang	144,757,823	Sekretariat DPRK
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	125 Paket		125 Paket	125 Paket	266,250,000							125 Paket	475,061,815	Sekretariat DPRK
	4 02 01 2.15 0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						10,192,673,000								10,939,896,922	Sekretariat DPRK
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	350 Orang/Bulan		350 Orang/Bulan	350 Orang/Bulan	10,192,673,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		350 Orang/Bulan	10,939,896,922	Sekretariat DPRK	
	4 02 01 2.15 0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						266,250,000								475,061,815	Sekretariat DPRK



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	125 Paket		125 Paket	25 Paket	266,250,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		125 Paket	475.061,815	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD					125,000,000							144,757,823	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang		25 Orang	25 Orang	125,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		25 Orang	144,757,823	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD					527,768,000					Fraksi dan Anggota DPRK		2,932,950,451	Sekretariat DPRK	
					Tersedianya Layanan Administrasi DPRD						527,768,000					Fraksi dan Anggota DPRK		2,932,950,451	Sekretariat DPRK	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5,000,000						4 Laporan	30,478,365	Sekretariat DPRK	
						Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	522,768,000						48 Laporan	2,902,472,086	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.16	0002	Fasilitas Fraksi DPRD					5,000,000							30,478,365	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Laporan	30,478,365	Sekretariat DPRK	
	4	02	01	2.16	0003	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					522,768,000							2,902,472,086	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	522,768,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		48 Laporan	2,902,472,086	Sekretariat DPRK	
132.	4	02	02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						1,516,400,000							6,001,840,820	Sekretariat DPRK	
					<i>Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan</i>						276,500,000							2,279,498,305	Sekretariat DPRK	
						999 Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat Tepat Waktu		Tepat Tepat Waktu	Tepat Tepat Waktu	276,500,000							Tepat Tepat Waktu	2,279,498,305	Sekretariat DPRK
						999.Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100 %		100 %	100 %	276,500,000							100 %	2,279,498,305	Sekretariat DPRK
	4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					115,000,000					Anggota DPRK Lhokseumawe		869,759,067	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						115,000,000					Anggota DPRK Lhokseumawe		869,759,067	Sekretariat DPRK	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen		Dokumen	11 Dokumen	50,000,000							10 Dokumen	709,799,271	Sekretariat DPRK
						Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000							1 Dokumen	50,803,961	Sekretariat DPRK
						Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000							2 Dokumen	109,155,835	Sekretariat DPRK
	4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program/Pembentukan Peraturan Daerah					60,000,000							50,803,961	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	20 Dokumen	60,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	50,803,961	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					50,000,000							709,799,271	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	10 Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Dokumen	709,799,271	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan					5,000,000							109,155,835	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Dokumen	109,155,835	Sekretariat DPRK	
					<i>Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan</i>						1,054,900,000							3,722,342,515	Sekretariat DPRK	
						999.Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %		100 %	100 %	1,054,900,000							100 %	3,722,342,515	Sekretariat DPRK
	4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran					26,500,000					Anggota DPRK Lhokseumawe		674,125,507	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran						26,500,000					Anggota DPRK Lhokseumawe		674,125,507	Sekretariat DPRK	
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000							1 Dokumen	396,773,021	Sekretariat DPRK
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2,500,000							1 Dokumen	29,855,129	Sekretariat DPRK
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	2,000,000							10 Dokumen	49,807,089	Sekretariat DPRK
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000							1 Dokumen	157,835,893	Sekretariat DPRK
						Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	2,000,000							10 Dokumen	39,854,375	Sekretariat DPRK
	4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS					2,000,000							49,807,089	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Dokumen	49,807,089	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					2,000,000							39,854,375	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Dokumen	39,854,375	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD					5,000,000							396,773,021	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	396,773,021	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan					2,500,000							29,855,129	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	29,855,129	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					15,000,000							157,835,893	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	157,835,893	Sekretariat DPRK	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH			(14)		(15)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
	4	02	02	2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						153,000,000						Pemerintah Kota Lhokseumawe	1,097,642,139	Sekretariat DPRK	
					Tertindakannya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						153,000,000						Pemerintah Kota Lhokseumawe	1,097,642,139	Sekretariat DPRK	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	10 Dokumen			10 Dokumen		4,000,000							10 Dokumen	44,120,240	Sekretariat DPRK
					Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	10 Dokumen			10 Dokumen		10,000,000							10 Dokumen	12,232,278	Sekretariat DPRK
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10 Laporan			10 Laporan		7,250,000							10 Laporan	248,814,525	Sekretariat DPRK
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	10 Laporan			10 Laporan		107,250,000							10 Laporan	200,166,499	Sekretariat DPRK
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10 Laporan			10 Laporan		7,250,000							10 Laporan	282,525,587	Sekretariat DPRK
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	10 Laporan			10 Laporan		5,000,000							10 Laporan	12,048,072	Sekretariat DPRK
					Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	10 Laporan			10 Laporan		7,250,000							10 Laporan	248,808,300	Sekretariat DPRK
					Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	10 Dokumen			10 Dokumen		5,000,000							10 Dokumen	48,926,638	Sekretariat DPRK
	4	02	02	2.03	0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						107,250,000								200,166,499	Sekretariat DPRK
					Tertindakannya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	10 Laporan		10 Laporan	1 Laporan	107,250,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Laporan	200,166,499	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.03	0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						7,250,000								248,814,525	Sekretariat DPRK
					Tertindakannya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	7,250,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Laporan	248,814,525	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.03	0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						7,250,000								248,808,300	Sekretariat DPRK
					Tertindakannya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	7,250,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Laporan	248,808,300	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.03	0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						7,250,000								282,525,587	Sekretariat DPRK
					Tertindakannya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	7,250,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Laporan	282,525,587	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.03	0005 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						5,000,000								12,048,072	Sekretariat DPRK
					Tertindakannya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Laporan	12,048,072	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.03	0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						10,000,000								12,232,278	Sekretariat DPRK
					Tertindakannya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Dokumen	12,232,278	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.03	0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran						4,000,000								44,120,240	Sekretariat DPRK
					Tertindakannya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	4,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Dokumen	44,120,240	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.03	0008 Pembahasan Laporan Keterangan/Pertanggungjawaban Kepala Daerah						5,000,000								48,926,638	Sekretariat DPRK
					Tertindakannya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Dokumen	48,926,638	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						287,000,000							Anggota DPRK Lhokseumawe	1,352,442,923	Sekretariat DPRK
					Meningkatnya Kapasitas DPRD						287,000,000							Anggota DPRK Lhokseumawe	1,352,442,923	Sekretariat DPRK
					Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	25 Dokumen			25 Dokumen	25 Dokumen	60,000,000							25 Dokumen	252,758,757	Sekretariat DPRK
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen			12 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000							12 Dokumen	31,058,108	Sekretariat DPRK
					Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	100,000,000							4 Dokumen	674,551,675	Sekretariat DPRK
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000							2 Dokumen	6,345,000	Sekretariat DPRK
					Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 Orang			36 Orang	36 Orang	60,500,000							36 Orang	184,972,103	Sekretariat DPRK
	4	02	02	2.04	0002 Pendalaman Tugas DPRD						60,500,000								202,757,280	Sekretariat DPRK
					Tertindakannya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	25 Dokumen		25 Dokumen	1 Dokumen	60,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		25 Dokumen	252,758,757	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.04	0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						60,500,000								184,972,103	Sekretariat DPRK
					Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	36 Orang		36 Orang	36 Orang	60,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		36 Orang	184,972,103	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.04	0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						60,500,000								202,757,280	Sekretariat DPRK



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	48 Orang		48 Orang	48 Orang	60,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		48 Orang	202,757,280	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat					1,000,000							31,058,108	Sekretariat DPRK	
					Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Dokumen	31,058,108	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD					5,000,000							6,345,000	Sekretariat DPRK	
					Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Dokumen	6,345,000	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD					100,000,000							674,551,675	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Dokumen	674,551,675	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					905,900,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		1,686,794,084	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						905,900,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		1,686,794,084	Sekretariat DPRK	
						Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	900,900,000						3 Dokumen	1,618,162,722	Sekretariat DPRK	
						Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	5,000,000							3 Laporan	55,220,330	Sekretariat DPRK
	4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah					5,000,000							55,220,330	Sekretariat DPRK	
					Terselengeranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Laporan	55,220,330	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses					900,900,000							1,618,162,722	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	900,900,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Dokumen	1,618,162,722	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					2,000,000					Anggota DPRK Lhokseumawe		188,844,940	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD						2,000,000					Anggota DPRK Lhokseumawe		188,844,940	Sekretariat DPRK	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2,000,000						1 Laporan	188,844,940	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD					2,000,000							188,844,940	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	188,844,940	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah					6,000,000					Pemerintah Kota dan Anggota DPRK		57,296,315	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Pembahasan Kerja Sama Daerah						6,000,000					Pemerintah Kota dan Anggota DPRK		57,296,315	Sekretariat DPRK	
						Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000						2 Dokumen	51,219,989	Sekretariat DPRK	
						Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5,000,000						12 Dokumen	6,076,326	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah					5,000,000							6,076,326	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Dokumen	6,076,326	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi					1,000,000							51,219,989	Sekretariat DPRK	
					Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Dokumen	51,219,989	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD					21,000,000					Anggota DPRK Lhokseumawe		74,935,845	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD						21,000,000					Anggota DPRK Lhokseumawe		74,935,845	Sekretariat DPRK	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000						12 Dokumen	12,233,282	Sekretariat DPRK	
						Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	10,000,000							18 Dokumen	12,130,581	Sekretariat DPRK
						Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1,000,000							6 Laporan	50,571,982	Sekretariat DPRK
	4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD					1,000,000							50,571,982	Sekretariat DPRK	
					Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	6 Laporan		6 Laporan	3 Laporan	1,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		6 Laporan	50,571,982	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					10,000,000							12,233,282	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Dokumen	12,233,282	Sekretariat DPRK	
	4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD					10,000,000							12,130,581	Sekretariat DPRK	
					Terlaksananya Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	18 Dokumen		18 Dokumen	3 Dokumen	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		18 Dokumen	12,130,581	Sekretariat DPRK	
					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						5,826,068,760							7,017,525,232	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						5,826,068,760							7,017,525,232	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01			PERENCANAAN						5,755,458,760							6,797,525,232	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
133.	5	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4,933,197,160							5,501,646,160	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						4,928,197,160							5,443,646,160	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	



NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT					INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF			
														NASIONAL					DAERAH	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						999.Nilai SAKIP OPD	77.50 Angka		69.10 Angka		70.15 Angka	4,928,197,160						73.30 Angka	5,443,646,160	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,500,000					Bappeda Kota Lhokseumawe		25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,500,000					Bappeda Kota Lhokseumawe		25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen		2,500,000						8 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2,500,000							25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		8 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4,133,782,000					Aparatur Bappeda Kota Lhokseumawe		4,900,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Terlaksananya Administrasi Keuangan Pada Bappeda						4,133,782,000					Aparatur Bappeda Kota Lhokseumawe		4,900,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/bulan		840 Orang/bulan	840 Orang/bulan		4,133,782,000						840 Orang/bulan	4,900,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4,133,782,000							4,900,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/bulan		840 Orang/bulan	840 Orang/bulan	4,133,782,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		840 Orang/bulan	4,900,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5,000,000					Aparatur Bappeda Kota Lhokseumawe		5,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5,000,000					Aparatur Bappeda Kota Lhokseumawe		5,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang		5,000,000						10 Orang	5,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						5,000,000							5,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	5 Orang	5,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Orang	5,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						113,640,000					Aparatur dan Kantor Bappeda Kota Lhokseumawe		70,250,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						113,640,000					Aparatur dan Kantor Bappeda Kota Lhokseumawe		70,250,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen		730 Dokumen	730 Dokumen		1,140,000						730 Dokumen	1,250,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan		100,000,000						60 Laporan	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1150 Paket		1150 Paket	1150 Paket		2,500,000						1150 Paket	3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket		2,500,000						30 Paket	3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	80 Paket		7,500,000						80 Paket	8,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7,500,000							8,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	10 Paket	7,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		80 Paket	8,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2,500,000							3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1150 Paket		1150 Paket	80 Paket	2,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1150 Paket	3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggunaan						2,500,000							3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggunaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggunaan yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	2,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Paket	3,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,140,000							1,250,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	730 Dokumen		730 Dokumen	1 Dokumen	1,140,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		730 Dokumen	1,250,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100,000,000							55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	100,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		60 Laporan	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						313,359,000					Kantor Bappeda Kota Lhokseumawe		90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Tersedianya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						313,359,000					Kantor Bappeda Kota Lhokseumawe		90,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit			0 Unit	1 Unit	30,000,000						1 Unit	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit			5 Unit	5 Unit	283,359,000						5 Unit	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF			
															NASIONAL			DAERAH		(15)	(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
	5	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30,000,000						35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	30 Unit	30,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						283,359,000						55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
						Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		5 Unit	13 Unit	283,359,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Unit	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						246,616,160					Aparatur dan Kantor Bappeda Kota Daerah	253,516,160	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
						Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						246,616,160					Aparatur dan Kantor Bappeda Kota Lhokseumawe	253,516,160	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	133,600,000						84 Laporan	140,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	708 Laporan		708 Laporan	708 Laporan	112,016,160						708 Laporan	112,016,160	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	1,000,000						30 Laporan	1,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1,000,000						1,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
						Tertelaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan		30 Laporan	10 Laporan	1,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Laporan	1,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						133,600,000						140,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
						Tersediannya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	64 Laporan	133,600,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		84 Laporan	140,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						112,016,160						112,016,160	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
						Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	708 Laporan		708 Laporan	708 Laporan	112,016,160	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		708 Laporan	112,016,160	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						118,300,000					Sarana dan Prasarana Kantor Bappeda Kota Lhokseumawe	157,380,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
						Tertelaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						118,300,000					Sarana dan Prasarana Kantor Bappeda Kota Lhokseumawe	157,380,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	35,000,000						1 Unit	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	42,000,000						3 Unit	69,100,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26,300,000						1 Unit	28,280,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	15,000,000						8 Unit	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						26,300,000						28,280,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26,300,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	28,280,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						42,000,000						69,100,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
						Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	42,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Unit	69,100,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						35,000,000						40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
						Tertelaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	35,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15,000,000						20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
						Tertelaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	15,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		8 Unit	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
134.	5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						407,171,600						899,879,072	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
						Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah						397,171,600						899,879,072	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
							999.Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100 %		100 %	100 %	397,171,600						100 %	899,879,072	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
							999.Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100 %		100 %	100 %	397,171,600						100 %	899,879,072	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	



KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	NASIONAL	DAERAH	(14)	(16)	(17)	
	5	01	02	2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						254,921,600					Pemerintah Kota Lhokseumawe	875,679,072	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Tertelaksananya Perencanaan dan Pendanaan Kota Lhokseumawe						254,921,600					Pemerintah Kota Lhokseumawe	875,679,072	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	12 Berita Acara		12 Berita Acara	12 Berita Acara	5,000,000						12 Berita Acara	66,550,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	21,000,000						1 Berita Acara	172,763,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	28,921,600						1 Berita Acara	235,289,654	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	190,000,000						4 Dokumen	361,565,618	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	5,000,000						3 Dokumen	26,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	204 Usulan		204 Usulan	204 Usulan	5,000,000						204 Usulan	13,310,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						5,000,000							26,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Dokumen	26,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						21,000,000							172,763,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Tertelaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	21,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Berita Acara	172,763,800	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						5,000,000							66,550,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Tertelaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	12 Berita Acara		12 Berita Acara	12 Berita Acara	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Berita Acara	66,550,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						28,921,600							235,289,654	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Tertelaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	28,921,600	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Berita Acara	235,289,654	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	0006	Penyisipan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan						5,000,000							13,310,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	204 Usulan		204 Usulan	204 Usulan	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		204 Usulan	13,310,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						190,000,000							361,565,618	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Ditertapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	190,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Dokumen	361,565,618	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						112,250,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Tertelaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						112,250,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	40,750,000						3 Laporan	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	71,500,000						2 Laporan	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						71,500,000							-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Tertelaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	71,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Laporan	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						40,750,000							-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	40,750,000	Kota Lhokseumawe	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Laporan	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						40,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe	24,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Tertelaksananya Perencanaan Pembangunan yang Berbasis e-Planning						40,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe	24,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000						1 Dokumen	24,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						40,000,000							24,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Tertelaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	24,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
135	5	01	03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						415,090,000							396,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia						139,940,000							76,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Regio PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %		100 %	100 %	139,940,000						100 %	76,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						139,940,000					Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe	151,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
															NASIONAL		DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	24,940,000						Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe	2 Dokumen	151,000,000 15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000							1 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25,000,000							1 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15,000,000							1 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20,000,000							1 Laporan	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15,000,000							1 Laporan	16,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10,000,000							3 Laporan	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
							Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20,000,000							1 Laporan	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						10,000,000								15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	15,000,000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						15,000,000								20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	20,000,000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						20,000,000								25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	25,000,000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						10,000,000								15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Laporan	15,000,000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						24,940,000								15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Terkoordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	24,940,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Dokumen	15,000,000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						25,000,000								20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	20,000,000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						20,000,000								25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	25,000,000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						15,000,000								16,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Mon Geudong 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	16,000,000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA						157,150,000								85,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL					DAERAH
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)
							999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	157,150,000					100 Persentase	85,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						157,150,000				Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		95,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tertelaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						157,150,000				Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		95,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen			2 Dokumen	2 Dokumen	27,000,000					2 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	14,000,000					1 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	8,000,000					1 Laporan	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	8,000,000					1 Laporan	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	100,150,000					1 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						27,000,000						25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen			2 Dokumen	1 Dokumen	27,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	2 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						14,000,000						20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tertelaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	14,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	1 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						8,000,000						10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tertelaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	1 Laporan	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						100,150,000						30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100,150,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	1 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						8,000,000						10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tertelaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	1 Laporan	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan						118,000,000						60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persentase			100 Persentase	100 Persentase	118,000,000					100 Persentase	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						118,000,000				Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Tertelaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						118,000,000				Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe		150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000					1 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000					1 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	10,000,000					1 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan			3 Laporan	3 Laporan	10,000,000					3 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	15,000,000					1 Laporan	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan			3 Laporan	3 Laporan	10,000,000					3 Laporan	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF				
											NASIONAL	DAERAH							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan		2 Laporan		30,000,000						2 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan		23,000,000						1 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		10,000,000							15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
			Terkelolannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen		10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		10,000,000							20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan		10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		15,000,000							25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan		15,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur		30,000,000							20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan		2 Laporan		30,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		10,000,000							15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
			Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen		1 Dokumen		10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		10,000,000							20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
			Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan		3 Laporan		10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		10,000,000							15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
			Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan		3 Laporan		10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Laporan	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		23,000,000							20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
			Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan		23,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		70,610,000							220,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
136.	5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		40,610,000							70,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
						Meningkatnya pemanfaatan hasil Kelitbangan dalam perencanaan pembangunan		40,610,000							70,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
						999. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100 %		66.67 %	75.00 %	40,610,000				80.00 %	70,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		15,610,000						Pemerintah Kota Lhokseumawe	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
						Tersedianya Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		15,610,000						Pemerintah Kota Lhokseumawe	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
						Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15,610,000				1 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		15,610,000							30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
						Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15,610,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		25,000,000						Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Stakeholder Lainnya	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
						Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Teknologi		25,000,000						Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Stakeholder Lainnya	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25,000,000				1 Laporan	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		25,000,000							40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Tertelaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
137.	5	05	03		PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH						30,000,000							150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan						30,000,000							150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					999.Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	999.Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	83.78 %		76.00 %	78.57 %	30,000,000						80.65 %	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	05	03	2.02	Investasi dan Inovasi						30,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Stakeholder Lainnya		150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Tersedianya Dokumen Invensi dan Inovasi						30,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Stakeholder Lainnya		150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30,000,000						1 Laporan	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
	5	05	03	2.02	0012 Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi						30,000,000							150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Tertelaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Badan Pengelolaan Keuangan Daerah						115,005,783,241							149,645,856,361	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						115,005,783,241							149,645,856,361	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02			KEUANGAN						115,005,783,241							149,645,856,361	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
138.	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						23,758,117,720							14,192,054,613	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						23,758,117,720							14,156,054,613	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					999.Nilai SAKIP OPD	999.Nilai SAKIP OPD	68.00 Angka		66.25 Angka	66.50 Angka	23,758,117,720							66.75 Angka	14,156,054,613	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						20,000,000					Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		25,400,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah						20,000,000					Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		25,400,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	20,000,000						8 Dokumen	25,400,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20,000,000							25,400,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	20,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		8 Dokumen	25,400,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						22,519,175,867					Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		11,850,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Tertelaksananya Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN						22,519,175,867					Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		11,850,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan		80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	22,519,175,867						80 Orang/bulan	11,850,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						22,519,175,867							11,850,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan		80 Orang/bulan	80 Orang/bulan	22,519,175,867	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		80 Orang/bulan	11,850,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						277,000,000					Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		575,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						277,000,000					Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		575,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	105,000,000						2 Dokumen	220,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50,000,000						4 Laporan	170,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40,000,000						2 Paket	80,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengemasan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengemasan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15,258,400						2 Paket	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2,000,000						1 Paket	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	64,741,600						3 Paket	75,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						2,000,000							15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	2,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Paket	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						64,741,600							75,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	64,741,600	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Paket	75,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40,000,000							80,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Paket	80,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
	5	02	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						15,258,400								15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15,258,400	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Paket	15,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						50,000,000								170,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Laporan	170,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						105,000,000								220,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Tertindakannya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	105,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Dokumen	220,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						120,000,000						Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		120,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Tersedia dan terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah						120,000,000						Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		120,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	120,000,000							6 Unit	120,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						120,000,000								120,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		6 Unit	6 Unit	120,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		6 Unit	120,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						642,221,853						Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		1,434,654,613	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						642,221,853						Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		1,434,654,613	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	284,241,853							2 Laporan	440,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	355,480,000							2 Laporan	985,154,613	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2,500,000							1 Laporan	9,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2,500,000								9,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Tertindakannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	9,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						284,241,853								440,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	284,241,853	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Laporan	440,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						355,480,000								985,154,613	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	355,480,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Laporan	985,154,613	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						179,720,000						Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		187,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Terpeliharanya Barang Milik Daerah						179,720,000						Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe		187,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	25,000,000							2 Unit	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	134,720,000							8 Unit	45,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit		30 Unit	30 Unit	15,000,000							30 Unit	21,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	5,000,000							2 Unit	21,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						134,720,000								45,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	134,720,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		8 Unit	45,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						25,000,000								100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	25,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Unit	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						15,000,000								21,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit		30 Unit	30 Unit	15,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Unit	21,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5,000,000							21,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	5,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Unit	21,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
139.	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						90,257,301,521							132,745,486,748	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan						90,217,301,521							132,233,486,748	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						999.Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	21.17 %		20.07 %	20.30 %		90,217,301,521						20.62 %	132,233,486,748	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						999.Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	40.85 %		41.51 %	41.49 %		90,217,301,521						41.36 %	132,233,486,748	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						999.Persentase laporan keuangan tepat waktu	100.00 %		100.00 %	100.00 %		90,217,301,521						100.00 %	132,233,486,748	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						999.Persentase Penurunan SILPA	-16.67 %		-37.50 %	-20.00 %		90,217,301,521						-12.50 %	132,233,486,748	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						999.Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	97.87 %		95.78 %	95.35 %		90,217,301,521						98.31 %	132,233,486,748	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						642,000,000					Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		2,595,834,223	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Tersusunnya Dokumen Rencana Anggaran Daerah						642,000,000					Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		2,595,834,223	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen		40,000,000						2 Dokumen	81,033,750	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen		40,000,000						2 Dokumen	74,963,854	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen		75,000,000						4 Dokumen	206,836,619	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang		44 Orang	44 Orang		337,000,000						44 Orang	1,749,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen		80,000,000						2 Dokumen	242,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen		70,000,000						2 Dokumen	242,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						40,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Dokumen	81,033,750	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	40,000,000						2 Dokumen	81,033,750	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						40,000,000							74,963,854	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	40,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Dokumen	74,963,854	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						80,000,000							242,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Dokumen	242,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						70,000,000							242,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	70,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Dokumen	242,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						75,000,000							206,836,619	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	75,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Dokumen	206,836,619	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						337,000,000							1,749,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	44 Orang		44 Orang	44 Orang	337,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		44 Orang	1,749,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						200,000,000					Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		1,085,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Tesusunnya Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						200,000,000					Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe		1,085,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen		7,389,000						5 Dokumen	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH			(15)		(16)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	29 Dokumen		29 Dokumen	29 Dokumen	30,184,800							29 Dokumen	175,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	3,581,100							4 Dokumen	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	170 Dokumen		170 Dokumen	170 Dokumen	5,044,800							170 Dokumen	230,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	71,453,900							68 Dokumen	220,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	17,172,800							12 Laporan	60,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	272 Orang		272 Orang	272 Orang	54,214,200							272 Orang	220,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	10,959,400							5 Dokumen	80,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						7,389,000								50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Terkelaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	7,389,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Dokumen	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						5,044,800								230,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Terkelaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	170 Dokumen		170 Dokumen	170 Dokumen	5,044,800	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		170 Dokumen	230,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						30,184,800								175,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Terkelaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	29 Dokumen		29 Dokumen	29 Dokumen	30,184,800	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		29 Dokumen	175,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						3,581,100								50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Terkelaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	3,581,100	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Dokumen	50,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)						17,172,800								60,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Terkelaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	17,172,800	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	60,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						71,453,900								220,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Terkelaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	71,453,900	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desan Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		68 Dokumen	220,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						10,959,400								80,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5 Dokumen		5 Dokumen	10,959,400	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Dokumen	80,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					54,214,200							220,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	272 Orang		272 Orang	54,214,200	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		272 Orang	220,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					200,000,000						Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe	564,652,525	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					200,000,000						Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe	564,652,525	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9,800,000						4 Dokumen	35,191,800	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9,200,000						2 Dokumen	30,908,587	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	72 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	10,710,000						72 Laporan	34,265,700	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	60,000,000						40 Laporan	114,141,825	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10,810,000						4 Laporan	58,344,300	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	140 Orang		140 Orang	140 Orang	29,380,000						140 Orang	57,881,250	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	63,000,000						4 Dokumen	203,510,475	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7,100,000						1 Dokumen	30,408,588	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					10,710,000							34,265,700	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	72 Laporan		72 Laporan	10,710,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		72 Laporan	34,265,700	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban					9,800,000							35,191,800	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen		4 Dokumen	9,800,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Dokumen	35,191,800	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					10,810,000							58,344,300	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	4 Laporan		4 Laporan	10,810,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Laporan	58,344,300	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					60,000,000							114,141,825	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	40 Laporan		40 Laporan	60,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		40 Laporan	114,141,825	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					63,000,000							203,510,475	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	63,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Dokumen	203,510,475	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah					9,200,000							30,908,587	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	9,200,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Dokumen	30,908,587	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah					7,100,000							30,408,588	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7,100,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	30,408,588	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					29,380,000							57,881,250	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	140 Orang		140 Orang	140 Orang	29,380,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		140 Orang	57,881,250	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					89,215,301,521					Desa / Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe		128,500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan						89,215,301,521					Desa / Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe		128,500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	272 Laporan		272 Laporan	272 Laporan	89,215,301,521						272 Laporan	128,500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan					89,215,301,521							128,500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	272 Laporan		272 Laporan	272 Laporan	89,215,301,521	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Desa	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		272 Laporan	128,500,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
140.	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					430,364,000							1,277,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Meningkatnya tata kelola aset daerah						430,364,000							1,152,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						999.Persentase Penambahan Nilai Aset tetap	2.20 %		2.74 %	2.37 %	430,364,000						2.60 %	1,152,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah					430,364,000					Perangkat Daerah Lingkup Kota Lhokseumawe		1,277,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Tersusunnya Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah						430,364,000					Perangkat Daerah Lingkup Kota Lhokseumawe		1,277,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8,500,000						1 Dokumen	57,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75,000,000							1 Laporan	77,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17,500,000							1 Laporan	160,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	106,015,500							10 Laporan	550,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	34 Laporan		34 Laporan	34 Laporan	21,000,000							34 Laporan	67,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	175,848,500							5 Laporan	240,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	11,000,000							2 Dokumen	57,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15,500,000							1 Dokumen	67,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					15,500,000							67,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	67,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah					11,000,000							57,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	11,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Dokumen	57,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	03	2.01	0005	Penatusahaan Barang Milik Daerah					175,848,500							240,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Terlaksananya Penatusahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatusahaan Barang Milik Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	175,848,500	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Laporan	240,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah					17,500,000							160,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	160,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah					106,015,500							550,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	106,015,500	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Laporan	550,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					8,500,000							57,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	57,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					21,000,000							67,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	34 Laporan		34 Laporan	34 Laporan	21,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		34 Laporan	67,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						75,000,000							77,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Terususnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Dean Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	77,500,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
141.	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						560,000,000							1,430,815,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						560,000,000							1,162,907,500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							999.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	100.00 %		75.00 %	75.00 %	560,000,000						100.00 %	1,162,907,500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	10.01 %		10.29 %	10.63 %	560,000,000						9.76 %	1,162,907,500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							999.Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	91.41 %		90.14 %	90.03 %	560,000,000						90.31 %	1,162,907,500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						560,000,000					Masyarakat dan Para Pelaku Usaha Lingkup Kota Lhokseumawe		1,430,815,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Terupdate dan terkelolanya data Objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						560,000,000					Masyarakat dan Para Pelaku Usaha Lingkup Kota Lhokseumawe		1,430,815,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	9,941,847						10 Dokumen	35,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	27,049,999						3 Dokumen	55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemagihan Pajak Daerah	500 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	165,130,700						500 Dokumen	198,450,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	42,940,000						6 Dokumen	198,450,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	17,935,300						6 Dokumen	69,457,500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Dokumen Ketenapan Pajak Daerah	75975 Dokumen		62068 Dokumen	63819 Dokumen	17,633,999						65561 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	53,994,000						6 Laporan	69,457,500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	98,167,999						10 Laporan	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	38,827,879						10 Laporan	85,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	9,119,999						10 Laporan	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	75525 Obyek Pajak		61648 Obyek Pajak	63389 Obyek Pajak	25,239,999						65061 Obyek Pajak	65,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit		5 Unit	5 Unit	54,018,279						5 Unit	335,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						27,049,999						55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	27,049,999	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Dokumen	55,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						9,119,999							20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	9,119,999	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Laporan	20,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						54,018,279							335,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit		5 Unit	5 Unit	54,018,279	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Unit	335,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	04	2.01	0005	Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						98,167,999							200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	98,167,999	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Laporan	200,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						38,827,879							85,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Terlaksananya Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	38,827,879	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Laporan	85,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						25,239,999							65,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
						Terpenuhihnya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	75525 Obyek Pajak		61648 Obyek Pajak	63.389 Obyek Pajak	25,239,999	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		65061 Obyek Pajak	65,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						17,633,999							100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	75975 Dokumen		62068 Dokumen	63.819 Dokumen	17,633,999	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		65561 Dokumen	100,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						9,941,847							35,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Tertaklaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	9,941,847	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Dokumen	35,000,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah						165,130,700							198,450,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Tertaklaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	500 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	165,130,700	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		500 Dokumen	198,450,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						17,935,300							69,457,500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Tertaklaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	17,935,300	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		6 Dokumen	69,457,500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						42,940,000							198,450,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Tertaklaksananya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	42,940,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		6 Dokumen	198,450,000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						53,994,000							69,457,500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Tertaklaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	53,994,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kuta Blang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		6 Laporan	69,457,500	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						59,725,170,918							9,753,673,394	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						59,725,170,918							9,753,673,394	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03				KEPEGAWAIAN						59,155,170,918							6,873,213,394	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
142.	5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA						58,542,170,918							5,398,213,394	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						58,527,170,918							5,321,038,394	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							1.Nilai SAKIP OPD	65.50 Angka		63.5 Angka	64.00 Angka	58,527,170,918							64.50 Angka	5,321,038,394	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10,000,000					Aparatur Pemko Lhokseumawe		22,050,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10,000,000					Aparatur Pemko Lhokseumawe		22,050,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	10,000,000						10 Dokumen	22,050,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10,000,000							22,050,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Dokumen	22,050,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						58,189,570,918					Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe		4,413,307,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						58,189,570,918					Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe		4,413,307,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan		67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	58,189,570,918							67 Orang/bulan	4,413,307,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						58,189,570,918							4,413,307,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	67 Orang/bulan		67 Orang/bulan	67 Orang/bulan	58,189,570,918	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		67 Orang/bulan	4,413,307,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						92,500,000					Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe		249,495,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah						92,500,000					Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe		249,495,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70,000,000							12 Laporan	103,040,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	7,500,000							10 Paket	34,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	5,000,000						30 Paket	24,255,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	10,000,000						30 Paket	88,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10,000,000							88,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Paket	88,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7,500,000							34,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	7,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Paket	34,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						5,000,000							24,255,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Paket	24,255,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						70,000,000							103,040,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	103,040,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						183,300,000					Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe		531,448,394	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah						183,300,000					Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe		531,448,394	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	92,800,000						12 Laporan	170,887,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan			2 Laporan	2 Laporan	88,000,000						2 Laporan	356,702,144	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	2,500,000						12 Laporan	3,858,750	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2,500,000							3,858,750	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	3,858,750	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						92,800,000							170,887,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	92,800,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	170,887,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						88,000,000							356,702,144	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	88,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		2 Laporan	356,702,144	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						66,800,000					Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe		181,912,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						66,800,000					Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe		181,912,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			5 Unit	5 Unit	30,000,000						5 Unit	66,150,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit			1 Unit	1 Unit	13,500,000						1 Unit	38,587,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	1 Unit	18,300,000						1 Unit	38,587,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			5 Unit	5 Unit	5,000,000						5 Unit	38,587,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						18,300,000							38,587,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	18,300,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	38,587,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						13,500,000							38,587,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	38,587,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						30,000,000							66,150,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	30,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Unit	66,150,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5,000,000							38,587,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Unit	38,587,500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
143.	5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						613,000,000							1,475,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian						543,000,000							1,475,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							1. Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	16.52 %		14.32 %	15.49 %	543,000,000						15.83 %	1,475,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							2. Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	82.50 %		81.48 %	81.88 %	543,000,000						82.16 %	1,475,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							3. Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	70.55 %		68.82 %	69.25 %	543,000,000						69.69 %	1,475,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							999. Skor Pengembangan Karir ASN dalam penilaian Sistem Merit	60.00 Skor		15.00 Skor	30.00 Skor	543,000,000						40.00 Skor	1,475,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						55,000,000					CASN dan Aparatur BKPSDM Lhokseumawe		264,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Tersedianya Laporan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						55,000,000					CASN dan Aparatur BKPSDM Lhokseumawe		264,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000						1 Dokumen	12,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000						1 Dokumen	22,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	30,000,000						1 Lembaga	230,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	02	2.01	0008	Facilitasi Lembaga Profesi ASN						30,000,000							230,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	30,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Lembaga	230,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						20,000,000							22,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	22,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian						5,000,000							12,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	12,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN						105,000,000					Aparatur Pemko Lhokseumawe		186,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Tersedianya laporan Mutasi dan Promosi ASN						105,000,000					Aparatur Pemko Lhokseumawe		186,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000						1 Dokumen	28,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	70,000,000						10 Dokumen	75,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
							Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	250 Dokumen		250 Dokumen	250 Dokumen	15,000,000						250 Dokumen	83,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN						20,000,000							28,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	28,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						15,000,000							83,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	250 Dokumen		250 Dokumen	250 Dokumen	15,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		250 Dokumen	83,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN						70,000,000							75,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	70,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Dokumen	75,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN						343,000,000					Aparatur Pemko Lhokseumawe		945,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Tersedianya Laporan Pengembangan Kompetensi ASN						343,000,000					Aparatur Pemko Lhokseumawe		945,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan	8 Orang			5 Orang	6 Orang	68,000,000							7 Orang	70,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	150 Orang			125 Orang	130 Orang	25,000,000							135 Orang	130,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	3 Dokumen			3 Dokumen	3 Dokumen	250,000,000							3 Dokumen	745,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center						250,000,000							745,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	250,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Dokumen	745,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						25,000,000							130,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	150 Orang		125 Orang	125 Orang	25,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		135 Orang	130,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	02	2.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN						68,000,000							70,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Terlaksananya Fasilitas Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan	8 Orang		5 Orang	5 Orang	68,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		7 Orang	70,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						110,000,000					Aparatur Pemko Lhokseumawe		80,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Tersedianya Laporan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						110,000,000					Aparatur Pemko Lhokseumawe		80,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	250 Orang			250 Orang	250 Orang	10,000,000							250 Orang	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000							1 Dokumen	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	50,000,000							1 Laporan	45,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						50,000,000							-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						10,000,000							35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	250 Orang		250 Orang	250 Orang	10,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		250 Orang	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	03	02	2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN						50,000,000							45,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	45,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						570,000,000							2,880,460,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
144.	5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						570,000,000							2,880,460,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional						570,000,000							2,880,460,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
						999 Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	3.19 %			4.33 %	4.61 %	570,000,000							4.90 %	2,880,460,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						999 Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	2.60 %			1.59 %	1.73 %	570,000,000							2.02 %	2,880,460,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						570,000,000					Aparatur Pemko Lhokseumawe		2,880,460,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Tersedianya Laporan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						570,000,000					Aparatur Pemko Lhokseumawe		2,880,460,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	570,000,000						5 Laporan	2,880,460,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan					570,000,000							2,880,460,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	570,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Laporan	2,880,460,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Inspektorat						8,055,865,211							13,160,028,230	Inspektorat
	6				UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						8,055,865,211							13,160,028,230	Inspektorat
	6	01			INSPEKTORAT DAERAH						8,055,865,211							13,160,028,230	Inspektorat
145.	6	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6,363,458,000							7,953,321,455	Inspektorat
					Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						6,303,458,000							7,953,321,455	Inspektorat
						999 Nilai SAKIP OPD	68.70 Angka		68.30 Angka	68.40 Angka	6,303,458,000						68.50 Angka	7,953,321,455	Inspektorat
	6	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,500,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		6,011,831	Inspektorat
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,500,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		6,011,831	Inspektorat
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1,500,000						5 Dokumen	6,011,831	Inspektorat
	6	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1,500,000							6,011,831	Inspektorat
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Dokumen	6,011,831	Inspektorat
	6	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5,842,538,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		6,087,998,660	Inspektorat
					Tertelaksananya Administrasi Keuangan Pada Perangkat Daerah						5,842,538,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		6,087,998,660	Inspektorat
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan		83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	5,842,538,000						83 Orang/bulan	6,087,998,660	Inspektorat
	6	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5,842,538,000							6,087,998,660	Inspektorat
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang/bulan		83 Orang/bulan	83 Orang/bulan	5,842,538,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		83 Orang/bulan	6,087,998,660	Inspektorat
	6	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						146,760,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		450,000,000	Inspektorat
					Tertelaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						146,760,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		450,000,000	Inspektorat
						Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		7 Orang	7 Orang	146,760,000						10 Orang	450,000,000	Inspektorat
	6	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					146,760,000							450,000,000	Inspektorat
					Tertelaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		7 Orang	7 Orang	146,760,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Orang	450,000,000	Inspektorat
	6	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						59,500,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		398,034,136	Inspektorat
					Tertelaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						59,500,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		398,034,136	Inspektorat
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	50,000,000						8 Laporan	350,900,075	Inspektorat
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5,000,000						12 Paket	5,014,262	Inspektorat
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2,000,000						4 Paket	9,025,671	Inspektorat
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2,500,000						12 Paket	33,094,128	Inspektorat
	6	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					2,500,000							33,094,128	Inspektorat
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Paket	33,094,128	Inspektorat
	6	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					5,000,000							5,014,262	Inspektorat
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Paket	5,014,262	Inspektorat
	6	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					2,000,000							9,025,671	Inspektorat
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Paket	9,025,671	Inspektorat
	6	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					50,000,000							350,900,075	Inspektorat
					Tertelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		8 Laporan	350,900,075	Inspektorat
	6	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		-	Inspektorat
					Tersedianya Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						50,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		-	Inspektorat
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	50,000,000						10 Unit	-	Inspektorat
	6	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					50,000,000							-	Inspektorat



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
											NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	3 Unit	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Unit	-	Inspektoral	
	6	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			167,160,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		328,226,358	Inspektoral	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						167,160,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		328,226,358	Inspektoral	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	95,960,000						12 Laporan	96,233,713	Inspektoral	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan			1 Laporan	1 Laporan	70,700,000						1 Laporan	230,989,793	Inspektoral	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan			4 Laporan	4 Laporan	500,000						4 Laporan	1,002,852	Inspektoral	
	6	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		500,000							1,002,852	Inspektoral	
		Terkelaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Laporan	1,002,852	Inspektoral	
	6	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		95,960,000							96,233,713	Inspektoral	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan			12 Laporan	12 Laporan	95,960,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	96,233,713	Inspektoral	
	6	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		70,700,000							230,989,793	Inspektoral	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70,700,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	230,989,793	Inspektoral	
	6	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			96,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		683,050,470	Inspektoral	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						96,000,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		683,050,470	Inspektoral	
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit			1 Unit	1 Unit	5,000,000						1 Unit	400,480,000	Inspektoral	
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit			5 Unit	5 Unit	68,500,000						5 Unit	128,866,529	Inspektoral	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit			1 Unit	1 Unit	17,500,000						1 Unit	33,394,984	Inspektoral	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit			20 Unit	20 Unit	5,000,000						20 Unit	120,308,957	Inspektoral	
	6	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		17,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	33,394,984	Inspektoral	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel				Inspektoral	
	6	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		68,500,000							128,866,529	Inspektoral	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	68,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Unit	128,866,529	Inspektoral	
	6	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5,000,000							400,480,000	Inspektoral	
		Terkelaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		1 Unit	1 Unit	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	400,480,000	Inspektoral	
	6	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		5,000,000							120,308,957	Inspektoral	
		Terkelaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		20 Unit	20 Unit	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		20 Unit	120,308,957	Inspektoral	
146.	6	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			1,420,546,764							4,067,893,264	Inspektoral	
					Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan keuangan			1,420,546,764							4,067,893,264	Inspektoral	
					999.Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	85.3 %		82.40 %	83.07 %		1,420,546,764				84.59 %	4,067,893,264	Inspektoral
	6	01	02	2.01	Penyeleenggaraan Pengawasan Internal			1,130,483,764					Pemerintah Kota Lhokseumawe		3,278,274,025	Inspektoral	
		Terkelaksananya pengawasan internal	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	108,498,500					Pemerintah Kota Lhokseumawe	10 Dokumen	361,482,047	Inspektoral	
		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan		50,000,000						1 Kesepakatan	137,911,578	Inspektoral	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22 Laporan		25 Laporan	22 Laporan	22 Laporan	299,043,564						22 Laporan	827,059,275	Inspektoral	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintahan Daerah	9 Laporan		15 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	116,102,300						9 Laporan	358,413,853	Inspektoral	
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintahan Daerah	10 Laporan		7 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	126,619,400						10 Laporan	408,813,074	Inspektoral	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	35 Laporan		25 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	278,335,000						35 Laporan	779,828,125	Inspektoral	
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	18 Laporan		10 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	151,885,000						18 Laporan	404,766,073	Inspektoral	
	6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		126,619,400							408,813,074	Inspektoral	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	126,619,400	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Laporan	408,813,074	Inspektoral	
	6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah					116,102,300							358,413,853	Inspektoral	
					Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	9 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	116,102,300	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		9 Laporan	358,413,853	Inspektoral	
	6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja					151,885,000							404,766,073	Inspektoral	
					Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	18 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	151,885,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		18 Laporan	404,766,073	Inspektoral	
	6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan					278,335,000							779,828,125	Inspektoral	
					Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	35 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	278,335,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		35 Laporan	779,828,125	Inspektoral	
	6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa					299,043,564							827,059,275	Inspektoral	
					Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	22 Laporan		25 Laporan	25 Laporan	299,043,564	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		22 Laporan	827,059,275	Inspektoral	
	6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal					50,000,000							137,911,578	Inspektoral	
					Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Kesepakatan	137,911,578	Inspektoral	
	6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP					108,498,500							361,482,047	Inspektoral	
					Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	108,498,500	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Dokumen	361,482,047	Inspektoral	
	6	01	02	2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						290,063,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		789,619,239	Inspektoral	
					Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu						290,063,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		789,619,239	Inspektoral	
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan		15 Laporan	10 Laporan	253,943,000						10 Laporan	655,685,693	Inspektoral	
						Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	36,120,000						Laporan	133,933,546	Inspektoral	
	6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah					36,120,000							133,933,546	Inspektoral	
					Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	36,120,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		Laporan	133,933,546	Inspektoral	
	6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					253,943,000							655,685,693	Inspektoral	
					Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	10 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	253,943,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Laporan	655,685,693	Inspektoral	
147.	6	01	03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						271,860,447							1,138,813,511	Inspektoral	
					Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi						271,860,447							1,138,813,511	Inspektoral	
						999.Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APSP)	Level 3 (3.5) Level		Level 3 (3.2) Level	Level 3 (3.2) Level	271,860,447						Level 3 (3.5) Level	1,138,813,511	Inspektoral	
						999.Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (3.6) Level		Level 3 (3.3) Level	Level 3 (3.4) Level	271,860,447						Level 3 (3.5) Level	1,138,813,511	Inspektoral	
	6	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan						119,190,447					Pemerintah Kota Lhokseumawe		608,603,497	Inspektoral	
					Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitas Pengawasan						119,190,447					Pemerintah Kota Lhokseumawe		608,603,497	Inspektoral	
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi		1 Rekomendasi	5 Rekomendasi	38,155,447						5 Rekomendasi	264,745,485	Inspektoral	
						Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	10 Rekomendasi		10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	81,035,000						10 Rekomendasi	343,858,012	Inspektoral	
	6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan					81,035,000							343,858,012	Inspektoral	
					Terlaksananya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	10 Rekomendasi		10 Rekomendasi	10 Rekomendasi	81,035,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Rekomendasi	343,858,012	Inspektoral	
	6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan					38,155,447							264,745,485	Inspektoral	
					Terlaksananya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	38,155,447	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		5 Rekomendasi	264,745,485	Inspektoral	
	6	01	03	2.02	Pendampingan dan Asistensi						152,670,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		530,210,014	Inspektoral	
					Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi						152,670,000					Pemerintah Kota Lhokseumawe		530,210,014	Inspektoral	
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	31,425,000						1 Kegiatan	103,114,494	Inspektoral	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	34 perangkat daerah		34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	30,000,000						34 perangkat daerah	123,827,624	Inspektoral	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 perangkat daerah		34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	41,245,000						34 perangkat daerah	102,753,567	Inspektoral	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	34 perangkat daerah		34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	50,000,000						34 perangkat daerah	200,514,329	Inspektoral	



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB			
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF				
											NASIONAL	DAERAH							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
	6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah					50,000,000								
						Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	50,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	34 perangkat daerah	200,514,329	Inspektoral	
	6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi					41,245,000								
						Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	41,245,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	34 perangkat daerah	102,753,567	Inspektoral	
	6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					31,425,000								
						Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	31,425,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	1 Kegiatan	103,114,494	Inspektoral	
	6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas					30,000,000								
						Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	34 perangkat daerah	30,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	34 perangkat daerah	123,827,624	Inspektoral	
						Kecamatan Banda Sakti					2,351,229,720						3,737,624,427	Kecamatan Banda Sakti	
	7					UNSUR KEWILAYAHAN					2,351,229,720						3,737,624,427	Kecamatan Banda Sakti	
	7	01				KECAMATAN					2,351,229,720						3,737,624,427	Kecamatan Banda Sakti	
148.	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2,281,229,720						3,396,125,052	Kecamatan Banda Sakti	
						Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah					2,276,729,720						3,378,760,677	Kecamatan Banda Sakti	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	999.Nilai SAKIP OPD	62.40 Angka	62.28 Angka	62.30 Angka	2,276,729,720					62.32 Angka	3,378,760,677	Kecamatan Banda Sakti	
						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1,000,000					Kantor Camat Banda Sakti	20,000,000	Kecamatan Banda Sakti	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	1,000,000					Kantor Camat Banda Sakti	20,000,000	Kecamatan Banda Sakti	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1,000,000						9 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Banda Sakti
						Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	9 Dokumen	7 Dokumen	1,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	9 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Banda Sakti	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,047,147,000					Pegawai Kantor Camat Banda Sakti	2,561,340,778	Kecamatan Banda Sakti	
						Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,047,147,000					Pegawai Kantor Camat Banda Sakti	2,561,340,778	Kecamatan Banda Sakti	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 Orang/bulan	392 Orang/bulan	392 Orang/bulan	2,047,147,000					392 Orang/bulan	2,561,340,778	Kecamatan Banda Sakti	
						Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	392 Orang/bulan	392 Orang/bulan	392 Orang/bulan	2,047,147,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	392 Orang/bulan	2,561,340,778	Kecamatan Banda Sakti	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					24,500,000					Pegawai Kantor Camat Banda Sakti	198,429,080	Kecamatan Banda Sakti	
						Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					24,500,000					Pegawai Kantor Camat Banda Sakti	198,429,080	Kecamatan Banda Sakti	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan		22 Laporan	40 Laporan	20,000,000						43 Laporan	127,338,750	Kecamatan Banda Sakti
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	1,500,000						8 Paket	17,364,375	Kecamatan Banda Sakti
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	1,500,000						7 Paket	17,364,375	Kecamatan Banda Sakti
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket		48 Paket	50 Paket	1,500,000						52 Paket	36,361,580	Kecamatan Banda Sakti
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	48 Paket	48 Paket	50 Paket	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	52 Paket	36,361,580	Kecamatan Banda Sakti	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	8 Paket	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	8 Paket	17,364,375	Kecamatan Banda Sakti	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	7 Paket	17,364,375	Kecamatan Banda Sakti	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47 Laporan	22 Laporan	40 Laporan	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	43 Laporan	127,338,750	Kecamatan Banda Sakti	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					183,582,720					Pegawai Kantor Camat Banda Sakti	409,371,845	Kecamatan Banda Sakti	
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					183,582,720					Pegawai Kantor Camat Banda Sakti	409,371,845	Kecamatan Banda Sakti	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	46,200,000						48 Laporan	60,000,000	Kecamatan Banda Sakti
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	528 Laporan		528 Laporan	528 Laporan	136,882,720						528 Laporan	343,583,720	Kecamatan Banda Sakti
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	500,000						30 Laporan	5,788,125	Kecamatan Banda Sakti
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					500,000						5,788,125	Kecamatan Banda Sakti	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Laporan	5,788,125	Kecamatan Banda Sakti
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					46,200,000							60,000,000	Kecamatan Banda Sakti
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	46,200,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		48 Laporan	60,000,000	Kecamatan Banda Sakti
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					136,882,720							343,583,720	Kecamatan Banda Sakti
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	528 Laporan		528 Laporan	528 Laporan	136,882,720	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		528 Laporan	343,583,720	Kecamatan Banda Sakti
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					25,000,000						Pegawai Kantor Camat Banda Sakti	206,983,349	Kecamatan Banda Sakti
					Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						25,000,000						Pegawai Kantor Camat Banda Sakti	206,983,349	Kecamatan Banda Sakti
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3,000,000						1 Unit	92,610,000	Kecamatan Banda Sakti
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	18,000,000						1 Unit	73,856,475	Kecamatan Banda Sakti
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1,500,000						3 Unit	11,576,250	Kecamatan Banda Sakti
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	15 Unit	2,500,000						15 Unit	28,940,624	Kecamatan Banda Sakti
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					18,000,000							73,856,475	Kecamatan Banda Sakti
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	18,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	73,856,475	Kecamatan Banda Sakti
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					3,000,000							92,610,000	Kecamatan Banda Sakti
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	92,610,000	Kecamatan Banda Sakti
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1,500,000							11,576,250	Kecamatan Banda Sakti
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Unit	11,576,250	Kecamatan Banda Sakti
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2,500,000							28,940,624	Kecamatan Banda Sakti
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit		15 Unit	15 Unit	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		15 Unit	28,940,624	Kecamatan Banda Sakti
149.	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					34,000,000							208,372,500	Kecamatan Banda Sakti
						Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					34,000,000							208,372,500	Kecamatan Banda Sakti
						999.Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	70.00 %		65.00 %	66.00 %	34,000,000						69.00 %	208,372,500	Kecamatan Banda Sakti
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					34,000,000					Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti		208,372,500	Kecamatan Banda Sakti
						Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					34,000,000					Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti		208,372,500	Kecamatan Banda Sakti
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7,000,000						1 Laporan	173,643,750	Kecamatan Banda Sakti
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	27,000,000						1 Lembaga Kemasyarakatan	34,728,750	Kecamatan Banda Sakti
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					27,000,000							34,728,750	Kecamatan Banda Sakti
						Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	27,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Lembaga Kemasyarakatan	34,728,750	Kecamatan Banda Sakti
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					7,000,000							173,643,750	Kecamatan Banda Sakti
						Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	173,643,750	Kecamatan Banda Sakti
150.	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					8,000,000							23,152,500	Kecamatan Banda Sakti
						Meningkatnya lingkungan yang aman, tertib, dan tertanam					8,000,000							23,152,500	Kecamatan Banda Sakti
						999.Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	8,000,000						100 %	23,152,500	Kecamatan Banda Sakti
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Kertertiban Umum					8,000,000					-		23,152,500	Kecamatan Banda Sakti
						Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Kertertiban Umum					8,000,000					-		23,152,500	Kecamatan Banda Sakti
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8,000,000						1 Laporan	23,152,500	Kecamatan Banda Sakti



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF			
															NASIONAL	DAERAH						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)						
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						8,000,000									23,152,500	Kecamatan Banda Sakti
						Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan			1 Laporan	8,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	23,152,500	Kecamatan Banda Sakti	
151.	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						15,000,000									40,516,875	Kecamatan Banda Sakti
						Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam						15,000,000									40,516,875	Kecamatan Banda Sakti
						999.Persentase kebijakan urusan pemerintahan		100 %		100 %	100 %	15,000,000							100 %		40,516,875	Kecamatan Banda Sakti
	7	01	05	2.01		Penyeleenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemusatan Kepala Daerah						15,000,000						Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti			40,516,875	Kecamatan Banda Sakti
						Terlaksananya Penyeleenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pemusatan Kepala Daerah						15,000,000						Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti			40,516,875	Kecamatan Banda Sakti
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen			1 Dokumen	15,000,000							1 Dokumen		40,516,875	Kecamatan Banda Sakti
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						15,000,000									40,516,875	Kecamatan Banda Sakti
						Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen			1 Dokumen	15,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	40,516,875	Kecamatan Banda Sakti	
152.	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						13,000,000									69,457,500	Kecamatan Banda Sakti
						Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong						13,000,000									69,457,500	Kecamatan Banda Sakti
						999.persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100 %		100 %	100 %	13,000,000							100 %		69,457,500	Kecamatan Banda Sakti
	7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						13,000,000							Aparatur Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti		69,457,500	Kecamatan Banda Sakti
						Terlaksananya Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						13,000,000							Aparatur Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti		69,457,500	Kecamatan Banda Sakti
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		18 Dokumen			18 Dokumen	5,000,000							18 Dokumen		17,364,375	Kecamatan Banda Sakti
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		1 Laporan			1 Laporan	8,000,000							1 Laporan		52,093,125	Kecamatan Banda Sakti
	7	01	06	2.01	0001	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa						5,000,000									17,364,375	Kecamatan Banda Sakti
						Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	18 Dokumen			18 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		18 Dokumen	17,364,375	Kecamatan Banda Sakti	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						8,000,000									52,093,125	Kecamatan Banda Sakti
						Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan			1 Laporan	8,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	52,093,125	Kecamatan Banda Sakti	
						Kecamatan Blang Mangat						1,963,761,904									3,001,472,024	Kecamatan Blang Mangat
	7					UNSUR KEWILAYAHAN						1,963,761,904									3,001,472,024	Kecamatan Blang Mangat
	7	01				KECAMATAN						1,963,761,904									3,001,472,024	Kecamatan Blang Mangat
153.	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,890,761,904									2,861,472,024	Kecamatan Blang Mangat
						Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						1,886,261,904									2,761,472,024	Kecamatan Blang Mangat
						999.Nilai SAKIP OPD		60.42 Angka		60.20 Angka	60.30 Angka	1,886,261,904								60.35 Angka	2,761,472,024	Kecamatan Blang Mangat
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,000,000							Aparatur Pemerintah		20,000,000	Kecamatan Blang Mangat
						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,000,000							Aparatur Pemerintah		20,000,000	Kecamatan Blang Mangat
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10 Dokumen			10 Dokumen	1,000,000								10 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Blang Mangat
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1,000,000									20,000,000	Kecamatan Blang Mangat
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen			10 Dokumen	1,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Blang Mangat Desa Ulee Blang Mane 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,643,914,000							Aparatur Pemerintah		2,007,598,000	Kecamatan Blang Mangat
						Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,643,914,000							Aparatur Pemerintah		2,007,598,000	Kecamatan Blang Mangat
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		264 Orang/bulan			264 Orang/bulan	1,643,914,000								264 Orang/bulan	2,007,598,000	Kecamatan Blang Mangat
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1,643,914,000									2,007,598,000	Kecamatan Blang Mangat
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264 Orang/bulan			264 Orang/bulan	1,643,914,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Blang Mangat Desa Ulee Blang Mane 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		264 Orang/bulan	2,007,598,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						24,500,000							Aparatur Pemerintah		226,210,200	Kecamatan Blang Mangat
						Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah						24,500,000							Aparatur Pemerintah		226,210,200	Kecamatan Blang Mangat
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30 Laporan			30 Laporan	20,000,000								30 Laporan	100,000,000	Kecamatan Blang Mangat
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		600 Paket			600 Paket	1,500,000								600 Paket	44,500,000	Kecamatan Blang Mangat
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengordaan yang Disediakan		30 Paket			30 Paket	1,500,000								30 Paket	30,000,000	Kecamatan Blang Mangat
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		70 Paket			70 Paket	1,500,000								70 Paket	51,710,200	Kecamatan Blang Mangat
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1,500,000									51,710,200	Kecamatan Blang Mangat
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket			70 Paket	1,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Blang Mangat Desa Ulee Blang Mane 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		70 Paket	51,710,200	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1,500,000									44,500,000	Kecamatan Blang Mangat



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF		
											NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	600 Paket	600 Paket	600 Paket	1,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Blang Mangat Desa Ulee Blang Mane 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		600 Paket	44,500,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1,500,000							30,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	30 Paket	30 Paket	1,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Blang Mangat Desa Ulee Blang Mane 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Paket	30,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20,000,000							100,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
			Tertelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	30 Laporan	1 Laporan	20,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Blang Mangat Desa Ulee Blang Mane 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Laporan	100,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		199,347,904					Aparatur Pemerintah		408,863,824	Kecamatan Blang Mangat	
			Tertelaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					199,347,904					Aparatur Pemerintah		408,863,824	Kecamatan Blang Mangat	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	45,298,544							72 Laporan	45,298,544	Kecamatan Blang Mangat	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	288 Laporan	288 Laporan	288 Laporan	153,549,360							288 Laporan	358,565,280	Kecamatan Blang Mangat	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	500,000							30 Laporan	5,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		500,000							5,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
			Tertelaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Blang Mangat Desa Ulee Blang Mane 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Laporan	5,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		45,298,544							45,298,544	Kecamatan Blang Mangat	
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	72 Laporan	72 Laporan	45,298,544	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Blang Mangat Desa Ulee Blang Mane 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		72 Laporan	45,298,544	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		153,549,360							358,565,280	Kecamatan Blang Mangat	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	288 Laporan	288 Laporan	288 Laporan	153,549,360	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Blang Mangat Desa Ulee Blang Mane 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		288 Laporan	358,565,280	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		22,000,000					Aparatur Pemerintah		198,800,000	Kecamatan Blang Mangat	
			Tertelaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					22,000,000					Aparatur Pemerintah		198,800,000	Kecamatan Blang Mangat	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	18,000,000							1 Unit	63,800,000	Kecamatan Blang Mangat	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1,500,000							3 Unit	10,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	15 Unit	2,500,000							15 Unit	25,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		18,000,000							63,800,000	Kecamatan Blang Mangat	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	18,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Blang Mangat Desa Ulee Blang Mane 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	63,800,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1,500,000							10,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
			Tertelaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	3 Unit	1,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Blang Mangat Desa Ulee Blang Mane 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Unit	10,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2,500,000							25,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
			Tertelaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	1 Unit	2,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Blang Mangat Desa Ulee Blang Mane 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		15 Unit	25,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
154.	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		30,000,000							20,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
			Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					30,000,000							20,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
			999.Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desas dan Kelurahan		70.00 %	65.00 %	66.00 %	30,000,000						69.00 %	20,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		30,000,000					Masyarakat		20,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					30,000,000					Masyarakat		20,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000						1 Lembaga Kemasyarakatan	20,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		30,000,000							20,000,000	Kecamatan Blang Mangat	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	30,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Blang Mangat Desa Ulee Blang Mane 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Lembaga Kemasyarakatan	20,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
155.	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						10,000,000							30,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
					Meningkatnya lingkungan yang aman, tertib, dan tenteram						10,000,000							30,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
						999.Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat	100 %		100 %	100 %	10,000,000						100 %	30,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						10,000,000				-			30,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
					Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						10,000,000				-			30,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10,000,000						1 Laporan	30,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					10,000,000							30,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
					Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Blang Mangat Desa Ulee Blang Mane 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	30,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
156.	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						15,000,000							35,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
					Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam						15,000,000							35,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
						999.Persentase kebijakan urusan pemerintahan	100 %		100 %	100 %	15,000,000						100 %	35,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah						15,000,000					Masyarakat		35,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
					Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Perutusan Kepala Daerah						15,000,000					Masyarakat		35,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000						1 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					15,000,000							35,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
					Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Blang Mangat Desa Ulee Blang Mane 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	35,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
157.	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						18,000,000							55,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
					Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong						18,000,000							55,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
						999.persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %		100 %	100 %	18,000,000						100 %	55,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	06	2.01	Facilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						18,000,000					Masyarakat		55,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
					Terlaksananya Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						18,000,000					Masyarakat		55,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000						1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13,000,000						1 Laporan	35,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	06	2.01	0001	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa danPeraturan Kepala Desa					5,000,000							20,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
					Terlaksananya Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Blang Mangat Desa Ulee Blang Mane 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					13,000,000							35,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
					Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	35,000,000	Kecamatan Blang Mangat	
					Kecamatan Muara Satu						1,652,868,800							2,320,490,737	Kecamatan Muara Satu	
	7				UNSUR KEWILAYAHAN						1,652,868,800							2,320,490,737	Kecamatan Muara Satu	
	7	01			KECAMATAN						1,652,868,800							2,320,490,737	Kecamatan Muara Satu	
158.	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,582,868,800							2,218,490,737	Kecamatan Muara Satu	
					Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						1,579,868,800							2,218,490,737	Kecamatan Muara Satu	
						999.Nilai SAKIP OPD	61.00 Angka		60.25 Angka	60.40 Angka	1,579,868,800							60.60 Angka	2,218,490,737	Kecamatan Muara Satu
	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,000,000					Perangkat Daerah dan Aparatur Kecamatan		20,000,000	Kecamatan Muara Satu	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah						1,000,000					Perangkat Daerah dan Aparatur Kecamatan		20,000,000	Kecamatan Muara Satu	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1,000,000						6 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					1,000,000							20,000,000	Kecamatan Muara Satu	
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	1,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		6 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,371,586,000					Aparatur Perangkat Daerah		1,398,025,428	Kecamatan Muara Satu	
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						1,371,586,000					Aparatur Perangkat Daerah		1,398,025,428	Kecamatan Muara Satu	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	204 Orang/bulan		204 Orang/bulan	204 Orang/bulan	1,371,586,000						204 Orang/bulan	1,398,025,428	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					1,371,586,000							1,398,025,428	Kecamatan Muara Satu	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
														NASIONAL	DAERAH			(15)		(16)
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	204 Orang/bulan		204 Orang/bulan	204 Orang/bulan	1,371,586,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		204 Orang/bulan	1,398,025,428	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						24,500,000					Aparatur Perangkat Daerah		182,880,000	Kecamatan Muara Satu	
					Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						24,500,000					Aparatur Perangkat Daerah		182,880,000	Kecamatan Muara Satu	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	20,000,000						40 Laporan	110,000,000	Kecamatan Muara Satu	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	1,500,000						30 Paket	30,000,000	Kecamatan Muara Satu	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	730 Paket		730 Paket	730 Paket	1,500,000						730 Paket	2,880,000	Kecamatan Muara Satu	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	80 Paket	1,500,000						80 Paket	40,000,000	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	01	2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	80 Paket	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		80 Paket	40,000,000	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	01	2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Paket	30,000,000	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	01	2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	730 Paket		730 Paket	730 Paket	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		730 Paket	2,880,000	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	01	2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		40 Laporan	110,000,000	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	60,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	Aparatur Perangkat Daerah dan Lingkungan Kantor Kecamatan		369,666,360	Kecamatan Muara Satu	
					Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						165,282,800					Aparatur Perangkat Daerah dan Lingkungan Kantor Kecamatan		369,666,360	Kecamatan Muara Satu	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	60,000,000						84 Laporan	90,202,680	Kecamatan Muara Satu	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	104,782,800						3 Laporan	70,000,000	Kecamatan Muara Satu	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan		45 Laporan	50 Laporan	500,000						50 Laporan	209,463,680	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	01	2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan		45 Laporan	45 Laporan	500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		50 Laporan	209,463,680	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	01	2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	60,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		84 Laporan	90,202,680	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	01	2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	104,782,800	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Laporan	70,000,000	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	18,000,000					Aparatur Perangkat Daerah sebagai Pengguna Kendaraan Dinas		247,918,949	Kecamatan Muara Satu	
					Terseleenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2,500,000					Aparatur Perangkat Daerah sebagai Pengguna Kendaraan Dinas		247,918,949	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	01	2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	18,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	44,000,000	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	01	2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	203,918,949	Kecamatan Muara Satu	
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	203,918,949	Kecamatan Muara Satu	
199.	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						44,850,000							20,000,000	Kecamatan Muara Satu	
					Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						44,850,000							20,000,000	Kecamatan Muara Satu	
						999.Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		90.00 %	100 %	44,850,000						100 %	20,000,000	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						44,850,000					Masyarakat Gampong, Aparatur gampong dan Lembaga Kemasyarakatan Desa		20,000,000	Kecamatan Muara Satu	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						44,850,000					Masyarakat Gampong, Aparatur gampong dan Lembaga Kemasyarakatan Desa		20,000,000	Kecamatan Muara Satu	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
													LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
															NASIONAL	DAERAH					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		(15)	(16)	(17)
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	44,850,000						1 Lembaga Kemasyarakatan	20,000,000	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						44,850,000							20,000,000	Kecamatan Muara Satu	
						Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	44,850,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Lembaga Kemasyarakatan	20,000,000	Kecamatan Muara Satu	
160.	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						20,150,000							57,000,000	Kecamatan Muara Satu	
						Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh Perangkat Daerah						20,150,000							57,000,000	Kecamatan Muara Satu	
							999. Persentase kebijakan urusan pemerintahan	100 %		100 %	100 %	20,150,000						100 %	57,000,000	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penetapan Kepala Daerah						20,150,000					Masyarakat, Aparatur Pemerintahan di Kecamatan		57,000,000	Kecamatan Muara Satu	
						Pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20,150,000					Masyarakat, Aparatur Pemerintahan di Kecamatan		57,000,000	Kecamatan Muara Satu	
							Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20,150,000						1 Dokumen	57,000,000	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20,150,000							57,000,000	Kecamatan Muara Satu	
						Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20,150,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Dokumen	57,000,000	Kecamatan Muara Satu	
161.	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						5,000,000							25,000,000	Kecamatan Muara Satu	
						Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong						5,000,000							25,000,000	Kecamatan Muara Satu	
							999. persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %		100 %	100 %	5,000,000						100 %	25,000,000	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						5,000,000					Aparatur Pemerintahan Desa Gampong, Perangkat Desa dan Lembaga Desa		25,000,000	Kecamatan Muara Satu	
						Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Dokumen gampong						5,000,000					Aparatur Pemerintahan Desa Gampong, Perangkat Desa dan Lembaga Desa		25,000,000	Kecamatan Muara Satu	
							Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000						4 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Muara Satu	
	7	01	06	2.01	0001	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						5,000,000							25,000,000	Kecamatan Muara Satu	
						Terlaksananya Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Dokumen	25,000,000	Kecamatan Muara Satu	
						Kecamatan Muara Dua						1,837,215,800							2,555,119,804	Kecamatan Muara Dua	
7						UNSUR KEWILAYAHAN						1,837,215,800							2,555,119,804	Kecamatan Muara Dua	
7	01					Kecamatan Muara Dua						1,837,215,800							2,555,119,804	Kecamatan Muara Dua	
162.	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,767,215,800							2,358,119,804	Kecamatan Muara Dua	
						Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						1,767,215,800							2,343,119,804	Kecamatan Muara Dua	
							999. Nilai SAKIP OPD	61.40 Angka		60.60 Angka	60.80 Angka	1,767,215,800						61.00 Angka	2,343,119,804	Kecamatan Muara Dua	
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,000,000					Perangkat Daerah dan Aparatur Kecamatan		30,000,000	Kecamatan Muara Dua	
						Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah						1,000,000					Perangkat Daerah dan Aparatur Kecamatan		30,000,000	Kecamatan Muara Dua	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	1,000,000						8 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Muara Dua	
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1,000,000							30,000,000	Kecamatan Muara Dua	
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		8 Dokumen	15 Dokumen	1,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		8 Dokumen	30,000,000	Kecamatan Muara Dua	
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,527,883,000					Aparatur Perangkat Daerah		1,760,000,000	Kecamatan Muara Dua	
						Terlaksananya Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1,527,883,000					Aparatur Perangkat Daerah		1,760,000,000	Kecamatan Muara Dua	
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 Orang/bulan		308 Orang/bulan	308 Orang/bulan	1,527,883,000						308 Orang/bulan	1,760,000,000	Kecamatan Muara Dua	
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						1,527,883,000							1,760,000,000	Kecamatan Muara Dua	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 Orang/bulan		308 Orang/bulan	308 Orang/bulan	1,527,883,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		308 Orang/bulan	1,760,000,000	Kecamatan Muara Dua	
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						34,500,000					Aparatur Perangkat Daerah dan Pegawai Kecamatan		170,000,000	Kecamatan Muara Dua	
						Terlaksananya Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						34,500,000					Aparatur Perangkat Daerah dan Pegawai Kecamatan		170,000,000	Kecamatan Muara Dua	
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan		45 Laporan	45 Laporan	20,000,000						45 Laporan	120,000,000	Kecamatan Muara Dua	
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1150 Paket		1150 Paket	1150 Paket	7,000,000							15,000,000	Kecamatan Muara Dua	
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengiriman yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	1,500,000							15,000,000	Kecamatan Muara Dua	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	80 Paket	6,000,000							20,000,000	Kecamatan Muara Dua	
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6,000,000							20,000,000	Kecamatan Muara Dua	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket		80 Paket	1.150 Paket	6,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		80 Paket	20,000,000	Kecamatan Muara Dua	
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7,000,000							15,000,000	Kecamatan Muara Dua	



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1150 Paket		1150 Paket	1.150 Paket	7,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1150 Paket	15,000,000	Kecamatan Muara Dua
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					1,500,000							15,000,000	Kecamatan Muara Dua
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Paket	15,000,000	Kecamatan Muara Dua
	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					20,000,000							120,000,000	Kecamatan Muara Dua
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan		45 Laporan	45 Laporan	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		45 Laporan	120,000,000	Kecamatan Muara Dua
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					180,332,800					Aparatur Perangkat Daerah dan Lingkungan Kantor Kecamatan		222,049,925	Kecamatan Muara Dua
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						180,332,800					Aparatur Perangkat Daerah dan Lingkungan Kantor Kecamatan		222,049,925	Kecamatan Muara Dua
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	40,000,000						84 Laporan	88,434,000	Kecamatan Muara Dua
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		15 Laporan	10 Laporan	139,832,800						10 Laporan	128,103,675	Kecamatan Muara Dua
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan		45 Laporan	45 Laporan	500,000						50 Laporan	5,512,250	Kecamatan Muara Dua
	7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					500,000							5,512,250	Kecamatan Muara Dua
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan		45 Laporan	50 Laporan	500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		50 Laporan	5,512,250	Kecamatan Muara Dua
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					40,000,000							88,434,000	Kecamatan Muara Dua
					Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		84 Laporan	84 Laporan	40,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		84 Laporan	88,434,000	Kecamatan Muara Dua
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					139,832,800							128,103,675	Kecamatan Muara Dua
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		15 Laporan	1 Laporan	139,832,800	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		10 Laporan	128,103,675	Kecamatan Muara Dua
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					23,500,000					Aparatur Perangkat Daerah sebagai pengguna kendaraan dinas		176,069,879	Kecamatan Muara Dua
					Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						23,500,000					Aparatur Perangkat Daerah sebagai pengguna kendaraan dinas		176,069,879	Kecamatan Muara Dua
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3,000,000						1 Unit	115,762,500	Kecamatan Muara Dua
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	18,000,000						1 Unit	50,307,379	Kecamatan Muara Dua
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2,500,000						1 Unit	10,000,000	Kecamatan Muara Dua
	7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					18,000,000							50,307,379	Kecamatan Muara Dua
					Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	18,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	50,307,379	Kecamatan Muara Dua
	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					3,000,000							115,762,500	Kecamatan Muara Dua
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	115,762,500	Kecamatan Muara Dua
	7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					2,500,000							10,000,000	Kecamatan Muara Dua
					Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	10,000,000	Kecamatan Muara Dua
163.	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						35,000,000							95,000,000	Kecamatan Muara Dua
					Meningkatnya Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						35,000,000							95,000,000	Kecamatan Muara Dua
						999 Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %		100 %	100 %	35,000,000						100 %	95,000,000	Kecamatan Muara Dua
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					35,000,000					Masyarakat Gampong, Aparatur Gampong, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa		95,000,000	Kecamatan Muara Dua
					Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						35,000,000					Masyarakat Gampong, Aparatur Gampong, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa		95,000,000	Kecamatan Muara Dua
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	35,000,000						3 Lembaga Kemasyarakatan	95,000,000	Kecamatan Muara Dua
	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					35,000,000							95,000,000	Kecamatan Muara Dua
					Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3 Lembaga Kemasyarakatan		1 Lembaga Kemasyarakatan	3 Lembaga Kemasyarakatan	35,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		3 Lembaga Kemasyarakatan	95,000,000	Kecamatan Muara Dua
164.	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5,000,000							15,000,000	Kecamatan Muara Dua
					Meningkatnya lingkungan yang aman, tertib, dan tentram						5,000,000							15,000,000	Kecamatan Muara Dua



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						999. Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat		100 %		100 %	100 %	5,000,000						100 %	15,000,000	Kecamatan Muara Dua
	7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum						5,000,000					Masyarakat Gampong, Aparatur Gampong, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa		15,000,000	Kecamatan Muara Dua
						Terlaksananya Persentase penyelesaian Keluhan Masyarakat						5,000,000					Masyarakat Gampong, Aparatur Gampong, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa		15,000,000	Kecamatan Muara Dua
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		-		-	-	5,000,000						-	15,000,000	Kecamatan Muara Dua
	7	01	04	7.03	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						5,000,000							15,000,000	Kecamatan Muara Dua
						Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-		-	1 Laporan	5,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	-	15,000,000	Kecamatan Muara Dua
165.	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						18,000,000							57,000,000	Kecamatan Muara Dua
						Meningkatnya Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam						18,000,000							57,000,000	Kecamatan Muara Dua
						999. Persentase kebijakan urusan pemerintahan		100 %		100 %	100 %	18,000,000						100 %	57,000,000	Kecamatan Muara Dua
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Pengawasan Kepala Daerah						18,000,000					Masyarakat, Aparatur Pemerintahan di Kecamatan		57,000,000	Kecamatan Muara Dua
						Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan						18,000,000					Masyarakat, Aparatur Pemerintahan di Kecamatan		57,000,000	Kecamatan Muara Dua
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen			12 Dokumen	12 Dokumen	18,000,000						12 Dokumen	57,000,000	Kecamatan Muara Dua
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						18,000,000							57,000,000	Kecamatan Muara Dua
						Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	18,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	12 Dokumen	57,000,000	Kecamatan Muara Dua
166.	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						12,000,000							30,000,000	Kecamatan Muara Dua
						Meningkatnya Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong						12,000,000							30,000,000	Kecamatan Muara Dua
						999. persentase rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100 %		100 %	100 %	12,000,000						100 %	30,000,000	Kecamatan Muara Dua
	7	01	06	2.01		Facilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						12,000,000					Aparatur Pemerintahan Desa Gampong, Perangkat Desa, dan Lembaga Desa		30,000,000	Kecamatan Muara Dua
						Terlaksananya rekomendasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa						12,000,000					Aparatur Pemerintahan Desa Gampong, Perangkat Desa, dan Lembaga Desa		30,000,000	Kecamatan Muara Dua
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen			4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000						4 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Muara Dua
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan			3 Laporan	3 Laporan	7,000,000						3 Laporan	10,000,000	Kecamatan Muara Dua
	7	01	06	2.01	0001	Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa						5,000,000							20,000,000	Kecamatan Muara Dua
						Terlaksananya Facilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	4 Dokumen	20,000,000	Kecamatan Muara Dua
	7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						7,000,000							10,000,000	Kecamatan Muara Dua
						Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	7,000,000	Kota Lhokseumawe	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	3 Laporan	10,000,000	Kecamatan Muara Dua
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						3,543,434,640							2,736,066,240	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						3,543,434,640							2,736,066,240	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						3,543,434,640							2,736,066,240	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
167.	8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2,283,916,000							859,466,240	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						2,278,916,000							664,466,240	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						999. Nilai SAKIP OPD		61.40 Angka		61.00 Angka	61.10 Angka	2,278,916,000						61.20 Angka	664,466,240	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,500,000					Badan Kesbangpol		1,650,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,500,000					Badan Kesbangpol		1,650,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen			15 Dokumen	15 Dokumen	1,500,000						15 Dokumen	1,650,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1,500,000							1,650,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	1,500,000	Aceh 1 Kota Lhokseumawe 1 Kecamatan Banda Sakti 1 Desa Kota Lhokseumawe 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel	15 Dokumen	1,650,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,060,196,000					Badan Kesbangpol		152,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						2,060,196,000					Badan Kesbangpol		152,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan			50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	2,060,196,000						50 Orang/bulan	152,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						2,060,196,000							152,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
															NASIONAL	DAERAH			(15)		(16)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan		50 Orang/bulan	306 Orang/bulan	2,060,196,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		50 Orang/bulan	152,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						33,640,000					Badan Kesbangpol		180,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Pelaksanaan Pengadministrasian umum						33,640,000					Badan Kesbangpol		180,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	125 Dokumen			12 Dokumen	12 Dokumen	1,140,000						12 Dokumen	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan			35 Laporan	40 Laporan	25,000,000						45 Laporan	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket			12 Paket	15 Paket	2,500,000						22 Paket	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	95 Paket			12 Paket	12 Paket	2,500,000						12 Paket	75,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	175 Paket			24 Paket	32 Paket	2,500,000						40 Paket	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2,500,000							15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	175 Paket		24 Paket	1 Paket	2,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		40 Paket	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2,500,000							35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	150 Paket		12 Paket	1 Paket	2,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		22 Paket	35,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2,500,000							75,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	95 Paket		12 Paket	1 Paket	2,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Paket	75,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						1,140,000							5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	125 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	1,140,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Dokumen	5,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						25,000,000							50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tertaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		35 Laporan	1 Laporan	25,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		45 Laporan	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						20,000,000						Badan Kesbangpol	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah						20,000,000						Badan Kesbangpol	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	74 Unit			12 Unit	12 Unit	20,000,000						12 Unit	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20,000,000							100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	74 Unit		12 Unit	1 Unit	20,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Unit	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						127,580,000						Badan Kesbangpol	150,816,240	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						127,580,000						Badan Kesbangpol	150,816,240	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			1 Laporan	Laporan	60,480,000						Laporan	75,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			1 Laporan	Laporan	67,100,000						Laporan	75,816,240	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						60,480,000							75,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60,480,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		Laporan	75,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						67,100,000							75,816,240	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	67,100,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		Laporan	75,816,240	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						41,000,000						Badan Kesbangpol	275,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						41,000,000						Badan Kesbangpol	275,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit			1 Unit	1 Unit	5,000,000						1 Unit	70,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		1 Unit	1 Unit	12,500,000						1 Unit	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		1 Unit	1 Unit	13,500,000						1 Unit	85,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		1 Unit	1 Unit	10,000,000						1 Unit	70,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						13,500,000							85,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		1 Unit	1 Unit	13,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	85,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						12,500,000							50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		1 Unit	1 Unit	12,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	50,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5,000,000							70,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		1 Unit	1 Unit	5,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	70,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10,000,000							70,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		1 Unit	1 Unit	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Unit	70,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
168.	8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						20,000,000							82,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan						15,000,000							82,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						999.Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		32.14 %		25.00 %	26.47 %	15,000,000						28.13 %	82,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						20,000,000					Badan Kesbangpol		82,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						20,000,000					Badan Kesbangpol		82,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	46 Laporan		8 Laporan	10 Laporan	5,000,000						12 Laporan	38,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	65 Orang		45 Orang	50 Orang	5,000,000						55 Orang	24,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	403 Orang		80 Orang	82 Orang	10,000,000						83 Orang	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						10,000,000							20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	403 Orang		80 Orang	30 Orang	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		83 Orang	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						5,000,000							24,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	65 Orang		45 Orang	70 Orang	5,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		55 Orang	24,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						5,000,000							38,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	46 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	5,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		12 Laporan	38,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
169.	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						1,073,852,187							1,100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Meningkatnya etika dan budaya politik						1,073,852,187								
							999.Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	50.00 %		36.00 %	38.00 %	1,073,852,187						40.00 %	1,100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						1,073,852,187				Badan Kesbangpol		1,100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Terlaksananya Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik						1,073,852,187				Badan Kesbangpol		1,100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
							Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	87 Kegiatan		75 Kegiatan	80 Kegiatan	520,000,000						82 Kegiatan	1,100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250 Orang		45 Orang	50 Orang	10,000,000						55 Orang	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	210 Orang		35 Orang	40 Orang	543,852,187						45 Orang	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						543,852,187							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	210 Orang		35 Orang	40 Orang	543,852,187	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		45 Orang	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						10,000,000							-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250 Orang		45 Orang	50 Orang	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		55 Orang	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	03	2.01	0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka						520,000,000							1,100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	87 Kegiatan		75 Kegiatan	1 Kegiatan	520,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		82 Kegiatan	1,100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
170.	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						10,000,000							15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat						10,000,000							15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							999.Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100 %		77.94 %	82.35 %	10,000,000						86.76 %	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						10,000,000					Badan Kesbangpol		15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Persentase Kebijakan di bidang ekonomi sosial budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitas kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan						10,000,000					Badan Kesbangpol		15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	45 Orang		25 Orang	30 Orang	10,000,000						35 Orang	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						10,000,000							15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
										TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
														NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
					Tertelaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	45 Orang		25 Orang	30 Orang	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		35 Orang	15,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
171.	8	01	06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						155,666,453							679,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan						155,666,453							679,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					999.Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan		100 %		100 %	100 %	155,666,453						100 %	679,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						155,666,453					Badan Kesbangpol		679,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Persentase konflik sosial yang diselesaikan						155,666,453					Badan Kesbangpol		679,600,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		20 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	70,000,000						4 Dokumen	600,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60,000,000						1 Laporan	38,800,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		190 Orang		30 Orang	30 Orang	15,666,453						30 Orang	20,800,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(1)					Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		150 Orang		30 Orang	30 Orang	10,000,000						30 Orang	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					10,000,000							20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Tertelaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	150 Orang		30 Orang	25 Orang	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Orang	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					15,666,453							20,800,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Tertelaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	190 Orang		30 Orang	30 Orang	15,666,453	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		30 Orang	20,800,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					60,000,000							38,800,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Tertelaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		1 Laporan	38,800,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					70,000,000							600,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
					Tertelaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	70,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Kota Lhokseumawe 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Inovatif dan Akuntabel		4 Dokumen	600,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama					2,822,242,480							3,428,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9			UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN					2,822,242,480							3,428,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	9	01	KEKHUSUSAN ACEH					2,822,242,480							3,428,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
172	9	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2,792,242,480							3,368,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
				Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah				2,790,742,480							3,363,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					1.Nilai SAKIP OPD	62.30 Angka		2,790,742,480						61.90 Angka	3,363,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	9	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1,500,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		5,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah			1,500,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		5,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		1,500,000						3 Dokumen	5,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	9	01	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1,500,000							5,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		3 Dokumen	5,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	9	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,412,626,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		1,900,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1,412,626,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		1,900,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		1,412,626,000						12 Orang/bulan	1,900,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	9	01	01	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			1,412,626,000							1,900,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1,412,626,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		12 Orang/bulan	1,900,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	9	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			24,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		37,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Tersedianya administrasi umum perangkat daerah			24,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		37,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan		18,000,000						10 Laporan	25,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		2,000,000						3 Paket	4,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		1,500,000						3 Paket	3,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		2,500,000						3 Paket	5,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	9	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		2,500,000							5,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	2,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		3 Paket	5,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	9	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		2,000,000							4,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	2,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		3 Paket	4,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	9	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		1,500,000							3,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1,500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		3 Paket	3,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	9	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		18,000,000							25,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	18,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		10 Laporan	25,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	9	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,297,116,480					Masyarakat Kota Lhokseumawe		1,351,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			1,297,116,480					Masyarakat Kota Lhokseumawe		1,351,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		1,296,616,480						4 Laporan	1,350,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan		500,000						120 Laporan	1,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	9	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		500,000							1,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120 Laporan	500,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		120 Laporan	1,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
	9	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1,296,616,480							1,350,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
					Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1,296,616,480	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		4 Laporan	1,350,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	9	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						57,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		75,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
						Tersedianya Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan						57,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		75,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit			4 Unit	4 Unit	54,000,000						4 Unit	65,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			12 Unit	12 Unit	3,000,000						12 Unit	10,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	01	01	2.09	0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						54,000,000							65,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	54,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		4 Unit	65,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	01	01	2.09	0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3,000,000							10,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
						Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	10 Unit	3,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	12 Unit	10,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
173.	9	01	03			PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH						30,000,000							60,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
						Meningkatnya Fatwa yang tersebarluaskan						10,000,000							20,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
							999.Persentase Fatwa yang di sosialisasikan	94.23 %		85.71 %	90.00 %	10,000,000						90.00 %	20,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	01	03	7.01			Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama						20,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		40,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
						Tertaksananya Hasil Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama						20,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		40,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
							Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan	60 Orang		20 Orang	60 Orang	10,000,000						60 Orang	20,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
							Jumlah Laporan Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	10,000,000						3 Laporan	20,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	01	03	7.01	0005		Muzakarah Masalah Keagamaan						10,000,000							20,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
						Tertaksananya Muzakarah Masalah Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	3 Laporan	20,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
9	01	03	7.01	0014		Pendidikan Kader Ulama						10,000,000							20,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
						Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan	60 Orang		20 Orang	10 Orang	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	60 Orang	20,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
							Persentase Fatwa yang di sosialisasikan	-		-	90 Persen	10,000,000						-	20,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	01	03	7.02			Silaturahmi Ulama-Ulama						10,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
						-						10,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		20,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
							Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah	-		-	-	10,000,000						-	20,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
9	01	03	7.02	0002		Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah						10,000,000							20,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
						Diterapkannya Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah	-		-	30 Orang	10,000,000	Aceh Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Simpang Empat 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	-	20,000,000	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	
						Sekretariat Baitul Mal						5,890,830,456							10,242,782,258	Sekretariat Baitul Mal
9						USUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN						5,890,830,456							10,242,782,258	Sekretariat Baitul Mal
9	01					KEKHUSUSAN ACEH						5,890,830,456							10,242,782,258	Sekretariat Baitul Mal
174.	9	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1,290,830,456							2,542,782,258	Sekretariat Baitul Mal
						Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan kinerja Perangkat Daerah						1,286,330,456							2,542,782,258	Sekretariat Baitul Mal
							999.Nilai SAKIP OPD	62.15 Angka		61.95 Angka	62.00 Angka	1,286,330,456						62.05 Angka	2,542,782,258	Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,500,000					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6,967,800	Sekretariat Baitul Mal
						Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1,500,000					Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		6,967,800	Sekretariat Baitul Mal
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	1,500,000						8 Dokumen	6,967,800	Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						1,500,000							6,967,800	Sekretariat Baitul Mal
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	8 Dokumen	6,967,800	Sekretariat Baitul Mal	
9	01	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						875,050,000					Aparatur Sekretariat Baitul Mal		1,532,709,442	Sekretariat Baitul Mal
						Tertaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						875,050,000					Aparatur Sekretariat Baitul Mal		1,532,709,442	Sekretariat Baitul Mal
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	875,050,000						26 Orang/bulan	1,532,709,442	Sekretariat Baitul Mal
9	01	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						875,050,000							1,532,709,442	Sekretariat Baitul Mal
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang/bulan		26 Orang/bulan	364 Orang/bulan	875,050,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya	26 Orang/bulan	1,532,709,442	Sekretariat Baitul Mal	
9	01	01	2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		64,184,803	Sekretariat Baitul Mal



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Tersedianya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						25,000,000					Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		64,184,803	Sekretariat Baitul Mal
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20,000,000						1 Laporan	27,562,500	Sekretariat Baitul Mal
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	700 Paket		700 Paket	700 Paket	2,000,000						700 Paket	15,345,000	Sekretariat Baitul Mal
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1,500,000						4 Paket	3,858,750	Sekretariat Baitul Mal
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41 Paket		41 Paket	41 Paket	1,500,000						41 Paket	17,418,553	Sekretariat Baitul Mal
	9	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1,500,000							17,418,553	Sekretariat Baitul Mal
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41 Paket		41 Paket	41 Paket	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		41 Paket	17,418,553	Sekretariat Baitul Mal
	9	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2,000,000							15,345,000	Sekretariat Baitul Mal
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	700 Paket		700 Paket	110 Paket	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		700 Paket	15,345,000	Sekretariat Baitul Mal
	9	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						1,500,000							3,858,750	Sekretariat Baitul Mal
						Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		4 Paket	3,858,750	Sekretariat Baitul Mal
	9	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						20,000,000							27,562,500	Sekretariat Baitul Mal
						Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	10 Laporan	20,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		1 Laporan	27,562,500	Sekretariat Baitul Mal
	9	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah						354,780,456					Jumlah Aparatur Sekretariat		872,654,450	Sekretariat Baitul Mal
						Terlaksananya Kegiatan Jasa Pelayanan Kantor						354,780,456					Jumlah Aparatur Sekretariat		872,654,450	Sekretariat Baitul Mal
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	354,280,456						1 Laporan	870,361,250	Sekretariat Baitul Mal
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	500,000						1 Laporan	2,293,200	Sekretariat Baitul Mal
	9	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500,000							2,293,200	Sekretariat Baitul Mal
						Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	10 Laporan	500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		1 Laporan	2,293,200	Sekretariat Baitul Mal
	9	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						354,280,456							870,361,250	Sekretariat Baitul Mal
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	354,280,456	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		1 Laporan	870,361,250	Sekretariat Baitul Mal
	9	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah						34,500,000					Jumlah Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah		66,265,763	Sekretariat Baitul Mal
						Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan Rehabilitasi						34,500,000					Jumlah Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah		66,265,763	Sekretariat Baitul Mal
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13,900,000						1 Unit	24,585,750	Sekretariat Baitul Mal
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	19,100,000						1 Unit	29,524,950	Sekretariat Baitul Mal
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1,500,000						1 Unit	12,155,063	Sekretariat Baitul Mal
	9	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						19,100,000							29,524,950	Sekretariat Baitul Mal
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	19,100,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		1 Unit	29,524,950	Sekretariat Baitul Mal
	9	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						13,900,000							24,585,750	Sekretariat Baitul Mal
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	13,900,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		1 Unit	24,585,750	Sekretariat Baitul Mal
	9	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1,500,000							12,155,063	Sekretariat Baitul Mal
						Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	4 Unit	1,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		1 Unit	12,155,063	Sekretariat Baitul Mal
175.	9	01	04			PROGRAM BAITUL MAL						4,600,000,000							7,700,000,000	Sekretariat Baitul Mal
						Meningkat Pengumpulan ZISWAF						4,600,000,000							7,350,000,000	Sekretariat Baitul Mal
							999.Persentase Peningkatan ZISWAF	15.24 %		11.56 %	12.51 %	4,600,000,000							7,350,000,000	Sekretariat Baitul Mal
	9	01	04	7.03		Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf						4,600,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		7,700,000,000	Sekretariat Baitul Mal
						Terlaksananya Kegiatan Penerimaan ZIS Ke Masyarakat						4,600,000,000					Masyarakat Kota Lhokseumawe		7,700,000,000	Sekretariat Baitul Mal



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil	117 Orang		117 Orang	117 Orang	242,200,000						117 Orang	828,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
						Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	70 Orang		70 Orang	70 Orang	22,000,000						70 Orang	350,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
						Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah	50 Orang		50 Orang	50 Orang	40,800,000						50 Orang	350,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
						Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin	10 Orang		10 Orang	10 Orang	10,000,000						10 Orang	48,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
						Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Jafan	410 Orang		410 Orang	410 Orang	3,000,000,000						410 Orang	1,300,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
						Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin	381 Orang		381 Orang	381 Orang	250,000,000						381 Orang	2,500,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
						Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf	15 Orang		15 Orang	15 Orang	15,000,000						15 Orang	45,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	7.03	0001	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir					1,020,000,000							2,279,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
						Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	927 Orang	779 Orang	680 Orang	1,020,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Zakat, Infq, Shadaqah, dan Wakaf	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		853 Orang	2,279,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	7.03	0002	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin					250,000,000							2,500,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
						Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin	381 Orang	381 Orang	10 Orang	250,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Zakat, Infq, Shadaqah, dan Wakaf	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		381 Orang	2,500,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	7.03	0003	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil					242,200,000							828,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
						Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil	117 Orang	117 Orang	111 Orang	242,200,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Zakat, Infq, Shadaqah, dan Wakaf	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		117 Orang	828,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	7.03	0004	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf					15,000,000							45,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
						Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf	15 Orang	15 Orang	10 Orang	15,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Zakat, Infq, Shadaqah, dan Wakaf	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		15 Orang	45,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	7.03	0005	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin					10,000,000							48,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
						Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin	10 Orang	10 Orang	6 Orang	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Zakat, Infq, Shadaqah, dan Wakaf	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		10 Orang	48,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	7.03	0006	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah					40,800,000							350,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
						Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah	50 Orang	50 Orang	98 Orang	40,800,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Zakat, Infq, Shadaqah, dan Wakaf	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		50 Orang	350,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	7.03	0007	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibu Sabi					22,000,000							350,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
						Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibu Sabi	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	70 Orang	70 Orang	22 Orang	22,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Zakat, Infq, Shadaqah, dan Wakaf	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		70 Orang	350,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
	9	01	04	7.03	0008	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infq					3,000,000,000							1,300,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
						Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infq	410 Orang	410 Orang	450 Orang	3,000,000,000	Kota Lhokseumawe	Pendapatan Zakat, Infq, Shadaqah, dan Wakaf	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		410 Orang	1,300,000,000	Sekretariat Baitul Mal	
						Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah					8,405,799,520							12,811,456,705	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					2,740,300,000							4,175,857,185	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					2,740,300,000							4,175,857,185	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
176	1	01	07			PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH					2,740,300,000							4,175,857,185	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
						Meningkatnya Jumlah Dayah yang ber Type A					2,740,300,000							4,175,857,185	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
							999.Persentase Dayah dengan Type A	15.15 %	10.61 %	10.61 %	2,740,300,000						12.12 %	4,175,857,185	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	1	01	07	7.01		Pengelolaan Pendidikan Dayah					2,740,300,000						Pimpinan Dayah, Guru Dayah dan santreri, pengelola dayah Penguas dayah	4,175,857,185	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
						Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Dayah					2,740,300,000						Pimpinan Dayah, Guru Dayah dan santreri, pengelola dayah Penguas dayah	4,175,857,185	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
						Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	70 Satuan Pendidikan		70 Satuan Pendidikan	70 Satuan Pendidikan	5,000,000							35,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkatkan Mutunya	2301 Orang		2298 Orang	2298 Orang	2,534,300,000							3,040,857,185	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
						Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	25 Peserta Didik		25 Peserta Didik	25 Peserta Didik	200,000,000							900,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1,000,000							200,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	1	01	07	7.01	0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah					1,000,000							200,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
						Sarana dan Prasarana Dayah Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun	10 Unit	10 Unit	10 Unit	1,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penvandang disabilitas.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		10 Unit	200,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	1	01	07	7.01	0003	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah					2,534,300,000							3,040,857,185	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
						Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Meningkatkan Mutunya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkatkan Mutunya	2301 Orang		2298 Orang	2295 Orang	2,534,300,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		2295 Orang	3,040,857,185	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	1	01	07	7.01	0004	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri						200,000,000							900,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	25 Peserta Didik		25 Peserta Didik	25 Peserta Didik	200,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		25 Peserta Didik	900,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	1	01	07	7.01	0006	Penelitian dan Pengembangan Dayah						5,000,000							35,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	70 Satuan Pendidikan		70 Satuan Pendidikan	70 Satuan Pendidikan	5,000,000	Kota Lhokseumawe	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		70 Satuan Pendidikan	35,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9					UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN						5,665,499,520							8,635,599,520	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01				KEKHUSUSAN ACEH						5,665,499,520							8,635,599,520	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
177	9	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,581,999,520							4,597,599,520	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja Perangkat Daerah						3,571,499,520							4,597,599,520	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
							999.Nilai SAKIP OPD	62.20 Angka		61.45 Angka	61.65 Angka	3,571,499,520						61.85 Angka	4,597,599,520	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2,500,000					Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		25,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tersediannya Dokumen Perangkat Daerah						2,500,000					Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		25,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	2,500,000							7 Dokumen	25,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2,500,000							25,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	8 Dokumen	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		7 Dokumen	25,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,003,900,000					Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		3,540,360,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tersediannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,003,900,000					Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		3,540,360,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 Orang/bulan		504 Orang/bulan	504 Orang/bulan	3,003,900,000							504 Orang/bulan	3,540,360,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						3,003,900,000							3,540,360,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tersediannya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 Orang/bulan	504 Orang/bulan	504 Orang/bulan	3,003,900,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		504 Orang/bulan	3,540,360,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						67,500,000					Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		194,640,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tersediannya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						67,500,000					Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		194,640,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	365 Dokumen		365 Dokumen	365 Dokumen	365 Dokumen	500,000						365 Dokumen	1,140,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan		80 Laporan	80 Laporan	80 Laporan	60,000,000						80 Laporan	135,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	420 Paket		420 Paket	420 Paket	420 Paket	2,500,000						420 Paket	15,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2 Paket	2,000,000						2 Paket	10,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	50 Paket	2,500,000						50 Paket	33,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2,500,000							33,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	50 Paket	50 Paket	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		50 Paket	33,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2,500,000							15,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tersediannya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	420 Paket	420 Paket	420 Paket	420 Paket	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		420 Paket	15,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						2,000,000							10,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		2 Paket	10,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						500,000							1,140,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	365 Dokumen	365 Dokumen	365 Dokumen	365 Dokumen	500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		365 Dokumen	1,140,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
	9	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60,000,000							135,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tertelaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan		80 Laporan	80 Laporan	60,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		80 Laporan	135,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18,000,000					Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		63,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						18,000,000					Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		63,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	18,000,000						4 Unit	63,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						18,000,000							63,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	18,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		4 Unit	63,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						445,799,520					Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		608,999,520	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tertelaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						445,799,520					Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		608,999,520	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	359,100,000						1 Laporan	367,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	86,199,520						4 Laporan	238,799,520	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	500,000						250 Laporan	2,700,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500,000							2,700,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tertelaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	250 Laporan		250 Laporan	250 Laporan	500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		250 Laporan	2,700,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						359,100,000							367,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	359,100,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		1 Laporan	367,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						86,199,520							238,799,520	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	86,199,520	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		4 Laporan	238,799,520	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						44,300,000					Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		165,600,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tertelaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						44,300,000					Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		165,600,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	15,500,000						24 Unit	47,300,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	18,800,000						12 Unit	33,300,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	5,000,000						8 Unit	50,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
							Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	5,000,000						8 Unit	35,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						18,800,000							33,300,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	1 Unit	18,800,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		12 Unit	33,300,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						15,500,000							47,300,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		24 Unit	1 Unit	15,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		24 Unit	47,300,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5,000,000							50,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tertelaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		8 Unit	50,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5,000,000							35,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Tertelaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		8 Unit	35,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
															NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)				
178.	9	01	02			PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH						2,083,500,000				4,038,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
						Meningkatnya Pembinaan Syariat Islam						2,034,000,000				3,803,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
							999 Angka Melek Al-Qur'an	88.87 Angka		85.41 Angka	86.26 Angka	2,034,000,000				87.12 Angka	3,803,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		
	9	01	02	7.01		Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam						30,000,000				203,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
						Tertelaksananya Pelatihan Wawasan Keislaman bagi Masyarakat						30,000,000				203,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
						Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam	80 Orang		80 Orang	80 Orang	15,000,000				80 Orang	100,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
						Jumlah Siswa/Siawi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Mental Spirituainya	100 Orang		100 Orang	100 Orang	15,000,000				100 Orang	103,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
	9	01	02	7.01	0005	Seminar Problematika Syariat Islam						15,000,000				100,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
						Tertelaksananya Seminar Problematika Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam	80 Orang	80 Orang	80 Orang	15,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		80 Orang	100,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.01	0006	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siawi Sekolah Menengah Atas Sederajat						15,000,000				103,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
						Tertelaksananya Mental Spritual Siswa/Siawi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Jumlah Siswa/Siawi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Mental Spirituainya	100 Orang	100 Orang	100 Orang	15,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		100 Orang	103,500,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.02		Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran						750,000,000				885,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
						Tertelaksananya kegiatan peningkatan pemahaman Al-Qur'an						750,000,000				885,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
							Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	232 Orang		100 Orang	232 Orang	750,000,000				100 Orang	885,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah		
	9	01	02	7.02	0004	Pelaksanaan MTQ						750,000,000				885,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
						Tertelaksananya MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	232 Orang	100 Orang	100 Orang	750,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		100 Orang	885,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.04		Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam						43,500,000				377,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
						Tertelaksananya Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam						43,500,000				377,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
							Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	30,000,000				3 Dokumen	197,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
							Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan	104 Orang	104 Orang	104 Orang	10,000,000				104 Orang	80,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
							Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	3,500,000				10 Unit	100,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
	9	01	02	7.04	0001	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam						30,000,000				197,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
						Tertelaksananya Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakkan Syariat Islam	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	30,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		3 Dokumen	197,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.04	0005	Pelatihan Takmir Masjid						10,000,000				80,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
						Tertelaksananya Pelatihan Takmir Mesjid	Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan	104 Orang	104 Orang	104 Orang	10,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		104 Orang	80,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.04	0011	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan						3,500,000				100,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
						Tertelaksananya Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	3,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		10 Unit	100,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.05		Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam						927,500,000				1,378,490,900	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
						Tersediannya Laporan Pengkajian Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam						927,500,000				1,378,490,900	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
							Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan	50 Keluarga	50 Keluarga	50 Keluarga	5,000,000				50 Keluarga	85,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
							Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,500,000				1 Laporan	135,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	25 Orang	25 Orang	25 Orang	888,000,000				25 Orang	998,490,900	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Hafidh Hafidhah	25 Orang	25 Orang	25 Orang	30,000,000				25 Orang	85,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
							Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Qari Qariah	30 Orang	30 Orang	30 Orang	2,000,000				30 Orang	75,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
	9	01	02	7.05	0001	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman						2,500,000				135,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah			
						Tertelaksananya Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		1 Laporan	135,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	



NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
											TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF			
															NASIONAL					DAERAH	
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	9	01	02	7.05	0004	Pembinaan Keluarga Islami						5,000,000								85,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Terbinanya Keluarga Islam	Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan	50 Keluarga		50 Keluarga	50 Keluarga	5,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		50 Keluarga	85,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.05	0007	Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla						888,000,000								998,490,900	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Terlaksananya Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	25 Orang		25 Orang	25 Orang	888,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		25 Orang	998,490,900	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.05	0008	Pembinaan Qari Qariah						2,000,000								75,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Terlaksananya Pembinaan Qari Qariah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Qari Qariah	30 Orang		30 Orang	30 Orang	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		30 Orang	75,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.05	0009	Pembinaan Hafidh Hafidzah						30,000,000								85,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Terlaksananya Pembinaan Hafidh Hafidzah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Hafidh Hafidzah	25 Orang		25 Orang	25 Orang	30,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		25 Orang	85,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.06		Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam						327,500,000					Aparatur Peradilan Syariat Islam, Aparatur Penegak hukum dan Praktisi Hukum Islam, Imam masjid dan Meunasah,okoh Agama dan Tokoh Masyarakat,Akademisi dan Praktisi Hukum Islam		893,009,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
						Terlaksananya Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam						327,500,000					Aparatur Peradilan Syariat Islam, Aparatur Penegak hukum dan Praktisi Hukum Islam, Imam masjid dan Meunasah,okoh Agama dan Tokoh Masyarakat,Akademisi dan Praktisi Hukum Islam		893,009,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	2,500,000							5 Laporan	50,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	95,000,000							6 Laporan	349,009,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
							Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah	400 Orang		360 Orang	400 Orang	230,000,000							400 Orang	494,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	02	7.06	0006	Pengawasan Penegakan Hukum SyariatIslam						2,500,000								50,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Terlaksananya Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	2,500,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		5 Laporan	50,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.06	0007	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam						95,000,000								349,009,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	95,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		6 Laporan	349,009,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.06	0009	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah						230,000,000								494,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Terlaksananya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah	400 Orang		360 Orang	400 Orang	230,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		400 Orang	494,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.07		Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah						5,000,000					Pengurus dan Pengelola Masjid Agung Daerah, Aparatur Pemerintah Daerah terkait,Tokoh Agama dan Ulama, masyarakat		301,000,100	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
						Terselenggaranya Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah						5,000,000					Pengurus dan Pengelola Masjid Agung Daerah, Aparatur Pemerintah Daerah terkait,Tokoh Agama dan Ulama, masyarakat		301,000,100	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala	7 Unit		7 Unit	7 Unit	3,000,000							7 Unit	251,000,100	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
							Jumlah Tutor yang Mengikuti Pelatihan Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah	40 Orang		40 Orang	40 Orang	2,000,000							40 Orang	50,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
	9	01	02	7.07	0004	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah						2,000,000								50,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Terlaksananya Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah	Jumlah Tutor yang Mengikuti Pelatihan Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah	40 Orang		40 Orang	40 Orang	2,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		40 Orang	50,000,000	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
	9	01	02	7.07	0005	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah						3,000,000								251,000,100	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah
						Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala	7 Unit		7 Unit	7 Unit	3,000,000	Kota Lhokseumawe	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyalarsaan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya		7 Unit	251,000,100	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	
J U M L A H												682,134,795,603							639,741,921,011		



BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis RPJMK Lhokseumawe 2025-2029, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025. IKU tersebut merupakan kinerja pemerintah daerah pada posisi tertinggi dan merupakan kinerja dampak (impact) atau ultimate outcome. Pencapaian IKU didukung oleh kinerja outcome atau intermediate outcome, yang pada umumnya merupakan hasil dari crosscutting beberapa urusan dalam bentuk program sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.39	4.53-4.80	3.43-3.80	3.42-3.90
2	Indeks Gini	Nilai	0.344	0.295-0.322	0.295-0.322	0,293-0.320
3	Kontribusi PDRB Perdagangan	%	23.72	23.69	23.75	23.80
4	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	%	15.73	16.75	16.75	16.80
5	Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	9.37	9.54	9.54	9.66
6	Indeks Ketahanan Pangan	%	68.46	85.32	85.32	86.35
7	Pembentukan Modal Tetap (%) PDRB)	%	38.92	40.95	40.95	41.70
8	Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai	0.117 Rendah	-	1.140 Rendah	1.167 Rendah
9	PDRB per kapita	(Rp. juta)	62.54	65.48	65.48	68.21
10	Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2.40	2.42	2.42	2.43
11	Total Kredit/PDRB	%	48.26	48.12	48.50	48.91
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.24	7.75-7.85	7.75-7.85	7.65-7.80
13	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	(Rp. Juta)	142.23	142.60	142.60	146.21
14	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	81.75	81.95-82.30	81.95-82.30	82.10-82.50
15	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.56	16.00	16.00	16.10
16	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	11.64	11.58	11.66	11.68



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
17	Angka Literasi SD	%	53.39	61.72	55.50	57.90
18	Angka Numerasi SD	%	44.77	55.24	47.57	49.27
19	Angka Literasi SMP	%	68.95	70.54	69.35	69.96
20	Angka Numerasi SMP	%	60.49	62.94	61.94	62.49
21	Usia Harapan Hidup	Tahun	75.29	75.12	75.35	75.40
22	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	N/A	18.00	17.50	16.30
23	Tingkat Kemiskinan	%	9.01	9.00-9.81	9.00-8.85	8.85-8.70
24	Pengeluaran Perkapita	Rp.	13.071,-	13.832,-	13.832,-	14.401,-
25	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan Kabupaten/Kota	%	33.46	48.65	48.65	49.55
26	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	Angka	72.50	68.00	73.00	73.50
27	Indeks Desa	Angka	71.73	77.72	77.72	78.32
28	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0.254	0.300	0.252	0.250
29	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	96.82	96.65	96.85	96.90
30	Nilai Kota Layak Anak	Angka	N/A	730	740	750
31	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	44.52	45.19	47.37	51.08
32	Persentase kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88.19	89.03	89.03	89.92
33	Indeks Kepuasan layanan Infrastruktur	Angka	58.00	74.30	60.87	62.86
34	Tingkat Pelayanan Jalan	Level	C 0.57	C 0.50	C 0.58	C 0.59
35	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	80.16	82.96	84.80	86.31
36	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	Angka	71.54	73.35-73.85	73.35-73.85	75.10-75.65
37	Indeks Risiko Bencana	Angka	168.97	132.86	132.99	130.99
38	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori/ Point	BB 72.17	BB 72.85	BB 72.85	BB 73.32
39	Nilai SAKIP	Kategori/ Point	B 61.76	BB 71.20	BB 71.20	BB 72.60
40	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
41	Indeks Profesionalisme ASN	Angka	N/A	81.67	81.67	82.80
42	Indeks Integritas/SPI	Angka	74.31	72.50	75.00	75.50
43	Indeks Maturitas SPIP	Angka	Level 3 3.037	Level 3 3.300	Level 3 3.300	Level 3 3.400



No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
44	Indeks Pelayanan Publik	Angka	A-4.31	A4.28	A4.33	A4.35
45	Indeks SPBE	Angka	2.80	3.10	3.10	3.15
46	Indeks Inovasi Daerah	Angka	29.68	52.36	52.36	56.80
47	Indeks Pembangunan Syariah	Angka	80.11	84.91	84.91	85.25
48	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	54.00	40.74	54.50	60.19

Sumber : BPS 2025, OPD terkait 2026

6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator Kinerja Daerah merupakan sekumpulan indikator kinerja yang menggambarkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang akan dicapai pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Indikator Kinerja Daerah disajikan berdasarkan urusan wajib terkait pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar, urusan pilihan, unsur pendukung dan penunjang urusan pemerintahan daerah, pengawasan, dan pemerintahan umum. Adapun target masing-masing indikator disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintahan
Kota Lhokseumawe Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
I	ASPEK GEOGRAFI DAN PERGRAFI					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	68.46	85.32	85.32	86.35
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	5.50	5.50	5.45	5.35
3	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum perpipaan	%	19.78	67.33	67.33	67.57
4	Akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan	%	N/A	35.00	35.00	45.00
5	Kapasitas air baku	m³/detik	0.251	0.242	0.252	0.253
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	71.54	73.35-73.85	73.35-73.85	75.10-75.65
7	Indeks Kualitas Air	Nilai	75.61	71.20	75.80	76.00
8	Indeks Kualitas Udara	Nilai	82.03	92.93	92.93	92.95
9	Indeks Tutupan Lahan	Nilai	45.17	25.25	45.20	45.30



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	9.43	9.45	9.45	9.47
11	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	N/A	15.2	15.2	18.3
12	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	0.93	1.52	1.52	1.58
13	Indeks Risiko Bencana	Angka	168.97	132.86	132.99	130.99
14	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0.41	0.41	0.42	0.43
15	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.09	1.40	1.40	1.42
16	Rasio Penduduk	%	98.66	98.8	98.8	98.8
17	Kepadatan Penduduk	Orang/ Km ²	1.109	1.15	1.15	1.17
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3.39	4.53- 4.80	3.43- 3.80	3.42- 3.90
2	Tingkat Kemiskinan	%	9.01	9.00- 9.81	9.00- 8.85	8.85- 8.70
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	62.54	65.48	65.48	68.21
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	8.24	7.75- 7.85	7.75- 7.85	7.65- 7.80
5	Indeks Gini	Angka	0.344	0.295- 0.322	0.295- 0.322	0.293- 0.320
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	81.75	81.95- 82.30	81.95- 82.30	82.10- 82.50
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	75.25	75.12	75.35	75.40
8	Prevalensi Stunting	%	N/A	17.50	17.50	16.30
9	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	181.71	109	109	97
10	Angka Kematian Bayi	Angka	12.72	9.43	9.43	8.97
11	Angka Kematian Balita	Angka	12.72	13.80	12.70	12.65
12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus kulosis (treatment coverage)	%	100	1000	100	100
13	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	%	79.31	92.00	92.00	93.00
14	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	92.29	93.65	93.65	93.80
15	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	61.30	65.00	65.00	70.00
16	Cakupan Penerima Pemeriksa Kesehatan Gratis	%	17.22	31.00	31.00	36.00



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
17	Persentase Hipertensi dalam Pengendalian	%	96.14	100.00	100.00	100.00
18	Proporsi Penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	22.00	63.50	63.50	64.00
19	Persentase Lanjut Usia Yang Mandiri	%	87.00	84.00	87.50	88.00
20	Eliminasi Kusta	Orang	8	16	7	6
21	Prevalensi Depresi pada Usia ≥ 15 Tahun	%	N/A	0.80	0.80	0.80
22	Persentase Merokok Penduduk 10-21 Tahun	%	1.24	6.50	6.50	6.20
23	Prevalensi Obesitas > 18 Tahun	%	4.66	15.00	15.00	15.00
24	Jumlah Desa yang memiliki unit Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Desa	68	62	68	68
25	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	N/A	57.00	57.00	71.00
26	Persentase Puskesmas Dengan SDMK Sesuai Standar	%	100.00	100.00	100.00	100.00
27	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11.64	11.58	11.66	11.68
28	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15.56	16.00	16.00	16.10
29	Angka Literasi SD	Angka	53.39	61.72	55.50	57.90
30	Angka Numerasi SD	Angka	44.77	55.24	47.57	49.27
31	Angka Literasi SMP	Angka	68.95	70.54	69.35	69.96
32	Angka Numerasi SMP	Angka	60.49	62.94	61.94	62.49
33	Angka Partisipasi Sekolah (5-6) (PAUD)	Angka	89.19	95.73	90.73	91.04
34	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15 (SD/SMP)	Angka	99.77	99.05	99.79	99.82
35	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 Kesetaraan	Angka	30.86	57.57	57.57	64.06
36	Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	%	67.96	61.17	68.15	69.00
37	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	%	89.59	75.52	89.70	89.85
38	Iklim Inklusivitas SD	Angka	56.82	63.07	57.50	59.83
39	Iklim Inklusivitas SMP	Angka	58.50	61.35	60.00	61.51
40	Iklim Keamanan SD	Angka	73.04	76.40	74.40	75.44
41	Iklim Keamanan SMP	Angka	71.53	74.06	72.90	74.00
42	Iklim Kebinekaan SD	Angka	65.93	73.47	66.50	67.95
43	Iklim Kebinekaan SMP	Angka	66.37	71.77	67.50	68.50
44	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	16.77	62.68	17.10	17.77



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
45	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	33.46	48.65	48.65	49.55
46	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	49.98	50.55	50.55	50.70
47	Pengeluaran Perkapita	Rp.	13.071,-	13.832,-	13.832,-	14.401,-
48	Nilai Kota Layak Anak	Angka	N/A	740	740	750
49	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	N/A	72.13	72.13	73.60
50	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	72.50	68.00	72.80	73.00
51	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Angka	68.30	69.60	69.60	70.50
52	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2.28	2.27	2.27	2.27
53	Angka kelahiran remaja umur 15-19 (ASFR 15-19)	Angka	9.6	7.00	7.00	6.40
54	Demand Satisfied	%	75.10	77.30	77.30	78.40
55	Persentase Kehamilan tidak direncanakan (KTD)	%	12.50	10.40	10.40	9.40
56	Indeks Lansia Berdaya	Nilai	65.93	59.90	66.10	66.25
57	Indeks Pengasuhan Remaja	Nilai	85.20	89.80	89.80	90.70
58	Persentase Kampung KB Mandiri	%	42.65	95.60	95.60	96.10
59	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0.254	0.300	0.252	0.250
60	Indeks Pembangunan Gender	Angka	96.82	96.65	96.85	96.90
61	Persentase pemuda berprestasi dan atlet berprestasi	%	44.52	47.37	47.37	51.08
62	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	0.45	0.45	0.45	0.45
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Angka Ketergantungan	%	45.80	46.20	46.20	46.50
2	Kontribusi PDRB Perdagangan	%	23.46	23.69	23.69	23.80
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	15.73	16.75	16.75	16.80
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2.40	2.42	2.42	2.43
5	Rasio Kewirausahaan	%	7.92	8.16	8.16	8.56
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	64.56	65.20	65.20	65.45



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
7	Indeks Inovasi Daerah	%	29.68	52.36	52.36	56.80
8	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	9.37	9.54	9.54	9.66
9	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level Kab/Kota	%	4.77	5.90	4.76	4.75
10	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	%	42.00	47.60	47.60	48.32
11	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tingkat Kabupaten/kota	%	10.60	6.25	10.70	10.80
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) ²⁾	%	0.11	0.35	0.35	0.40
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	38.92	40.95	40.95	41.70
14	Ekspor Barang dan Jasa	%	-0.23	1.20	1.20	1.35
15	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	88.19	89.03	89.03	89.92
16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Angka	48.00	60.87	60.87	62.86
17	Tingkat Pelayanan Jalan	Level/Nilai	C 0.57	C 0.5	C 0.58	C 0.59
18	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	86.62	84.80	86.90	87.00
19	Indeks Desa	Angka	71.73	77.72	77.72	78.32
20	Persentase Desa Mandiri	%	42.65	48.53	48.53	52.94
21	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.73	0.76	0.76	0.78
22	Indeks Kemandirian Fiskal	Nilai	0.117 Rendah	1.140 Rendah	1.140 Rendah	1.167 Rendah
23	Tingkat Inflasi	%	5.56	2.5 ± 1	2.5 ± 1	2.5 ± 1
24	Total Kredit/PDRB	%	48.27	48.12	48.50	48.91
25	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	23.99	41.97	41.97	42.28
26	Indeks Akses Keuangan Daerah	%	5.27	3.93	5.30	5.32
27	Indeks Zakat Nasional	Angka	0.65	0.71	0.71	0.74
28	Persentase Pekerja Informal	%	53.90	49.67	54.00	54.18
29	Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi	%	3.49	2.82	2.82	2.73
	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka/	BB 72.17	BB 72.85	BB 72.85	BB 73.32
2	Nilai SAKIP	Angka/	B 61.76	BB 71.20	BB 71.20	BB 72.60



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
3	Indeks Reformasi Hukum	Angka	67.26	79.32	79.32	80.25
4	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	2.80	3.10	3.10	3.15
5	Opini BPK ³⁾	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Indeks Profesionalisme ASN ³⁾	Nilai	79.65	81.67	81.67	82.80
7	Indeks Pembangunan Statistik ⁷⁾	Nilai	1.69 Cukup	1.80 Cukup	1.80 Cukup	1.85 Cukup
8	Indeks Pelayanan Publik	Angka	A 4.31	A 4.28	A 4.33	A 4.35
9	Indeks kualitas Kebijakan	Nilai	60.73 Cukup	52.00 Cukup	60.95 Cukup	64.00 Cukup
10	Indeks Integritas Nasional	Angka	74.31	71.35	75.00	75.50
11	Indeks Maturitas SPIP	Angka	Level 3 3.037	Level 3 3.300	Level 3 3.300	Level 3 3.400
12	Persentase Penegakan Perda	%	90.17	97.00	97.00	98.00
13	Persentase Capaian Aksi HAM	%	70.00	67.70	70.15	70.40
14	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3.90	4.10	4.10	4.30
15	Indeks Pembangunan Syariah	Angka	80.11	84.91	84.91	85.25
16	Persentase Dayah Mandiri	%	10.67	10.9	10.9	14.06
17	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	54.00	40.74	54.50	60.19
18	Jumlah Konflik SARA	Angka	0	0	0	0
	INDIKATOR KINERJA KUNCI					
A	Pendidikan					
1	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	89.19	95.73	90.73	91.04
2	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	99.77	99.05	99.74	99.82
3	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	30.86	57.57	57.57	64.06
4	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	53.39	61.72	61.72	64.22



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	44.77	55.24	47.57	49.27
6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	68.95	70.54	69.35	69.96
7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Angka	60.49	62.94	61.94	62.49
8	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	67.96	61.17	68.15	69.00
9	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	89.59	75.52	89.70	89.85
10	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Angka	73.04	76.40	74.40	75.44
11	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Angka	71.53	74.06	72.90	74.00
12	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Angka	69.93	73.47	66.50	67.95
13	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Angka	66.37	71.77	67.50	68.50
14	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Angka	56.82	63.07	57.50	59.83
15	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Angka	58.50	61.35	60.00	61.51
B	Kesehatan					
1	Jumlah Kematian Ibu	rasio	181.71	109	109	97
2	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	N/A	18.00	18.00	16.30
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	91.91	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	97.52	100	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	84.65	100	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	89.42	100	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan	%	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
	kesehatan sesuai standar					
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	85.97	100	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	99.08	100	100	100
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	68.84	100	100	100
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	100
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	100
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	159.09	100	100	100
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	117.01	100	100	100
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	2.22	11.53	11.53	16.51
2	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	60.06	63.10	63.10	64.09
3	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	N/A	30.00	30.00	35.00
4	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	20.00	30.00	30.00	35.00
5	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses	%	19.78	21.09	21.09	22.03



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
	terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota ⁴⁾					
6	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman ⁴⁾	%	93.71	93.89	93.89	94.61
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota ⁴⁾	%	72.65	73.66	73.66	74.77
8	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	59.54	61.54	61.54	64.54
9	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis ⁴⁾	%	26.15	32.31	32.31	37.69
10	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ⁴⁾	%	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah ⁴⁾	Hari	20	20	20	20
12	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota ⁴⁾	%	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	N/A	5.00	5.00	5.26
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program	%	N/A	25.00	25.00	25.00



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
	kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni					
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	0.92	1.40	1.40	1.80
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	1.00	1.83	1.83	2.17
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	65.06	65.73	65.73	66.41
E	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	88.89	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100
3	Jumlah PPNS pada Satpol PP	Orang	5	8	8	9
4	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	87.50	80.00	88.00	88.50
5	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta br ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	62.50	100	100	100
6	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	50	100	100	100
7	Persentase warga negara yang memperoleh	%	111.436	100	100	100



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
	layanan informasi rawan bencana					
8	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	59.54	0.10	59.60	59.75
9	Persentase Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 4)5)	%	100	100	100	100
10	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/ilegal 4)5)	%	100	100	100	100
11	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100
12	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100
13	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100
14	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100
F	Sosial					
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	50.00	80.00	80.00	81.00
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	80.00	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	80.00	100	100
4	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	50.00	60.00	60.00	60.00
5	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	60.00	60.00	60.50	61.00



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
6	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	86.44	79.66	86.55	86.90
7	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100
8	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100
9	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	90.00	80.00	90.50	91.00
10	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100
11	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100	100	100	100
12	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	100
13	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	100	53.33	100	100
14	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	kali	2	12	12	12



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
G	Tenaga Kerja					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0.55	7.65	7.65	8.21
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.Juta	142.23	142.60	142.60	146.21
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	14.04	46.71	46.71	47.74
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	3.77	10.03	10.03	11.11
H	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Indeks Pembangunan Gender ²⁾³⁾⁴⁾	Nilai	96.59	96.65	96.65	96.68
2	Indeks Ketimpangan Gender ²⁾³⁾⁴⁾	Nilai	0.254	0.300	0.252	0.250
3	Persentase ARG pada belanja langsung APBD ³⁾⁴⁾	%	3.1	3.5	3.5	3.6
4	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif ³⁾⁴⁾	%	100	100	100	100
5	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif ⁴⁾	%	100	30.5	100	100
I	Pangan					
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota ⁴⁾	%	0.00	0.00	0.00	100



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
2	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota ⁴⁾	Nilai	88.9	78.00	89.00	89.15
3	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan ⁴⁾	%	33.82	20.58	20.58	17.64
4	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan ⁴⁾	%	80.00	86.00	86.00	90.00
J Pertanian						
1	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran ⁴⁾	%	N/A	0	0	0
2	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran ⁴⁾	%	N/A	0	0	0
3	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran ⁴⁾	%	N/A	0	0	0
4	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran ⁴⁾	%	N/A	0	0	0
5	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	Angka	20.19	21.20	21.20	22.26



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
6	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas ⁴⁾	%	N/A	0	0	0
7	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah ⁴⁾	%	18.99	20.94	20.94	21.99
8	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota ⁴⁾	%	N/A	0	0	0
9	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB ⁴⁾	%	N/A	0	0	0
K	Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Angka	71.54	73.35-73.85	73.35-73.85	75.10-75.65
2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) ⁴⁾	%	N/A	51.00	51.00	53.00
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	20	100	100	100
L	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100
2	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100
3	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
4	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	98.88	99.80	99.80	100
5	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	47.73	51.00	51.00	55.00
6	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	50	100	100	100
7	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan	%	11	20.00	20.00	25.00
M	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	16.00	13.33	13.33	9.09
2	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	8.82	14.71	14.71	22.06
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	14.71	17.65	17.65	22.06
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga masyarakatan Desa	%	73.53	76.47	76.47	78.92
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	%	100	100	100	100
N	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana					
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	2.28	2.27	2.27	2.27
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	48.70	57.10	57.10	57.20
3	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	16.10	8.41	8.41	8.30
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	9.64	7.0	7.0	6.4
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Nilai	72.5	68.00	73.00	73.50
O	Perhubungan					
1	konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0.52	0.50	0.55	0.60
2	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap	%	6.2.50	62.50	62.70	62.90



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
	kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota ³⁾⁴⁾					
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan ⁴⁾	%	0.00	14.29	14.29	14.29
P	Komunikasi dan Informatika					
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ⁴⁾	%	100	100	100	100
3	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) ⁴⁾	%	100	100	100	100
Q	Koperasi, usaha kecil dan menengah					
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	28.72	26.90	28.90	29.00
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	2.04	0.76	2.10	2.15
3	Pertumbuhan Wirausaha	%	7.07	10.53	10.53	11.43
R	Penanaman Modal					
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	148.23	2.00	2.00	2.94
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi ³⁾⁴⁾	%	261.22	98.08	98.08	99.06
S	Kepemudaan dan Olahraga					
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	Nilai	0.0814	0.33	0.33	0.35
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota	%	N/A	1.00	1.00	1.00



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
	yang masuk Pelatda Provinsi					
T	Statistik					
1	Indeks Pembangunan Statistik	%	1.69 Cukup	1.80 Cukup	1.80 Cukup	1.85 Cukup
U	Persandian					
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	1	0.31	1.10	1.20
V	Kebudayaan					
1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	N/A	14.81	14.81	37.04
2	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan	%	41.67	40.7	41.84	60.2
3	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	%	4.76	13.00	13.00	17.40
W	Perpustakaan					
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	62.90	70.11	64.00	65.00
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	16.77	67.42	17.10	17.77
X	Kearsipan					
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah ⁴⁾	%	5.03	21.40	21.40	21.90
Y	Kelautan dan Perikanan					
1	Produksi Perikanan Tangkap	%	70.92	92.00	92.00	92.70
2	Produksi Perikanan Budi Daya	%	88.16	99.50	99.50	99.50
Z	Pariwisata					
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	0.016	6.48	6.48	6.59
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	15.00	16.50	16.50	17.20
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	1.7	2.60	2.60	3.40



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
AA	Pertanian					
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	0.92	5.71	5.71	5.74
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	-14.26	4.50	4.50	4.52
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	1.24	1.58	1.58	2.14
4	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	22.48	1.94	22.50	22.70
5	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	20.00	25.00	25.00	30.00
6	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	100.00	100.00	100.00	100.00
BB	Perdagangan					
1	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota ⁴⁾	%	95.04	94.15	95.15	95.25
2	Persentase; alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	76.22	76.46	76.46	77.07
CC	Perindustrian					
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi :					
	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota ⁴⁾	%	1.71	1.80	1.80	2.10
	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota ⁴⁾	%	15.73	16.75	16.75	16.80
	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota ⁴⁾	%	4.96	7.00	7.00	9.00
	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota ⁴⁾	%	86.29	89.00	89.00	92.00



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota ⁴⁾	%	62.45	68.00	68.00	75.00
2	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor ⁴⁾	%	48.55	75.00	75.00	80.00
3	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan ⁴⁾	%	90.00	93.10	93.10	95.00
4	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	%	90.00	93.10	93.10	95.00
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Angka	90.00	91.00	91.00	92.00
DD	Perencanaan					
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100
EE	Keuangan					
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD ⁴⁾	%	42.26	41.51	41.51	41.49
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ⁴⁾	%	10.03	10.29	10.29	10.63
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar ⁴⁾	%	79.88	95.78	95.78	95.35



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap ⁴⁾	%	3.10	2.74	2.74	2.37
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik ⁴⁾	%	20.25	20.07	20.28	20.30
6	Persentase Penurunan SILPA ⁴⁾	%	274.16	-37.50	-37.50	-20.00
FF	Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan					
1	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Nilai	N/A	B 77.37	B 77.37	B 77.87
GG	Penelitian dan Pengembangan					
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah ⁴⁾	%	N/A	66.67	66.67	75.00
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah ⁴⁾	Rasio	75.00	76.00	76.00	78.57
HH	Fungsi Pengawasan					
1	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level/ Nilai	Level 3 3.037	Level 3 3.300	Level 3 3.300	Level 3 3.400
3	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level/ Nilai	Level 3	Level 3 3,2	Level 3 3,2	Level 3 3,2
4	Manajemen Risiko Indeks	Level/ Nilai	Level 3 3.059	Level 3 3.06	Level 3 3.06	Level 3 3.12
5	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	82.31	82.40	82.40	83.07
II	Fungsi Pengadaan					
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	poin	24.32	25.50	25.50	26.00
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	poin	3.33	3.65	3.65	3.80
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	poin	35.56	9.15	35.60	35.70



No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Capaian 2025	Target		
				RKPK 2026	P-RKPK 2026	RKPK 2027
JJ	Hubungan dengan Perwakilan Daerah					
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	75	100	100	100
KK	Pelayanan Publik					
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	N/A	94.00	94.00	95.00

Sumber : BPS 2025, OPD terkait 2026



BAB VII PENUTUP

RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2025, kebijakan pusat dan Aceh serta sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran Pembangunan serta permasalahan yang terjadi akibat Bencana Hidrometeorologi di akhir Tahun 2025 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan mengganggu aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 juga diselaraskan dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMK Lhokseumawe 2025-2029 dengan tema **“Peningkatan Infrastruktur Dasar, Fasilitas Publik, dan Ruang Publik Yang Berkualitas Guna Mendukung Produktivitas, Investasi, dan Pengembangan Industri Daerah”**.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2027 bertujuan untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan serta mewujudkan akuntabilitas alokasi sumber daya publik untuk pembangunan daerah. Pelaksanaan RKPK Lhokseumawe Tahun 2027 perlu pengendalian untuk mengetahui resiko sejak dini dan menentukan langkah-langkah yang tepat dalam merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan.

WALI KOTA LHOKSEUMAWE

Dr. SAYUTI ABUBAKAR, SH., MH



Pemerintah Kota Lhokseumawe
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

www.bappeda.lhokseumawekota.go.id

